



**PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023**



GERBANG EMAS





BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 123);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Temanggung untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2023 dan berakhir pada 31 Desember 2023.

Pasal 2

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023;
- b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023; dan
- c. pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.

Pasal 3

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
- f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
- g. BAB VII : PENUTUP.

Pasal 4

RKPD Tahun 2023 terdiri atas:

- a. Narasi RKPD Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I/Buku 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- b. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II/Buku 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 Juli 2022



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 1 Juli 2022



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,
HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR 52

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN I-1

1.1	LATAR BELAKANG	I-1
1.2	PROSES PENYUSUNAN.....	I-3
1.3	DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I-10
1.4	HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-13
1.5	MAKSUD DAN TUJUAN.....	I-14
1.6	SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD	I-16

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

2.1	KONDISI UMUM DAERAH.....	II-1
2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1	Karakteristik Wilayah.....	II-1
2.1.1.2	Luas dan Batas Wilayah Administrasi.....	II-3
2.1.1.3	Letak dan Kondisi Geografis.....	II-5
2.1.1.4	Kondisi Demografi.....	II-8
2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-17
2.1.2.1	Pertumbuhan Ekonomi	II-17
2.1.2.2	Struktur Ekonomi	II-22
2.1.2.3	PDRB Perkapita	II-25
2.1.2.4	Distribusi Pengeluaran berdasarkan Kriteria Bank Dunia	II-28
2.1.2.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	II-32
2.1.2.6	Indeks Pembangunan Manusia	II-37
2.1.2.7	Tingkat Kemiskinan	II-46
2.1.2.8	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).....	II-51
2.1.3	Aspek Pelayanan Umum	II-54
2.1.3.1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-54
2.1.3.2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-110
2.1.3.3	Urusan Pemerintahan Pilihan	II-212
2.1.3.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....	II-235
2.1.3.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-240
2.1.3.6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	II-251
2.1.3.7	Unsur Kewilayahan	II-253
2.1.3.8	Unsur Pemerintahan Umum	II-257



2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-260
2.1.4.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Rata-rata Per Kapita Tiap Bulan	II-260
2.1.4.2	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan..	II-262
2.1.4.3	Perkembangan Pelanggan Listrik	II-262
2.1.4.4	Perkembangan Hotel	II-263
2.1.4.5	Angka Kriminalitas	II-263
2.1.4.6	Jenis Pajak dan Retribusi Daerah	II-264
2.1.4.7	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha.	II-265
2.1.4.8	Kualitas Tenaga Kerja	II-266
2.1.4.9	Rasio Ketergantungan	II-267
2.2	EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKP SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD	II-268
2.2.1	Evaluasi Kinerja Utama.....	II-269
2.2.2	Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-275
2.2.3	Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	II-295
2.2.4	Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Pilihan.....	II-323
2.2.5	Evaluasi Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II-332
2.2.6	Evaluasi Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II-336
2.2.7	Evaluasi Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	II-345
2.2.8	Evaluasi Kinerja Unsur Kewilayahan	II-348
2.2.9	Evaluasi Kinerja Unsur Pemerintahan Umum.....	II-354
2.3	RINGKASAN HASIL EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	II-357
2.4	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	II-370
2.4.1	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-370
2.4.1.1	Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.	II-371
2.4.1.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	II-371
2.4.2	Isu Strategis	II-381
2.5	INOVASI DAERAH	II-389
2.6	PENGHARGAAN YANG DITERIMA KABUPATEN TEMANGGUNG	II-462



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	III-1
3.1.1 Kondisi Perekonomian Global dan Nasional	III-1
3.1.2 Kondisi Perekonomian Jawa Tengah	III-4
3.1.3 Kondisi Perekonomian Kabupaten Temanggung	III-4
3.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi	III-6
3.1.3.2 Struktur Ekonomi	III-8
3.1.3.3 PDRB Perkapita	III-11
3.1.3.4 Inflasi	III-12
3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-13
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-17
3.2.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah	III-26
3.2.2.1 Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah	III-33
3.2.2.2 Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah	III-34
3.2.2.3 Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah	III-34
3.2.2.4 Persentase Belanja Tidak Terduga	III-35
3.2.3 Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah	III-36
3.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	III-36
3.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	III-37
3.3 OPINI BPK-RI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	III-39

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN	IV-2
4.1.1 Visi Pembangunan Daerah	IV-2
4.1.2 Misi Pembangunan Daerah	IV-3
4.1.3 Tujuan dan Sasaran	IV-5
4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023.	IV-16
4.2.1 Tema Pembangunan Tahun 2023	IV-16
4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	IV-16
4.3 KONTRIBUSI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2019 PADA TAHUN 2023	IV-60
4.4 PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA TAHUN 2022	IV-62



4.5 SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH DALAM Mendukung Pencapaian Target SDGs Kabupaten Temanggung	IV-63
4.6 SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH DALAM Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG)	IV-73
4.7 SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH DALAM Mendukung Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim	IV-75
4.8 FASILITASI PERUBAHAN IKLIM	IV-77
4.9 SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH DALAM Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-79

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH..... V-1

5.1 RENCANA KERJA DAERAH	V-1
5.1.1 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Terhadap Arah Kebijakan RKP 2023	V-1
5.1.2 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Terhadap Prioritas Nasional RKP 2023	V-15
5.1.3 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2023	V-99
5.1.4 Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)	V-127
5.1.5 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Terhadap Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur	V-146
5.1.6 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Terhadap Pembangunan Pintu Tol Bawen-Yogyakarta	V-149
5.1.7 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Terhadap Aksi Konvergensi Stunting	V-149
5.1.8 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Terhadap SDG's	V-150
5.1.9 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Terhadap Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	V-157
5.2 PENDANAAN DAERAH	V-158
5.2.1 Kegiatan Prioritas Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang	V-158
5.2.2 Pagu Indikatif Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang	V-185



5.3 ANALISIS PEMETAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKPD 2023	V-214
5.3.1 Persebaran Tema Pembangunan RPJMD 2018-2023 dalam RKPD 2023.....	V-215
5.4 DUKUNGAN PROGRAM RKPd KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 TERHADAP PENANGANAN UPAYA KERAS....	V-223
5.5 DUKUNGAN PROGRAM RKPd KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 TERHADAP PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	V-227
5.6 RENCANA TINDAK LANJUT.....	V-228

BAB VI	
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1

BAB VII	
PENUTUP	VII-1



DAFTAR TABEL

BAB I

PENDAHULUAN	I-1
--------------------------	------------

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
---	-------------

Tabel 2.1	Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung	II-3
Tabel 2.2	Sebaran Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Per kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2021	II-4
Tabel 2.3	Pembagian Wilayah Kab. Temanggung Berdasarkan Ketinggian	II-7
Tabel 2.4	Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin di Tiap Kecamatan Tahun 2021	II-8
Tabel 2.5	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2021	II-9
Tabel 2.6	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan PURWOMANGGUNG Tahun 2021	II-11
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2017-2021	II-11
Tabel 2.8	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan PURWOMANGGUNG Tahun 2017-2021	II-13
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Tahun 2017 – 2021 dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan Tahun 2017 – 2021	II-14
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan Tahun 2021	II-15
Tabel 2.11	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2021	II-16
Tabel 2.12	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (tahun dasar 2010) Tahun 2017-2021 dan pertumbuhan lapangan usaha tahun 2020-2021	II-17
Tabel 2.13	Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017-2022 dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-19
Tabel 2.14	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Wilayah Pengembangan PURWOMANGGUNG.....	II-21



Tabel 2.15	Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021	II-23
Tabel 2.16	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kab. Temanggung Tahun 2017-2021	II-24
Tabel 2.17	Target dan Realisasi PDRB Kab. Temanggung Tahun 2017-2021 (Ribu Rupiah).....	II-25
Tabel 2.18	PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2020 dan Target Tahun 2020-2021.....	II-25
Tabel 2.19	Perbandingan Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021 dengan Rata-rata Capaian Wilayah yang Setara (Purwomanggung)	II-26
Tabel 2.20	Distribusi Pendapatan berdasar Kriteria Bank Dunia Kawasan PURWOMANGGUNG Tahun 2017-2021	II-30
Tabel 2.21	Distribusi Pendapatan berdasar Kriteria Bank Dunia Kawasan PURWOMANGGUNG Tahun 2017-2021	II-30
Tabel 2.22	Perubahan Capaian Distribusi Pendapatan Kab. Temanggung dan Rata-rata PURWOMANGGUNG dan Nasional Tahun 2017-2021	II-31
Tabel 2.23	TPT Kabupaten Temanggung dan Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021	II-33
Tabel 2.24	Realisasi dan Pertumbuhan TPT Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021	II-34
Tabel 2.25	Perubahan Capaian TPT Kabupaten Temanggung, Rata-rata PURWOMANGGUNG dan Nasional Tahun 2017-2021	II-35
Tabel 2.26	Tingkat Pertumbuhan Jumlah Penganggur Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-35
Tabel 2.27	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021	II-36
Tabel 2.28	Pertumbuhan Jumlah Penganggur Terbuka Kabupaten/Kota di Kawasan Purwomanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021.....	II-37
Tabel 2.29	Perubahan Capaian Jumlah Penganggur Kabupaten Temanggung, Rata-rata PURWOMANGGUNG dan Nasional Tahun 2017-2021.....	II-37
Tabel 2.30	Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-38
Tabel 2.31	Perbandingan Target dan Realisasi IPM Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021	II-39



Tabel 2.32	Pertumbuhan IPM Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Se-Wilayah PURWOMANGGUNG, Tahun 2017-2021	II-40
Tabel 2.33	Perbandingan Perubahan IPM Kabupaten Temanggung, Rata-rata PURWOMANGGUNG dan Nasional Sebelum dan Sesudah Covid-19.....	II-41
Tabel 2.34	Pertumbuhan AHH Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Sewilayah Purwomanggung Tahun 2017-2021	II-42
Tabel 2.35	Pertumbuhan HLS Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Sewilayah Purwomanggung Tahun 2017-2021	II-42
Tabel 2.36	Pertumbuhan RLS Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Sewilayah Purwomanggung Tahun 2017-2021	II-43
Tabel 2.37	Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Sewilayah Purwomanggung Tahun 2017-2021	II-44
Tabel 2.38	Perbandingan Perubahan Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rp) Kabupaten Temanggung, Rata-rata PURWOMANGGUNG dan Nasional Sebelum dan Sesudah Covid-19.....	II-45
Tabel 2.39	Realisasi dan Perubahan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021	II-47
Tabel 2.40	Target dan Realisasi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-47
Tabel 2.41	Rasio Perubahan Presentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Rata-Rata Capaian Nasional Tahun 2017-2021	II-48
Tabel 2.42	Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se Kawasan Purwomanggung, Tahun 2017-2021	II-49
Tabel 2.43	Perubahan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung, Rata-rata PURWOMANGGUNG dan Nasional Sebelum dan Sesudah Covid-19	II-49
Tabel 2.44	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten /Kota Se-Kawasan Purwomanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021	II-50
Tabel 2.45	Perubahan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung, Rata-rata PURWOMANGGUNG dan Nasional Sebelum dan Sesudah Covid-19	II-51



Tabel 2.46	Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota di Kawasan Purwomanggung Dibandingkan Jateng dan Nasional Tahun 2021.....	II-52
Tabel 2.47	Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota di Kawasan Purwomanggung Dibandingkan Jateng dan Nasional Tahun 2017-2021	II-52
Tabel 2.48	Perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota di Kawasan Purwomanggung Dibandingkan Jateng dan Nasional Tahun 2017-2021	II-53
Tabel 2.49	Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021	II-54
Tabel 2.50	Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021.....	II-56
Tabel 2.51	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021.....	II-57
Tabel 2.52	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-57
Tabel 2.53	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-58
Tabel 2.54	Angka Putus Sekolah (APtS) Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-58
Tabel 2.55	Angka Lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-59
Tabel 2.56	Persentase Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021....	II-59
Tabel 2.57	Rasio Ketersediaan Sekolah Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021.....	II-60
Tabel 2.58	Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-60
Tabel 2.59	Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-2021	II-61
Tabel 2.60	Rasio Siswa per Guru Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021.....	II-61
Tabel 2.61	Persentase Pendidik yang Memiliki Sertifikat Pendidik Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-62
Tabel 2.62	Persentase Pendidik yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4 Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-62
Tabel 2.63	Angka Melek Huruf Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-63



Tabel 2.64	Angka Harapan Hidup Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021	II-64
Tabel 2.65	Angka Kematian Ibu di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-64
Tabel 2.66	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Temanggung dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021	II-65
Tabel 2.67	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Temanggung Tahun 2017 – 2021	II-66
Tabel 2.68	Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-66
Tabel 2.69	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses terhadap Jamban Sehat di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-67
Tabel 2.70	Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi Standar Kompetensi di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-67
Tabel 2.71	Persentase Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-68
Tabel 2.72	Persentase Gedung Puskesmas sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-69
Tabel 2.73	Persentase PHBS Rumah Tangga Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-69
Tabel 2.74	Desa Bebas Rawan Gizi di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-70
Tabel 2.75	Persentase Rumah Sehat di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-70
Tabel 2.76	Persentase orang Terduga TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-71
Tabel 2.77	Penemuan Kasus HIV Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021.....	II-72
Tabel 2.78	Incident Rate (IR) DBD per 100.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-72
Tabel 2.79	Angka Kesakitan Malaria (Annual Paracite Incidence/ API) per 100.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-73
Tabel 2.80	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-73
Tabel 2.81	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-74



Tabel 2.82	Cakupan Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization) Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-74
Tabel 2.83	Frekuensi KLB dan Penanggulangannya di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-75
Tabel 2.84	Persentase Kunjungan Baru di Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-76
Tabel 2.85	Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021.....	II-76
Tabel 2.86	Persentase Neonatal dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021.....	II-77
Tabel 2.87	Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Temanggung Tahun 2017 – 2021	II-77
Tabel 2.88	Persentase Balita Mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021.....	II-78
Tabel 2.89	Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Temanggung Tahun 2017 – 2021	II-78
Tabel 2.90	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-79
Tabel 2.91	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-79
Tabel 2.92	Persentase Warga Negara Usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2017 - 2021.....	II-80
Tabel 2.93	Persentase Kunjungan Baru di Pelayanan Kesehatan Dasardi Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021 .	II-81
Tabel 2.94	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Terakreditasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021.....	II-81
Tabel 2.95	Persentase Infrastruktur Wilayah Kondisi Baik Tahun 2017-2021.....	II-82
Tabel 2.96	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang Tahun 2017-2021.....	II-82
Tabel 2.97	Total Rekapitulasi Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian Tahun 2021	II-83
Tabel 2.98	Jalan Kabupaten Kondisi Mantap Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-83



Tabel 2.99	Jembatan Kabupaten Kondisi Baik Tahun 2017-2021	II-83
Tabel 2.100	Daerah Irigasi Kabupaten Kondisi Baik Tahun 2017-2021	II-84
Tabel 2.101	Luasan Daerah Irigasi Kabupaten Kondisi Baik Tahun 2019-2021	II-84
Tabel 2.102	Persentase Pelayanan Drainase Skala Kawasan/Kota Tahun 2017-2021	II-85
Tabel 2.103	Persentase Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang terupdate di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-85
Tabel 2.104	Capaian Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan	II-86
Tabel 2.105	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	II-87
Tabel 2.106	Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-88
Tabel 2.107	Cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2017- 2021	II-88
Tabel 2.108	Persentase Penerangan Jalan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-89
Tabel 2.109	Rumah Berakses Sanitasi Layak Tahun 2017-2021 ..	II-90
Tabel 2.110	Indeks Rasa Aman Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-90
Tabel 2.111	Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Bupati Temanggung Tahun 2017-2021	II-91
Tabel 2.112	Rasio Linmas Per RT Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-91
Tabel 2.113	Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-2021	II-92
Tabel 2.114	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-92
Tabel 2.115	Cakupan Penanganan Bencana Non Kebakaran Tahun 2017-2021	II-93
Tabel 2.116	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-94
Tabel 2.117	Indeks Resiko Bencana Tahun 2017-2021	II-94
Tabel 2.118	Cakupan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Temanggung	II-94
Tabel 2.119	Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan Fisik Akibat Bencana pada masa Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Temanggung Tahun 2017 – 2021	II-95



Tabel 2.120	Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada Masa Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Temanggung..	II-96
Tabel 2.121	Persentase Desa Mitigasi terhadap Desa Rawan Bencana Kabupaten Temanggung	II-96
Tabel 2.122	Persentase Tertanganinya Pemulihan Kerusakan Fisik Akibat Bencana Pada Pasca Bencana Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-97
Tabel 2.123	Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada Pasca Bencana Kabupaten Temanggung Tahun 2017 – 2021	II-97
Tabel 2.124	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani Tahun 2017-2021	II-98
Tabel 2.125	Cakupan Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga dalam Usaha Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-99
Tabel 2.126	Persentase Eks Migran Bermasalah Sosial yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Individu, Keluarga, Masyarakat Tahun 2017-2021 ...	II-100
Tabel 2.127	Persentase Anak Telantar yang Memperoleh Rehabilitasi Diluar Panti di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-100
Tabel 2.128	Persentase Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti Tahun 2017-2021	II-101
Tabel 2.129	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial Tahun 2017-2021	II-102
Tabel 2.130	Persentase Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti Tahun 2017-2021	II-103
Tabel 2.131	Jumlah Warga Negara Gelandangan Dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti Tahun 2017-2021	II-103
Tabel 2.132	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi PPKS Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial Tahun 2017-2021	II-104
Tabel 2.133	Persentase Anak Yatim Piatu Terlantar Dalam Panti Sosial yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Tahun 2017-2021	II-105
Tabel 2.134	Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota Tahun 2017-2021.....	II-106
Tabel 2.135	Cakupan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021	II-106



Tabel 2.136	Data Anggota Rumah Tangga Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2021	II-107
Tabel 2.137	Persentase Penerima UEP Dan KUBE yang Berkelanjutan Produktif di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-108
Tabel 2.138	Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-108
Tabel 2.139	Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Sosial Di Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-2021	II-109
Tabel 2.140	Kejadian Bencana di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-110
Tabel 2.141	Perbandingan Komponen Pembentuk IPG Antara Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Temanggung, Tahun 2021	II-116
Tabel 2.142	Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-118
Tabel 2.143	Rasio PD yang Menerapkan Kebijakan Responsif Gender dalam Penyusunan Renja SKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-119
Tabel 2.144	Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak Perempuan Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-129
Tabel 2.145	Persentase Desa Sayang Ibu dan Bayi Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-120
Tabel 2.146	Kecamatan Layak Anak Tahun 2017-2021.....	II-120
Tabel 2.147	Rekapitulasi Hasil Teskit Residu Pestisida Komoditas Sayuran DKPPP Kabupaten Temanggung.....	II-124
Tabel 2.148	Capaian Persentase Penyelesaian Fasilitas Pertanian	II-124
Tabel 2.149	Klasifikasi Dan Rentang Nilai IKLH	II-125
Tabel 2.150	Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2017-2021	II-126
Tabel 2.151	Capaian Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2021	II-127
Tabel 2.152	Capaian Persentase Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Tahun 2017-2021.....	II-127
Tabel 2.153	Nilai IKA Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021.....	II-128



Tabel 2.154	Nilai IKU Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-129
Tabel 2.155	Capaian IKTL Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-129
Tabel 2.156	Luas Kekritisian Lahan di Kabupaten Temanggung ...	II-129
Tabel 2.157	Capaian Proporsi Luas Lahan Kritis Terhadap Total Luas Lahan Temanggung Tahun 2017-2021	II-130
Tabel 2.158	Cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2017-2021	II-131
Tabel 2.159	Persentase Rekomendasi Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) Tahun 2017-2020	II-132
Tabel 2.160	Persentase Kajian Teknis Penyimpanan Limbah B3 ..	II-133
Tabel 2.161	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang Memiliki Izin	II-133
Tabel 2.162	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang Memiliki Dokumen Lingkungan di Terbitkan oleh Pemkab	II-133
Tabel 2.163	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup yang Diusulkan Tahun 2017-2021	II-135
Tabel 2.164	Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti Tahun 2017- 2021	II-135
Tabel 2.165	Persentase Sampah yang Tertangani Tahun 2017-2021	II-136
Tabel 2.166	Cakupan Area Layanan Sampah Tahun 2017-2021 ..	II-138
Tabel 2.167	Emisi dan Serapan GRK Kabupaten Temanggung Berdasarkan Kategori	II-138
Tabel 2.168	Kategorisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-140
Tabel 2.169	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021	II-140
Tabel 2.170	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-142
Tabel 2.171	Persentase Pelayanan Surat Pindah dan Datang Tepat Waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-143
Tabel 2.172	Persentase Penerbitan Akta Kematian Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-144
Tabel 2.173	Persentase Pelayanan Akta Perkawinan Non Muslim Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-145
Tabel 2.174	Persentase Pelayanan Akta Perceraian Non Muslim Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-145



Tabel 2.175	Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-146
Tabel 2.176	Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-146
Tabel 2.177	Klasifikasi Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)	II-147
Tabel 2.178	Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-147
Tabel 2.179	Persentase Desa yang berpredikat Mandiri di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-147
Tabel 2.180	Jumlah desa berdasarkan klasifikasi IDM Tahun 2017-2021	II-148
Tabel 2.181	Persentase Desa Cepat Berkembang Berdasarkan Indeks Pembangunan Desa dan Kelurahan Tahun 2019-2021	II-149
Tabel 2.182	Persentase Desa yang Menetapkan Penyusunan RPKDesa Tepat Waktu dan Sesuai Aturan Tahun 2017-2021	II-149
Tabel 2.183	Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tepat Waktu dan Sesuai Aturan Tahun 2017-2021	II-150
Tabel 2.184	Persentase Desa yang Menerapkan Siskeudes Tahun 2017-2021	II-151
Tabel 2.185	Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan Semua Kegiatan di APBDes Tepat Waktu Tahun 2017-2021 ..	II-151
Tabel 2.186	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel yang Aktif Tahun 2017-2021	II-152
Tabel 2.187	Persentase BUMDesa yang Aktif Tahun 2017-2021 ..	II-152
Tabel 2.188	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif Tahun 2017-2021	II-153
Tabel 2.189	Persentase Pemberdayaan di Kawasan yang Telah Ditetapkan Tahun 2017-2021	II-153
Tabel 2.190	Persentase Laporan Administrasi Desa yang Tepat Waktu Tahun 2017-2021	II-154
Tabel 2.191	Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa Tahun 2017-2021	II-154
Tabel 2.192	Persentase Desa yang Tertib Mengelola Aset Desa Tahun 2017-2021	II-155
Tabel 2.193	Pertambahan Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-155



Tabel 2.194	Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/Kelurahan Kabupaten Temanggung tahun 2017 - 2021	II-156
Tabel 2.195	PUS dengan Istri dibawah 20 Tahun Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-157
Tabel 2.196	Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun.....	II-157
Tabel 2.197	PUS yang Mengetahui dan Memahami Tentang Alat Kontrasepsi Modern Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-160
Tabel 2.198	Indek Pembangunan Keluarga/i Bangga Tahun 2021	II-160
Tabel 2.199	Presentase Kampung KB yang Memenuhi IDM Tahun 2017-2021	II-161
Tabel 2.200	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-162
Tabel 2.201	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-165
Tabel 2.202	Persentase bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar di Kabupaten Temanggung 2017-2021.....	II-166
Tabel 2.203	Persentase bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-166
Tabel 2.204	Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-167
Tabel 2.205	Persentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah Tersedia Jaringan Trayek di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-167
Tabel 2.206	Persentase Terminal Tipe C yang Aktif di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-168
Tabel 2.207	Persentase Terminal Tipe C dalam Kondisi Baik di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-168
Tabel 2.208	Persentase Penerangan Jalan di Jalan Kabupaten Tahun 2017-2021	II-169
Tabel 2.209	Nilai Indek Tingkat Kematangan SPBE.....	II-170
Tabel 2.210	Indeks SPBE Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-170
Tabel 2.211	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-172
Tabel 2.212	Persentase PPID Badan Publik Aktif Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-172
Tabel 2.213	PPID Badan Publik Aktif Kabupaten Temanggung Tahun 2021	II-173



Tabel 2.214	Persentase KIM Aktif Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-175
Tabel 2.215	Persentase Kepatuhan LPP Terhadap norma Siaran Tahun 2017-2021	II-176
Tabel 2.216	Lembaga Penyiaran Publik di Kabupaten Temanggung	II-177
Tabel 2.217	Persentase Ketersediaan Jaringan Internet Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-178
Tabel 2.218	Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-178
Tabel 2.219	Sistem Informasi yang Terintegrasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2021	II-179
Tabel 2.220	Persentase Sistem Informasi yang Berfungsi Optimal Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-2021	II-182
Tabel 2.221	Persentase Koperasi Sehat Tahun 2017-2021	II-182
Tabel 2.222	Persentase Usaha Mikro Aktif Tahun 2017-2021	II-183
Tabel 2.223	Penambahan Nilai Aset Koperasi Tahun 2017-2021..	II-184
Tabel 2.224	Penambahan Nilai Omset Tahun 2017-2021	II-184
Tabel 2.225	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas Tahun 2017-2021	II-185
Tabel 2.226	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2017-2021	II-185
Tabel 2.227	Persentase Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan dalam Pengembangan dan Pemasaran Usaha Koperasi Aktif Tahun 2021	II-186
Tabel 2.228	Persentase Usaha Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pengembangan Usaha Tahun 2021	II-187
Tabel 2.229	Indeks Kemudahan Berusaha	II-188
Tabel 2.230	Realisasi Investasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-188
Tabel 2.231	Kajian Teknis Investasi Tahun 2017-2021	II-189
Tabel 2.232	Persentase Ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih Tahun 2017-2021	II-190
Tabel 2.233	Persentase Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor/Bidang Unggulan Tahun 2017-2021	II-190
Tabel 2.234	Persentase Pelayanan Perizinan Online Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-191
Tabel 2.235	Persentase Permohonan Izin Bebas Calo Tahun 2017-2021	II-192
Tabel 2.236	Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu Tahun 2017-2021	II-192
Tabel 2.237	Persentase Kesesuaian Perizinan Tahun 2017-2021 .	II-193
Tabel 2.238	Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan Tahun 2017-2021	II-194



Tabel 2.239	Persentase Tertanganinya Gugatan Hukum di Dalam Pengadilan Tahun 2017-2021	II-194
Tabel 2.240	Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-195
Tabel 2.241	Indeks Pembangunan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2021	II-195
Tabel 2.242	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-197
Tabel 2.243	Persentase Pelatih Olahraga Bersertifikat Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-197
Tabel 2.244	Persentase Prestasi Olahraga, Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-197
Tabel 2.245	Persentase Atlet Berprestasi Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-198
Tabel 2.246	Persentase Gugus Depan yang Aktif Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-198
Tabel 2.247	Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-199
Tabel 2.248	Detail Ketersediaan Data Makro Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-199
Tabel 2.249	Tingkat Penilaian Persiapan/Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-200
Tabel 2.250	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Temanggung	II-201
Tabel 2.251	Persentase Kelompok Budaya Produktif Tahun 2017-2021	II-202
Tabel 2.252	Persentase Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-2021	II-202
Tabel 2.253	Persentase Pelestarian Sejarah Kabupaten Temanggung	II-202
Tabel 2.254	Persentase Kelompok Seni Budaya yang Produktif Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-203
Tabel 2.255	Data Kelompok Kesenian Beregister Tahun 2017-2021	II-203
Tabel 2.256	Persentase Kelompok Pelestari dan Pecinta Bahasa/ Sastra yang Aktif Tahun 2017-2021.....	II-204
Tabel 2.257	Persentase Peminjam Perpustakaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-205
Tabel 2.258	Persentase Perpustakaan Aktif Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-207
Tabel 2.259	Cakupan Naskah Kuno Kabupaten Temanggung dan Koleksi Nasional Tahun 2017 - 2021.....	II-208



Tabel 2.260	Indeks Manajemen Kearsipan Tahun 2017 – 2021	II-209
Tabel 2.261	Persentase Cakupan Penerapan Arsip Secara Baku Tahun 2017-2021	II-210
Tabel 2.262	Arsip Vital Konvensional yang Dialih mediakan Tahun 2017-2021	II-210
Tabel 2.263	Tingkat Konsumsi Ikan di Kabupaten Temanggung Tahun 2017 – 2021	II-211
Tabel 2.264	Tingkat Produktivitas Ikan Kabupaten Temanggung Tahun 2017 – 2021	II-212
Tabel 2.265	Tabel Data Lokasi Penebaran Benih Ikan Tahun 2020-2021	II-213
Tabel 2.266	Tabel Data Jumlah Benih (Ekor) Yang Ditebar Di Perairan Umum Tahun 2020 – 2021	II-213
Tabel 2.267	Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-213
Tabel 2.268	Length of Stay (Lama Tinggal Wisatawan) di Kabupaten Temanggung Tahun 2017 - 2021	II-215
Tabel 2.269	Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Temanggung Tahun 2017 - 2021	II-215
Tabel 2.270	Persentase Obyek Wisata yang Berkembang Kabupaten Temanggung Tahun 2017 -2021	II-216
Tabel 2.271	Persentase Desa Wisata Kabupaten Temanggung Tahun 2017 – 2021	II-217
Tabel 2.272	Persentase Desa Wisata Naik klasifikasi Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-217
Tabel 2.273	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Tahun 2017-2021	II-218
Tabel 2.274	Tabel Ketersediaan Energi per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2017 – 2021	II-218
Tabel 2.275	Tabel Ketersediaan Protein per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2017 – 2021	II-219
Tabel 2.276	Perkembangan Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2017 – 2021	II-221
Tabel 2.277	Perkembangan Komoditas Tanaman Hortikultura Kabupaten Temanggung Tahun 2017 – 2021	II-222
Tabel 2.278	Perkembangan Komoditas Tanaman Perkebunan Kabupaten Temanggung Tahun 2017 – 2021	II-223
Tabel 2.279	Daftar Kelompok Tani yang Tergabung dalam Kelompok Ekonomi Petani	II-225
Tabel 2.280	Produktivitas Ternak Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-225
Tabel 2.281	Produktivitas Ternak Unggas di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-227



Tabel 2.282	Persentase penanganan penyakit hewan di Kabupaten Temanggung Tahun 2017 - 2021	II-228
Tabel 2.283	Persentase pengendalian bencana pertanian di Kabupaten Temanggung Tahun 2017 - 2021	II-229
Tabel 2.284	Persentase Kelompok tani yang Naik Kelas di Kabupaten Temanggung tahun 2017-2021	II-229
Tabel 2.285	Persentase Ketersediaan Informasi Harga Bahan Pokok dan Bahan Lainnya Penyebab Inflasi Tahun 2017-2021	II-230
Tabel 2.286	Persentase Kontribusi nilai ekspor terhadap PRDB Sektor Perdagangan Tahun 2017 – 2021	II-230
Tabel 2.287	Persentase Pedagang Kaki Lima yang Menempati Ruang Sesuai Peruntukan di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-231
Tabel 2.288	Cakupan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan yang Ditera Ulang	II-231
Tabel 2.289	Persentase Pasar Daerah dalam Kondisi Baik di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-232
Tabel 2.290	Persentase Kepatuhan Pedagang Pasar Sesuai Zonasi Peruntukan Pedagang di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-232
Tabel 2.291	Persentase Realisasi Pendapatan Pasar Daerah Tahun 2017-2021	II-233
Tabel 2.292	Persentase IKM Industri yang Berbasis Komoditas Unggulan Daerah Tahun 2017-2021	II-233
Tabel 2.293	Persentase Pembinaan Industri Penghasil Cukai Tahun 2017-2021	II-234
Tabel 2.294	Persentase Calon Transmigran yang Mendapatkan Pembekalan Tahun 2017-2021	II-235
Tabel 2.295	Nilai EKPPD Tahun 2017-2021	II-235
Tabel 2.296	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2017-2021	II-236
Tabel 2.297	Penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-237
Tabel 2.298	Penilaian Reformasi Birokrasi Kab. Temanggung Tahun 2020-2021 dari Kementrian PAN dan RB	II-237
Tabel 2.299	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017-2021	II-238
Tabel 2.300	Nilai IKM Unit Pelayanan di Kabupaten Temanggung Tahun 2021	II-239
Tabel 2.301	Persentase RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu Tahun 2017-2021	II-240
Tabel 2.302	Tingkat Konsistensi Program Pembangunan di Kabupaten Temanggung Tahun 2017- 2021	II-241



Tabel 2.303	Program Pada RPJMD yang Tidak Dilaksanakan di RKPD	II-241
Tabel 2.304	Program Pada RKPD Diluar RPJMD	II-242
Tabel 2.305	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017-2021	II-242
Tabel 2.306	Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah	II-243
Tabel 2.307	Tanggal dan Nomor Peraturan Daerah tentang Penetapan APBD Kabupaten Temanggung	II-244
Tabel 2.308	Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-244
Tabel 2.309	Pencapaian skor dimensi IP ASN Tahun 2020 dibandingkan dengan prosentase pengukuran.....	II-245
Tabel 2.310	Indeks Sistem Merit Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-246
Tabel 2.311	Persentase Pejabat yang Telah Lulus Diklat Kepemimpinan sesuai Jenjang Jabatan	II-247
Tabel 2.312	Persentase Pejabat yang Telah Lulus Diklat Kepemimpinan sesuai Jenjang Jabatan	II-248
Tabel 2.313	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-249
Tabel 2.314	Persentase Hasil Krenova Yang Dikembangkan di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-250
Tabel 2.315	Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-251
Tabel 2.316	Level Penilaian SPIP Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2020	II-252
Tabel 2.317	Table Hasil Penilaian Maturitas SPIP Kabupaten Temanggung	II-252
Tabel 2.318	Capaian Rata-Rata IKM di Kecamatan Tahun 2017-2021	II-253
Tabel 2.319	Capaian Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan Tahun 2017-2021	II-253
Tabel 2.320	Capaian Persentase Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2017-2021	II-254
Tabel 2.321	Capaian Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu Tahun 2017-2021	II-254
Tabel 2.322	Capaian Sarpras Lokal Kelurahan Kondisi Layak Tahun 2017-2021	II-255
Tabel 2.323	Capaian Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Aktif Tahun 2017-2021	II-255



Tabel 2.324	Capaian Penanganan Laporan Kejadian Tahun 2017-2021	II-255
Tabel 2.325	Capaian Penanganan Laporan Kejadian Tahun 2017-2021	II-256
Tabel 2.326	Capaian Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa/Kelurahan Tahun 2017-2021 ...	II-256
Tabel 2.327	Capaian Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APBDesa Tepat waktu Tahun 2017-2021	II-257
Tabel 2.328	Capaian Persentase Sekolah yang Mendapatkan Pemahaman Kebangsaan Tahun 2017-2021	II-257
Tabel 2.329	Persentase desa/kelurahan yang Mendapatkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Tahun 2017-2021	II-258
Tabel 2.330	Persentase Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan Tahun 2017-2021	II-258
Tabel 2.331	ProsentaseDesa/Kelurahan yang Telah Mendapatkan Pembinaan Pencegahan, Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2017-2021	II-259
Tabel 2.332	Prosentase jumlah sekolah yang Telah Mendapatkan Pembinaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2017-2021	II-260
Tabel 2.333	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-262
Tabel 2.334	Perkembangan Angka Kriminalitas di Kabupaten Temanggung Tahun 2017- 2021	II-263
Tabel 2.335	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-266
Tabel 2.336	Kualitas Tenaga Kerja di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-266
Tabel 2.337	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Temanggung Tahun 2017- 2021	II-267
Tabel 2.338	Simbol dan Status Capaian Kinerja RPJMD	II-269
Tabel 2.339	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama.....	II-269
Tabel 2.340	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2021	II-275
Tabel 2.341	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2021	II-279
Tabel 2.342	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 .	II-285
Tabel 2.343	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021.	II-287
Tabel 2.344	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021	II-288



Tabel 2.345	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi Lainnya Penanggulangan Bencana Tahun 2021	II-290
Tabel 2.346	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2021	II-292
Tabel 2.347	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2021	II-295
Tabel 2.348	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021	II-297
Tabel 2.349	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2021.....	II-299
Tabel 2.350	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2021	II-300
Tabel 2.351	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2021	II-301
Tabel 2.352	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2021	II-304
Tabel 2.353	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021	II-305
Tabel 2.354	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021	II-308
Tabel 2.355	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2021	II-310
Tabel 2.356	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Tahun 2021	II-312
Tabel 2.357	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021....	II-314
Tabel 2.358	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2021	II-315
Tabel 2.359	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2021	II-317
Tabel 2.360	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2021	II-318
Tabel 2.361	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2021	II-319
Tabel 2.362	Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2021	II-320
Tabel 2.363	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2021	II-321
Tabel 2.364	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2021	II-322



Tabel 2.365	Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2021	II-323
Tabel 2.366	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2021	II-324
Tabel 2.367	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2021	II-326
Tabel 2.368	Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2021	II-328
Tabel 2.369	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2021	II-330
Tabel 2.370	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Tahun 2021	II-331
Tabel 2.371	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2021	II-332
Tabel 2.372	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Tahun 2021	II-335
Tabel 2.373	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Tahun 2021	II-336
Tabel 2.374	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Keuangan Tahun 2021	II-339
Tabel 2.375	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Kepegawaian Tahun 2021	II-341
Tabel 2.376	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021	II-344
Tabel 2.377	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021	II-345
Tabel 2.378	Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2021	II-346
Tabel 2.379	Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Fungsi Kecamatan Tahun 2021	II-348
Tabel 2.380	Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2021	II-354
Tabel 2.381	Capaian Sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2021	II-358
Tabel 2.382	Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2021	II-359



Tabel 2.383	Capaian Sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2021	II-360
Tabel 2.384	Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2021	II-361
Tabel 2.385	Capaian Sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun 2021	II-362
Tabel 2.386	Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah urusan pemerintahan pilihan Tahun 2021	II-363
Tabel 2.387	Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2021	II-364
Tabel 2.388	Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Unsur pendukung urusan pemerintahan Tahun 2021	II-364
Tabel 2.389	Capaian sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2021	II-365
Tabel 2.390	Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah unsur penunjang urusan pemerintahan Tahun 2021	II-366
Tabel 2.391	Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2021	II-367
Tabel 2.392	Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2021	II-367
Tabel 2.393	Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Unsur Kewilayahan Tahun 2021	II-368
Tabel 2.394	Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Unsur kewilayahan Tahun 2021	II-368
Tabel 2.395	Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2021	II-369
Tabel 2.396	Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2021	II-370
Tabel 2.397	Rangkuman Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Temanggung Tahun 2021	II-370
Tabel 2.398	Data Krenova Kabupaten Temanggung.....	II-391
Tabel 2.399	Kerangka Kerja Logis (KKL) GERBANG EMAS	II-428
Tabel 2.400	Kesesuaian Outcome Inovasi dan Dampak Inovasi dengan Permasalahan Daerah dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023	II-421
Tabel 2.401	Hasil Kajian Analisis IKUPD	II-423



Tabel 2.402	Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2022	II-426
Tabel 2.403	Krenova Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung .	II-427
Tabel 2.404	Krenova Masyarakat Tahun 2022.....	II-444
Tabel 2.405	Jumlah Penghargaan yang diterima Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2021	II-462
Tabel 2.406	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2018	II-462
Tabel 2.407	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019	II-465
Tabel 2.408	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020	II-469
Tabel 2.409	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021	II-471

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1

Tabel 3.1	Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Nasional 2017-2023	III-3
Tabel 3.2	Realisasi dan Target Indikator Makro Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2023.....	III-4
Tabel 3.3	Realisasi dan Target Indikator Makro Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2023	III-6
Tabel 3.4	Pertumbuhan Ekonomi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 – 2023	III-7
Tabel 3.5	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung ADHK tahun 2017-2023	III-8
Tabel 3.6	Nilai dan Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2017 – 2021	III-11
Tabel 3.7	Inflasi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional.....	III-12
Tabel 3.8	Realisasi Pendapatan Kabupaten Temanggung	III-23
Tabel 3.9	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung 2019-2020	III-30
Tabel 3.10	Target dan Realisasi Tahun 2021, Target 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 Belanja Daerah Kabupaten Temanggung	III-31
Tabel 3.11	Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah.....	III-33
Tabel 3.12	Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah..	III-34



Tabel 3.13	Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah	III-35
Tabel 3.14	Persentase Belanja Tidak Terduga terhadap Belanja Daerah	III-35
Tabel 3.15	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung	III-38

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1

Tabel 4.1	Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, indikator tujuan, indikator sasaran per Misi dengan Urusan/Bidang...	IV-8
Tabel 4.2	Tema Pembangunan Tahun 2023	IV-16
Tabel 4.3	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam RKP 2023	IV-17
Tabel 4.4	Prioritas dan Fokus Pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RKPD 2023	IV-20
Tabel 4.5	Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Sasaran PN RKP Tahun 2023	IV-23
Tabel 4.6	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023	IV-31
Tabel 4.7	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Temanggung Tahun 2023	IV-34
Tabel 4.8	Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Janji Tahunan Kepala Daerah dan Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun 2023	IV-42
Tabel 4.9	Keterkaitan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas	IV-45
Tabel 4.10	Perencanaan Pembangunan Mendukung Perpres 79 Tahun 2019	IV-60
Tabel 4.11	Sasaran, Prioritas dan Program Yang Mendukung Terwujudnya SDGs Di Kabupaten Temanggung Pada Tahun 2023.....	IV-63
Tabel 4.12	Sasaran dan Prioritas Daerah Yang Mendukung Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Temanggung Tahun 2023	IV-73



Tabel 4.13	Sasaran dan Prioritas Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim di kabupaten Temanggung Tahun 2023	IV-76
Tabel 4.14	Sasaran, Prioritas Daerah dan Program Yang Mendukung Pemenuhan SPM Di Kabupaten Temanggung Tahun 2023	IV-81

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH..... V-1

Tabel 5.1	Rekapitulasi Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Arah Kebijakan dalam RKP Tahun 2023	V-2
Tabel 5.2	Persentase Dukungan Program Daerah RKPD Kabupaten Temanggung terhadap Arah Kebijakan Nasional Tahun 2023.....	V-3
Tabel 5.3	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Arah Kebijakan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Tahun 2023	V-3
Tabel 5.4	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Agenda Prioritas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM): Kesehatan dan Pendidikan Tahun 2023	V-10
Tabel 5.5	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Agenda Prioritas Penanggulangan Pengangguran yang Disertai Decent Job Tahun 2023.....	V-12
Tabel 5.6	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Agenda Prioritas Mendorong Pemulihan Dunia Usaha Tahun 2023	V-12
Tabel 5.7	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Agenda Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan Tahun 2023	V-14
Tabel 5.8	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Agenda Prioritas Pembangunan Rendah Karbon Dan Transisi Energi (Respon Terhadap Perubahan Iklim) Tahun 2023	V-14
Tabel 5.9	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Agenda Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar antara lain Air Bersih dan Sanitasi Tahun 2023.....	V-15



Tabel 5.10	Rekapitulasi Dukungan Program Kabupaten Temanggung Tahun 2023 terhadap Prioritas Nasional RKP Tahun 2023	V-16
Tabel 5.11	Dukungan Program Pemerintah Temanggung Terhadap Prioritas Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.....	V-18
Tabel 5.12	Dukungan Program dan Kegiatan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Terhadap Prioritas Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.....	V-23
Tabel 5.13	Dukungan Program dan Kegiatan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Terhadap Prioritas Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.....	V-24
Tabel 5.14	Dukungan Program dan Kegiatan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Terhadap Prioritas Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	V-34
Tabel 5.15	Dukungan Program dan Kegiatan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Terhadap Prioritas Memperkuat Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	V-37
Tabel 5.16	Dukungan Program dan Kegiatan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Terhadap Prioritas Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	V-43
Tabel 5.17	Dukungan Program dan Kegiatan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Terhadap Prioritas Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.....	V-46
Tabel 5.18	Dukungan Program Daerah Kabupaten Temanggung Terhadap Kegiatan Prioritas Masing-Masing PN Tahun 2023	V-56
Tabel 5.19	Rekapitulasi Dukungan Program Daerah RKPDP Tahun 2023 terhadap Kegiatan Prioritas Masing-Masing PN Tahun 2023.....	V-99
Tabel 5.20	Rekapitulasi Dukungan Program dan Anggaran terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2023	V-100
Tabel 5.21	Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Pemantapan Reformasi Birokrasi	V-101
Tabel 5.22	Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Percepatan Pengurangan Kemiskinan	V-108



Tabel 5.23	Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Pemantapan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan	V-118
Tabel 5.24	Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup.....	V-122
Tabel 5.25	Penjabaran Pagu Anggaran Program Prioritas yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023	V-126
Tabel 5.26	Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) dan Pentahelix dalam Mendukung Prioritas Kabupaten Temanggung Tahun 2023	V-129
Tabel 5.27	Dukungan Program dan Kegiatan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Terhadap Pengembangan Destinasi Wisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur Tahun 2023	V-146
Tabel 5.28	Program Daerah yang Mendukung Aksi Konvergensi Stunting pada Tahun 2023	V-150
Tabel 5.29	Program Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Pengarusutamaan Gender.....	V-151
Tabel 5.30	Pemetaan Indikator SDG's dalam Dokumen Perencanaan Daerah.....	V-156
Tabel 5.31	Program Daerah yang Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	V-157
Tabel 5.32	Rekapitulasi Anggaran Per Urusan dan Per Bidang...	V-183
Tabel 5.33	Rencana Pembiayaan Per Urusan Per Program	V-185
Tabel 5.34	Kontribusi Perangkat Daerah dalam Pemantapan Reformasi Birokrasi dalam RKPD Tahun 2023	V-218
Tabel 5.35	Kontribusi Perangkat Daerah dalam Percepatan Pengurangan Kemiskinan dalam RKPD Tahun 2023.	V-220
Tabel 5.36	Kontribusi Perangkat Daerah dalam Pemantapan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan dalam RKPD Tahun 2023	V-222
Tabel 5.37	Kontribusi Perangkat Daerah dalam Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup dalam RKPD Tahun 2023	V-223
Tabel 5.38	Dukungan Program dan Anggaran Terhadap Pencapaian Upaya Keras Tahun 2023	V-223



Tabel 5.39	Program dan Anggaran Yang Mendukung Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023.....	V-228
------------	--	-------

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1

Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Temanggung Tahun 2023	VI-3
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Misi Kesatu ...	VI-5
Tabel 6.3	Indikator Kinerja Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Misi Kedua	VI-11
Tabel 6.4	Indikator Kinerja Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Misi Ketiga	VI-16
Tabel 6.5	Indikator Kinerja Program Kabupaten Temanggung Tahun 2023	VI-25
Tabel 6.6	Laporan Dokumen BAPPEDA yang Wajib Dikirim ke Provinsi Maupun Pusat Tahun 2019-2021	VI-58

BAB VII

PENUTUP..... VII-1



DAFTAR GAMBAR

BAB I

PENDAHULUAN I-1

- Gambar 1.1 Alur Penyusunan RKPD Tahun 2022 I-2
- Gambar 1.2 Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 I-3
- Gambar 1.3 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan..... I-12

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

- Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung II-4
- Gambar 2.2 Peta Posisi Kabupaten Temanggung terhadap Provinsi Jawa Tengah..... II-6
- Gambar 2.3 Peta Geologi Kabupaten Temanggung..... II-8
- Gambar 2.4 Kepadatan Penduduk Kawasan PURWOMANGGUNG Tahun 2021 II-10
- Gambar 2.5 Gambaran Jumlah Penduduk Kab. Temanggung Tahun 2021 II-12
- Gambar 2.6 Laju Pertumbuhan Penduduk Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021..... II-13
- Gambar 2.7 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021 II-20
- Gambar 2.8 Pertumbuhan PDRB Perkapita Kab. Temanggung, Jawa Tengah, Nasional dan Kabupaten/Kota Kawasan Purwomanggung Tahun 2017-2021 II-21
- Gambar 2.9 Distribusi Pendapatan berdasar Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, Nasional Tahun 2017-2021 II-27
- Gambar 2.10 Perkembangan TPT Kab. Temanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021 II-27
- Gambar 2.11 Pertumbuhan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021 II-29
- Gambar 2.12 Distribusi Pendapatan Berdasar Kriteria Bank Dunia Kawasan PURWOMANGGUNG Tahun 2017-2021 ... II-31
- Gambar 2.13 Perkembangan TPT Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021..... II-32



Gambar 2.14	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Kawasan Purwomanggung Tahun 2017-2021	II-36
Gambar 2.15	Pertumbuhan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-40
Gambar 2.16	Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Wilayah Purwomanggung Tahun 2017-2021	II-41
Gambar 2.17	Pertumbuhan AHH Kabupaten/Kota di Wilayah Purwomanggung Tahun 2017-2021	II-42
Gambar 2.18	Pertumbuhan HLS Kabupaten/Kota di Wilayah Purwomanggung Tahun 2017-2021	II-43
Gambar 2.19	Pertumbuhan RLS Kabupaten/Kota di Wilayah Purwomanggung Tahun 2017-2021	II-44
Gambar 2.20	Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten/Kota di Wilayah Purwomanggung Tahun 2017-2021	II-45
Gambar 2.21	Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-46
Gambar 2.22	Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/ Kota di Wilayah Purwomanggung Tahun 2017-2021	II-48
Gambar 2.23	Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	II-50
Gambar 2.24	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten/Kota di Wilayah Purwomanggung Tahun 2017-2021	II-53
Gambar 2.25	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten/Kota di Wilayah Purwomanggung Tahun 2017-2021	II-54
Gambar 2.26	Grafik Perubahan AHLS Tahun 2017-2021	II-55
Gambar 2.27	Grafik Perubahan ARLS 2017-2021	II-56
Gambar 2.28	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-110
Gambar 2.29	Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun 2017-2021	II-111
Gambar 2.30	Persentase Peserta Pelatihan Keterampilan yang Menjadi Wirausaha Baru/Telah Bekerja Tahun 2017 – 2021	II-112
Gambar 2.31	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatka Tahun 2017-2021	II-112
Gambar 2.32	Persentase Perusahaan yang Telah Membayarkan Upah Sesuai UMK tahun 2017-2021	II-113
Gambar 2.33	Persentase Pemenuhan Sarana Hubungan Industrial Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-114



Gambar 2.34	Jumlah Perselisihan yang terselesaikan dengan Perjanjian Bersama	II-115
Gambar 2.35	Persentase Peningkatan Produktivitas Kewirausahaan Kabupaten Temanggung Tahun 2017- 2021	II-115
Gambar 2.36	Indek Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-116
Gambar 2.37	Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-117
Gambar 2.38	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-121
Gambar 2.39	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-121
Gambar 2.40	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-126
Gambar 2.41	Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-134
Gambar 2.42	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2017-2021	II-141
Gambar 2.43	Persentase Penduduk ber-KTP el per satuan penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-141
Gambar 2.44	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-143
Gambar 2.45	Persentase Desa/Kelurahan Swasembada di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021.....	II-148
Gambar 2.46	PUS yang Ingin Ber-KB tapi Tidak Terlayani (Unmetneed) Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-2021	II-156
Gambar 2.47	Jumlah Peserta KB Aktif Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-160
Gambar 2.48	Jumlah PUS MKJP Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-161
Gambar 2.49	Persentase Ruas Jalan yang Didukung Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai Tahun 2017-2021	II-163
Gambar 2.50	Persentase Potensi Titik Parkir yang Tertangani di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-164
Gambar 2.51	Leaflet Informasi Peluang Usaha	II-191
Gambar 2.52	Pertumbuhan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-206
Gambar 2.53	Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2017-2021..	II-221
Gambar 2.54	Irisan Kesesuaian Jumlah Program RPJMD Tahun 2018-2023 dengan Program RKPD Tahun 2021	II-241



Gambar 2.55	Angka Konsumsi Rumah Tangga Rata-Rata Per Kapita Tiap Bulan Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-261
Gambar 2.56	Persentase Konsumsi Rumah Tangga Bahan Makanan dan Non Bahan Makanan Rata-Rata Per Kapita Tiap Bulan Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-261
Gambar 2.57	Perkembangan Pelanggan Listrik Di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-262
Gambar 2.58	Perkembangan Hotel di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	II-263
Gambar 2.59	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Temanggung Tahun 2021	II-268
Gambar 2.60	Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	II-269
Gambar 2.61	Capaian Indikator Kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2021	II-357
Gambar 2.62	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sampai dengan Tahun 2021.....	II-357
Gambar 2.63	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sampai dengan Tahun 2021.....	II-358
Gambar 2.64	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sampai dengan Tahun 2021.....	II-359
Gambar 2.65	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sampai dengan Tahun 2021.....	II-361
Gambar 2.66	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun 2021	II-362
Gambar 2.67	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun 2021	II-363
Gambar 2.68	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2021	II-363
Gambar 2.69	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Unsur pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2021	II-364
Gambar 2.70	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2021.....	II-365
Gambar 2.71	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2021.....	II-366
Gambar 2.72	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2021	II-366
Gambar 2.73	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2021	II-367



Gambar 2.74	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Unsur Kewilayahan Tahun 2021	II-368
Gambar 2.75	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Unsur Kewilayahan Tahun 2021	II-368
Gambar 2.76	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2021	II-369
Gambar 2.77	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2021	II-369
Gambar 2.78	Sinergitas Inovasi Daerah.....	II-391
Gambar 2.79	Bentuk Kolaborasi Pentahelix GERBANG EMAS.....	II-393
Gambar 2.80	Keterkaitan Inovasi GERBANG EMAS dengan Indikator Kinerja Daerah.....	II-394
Gambar 2.81	Inovasi Shibiru.....	II-395
Gambar 2.82	Pelepasan Ekspor Kopi.....	II-396
Gambar 2.83	Kegiatan Kenangan Bansari Bersama Presiden RI dan Bupati Temanggung	II-398
Gambar 2.84	Pesona Alam Posong Kledung.....	II-399
Gambar 2.85	Obyek Desa Wisata Tegalrejo.....	II-401
Gambar 2.86	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Sipanjul Jitu Plus di Puskesmas Kedu Temanggung	II-403
Gambar 2.87	Kegiatan Sinergitas Sabuk Gunung antara Pemerintah, FTJSLP, TNI, Ormas dan Mensos	II-404
Gambar 2.88	Kegiatan Desa bebas Sampah	II-405
Gambar 2.89	Keterkaitan Inovasi GERBANG EMAS dengan Konsep THIS	II-406
Gambar 2.90	Tahapan Inovasi GERBANG EMAS	II-410
Gambar 2.91	Alokasi Anggaran GERBANG EMAS	II-411
Gambar 2.92	SDM dan Peran Nyata dalam GERBANG EMAS.....	II-412
Gambar 2.93	Metode Pelaksanaan Inovasi.....	II-413
Gambar 2.94	Perkembangan Pelaksanaan GERBANG EMAS.....	II-416
Gambar 2.95	Masalah dan Tindak Lanjut dalam GERBANG EMAS.....	II-416
Gambar 2.96	Data Capaian Output GERBANG EMAS	II-419
Gambar 2.97	Data Capaian Outcome GERBANG EMAS	II-420
Gambar 2.98	Data Capaian Dampak GERBANG EMAS	II-420

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1

Gambar 3.1	Persentase Sumbangan Sektor Utama terhadap PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021 ..	III-9
Gambar 3.2	Pertumbuhan Sektor Utama di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	III-10



Gambar 3.3	Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah di	
	Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	III-19
Gambar 3.4	Pendapatan Kabupaten Temanggung	III-22
Gambar 3.5	Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.....	III-33
Gambar 3.6	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023.....	III-40
Gambar 3.7	Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023	III-40
Gambar 3.8	Proyeksi Pendapatan Transfer Tahun 2023	III-41
Gambar 3.9	Proyeksi Belanja Tahun 2023.....	III-41

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1

Gambar 4.1	Komponen penyusun RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023	IV-1
Gambar 4.2	Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023	IV-15
Gambar 4.3	Konsep THIS dalam Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2023.....	IV-20
Gambar 4.4	Keterkaitan dan Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Temanggung dengan Arah Kebijakan Perubahan RPJMD	IV-21

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH..... V-1

Gambar 5.1	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Temanggung	V-127
Gambar 5.2	Anggaran Belanja Program dan Belanja Urusan Penunjang.....	V-215
Gambar 5.3	Anggaran Belanja Program Terkait Pelayanan Dasar	V-216
Gambar 5.4	Anggaran Belanja Program Berdasarkan Prioritas Tahun 2023	V-217
Gambar 5.5	Distribusi Anggaran Belanja Program Perangkat Daerah yang mendukung Pemantapan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023	V-218
Gambar 5.6	Distribusi Anggaran Belanja Program Perangkat Daerah yang mendukung Percepatan Pengurangan Kemiskinan di Kabupaten Temanggung Tahun 2023	V-220





GERBANG EMAS

BAB I RKPD 2023

WISATA ALAM POSONG TEMANGGUNG

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2023

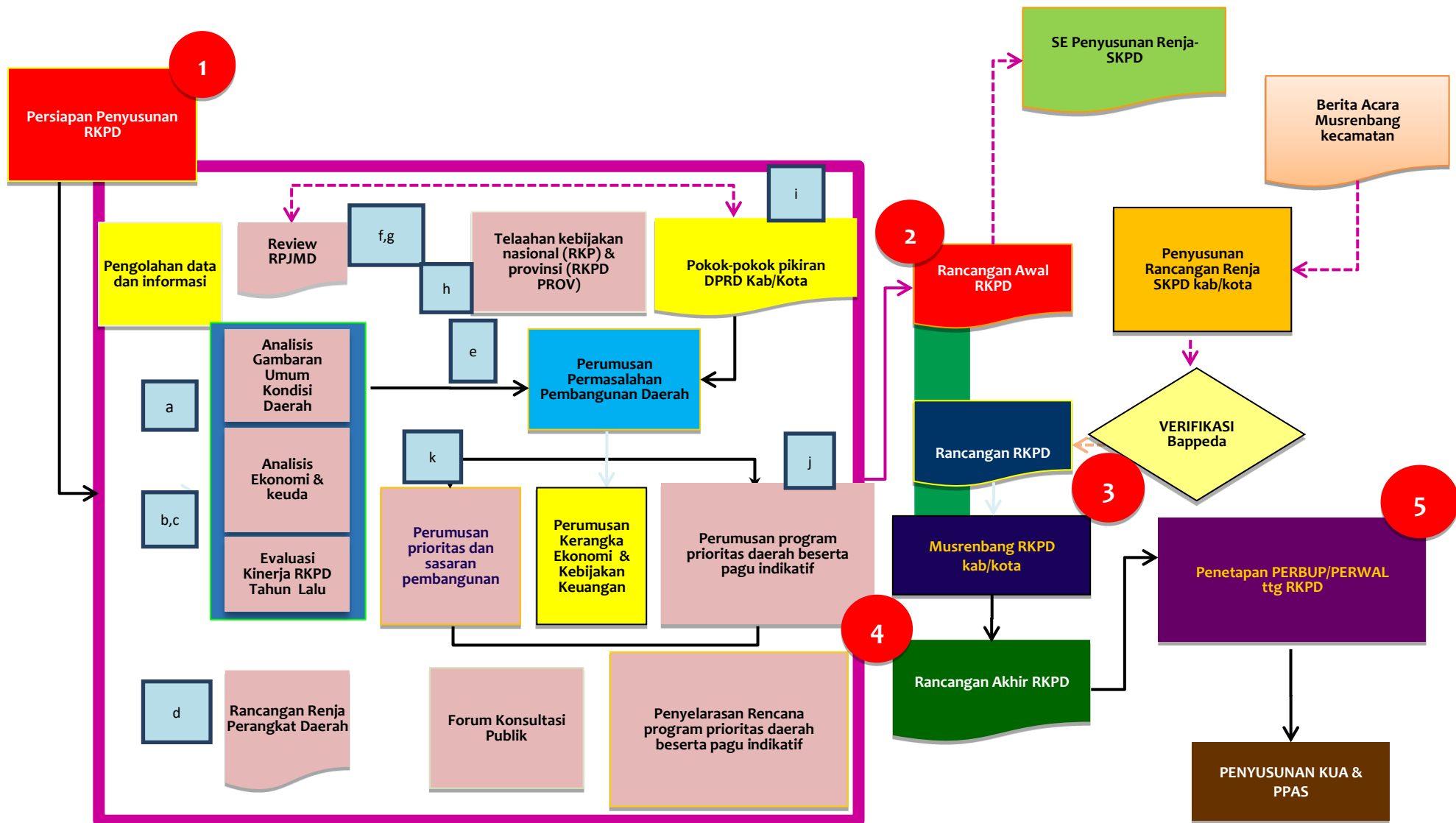
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2023, merupakan perencanaan tahun kelima dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

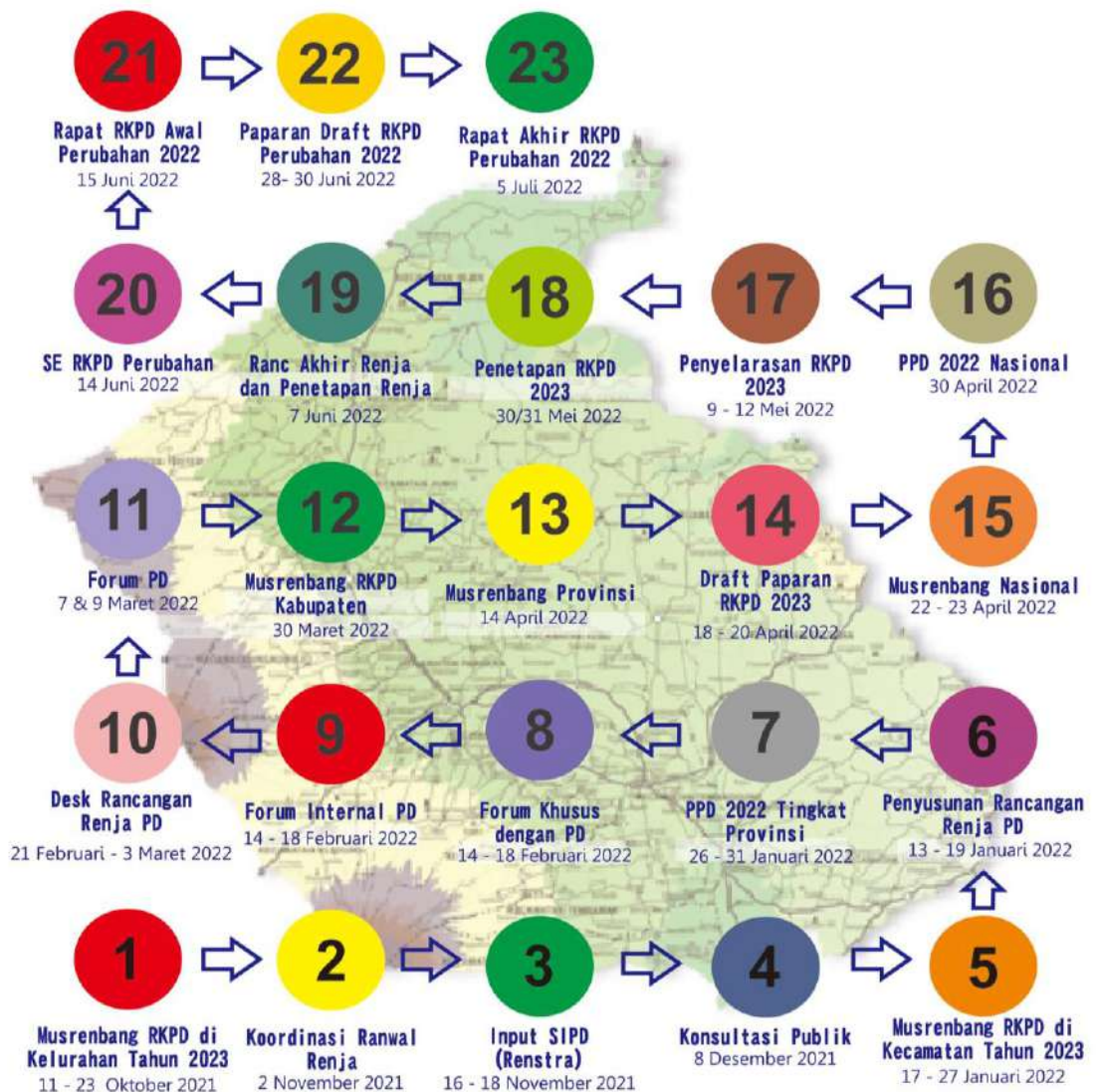
RKPD Tahun 2023 memuat permasalahan dan isu strategis, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan disertai pagu indikatif pendanaan kegiatan semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. RKPD Tahun 2023 yang merupakan tahun terakhir Perubahan RPJMD maka difokus mendorong ketercapaian indikator sasaran dan indikator program yang masih berstatus upaya keras, dengan tetap mengutamakan tema RKPD tahun 2023 yaitu Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Berkelanjutan dan Peningkatan Daya Saing Daerah dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan, dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber pendanaan lainnya yang menjadikan model inovasi sinergitas *pentahelix* dalam percepatan penyelesaian permasalahan dan isu strategis.

RKPD Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Temanggung akan menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Temanggung yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam penyusunan rancangan APBD Tahun 2023. Secara lebih jelas alur penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dijelaskan pada gambar berikut ini.



Gambar 1.1
Alur Penyusunan RKPD Tahun 2023

Proses rencana penyusunan RKPD Tahun 2023 yang mengikuti Alur Penyusunan sebagaimana pada Gambar 1.1 di atas, proses penyusunan secara alur waktu perencanaan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.2
Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023

1.2 PROSES PENYUSUNAN

Penjabaran proses yang dilaksanakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Rancangan Awal RKPD

Perumusan dan Penyusunan Rancangan awal RKPD Tahun 2023 dilaksanakan pada bulan November 2021 dan diserahkan kepada perangkat daerah pada minggu pertama Bulan Desember 2021.

Rancangan awal RKPD Tahun 2023 berisikan panduan dan koridor perencanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan pendekatan perencanaan teknokratik.

2. Musrenbang RKPD di Kelurahan

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2023 di kelurahan dilaksanakan pada tanggal 11-23 Oktober 2021 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2021. Peserta Musrenbang RKPD pada 23 kelurahan rata-rata diikuti oleh 40 orang peserta yang terdiri lurah dan perangkat kelurahan, lembaga kemasyarakatan, kader pemberdayaan masyarakat dan tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, kelompok perempuan, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kelurahan, perwakilan akademisi dan pelaku pendidikan, perwakilan rumah tangga miskin, perwakilan penyandang disabilitas, pengurus partai politik tingkat kelurahan, dan unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu.

Dalam rangka pemantauan pelaksanaan jalannya musrenbang RKPD di kelurahan, Bappeda membentuk Tim Evaluasi untuk melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan Musrenbang, dengan tujuan mengetahui dan menilai pelaksanaan musrenbang RKPD di kelurahan apa sudah sesuai ketentuan yang berlaku, dengan menggunakan format penilaian yang terdapat pada lampiran Form L15 dari Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2021. Metode evaluasi yang digunakan dengan memberikan bobot penilaian terhadap aspek waktu pelaksanaan dan administrasi pendukungnya, persentase kehadiran dari berbagai unsur yang diundang beserta lampirannya, proses pelaksanaan dan hasilnya, serta acara pendukung kegiatan musrenbang RKPD di Kelurahan seperti pameran produk-produk unggulan dan hasil UMKM. Hasil penilaian digunakan untuk menentukan pelaksanaan musrenbang terbaik, yang akan diberikan hadiah berdasarkan peringkat pertama, kedua dan ketiga dengan besaran hadiah sesuai kemampuan daerah berupa tambahan pagu indikatif kelurahan.



3. Konsultasi Publik Rancangan Awal

Konsultasi publik yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2021 merupakan forum konsultasi yang diikuti oleh perangkat daerah dan perwakilan masyarakat, LSM, Lembaga Non Pemerintahan, Forum Anak, Forum Lansia, dan *stakeholders* lain yang turut dalam proses perencanaan pembangunan. Forum ini dihadiri langsung oleh 66 orang peserta dan secara daring melalui *zoom* oleh 61 orang peserta, serta ditayangkan secara *live streaming* oleh TV Temanggung, guna menjangkau masukan dan saran dari peserta forum yang selanjutnya menjadi masukan dalam penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2023. Pada acara konsultasi publik diumumkan Penerima Penghargaan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2023 di Kelurahan 3 (tiga) terbaik berdasarkan SK Bupati Nomor 050/374 Tahun 2021 yaitu Kelurahan Kranggan (juara I), Kelurahan Manding (juara II), dan Kelurahan Jampiroso (juara III) selanjutnya dalam Rancangan RKPD Tahun 2024 akan ditambahkan Pagu Indikatif bagi 3 (tiga) kelurahan tersebut dengan hadiah pertama sebesar Rp150.000.000,00 hadiah kedua Rp100.000.000,00 dan hadiah ketiga Rp50.000.000,00.

4. Musrenbang RKPD di Kecamatan

Musrenbang RKPD di kecamatan berlangsung antara tanggal 17 – 27 Januari 2022 dan berlangsung selama 2 (dua) hari. Peserta Musrenbang RKPD di kecamatan rata-rata diikuti oleh 60 orang peserta yang terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, para Kepala Sub Bagian, para Kepala Seksi, dan unsur staf kecamatan, pengurus partai politik tingkat kecamatan dan/atau anggota DPRD daerah pemilihan setempat, delegasi dari Desa dan/atau Kelurahan, Tim Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan, unsur kelembagaan dan organisasi tingkat kecamatan, perwakilan kelompok profesi Tingkat Kecamatan, perwakilan rumah tangga miskin, perwakilan penyandang disabilitas, perwakilan unsur pendidikan/akademisi.



Sebagaimana Musrenbang RKPD di kelurahan, Bappeda juga mengirimkan Tim Evaluasi untuk melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan Musrenbang RKPD di kecamatan, dengan menggunakan format yang terdapat pada lampiran Form C12 dari Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2021. Metode evaluasi yang digunakan dengan memberikan bobot penilaian terhadap aspek waktu pelaksanaan dan administrasi pendukungnya, persentase kehadiran dari berbagai unsur yang diundang beserta lampirannya, proses pelaksanaan dan hasilnya, serta acara pendukung kegiatan musrenbang RKPD di kecamatan seperti pameran produk-produk unggulan dan hasil UMKM. Hasil penilaian digunakan untuk menentukan pelaksanaan Musrenbang RKPD terbaik, yang akan diberikan hadiah berdasarkan peringkat pertama, kedua dan ketiga dengan besaran hadiah sesuai kemampuan daerah berupa tambahan pagu indikatif kecamatan.

5. Desk Hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan

Desk Hasil Musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan pada tanggal 7 – 8 Februari 2022 diikuti oleh kecamatan pengusul dan Perangkat Daerah (PD) pengampu hasil Musrenbang RKPD dengan maksud untuk melakukan Sinkronisasi Hasil Musrenbang RKPD baik dari Nomenklatur Kegiatan dan Sub Kegiatan, Kewenangan, Volume dan Harga Satuan, serta Teknis Pelaksanaannya. Selanjutnya hasil desk menjadi acuan kecamatan dalam menginput usulan ke aplikasi SIPD sesuai hasil desk bersama PD pengampu.

6. Forum Internal Perangkat Daerah

Forum Internal PD yang dilaksanakan tanggal 16 – 18 Februari 2022 dengan peserta internal PD dan *stakeholder* terkait merupakan kegiatan untuk mensinergikan kegiatan pada perangkat daerah yang dibahas oleh internal PD sebelum dibawa ke forum PD.

7. Forum Khusus dengan Perangkat Daerah

Forum Khusus dengan PD dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2022 yang diikuti oleh 36 orang peserta terdiri dari perwakilan anak, rumah tangga miskin, penyandang disabilitas, penyandang



penyakit yang rentan penolakan sosial, pemerhati kemiskinan, komite ekonomi kreatif, PD dan *stakeholder* terkait menghasilkan keputusan mengenai kebutuhan kelompok masyarakat tertentu yang dapat diakomodir dan yang tidak dapat diakomodir oleh PD.

8. Desk Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Klinik Perencanaan

Desk Rancangan Renja PD dilaksanakan tanggal 22 Februari-1 Maret 2022 yang bertempat di Bappeda dan diikuti oleh PD dan tim verifikator dari Bappeda bertujuan untuk menyelaraskan rencana kerja perangkat daerah terutama lokus dan anggaran kegiatan yang diusulkan dengan hasil Musrenbang kecamatan dan kelurahan serta pokok-pokok pikiran DPRD, dan juga pencermatan serta penyelarasan lebih mendalam bagi perangkat daerah yang mempunyai amanat SPM dan SDG's.

Desk rancangan Renja juga melihat kesesuaian dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terutama dari sisi tujuan dan sasaran yang diwujudkan dalam program dan kegiatan perangkat daerah. Selanjutnya perencanaan yang bersifat *Top-down planning* ini akan menjadi muatan rancangan RKPD. Jika dipandang perlu maka perangkat daerah dapat memanfaatkan klinik perencanaan Bappeda untuk asistensi lebih dalam atas rencana kerja mereka. Hasil desk yang juga menampung usulan PD terhadap kebutuhan mendesak yang belum terakomodir dalam pagu inkikatif yang diberikan, selanjutnya ditampung dan disampaikan oleh bidang sektoral kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Temanggung, untuk memperoleh persetujuan TAPD sesuai kemampuan keuangan daerah.

9. Forum Perangkat Daerah

Forum perangkat Daerah yang dilaksanakan 7 dan 9 Maret 2022 dilaksanakan dengan dibagi kedalam 2 (dua) bidang yaitu Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan dihadiri secara langsung oleh 53 orang peserta dan daring diikuti 68 orang peserta, dan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur dihadiri secara langsung oleh 49 orang peserta dan daring diikuti 49 orang



peserta. Hasil dari kegiatan ini adalah pembicaraan tentang isu strategis dan permasalahan pembangunan, rancangan Renja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD, prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Musrenbang Wilayah, Provinsi, dan Nasional, daftar usulan kegiatan yang belum diakomodir (*long list*) dalam rancangan RKPD.

10. Musrenbang RKPD di Kabupaten

Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2022 dihadiri secara langsung oleh 40 orang peserta terdiri dari Forkompimda, Pimpinan DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Delegasi Kecamatan, Kepala Instansi Vertikal, unsur kelembagaan dan organisasi tingkat kabupaten, perwakilan kelompok profesi tingkat kabupaten, perwakilan akademisi dan pelaku pendidikan antara lain perwakilan perguruan tinggi dan perwakilan sekolah, pengurus partai politik tingkat kabupaten, perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar, LSM/Ormas, Tokoh masyarakat, unsur pengusaha/Investor, penyandang disabilitas, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat tertentu, sedangkan yang melalui daring diikuti 108 orang peserta. Kegiatan Musrenbang Kabupaten ditayangkan secara *live streaming* oleh TV Temanggung, guna menjangkau banyaknya masukan dan saran dari peserta selanjutnya menjadi masukan dalam penyusunan rancangan RKPD. Hasil dari kegiatan ini adalah kesepakatan isu strategis dan permasalahan pembangunan, kesepakatan prioritas program dan kegiatan, tanggapan atas masukan yang dituangkan dalam Berita Acara hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Temanggung untuk penyempurnaan rancangan akhir RKPD Tahun 2023.

Pada acara Musrenbang RKPD Kabupaten Temanggung juga diumumkan Penerima Penghargaan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2023 di kecamatan 3 (tiga) terbaik berdasarkan SK Bupati Nomor 050/55 Tahun 2022 yaitu Kecamatan Temanggung (juara I), Kecamatan Jumo (juara II), dan Kecamatan Tembarak (juara III) selanjutnya dalam Rancangan RKPD Tahun 2024 akan ditambahkan Pagu Indikatif kecamatan bagi 3 (tiga) kecamatan

tersebut dengan hadiah pertama sebesar Rp200.000.000,00 hadiah kedua Rp150.000.000,00 dan hadiah ketiga Rp100.000.000,00.

11. Penyusunan Rancangan RKPD pasca Musrenbang

Tahapan pasca musrenbang RKPD untuk memperbaiki rancangan RKPD dengan masukan dan saran yang ada juga untuk memberi kesempatan perangkat daerah untuk memastikan lokasi kegiatan yang direncanakan.

12. *Reviu* Inspektorat

Dokumen perencanaan yang telah disesuaikan dengan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten dilakukan *reviu* oleh Inspektorat Kabupaten pada tanggal 25 s.d 29 April 2022. *Reviu* ini dilaksanakan dengan tujuan untuk sinkronisasi antara Kebijakan Pusat, Provinsi, dan Daerah untuk Perencanaan Tahun 2023 di Kabupaten Temanggung.

13. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

Hasil dari semua proses yang dilakukan kemudian dirangkum menjadi rancangan Akhir RKPD yang berisi narasi lengkap dari Rancangan Peraturan Bupati, pendahuluan sampai dengan penutup termasuk matriks rencana program dan kegiatan beserta anggarannya. Penyusunan ini dilaksanakan sampai dengan 13 Mei 2022.

14. Asistensi RKPD dari Provinsi Jawa Tengah

Rancangan Akhir RKPD sebelum ditetapkan harus mendapatkan assistensi/fasilitasi oleh Provinsi Jawa Tengah pada Pertengahan Bulan Mei 2022 melalui Surat Fasilitasi Rancangan Akhir Perkada RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 yang disampaikan kepada Kabupaten/Kota dengan mengirimkan surat permohonan fasilitasi dari Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi beserta kelengkapannya. Asistensi ini bertujuan untuk sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dengan Kabupaten.

15. Penetapan RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati pada tanggal 30 Mei 2022.



1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;

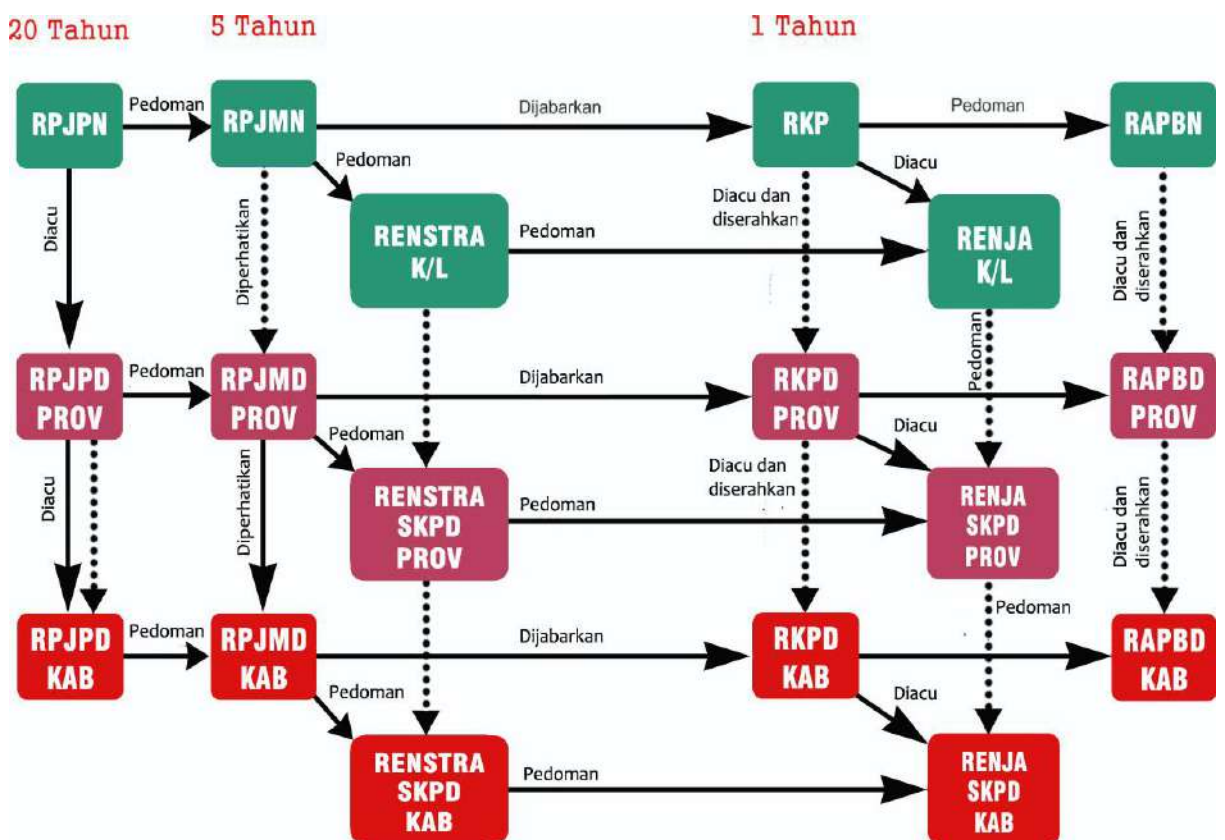
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
25. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2019 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022;
34. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 105 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
35. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 berpedoman pada sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah, dokumen perencanaan sektoral yang ada serta merujuk juga pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan level pemerintahan desa. Hubungan keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.3

Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Tujuan penyusunan adalah sebagai berikut.

1. Pedoman dalam penyusunan KUA/PPAS dan untuk menyusun RAPBD Kabupaten Temanggung Tahun anggaran 2023;
2. Memberikan arah, acuan, dan indikator capaian yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan

1.6 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai Latar Belakang, Proses Penyusunan, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat gambaran umum kondisi daerah, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Ringkasan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Identifikasi Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis, Inovasi Daerah dan Penghargaan Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat Arah Kebijakan dilihat dari kondisi perekonomian global dan nasional, kondisi perekonomian Jawa Tengah, dan kondisi perekonomian Kabupaten Temanggung, Pertumbuhan



Ekonomi, Struktur Ekonomi, PDRB Perkapita serta inflasi. Menjelaskan juga Arah Kebijakan Keuangan Daerah yang memuat Proyeksi Keuangan dan Kerangka Pendanaan, Arah Kebijakan Pendapatan, Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja, Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan, Kebijakan Penerimaan Pembiayaan, Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan serta memuat Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan tentang Indikator Tujuan, Indikator Sasaran per Misi dengan Urusan/Bidang dan prioritas pembangunan daerah dengan mempertimbangkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2021.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat: rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD), dan capaian yang direncanakan dalam RPJMD. Bab ini juga memuat berbagai inovasi program dan kegiatan dalam perencanaan kegiatan pembangunan yang mendukung ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan, Analisa Tema Tahun 2023 serta peran serta sinergitas *pentahelix* termasuk TJSPL.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat tentang indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dirumuskan dari indikator tujuan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator sasaran yang kemudian disebut sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB VII PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan manfaat Dokumen RKPD, hasil capaian indikator kinerja utama tahun 2021 serta hasil evaluasi RKPD tahun 2021 tentang capaian tujuan, sasaran per misi.



BAB II RKPD 2023

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Wilayah

Kabupaten Temanggung secara administratif terletak di provinsi Jawa Tengah dan merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah pengembangan Purwomanggung. Pengembangan wilayah di kawasan Purwomanggung didasarkan pada sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, perdagangan dan jasa, industri, dan panas bumi. Keunggulan dari Kabupaten Temanggung pada sektor pertanian khususnya hortikultura adalah bawang putih, bawang merah dan cabai. Kabupaten Temanggung merupakan sentra produksi bawang putih terbesar di Indonesia. Jenis bawang putih yang dikembangkan di Temanggung adalah lembu hijau, lembu kuning, lembu putih, dan Geol Temanggung. Produksi nasional bawang putih tahun 2021 mencapai 10.355,3 ton dengan luas lahan 1.591 ha. Melalui program lumbung pangan atau *food estate* pada tahun 2021, produksi bawang merah sebesar 11.102,1 ton dengan lahan seluas 1.555 ha yang tersebar di 5 kecamatan yaitu Bulu, Parakan, Kledung, Bansari, dan Ngadirejo. *Food estate* Temanggung dipusatkan/*area of interest* (AOI) terletak di bawah Embung Bansari, Desa Bansari, Kecamatan Bansari mampu menghasilkan bawang merah sebanyak 15,7 ton/ha. Produk hortikultura yang unggulan lainnya yaitu cabai rawit dengan produksi pada tahun 2021 sebesar 20.802.930 ton dengan luas lahan 2.977,50 ha dan untuk cabai besar sebesar 19.886.640 ton dengan luas 2.818,00 ha.

Produk perkebunan Kabupaten Temanggung yang unggul adalah tembakau dan kopi. *Tembakau* srintil merupakan tembakau berkualitas terbaik di dunia yang ditanam dengan kearifan lokal berasal dari varietas asli Temanggung yaitu Kemloko, selain itu tembakau Temanggung menjadi salah satu supplier pabrik rokok terbesar di Indonesia. Produksi



tembakau pada tahun 2021 sebesar 12.585,639 ton dengan luas lahan 18.293,08 ha, sedangkan untuk produksi kopi, salah satu kopi yang mempunyai cita rasa yang khas yaitu kopi Robusta dan kopi Arabika.

Produksi kopi Robusta tahun 2021 sebesar 83.841,6 ton dengan luas lahan 11.724,46 ha, dimana produksi kopi Arabika pada tahun 2021 sebesar 955,24 ton luas lahan 1.564,36 ha. Kopi dari Temanggung menjadi produsen terbesar di Jawa Tengah.

Kabupaten Temanggung merupakan wilayah pergunungan dengan curah hujan yang cukup tinggi menjadikan embung sebagai salah satu cara efektif untuk menampung air hujan. Program 1.000 embung merupakan program pemerintah pusat dalam penanganan kekeringan jangka panjang. Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2021 mempunyai 40 Embung yang tersebar di 16 Kecamatan 34 desa. Pembangunan embung tersebut bersumber dari beberapa sumber dana di antaranya TJSPL dari PT, APBN Kementerian Pertanian, DAK Pertanian, APBD Kabupaten dan APBD Provinsi Jawa Tengah.

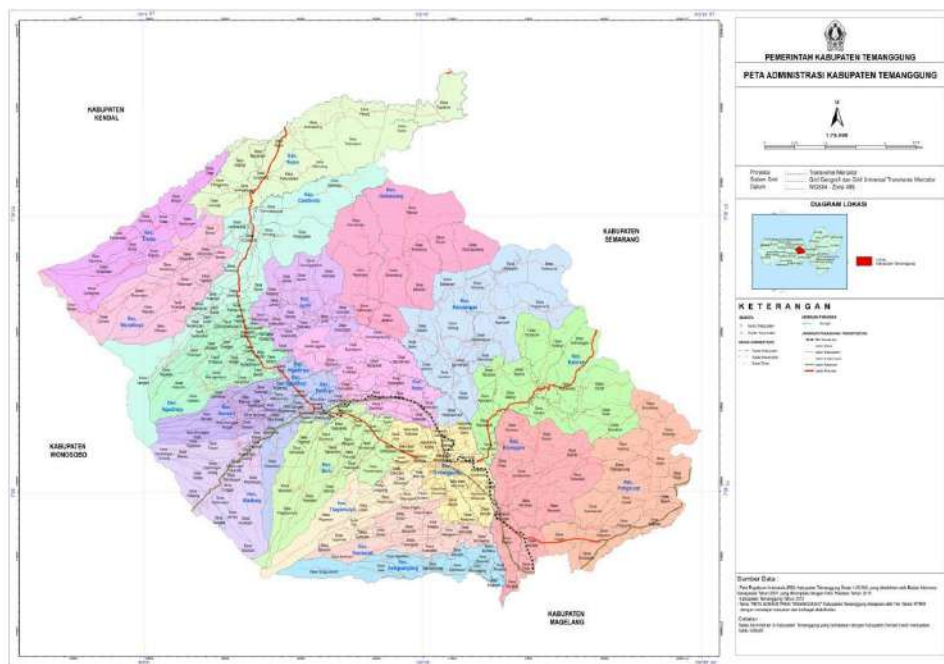
Berkaitan dengan pengembangan pariwisata, Kabupaten Temanggung memiliki potensi alam yang sangat menarik untuk dapat dijadikan tempat wisata salah satunya adalah Gunung Sindoro. Gunung Sindoro memiliki ketinggian 3.115 meter di atas permukaan laut dan menjadi salah satu tujuan pendakian. Selain itu Kabupaten Temanggung memiliki Pasar Papringan yang berbeda dengan pasar yang ada pada umumnya. Pasar Papringan hanya buka pada hari Minggu Wage dan menjual kuliner asli hasil tani Kabupaten Temanggung. Transaksi dipasar papringan juga dapat dikatakan unik karena tidak menggunakan uang rupiah, melainkan menggunakan kepingan bambu.

2.1.1.2 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Tabel 2.1
Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung

No.	Batas Wilayah	Kabupaten Lain	Kecamatan yang berbatasan	Desa yang berbatasan
1.	Sebelah Utara	Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang	Bejen, Candirotto, Gemawang, Kandangan	<ul style="list-style-type: none"> Desa Bejen, Desa Selosabrang, Desa Petung, Desa Duren, dan Desa Ngaliyan di Kecamatan Bejen. Desa Canggal di Kecamatan Candirotto. Desa Muncar dan Desa Karangseneng di Kecamatan Gemawang. Desa Margolelo dan Desa Kedawung di Kecamatan Kandangan.
2.	Sebelah Timur	Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang	Kandangan, Kaloran, Pringsurat	<ul style="list-style-type: none"> Desa Tlogopucang dan Desa Kedawung di Kecamatan Kandangan. Desa Kaloran, Desa Kalimanggis, dan Desa Getas di Kecamatan Kaloran. Desa Wonokerso, Desa Soborejo, dan Desa Klepu di Kecamatan Pringsurat
3.	Sebelah Selatan	Kabupaten Magelang	Pringsurat, Kranggan, Selopampang, Tlogomulyo, Bulu	<ul style="list-style-type: none"> Desa Soropadan, Desa Kuppen, Desa Kebumen, Desa Pringsurat, dan Desa Rejosari di Kecamatan Pringsurat. Desa Nguwet, Desa Pare, dan Desa Bengkal di Kecamatan Kranggan. Desa Bagus, Desa Kebonagung, Desa Gambasan, Desa Salamrejo, Desa Selopampang, dan Desa Tanggulanom di Kecamatan Selopampang. Desa Losari dan Desa Pagersari di Kecamatan Tlogomulyo
4.	Sebelah Barat	Kabupaten Wonosobo	Kledung, Candirotto, Wonoboyo	<ul style="list-style-type: none"> Desa Baturisari dan Desa Kledung di Kecamatan Kledung. Desa Canggal di Kecamatan Candirotto. Desa Cemoro di Kecamatan Wonoboyo.

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, Tahun 2021



Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung

Secara administratif Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 Kecamatan, 266 Desa, 23 Kelurahan, 1.568 Dusun, 1.731 lingkungan, 1.506 RW, dan 5.913 RT dengan pusat pemerintahan berada di Kota Temanggung. Jumlah tersebut berbeda dengan tahun sebelumnya karena pada tahun 2021 terdapat pemekaran di Kecamatan Temanggung di mana jumlah RW di Kecamatan Temanggung pada tahun 2020 sebanyak 118 RW dan 529 RT kemudian pada tahun 2021 menjadi 119 RW dan 533 RT. Sebaran jumlah desa, kelurahan, RW dan RT menurut kecamatan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Sebaran Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Per kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Desa		Kelurahan		Total	
					RW	RT	RW	RT	RW	RT
1	BULU	4.304	19	0	84	302	0	0	84	302
2	TEMBARAK	2.683	13	0	67	224	0	0	67	224
3	TEMANGGUNG	3.339	6	19	20	87	119	533	139	620
4	PRINGSURAT	5.728	14	0	113	364	0	0	113	364
5	KALORAN	6.392	14	0	111	416	0	0	111	416

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Desa		Kelurahan		Total	
					RW	RT	RW	RT	RW	RT
6	KANDANGAN	7.836	16	0	101	378	0	0	101	378
7	KEDU	3.496	14	0	108	424	0	0	108	424
8	PARAKAN	2.223	14	2	50	239	27	120	77	359
9	NGADIREJO	5.331	19	1	97	396	3	30	100	426
10	JUMO	2.932	13	0	60	273	0	0	60	273
11	TRETEP	3.365	11	0	25	141	0	0	25	141
12	CANDIROTO	5.994	14	0	74	275	0	0	74	275
13	KRANGGAN	5.761	12	1	97	358	7	29	104	387
14	TLOGOMULYO	2.484	12	0	47	156	0	0	47	156
15	SELOPAMPANG	1.729	12	0	46	128	0	0	46	128
16	BANSARI	2.254	13	0	46	189	0	0	46	189
17	KLEDUNG	3.221	13	0	38	160	0	0	38	160
18	BEJEN	6.884	14	0	51	170	0	0	51	170
19	WONOBOYO	4.398	13	0	53	209	0	0	53	209
20	GEMAWANG	6.711	10	0	62	312	0	0	62	312
Jumlah		87.065	266	23	1.350	5.201	156	712	1.506	5.913

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2021

Kecamatan paling luas di Kabupaten Temanggung adalah Kecamatan Kandangan dengan luas 7.836 ha atau setara dengan 9,01% dari total luas wilayah Kabupaten Temanggung, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Selopampang dengan luas 1.729 ha (1,98%). Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling banyak adalah Kecamatan Temanggung dengan 6 desa dan 19 Kelurahan, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Gemawang dengan jumlah 10 desa.

2.1.1.3 Letak dan Kondisi Geografis

a. Posisi Astronomis

Secara astronomis, Kabupaten Temanggung berada pada koordinat 110°23'–110°46'30" Bujur Timur dan 7°14'–7°32'35" Lintang Selatan.

b. Posisi Geografis

Kabupaten Temanggung berada di tengah-tengah tiga pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

(DIY), yaitu Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto (134 Km).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2020

Gambar 2.2

Peta Posisi Kabupaten Temanggung terhadap Provinsi Jawa Tengah

c. Kemiringan Lahan

Topografi Wilayah Kabupaten Temanggung kompleks dan beragam, meliputi: dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan gunung dengan kemiringan antara 0%–70%. Pola topografi wilayah mirip sebuah cekungan raksasa yang terbuka di bagian Tenggara, sedangkan di bagian Selatan dan Barat dibatasi oleh Gunung Sumbing (3.340 m dpl) dan Gunung Sindoro (3.115 m dpl) dan di bagian Utara dibatasi oleh Gunung Jurang Grawah (2.565 m dpl) dan pegunungan kecil lainnya yang membujur dari Timur Laut ke arah Tenggara. Berdasarkan klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Temanggung meliputi: datar seluas 968 ha (1,17%), bergelombang seluas 32.492 ha (39,31%), curam seluas 31.232 ha (37,88%), dan sangat curam seluas 17.983 ha (21,64%).

d. Ketinggian Lahan

Wilayah Kabupaten Temanggung berada pada ketinggian 400- >1.500 m dpl. Wilayah tersebut merupakan daerah lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang terhampar dari sisi Selatan, Barat sampai dengan Utara. Apabila ditinjau berdasarkan klasifikasi

ketinggian Kabupaten Temanggung terbagi dalam 5 wilayah ketinggian sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

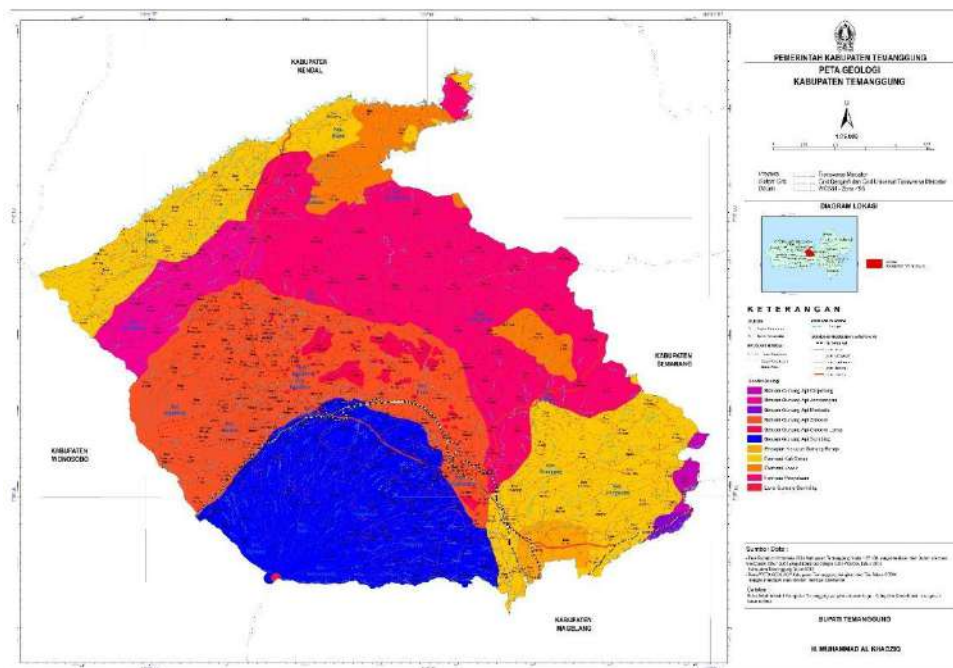
Tabel 2.3
Pembagian Wilayah Kabupaten Temanggung Berdasarkan Ketinggian

No	Wilayah Ketinggian (meter dpl)	Luas (Ha)	Luas (%)	Kecamatan
1	0– 500	8.538	9,77	Bejen, Candiroto, Gemawang, Kandangan, Kranggan, Temanggung, Tembarak, Selopampang, Pringsurat, Kaloran
2	500– 750	38.421	43,99	Bejen, Candiroto, Gemawang, Jumo, Kedu, Kandangan, Parakan, Bulu, Temanggung, Kaloran, Kranggan, Pringsurat, Tembarak, Tlogomulyo, Selopampang, Tretep, Wonoboyo
3	750– 1.000	20.106	23,02	Bejen, Tretep, Wonoboyo, Ngadirejo, Candiroto, Jumo, Gemawang, Kandangan, Selopampang, Kedu, Parakan, Kledung, Bulu, Kaloran, Pringsurat, Kandangan, Selopampang, Tembarak, Tlogomulyo
4	1.000–1.250	7.834	8,97	Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang, Bejen, Kandangan, Kaloran
5	1.250– 3550	12.167	14,25	Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang
Jumlah		87.065	100	

Sumber: Statistik Kabupaten Temanggung, 2020

e. Geologi

Dilihat dari sisi geologi, lahan seluas 82.675 ha jenis tanah di Kabupaten Temanggung meliputi: Latosol coklat (32,13%), Latosol coklat kemerahan (9,53%), Latosol merah kekuningan (35,33%), Regosol (20,14%), dan Andosol (2,60%). Selanjutnya apabila dilihat dari jenis batuan dan mineral yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung dapat dikelompokkan menjadi: 1). Batuan Andesit, 2). Batu gamping, 3). Batu kali, 4). Batu tras, 5). Bentonit, 6). Diatomae, 7). Kerikil, dan 8). Pasir. Apabila dilihat luas wilayah secara administrasi, kemiringan dan ketinggian disebabkan karena metoda dan pendekatan penghitungan.



Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031

Gambar 2.3
Peta Geologi Kabupaten Temanggung

2.1.1.4 Kondisi Demografi

a. Jumlah dan Sebaran Penduduk Perkecamatan

Jumlah penduduk pada tahun 2021 adalah 800.429 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 403.095 jiwa (50,36%), sedangkan penduduk perempuan sebanyak 397.334 jiwa (49,64%) di mana jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,59% dari tahun sebelumnya. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan dengan rasio 101,42. Sebaran jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kepadatan penduduk di tiap kecamatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin di Tiap Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Jenis Kelamin				Sebaran		Rasio jenis kelamin
		Pria	%	Wanita	%	Kecamatan	%	
1	BULU	25.025	50,76	24.276	49,24	49.301	6,16	103,09
2	TEMBARAK	16.070	50,94	15.475	49,06	31.545	3,94	103,84
3	TEMANGGUNG	41.360	49,67	41.911	50,33	83.271	10,40	98,66
4	PRINGSURAT	26.452	50,11	26.339	49,89	52.791	6,60	100,43

No	Kecamatan	Jenis Kelamin				Sebaran		Rasio jenis kelamin
		Pria	%	Wanita	%	Kecamatan	%	
5	KALORAN	23.156	50,07	23.092	49,93	46.248	5,78	100,28
6	KANDANGAN	26.856	50,59	26.228	49,41	53.084	6,63	102,39
7	KEDU	29.946	50,48	29.372	49,52	59.318	7,41	101,95
8	PARAKAN	27.231	50,36	26.845	49,64	54.076	6,76	101,44
9	NGADIREJO	28.974	50,50	28.397	49,50	57.371	7,17	102,03
10	JUMO	15.240	50,22	15.104	49,78	30.344	3,79	100,90
11	TRETEP	10.957	51,22	10.437	48,78	21.394	2,67	104,98
12	CANDIROTO	16.680	50,29	16.486	49,71	33.166	4,14	101,18
13	KRANGGAN	24.716	49,68	25.034	50,32	49.750	6,22	98,73
14	TLOGOMULYO	11.839	51,01	11.369	48,99	23.208	2,9	104,14
15	SELOPAMPANG	10.255	49,74	10.363	50,26	20.618	2,58	98,96
16	BANSARI	12.393	50,77	12.016	49,23	24.409	3,05	103,14
17	KLEDUNG	14.277	50,68	13.894	49,32	28.171	3,52	102,76
18	BEJEN	10.893	50,33	10.750	49,67	21.643	2,70	101,33
19	WONOBOYO	13.599	50,78	13.182	49,22	26.781	3,35	103,16
20	GEMAWANG	17.176	50,61	16.764	49,39	33.940	4,24	102,46
Jumlah		403.095	50,36	397.334	49,64	800.429	100	101,45

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2021

Pada tahun 2021 kecamatan dengan jumlah penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Temanggung. Jumlah penduduk Kecamatan Temanggung pada tahun 2021 sebanyak 83.271 jiwa dimana mencakup 10,40% dari jumlah total keseluruhan penduduk Kabupaten Temanggung. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Selopampang yaitu dengan jumlah penduduk sebanyak 20.618 jiwa yang mencakup hanya sekitar 2,58% dari total penduduk. Jumlah dan kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

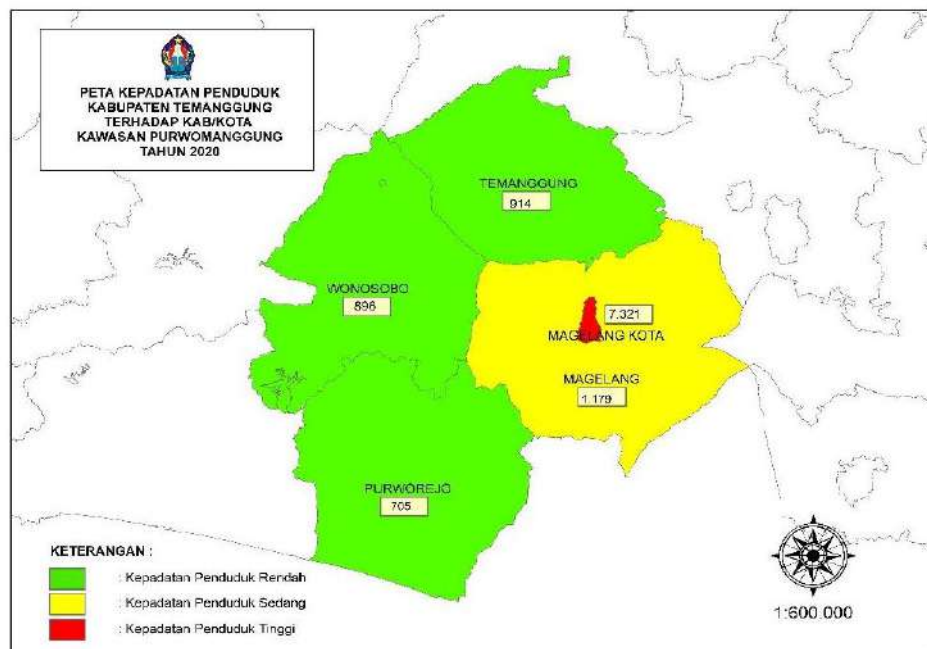
Tabel 2.5
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Sebaran penduduk (%)	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)
1	BULU	43,04	49.301	6,16	1.145
2	TEMBARAK	26,84	31.545	3,94	1.175
3	TEMANGGUNG	33,39	83.271	10,40	2.494
4	PRINGSURAT	57,27	52.791	6,60	922
5	KALORAN	63,92	46.248	5,78	724
6	KANDANGAN	78,36	53.084	6,63	677
7	KEDU	34,96	59.318	7,41	1.697

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Sebaran penduduk (%)	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)
8	PARAKAN	22,23	54.076	6,76	2.433
9	NGADIREJO	53,31	57.371	7,17	1.076
10	JUMO	29,32	30.344	3,79	1.035
11	TRETEP	33,65	21.394	2,67	636
12	CANDIROTO	59,94	33.166	4,14	553
13	KRANGGAN	57,61	49.750	6,22	864
14	TLOGOMULYO	24,84	23.208	2,9	934
15	SELOPAMPANG	17,29	20.618	2,58	1.192
16	BANSARI	22,54	24.409	3,05	1.083
17	KLEDUNG	32,21	28.171	3,52	875
18	BEJEN	68,84	21.643	2,70	314
19	WONOBOYO	43,98	26.781	3,35	609
20	GEMAWANG	67,11	33.940	4,24	506
Jumlah		870,65	800.429	100	919

Sumber: Dindikcapil Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

Tiga kecamatan dengan jumlah penduduk paling padat adalah Kecamatan Temanggung dengan kepadatan 2.494 jiwa/km², diikuti Kecamatan Parakan dengan kepadatan 2.435 jiwa/km², Kecamatan Kedu dengan kepadatan 1.695 jiwa/km² dan rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Temanggung tahun 2021 adalah 919 jiwa/km². Sedangkan Kepadatan penduduk di Kawasan Purwomanggung dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber : Dindikcapil, SIPD Kabupaten Temanggung, 2021, Data diolah

Gambar 2.4
Kepadatan Penduduk Kawasan Purwomanggung Tahun 2021

Kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten Wonosobo dan Purworejo.

Tabel 2.6
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan Purwomanggung Tahun 2021

Kab/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk Tahun 2021	Kepadatan Penduduk Tahun 2021 (Jiwa/Km ²)
Kab. Purworejo	1.091,49	769.880	705
Kab. Wonosobo	984,68	879.124	893
Kab. Temanggung	870,65	800.276	919
Kab. Magelang	1.102,93	1.299.859	1.179
Kota Magelang	18,12	127.846	7.055
Rata-rata			2.150

Sumber: ^(a) SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021, data diolah

^(b) BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2021

Rata-rata kepadatan penduduk di wilayah Kawasan Purwomanggung adalah 2.150 jiwa/km². Daerah dengan jumlah penduduk paling padat adalah Kota Magelang dengan kepadatan mencapai 7.055 jiwa/km². Kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung berada di bawah rata-rata kepadatan penduduk di wilayah Kawasan Purwomanggung, dengan kepadatan 919 jiwa/km². Sebaran jumlah penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

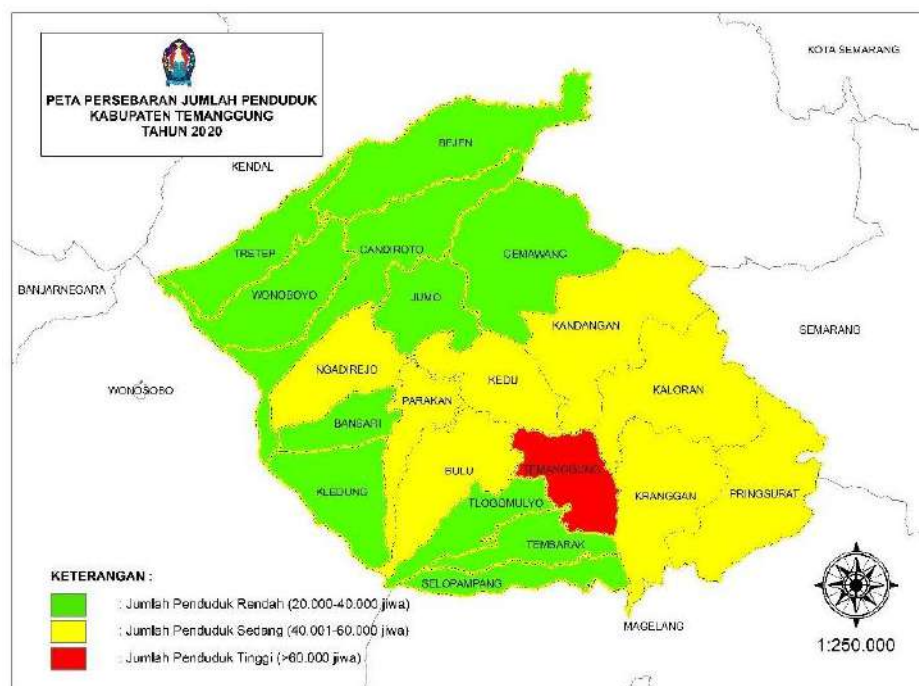
Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2017-2021

NO	KECAMATAN	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Bulu	47.361	48.119	48.785	48.840	49.301
2.	Tembarak	30.490	30.739	31.107	31.274	31.545
3.	Temanggung	81.207	82.620	83.157	83.138	83.271
4.	Pringsurat	50.340	51.583	52.122	52.458	52.791
5.	Kaloran	44.543	45.098	45.631	46.065	46.248
6.	Kandangan	50.638	51.618	52.160	52.648	53.084
7.	Kedu	57.273	58.072	58.889	58.935	59.318
8.	Parakan	52.513	53.297	53.588	53.897	54.076
9.	Ngadirejo	54.848	55.746	56.233	56.921	57.371
10.	Jumo	29.519	29.656	30.002	30.172	30.344
11.	Tretep	20.894	20.906	21.113	21.238	21.394

NO	KECAMATAN	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Candirototo	32.469	32.621	32.956	32.857	33.166
13.	Kranggan	47.467	48.465	49.021	49.254	49.750
14.	Tlogomulyo	22.573	22.710	22.832	23.087	23.208
15.	Selopampang	19.821	19.986	20.175	20.465	20.618
16.	Bansari	23.423	23.984	24.203	24.298	24.409
17.	Kledung	27.049	27.606	27.902	28.009	28.171
18.	Bejen	21.004	21.278	21.482	21.693	21.643
19.	Wonobojo	26.077	26.172	26.294	26.540	26.781
20.	Gemawang	32.780	33.274	33.612	33.767	33.940
	JUMLAH	760.297	772.289	783.550	791.264	800.429

Sumber : Dindukcapil, SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung bertambah dari 760.297 jiwa Tahun 2017 menjadi 800.429 jiwa pada tahun 2021 naik sejumlah 40.132 jiwa. Gambaran penyebaran jumlah penduduk Kabupaten Temanggung di 20 kecamatan dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber : Dindukcapil, SIPD Kabupaten Temanggung, 2021

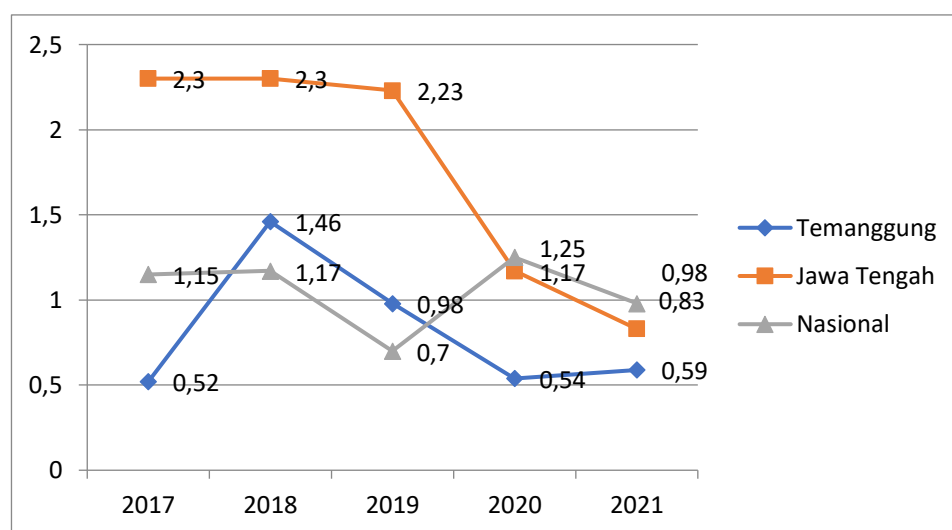
Gambar 2.5
Gambaran Jumlah Penduduk Kab. Temanggung Tahun 2021

Jumlah penduduk terbesar pada akhir tahun 2021 adalah di Kecamatan Temanggung. Hal tersebut dikarenakan pusat

perekonomian Kabupaten Temanggung berada di Kecamatan Temanggung.

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan jumlah penduduk dengan faktor penambah jumlah kelahiran dan migrasi masuk serta faktor pengurang jumlah kematian dan migrasi keluar pada suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung tergolong fluktuatif sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2021, SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Gambar 2.6
Laju Pertumbuhan Penduduk Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif, dan pertumbuhan penduduk pada Tahun 2021 lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Tabel 2.8
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan Purwomanggung Tahun 2017-2021

Kab/Kota	Jumlah Penduduk					Laju Pertumbuhan Penduduk (%)			
	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Kab.Purworejo	714.574	716.477	718.316	769.880	773.588	0,27	0,26	0,99	0,64

Kab/Kota	Jumlah Penduduk					Laju Pertumbuhan Penduduk (%)			
	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Kab.Wonosobo	784.207	787.384	790.504	879.124	886.613	0,42	0,41	1,49	1,14
Kota. Magelang	121.474	121.872	122.111	121.526	121.610	0,31	0,27	0,27	0,09
Kab.Magelang	1.268.396	1.279.625	1.290.591	1.299.859	1.305.512	0,89	0,88	0,93	0,59
Kab. Temanggung	772.289	783.550	791.264	795.556	800.429	1,46	0,98	0,54	0,71
Rata-rata	808.825	814.000	818.461	869.397	776.345	0,60	0,51	0,95	0,63
Rata-rata 4 tahun						0,67			

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kawasan Purwomanggung Tahun 2017-2021 adalah 0,67%, meskipun secara kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung lebih tinggi dibandingkan rata-rata penduduk di Kawasan Purwomanggung.

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Tahun 2017 – 2021 dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan Tahun 2017 – 2021

No	Kecamatan	Jumlah penduduk					Laju pertumbuhan penduduk (%)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	BULU	47.361	48.119	48.785	48.840	49.301	1,38	0,11	0,77
2	TEMBARAK	30.490	30.739	31.107	31.274	31.545	1,20	0,54	0,73
3	TEMANGGUNG	81.207	82.620	83.157	83.138	83.271	0,65	(0,02)	0,32
4	PRINGSURAT	50.340	51.583	52.122	52.458	52.791	1,04	0,64	0,55
5	KALORAN	44.543	45.098	45.631	46.065	46.248	1,18	0,95	0,50
6	KANDANGAN	50.638	51.618	52.160	52.648	53.084	1,05	0,94	0,73
7	KEDU	57.273	58.072	58.889	58.935	59.318	1,41	0,08	0,56
8	PARAKAN	52.513	53.297	53.588	53.897	54.076	0,55	0,58	0,43
9	NGADIREJO	54.848	55.746	56.233	56.921	57.371	0,87	1,22	0,76
10	JUMO	29.519	29.656	30.002	30.172	30.344	1,17	0,57	0,72
11	TRETEP	20.894	20.906	21.113	21.238	21.394	0,99	0,59	0,58
12	CANDIROTO	32.469	32.621	32.956	32.857	33.166	1,03	(0,30)	0,79
13	KRANGGAN	47.467	48.465	49.021	49.254	49.750	1,15	0,48	0,66
14	TLOGOMULYO	22.573	22.710	22.832	23.087	23.208	0,54	1,12	0,52
15	SELOPAMPANG	19.821	19.986	20.175	20.465	20.618	0,95	1,44	0,73
16	BANSARI	23.423	23.984	24.203	24.298	24.409	0,91	0,39	0,49

No	Kecamatan	Jumlah penduduk					Laju pertumbuhan penduduk (%)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
17	KLEDUNG	27.049	27.606	27.902	28.009	28.171	1,07	0,38	0,71
18	BEJEN	21.004	21.278	21.482	21.693	21.643	0,96	0,98	0,25
19	WONOBOYO	26.077	26.172	26.294	26.540	26.781	0,47	0,94	0,86
20	GEMAWANG	32.780	33.274	33.612	33.767	33.940	1,02	0,46	0,49
Jumlah/rata-rata		772.289	783.550	791.264	795.556	800.429	0,98	0,54	0,61

Sumber: Dindukcapil dan SIPD Kab. Temanggung Tahun 2021, data diolah

Meskipun jumlah penduduk total Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021 cenderung bertambah, namun laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019-2021 di tiap kecamatan cenderung menurun. Pada Tahun 2021, laju pertumbuhan penduduk paling tinggi di Kecamatan Wonoboyo sebesar 0,86% atau bertambah 227 jiwa.

c. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Tiap Kecamatan

Kualitas sumber daya manusia dilihat dari keahlian, kemampuannya dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Asumsinya, semakin tinggi pendidikan diharapkan semakin tinggi kemampuan dan keahlian yang dimilikinya. Indikator jenjang pendidikan yang ditamatkan bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan program wajib belajar 9 tahun. Komposisi penduduk Kabupaten Temanggung berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan										JUMLAH
		Strata III	Strata II	D IV/ Strata I	DIII	DI/ DII	SLTA	SLTP	SD	Tidak/ belum tamat SD	Tidak/ Belum sekolah	
1	Bulu	1	45	1.008	371	145	4.661	5.986	9.708	15.250	12.126	49.301
2	Tembarak	7	20	655	156	125	3.350	4.833	6.695	5.425	10.279	31.545
3	Temanggung	9	404	5.792	1.888	664	17.226	10.813	15.794	11.601	19.080	83.271
4	Pringsurat	3	43	973	285	172	6.806	9.955	12.270	4.369	17.915	52.791
5	Kaloran	4	20	760	219	206	4.340	6.962	10.160	5.336	18.241	46.248
6	Kandangan	5	34	887	290	231	4.630	6.783	10.169	6.895	23.160	53.084
7	Kedu	2	70	1.561	534	303	6.453	7.254	12.142	14.155	16.844	59.318
8	Parakan	18	108	1.973	769	301	8.334	6.912	9.070	9.518	17.073	54.076
9	Ngadirejo	1	30	1.280	490	273	6.516	10.165	15.823	10.119	12.674	57.371
10	Jumo	3	16	603	208	160	2.747	4.222	6.928	5.595	9.862	30.344

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan										JUMLAH
		Strata III	Strata II	D IV/ Strata I	DIII	DI/ DII	SLTA	SLTP	SD	Tidak/ belum tamat SD	Tidak/ Belum sekolah	
11	Tretep	1	4	114	46	43	662	2.790	5.870	4.709	7.155	21.394
12	Candiroto	2	11	754	304	207	3.146	4.272	8.158	9.751	6.561	33.166
13	Kranggan	3	56	1.246	379	224	7.022	8.976	8.597	7.807	15.440	49.750
14	Tlogomulyo	3	10	293	110	45	1.880	3.534	5.849	4.765	6.719	23.208
15	Selopampang	1	10	437	133	76	2.437	3.192	5.708	3.570	5.054	20.618
16	Bansari	0	11	384	135	64	1.931	3.572	5.134	9.504	3.674	24.409
17	Kledung	1	8	205	86	33	1.672	3.653	6.793	4.338	11.382	28.171
18	Bejen	1	13	304	116	96	1.994	3.527	6.132	2.715	6.745	21.643
19	Wonobojo	2	8	283	105	90	1.682	4.194	8.202	3.940	8.275	26.781
20	Gemawang	2	13	315	116	98	1.847	3.965	7.809	7.501	12.274	33.940
Jumlah		69	934	19.827	6.740	3.556	89.336	115.560	177.011	146.863	240.533	800.429
Persentase (%)		0,01	0,12	2,48	0,84	0,44	11,16	14,44	22,11	18,35	30,05	100

Sumber: Dindikcapil Kabupaten Temanggung, 2021

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan terbanyak adalah jenjang SD sebesar 22,11%, disusul jenjang tidak/belum tamat SD sebesar 18,35%. Untuk tamatan jenjang perguruan tinggi masih relatif kecil yaitu 2,48% dan faktor yang mempengaruhi antara lain karena mahalnya biaya pendidikan.

d. Penduduk Menurut Kelompok Umur

Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2021

NO	KELOMPOK USIA	JUMLAH	%
1	0 – 4	52.159	6,52
2	5 – 9	61.070	7,63
3	10 – 14	64.950	8,11
4	15 – 19	55.493	6,93
5	20 – 24	59.879	7,48
6	25 – 29	59.663	7,45
7	30 – 34	56.750	7,09
8	35 – 39	56.965	7,12
9	40 – 44	58.998	7,37
10	45 – 49	57.902	7,23
11	50 – 54	56.683	7,08
12	55 – 59	51.566	6,44
13	60 – 64	41.220	5,15
14	65 – 69	30.689	3,83

NO	KELOMPOK USIA	JUMLAH	%
15	70 – 74	16.625	2,08
16	≥ 75	19.817	2,60
Jumlah		800.429	100

Sumber: Dindikcapil Kabupaten Temanggung, 2021

Kelompok umur paling terbanyak di Kabupaten Temanggung adalah penduduk usia 10-14 tahun dengan jumlah 64.950 jiwa atau setara dengan 8,11% dari total penduduk Kabupaten Temanggung, berikutnya kelompok usia 5-9 tahun, dengan jumlah 61.070 jiwa atau setara dengan 7,63%.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat diketahui dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Nilai PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Konstan (tahun dasar 2010) Tahun 2017-2021 dan pertumbuhan lapangan usaha Tahun 2020-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah) Tahun 2017-2021 dan Pertumbuhan Lapangan Usaha Tahun 2020-2021

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan 2020	2021	Pertumbuhan 2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.109,053	3.213,42	3.269,02	3.331,08	1,90	3.358,51	0,82
B	Pertambangan dan Penggalian	107,69	111,58	116,31	118,76	2,11	126,77	6,74
C	Industri Pengolahan	3.601,37	3.804,20	3.971,38	3.947,19	-0,61	4.025,97	2,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12,57	13,15	13,70	14,10	2,92	14,78	4,82
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,62	12,17	12,74	13,00	2,04	13,73	5,62
F	Konstruksi	668,64	707,36	764,99	749,62	-2,01	806,17	7,54
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.090,08	3.268,88	3.445,11	3.314,95	-3,78	3.559,94	7,39
H	Transportasi dan Pergudangan	675,72	706,33	771,94	533,79	-30,85	548,56	2,77

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan tahun 2020	2021	Pertumbuhan tahun 2021
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	229,95	244,29	267,28	249,09	-6,81	264,11	6,03
J	Informasi dan Komunikasi	258,44	287,01	332,03	378,99	14,14	401,67	5,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	435,55	449,37	466,12	475,46	2,00	491,70	3,42
L	Real Estate	120,28	125,87	134,95	134,87	-0,06	137,94	2,28
M,N	Jasa Perusahaan	48,69	52,96	58,37	54,68	-6,32	56,33	3,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	377,51	389,25	402,52	396,03	-1,61	395,01	-0,26
P	Jasa Pendidikan	584,21	619,12	669,62	668,34	-0,19	671,96	0,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	154,28	164,86	178,40	192,22	7,75	193,28	0,55
R,S,T,U	Jasa lainnya	290,60	313,46	339,57	318,57	-6,18	321,56	0,96
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		13.776,25	14.483,26	15.214,06	14.890,75	-2,13	15.387,93	3,34

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2021

Berdasarkan harga konstan 2010 pada tabel di atas nilai PDRB Temanggung pada tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,34. Nilai PDRB Temanggung tahun 2021 atas dasar harga konstan sebesar 15,38 triliun rupiah, naik dari tahun 2020 yang sebesar 14,89 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Temanggung mulai bangkit kembali pasca pandemi covid-19. Salah satu sektor yang berkontribusi cukup tinggi terhadap nilai PDRB di Kabupaten Temanggung adalah lapangan usaha konstruksi dimana mengalami pertumbuhan sebesar 7,54% dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 7,39% kemudian disusul dengan lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 6,74%.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha konstruksi. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif dimana 10 lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar 5-10%, sedangkan lapangan usaha lainnya tercatat kurang dari 5% (<5%).

Guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi diperlukan daya ungkit sektor pertanian melalui pengembangan industri pengolahan berbasis produk pertanian lokal. Pada Tahun 2018, kondisi perekonomian Kabupaten Temanggung tumbuh melebihi target yang diharapkan dimana target yang ditetapkan 5,01 dengan capaian 5,13. Namun pada tahun 2019 di bawah target yang ditetapkan dimana target yang ditetapkan sebesar 5,20 dengan capaian 5,05. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung 5 tahun terakhir jika dibandingkan dengan target dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13
Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017-2022 dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

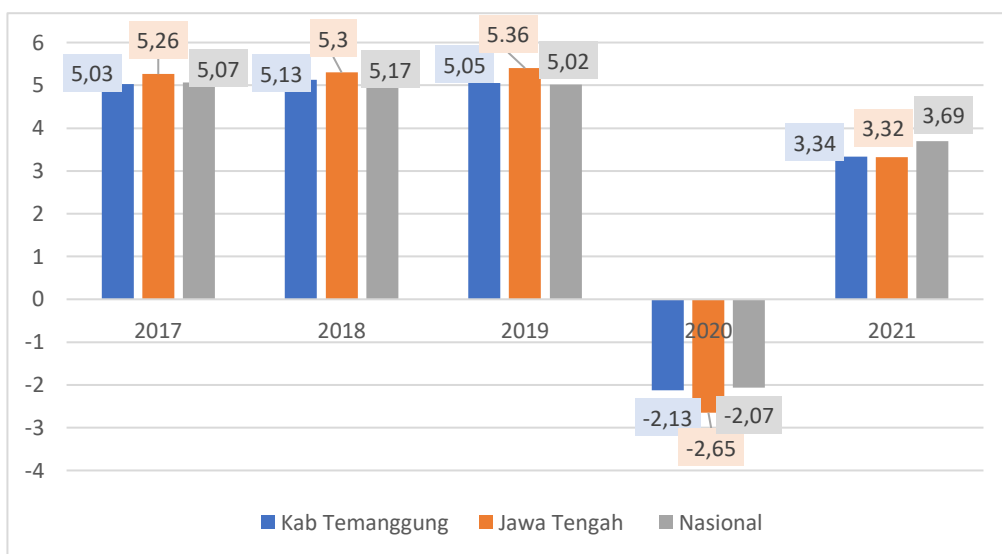
Tahun	Temanggung	
	Target	Realisasi
2017	5,10	5,03
2018	5,01	5,13
2019	5,20	5,05
2020	2,50	-2,13
2021	3,50	3,34
2022*	4,50	-
2023*	4,80	-

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2021.

Pada tahun 2021, realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung sebesar 3,34 jauh lebih baik dari tahun 2020 dimana pertumbuhan tersebut hampir mendekati target daerah yang telah ditetapkan yaitu 3,50. Laju pertumbuhan minus pada tahun 2020 disebabkan oleh melemahnya roda kegiatan perekonomian yang merupakan dampak pandemi Covid-19, namun pada tahun 2021 tingkat kesejahteraan masyarakat terlihat mulai membaik. Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung tahun 2023 sebesar 4,80% dengan asumsi ada peningkatan ekonomi dari upaya pemerintah daerah menggenjot semua sektor lapangan usaha, dan tetap dilakukan perbaikan infrastruktur dasar masyarakat yaitu perbaikan jalan di beberapa titik pusat kegiatan ekonomi untuk memperlancar distribusi barang dan mempersingkat waktu tempuh perjalanan sehingga roda perekonomian dapat terpacu dan biaya pengangkutan lebih efisien. Hal tersebut juga menjadikan upaya agar target pertumbuhan ekonomi di

Kabupaten Temanggung dapat perlahan pulih kembali seperti saat sebelum pandemi Covid-19 (rentang target 4,9-5,2%) melalui peningkatan produktivitas sektor kearifan lokal, penguatan peranan UMKM, peningkatan lapangan kerja dan investasi, serta peningkatan daya saing ekonomi.

Sebagai perbandingan, berikut grafik pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional tahun 2017-2021.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI, 2021

Gambar 2.7

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021

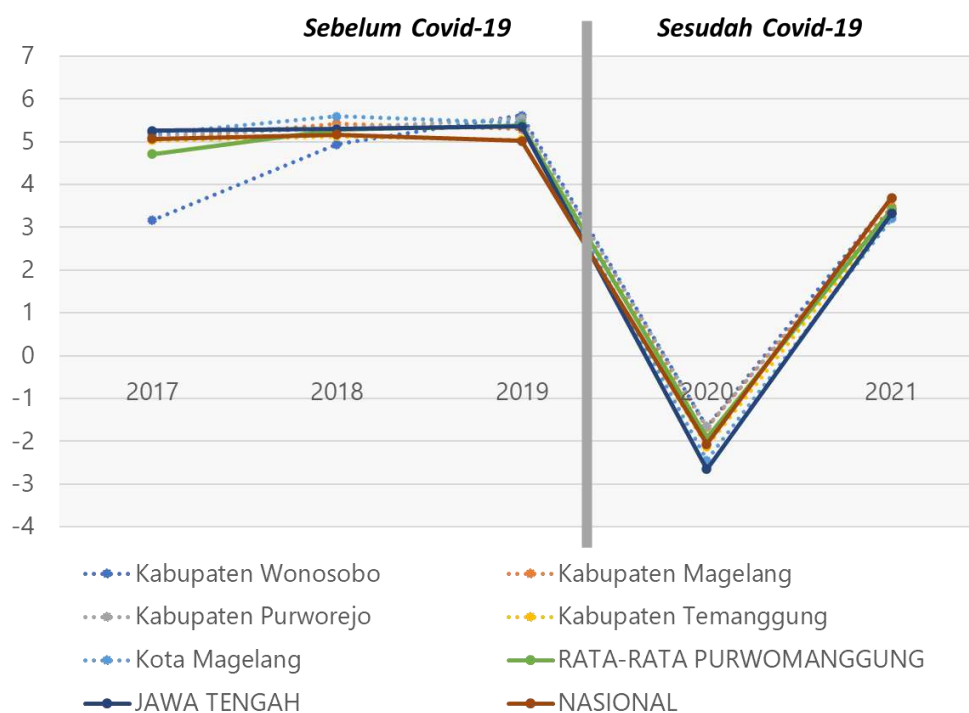
Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2017-2019 cenderung meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional dan Kabupaten Temanggung pada tahun 2017-2019 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 ketiganya mengalami penurunan yang sangat drastis akibat adanya pandemi covid-19. Namun pada tahun 2021 kondisi perekonomian semakin membaik, ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional, Jawa Tengah, maupun Kabupaten Temanggung. Sektor yang berkontribusi cukup tinggi terhadap PDRB Jawa Tengah berdasarkan lapangan usaha yaitu lapangan usaha industri pengolahan sebesar 34,31%, sedangkan di Kabupaten Temanggung adalah lapangan usaha konstruksi sebesar 7,54%.

Selain Kabupaten Temanggung, peningkatan pertumbuhan ekonomi juga dialami oleh daerah sekitar. Berikut Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung jika disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung.

Tabel 2.14
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Wilayah Pengembangan Purwomanggung

Kab/Kota	2017		2018		2019		2020		2021	
	Realisasi	Pertumbuhan	Realisasi	Pertumbuhan	Realisasi	Pertumbuhan	Realisasi	Pertumbuhan	Realisasi	Pertumbuhan
Kab. Purworejo	5,14		5,32	3,50	5,54	4,14	-1,66	-129,96	3,38	303,61
Kab. Wonosobo	3,16		4,94	56,33	5,61	13,56	-1,66	-129,59	3,68	321,69
Kota Magelang	5,18		5,59	7,92	5,44	-2,68	-2,45	-145,04	3,2	230,61
Kab. Magelang	5,05		5,43	7,52	5,3	-2,39	-1,68	-131,70	3,48	307,14
Kab. Temanggung	5,03		5,13	1,99	5,05	-1,56	-2,13	-142,18	3,34	256,81
Rata-Rata Purwomanggung	4,71		5,28	15,45	5,39	2,21	-1,92	-135,69	3,42	283,97
Jawa Tengah	5,26		5,3	0,76	5,36	1,13	-2,65	-149,44	3,32	225,28
Nasional	5,07		5,17	1,97	5,02	-2,90	-2,07	-141,24	3,69	278,26

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



Gambar 2.8
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Wilayah Pengembangan Purwomanggung 2017-2021

Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang yaitu dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan kawasan yang berdampak pada perekonomian regional nasional maka dilakukan percepatan pembangunan di Kawasan Purwomanggung. Salah satunya kawasan prioritas Purwomanggung dengan *quick win* Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur, maka dari Pemerintah Kabupaten Temanggung akan mendukung dan memantau progres pelaksanaan amanat Perpres tersebut dengan mengoptimalkan potensi di Kabupaten Temanggung serta memberikan dukungan pada program kegiatan pembangunan. Hal ini juga bertujuan untuk memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas, keterpaduan pengembangan sektor/ potensi unggulan, maupun dukungan infrastruktur/sarana prasarana. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung jika dibandingkan dengan rata-rata Kabupaten/Kota yang berada di kawasan Purwomanggung cenderung fluktuatif. Pada tahun 2021 pertumbuhannya mencapai 256,81. Angka tersebut diatas pertumbuhan provinsi Jawa Tengah namun masih dibawah pertumbuh nasional.

2.1.2.2 Struktur Ekonomi

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur perekonomian suatu daerah adalah distribusi kategori lapangan usaha PDRB secara keseluruhan. Distribusi kategori lapangan usaha ini juga menunjukkan komposisi atau susunan kegiatan ekonomi dalam sistem perekonomian. Kategori yang dominan atau diandalkan mempunyai nilai persentase yang paling besar dalam struktur tersebut, dan dapat menjadikan ciri khas perekonomian di wilayah yang bersangkutan. Distribusi ekonomi untuk menggambarkan struktur perekonomian dihitung dari nilai PDRB menurut harga berlaku. Secara lengkap distribusi PDRB yang menggambarkan struktur perekonomian di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 (Persen)

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,35	24,10	23,38	24,43	23,91
B	Pertambangan dan Penggalian	0,90	0,90	0,89	0,90	0,93
C	Industri Pengolahan	27,16	27,31	27,20	27,47	27,11
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,07	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
F	Konstruksi	4,82	4,92	5,12	5,06	5,37
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,46	20,45	20,61	20,14	20,90
H	Transportasi dan Pergudangan	4,23	4,19	4,36	3,14	3,18
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,56	1,56	1,62	1,53	1,58
J	Informasi dan Komunikasi	1,32	1,37	1,46	1,70	1,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,28	3,27	3,21	3,29	3,21
L	Real Estate	0,75	0,76	0,76	0,77	0,76
M,N	Jasa Perusahaan	0,36	0,37	0,39	0,38	0,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,84	2,74	2,69	2,70	2,69
P	Jasa Pendidikan	4,75	4,78	4,97	5,10	4,97
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,13	1,15	1,18	1,32	1,18
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,96	1,98	2,02	1,93	2,02
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa struktur ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 yang paling dominan adalah Lapangan Usaha Industri Pengolahan yaitu sebesar 27,11%, kemudian lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 23,91% dilanjutkan dengan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 20,90%.

Sedangkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir yang digunakan sebagai dasar penghitungan struktur ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.16
 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Temanggung (Miliar
 Rupiah) Tahun 2017-2021

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.578,81	4.880,35	5.057,41	5.263,68	5.411,36
B	Pertambangan dan Penggalian	168,90	176,91	186,80	194,99	210,32
C	Industri Pengolahan	5.108,06	5.525,25	5.889,85	5.920,28	6.134,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,36	15,48	16,16	16,54	17,21
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,70	14,39	15,31	16,51	17,61
F	Konstruksi	907,37	997,04	1.107,96	1.090,85	1.214,05
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.847,20	4.141,92	4.464,46	4.341,92	4.730,06
H	Transportasi dan Pergudangan	795,07	848,36	943,70	679,50	718,5
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	292,81	314,97	350,65	329,87	356,76
J	Informasi dan Komunikasi	247,56	274,57	320,72	366,50	388,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	617,40	659,82	694,55	708,79	769,23
L	Real Estate	141,47	151,74	164,70	165,41	171,05
M,N	Jasa Perusahaan	66,95	74,80	85,10	81,44	84,89
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	533,61	555,70	582,67	581,57	574,17
P	Jasa Pendidikan	892,85	966,99	1.075,52	1.100,45	1.118,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	213,30	230,44	255,95	283,38	287,61
R,S,T,U	Jasa lainnya	368,31	400,56	437,48	415,39	423,32
	PDRB	18.807,71	20.229,29	21.648,99	21.577,08	22.627,79

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2021

Nilai PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2021 mencapai 22,63 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 1.050,74 triliun rupiah dibandingkan dengan Tahun 2020 yang mencapai 21,577 triliun rupiah.

Tabel 2.17
Target dan Realisasi PDRB Kabupaten Temanggung
Tahun 2017-2021 (Ribu Rupiah)

Tahun	Target PDRB ADHB*	Realisasi PDRB ADHB	Target PDRB ADHK*	Realisasi PDRB ADHK
2017	18.000.000	18.807.712,01	13.000.000	13.776.254,81
2018	20.000.000	20.229.292,56	14.000.000	14.483.255,21
2019	21.500.000	21.648.988,07	15.000.000	15.214.058,87
2020	21.700.000	21.557.077,66	15.000.000	14.890.755,46
2021	22.500.000	22.627.792,08	15.000.000	15.387.930,43

Sumber: BPS Kab. Temanggung, 2021, *Target Bappeda Kab. Temanggung

Realisasi PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2020 lebih rendah dari target yang ditetapkan, dimana banyak sektor yang tidak tumbuh secara normal karena terdampak pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2021 melebihi target yang telah ditetapkan.

2.1.2.3 PDRB Perkapita

Meskipun belum dapat mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB perkapita dapat dijadikan salah satu tolok ukur guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian khususnya tingkat kemakmuran penduduk pada suatu wilayah secara makro. PDRB perkapita menggambarkan rata-rata besarnya output barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Semakin besar PDRB perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut. Perkembangan PDRB Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.18
Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021
dengan Target Daerah

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)			Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)		
	Target	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)	Target	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
2017	23.809.178,62	24.775.420,00	6,21	17.749.677,46	18.147.470,00	4,11
2018	25.741.661,38	26.423.000,00	6,76	18.545.263,54	18.917.670,00	4,24
2019	27.453.497,00	28.173.930,00	5,14	19.332.345,33	19.799.530,0	4,66
2020	29.272.713,27	27.325.870,00	-2,13	20.233.536,70	18.875.600,0	-4,67
2021	28.391.578,93	28.484.021,00	3,34	19.289.353,15	19.370.430,0	2,62

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2021

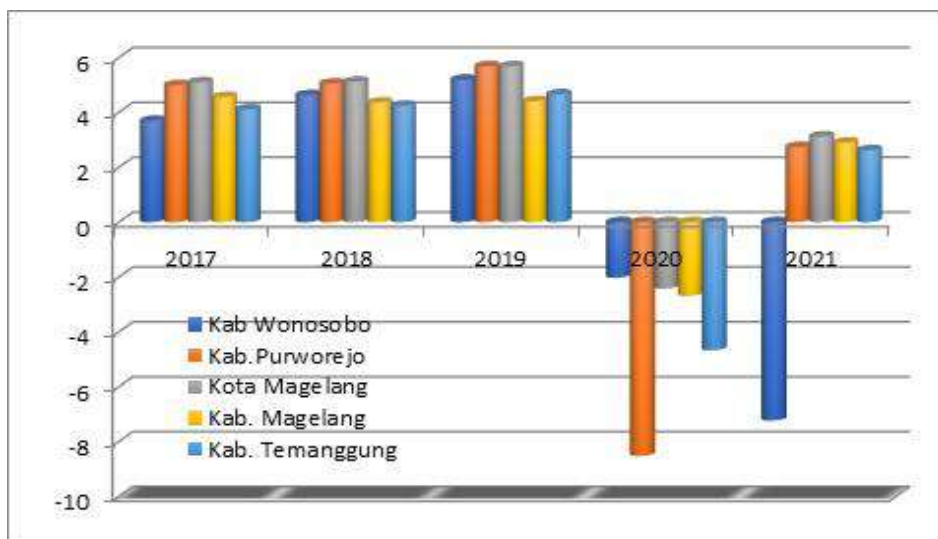
Sebelum pandemi, nilai PDRB perkapita selalu naik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin membaik. Pada tahun 2020, mengalami penurunan PDRB perkapita akibat adanya pandemi covid-19. Kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar 3,34% menunjukkan kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung kembali membaik pasca pandemi covid-19 dan kondisi perekonomian Kabupaten Temanggung semakin stabil. Berikut perbandingan pertumbuhan PDRB perkapita Kabupaten Temanggung jika dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Tabel 2.19
Perbandingan Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021 dengan Rata-rata Capaian Wilayah yang Setara (Purwomanggung)

Kabupaten /Kota	2017		2018		2019		2020		2021	
	Nilai (Ribuan Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Ribuan Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Ribuan Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Ribuan Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Ribuan Rupiah)	Pertumbuhan (%)
Kabupaten Purworejo	16.827,00	4,99	17.677,00	5,05	18.681,00	5,68	17.090,00	-8,52	17.558,00	2,74
Kabupaten Wonosobo	15.858,12	3,72	16.593,99	3,76	17.532,72	4,22	15.473,24	-10,69	15.863,48	0,66
Kota Magelang	47.915,85	5,10	50.369,40	5,12	53.231,38	5,68	51.942,91	-2,42	53.563,77	3,12
Kabupaten Magelang	16.536,48	4,56	17.257,24	4,36	18.101,09	4,41	17.613,16	-2,69	18.124,47	2,90
Kabupaten Temanggung	18.147,47	4,11	18.917,67	4,24	19.799,53	4,66	18.875,60	-4,67	19.370,43	2,62
RATA-RATA PURWOMANGGUNG	23.056,98	4,50	24.163,06	4,51	25.469,14	4,93	24.198,98	-5,80	24.896,03	2,41

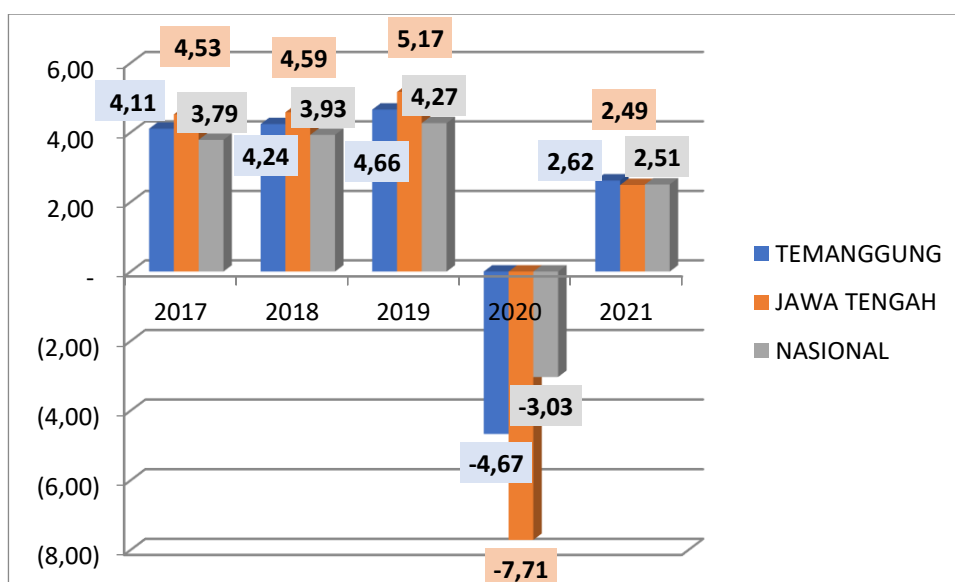
Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2021

Dilihat dari capaian PDRB per kapita dengan wilayah yang setara, dalam hal ini kawasan Purwomanggung, Kabupaten Temanggung menunjukkan perkembangan PDRB per kapita yang positif, dibuktikan dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan Purwomanggung. Capaian ini turut dipengaruhi oleh kondisi perekonomian di Kabupaten Temanggung yang semakin membaik pasca pandemi Covid-19.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.9
Pertumbuhan PDRB Per kapita Kabupaten/Kota Kawasan Purwomanggung Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.10
Pertumbuhan PDRB Perkapita Kab. Temanggung, Jawa Tengah, Nasional dan Kabupaten/Kota Kawasan Purwomanggung Tahun 2017-2021

Pendapatan perkapita di Kabupaten Temanggung masih berada di bawah pendapatan perkapita provinsi dan nasional. Namun demikian data tersebut belum dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki dan dinikmati oleh warga Temanggung saja, akan tetapi ada juga yang dimiliki dan dinikmati oleh penduduk

dari luar kabupaten Temanggung yang melakukan investasi di Kabupaten Temanggung. Selain itu, angka pendapatan per kapita belum memperlihatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.4 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup menjadi jaminan bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara merata. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi seyogyanya harus diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan agar hasil-hasil pertumbuhan tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, sasaran pembangunan tidak hanya berhenti sampai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, melainkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperhitungkan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas ketika semakin besar masyarakat yang terlibat dan menikmati hasil ekonomi produktif di dalam sistem perekonomian.

Indeks Gini dihitung oleh BPS hanya sampai provinsi karena menggunakan data susenas dan jumlah sample jika dihitung sampai kabupaten/kota kurang mencukupi. RSE (*Relative Standar Error*) >25% menunjukkan standar error melebihi ambang batas jadi data tidak valid.

Sebagai alternatif untuk menghitung kesenjangan penduduk digunakan '**distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia**' yang juga menggunakan data susenas (survei sosial ekonomi Nasional) Maret 2019 dengan membagi penduduk berdasarkan pengeluarannya 40% bawah, 40% tengah, 20% atas.

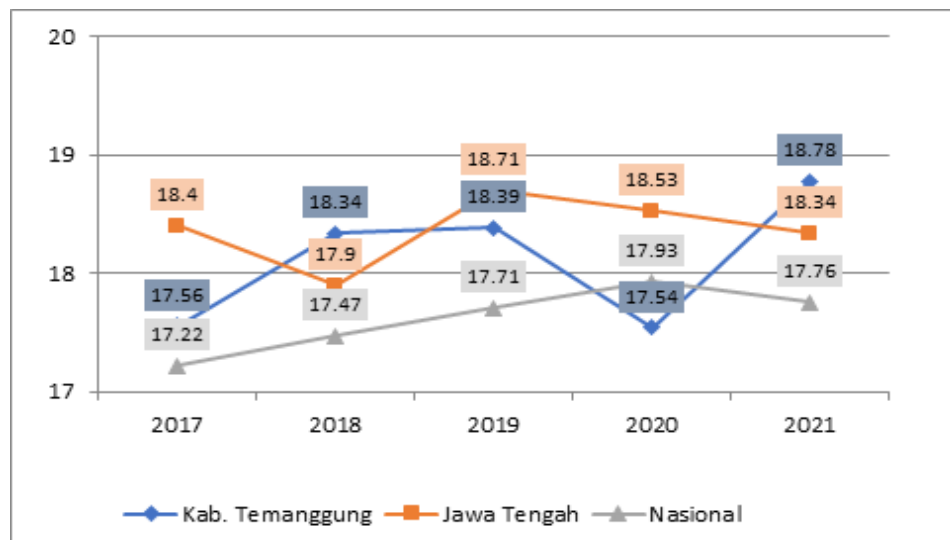
Tingkat ketimpangan menjadi masalah yang perlu dituntaskan bersama. Ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan di suatu daerah dapat menimbulkan masalah sosial, oleh sebab itu Pemerintah Daerah seharusnya mendistribusikan pendapatan ke seluruh wilayah kecamatan agar tidak terjadi ketimpangan, dengan membangun infrastruktur dan memberdayakan masyarakat sekitarnya, sehingga dapat mengurangi tingkat ketimpangan tersebut.

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20 % penduduk dengan pendapatan tinggi. Dalam hal ini Ketimpangan Pendapatan diperoleh dari Distribusi Pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia dengan rumus jumlah pendapatan dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibagi total pendapatan seluruh penduduk dikali 100%.

Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- memperoleh < 12 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap tinggi;
- memperoleh 12 – 17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap sedang;
- memperoleh > 17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap rendah.

Berikut merupakan gambaran distribusi pengeluaran berdasar kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional dari tahun 2017-2021.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.11
Distribusi Pendapatan berdasar Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, Nasional Tahun 2017-2021

Distribusi pengeluaran berdasar kriteria bank dunia Kabupaten Temanggung dari tahun 2017-2019 cenderung naik. Nilai tersebut lebih baik dibanding Nasional namun masih rendah dari Jawa Tengah. Pada tahun 2020 Kabupaten Temanggung mengalami penurunan dan berada pada kategori paling rendah dengan nilai 17,54%. Hal tersebut disebabkan ketimpangan pendapatan cukup tinggi akibat adanya pandemi covid-19. Tahun 2021 kembali meningkat sebesar 7,07% menunjukkan bahwa kondisi perekonomian mulai membaik dengan ditandai peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah. Berikut grafik ketimpangan Kabupaten Temanggung jika dibandingkan Kabupaten/Kota di wilayah pengembangan Purwomanggung periode 2017-2021.

Tabel 2.20
Distribusi Pendapatan Berdasar Kriteria Bank Dunia Kawasan
PURWOMANGGUNG Tahun 2017-2021

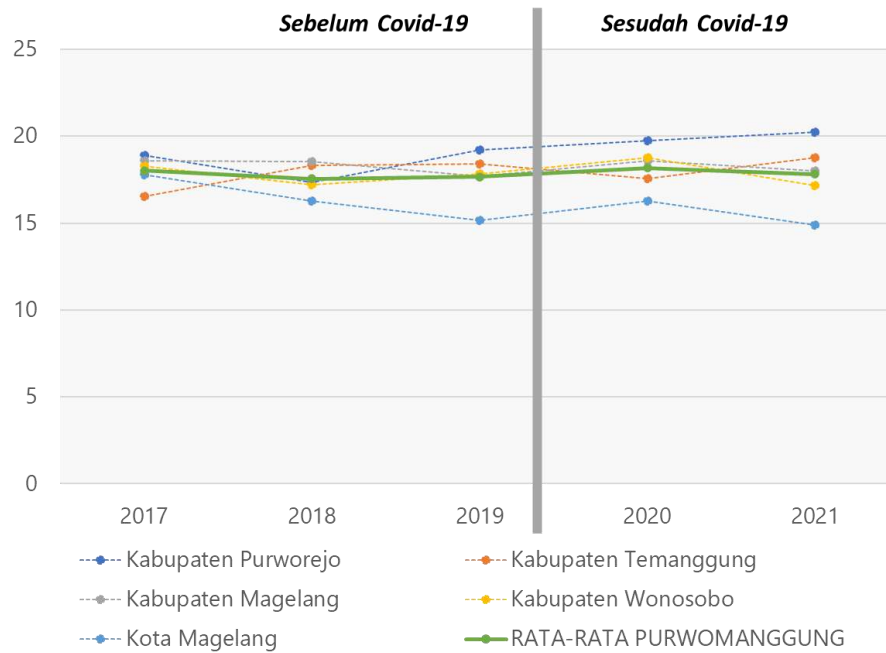
Tahun	Target	Realisasi	Perubahan
2017	-	16,56	
2018	-	18,34	1,78
2019	18,30	18,39	0,05
2020	18,50	17,54	-0,85
2021	18,70	18,78	1,24

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2021

Tabel 2.21
Distribusi Pendapatan Berdasar Kriteria Bank Dunia Kawasan
PURWOMANGGUNG Tahun 2017-2021

Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Purworejo	18,89	17,35	19,20	19,76	20,24
Kab. Wonosobo	18,29	17,22	17,85	18,76	17,16
Kota. Magelang	17,77	16,29	15,17	16,26	14,90
Kab. Magelang	18,60	18,52	17,71	18,57	18,01
Kab. Temanggung	16,56	18,34	18,39	17,54	18,78
Rata-rata PURWOMANGGUNG	18,022	17,544	17,664	18,178	17,818

Sumber : BPS dan BPS Temanggung, 2022



Gambar 2.12
Distribusi Pendapatan Berdasar Kriteria Bank Dunia Kawasan PURWOMANGGUNG Tahun 2017-2021

Dari angka pengeluaran 40% bawah Kriteria angka dan sebutannya:

- a. ketimpangan pengeluaran tinggi (*high inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah kurang dari 12%
- b. ketimpangan pengeluaran sedang (*moderate inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah antara 12-17%
- c. ketimpangan pengeluaran rendah (*low inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah lebih dari 17%
- d. Ketimpangan rendah berarti pemerataan tinggi

Distribusi pendapatan Kabupaten Temanggung tiap tahun angkanya meningkat di atas 17% menunjukkan ketimpangan yang rendah, sehingga pemerataannya tinggi.

Tabel 2.22
Perubahan Capaian Distribusi Pendapatan Kabupaten Temanggung dan Rata-rata PURWOMANGGUNG dan Nasional Tahun 2017-2021

Tahun	Kabupaten Temanggung		Rata-rata PURWOMANGGUNG		Nasional		
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	
Sebelum Covid-19	2017	16,56	-	18,022	-	17,22	-
	2018	18,34	1,78	17,544	-0,478	17,47	0,25
	2019	18,39	0,05	17,664	0,12	17,71	0,24

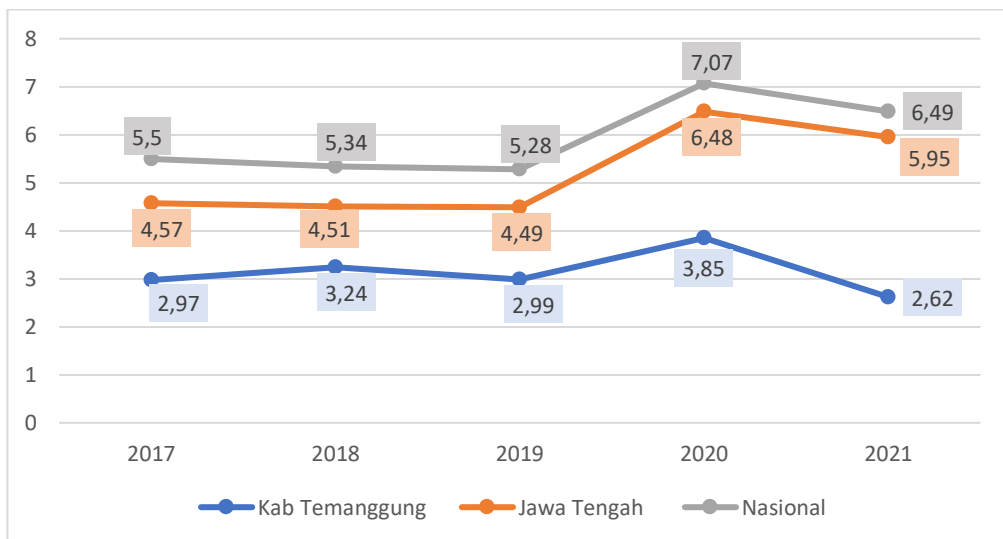
Tahun	Kabupaten Temanggung		Rata-rata PURWOMANGGUNG		Nasional		
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	
Sesudah Covid-19	2020	17,54	-0,85	18,178	0,514	17,93	0,22
	2021	18,78	1,24	17,818	-0,36	17,76	-0,17

Sumber : BPS dan BPS Temanggung, 2022

Selain ukuran ketimpangan menurut Bank Dunia, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah Indeks Gini. Indeks Gini digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar penduduk. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1, di mana semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketidakmerataan yang semakin tinggi.

2.1.2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT menunjukkan persentase orang yang mencari kerja terhadap penduduk angkatan kerja. Tingginya TPT merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. TPT Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS, 2021 (menggunakan data Agustus)

Gambar 2.13
Perkembangan TPT Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021

Sepanjang 5 tahun terakhir TPT di Kabupaten Temanggung relatif rendah dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional yaitu dibawah 5%. Hal ini karena banyak sektor pertanian terutama pertembakauan dan industri pengolahan kayu yang padat karya sehingga banyak menyerap tenaga kerja. TPT tertinggi Kabupaten Temanggung terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 3,85%. Tingginya TPT tahun 2020 merupakan salah satu dampak dari adanya pandemi covid-19. Pada tahun 2021 TPT Kabupaten Temanggung turun di angka 2,62%. Turunnya TPT tahun 2021 menunjukkan sektor-sektor penyerap tenaga kerja yang terpuruk akibat pandemi covid-19 terutama industri padat karya mulai pulih kembali.

Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional pada Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23
TPT Kabupaten Temanggung dan Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Tahun	TPT Kabupaten Temanggung	Perubahan TPT	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung	Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah	Pertumbuhan Ekonomi Nasional
2017	2,97	+1,47	5,03	5,26	5,07
2018	3,24	+0,27	5,13	5,30	5,17
2019	2,99	-0,25	5,05	5,40	5,02
2020	3,85	+0,86	-2,13	-2,65	-2,07
2021	2,62	-1,23	3,34	3,32	3,69

Sumber: BPS, 2021

Antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada kondisi normal adalah hubungan terbalik, yaitu semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka TPT makin rendah. Pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan penurunan angka TPT menunjukkan bahwa upaya pembangunan yang telah dilaksanakan daerah menunjukkan capaian yang positif. Hal ini karena beberapa sektor ekonomi mengalami kemajuan dan menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran berkurang. Dengan asumsi dasar bahwa rasio antara pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja tetap, artinya tidak ada pergeseran yang signifikan terhadap pola produksi dan teknologi yang

digunakan. Dengan kata lain tidak ada perubahan pola produksi padat karya ke padat modal ataupun dengan penggunaan alat berteknologi yang menggunakan lebih sedikit tenaga kerja dalam memproduksi. Pada tahun 2018 rupanya pertumbuhan ekonomi sedikit melambat mengakibatkan pengangguran bertambah sehingga TPT naik. Namun pada Tahun 2019 TPT dapat diturunkan meskipun di tahun 2020 naik lagi akibat banyak PHK di masa pandemi Covid-19 namun ada harapan di tahun berikutnya ketika pandemi sudah berakhir, angka TPT kembali turun, terbukti pada tahun 2021 TPT turun di angka 2,62 sedangkan pertumbuhan ekonomi naik sebesar 3,34. Hal itu menunjukkan bahwa dengan membaiknya kondisi perekonomian memunculkan lapangan kerja baru sehingga dapat menyerap angkatan kerja. Salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi adalah jumlah penduduk sebagai sumber daya manusia. Secara makro dikatakan bahwa pertumbuhan penduduk merupakan faktor yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi.

Jika dilihat dari pertumbuhan TPT Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.24
Realisasi dan Pertumbuhan TPT Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Tahun	Kabupaten Temanggung			Jawa Tengah		Nasional	
	Target	Realisasi	Pertumbuhan	Realisasi	Pertumbuhan	Realisasi	Pertumbuhan
2017	3,00	2,97	n.a	4,57	n.a	5,50	+1,96
2018	3,00	3,24	-9,09	4,51	+1,31	5,34	+2,91
2019	3,20	2,99	+7,72	4,49	+0,44	5,28	+1,12
2020	3,15	3,85	-28,76	6,48	-44,32	7,07	-33,90
2021	3,5	2,62	+31,95	5,95	+8,18	6,49	+8,20

Sumber: BPS, 2021 (menggunakan data Agustus)

Sedangkan perubahan capaian TPT Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan wilayah setara (PURWOMANGGUNG) dan nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25
Perubahan Capaian TPT Kabupaten Temanggung, Rata-rata
PURWOMANGGUNG dan Nasional Tahun 2017-2021

Tahun	Kabupaten Temanggung		Rata-rata PURWOMANGGUNG		Nasional		
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	
Sebelum Covid-19	2017	2,97	1,47	3,982	-	5,50	-0,11
	2018	3,24	0,27	3,768	-0,214	5,30	-0,2
	2019	2,99	-0,25	3,354	-0,414	5,23	-0,07
Sesudah Covid-19	2020	3,85	0,86	5,224	1,870	7,07	1,84
	2021	2,62	-1,23	5,046	-0,178	6,49	-0,58

Sumber: BPS, 2021 (menggunakan data Agustus)

Jika dilihat dari perubahan capaian TPT pada kondisi sesudah pandemi Covid-19 menunjukkan capaian Kabupaten Temanggung yang lebih baik dibandingkan dengan capaian wilayah setara (PURWOMANGGUNG) maupun nasional.

Tabel 2.26
Tingkat Pertumbuhan Jumlah Penganggur Kabupaten Temanggung Tahun
2017-2021

Tahun	Jumlah Penganggur	Pertumbuhan
2017	22.482	n.a
2018	24.714	-9,09
2019	22.975	+7,72
2020	30.422	-28,76
2021	20.813	+31,95

Sumber: BPS dan data diolah, 2021 (menggunakan data Agustus)

TPT Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 angkanya naik drastis karena pandemi dimana sektor-sektor yang terkait dengan jasa yang padat karya banyak yang tidak beroperasi mengakibatkan PHK karyawan. Namun kondisi PHK ini diperkirakan hanya bersifat sementara dan akan berjalan normal kembali ketika pandemi tidak lagi mengkhawatirkan. Proyeksi TPT Kabupaten Temanggung diperkirakan akan mulai membaik di tahun 2021. Terbukti dengan realisasi tahun 2021 sebesar 2,62%, angka tersebut melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2023 nantinya diharapkan angka TPT juga kembali menurun (dapat dibawah 2,62%) melalui berbagai upaya diantaranya penciptaan lapangan kerja baru, perluasan kerja di sektor informal, peningkatan keahlian dan kompetensi tenaga kerja, peningkatan

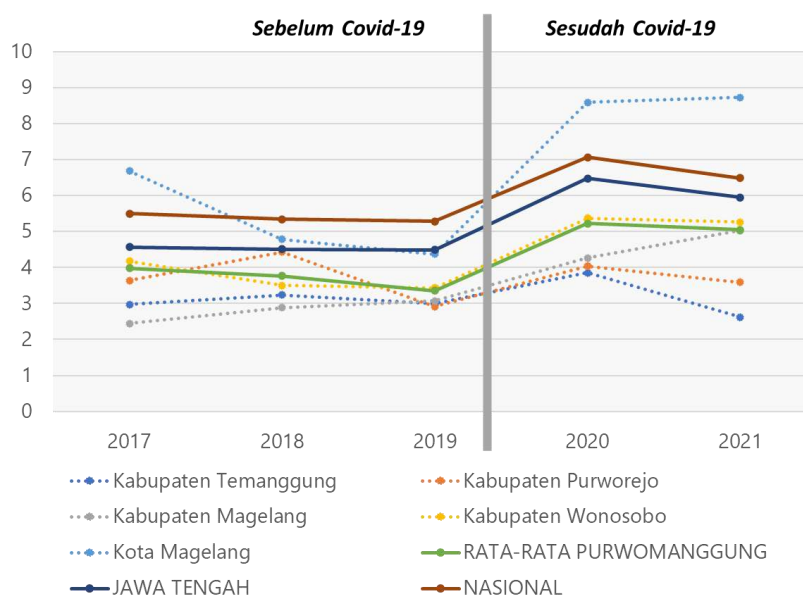
kewirausahaan, memperkuat sistem informasi pasar kerja dan perlindungan sosial bagi pekerja.

TPT Kabupaten Temanggung menempati posisi kedua setelah Kabupaten Wonogiri jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan menempati posisi pertama jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Kawasan Purwomanggung dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.27
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Kawasan Purwomanggung Tahun 2017-2021

Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Purworejo	3,64	4,43	2,91	4,04	3,59
Kab. Wonosobo	4,18	3,5	3,43	5,37	5,26
Kota. Magelang	6,68	4,78	4,37	8,59	8,73
Kab. Magelang	2,44	2,89	3,07	4,27	5,03
Kab. Temanggung	2,97	3,24	2,99	3,85	2,62
RATA-RATA PURWOMANGGUNG	3,982	3,768	3,354	5,224	5,046
JAWA TENGAH	4,57	4,51	4,49	6,48	5,95
NASIONAL	5,5	5,34	5,28	7,07	6,49

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



Gambar 2.14
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Kawasan Purwomanggung Tahun 2017-2021

Tabel 2.28
Pertumbuhan Jumlah Penganggur Terbuka Kabupaten/Kota di Kawasan
Purwomanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021

Kab/Kota	Jumlah Penganggur					Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2020	2021
Kab. Temanggung	22.482	24.714	22.975	30.422	20.813	+32,41	-31,6
Kab. Purworejo	25.935	31.620	20.801	31.103	27.772	+49,53	-10,7
Kab. Magelang	30.862	36.844	39.438	55.504	65.667	+40,74	18,3
Kab. Wonosobo	32.679	27.452	26.984	47.209	46.636	+74,95	-1,2
Kota. Magelang	8.093	5.802	5.312	10.439	10.617	+96,52	+31,95
RATA-RATA PURWOMANGG UNG	24.010	25.286	23.102	34.935	34.301	58,83	1,35
Jawa Tengah	1.565.584	1.555.086	1.558.847	2.366.239	2.186.179	+51,79	-7,6
Nasional	143.745.525	141.062.294	140.929.483	190.609.604	176.970.943	+35,25	-7,2

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Tabel 2.29
Perubahan Capaian Jumlah Penganggur Kabupaten Temanggung, Rata-rata
PURWOMANGGUNG dan Nasional Tahun 2017-2021

Tahun	Kabupaten Temanggung		Rata-rata PURWOMANGGUNG		Nasional		
	Realisasi	Pertumbuhan	Realisasi	Pertumbuhan	Realisasi	Pertumbuhan	
Sebelum Covid-19	2017	22.482	-	24.010	-	143.745.525	0
	2018	24.714	9,93%	25.286	5,32%	141.062.294	-1,87%
	2019	22.975	-7,04%	23.102	-8,64%	140.929.483	-0,09%
Sesudah Covid-19	2020	30.422	32,41%	34.935	51,22%	190.609.604	35,25%
	2021	20.813	-31,59%	34.301	-1,82%	176.970.943	-7,16%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Jika dilihat dari perubahan capaian jumlah penganggur pada kondisi sesudah pandemi Covid-19 menunjukkan capaian Kabupaten Temanggung yang lebih baik dibandingkan dengan capaian wilayah setara (PURWOMANGGUNG) maupun nasional.

2.1.2.6 Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dikenal secara universal ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). IPM merupakan salah satu indikator yang dapat mewakili keterbandingan hasil pembangunan manusia antar daerah. Konsep pembangunan manusia

sebagai ukuran pencapaian hasil pembangunan menempatkan manusia pada posisi yang sebenarnya yaitu manusia sebagai penerima akhir dari hasil-hasil pembangunan. Angka IPM mengindikasikan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan. Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.30
Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Variabel	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)		68,34	68,83	69,56	69,57	69,88
A	Angka Harapan Hidup /AHH (Tahun)	75,42	75,47	75,48	75,58	75,64
B	Harapan Lama Sekolah(tahun)	12,07	12,08	12,14	12,14	12,32
	Rata-rata lama sekolah (tahun)	6,9	6,94	7,24	7,24	7,25
C	Pengeluaran riil per kapita (ribu Rp)	8.794	9.142	9.343	9.343	9.408

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2021

Status pencapaian IPM dikategorikan: (a) sangat tinggi, apabila IPM ≥ 80 ; (b) Tinggi, apabila IPM antara 70-80; (c) Sedang, apabila IPM antara 60-70; dan (d) Rendah, apabila IPM < 60 .

IPM Kabupaten Temanggung selama tahun 2017-2021 naik dari 68,34 pada tahun 2017 menjadi 69,88 pada Tahun 2021, termasuk kategori sedang. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2018 dengan laju 0,71 dan terendah pada Tahun 2020 sebesar 0,01. Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah juga naik, namun pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan turun 146 ribu rupiah dibandingkan Tahun 2019.

Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 telah mencapai 75,64 tahun dan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selalu terjadi peningkatan. Lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan dapat melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena lama hidup seseorang tidak terlepas dari tingkat kesehatan yang bersangkutan. Kesehatan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh asupan gizi yang baik, tingkat kepedulian dan perawatan terhadap

kesehatan sehingga angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan.

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 mencapai 7,25 yang artinya tingkat anak-anak Temanggung yang pada tahun 2020 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati Pendidikan selama 12,14 tahun (Diploma I) lebih lama 0,01 tahun dibanding anak berusia sama di tahun 2019.

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung ini masih sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung hanya berada pada posisi ke-30 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, bahkan secara rata-rata cukup jauh dibanding kemampuan daya beli masyarakat Jawa Tengah pada umumnya. Pengeluaran per kapita per tahun penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 adalah sebesar Rp9.408.000,00 sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita per tahun penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp10.930.000,00. Perbandingan target dan realisasi IPM Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

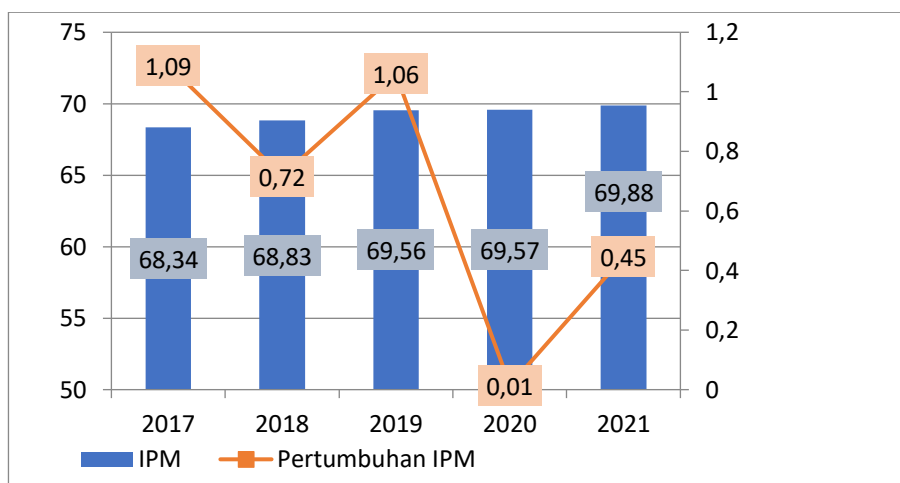
Tabel 2.31
Perbandingan Target dan Realisasi IPM Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021

No	Variabel	Temanggung		Jawa Tengah		Nasional
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA		69,84	69,88	72,50	72,16	72,29
a	Angka Harapan Hidup saat lahir (Tahun)	75,49	75,64	74,10	74,47	72,29
b	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,20	12,32	7,37	12,77	13,08
c	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,35	7,25	13	7,75	8,54
d	Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan (Ribu Rp)	9.500	9.408	-	11.034	11.156

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

IPM Kabupaten Temanggung masih berada di bawah IPM Jawa Tengah. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Temanggung masih berada di bawah kemajuan pembangunan Jawa Tengah pada umumnya.

IPM dan pertumbuhan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2021 serta Perbandingan IPM Kabupaten Temanggung dengan kabupaten/kota dalam regional Kawasan Purwomanggung dan Jawa Tengah ditunjukkan pada gambar berikut.



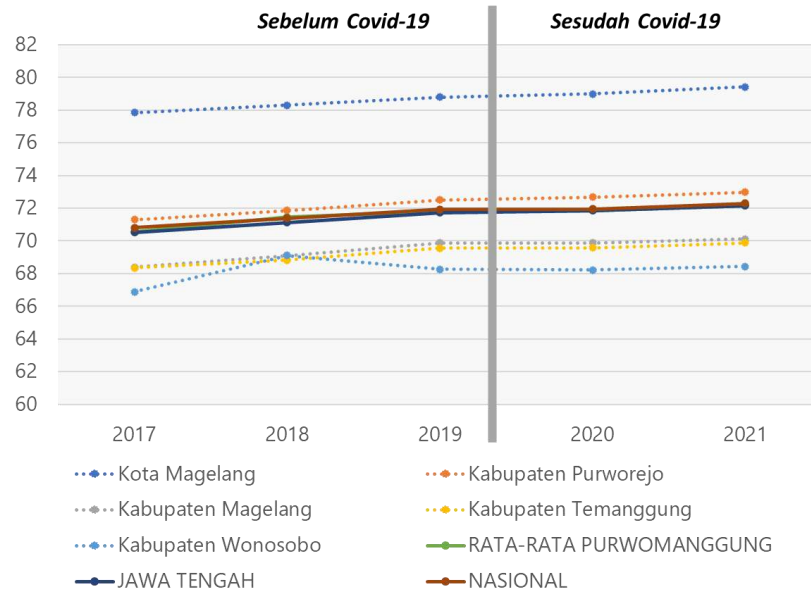
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021

Gambar 2.15
Pertumbuhan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Tabel 2.32
Pertumbuhan IPM Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Sewilayah Purwomanggung Tahun 2017-2021

Kab/Kota	IPM					Pertumbuhan IPM				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Kab.Purworejo	71,31	71,87	72,50	72,68	72,98	0,92	0,79	0,88	0,25	0,41
Kab.Wonosobo	66,89	69,11	68,27	68,22	68,43	1,06	1,38	0,68	-0,07	0,31
Kota Magelang	77,84	78,31	78,80	78,99	79,43	0,88	0,6	0,63	0,24	0,56
Kab.Magelang	68,39	69,11	69,87	69,87	70,12	0,8	1,05	1,1	0,00	0,36
Kab.Temanggung	68,34	68,83	69,56	69,57	69,88	1,09	0,72	1,06	0,01	0,45
RATA-RATA PURWOMANGGUNG	70,55	71,45	71,80	71,87	72,17	0,95	0,91	0,87	0,09	0,42
JAWA TENGAH	70,52	71,12	71,73	71,87	72,16	0,77	0,85	0,86	0,20	0,40
NASIONAL	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29	0,90	0,82	0,74	0,03	0,49

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



Gambar 2.16
Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Wilayah Purwomanggung Tahun 2017-2021

Pertumbuhan IPM Kabupaten selama tahun 2017-2021 cukup fluktuatif. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan IPM kabupaten/kota Kawasan Purwomanggung tahun 2017-2021, pertumbuhan IPM Kabupaten Temanggung tergolong moderat.

Tabel 2.33
Perbandingan Perubahan IPM Kabupaten Temanggung, Rata-rata PURWOMANGGUNG dan Nasional Sebelum dan Sesudah Covid-19

Tahun	Kabupaten Temanggung		Rata-rata PURWOMANGGUNG		Nasional		
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	
Sebelum Covid-19	2017	68,34	0,74	70,55	0,662	70,81	0,63
	2018	68,83	0,49	71,19	0,632	71,39	0,58
	2019	69,56	0,73	71,80	0,614	71,92	0,53
Sesudah Covid-19	2020	69,57	0,01	71,87	0,066	71,94	0,02
	2021	69,88	0,31	72,17	0,302	72,29	0,35

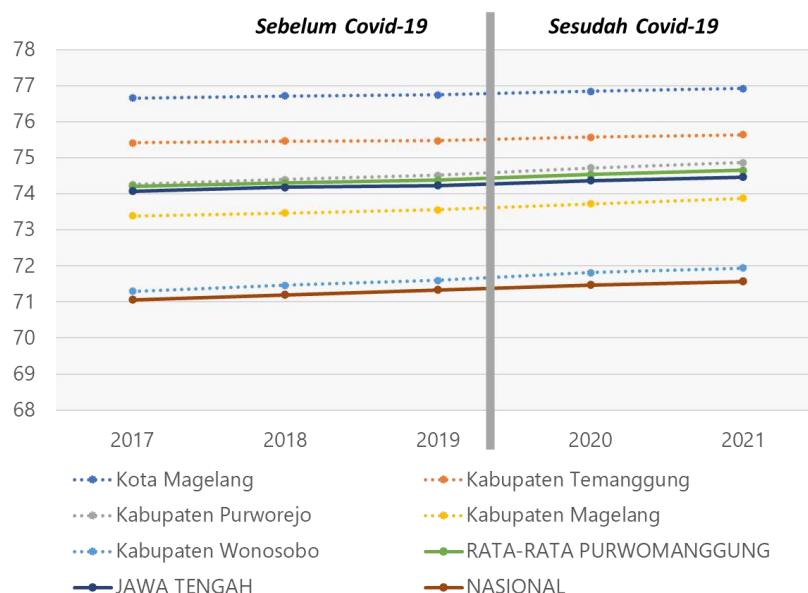
Sumber: BPS, 2021

Sementara itu, pertumbuhan Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran Riil per Kapita dari Kabupaten/Kota sewilayah Purwomanggung, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.34
Pertumbuhan AHH Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Sewilayah
Purwomanggung Tahun 2017-2021

Kab/Kota	AHH (tahun)					Pertumbuhan AHH				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Kab.Purworejo	74,26	74,40	74,52	74,72	74,87	0,16	0,19	0,16	0,27	0,20
Kab.Wonosobo	71,30	71,46	71,60	71,82	71,94	0,20	0,22	0,20	0,31	0,17
Kota Magelang	76,66	76,72	76,75	76,85	76,93	0,05	0,08	0,04	0,13	0,10
Kab.Magelang	73,39	73,47	73,56	73,72	73,88	0,08	0,11	0,12	0,22	0,22
Kab.Temanggung	75,42	75,47	75,48	75,58	75,64	0,04	0,07	0,01	0,13	0,08
RATA-RATA PURWOMANGGUNG	74,21	74,30	74,38	74,54	74,65	0,08	0,13	0,11	0,21	0,15
JAWA TENGAH	74,08	74,18	74,23	74,37	74,47	0,08	0,13	0,07	0,19	0,13
NASIONAL	71,06	71,20	71,34	71,47	71,57	0,23	0,20	0,20	0,18	0,14

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



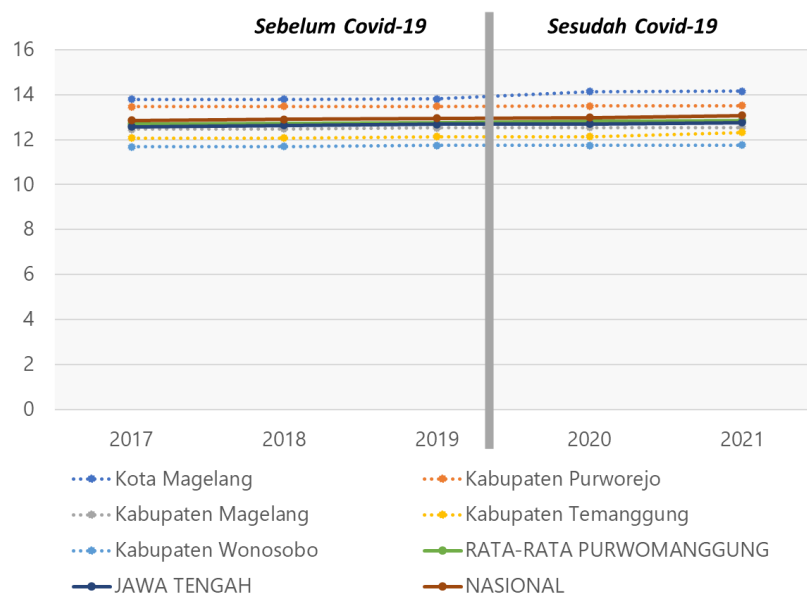
Gambar 2.17
Pertumbuhan AHH Kabupaten/Kota di Wilayah
Purwomanggung Tahun 2017-2021

Tabel 2.35
Pertumbuhan HLS Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Sewilayah
Purwomanggung Tahun 2017-2021

Kab/Kota	HLS (tahun)					Pertumbuhan HLS				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Kab.Purworejo	13,47	13,48	13,49	13,50	13,51	3,22	0,07	0,07	0,07	0,07
Kab.Wonosobo	11,68	11,69	11,74	11,75	11,76	0,09	0,09	0,43	0,09	0,09
Kota Magelang	13,79	13,80	13,81	14,14	14,15	1,77	0,07	0,07	2,39	0,07

Kab/Kota	HLS (tahun)					Pertumbuhan HLS				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Kab.Magelang	12,47	12,48	12,53	12,54	12,55	2,63	0,08	0,40	0,08	0,08
Kab.Temanggung	12,07	12,08	12,13	12,14	12,32	0,08	0,08	0,41	0,08	1,48
RATA-RATA	12,70	12,71	12,74	12,81	12,86	1,56	0,08	0,28	0,54	0,36
JAWA TENGAH	12,57	12,63	12,68	12,70	12,77	0,96	0,48	0,40	0,16	0,55
NASIONAL	12,85	12,91	12,95	12,98	13,08	1,02	0,47	0,31	0,23	0,77

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



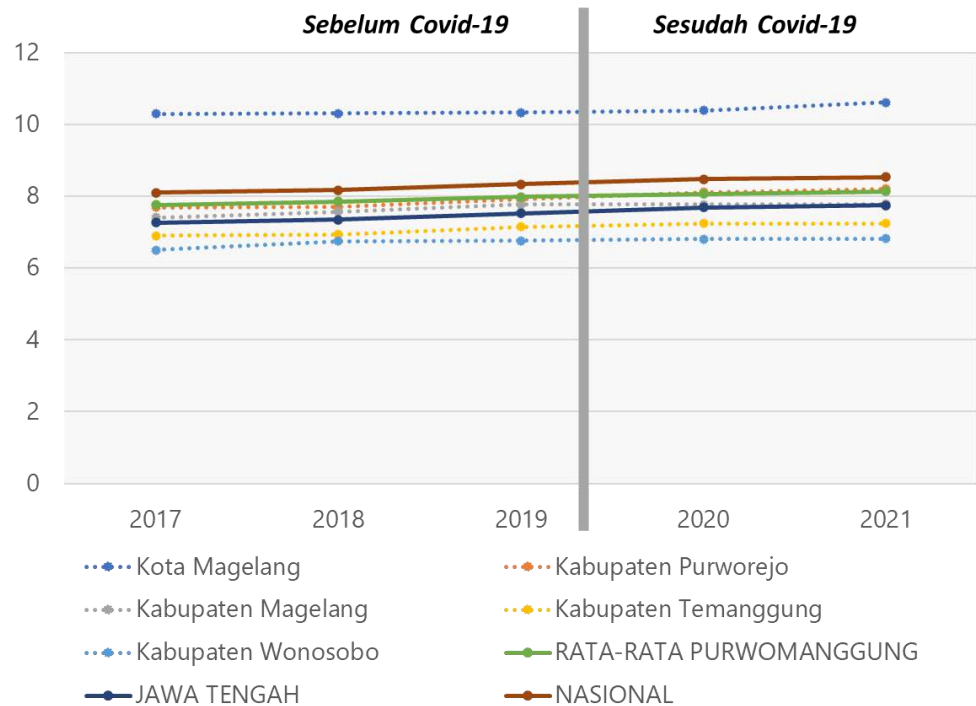
Gambar 2.18
Pertumbuhan HLS Kabupaten/Kota di Wilayah Purwomanggung Tahun 2017-2021

Tabel 2.36
Pertumbuhan RLS Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Sewilayah Purwomanggung Tahun 2017-2021

Kab/Kota	RLS (tahun)					Pertumbuhan RLS				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Kab.Purworejo	7,69	7,70	7,91	8,12	8,21	0,39	0,13	2,73	2,65	1,11
Kab.Wonosobo	6,51	6,75	6,76	6,81	6,82	6,37	3,69	0,15	0,74	0,15
Kota Magelang	10,30	10,31	10,33	10,39	10,62	0,10	0,10	0,19	0,58	2,21
Kab.Magelang	7,41	7,57	7,77	7,78	7,79	0,14	2,16	2,64	0,13	0,13
Kab.Temanggung	6,90	6,94	7,15	7,24	7,25	5,34	0,58	3,03	1,26	0,14
RATA-RATA	7,762	7,854	7,984	8,068	8,138	2,468	1,332	1,748	1,072	0,748
JAWA TENGAH	7,27	7,35	7,53	7,69	7,75	1,68	1,10	2,45	2,12	0,78
NASIONAL	8,10	8,17	8,34	8,48	8,54	1,89	0,86	2,08	1,68	0,71

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021





Gambar 2.19
Pertumbuhan RLS Kabupaten/Kota di Wilayah Purwomanggung
Tahun 2017-2021

Tabel 2.37
Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten
Temanggung dan Kabupaten/Kota Sewilayah Purwomanggung Tahun 2017-
2021

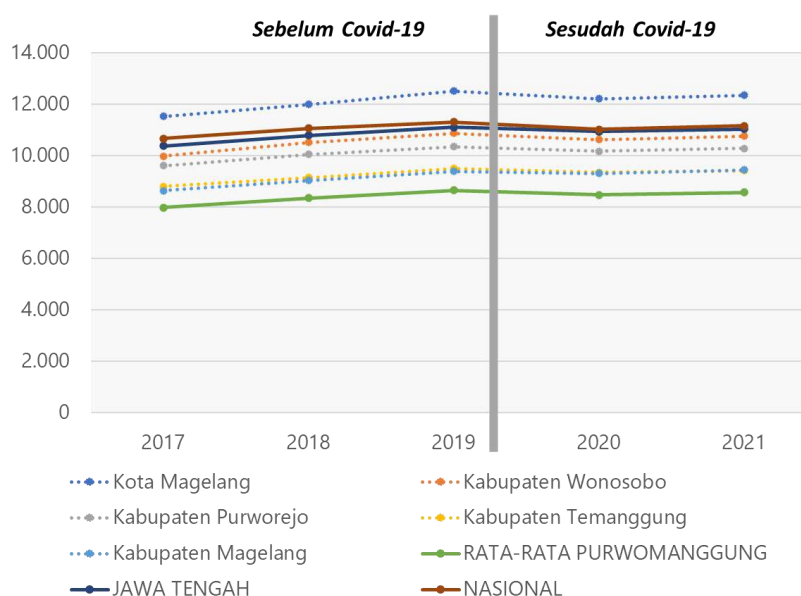
Kab/Kota	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (ribu Rp)					Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Kab.Purworejo	9.601	10.048	10.342	10.163	10.275	1,10	4,66	2,93	-1,73	1,10
Kab.Wonosobo	9.969	10.503	10.871	10.621	10.760	0,93	5,36	3,50	-2,30	1,31
Kota Magelang	11.525	11.994	12.514	12.210	12.349	3,92	4,07	4,34	-2,43	1,14
Kab.Magelang	8,627	9,025	9,387	9,301	9,440	1,48	4,61	4,01	-0,92	1,49
Kab.Temanggung	8.794	9.142	9.489	9.343	9.408	2,34	3,96	3,80	-1,54	0,70
RATA-RATA	7.980	8.339	8.645	8.469	8.560	1,95	4,53	3,72	-1,78	1,15
JAWA TENGAH	10.377	10.777	11.102	10.930	11.034	2,21	3,85	3,02	-1,55	0,95
NASIONAL	10.664	11.059	11.299	11.013	11.156	2,34	3,70	2,17	-2,53	1,30

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Tabel 2.38
Perbandingan Perubahan Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rp)
Kabupaten Temanggung, Rata-rata PURWOMANGGUNG dan Nasional
Sebelum dan Sesudah Covid-19

Tahun	Kabupaten Temanggung		Rata-rata PURWOMANGGUNG		Nasional		
	Realisasi	Pertumbuhan	Realisasi	Pertumbuhan	Realisasi	Pertumbuhan	
Sebelum Covid-19	2017	8.794	2,34%	9.703	2,01%	10.664	2,34%
	2018	9.142	3,96%	10.142	4,53%	11.059	3,70%
	2019	9.489	3,80%	10.521	3,73%	11.299	2,17%
Sesudah Covid-19	2020	9.343	-1,54%	10.328	-1,83%	11.013	-2,53%
	2021	9.408	0,70%	10.446	1,15%	11.156	1,30%

Sumber: BPS, 2021



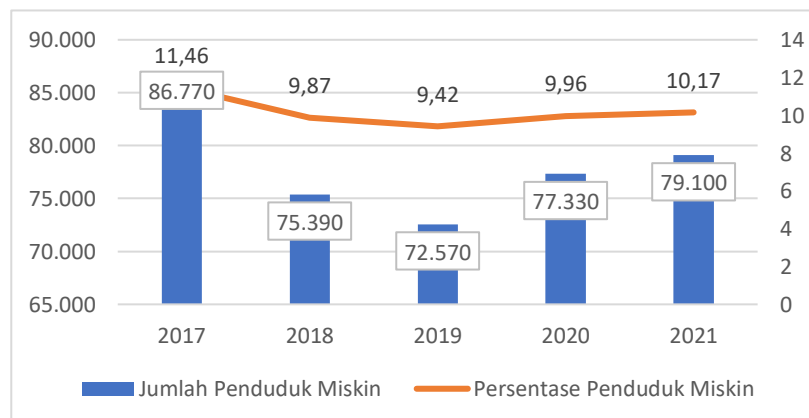
Gambar 2.20
Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan
Kabupaten/Kota di Wilayah Purwomanggung Tahun 2017-2021

Target IPM Nasional yang termuat di RKP 2021 ada di kisaran 71,98. Kabupaten Temanggung masih mempunyai harapan untuk meningkatkan IPM mendekati target Nasional dengan program-program prioritas yang ditetapkan dalam RKPD 2023 ini untuk meningkatkan IPM hingga selaras dengan target Nasional yaitu pada angka 71,98. Arah kebijakan yang ditempuh untuk mencapai target ini sesuai arahan Nasional yaitu:

- a. Meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas, terutama pada upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, penguatan upaya promotif dan preventif untuk mendorong masyarakat hidup sehat, serta mencegah penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan melalui percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dengan menjamin layanan pendidikan dasar berkualitas dan memperluas akses pendidikan menengah yang berkualitas, peningkatan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, serta pemerataan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi; dan
- c. Upaya urusan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui perbaikan iklim investasi dan usaha, peningkatan ketersediaan lapangan kerja yang layak, fasilitasi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan subsidi yang tepat sasaran bagi masyarakat miskin.

2.1.2.7 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu global dan masih menjadi prioritas pembangunan nasional. Perkembangan tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin) dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar:



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2021

Gambar 2.21
Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Temanggung
Tahun 2017-2021

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir turun dari 11,46% pada tahun 2017 menjadi 10,17% pada tahun 2021. Pada tahun 2018, tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung turun 1,59 % atau berkurang 11.380 jiwa. Namun pada tahun 2021 meningkat sebesar 2,11% yaitu di angka 10,17 sebagai dampak adanya pandemi covid-19. Realisasi dan perubahan tingkat Kemiskinan Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.39
Realisasi dan Perubahan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Tahun	Temanggung		Jawa Tengah		Nasional	
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan
2017	11,46	-0,14	13,01	-0,26	10,64	-0,22
2018	9,87	-1,59	11,32	-1,69	9,82	-0,82
2019	9,42	-0,45	10,80	-0,52	9,44	-0,38
2020	9,96	0,54	11,41	0,61	9,78	0,34
2021	10,17	0,21	11,79	0,38	10,14	0,36

Sumber: BPS, 2021 (menggunakan data Maret)

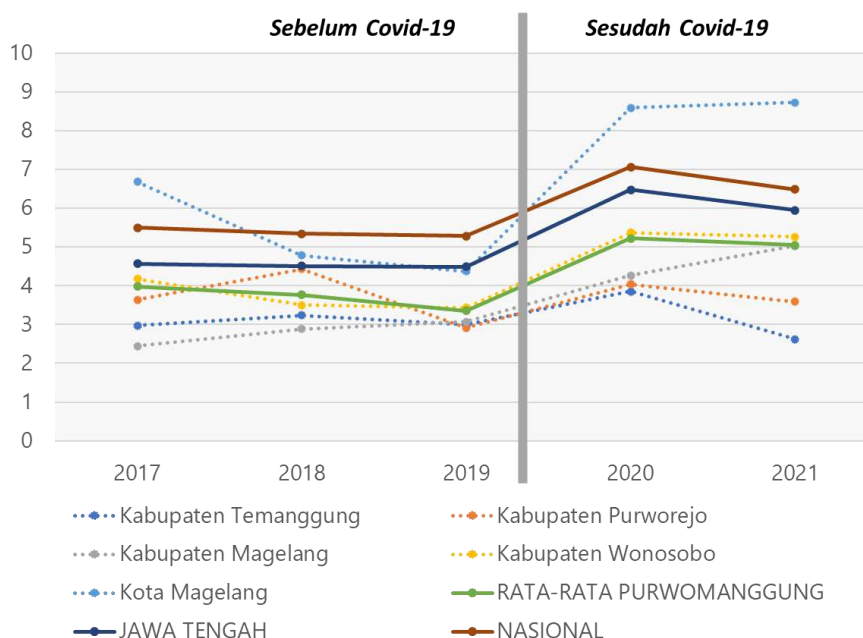
Tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan provinsi, namun lebih rendah dibandingkan capaian nasional. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat cukup berhasil menurunkan kemiskinan. Pada tahun 2019, persentase penduduk miskin turun dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 9,87 persen menjadi 9,42%. Namun dengan capaian 10,17 di tahun 2021, angka tersebut masih dibawah target yang telah ditetapkan. Target dan realisasi tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021 sebagai berikut :

Tabel 2.40
Target dan Realisasi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Tahun	Target		Realisasi	
	(%)	Jiwa	(%)	Jiwa
2017	11,3	98.058	11,46	86.770
2018	10,9	94.587	9,87	75.390

Tahun	Target		Realisasi	
	(%)	Jiwa	(%)	Jiwa
2019	9,36	81.223	9,42	72.570
2020	8,85	76.798	9,96	77.330
2021	8,34	72.372	10,17	79.100

Sumber: BPS 2021, (menggunakan data maret)



Gambar 2.22
Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Wilayah Purwomanggung Tahun 2017-2021

Perbandingan rasio perubahan presentase penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata capaian nasional tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41
Rasio Perubahan Presentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Rata-Rata Capaian Nasional Tahun 2017-2021

Tahun	Kabupaten Temanggung			Nasional		
	Presentase Penduduk Miskin		Pertumbuhan Ekonomi	Presentase Penduduk Miskin		Pertumbuhan Ekonomi
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Realisasi	Perubahan	Realisasi
2017	11,46	-0,14	5,03	10,12	-0,58	5,07
2018	9,87	-1,59	5,13	9,66	-0,46	5,17
2019	9,42	-0,45	5,05	9,22	-0,44	5,02
2020	9,96	0,54	-2,13	10,19	0,97	-2,07
2021	10,17	0,21	3,34	9,71	-0,48	3,69

Sumber: BPS 2021, (menggunakan data Maret)

Presentase penduduk miskin di Kabupaten Temanggung tahun 2021 naik sebesar 0,21 begitupun pertumbuhan ekonomi juga naik sebesar 3,34. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan menurunnya angka kemiskinan. Karena pertumbuhan ekonomi belum tentu berdampak bagi penduduk miskin. Mayoritas penduduk Kabupaten Temanggung adalah petani sedangkan penyumbang terbesar pertumbuhan adalah pada sektor jasa konstruksi.

Sedangkan posisi relatif dan perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung dan kabupaten/kota se-Wilayah Pengembangan Purwomanggung Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se Kawasan Purwomanggung, Tahun 2017-2021

Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kab.Purworejo	13,81	11,67	11,45	11,78	12,40
Kab.Wonosobo	20,32	17,58	16,63	17,36	17,67
Kota. Magelang	8,75	7,87	7,46	7,58	7,75
Kab.Magelang	12,42	11,23	10,67	11,27	11,91
Kab.Temanggung	11,46	9,87	9,42	9,96	10,17
RATA-RATA	13,35	11,64	11,13	11,59	11,98

Sumber: BPS, 2021 (menggunakan data Maret)

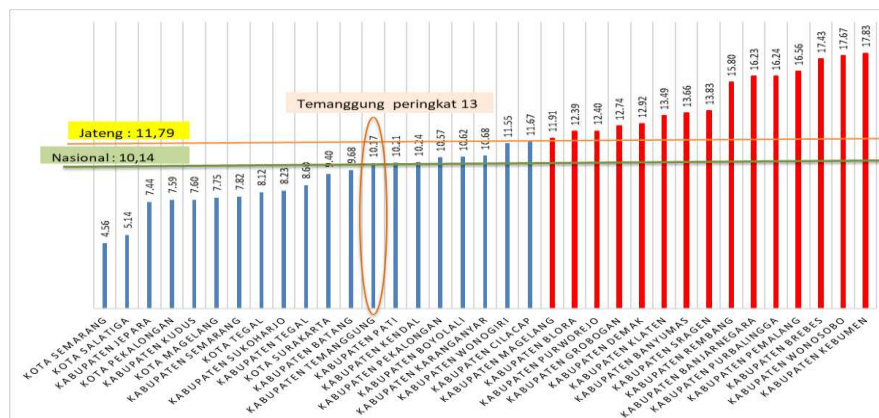
Tabel 2.43
Perubahan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung, Rata-rata PURWOMANGGUNG dan Nasional Sebelum dan Sesudah Covid-19

Tahun	Kabupaten Temanggung		Rata-rata PURWOMANGGUNG		Nasional		
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	
Sebelum Covid-19	2017	11,46	-0,14	13,35	-	10,12	-0,58
	2018	9,87	-1,59	11,64	-1,71	9,66	-0,46
	2019	9,42	-0,45	11,13	-0,51	9,22	-0,44
Sesudah Covid-19	2020	9,96	0,54	11,59	0,46	10,19	0,97
	2021	10,17	0,21	11,98	0,39	9,71	-0,48

Sumber: BPS, 2021

Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021 di Kawasan Purwomanggung menempati posisi kedua setelah Kota

Magelang. Hal ini menunjukkan bahwa posisi relatif tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung di Kawasan Purwomanggung lebih baik dari kabupaten yang lain. Sedangkan di Provinsi Jawa Tengah posisi relatif Kabupaten Temanggung menempati urutan ke 13 dibandingkan kabupaten/kota lain yaitu:



Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.23
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Selain itu, penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Adapun jumlah penduduk miskin dan pertumbuhannya di Kabupaten Temanggung, kabupaten/kota sewilayah Purwomanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.44
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se Kawasan Purwomanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)					Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Kab.Purworejo	98,65	83,55	82,17	84,79	88,80	-0,45	-15,31	-1,65	3,19	4,73
Kab.Wonosobo	159,16	138,32	131,35	137,64	139,67	-0,59	-13,09	-5,04	4,79	1,47
Kota Magelang	10,63	9,59	9,10	9,27	9,44	0,28	-9,78	-5,11	1,87	1,83
Kab.Magelang	157,15	143,44	137,45	146,34	154,91	-1,10	-8,72	-4,18	6,47	5,86
Kab.Temanggung	86,77	75,39	72,57	77,33	79,09	-0,38	-13,12	-3,74	6,56	2,28
RATA-RATA	102,47	90,06	86,53	91,07	94,38	-0,45	-12,00	-3,94	4,58	3,23
JAWA TENGAH	4.450,72	3.897,20	3.743,23	3.980,90	4.109,75	-1,25	-12,44	-3,95	6,35	3,24
NASIONAL	27.771,22	25.949,80	25.144,72	26.424,02	27.542,77	0,02	-6,56	-3,10	5,08	4,23

Sumber: BPS, 2021, data diolah (menggunakan data Maret)

Tabel 2.45
Perubahan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung, Rata-rata
PURWOMANGGUNG dan Nasional Sebelum dan Sesudah Covid-19

Tahun		Kabupaten Temanggung		Rata-rata PURWOMANGGUNG		Nasional	
		Realisasi	Pertumbuhan	Realisasi	Pertumbuhan	Realisasi	Pertumbuhan
Sebelum Covid-19	2017	86.770	-0,38%	102.470	-0,45%	27.771.220	0,02%
	2018	75.390	-13,12%	90.060	-12,11%	25.949.800	-6,56%
	2019	72.570	-3,74%	86.530	-3,92%	25.144.720	-3,10%
Sesudah Covid-19	2020	77.330	6,56%	91.070	5,25%	26.424.020	5,09%
	2021	79.100	2,29%	94.380	3,63%	27.542.770	4,23%

Sumber: BPS, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami kenaikan pasca pandemi Covid-19. Kondisi tersebut tidak terlepas dari pengaruh atau dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan gangguan pada aktivitas ekonomi yang berlangsung di Kabupaten Temanggung. Jika dibandingkan dengan capaian rata-rata PURWOMANGGUNG dan Nasional, Kabupaten Temanggung memiliki capaian yang relatif lebih baik pada kondisi setelah terjadi pandemi Covid-19. Sedangkan pada kondisi sebelum Covid-19, capaian perubahan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung lebih baik dibanding nasional meskipun masih dibawah rata-rata PURWOMANGGUNG.

2.1.2.8 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar melihat berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, akan tetapi juga memperhatikan tingkat kedalaman (P1) dan keparahan dari kemiskinan (P2). Semakin kecil P1 maupun P2 semakin baik karena menunjukkan semakin kecilnya kedalaman dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin baik terhadap Garis Kemiskinan maupun di antara penduduk miskin itu sendiri. Tahun 2021 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung sebesar 1,57% berada di atas angka Provinsi

Jawa Tengah sebesar 1,91% dan Nasional sebesar 1,67%. Hal ini berarti rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas garis kemiskinan di Kabupaten Temanggung lebih baik daripada tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Kawasan Purwomanggung dibandingkan dengan Provinsi Jateng dan Nasional Tahun 2021 yaitu:

Tabel 2.46
Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten/Kota di Kawasan Purwomanggung Dibandingkan Jateng dan
Nasional Tahun 2021

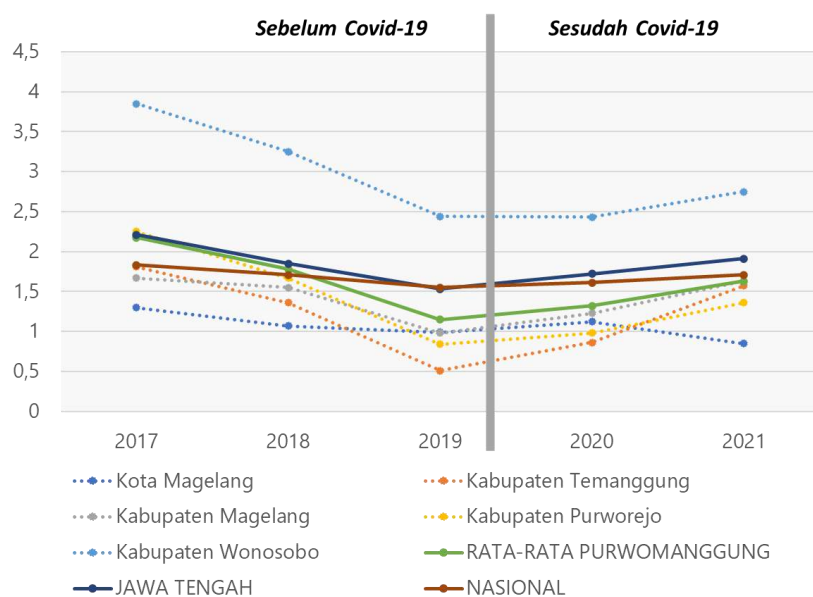
No.	Kabupaten/Kota	P1	P2	GK (Rp/Kap /Bln)
1	Kab. Purworejo	1,36	0,28	376,127
2	Kab. Wonosobo	2,75	0,65	373.474
3	Kota Magelang	0,85	0,15	537.783
4	Kab. Magelang	1,63	0,35	353.608
5	Kab. Temanggung	1,57	0,39	336.034
Rata-Rata		1,63	1,63	0,36
Provinsi Jawa Tengah		1,91	1,91	0,45
Nasional		1,67	1,67	0,42

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021 (data diolah)

Tabel 2.47
Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota
di Kawasan Purwomanggung Dibandingkan Jateng dan Nasional Tahun
2017-2021

Kab/Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)					Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Kab.Purworejo	2,25	1,67	0,84	0,98	1,36	-0,42	-0,58	-0,83	0,14	0,38
Kab.Wonosobo	3,85	3,25	2,44	2,43	2,75	-0,17	-0,60	-0,81	-0,01	0,33
Kota Magelang	1,30	1,07	0,99	1,12	0,85	0,1	-0,23	-0,08	0,13	-0,27
Kab.Magelang	1,67	1,55	0,98	1,23	1,63	-0,17	-0,12	-0,57	0,25	0,40
Kab.Temanggung	1,81	1,36	0,51	0,86	1,57	0,11	-0,45	-0,85	0,35	0,71
RATA-RATA	2,176	1,78	1,15	1,32	1,63	-0,11	-0,40	-0,63	0,17	0,31
JAWA TENGAH	2,21	1,85	1,53	1,72	1,91	-0,16	-0,36	-0,32	0,19	0,19
NASIONAL	1,83	1,71	1,55	1,61	1,71	-0,11	-0,12	-0,16	0,06	0,10

Sumber: BPS, 2021 (menggunakan data Maret)

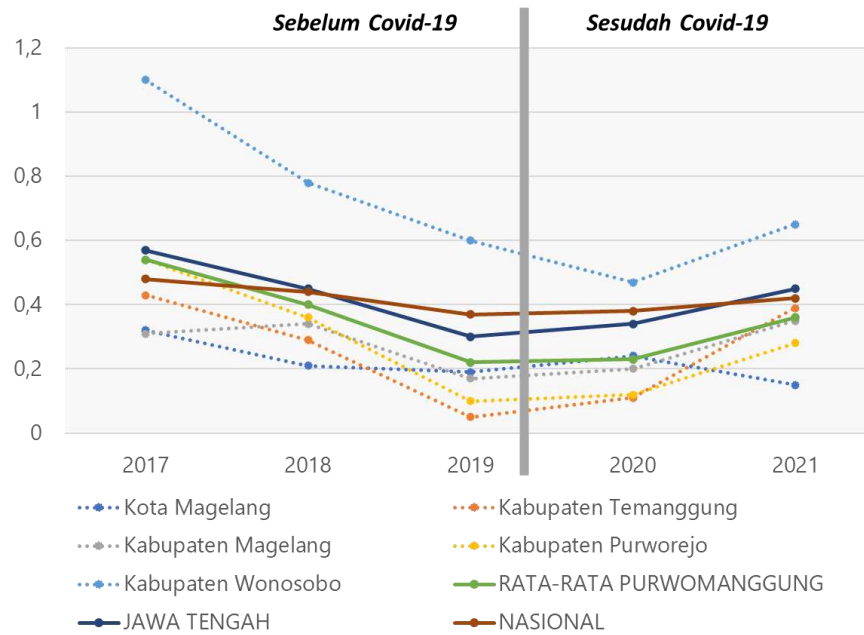


Gambar 2.24
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten/Kota di Wilayah Purwomanggung Tahun 2017-2021

Tabel 2.48
Perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota di Kawasan Purwomanggung Dibandingkan Jateng dan Nasional Tahun 2017-2021

Kab/Kota	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)					Perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Kab.Purworejo	0,54	0,36	0,10	0,12	0,28	-0,22	-0,18	-0,26	0,02	0,16
Kab.Wonosobo	1,1	0,78	0,60	0,47	0,65	-0,01	-0,32	-0,32	0,01	0,18
Kota Magelang	0,32	0,21	0,19	0,24	0,15	0,09	-0,11	-0,02	0,05	-0,08
Kab.Magelang	0,31	0,34	0,17	0,2	0,35	-0,13	0,03	-0,17	0,03	0,15
Kab.Temanggung	0,43	0,29	0,05	0,11	0,39	0,04	-0,14	-0,24	0,06	0,28
RATA-RATA	0,54	0,40	0,22	0,23	0,36	-0,05	-0,14	-0,20	0,03	0,14
JAWA TENGAH	0,57	0,45	0,3	0,34	0,45	-0,06	-0,12	-0,15	0,04	0,11
NASIONAL	0,48	0,44	0,37	0,38	0,42	-0,04	-0,04	-0,07	0,01	0,04

Sumber : BPS, 2021 (menggunakan data Maret)



Gambar 2.25
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten/Kota di Wilayah Purwomanggung Tahun 2017-2021

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

1) Angka Harapan Lama Sekolah

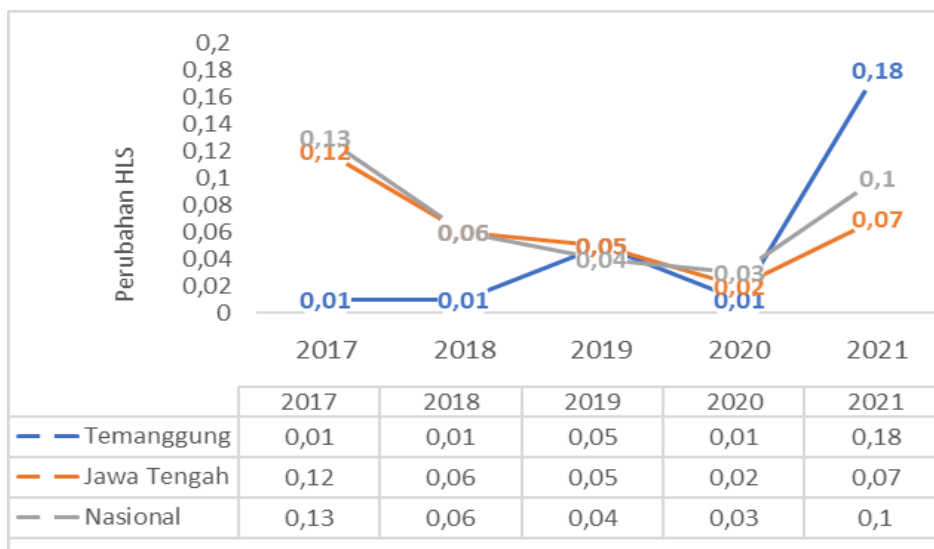
Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yaitu:

Tabel 2.49
Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

No	Tahun	Harapan Lama Sekolah (Tahun)			
		Target RKP	Realisasi		
			Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
1	2017	n.a	12,07	12,57	12,85
2	2018	n.a	12,08	12,63	12,91
3	2019	12,21	12,13	12,68	12,95
4	2020	12,28	12,14	12,70	12,98
5	2021	12,35	12,32	12,77	13,08

Sumber: BPS, 2021

AHLS di Kabupaten Temanggung dari tahun 2017-2021 mengalami kenaikan setiap tahunnya. AHLS Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 adalah 12,32 tahun. Capaian terhadap target 2021 adalah 99,76% berarti mendekati target akhir dalam perubahan RPJMD 2018-2023 yaitu 12,35 tahun.



Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.26
Grafik Perubahan AHLS Tahun 2017-2021

AHLS Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 0,17 dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini menggambarkan bahwa akses terhadap pendidikan semakin baik. Masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan pendidikan wajib sampai dengan lulus SMA/ sederajat. Meningkatnya AHLS di Kabupaten Temanggung, menjadi salah satu elemen yang meningkatkan IPM pada tahun 2021 (69,88). IPM Kabupaten Temanggung tahun 2021 meningkat 0,31 poin dibandingkan dengan tahun 2020 (69,57).

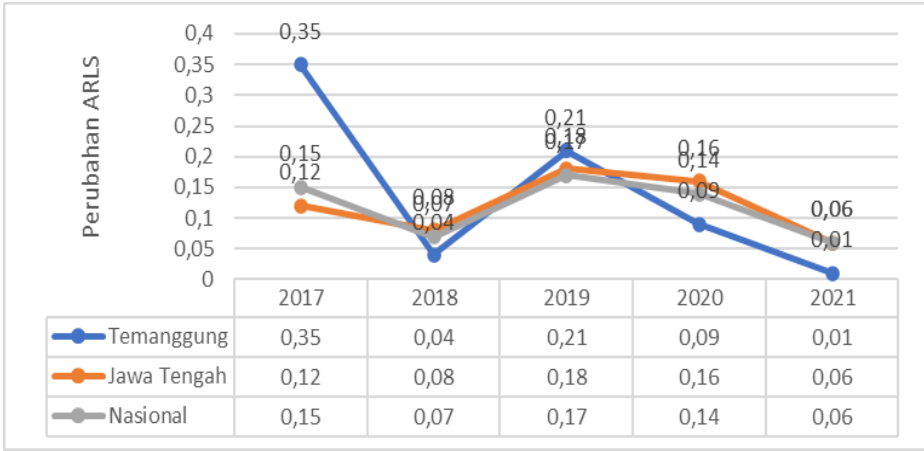
2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.50
Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

No	Tahun	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)			
		Target RKPD	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
1	2017	n.a.	6,90	7,27	8,10
2	2018	n.a.	6,94	7,35	8,17
3	2019	7,20	7,15	7,53	8,34
4	2020	7,35	7,24	7,69	8,48
5	2021	7,50	7,25	7,75	8,54

Sumber: BPS, 2021



Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.27
Grafik Perubahan ARLS 2017-2021

ARLS Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 sampai 2021 cenderung meningkat. ARLS Kabupaten Temanggung lebih rendah dari Provinsi dan Nasional. Rendahnya ARLS Kabupaten Temanggung antara lain disebabkan karena di Kabupaten Temanggung terdapat siswa yang putus sekolah, anak usia sekolah yang tidak sekolah, lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs, dan lulusan SMP/MTs yang tidak melanjutkan ke SMA/SMK/MA.

3) Angka Partisipasi Kasar (APK).

Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.51
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Temanggung
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	APK SD Sederajat Temanggung	112,13	110,39	106,89	106,86	98,07
2	APK SD /Sederajat Jawa Tengah	108,44	108,18	107,74	106,32	106,40
3	APK SMP Sederajat	98,17	96,42	97,26	98,17	98,56
4	APK SMP/Sederajat Jawa Tengah	91,09	91,96	91,70	93,21	94,00
5	APK PAUD 0-6 Tahun	38,21	32,91	37,53	38,27	40,31
6	APK PAUD 4-6 Tahun	73,85	73,72	73,99	74,16	72,07

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2021

Pada tahun 2021 APK SD/Sederajat Kabupaten Temanggung mengalami penurunan sebesar 8,79% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini karena adanya pemberlakuan wajib masuk SD/ sederajat dengan usia minimal 7 tahun, sehingga APK PAUD mengalami peningkatan. Sedangkan APK SMP/ sederajat Kabupaten Temanggung mengalami kenaikan dan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan APK Jawa Tengah.

4) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.52
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Jenis Sekolah	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	APM SD/ Sederajat Kabupaten Temanggung	96,65	96,88	96,97	97,62	91,24
2	APM SD/Sederajat Provinsi Jawa Tengah	97,13	97,75	97,77	97,77	98,22
3	APM SMP/Sederajat Kabupaten Temanggung	84,20	84,43	84,52	85,25	77,18
4	APM SMP/Sederajat Provinsi Jawa Tengah	79,13	79,31	79,84	79,84	80,99

Sumber : Dindikpora Kab. Temanggung , 2021

Menurunnya APM SMP/Sederajat diantaranya disebabkan terdapat anak usia 13-15 tahun yang sudah bersekolah di jenjang pendidikan menengah, dan berbagai faktor termasuk salah satunya adalah pandemi Covid-19.

5) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.53

Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Kelompok Usia	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	4-6 Tahun	74,00	75,28	85,07	86,72	81,81
2	7-12 Tahun	99,60	99,63	99,61	99,98	97,91
3	13-15 Tahun	99,80	99,82	99,83	102,60	92,61

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2021

Keadaan ekonomi yang masih belum stabil menjadi salah satu faktor pendukung menurunnya APS di Kabupaten Temanggung seiring dengan tingkat kemiskinan yang mengalami kenaikan di tahun 2021.

6) Angka Putus Sekolah (APtS)

Angka Putus Sekolah di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.54

Angka Putus Sekolah (APtS) Kabupaten Temanggung 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	APtS SD/MI	0,08	0,05	0,04	0,03	0,03
2.	APtS SMP/MTs	0,30	0,30	0,29	0,21	0,37

Sumber : Dindikpora Kab. Temanggung ,2021

APtS SMP/MTs pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 0,37%. Meningkat 0,16 dibandingkan dengan tahun 2020. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya APtS pada siswa SD/MI dan SMP/MTs umumnya adalah faktor motivasi anak, perhatian/persepsi orang tua siswa, memiliki kebutuhan khusus (anak berkebutuhan khusus), budaya, dan faktor ekonomi orang tua siswa. Selain faktor-faktor tersebut di atas,

pada tahun 2021 pandemi Covid-19 juga memberikan andil terhadap terjadinya APTS pada siswa SD/MI dan SMP/MTs.

7) Angka Kelulusan (AL)

Angka Kelulusan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.55
Angka Lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan Pendidikan Kesetaraan
Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka lulusan SD	100	100	100	100	100
2	Angka lulusan SMP	100	100	99,99	100	100
3	Angka Lulusan Pendidikan Kesetaraan	89,26	96,69	96,80	98,10	85,86

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2021

AL SD/MI, AL SMP/MTs selama 6 tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Bahkan pada tahun terakhir baik AL SD/MI dan AL SMP/MTs telah mencapai angka ideal 100%, AL Pendidikan Kesetaraan mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 98,10% pada tahun 2020 menjadi 85,86% pada tahun 2021. Menurunnya AL Pendidikan Kesetaraan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah tidak semua warga belajar yang telah terdaftar sebagai peserta Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) dapat mengikuti UPK karena tidak mendapatkan ijin dari perusahaan tempatnya bekerja.

8) Angka Melanjutkan (AM)

Tabel berikut menunjukkan perkembangan AM SD/MI ke SMP/MTs Kabupaten Temanggung tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 2.56
Persentase Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs
Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah siswa baru tingkat I SMP/MTs	11.229	11.224	11.311	12.015	12.953
2	Jumlah lulusan SD/MI	11.542	11.529	11.586	12.286	13.189
3	Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	97,29	97,35	97,63	97,79	98,21

Sumber : Dindikpora Kab. Temanggung, 2021

AM SD/MI ke SMP/MTs menunjukkan peningkatan. Belum optimalnya AM SD/MI ke SMP/MTs disebabkan adanya lulusan SD/MI yang melanjutkan ke luar daerah, ke jalur nonformal, dan tidak melanjutkan baik ke jalur formal maupun nonformal.

9) Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Temanggung yaitu:

Tabel 2.57

Rasio Ketersediaan Sekolah Kabupaten Temanggung 2017-2021

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	TK/RA/BA	142,37	141,63	136,76	143,26	150,55
2	SD/MI	82,82	82,51	78,20	77,01	75,21
3	SMP/MTs	31,40	31,96	31,95	31,98	31,26

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2021

Pada tahun 2021 ketersediaan sekolah TK/RA/BA naik 5,7%, karena jumlah peserta didik bertambah. Penurunan jenjang SD/MI serta SMP/MTs dikarenakan adanya peraturan sistem zonasi yang secara tidak langsung mengurangi jumlah sekolah akibat peleburan atau karena berkurangnya jumlah peserta didik.

10) Persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Baik

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, mulai tahun 2019 indikator kinerja Persentase Ruang Kelas kondisi baik yang dihitung hanya SD Negeri dan SMP Negeri, sedangkan jenjang TK/RA/BA tidak ada indikator kinerjanya.

Tabel 2.58

Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI	85,48	76,12	77,51	78,13	43,21
2	SMP/MTs	88,25	88,78	92,17	92,25	53,68

Sumber: Dindikpora Kab. Temanggung, 2021

Pada tahun 2021 Persentase Ruang Kelas SD Negeri dalam Kondisi Baik sebesar 43,21%, dan SMP Negeri sebesar 53,68%.

11) Persentase Sekolah Terakreditasi Minimal B

Selama kurun waktu 2017-2021 Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B pada semua jenjang/jenis pendidikan cenderung fluktuatif.

Tabel 2.59
Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B
Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-2021

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019*)	2020*)	2021*)
1	SD/MI	94,98	94,39	95,39	98,39	97,93
2	SMP/MTs	92,52	85,50	90,91	91,03	88,75
3	TK/RA/BA	52,72	46,50	47,84	56,75	56,06
4	Satuan PNF	20,37	24,07	27,78	29,51	31,15

Sumber: Dindikpora Kab. Temanggung, 2021. *) TK, SD dan SMP

Pada tahun 2021 semua satuan pendidikan terakreditasi B mengalami penurunan. Hal ini berhubungan dengan ketersediaan sekolah. Sekolah TK/RA/BA yang mengalami peningkatan sekolah baru sebanyak 5,7% sehingga masih banyak sekolah TK/RA/BA yang masih baru beroperasi. Pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs mengalami penurunan sebanyak 2,3% dan 2,5%. Indikator Satuan PNF yang terakreditasi merupakan suplemen untuk memperkaya informasi dimana terjadi peningkatan Satuan PNF yang terakreditasi yaitu 27,78% pada tahun 2019 menjadi 31,15% pada tahun 2021.

12) Rasio Siswa per Guru

Rasio siswa per guru di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.60
Rasio Siswa per Guru Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun					Perubahan Rasio di 2021
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	TK/RA/BA						
1.1	Rasio Siswa per Guru	14,05	13,90	13,08	12,20	16,05	3,85
1.2	Rasio Guru per 1000 Siswa	71,19	71,93	76,45	81,95	62,32	(-)19,63

No	Uraian	Tahun					Perubahan Rasio di 2021
		2017	2018	2019	2020	2021	
2	SD/MI						
2.1	Rasio Siswa per Guru	14,28	14,54	16,45	19,18	16,79	(-)2,39
2.2	Rasio Guru per 1000 Siwa	70,04	68,77	60,78	52,20	59,55	7,35
3	SMP/MTs						
3.1	Rasio Siswa per Guru	15,16	14,95	13,27	15,36	16,60	1
3.2	Rasio Guru per 1000 Siwa	65,96	66,89	75,36	65,10	60,25	(-)5

Sumber: Dindikpora Kab. Temanggung, 2021

Pada tabel diatas menggambarkan bahwa untuk ketersediaan guru TK/RA/BA meningkat, hal ini disebabkan bertambahnya jumlah TK/RA/BA di tahun 2021. Sedangkan untuk di tingkat SD/MI semakin baik. Adapun tingkat SMP/MTs meningkat di tahun 2021.

13) Pendidik yang Memiliki Sertifikat Pendidik

Pendidik yang memiliki sertifikat pendidik di Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.61
Persentase Pendidik yang Memiliki Sertifikat Pendidik
Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Jenjang	Tahun				
		2017	2018	2019*)	2020*)	2021*)
1	SD/MI	52,52	53,96	49,70	50,61	56,13
2	SMP/MTs	60,46	60,67	64,23	62,48	58,55
3	TK/RA/BA	44,44	44,75	46,88	44,51	37,87

Sumber: Dindikpora Kab Temanggung, 2021. *) Hanya TK, SD, dan SMP

Pada tingkat SD/MI jumlah guru bersertifikasi meningkat sebesar 5,52%, didukung dengan meningkatnya jumlah guru di kabupaten Temanggung yang berkompeten.

14) Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.62
Persentase Pendidik yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4
Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Jenjang	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	TK/RA/BA	66,80	67,57	68,04	65,83	80,62

No	Jenjang	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
2	SD/MI	88,01	90,18	90,22	89,90	89,90
3	SMP/MTs	94,57	94,66	94,94	93,47	94,16

Sumber: Dindikpora Kab Temanggung, 2021

Guru bersertifikasi di tingkat TK/RA/BA mengalami peningkatan tertinggi dibandingkan dengan jenjang yang lain. Hal ini karena bertambahnya jumlah TK/RA/BA di Kabupaten Temanggung yang didukung dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendidikan di Kabupaten Temanggung, serta melaksanakan amanat Permendiknas NO 16 tahun 2017, dimana kompetensi guru PAUD/TK/RA-SMA diwajibkan minimal S1.

15) Angka Melek Huruf (AMH) Usia >15 Tahun

Angka melek huruf di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir semakin meningkat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.63

Angka Melek Huruf Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jml Penduduk Usia >15 Tahun Bisa Membaca dan Menulis	555.782	563.031	572.044	587.720	619.995
2	Jumlah Penduduk Usia >15 Tahun	564.360	571.547	580.932	596.625	628.120
3	Angka Melek Huruf	98,48	98,51	98,47	98,51	98,71

Sumber: Dindikpora Kab Temanggung, 2021

Pada tahun 2017 AMH sebesar 98,48% dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 meningkat menjadi 98,71%. Perkembangan AMH meningkat kurang signifikan yaitu sekitar 0,23% setiap tahun. Untuk mencapai AMH 100% sangat sulit karena sebagian besar penduduk buta huruf telah berusia lanjut > 65 tahun yang tersebar di hampir seluruh wilayah.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

1) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) dihitung oleh BPS dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau Mortpack. Angka Harapan Hidup penduduk di Kabupaten Temanggung yaitu:



Tabel 2.64
Angka Harapan Hidup Kabupaten Temanggung
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Angka Harapan Hidup /AHH	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Temanggung	75,42	75,47	75,48	75,58	75,64
Jawa Tengah	74,08	74,18	74,23	74,37	74,47
Nasional	71,06	71,20	71,34	71,47	71,57

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2021

AHH di Kabupaten Temanggung telah mencapai 75,64 tahun dan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selalu terjadi peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena lama hidup seseorang tidak terlepas dari tingkat kesehatan yang bersangkutan. Derajat Kesehatan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh peningkatan pelayanan kesehatan baik akses maupun mutu pelayanan, penyehatan lingkungan, asupan gizi yang baik, tingkat kepedulian dan perawatan terhadap kesehatan sehingga angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan pada umumnya.

Secara mikro, individu dengan harapan hidup yang tinggi secara ekonomis memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan yang tinggi. Keluarga dengan usia harapan hidup yang tinggi cenderung untuk menginvestasikan pendapatannya di bidang pendidikan dan menabung. Dengan demikian, tabungan nasional akan meningkat, investasi akan meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan pembangunan.

2) Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.65
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kasus kematian ibu	7	9	9	10	17
2	Jumlah kelahiran hidup	10.378	10.272	10.555	10.435	9.749
3	AKI Kabupaten	67,45	87,62	85,27	95,83	174,38

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Temanggung					

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2021

Angka kematian ibu mengalami peningkatan selama periode 2017-2021. Pada tahun 2021 Angka Kematian Ibu meningkat secara drastis yaitu sebesar 174,38 per 100.000 kelahiran hidup dengan jumlah kematian ibu sebanyak 17 kematian dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 95,83 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang menjadi penyebab kematian ibu tertinggi di tahun 2021 yakni 9 orang (52,94%). Angka Kematian Ibu di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 tahun terakhir, rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan Angka Kematian Ibu di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.66

Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Temanggung dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

No	Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Temanggung	67,45	87,62	85,27	95,83	174,38
2	Jawa Tengah	88,58	78,60	76,93	98,60	199

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2021

Selain karena Covid-19, penyebab kematian ibu di Kabupaten Temanggung tahun 2021 adalah karena pre eklampsia sebanyak 3 orang (17,64%), perdarahan sebanyak 1 orang (5,8%) infeksi sebanyak 1 orang (5,8%), *cardiac arrest* sebanyak 2 orang (11,765) dan lain-lain sebanyak 1 orang (5,8%).

3) Angka Kematian Bayi

Pada tahun 2021 jumlah kematian bayi sebanyak 124 kematian tersebar di seluruh Kecamatan dan Puskesmas.

Tabel 2.67

Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup
di Kabupaten Temanggung Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kasus kematian bayi	137	132	132	132	124

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
2.	Jumlah Kelahiran Hidup (Jiwa)	10.378	10.272	10.555	10.435	9.749
3.	Angka Kematian Bayi	13,20	12,85	12,51	12,65	12,72

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian *neonatal* (0-28 hari) menjadi penting karena kematian *neonatal* memberi kontribusi paling besar yaitu sebanyak 93 (75,76%) kasus dari 124 kasus kematian bayi di Kabupaten Temanggung tahun 2021. Kematian bayi paling banyak terjadi di Puskesmas Parakan, Kandangan dan Tretep sedangkan mayoritas penyebab kematian adalah BBLR, asfiksia dan kelainan *kongenital*.

4) Prevalensi Balita Gizi Buruk

Prevalensi Balita gizi buruk di kabupaten Temanggung sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami penurunan yaitu < 0,5 %.

Tabel 2.68
Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Temanggung
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah balita gizi buruk	186	157	142	93	93
2	Jumlah balita	52.903	52.303	51.936	50.297	51.545
3	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,35	0,30	0,27	0,18	0,18

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2021

Persentase balita gizi buruk cenderung fluktuatif, angka ini selalu ada di bawah 10%, termasuk kategori rendah menurut WHO dan masih berada di bawah target nasional yaitu kurang dari 0,5%. Status gizi balita bersifat labil, karena sangat dipengaruhi pola asupan makanan bergizi dan penyakit penyerta, misalnya BBLR, diare, cacingan, demam berdarah, thypus dan lain-lain.

5) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Jamban Sehat

Pada tahun 2019 Kabupaten Temanggung telah mendeklarasikan ODF (*Open Defecation Free*) tingkat kabupaten, dengan dilakukan percepatan salah satunya adalah melalui program bantuan sosial pembangunan jamban bagi keluarga miskin di tahun 2019.

Tabel 2.69
Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses terhadap Jamban Sehat di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah RT yang memiliki akses thd jamban	137.085	202.231	213.133	251.534	196.684
2	Jumlah Rumah Tangga	226.618	233.358	257.391	257.391	196.684
3	Persentase	60,49	86,66	82,81	97,72	100

Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Temanggung, 2021

Pada tahun 2021 akses terhadap jamban di Kabupaten Temanggung meningkat menjadi 100%.

6) Persentase Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standar Kompetensi

Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 100%.

Tabel 2.70
Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi Standar Kompetensi di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	696	647	825	891	1.507
2	Jumlah Tenaga kesehatan	772	680	850	891	1507
3	Persentase Tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	90,6	95,5	97,6	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2021

Peningkatan tersebut didorong karena meningkatnya kesadaran tenaga kesehatan dalam meningkatkan kompetensi minimal pendidikannya sesuai dengan amanat Undang-Undang

tentang Tenaga Kesehatan. Peningkatan kompetensi pendidikan tersebut ditempuh melalui program ijin belajar jalur biasa dan ijin belajar RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau).

7) Persentase Ketersediaan Obat Sesuai Kebutuhan

Tabel 2.71
Persentase Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan
Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah obat yang tersedia sesuai kebutuhan	141	144	127	124	129
2	Jumlah kebutuhan obat	145	148	128	126	132
3	Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	97,2	97,3	99,22	98,57	97.73

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung , 2021

Ketersediaan Obat sesuai kebutuhan belum bisa 100% karena proses perencanaan dan pengadaan obat di Kabupaten diadakan setahun sekali di awal tahun sehingga dimungkinkan terjadi perubahan dalam kebutuhan dalam bulan-bulan terakhir yang disebabkan karena perubahan dari segi jumlah pasien yang berobat (metode konsumsi) dan jenis penyakit yang muncul (metode epidemiologi) sehingga tidak bisa tepat 100%. Kecuali itu untuk beberapa jenis obat program juga timbul permasalahan yang sama apalagi untuk obat program pengadaan di tingkat pusat dan kita hanya menerima *dropping* saja sehingga sering timbul masalah kekosongan obat program. Untuk mengatasi permasalahan tersebut sudah ditempuh jalan dengan melakukan perencanaan dengan penambahan untuk waktu tunggu / *lead time* maksimal 6 bulan dan *buffer stock/stock* penyangga untuk mengatasi kekosongan obat maksimal 20% serta penyusunan rencana kebutuhan obat yang semakin baik setiap tahunnya dan melakukan penyusunan RKO obat program dan dikirim ke provinsi setiap tahunnya.

8) Persentase Puskesmas yang Sarprasnya sesuai Standar

Persentase Puskesmas yang sarana prasarannya sesuai standar dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.72
Persentase Gedung Puskesmas sesuai Standar
di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Puskesmas sesuai standar :	24	25	25	25	26
	a. Puskesmas Rawat Inap	4	5	5	5	6
	b. Puskesmas Non Rawat Inap	20	20	20	20	20
2	Jumlah Puskesmas :	25	25	26	26	26
	a. Puskesmas Rawat Inap	5	5	5	5	6
	b. Puskesmas Non Rawat Inap	20	20	21	21	20
3	Persentase Puskesmas sesuai standar :	96%	100%	96,15	96,15	100
	a. Puskesmas Rawat Inap	80%	100%	100%	100%	100
	b. Puskesmas Non Rawat Inap	100%	100%	95,24%	95,24%	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2021

Perkembangan persentase Gedung puskesmas sesuai standar pada tahun 2017-2021 mengalami peningkatan menjadi 100%.

9) Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Rumah Tangga Strata Utama dan Paripurna

Persentase PHBS Rumah Tangga Strata Utama dan Paripurna dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.73
Persentase PHBS Rumah Tangga Kabupaten Temanggung
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rumah Tangga ber PHBS strata Utama dan Paripurna	185.268	191.828	208.607	197.523	201.477
2	Jumlah Rumah Tangga yang dipantau	224.062	226.640	233.989	212.574	213.410
3	Persentase Rumah Tangga ber PHBS strata Utama dan Paripurna	82,69%	84,64%	89,15%	92,92%	94,42%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2021

Tahun 2021 capaian persentase PHBS rumah tangga di Kabupaten Temanggung sudah berada di atas target provinsi (70%). Hal ini menunjukkan peningkatan PHBS di masyarakat mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun 2017-2021.

10) Persentase desa bebas rawan gizi

Desa Bebas Rawan Gizi merupakan suatu wilayah kerja

lurah/kepala desa dengan prevalensi gizi kurang dan gizi buruk pada balita sebesar 15% atau lebih pada kurun waktu tertentu.

Tabel 2.74

Desa Bebas Rawan Gizi di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

NO	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa bebas rawan Gizi	289	289	289	289	289
2	Jumlah seluruh Desa	289	289	289	289	289
3	Persentase Desa bebas rawan Gizi	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2021

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Temanggung tidak ada desa yang rawan gizi.

11) Persentase Rumah Sehat

Rumah sehat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 1,59%. Capaian ini telah memenuhi target RPJMD yaitu 81%.

Tabel 2.75

Persentase Rumah Sehat di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

NO	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rumah	196.913	198.915	196.791	187.560	196.536
2	Jumlah Rumah Sehat	141.554	147.244	157.636	157.078	161.481
3	Jumlah Rumah Tidak Sehat	55.578	51.671	39.155	30.482	35.055
4	Jumlah Rumah Tidak Sehat yang dibina	33.365	29.632	39.155	30.482	35.055
5	Persentase Rumah Sehat	71,89	74,02	80,10	83,75	82,16
6	Persentase Rumah Tidak Sehat yang dibina	39,87	60,03	100	100	17,84

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2021

Capaian cakupan rumah sehat didukung oleh kegiatan yang dilakukan oleh sektor terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sosial, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Pemerintah desa, lembaga non pemerintah termasuk dunia usaha.

12) Persentase Orang Terduga Tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar

Indikator ini merupakan salah satu indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Bidang Kesehatan dimana targetnya sebesar



100% yang artinya semua orang terduga TB wajib menerima pemeriksaan penunjang TB sesuai standar.

Tabel 2.76

Persentase orang Terduga TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	547	752	5.693	3.070	5.462
2	Jumlah orang terduga TBC	547	752	7.895	8.039	8.046
3	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100	100	72,11	38,19	67,88

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah orang terduga TB yang dilakukan pemeriksaan penunjang TB ditemukan dan tercatat tahun 2021 adalah sebanyak 5.462 orang dari sasaran orang terduga TB sebanyak 8.039 orang dengan capaian hanya 67,88% dari target 100%.

Faktor penghambat capaian tersebut adalah karena adanya pandemi Covid-19, dimana orang terduga TBC masih merasa takut untuk memeriksakan kesehatannya di fasilitas Kesehatan atau di Puskesmas atau Rumah sakit.

Alternatif solusinya adalah kerjasama petugas kesehatan dengan kader kesehatan di desa untuk melaksanakan kunjungan rumah guna melakukan pemeriksaan penunjang atau jemput bola *specimen* dahak dari orang terduga TBC tersebut untuk diperiksakan di puskesmas.

- 13) Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di Kabupaten Temanggung tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.77

Penemuan Kasus HIV Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah orang dengan resiko	2.466	7.152	8.709	9.352	9.338

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
2	Jumlah orang beresiko HIV	15.330	7.152	12.731	12.567	12.706
3	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV sesuai standar	16,09	100	68,41	74,42	73,49

Sumber: Dinas Kesehatan kabupaten Temanggung, 2021

Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di Kabupaten Temanggung tahun 2021 turun sebanyak 0,93 dari tahun sebelumnya.

14) Angka Penemuan Penderita Demam Berdarah Dengue per 100.000 penduduk

Penyakit DBD dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat.

Tabel 2.78
Incident Rate (IR) DBD per 100.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kasus DBD	189	150	375	406	30
2	Jumlah penduduk	759.093	780.148	789.508	794.055	800.276

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2021

Penyakit DBD masih menjadi permasalahan kesehatan prioritas di Kabupaten Temanggung. Kecamatan dengan penderita terbanyak adalah Kecamatan Temanggung, Jumo, dan Parakan.

15) Angka Penemuan Penderita Malaria per 1.000 Penduduk

Persentase Angka penemuan penderita Malaria dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.79
Angka Kesakitan Malaria (Annual Paracite Incidence/API) per 100.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kasus malaria	7	7	6	0	4

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
2	Jumlah penduduk	759.093	780.148	789.508	794.055	800.276
3	API Malaria per 1.000 penduduk	0,009	0,009	0,008	0	0,0005

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2021

Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk di Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 hingga tahun 2021 di bawah target <1 per 1.000 penduduk dikarenakan Kabupaten Temanggung bukan merupakan daerah endemis malaria.

- 16) Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar

Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi juga merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan (Permenkes Nomor 4 tahun 2019).

Tabel 2.80
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penyandang Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5.989	39.166	49.333	43.629	66.107
2	Jumlah estimasi penderita Hipertensi berdasarkan angka Prevalensi Kabupaten	62.535	166.922	217.973	218.228	213.442
3	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	36,76%	23,46%	22,63%	19,99%	30,97%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2021

Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar masih sangat kecil, dikarenakan data yang diperoleh hanya berdasarkan laporan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama belum termasuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut dan Fasilitas Kesehatan Swasta, sementara sasaran untuk capaian Hipertensi adalah semua penduduk usia 15 tahun ke atas.

- 17) Persentase Penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar

Pelayanan kesehatan Penderita DM juga merupakan salah satu indikator dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan (Permenkes Nomor 43 tahun 2016).

Tabel 2.81
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5.165	7.130	7.923	8.084	9.456
2	Pelayanan Kesehatan Penderita DM	56,78	13,25	75,91	77,37	92,50

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2021

Untuk Data Pelayanan kesehatan penderita DM baru dapat diperoleh mulai tahun 2017 karena pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan baru diimplementasikan mulai tahun 2017. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penderita Diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar masih sangat kecil, karena data yang diperoleh hanya berdasarkan laporan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama belum termasuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut dan Fasilitas Kesehatan Swasta, sementara sasaran untuk capaian Diabetes Mellitus adalah semua penduduk.

18) Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan desa UCI capaian sampai tahun 2021 mendekati 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar bayi telah mendapatkan imunisasi.

Tabel 2.82
Cakupan Desa/Kelurahan UCI (*Universal Child Immunization*)
Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa/Kelurahan	289	289	289	289	289
2	Jumlah Desa/Kelurahan UCI	288	288	286	287	287
3	Persentase	99,65	99,65	98,96	99,31	99,31

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2021

Selama 2 (dua tahun) yaitu tahun 2017-2018 capaian desa UCI hanya 99,65% dikarenakan ada 1 desa yang masyarakatnya menolak untuk dilakukan imunisasi pada balita mereka, yaitu desa Bonjor Kecamatan Tretap, karena keyakinan. Sementara

usaha dari Dinas Kesehatan sudah dilakukan melalui pendekatan dengan cara sosialisasi bersama MUI dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah secara terus menerus. Tahun 2020 desa yang menolak bertambah menjadi 2 desa yaitu Desa Plosogaden Kecamatan Candiroto dan Desa Bonjor Kecamatan Tretep.

- 19) Persentase Desa/Kelurahan mengalami KLB yang Dilakukan Penyidikan Epidemiologi <24 jam

Pada tahun 2021 jumlah frekuensi KLB menurun kejadian menjadi 3 kejadian, hal didorong oleh adanya kewaspadaan dini terhadap penyakit menular di masing-masih wilayah puskesmas, dimana bila ada kenaikan kasus penyakit menular di wilayah kerjanya segera ditindaklanjuti dengan penanganan untuk mencegah peningkatan atau penyebaran kasus penyakit tersebut.

Tabel 2.83
Frekuensi KLB dan Penanggulangannya
di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa KLB	12	9	8	4	3
2	Jumlah Desa KLB yang ditangani < 24 jam	12	9	8	4	3
3	Persentase Desa/kel KLB yang dilakukan PE < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tahun 2021 semua kejadian Luar Biasa (KLB) di lakukan Penyelidikan Epidemiologi dan penanggulangan < 24 jam atau 100% dapat ditanggulangi.

- 20) Persentase Kunjungan Baru di Pelayanan Kesehatan Dasar

Realisasi persentase kunjungan baru di pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 - 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.84
Persentase Kunjungan Baru di Pelayanan Kesehatan Dasar
di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kunjungan baru di	308.723	362.994	284.679	302.486	270.756

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	arana pelayanan kesehatan dasar					
2	Jumlah penduduk	759.093	780.148	789.508	794.055	800.276
3	Persentase kunjungan baru di sarana pelayanan kesehatan dasar	40,67	46,53	36,06	38,09	33,83

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2021

Persentase kunjungan baru di pelayanan kesehatan mengalami penurunan. Pada tahun 2020 dan 2021 penurunan kunjungan baru di sarana pelayanan kesehatan dasar hanya mencapai 33,83% karena hal ini karena adanya Pandemi Covid, sehingga masyarakat tidak mengunjungi sarana pelayanan Kesehatan kecuali jika ada keadaan mendesak.

21) Cakupan Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Temanggung tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.85

Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10.377	10.272	10.555	10.435	9.740
2	Jumlah sasaran bayi baru lahir	10.377	10.272	10.555	10.435	9.740
3	Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2021

Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar di Kabupaten Temanggung sudah mencapai 100%.

22) Persentase Neonatal dengan komplikasi yang tertangani

Neonatal dengan komplikasi yang ada di Kabupaten Temanggung selalu ditangani seluruhnya sehingga capaiannya selalu 100% sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2021.

Tabel 2.86
Persentase Neonatal dengan komplikasi yang ditangani
di Kabupaten Temanggung Tahun 2017- 2021

NO	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	1.955	2.068	2.191	2.337	2.138
2	Jumlah seluruh Neonatus dengan komplikasi	1.955	2.068	2.191	2.337	2.138
3	Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2021

23) Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup

Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Temanggung tahun 2017–2021 fluktuatif sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.87
Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup
di Kabupaten Temanggung Tahun 2017 – 2021

NO	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah bayi usia 0-28 hari yang meninggal	99	100	95	102	93
2	Jumlah Kelahiran Hidup	10.378	10.272	10.555	10.435	9.749
3	Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup	9,54	9,74	9,00	9,77	9,54

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2021

Kematian neonatal pada bayi mengalami penurunan pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020.

24) Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 2.88
Persentase Balita Mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah balita usia 12-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	43.365	48.654	45.172	40.441	42.083
2	Jumlah sasaran balita usia 12-59 bulan	43.365	48.654	45.172	50.297	51.545
3	Persentase balita Mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	80,40	81,64

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2021

Pada tahun 2020 mencapai 80,40% dan tahun 2021 naik menjadi 81,64% dimana dari 51.545 balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sebanyak 42.083 balita disebabkan pandemi Covid-19 kegiatan posyandu dibatasi sehingga tidak maksimal. Hal ini merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan bagi masyarakat khususnya balita (0-60 bulan).

25) Angka Kematian Balita (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup

Kematian balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Temanggung tahun 2017–2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.89
Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup
di kabupaten Temanggung Tahun 2017 – 2021

NO	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah balita usia 0 – 59 bulan yang meninggal	158	147	155	145	137
2	Jumlah Kelahiran Hidup	10.378	10.272	10.555	10.435	9.749
3	Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	15,22	14,31	14,68	13,90	14,05

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2021

Jumlah kematian balita dari tahun 2017-2021 mengalami penurunan, demikian juga Angka Kematian Balita (AKBA) menurun dari tahun 2017 sebesar 15,22 menjadi 14,05 pada tahun 2021.

26) Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.90
Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah anak usia	24.382	12.971	58.335	28.242	96.443

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
	pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
2	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar	24.382	12.971	58.335	91.245	113.569
3	Persentase anak usia pendidikan dasar yang Mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	30,95	84,92

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2021

Anak usia Pendidikan dasar wajib mendapatkan pelayanan Kesehatan di dalam dan luar satuan Pendidikan dasar. Tahun 2021 dengan adanya pandemi Covid-19 pelaksanaan pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar mengalami peningkatan yang drastis 174,4%. Hal ini dikarenakan adanya wajib vaksin untuk anak sekolah dasar untuk pencegahan terpapar Covid-19.

27) Persentase warga negara Indonesia usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase warga negara Indonesia usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.91

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	20120	2021
1	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining sesuai standar	372.315	398.395	442.748	280.135	357.786
2	Jumlah orang usia 15-59 tahun	511.942	511.632	511.265	540.662	516.638
3	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	72,73	77,87	86,60	51,81	69,25

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2021

Masyarakat yang mendapatkan pelayanan skrining sesuai standar mengalami peningkatan sebesar 33,7%. Sehingga dapat disimpulkan jumlah masyarakat yang sadar kesehatan semakin banyak.

28) Cakupan warga Negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Cakupan warga Negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2017-2021 sebagaimana berikut:

Tabel 2.92

Persentase Warga Negara Usia 60 tahun keatas mendapatkanskrining kesehatan sesuai standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan minimal 1 kali dalam satu tahun	73.379	95.094	96.839	72.733	99.987
2	Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih	73.379	100.776	102.744	116.105	111.691
3	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	94,36	94,25	62,64	89,52

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2021

Cakupan warga Negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 37,47%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang sadar dan datang ke fasilitas kesehatan juga semakin meningkat.

Pada tahun 2018 belum semua usia lanjut mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, hal ini dikarenakan yang mendapatkan skrining kesehatan baru warga negara usia lanjut yang datang ke fasilitas kesehatan atau ke posyandu lansia, sedangkan yang tidak mengunjungi fasilitas kesehatan atau posyandu lansia belum mendapatkan skrining kesehatan.

29) Persentase Kunjungan Baru di Pelayanan Kesehatan Dasar

Persentase Kunjungan Baru di Pelayanan Kesehatan Dasar (puskesmas dan jaringannya) di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.93
Persentase Kunjungan Baru di Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kunjungan baru di sarana pelayanan kesehatan dasar	308.723	362.994	284.679	123.685	302.486
2	Jumlah penduduk	772.289	783.550	791.264	795.556	795.055
3	Persentase	40,67	46,53	38,46	15,63	38,09

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2021

Persentase kunjungan baru di pelayanan kesehatan dasar cenderung meningkat dari tahun 2017-2021, masyarakat sudah sadar untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan tingkat dasar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dirinya.

30) Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Terakreditasi Utama

Realisasi Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah terakreditasi utama di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2.94
Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Terakreditasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah FKTP terakreditasi utama	2	2	8	8	8
2	Jumlah FKTP terakreditasi madya	15	16	15	15	15
3	Jumlah FKTP terakreditasi dasar	7	7	1	1	1
4	Jumlah FKTP	25	25	25	25	25
5	Persentase akreditasi utama	8	8	40	40	40

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2021

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

1) Persentase Infrastruktur Wilayah Kondisi Baik

Berdasarkan tabel berikut capaian infrastruktur wilayah kondisi baik tahun 2017-2021 mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2021 jalan dengan kondisi baik meningkat 7,15%, jembatan kondisi baik 0,65%, rumah tangga berakses air minum layak meningkat 0,66%.

Tabel 2.95
Persentase Infrastruktur Wilayah Kondisi Baik Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jalan kondisi baik	82,16	84,15	89,14	83,33	89,29
2	Jembatan kabupaten kondisi baik	90	92	91,39	92,28	92,88
3	Jaringan irigasi kondisi baik	51,65	55,81	57,41	59,97	58,12
4	Rumah tangga berakses air minum layak	82,67	84,99	86,73	93,90	94,52
5	Jumlah	306,48	316,95	325,57	329,48	334,798
6	Rata - Rata	76,62	79,24	81,39	82,37	83,70

Sumber:DPUPR Kabupaten Temanggung, 2021

2) Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari tahun 2017-2021 mengalami kenaikan.

Tabel 2.96
Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pemanfaatan ruang sesuai RTRW	76.996,74	76.996,74	77.047,99	77.059,69	77.086,11
2	jumlah luasan wilayah kabupaten Temanggung	87.065	87.065	87.065	87.065	87.065
3	%	88,43%	88,43%	88,49%	88,50%	88,53%

Sumber:DPUPR Kabupaten Temanggung, 2021

Luasan Wilayah Kabupaten Temanggung berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung adalah 87.065 ha. Pada Tahun 2021, alih fungsi lahan pertanian yang diizinkan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sebesar 26,42 ha sehingga penambahan luasan di Tahun 2021 menjadi 77.086,11 ha. Berkaitan dengan adanya alih fungsi lahan di Kabupaten

Temanggung telah menyesuaikan sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung. Berdasarkan data total rekapitulasi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.97
Total Rekapitulasi Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian Tahun 2021

Luas Lahan (m ²)	Luasan Permohonan (m ²)	Luasan yang Dijinkan (m ²)	Luasan yang Ditolak (m ²)
1.919.080	1.621.198	283.337	58.673

Sumber: DPM Kabupaten Temanggung, 2021

3) Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap

Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.98
Jalan Kabupaten Kondisi Mantap Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Tahun	Jalan Kabupaten (km)		
	Panjang Jalan (km)	Kondisi Baik (baik + sedang)(km)	%
2017	739,127	607,25	82,16
2018	739,127	621,992	84,15
2019	650,476	579,866	89,14
2020	650,476	542,047	83,33
2021	650,476	580,790	89,29

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2021

Pada Tahun 2021 telah terdapat peningkatan kondisi jalan sebesar 7,15% dari tahun sebelumnya.

4) Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi Baik

Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi Baik dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.99
Jembatan Kabupaten Kondisi Baik Tahun 2017-2021

Tahun	Jembatan Kabupaten		
	Jumlah (Unit)	Kondisi Baik (Unit)	%
2017	335	302	90

Tahun	Jembatan Kabupaten		
	Jumlah (Unit)	Kondisi Baik (Unit)	%
2018	335	309	92
2019	337	311	92,28
2020	337	313	92,88
2021	337	313	92,88

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2021

Persentase Jembatan kondisi baik pada Tahun 2021 dari total 337 unit jembatan yang ada terdapat 313 unit jembatan dengan kondisi baik atau setara dengan 92,88%. Jumlah Jembatan kondisi baik bertambah karena terdapat Pemeliharaan Jembatan Kali Mlulon pada sub kegiatan pemeliharaan berkala jembatan Tahun 2021.

5) Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik

Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.100

Daerah Irigasi Kabupaten Kondisi Baik Tahun 2017-2021

Tahun	Daerah Irigasi (DI) kabupaten		
	Jumlah DI (unit)	Kondisi Baik (Unit)	%
2017	577	298	51,65
2018	577	322	55,81
2019	577	331	57,36
2020	577	346	59,97
2021	577	335	58,12

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2021

Tabel 2.101

Luasan Daerah Irigasi Kabupaten Kondisi Baik Tahun 2019-2021

Tahun	Daerah Irigasi (DI) kabupaten		
	Luas DI (Ha)	Kondisi Baik (Ha)	%
2019	17710,91	10167,36	57,41
2020	17710,91	10621,66	59,97
2021	17708,78	10291,61	58,12

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2021

Pada tahun 2021 terjadi penurunan prosentase jaringan irigasi kondisi baik karena kondisi *existing* infrastruktur jaringan irigasi tingkat kerusakan lebih tinggi daripada kemampuan anggaran untuk rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020.

6) Persentase Pelayanan Drainase Skala Kawasan/Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan

Pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan di wilayah Kabupaten Temanggung ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.102

Persentase Pelayanan Drainase Skala Kawasan/Kota Tahun 2017-2021

No.	Uraian	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Panjang Jaringan drainase pada skala kawasan/kota	300,09	303,04	300,11	303,04	146,645
2	Panjang jalan kabupaten skala kawasan/kota	739,127	739,127	650,467	650,467	650,467
3	Persentase (%)	40,6	41	46,14	46,59	22,54

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2021

Persentase pelayanan drainase pada tahun 2021 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena pada tahun 2015-2020 data panjang jalan yang digunakan untuk penghitungan panjang drainase menggunakan SK lama, dimana jalan kelurahan masih tercantum. Mulai tahun 2021, UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I–VI mengadakan pendataan ulang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/405 Tahun 2018 tentang Ruas-Ruas Jalan yang Berstatus Sebagai Jalan Kabupaten sehingga ada penyesuaian panjang drainase. Berdasarkan hal tersebut panjang drainase yang menjadi tanggungjawab DPUPR adalah 146,645 Km. *Master Plan* Drainase yang telah dibuat meliputi Kota Temanggung, Kota Parakan, dan Kota Ngadirejo.

7) Tersedianya Layanan Informasi Jasa Konstruksi

Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi di Wilayah Kabupaten Temanggung yaitu:

Tabel 2.103

Persentase Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang terupdate di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah layanan minimal sistem informasi jasa konstruksi yang terupdate	7	7	7	7	7

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
2.	Jumlah layanan minimal sistem informasi jasa konstruksi	7	7	7	7	7
	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: DPUPPR Kabupaten Temanggung, 2021

Tersedianya informasi jasa konstruksi setiap tahun dapat tercapai didukung oleh adanya kegiatan dari tingkat pusat dan provinsi yang secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap update data yang dilakukan.

Berkaitan dengan percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2023 sudah memasukkan kegiatan tersebut yang merupakan bagian dari Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), hal tersebut juga akan mendukung peningkatan investasi daerah.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1) Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan

Wilayah di Kabupaten Temanggung telah diidentifikasi Kawasan Kumuh sehingga untuk lebih mengintensifkan dan memfokuskan penanganannya telah dibuat SK Bupati Temanggung Nomor 050/7 Tahun 2021 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Temanggung, dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman.

Tabel 2.104
Capaian Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Luasan Kawasan Kumuh	297,81	297,81	297,81	176,84	138,52
2	Luasan Permukiman Perkotaan	2.495,69	2.495,69	2.495,69	2.495,69	2.495,69
3	Persentase	11,93	11,93	11,93	7,09	5,55

Sumber : DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2021

Perkembangan realisasi capaian sampai akhir tahun 2021, menunjukkan luasan kawasan kumuh perkotaan mengalami penurunan (berkurang sebesar 38,32 Ha) sehingga capaian tahun 2021 mengalami perkembangan yang cukup signifikan dengan penurunan sebesar 1,54%. Faktor penghambat capaian indikator di atas adalah terbatasnya anggaran sedangkan faktor pendorongnya adalah adanya program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Pada tahun 2021, dianggarkan dari Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) Kotaku dengan lokus Parakan Kauman, Parakan Wetan, Walitelon Utara, Nampirejo, dan Glapansari.

2) Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.105
Persentase Warga Negara yang Memperoleh
Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rumah yang terlayani infrastruktur	Na	Na	Na	Na	181.568
2	Jumlah total rumah	Na	Na	Na	Na	196.536
3	Persentase	Na	Na	Na	Na	92,38

Sumber : DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2021

Dari tahun 2017 sampai tahun 2020 data belum tersedia karena merupakan indikator baru di Perubahan RPJMD. Sedangkan tahun 2021 jumlah rumah yang terlayani infrastruktur sebanyak 181.568 rumah dari 196.536 rumah di Kabupaten Temanggung atau secara prosentase capaian sebesar 92,38%.

3) Persentase Rumah Layak Huni

Salah satu penanganan penting dalam bidang perumahan dan penanganan kemiskinan selama 5 tahun terakhir adalah pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah

layak huni (RLH). Pembangunan RTLH menggunakan berbagai sumber pendanaan meliputi APBD Kabupaten Temanggung, APBD Provinsi dan APBN melalui Kementerian PUPR maupun Kementerian Sosial RI.

Tabel 2.106
Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Temanggung
Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rumah layak huni	163.216	169.912	173.702	177.349	179.150
2	Jumlah rumah	196.536	196.536	196.536	196.536	196.536
3	Persentase	83,05	86,45	88,38	90,24	91,15

Sumber : DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2021

Faktor pendorong capaian tersebut adalah adanya pelaksanaan program-program di bidang perumahan dan permukiman khususnya penanganan RTLH menjadi RLH (baik dari sumber dana DAK, APBD Provinsi, APBN, APBDes), sedangkan faktor penghambatnya adalah terkendala masalah refocusing sehingga anggaran APBD tidak dapat direalisasikan. Sebagai rekomendasi dan tindaklanjutnya untuk capaian indikator di atas adalah memaksimalkan pengusulan RTLH menjadi RLH dari sumber APBN dan APBD Provinsi untuk pelaksanaan tahun berikutnya. Selain itu juga melibatkan sumber dana dari Non pemerintah seperti Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan (TJSLP), BAZNAS kabupaten Temanggung, dan swadaya masyarakat lain.

4) Cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Luas Ruang Terbuka Hijau Publik di Kabupaten Temanggung sampai tahun 2021 sebesar 79.628,31 m².

Tabel 2.107
Cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan RTH Publik	1,06	1,08	1,10	1,10	1,10

Sumber : DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2021

Capaian Cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik tahun 2021 sebesar 1,10 dengan perhitungan jumlah RTH Publik (79.628,31 M2) dan 20% Luas IKK yang mempunyai RTH (72.341,03 M2) sehingga diperoleh hasil 1,10. Faktor pendorong capaian tersebut karena responsibilitas masyarakat terhadap RTH Publik, sedangkan faktor penghambatnya antara lain Keterbatasan lahan RTH, Keterbatasan anggaran untuk penyediaan RTH Publik / taman, Pengelolaan dan penataan terbatas, Jumlah SDM yang terbatas.

5) Persentase Penerangan Jalan di Jalan Kabupaten

Standar kesesuaian Sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan pada PP Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tabel 2.108
Persentase Penerangan Jalan Umum Kabupaten Temanggung
Tahun 2017-2021

INDIKATOR	SAT	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penerangan jalan di jalan kabupaten	Unit	na	na	4.121	4.123	4.123
Panjang jalan kabupaten dibagi 50 m (jarak antar lampu)	Unit	na	na	13.009,52	13.009,52	13.009,52
Persentase Penerangan Jalan di Jalan Kabupaten	%	na	na	31,68	31,69	31,69

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, 2021

Persentase penerangan jalan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 sebesar 31,68% sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 31,69%. Sedangkan sampai dengan tahun 2021 kondisinya masih sama dengan tahun 2020 yaitu sebesar 31,69% karena tidak ada kegiatan pemasangan PJU baru. Tahun 2017-2018 tidak tersedia datanya karena adanya perbedaan rumus perhitungan.

6) Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi layak selama 5 (lima) tahun cenderung mengalami peningkatan dari 78,56% menjadi

92,98% pada tahun 2021. Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi layak di Kabupaten Temanggung semakin bertambah, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten Temanggung selalu meningkat.

Tabel 2.109
Rumah Berakses Sanitasi Layak Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi layak	159.147	162.853	177.265	181.568	182.735
2	Jumlah rumah	196.536	196.536	196.536	196.536	196.536
3	Persentase	80,98	82,86	90,19	92,38	92,98

Sumber : DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2021

Keberhasilan jumlah rumah tinggal berakses sanitasi layak didukung oleh program nasional 100-0-100. Program 100-0-100 merupakan program ketersediaan 100 persen air minum, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen fasilitas sanitasi. Walaupun belum tercapai 100 persen seluruh rumah tinggal di Kabupaten Temanggung berakses sanitasi layak namun program ini telah menunjukkan keberhasilan peningkatan jumlah rumah tinggal yang mempunyai fasilitas sanitasi layak. Faktor pendorong yang lain adalah intervensi dari Pemerintah Pusat dan Daerah (Sandes, Sanimas, DAK Sanitasi) dalam peningkatan rumah tinggal berakses sanitasi layak. Faktor penghambat capaian indikator ini disebabkan karena terbatasnya anggaran Rumah Berakses Air Bersih.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Indeks Rasa Aman

Indeks rasa aman di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.110
Indeks Rasa Aman Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Rasa Aman	Angka	n.a	n.a	4,23	4,36	4,48

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, 2021

Realisasi indeks rasa aman di Kabupaten Temanggung diperoleh berdasarkan survey dari Tim P5 Universitas Diponegoro Semarang tahun 2021 adalah 4,48 (skala 1-5) dengan kategori sangat baik.

2) Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.111
Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Bupati Temanggung Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Pelanggaran Perda/Perbup yang ditangani	kasus	797	275	462	1903	1056
Pelanggaran Perda/Perbup yang dilaporkan atau dipantau	kasus	797	315	462	1903	1056
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	%	100	87,3	100	100	100

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, 2021

Persentase cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati pada tahun 2021 adalah 100%. Penanganan terhadap pelanggaran perda dan perbup penyelesaiannya hanya sebatas sosialisasi, pendataan dan pembinaan kepada pelanggar Perda dan Perbup (*preventif non yustisial*).

3) Rasio Linmas per RT

Rasio Linmas Per RT di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.112
Rasio Linmas Per RT Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Linmas	8.172	8.184	8.184	8.184	8.414
2.	Jumlah RT	5.692	5.916	5.916	5.916	5.848
3.	Rasio	1,4	1,3	1,3	1,3	1,4

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, 2021

Jumlah anggota Linmas per RT telah mencukupi dan mampu melaksanakan tugas perlindungan masyarakat.

4) Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten

Tabel 2.113
Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-2021

Uraian	satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah WMK Kabupaten/Kota	km2	528	528	528	528	528
Jumlah wilayah Kabupaten	km2	870,65	870,65	870,65	870,65	870,65
Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten	%	60,64%	60,64%	60,64%	60,64%	60,64%

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, 2021

Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten tidak mengalami peningkatan dikarenakan sampai dengan tahun 2020 tidak dapat terlaksana pembangunan pos pemadam kebakaran sehingga tidak terdapat penambahan pos, apabila melihat jangkauan luas layanan Kabupaten Temanggung cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten masih terbatas sejumlah 60% dari seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.

5) Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*)

Persentase tingkat waktu tanggap di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2.114
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 menit	41	44	33	30	23
2.	Jumlah kasus kebakaran dalam Jangkauan WMK	69	63	77	54	30
3.	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate-%)	59,4%	69,8%	42,86%	55,56%	76,67%

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, 2021

Meski belum tercapai 100% tetapi terdapat peningkatan 38 % dari tahun sebelumnya. Beberapa faktor kendala sebagai berikut:

- a. Lokasi kasus kebakaran yang berbeda-beda tempat setiap tahunnya;

- b. Keterlambatan masyarakat dalam melaporkan berita kebakaran;
 - c. Lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran;
 - d. Kepadatan penduduk dan kemacetan lalu lintas;
 - e. Perubahan kondisi lalu lintas;
 - f. Perbedaan waktu tanggap yang dipengaruhi oleh kecepatan unit mobil kebakaran yang sebagian sudah berumur;
 - g. Hambatan *akseleri* unit pemadam kebakaran antara lain wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, jalan sempit, dll;
 - h. Luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candirototo serta minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi.
 - i. Belum optimalnya koordinasi instansi.
- 6) Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten
Jumlah dan jenis penanganan bencana non kebakaran tahun 2017-2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.115
Cakupan Penanganan Bencana Non Kebakaran
Tahun 2017-2021

NO	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) dalam Tahun X	n.a	n.a	105	268	310

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, 2021

- 7) Presentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi
- Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.116
 Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar
 Kualifikasi Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

NO	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar	19	18	18	19	18
2.	Jumlah aparatur pemadam kebakaran	54	53	53	54	56
3.	Prosentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	35,2%	33,9%	35,9%	35,19%	32,14%

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, 2021.

8) Indeks Resiko Bencana

Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.117
 Indeks Resiko Bencana Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Resiko Bencana	143,20	143,20	143,20	134,51	121,33

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung, 2021

Indeks resiko bencana di Kabupaten Temanggung mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2020 sebesar 134,51 menurun menjadi 121,33 pada tahun 2021.

9) Cakupan Desa Tangguh Bencana

Persentase cakupan desa tangguh bencana di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.118
 Cakupan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Temanggung

NO	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana	11	11	14	15	18
2.	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	184	210	210	213	217
3.	Persentase cakupan desa tangguh bencana	5,23%	5,23%	6,66%	7,04%	8,29%

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung, 2021

Berdasarkan Tabel diatas cakupan desa tangguh bencana sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 terdapat peningkatan Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dari

Jumlah desa/kelurahan rawan bencana karena adanya program pembentukan Destana. Pada Tahun 2021 Triwulan IV ada pembentukan Destana sejumlah 4 Desa yaitu, Desa Losari Kecamatan Tlogomulyo, Caturanom Kecamatan Parakan, Tlahap Kecamatan Kledung, dan Tegalrejo Kecamatan Ngadirejo sehingga capaian Destana sampai dengan Triwulan IV 2021 adalah 8.29%

10) Persentase Tertanganinya Pemulihan Sementara Kerusakan Fisik Akibat Bencana pada Masa Tanggap Darurat Bencana

Kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana di Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 sampai tahun 2019 tertangani 100%. Namun di Tahun 2020 hanya tercapai 90% dikarenakan dari 9 dari 10 kerusakan fisik yang tertangani rehabilitasi. Hal ini membuktikan bahwa penanganan cepat dari pemerintah untuk pemulihan sarana dan prasarana pada masa tanggap darurat bencana, sebagai upaya agar tidak mengganggu aktivitas dan perekonomian masyarakat.

Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana di Kabupaten Temanggung pada tabel berikut:

Tabel 2.119

Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan Fisik Akibat Bencana pada masa Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Temanggung Tahun 2017 – 2021

No	Kriteria	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	jumlah kerusakan fisik yang tertangani masa tanggap darurat bencana	19	7	12	9	310
2	jumlah total kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	19	7	12	10	310
3	Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	100	100	100	90	100

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

11) Persentase Tertanganinya Korban Bencana pada Masa Tanggap Darurat Bencana

Persentase tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana di Kabupaten Temanggung :

Tabel 2.120
Persentase Tertanganinya Korban Bencana
Pada Masa Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Temanggung

No	Kriteria	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumah korban yang tertangani	272	222	214	287	753
2	Jumlah total korban pada masa tanggap darurat bencana	272	222	214	287	753
3	Persentase tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana	100	100	100	90	100

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Menurut tabel diatas, persentase tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana di Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 sampai 2021 tercapai 100%.

12) Persentase Desa Mitigasi terhadap Desa Rawan Bencana

Persentase Desa Mitigasi Terhadap Desa Rawan Bencana sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.121
Persentase Desa Mitigasi terhadap Desa Rawan Bencana
Kabupaten Temanggung

NO	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah desa/kelurahan mitigasi	83	111	139	140	147
2.	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	184	210	210	213	217
3.	Persentase Desa Mitigasi terhadap desa rawan bencana	45,10%	52,85%	66,19%	65,74%	67,74%

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung, 2021

Terdapat peningkatan persentase dengan adanya program kegiatan mitigasi di desa/kelurahan rawan bencana berupa pemasangan alat peringatan dini bencana khususnya untuk peringatan dini bencana tanah longsor, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya program kegiatan Desa mitigasi terhadap Desa Rawan bencana berupa EWS belum ada namun sudah adanya pelatihan sumber daya manusia pada daerah rawan bencana.

13) Persentase Tertanganinya Pemulihan Kerusakan Fisik Akibat Bencana pada Pasca Bencana

Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana di Kabupaten Temanggung dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.122
Persentase Tertanganinya Pemulihan Kerusakan Fisik Akibat Bencana Pada Pasca Bencana Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Kriteria	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah tertangani kerusakan fisik akibat bencana dalam 1 tahun melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	11	7	17	6	47
2	Jumlah kerusakan akibat bencana dalam 1 tahun pada pasca bencana	11	7	17	6	47
3	Persentase Tertanganinya Pemulihan Kerusakan Fisik Akibat Bencana pada Pasca Bencana Melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Waktu 1(satu) Tahun	100	100	100	100	100

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung, 2021

Berdasarkan analisis tabel di atas menunjukkan bahwa persentase pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana sejak tahun tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mencapai 100%. Hal ini didukung oleh peran pemerintah daerah, provinsi maupun pusat dengan sumber pendanaan kegiatan berasal dari APBD Kabupaten dan Provinsi maupun APBN yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional penanggulangan Bencana (BNPB).

14) Persentase Tertanganinya Korban Bencana pada Pasca Bencana

Persentase tertanganinya Korban Bencana Pada Pasca Bencana di Kabupaten Temanggung sebagaimana berikut:

Tabel 2.123
Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada Pasca Bencana Kabupaten Temanggung Tahun 2017 – 2021

No	Kriteria	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penyintas (Korban Bencana) dalam 1 tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	44	30	137	4	10
2	jumlah korban bencana dalam 1 tahun	44	30	137	5	10

No	Kriteria	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat					
3	Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100	100	100	80	100

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung, 2021

Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana tahun 2021 sudah menunjukkan angka 100%. Hal ini dikarenakan korban bencana pada pasca bencana sudah ditindaklanjuti dengan assessment serta pemberian bantuan sosial.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

- 1) Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani (IKUPD)

Tabel 2.124
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
yang ditangani Tahun 2017-2021

No.	Kriteria	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan sosial	1.214	50.344	48.863	101.684	135.136
2	jumlah KK DKD skala kabupaten dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	101,9	101.993	103.280	120.876	120.876
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	1,19	49,36	47,31	84,12	111,79

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Jumlah PPKS yang mendapatkan penanganan dari tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan secara signifikan. Pada tahun 2019 terdapat sedikit penurunan karena sebagai akibat dilakukannya verwal dengan hasil data yang semakin baik. Adapun yang mendukung ketercapaian PPKS dalam mendapatkan penanganan didukung dari sebagian besar program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial.

- 2) Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga,

Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial
 Capaian cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat dan Kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.125

Cakupan Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga dalam Usaha Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan usaha Kesejahteraan Sosial	90	130	162	243	167
2	Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial	90	130	162	243	167
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Pemberdayaan terkait dengan penggalian dan pengembangan potensi masyarakat dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 cenderung fluktuatif, hal ini terkait fasilitasi pemberdayaan melalui diklat dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

- 3) Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

Realisasi warga negara eks migran bermasalah sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis individu, keluarga dan masyarakat di Kabupaten Temanggung dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.126
Persentase Eks Migran Bermasalah Sosial yang Mendapatkan Layanan
Rehabilitasi Sosial Berbasis Individu, Keluarga, Masyarakat
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Eks Migran Bermasalah Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	0	20	10	10	10
2	Jumlah Eks Migran Bermasalah Sosial yang memerlukan rehabilitasi sosial	0	20	10	10	10
3	Persentase Eks Migran Bermasalah Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis Individu, keluarga, dan masyarakat	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Data yang tertuang dalam tabel diatas merupakan data eks migran bermasalah sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial melalui bimbingan psikososial dan peningkatan motivasi dan juga pelatihan ketrampilan. Selain itu, eks migran tersebut juga menerima bantuan sosial berupa bahan kebutuhan dasar serta bantuan stimulan untuk usaha ekonomi produktif. Pada tahun 2017 di Kabupaten Temanggung belum ditetapkan untuk penanganan eks migran bermasalah sosial. Capaian target rehabilitasi bagi eks migran bermasalah adalah jumlah eks migran bermasalah sosial yang membutuhkan layanan dapat terlayani semua.

- 4) Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Jumlah anak terlantar dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif dengan jumlah terbanyak pada tahun 2020 sebanyak 381 anak, anak terlantar akan memperoleh jenis pendampingan yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang keterlantaran anak dan hasil *assesmet* kebutuhan penanganan.

Tabel 2.127
Persentase Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Diluar Panti
Di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah anak terlantar diluar panti sosial	371	371	371	381	271

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	yang mendapat rehabilitasi sosial					
2.	Jumlah anak terlantar	371	371	371	381	271
3.	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung (diolah), 2021

Pada tahun 2020 kasus anak mengalami peningkatan yang cukup drastis bila dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini disebabkan adanya Pandemi COVID-19 yang berdampak pada kondisi ekonomi keluarga yang mengalami penurunan, hal ini juga berdampak kepada munculnya kasus anak dari berbagai kluster (Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak memerlukan Perlindungan Khusus, dan Anak Terlantar).

- 5) Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2.128
Persentase Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Penyandang Disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial	40	40	247	536	583
2	Jumlah Disabilitas yang memerlukan rehabilitasi sosial	40	40	247	536	583
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Capaian target rehabilitasi penyandang disabilitas adalah jumlah Penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan selama kurun waktu 5 tahun selalu terpenuhi. Sehingga dari permohonan yang masuk 100% dapat dibantu. Selain dari anggaran APBD Kabupaten, Dinas Sosial berupaya menggerakkan masyarakat melalui Lembaga dan komunitas-komunitas yang berkembang untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan rasa kepedulian sosial termasuk peduli terhadap

disabilitas dengan membantu kursi roda. Lembaga yang dimaksud adalah BAZNAS Kabupaten Temanggung, sedangkan Komunitas yang telah ikut berperan serta dalam membantu disabilitas utamanya disabilitas fisik yaitu Gerakan Mari Berbagi (GMB), Berbagi Informasi Temanggung (BIT), dan komunitas lainnya.

6) Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Luar Panti Sosial

Rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS di luar panti sosial di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2017-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.129

Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial Tahun 2017-2021

No	Kriteria	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial	404	321	349	591	1.138
2	Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang membutuhkan rehabilitasi sosial	29.395	27.277	26.440	26.883	26.973
3	Persentase	1,37	1,18	1,31	2,2	4,22

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Pada tahun 2021 persentase rehabilitasi PMKS meningkat 91,8 % menjadi 4,22 %. Kenaikan ini disebabkan karena adanya peningkatan PMKS yang membutuhkan rehabilitasi . Akan tetapi belum semua PMKS mendapatkan rehabilitasi sehingga persentase yang didapatkan masih sangat kecil. Apabila sesuai dengan target pada dokumen RPJMD 2018-2023, realisasi tahun 2021 sudah melebihi target (1,22%) yang telah ditetapkan. Penambahan jumlah yang membutuhkan rehabilitasi terjadi karena pandemi COVID 19, yang secara langsung mempengaruhi keadaan masyarakat.

- 7) Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dari tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.130
Persentase Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah lansia terlantar yang mendapatkan pendampingan sosial	14	7	8	7	181
2	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang di tangani	14	7	8	7	181
3	Presentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Pada tahun 2021 kasus lansia mengalami peningkatan yang cukup drastis bila dibandingkan dengan tahun 2020, hal ini disebabkan adanya Pandemi COVID-19 yang berdampak pada kondisi ekonomi keluarga yang mengalami penurunan, hal ini juga berdampak kepada munculnya kasus lansia terlantar.

- 8) Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti

Capaian jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.131
Jumlah Warga Negara Gelandangan Dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang mendapat layanan rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial	183	184	182	77	103
2	Jumlah Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang menjadi klien rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial	183	184	182	77	103
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Sejak beroperasinya Rumah Perlindungan Sosial, capaian targetnya adalah 100 %. Hal ini dikarenakan sudah adanya sumber daya manusia yang memenuhi dari aspek kuantitasnya. Meskipun dari aspek kualitas SDM perlu adanya peningkatan kapasitas kompetensinya, mengingat SDM yang ada di Rumah Perlindungan Sosial belum ada tenaga Pekerja Sosial profesional yang menjabat secara fungsional dan pelaksanaannya masih di bawah Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Terkait dengan sarana dan prasarananya pada pembangunan Rumah Perlindungan Sosial telah di laksanakan pembangunan Gedung RPS dengan anggaran Bantuan Keuangan Gubernur Jawa Tengah. Adapun pelayanan Rumah Pelayanan Sosial sebagai shelter pertama bagi penyandang disabilitas terlantar, pengemis, gelandangan dan orang terlantar sebelum mereka dirujuk atau dipertemukan dengan keluarganya.

9) Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi PPKS Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial

Tabel 2.132

Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi PPKS Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial Tahun 2017-2021

No	Kriteria	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial	404	321	349	591	1.138
	- disabilitas terlantar	40	40	247	536	583
	- anak terlantar	167	90	54	41	271
	- lanjut usia terlantar	14	7	8	7	181
	- tuna sosial diluar panti sosial	183	184	40	7	103
2	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang membutuhkan rehabilitasi sosial	29.395	27.277	26.440	26.883	26973
	- disabilitas terlantar	6.275	5.970	5.186	5.685	5.685

No	Kriteria	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	- anak terlantar	1.632	865	609	609	609
	- lanjut usia terlantar	21.030	20.134	20.561	20.651	20.651
	- tuna sosial diluar panti sosial	458	308	84	28	28
3	Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial diluar panti sosial	1.37	1.18	1,31	2,20	1.91

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dari tahun 2017-2021 cenderung fluktuatif. Pelayanan rehabilitasi sosial dasar sejalan dengan slogan Kementerian Sosial Republik Indonesia Humanis, Adaptif, Dedikatif, Inklusif dan Responsif.

- 10) Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial

Tabel 2.133

Persentase Anak Yatim Piatu Terlantar Dalam Panti Sosial Yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti sosial yang mendapatkan layanan perlindungan social	371	371	371	381	381
2.	Jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti social	371	371	371	381	381
3.	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021.

Anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial merupakan kewenangan provinsi, akan tetapi kegiatan yang ada di Kabupaten Temanggung hanya berupa penganggaran bantuan permakanan anak panti.

- 11) Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota

Berikut adalah time series selama 5 tahun tentang Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota di Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.134
Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah rumah tangga dalam DTKS yang diverval	n.a	n.a	56.414	68.262	490.347
2.	Jumlah rumah tangga dalam DTKS	n.a	n.a	104.120	108.695	496.392
3.	Persentase	n.a	n.a	54,18%	63,80%	98,78%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Persentase pendataan fakir miskin mengalami kenaikan sebesar 9% pada tahun 2020 dibanding tahun 2019, dan naik lagi 34,98% pada 2021. Terdapat perbedaan tentang verval pada tahun 2021 dengan tahun sebelumnya, yaitu menggunakan jumlah jiwa sedangkan tahun sebelumnya menggunakan data Rumah Tangga. Hal ini karena Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 88/HUK/2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Baru 31 Agustus 2021, sudah tidak memuat data Rumah Tangga, sehingga verval menggunakan data jiwa.

RPJMD Kabupaten Temanggung dan Renstra Dinas Sosial untuk tahun 2021 ditargetkan akan meningkat menjadi 75% dan sudah tercapai pada tahun 2021 karena capaiannya sudah melebihi, yaitu 98,78%. Adapun yang di verval adalah NIK, Status Fakir Miskin, dan Orang Tidak Mampu, dan data ini akan ditetapkan menjadi Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

- 12) Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota

Cakupan pengelolaan data fakir miskin kabupaten/kota di Kabupaten Temanggung tahun 2017-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.135
Cakupan Pengelolaan Data Fakir Miskin
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah anggota rumah tangga yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial	n.a	n.a	413.890	422.930	389.391

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
2.	Jumlah anggota rumah tangga dalam DTKS	n.a	n.a	360.705	369.235	496.392
3.	Persentase	n.a	n.a	114,74%	114,54%	78,44%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Cakupan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota diwakili oleh data anggota rumah tangga yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial (bansos) yaitu Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), baik yang berasal dari APBN maupun APBD II.

Jumlah penerima PBI-JK tahun 2021 persentasenya turun sebanyak 36,1% dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini karena jumlah penduduk yang masuk di DTKS naik 127.157 jiwa (34,4%) dari tahun 2020, sedangkan kepesertaan PBI APBN sebanyak 37.973 jiwa mengalami penonaktifan (Kepmensos SK 92/HUK/2021). Kepesertaan tersebut dapat diaktifkan lagi selama non aktifnya sebelum 6 bulan dengan cara reaktivasi, apabila lebih dari 6 bulan maka harus pengusulan ulang. Reaktivasi hanya diperbolehkan apabila kartu hendak digunakan di untuk berobat di fasilitas kesehatan.

Tabel 2.136
Data Anggota Rumah Tangga
Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2021

No	Sumber Pembiayaan/ anggaran	PBI-JK 2019	PBI-JK 2020	PBI-JK 2021
1	APBN	348.596	391.981	350.413
2	APBD I	10.648	1.470	-
3	APBD II	54.646	29.479	38.978
	Jumlah	413.890	422.930	389.391

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Data kepesertaan PBI-JK tahun 2021 Triwulan IV mengalami penurunan dari Triwulan III karena terjadi pengurangan kuota APBN dari 389.222 (Triwulan II) menjadi 351.941 (Triwulan III) lalu 350.413 (Triwulan IV), sedangkan kuota APBD mengalami penambahan dari 31.514 (Triwulan II) menjadi 38.978 (Triwulan III dan IV) dari anggaran DBHCHT.

13) Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan

Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.137
Persentase Penerima UEP Dan KUBE yang Berkelanjutan Produktif Di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Kriteria	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah UEP dan KUBE yang aktif	n.a	n.a	n.a	n.a	202
2	Jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan	n.a	n.a	n.a	n.a	317
3	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	63,72

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Pada tahun 2017 sampai dengan 2020 belum dapat diketahui berapa jumlah UEP/KUBE yang masih aktif dari jumlah UEP/KUBE yang sudah dibantu di tahun sebelumnya. Sedangkan data yang disajikan di tahun 2021 adalah data UEP/KUBE yang dibantu di tahun 2020 kemudian dilakukan monitoring UEP/KUBE yang masih aktif berdasarkan indikator yang ada di atas. Pada tahun 2021 terdapat 317 UEP/KUBE yang dibantu serta terdapat 202 UEP/KUBE yang masih aktif.

14) Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Tabel 2.138
Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Kriteria	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah KK Miskin yang memperoleh bantuan social dalam 1 (satu) tahun	n.a	49.186	47.742	100.530	135.257
2	Jumlah DT PPFM Skala Kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya memperoleh bantuan social	n.a	101.992	103.280	120.876	120.876
3	Persentase (%)	n.a	48,9	46,23	83,17	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu Bantuan Pangan Non Tunai/Sembako pada Tahun 2021 sampai triwulan IV bulan

oktober 2021 sejumlah 91.581 KK terdiri dari 774.350 KK Program Sembako reguler, 17.231 penerima BPNT PPKM. Data penerima Program sembako untuk bulan November dan Desember masih dalam proses, sehingga data penerima belum dapat disajikan. Dari jumlah tersebut menunjukkan adanya penurunan terkait bantuan sosial dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini karena program KPM BST terakhir diberikan pada bulan Agustus 2021. Tahun 2021, komoditas yang bisa di belanjakan yaitu komoditas yang memenuhi unsur karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Bantuan Pangan Non Tunai yang diberikan dalam bentuk uang dalam e-wallet sejumlah Rp 200.000,- untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin dan mineral keluarga penerima manfaat. Pada Triwulan IV tahun 2021 jumlah penyerapan anggaran untuk program sembako belum diketahui dengan pasti karena proses bantuan bulan November dan Desember masih dalam proses. Kelancaran dan ketepatan penyaluran program bantuan sembako ini sangat tergantung dari kebijakan pusat, baik jumlah penerima maupun waktu pelaksanaannya semua ditentukan dari pusat.

15) Persentase Korban Bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial

Pada tahun 2017-2021 Jumlah keluarga yang mendapat layanan perlindungan sosial berbanding lurus dengan jumlah korban bencana yang ada.

Tabel 2.139
Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Layanan
Perlindungan Sosial Di Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	119	66	55	58	51
2.	Jumlah korban bencana	119	66	55	58	51
3.	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Tabel 2.140
Kejadian Bencana di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angin ribut	36	24	5	0	23
2.	Kebakaran	56	28	20	0	19
3.	Tanah longsor	18	5	30	10	9

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

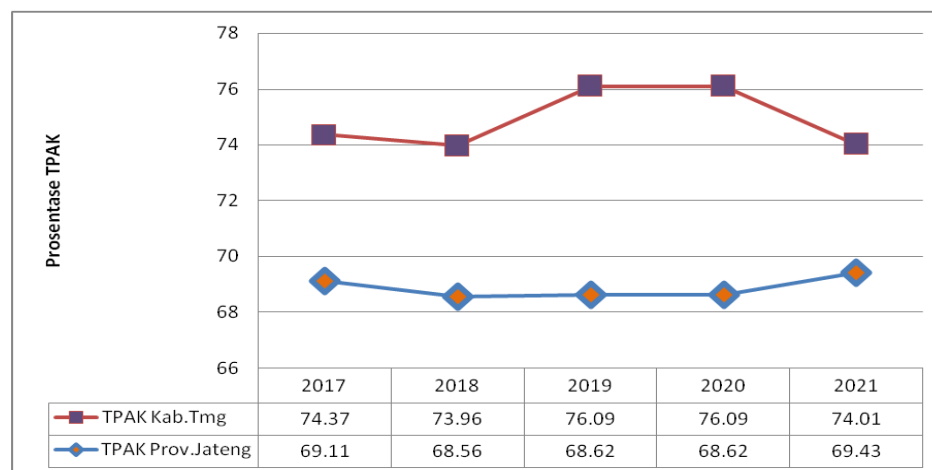
Kejadian bencana dilihat dari jenis kejadian, bencana angin ribut menduduki peringkat tertinggi pada tahun 2021 dibanding bencana lainnya.

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK tinggi merupakan salah satu indikasi tingginya kesempatan kerja yang tersedia sehingga orang terserap dalam lapangan kerja yang ada atau sedang mencari kerja atau bahkan mempersiapkan usaha.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

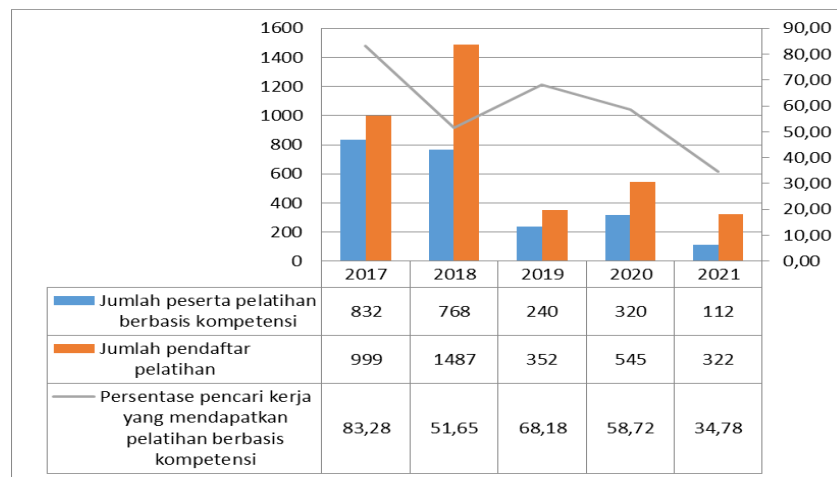
Gambar 2.28
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Sepanjang 5 tahun terakhir, kondisi ketenagakerjaan penduduk Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 ke 2021 TPAC Kabupaten Temanggung mengalami penurunan, demikian juga TPT, sehingga bukan hanya faktor jumlah penganggur saja yang mempengaruhi TPAC tapi

berkurang dan bertambahnya angkatan kerja juga berpengaruh, diantaranya yang beralih ke ibu rumah tangga, mendapat tambahan jumlah penduduk usia kerja dari mahasiswa, dimana ibu rumah tangga dan mahasiswa merupakan usia kerja tetapi bukan angkatan kerja. TPAK Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir selalu lebih tinggi dari TPAK Provinsi Jateng yang menunjukkan bahwa lebih tingginya pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

2) Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut.



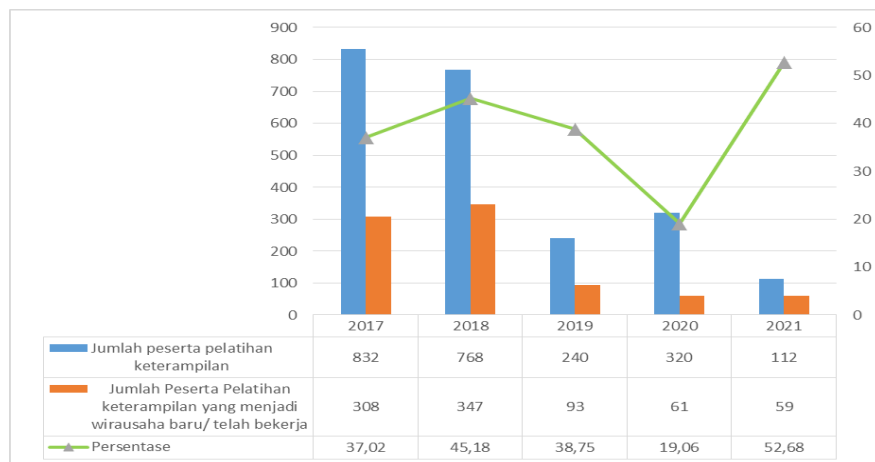
Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2021

Gambar 2.29

Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun 2017-2021

Pelatihan keterampilan berbasis kompetensi pada tahun 2021 berasal dari dana APBD sebanyak 7 jurusan yaitu: Menjahit pakaian wanita dewasa; Pembuatan roti dan kue; Otomotif sepeda motor; Juru gambar arsitektur; Bahasa Inggris; Desain grafis dan jurusan kecantikan rambut dan kulit. Tahun 2021, total pendaftar 322 orang dan dilatih sebanyak 112 orang.

3) Persentase peserta pelatihan keterampilan yang menjadi wirausaha baru/telah bekerja

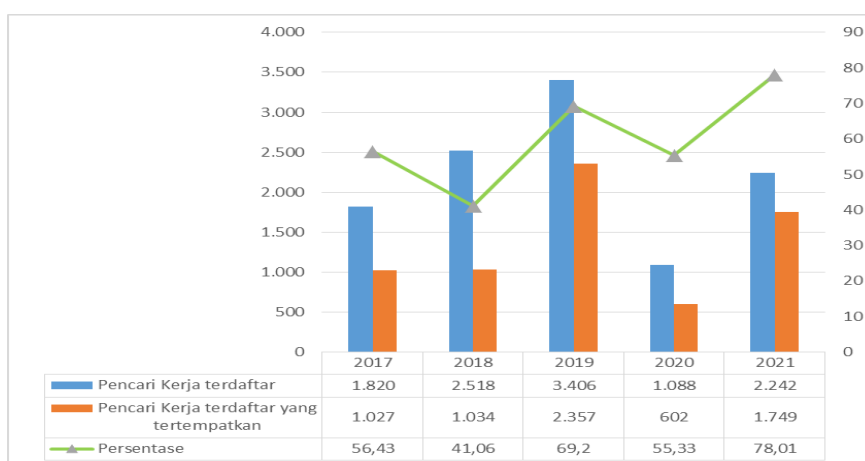


Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2021

Gambar 2.30
 Persentase Peserta Pelatihan Keterampilan yang Menjadi Wirausaha Baru/Telah Bekerja Tahun 2017 – 2021

4) Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan

Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021 terlihat fluktuatif, hal ini karena menyesuaikan dengan permintaan tenaga kerja yang ada dengan ketrampilan dan latar belakang pendidikan pencari kerja yang mendaftar.



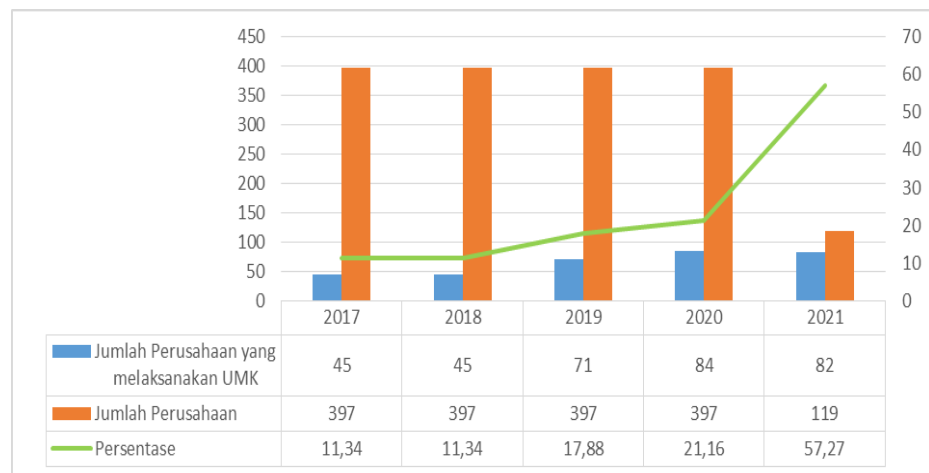
Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung tahun 2021

Gambar 2.31
 Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Tahun 2017-2021

Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan cenderung fluktuatif karena capaiannya tergantung pada banyaknya pendaftar dan seberapa banyak dapat menempatkan. Persentasenya juga relatif kecil, karena pencaker terdaftar tidak dapat maksimal termonitoring, hanya pencaker terdaftar yang ditempatkan difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja saja yang dapat termonitoring, baik bekerja di luar negeri maupun dalam negeri. Lowongan pekerjaan meningkat dan trendnya selalu naik meskipun masih ada pandemi covid-19 di tahun 2021.

5) Persentase Perusahaan yang Telah Membayarkan Upah Sesuai UMK

UMK Kabupaten Temanggung tahun 2021 adalah sebesar Rp1.885.000,00 dan harapannya semua perusahaan informal di Kabupaten Temanggung membayar tenaga kerjanya dengan upah yang besarnya memenuhi UMK Tahun 2021.



Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung tahun 2021

Gambar 2.32

Persentase Perusahaan yang Telah Membayarkan Upah Sesuai UMK tahun 2017-2021

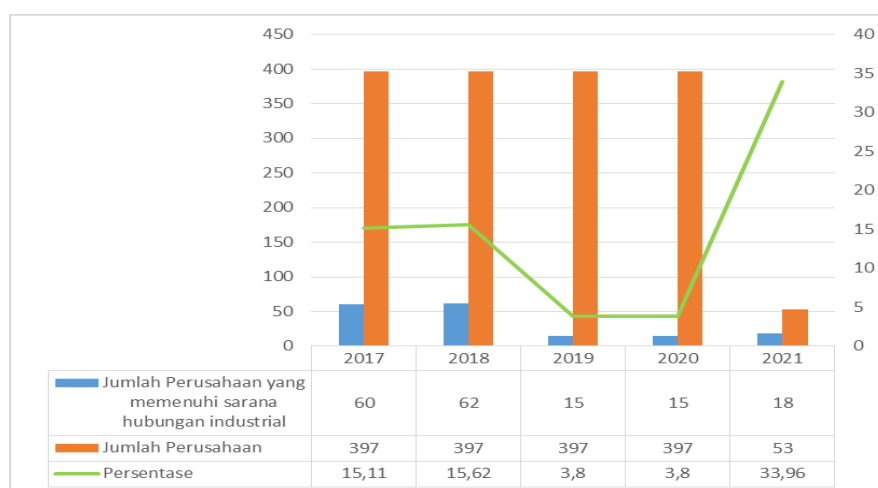
Sejak tahun 2017 sistem Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) berubah menjadi online, banyak perusahaan yang belum memasukkan data perusahaannya ke aplikasi WLKP. Sejak tahun 2019, Disnaker berupaya keras mendapatkan data dengan mengadakan kunjungan langsung ke perusahaan yang

ada di Kabupaten Temanggung. Jumlah perusahaan yang telah memenuhi wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP) online baru 119 perusahaan.

6) Persentase pemenuhan sarana hubungan industrial

Sarana hubungan industrial yang dihitung adalah (a) Perjanjian kerja bersama/perjanjian kerja yang berpedoman pada peraturan perusahaan bagi perusahaan yang belum memiliki serikat pekerja; (b) Serikat Pekerja; (c) LKS Bipartit; dan (d) Kepesertaan BPJS.

Persentase pemenuhan sarana hubungan industrial dapat dilihat pada gambar berikut ini.



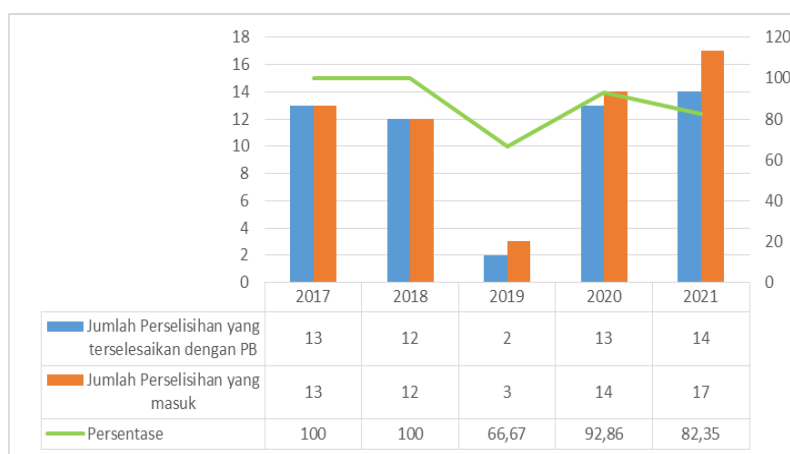
Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2021

Gambar 2.33
Persentase Pemenuhan Sarana Hubungan Industrial Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Mulai tahun 2019 data didapat dengan kunjungan langsung ke perusahaan-perusahaan se-Kabupaten Temanggung dan baru terdata 98 perusahaan dari 397 perusahaan atau sekitar 25%, dengan 16.587 pekerja dari 27.751 pekerja atau baru sekitar 60%. Pada Tahun 2020 ada penambahan data menjadi 110 perusahaan dengan 18.223 pekerja. Baru 18 perusahaan yang memenuhi sarana HI di tahun 2021.

7) Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama

Perselisihan hubungan industrial yang dimediasi adalah perselisihan hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja atau serikat pekerja. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan secara berjenjang. Namun demikian Disnaker Kabupaten Temanggung hanya dapat melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai pada tahap mediasi dengan Perjanjian Bersama. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama Tahun 2017-2021 fluktuatif mengikuti jumlah perselisihan yang terjadi.

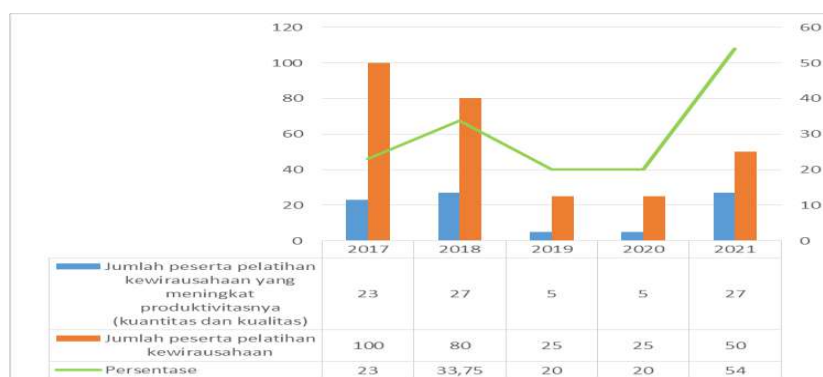


Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2021

Gambar 2.34

Jumlah Perselisihan yang terselesaikan dengan Perjanjian Bersama

8) Persentase peningkatan produktivitas kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang



Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2021

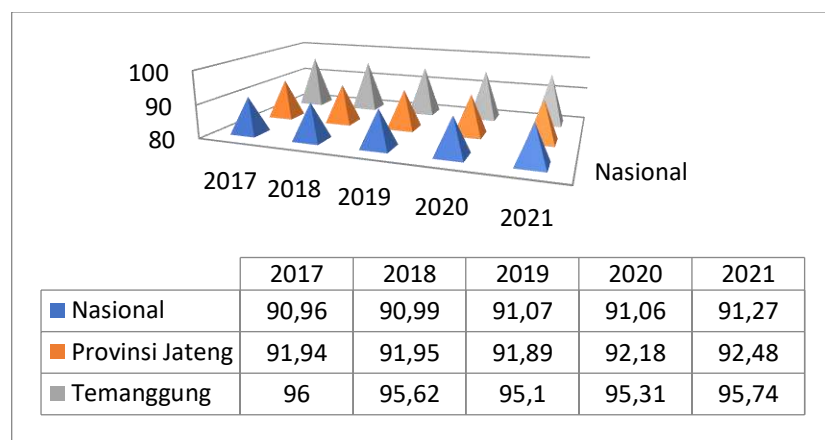
Gambar 2.35

Persentase peningkatan produktivitas kewirausahaan Kabupaten Temanggung Tahun 2017- 2021

Peningkatan produktivitas kewirausahaan dilakukan dengan kegiatan pelatihan skill personal, sehingga diharapkan dapat meningkatkan dari wirausaha rintisan menjadi berkembang. Pelatihan produktivitas bagi wirausaha baru pada Tahun 2021 berjumlah 50 orang, dari jumlah tersebut 27 orang peserta diantaranya telah meningkat produktivitasnya.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1) Indek Pembangunan Gender (IPG)



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2021

Gambar 2.36

Indek Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Berdasarkan data dari Kementerian PP dan PA tahun 2021 capaian IPG Kabupaten Temanggung (95,74) lebih tinggi dari IPG tingkat Nasional (91,27) dan lebih tinggi dari pencapaian tingkat Provinsi Jawa Tengah (92,48).

Perbandingan Komponen Pembentuk IPG Antara Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Temanggung, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.141

Perbandingan Komponen Pembentuk IPG Antara Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

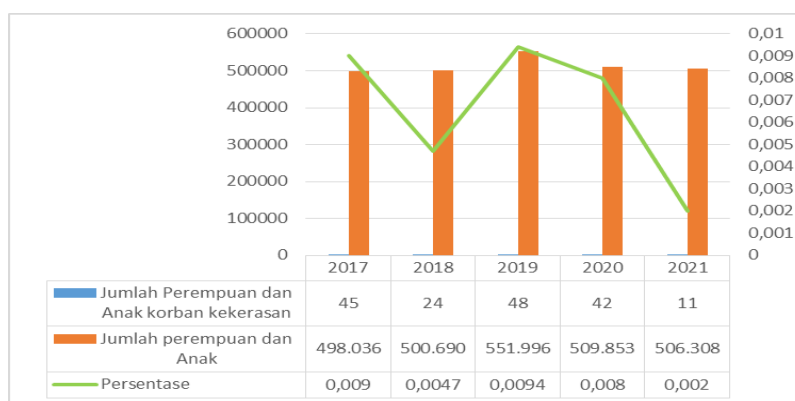
No	Uraian	Angka Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata Rata Lama Sekolah		Penghasilan Perkapita	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Temanggung	73,81	77,57	12,12	12,59	7,54	7,02	11.098	8.819

No	Uraian	Angka Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata Rata Lama Sekolah		Penghasilan Perkapita	
		L	P	L	P	L	P	L	P
2	Jawa Tengah	72,61	76,42	12,71	12,93	8,17	7,34	15.253	9.805

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

2) Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi dalam beberapa bentuk, dan penanganan pun menyesuaikan kebutuhan pemulihan dari bentuk kekerasan yang mereka alami.



Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung, Polres Temanggung, 2021

Gambar 2.37

Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

KDRT di Kabupaten Temanggung cenderung fluktuatif. Pada tahun 2021 korban kekerasan mengalami penurunan dari 42 menjadi 11. Beberapa kasus pada tahun 2021 ini yaitu laporan kasus KDRT sebanyak 3 kasus, kekerasan terhadap anak 5 orang, 1 korban pelecehan seksual, dan 2 korban persetubuhan anak. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat sudah banyak upaya untuk membangun kepedulian terhadap KDRT, baik melalui Women Crisis Center (WCC), Unit Pelayanan Terpadu (PTT) di setiap kecamatan, PPA (pelayanan Perempuan dan Anak) di Polres, pendampingan dari Dinas Sosial, koordinasi lintas sektoral melalui P2TP2A (pos pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak) dan optimalisasi peran masyarakat dalam pencatatan dan pelaporan kasus KDRT. Selain itu sudah dilakukan upaya-upaya preventif berupa sosialisasi kepada anak sekolah dan organisasi kemasyarakatan. Sebagai upaya

pengecehan berupa sosialisasi, edukasi, penyuluhan dan peningkatan kapasitas lembaga penanganan untuk lebih ditingkatkan.

3) Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Pemerintah

Salah satu ukuran kontribusi perempuan dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan keluarga adalah partisipasi angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan dapat dilihat dari jumlah semua angkatan kerja perempuan baik disektor swasta maupun sektor pemerintah. Partisipasi angkatan kerja perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2021 sebanyak 1,80%.

Tabel 2.142
Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah perempuan di lembaga pemerintah	4.216	4.508	3.711	3.536	3.349
2	Jumlah angkatan kerja perempuan	196.600	182.753	196.675	174.643	187.543
3	Persentase (%)	2,14	2,46	1,88	2,02	1,80

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung, 2021

Untuk jumlah perempuan di lembaga pemerintah angka menurun dikarenakan jumlah angkatan kerja yang dapat terserap di lembaga pemerintahan turun imbas dari efisiensi sumber daya manusia secara Nasional, serta banyak ASN Perempuan yang telah Purna (Pensiun).

4) Rasio Perangkat Daerah yang Menerapkan Kebijakan Responsif Gender dalam Penyusunan Renja SKPD

Dengan mengintegrasikan Aspirasi Kebutuhan permasalahan laki-laki dan perempuan ke dalam perencanaan PUG, didasarkan kepada hasil analisis gender yang menggunakan data terpilah/statistik gender. Untuk menyusun Anggaran Responsif Gender (ARG) digunakan Analisa Gender yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan pembangunan.

Tabel 2.143
Rasio PD yang Menerapkan Kebijakan Responsif Gender dalam
Penyusunan Renja SKPD Kabupaten Temanggung
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PD yang menerapkan ARG	23	23	20	21	21
2	Jumlah PD	46	46	48	48	46
3	Persentase (%)	50,00	50,00	41,67	43,75	45,65

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung, 2022

5) Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak Perempuan

Tabel 2.144
Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak Perempuan Kabupaten
Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kekerasan terhadap anak perempuan yang melapor dan ditangani	43	15	16	24	7
2	Jumlah anak perempuan	113.739	113.222	111.545	111.545	113.645
3	Persentase	0,039	0,013	0,014	0,022	0,006

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung, 2021

Adapun kasus yang menimpa perempuan dan anak perempuan di kabupaten Temanggung pada tahun 2021 tersebar di 12 kecamatan, yaitu: Temanggung, Tembarak, Selompampang, Kranggan, Bejen, Parakan, Ngadirejo dan Bulu. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 ada 7 kasus yang tertangani sesuai standar pelayanan minimal.

6) Persentase Desa Sayang Ibu dan Bayi

Salah satu upaya Pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan adalah dengan Gerakan Sayang Ibu (GSI). Gerakan Sayang Ibu (GSI) merupakan gerakan percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi yang dilaksanakan bersama-sama. Yakni, antara pemerintah dan masyarakat untuk lebih meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian terhadap kesehatan ibu dan bayi.

Tabel 2.145
Persentase Desa Sayang Ibu dan Bayi Kabupaten Temanggung Tahun
2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa sayang ibu dan bayi	50	62	82	82	91
2	Jumlah desa	289	289	289	289	289
3	Persentase	17,30	21,45	28,37	28,37	31,49

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung, 2021

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menurunkan AKB dan AKI, diantaranya adalah dengan integrasi kegiatan yang ada ditingkat desa, yaitu desa Siaga dan memaksimalkan FKD /Forum Kesehatan Desa.

7) Persentase Terbentuknya Kecamatan Layak Anak

Tabel 2.146
Kecamatan Layak Anak Tahun 2017-2021

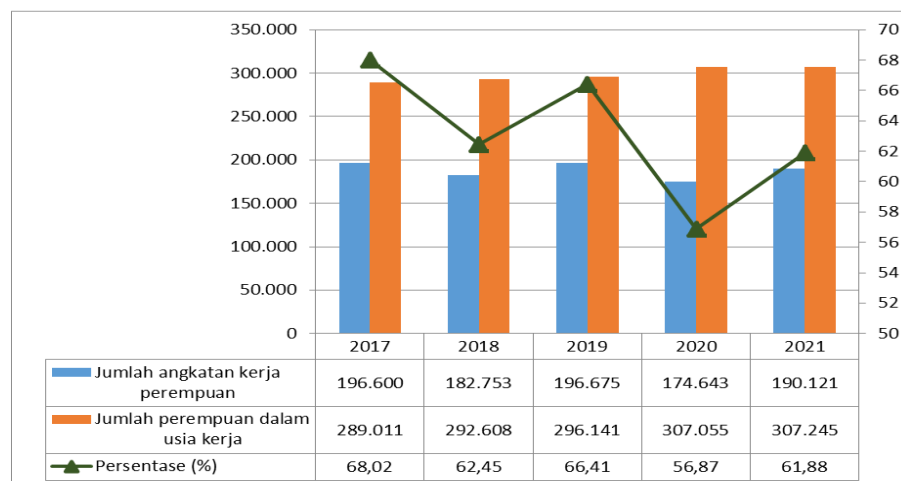
No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kecamatan layak Anak	0	4	8	12	16
2	Jumlah Kecamatan	20	20	20	20	20
3	Persentase (%)	0	20%	40%	60%	80%

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung, 2021

Prosentase kecamatan dan kelurahan layak anak semakin meningkat dan sudah mencapai 80%. Hingga saat ini hanya 4 kecamatan yang belum berpredikat kecamatan layak anak yaitu Kecamatan Tretep, Wonobojo, Kledung, dan Bejen. Kegiatan Kecamatan dan kelurahan/desa layak Anak sifatnya adalah pembinaan dan pengembangan dalam kegiatan kecamatan, desa/kelurahan layak anak, bersama lintas sektoral.

8) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Temanggung terlihat fluktuatif berkisar 56% hingga 68%. Dengan situasi yang semakin terkendali dari pandemi covid-19 di tahun 2021, jumlah angkatan kerja perempuan semakin meningkat setelah sempat menurun di tahun 2020.



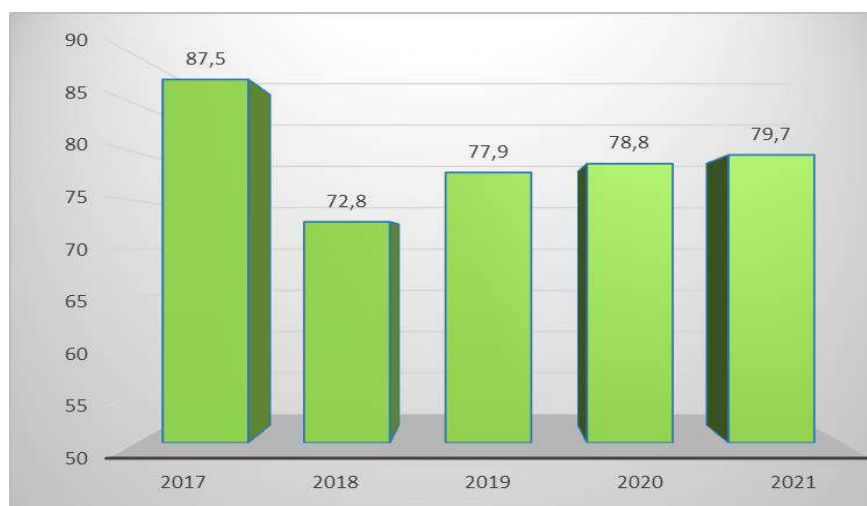
Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung, 2021

Gambar 2.38
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

1) Skor Pola Pangan Harapan

Realisasi Skor PPH di Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2021

Gambar 2.39
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Tren PPH dari tahun 2018 - 2021 selalu meningkat. Beberapa hal yang mendukung peningkatan skor PPH diantaranya adanya partisipasi kelompok wanita tani dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi

pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral untuk konsumsi keluarga. Berdasarkan data ini, maka masih perlunya upaya peningkatan skor PPH untuk dapat meningkatkan konsumsi atau ketersediaan pangan, baik jumlah dan komposisi/keragaman pangan serta perencanaan konsumsi atau ketersediaan pangan.

2) Rasio Ketersediaan Pangan

Rasio ketersediaan pangan dipengaruhi oleh produksi bersih beras serta jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut. Rasio ketersediaan pangan dihitung dari jumlah beras yang tersedia dibagi jumlah penduduk kali indeks konsumsi beras perkapita pertahun. Jumlah beras yang tersedia dihitung dari GKG (gabah kering giling) x 63,84% (angka konversi nasional dalam perhitungan NBM 2020), dimana Indeks kebutuhan beras perkapita 65,78 kg/tahun (data dari susenas 2019).

Perhitungan: Total Produksi Padi per triwulan IV sebesar 1.212.627 kwintal. Jumlah beras = 77.414.107,680 kg/th, jumlah penduduk Kabupaten Temanggung 800.276 jiwa. Kebutuhan per kapita 65,78 kg/th, sehingga kebutuhan beras = 52.642.155 kg/tahun.

3) Persentase Desa Pelaksana Program Ketahanan Pangan

Desa Pelaksana Program Ketahanan Pangan adalah suatu lokasi (desa/kelurahan/kelompok) yang mempunyai Program yang dilaksanakan secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dalam rangka mendukung program pemerintah untuk penanganan daerah prioritas intervensi stunting dan/atau penanganan prioritas daerah rentan rawan pangan atau pemantapan daerah tahan pangan, serta meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar.

Rumus Persentase Desa Pelaksana Program Ketahanan Pangan yaitu Jumlah Desa/kelurahan pelaksana Kegiatan dibagi jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung.

Sampai dengan TW IV desa/kelurahan/kelompok pelaksana Program ketahanan Pangan yang berkelanjutan sejumlah 81 lokasi serta jumlah seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung 289.

4) Rasio lumbung pangan masyarakat

Cadangan Pangan masyarakat di Kabupaten Temanggung banyak berupa cadangan pangan di lumbung pangan masyarakat.

Hasil pendataan terhadap sarana dan prasarana distribusi di Kabupaten Temanggung yang pernah dilaksanakan oleh DKPPP sampai dengan TW IV 2021 menunjukkan terdapat 50 unit lumbung pangan di kabupaten Temanggung namun beberapa dalam kondisi tidak aktif dan 28 dalam kondisi aktif.

5) Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman

Keamanan pangan secara definisi adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.

Kualitas dari bahan baku pangan olahan yang berasal dari pangan segar, dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti residu pestisida dan obat-obatan terkait perlakuan on-farm pada saat budidaya, serta sifat genetik/kemungkinan transgenik. Penanganan pasca panen yang kurang tepat, penyimpanan yang kurang memperhatikan sifat bahan pangan juga akan menurunkan mutu dan kualitas pangan. Demikian pula alat dan cara pengolahan pangan yang tidak tepat juga berpotensi mengurangi kandungan gizi, seperti pemasakan yang terlalu lama, mengalami oksidasi, atau kurang higienenya peralatan yang digunakan juga dapat menimbulkan masalah apabila makanan tersebut dikonsumsi.

Akhir-akhir ini isu mengenai bahan tambahan pangan yang berbahaya juga menjadi bahasan utama di bidang keamanan pangan. Bahan tambahan pangan (BTP) adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Bahan tambahan pangan ini dapat berupa pewarna, pemanis, penyedap rasa dan pengawet.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang keamanan pangan adalah tingkat keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu secara rutin dilakukan pemeriksaan sampel pangan di 5 pasar di Kabupaten Temanggung (Pasar Temanggung, Pasar Parakan, Pasar Ngadirejo, Pasar Selopampang, Pasar Tembarak, Pasar Kranggan) pada tahun 2021 telah diuji 55 sample PSAT dan 1 sample banding dengan hasil pemeriksaan semua negatif.

Tabel 2.147
Rekapitulasi Hasil Teskit Residu Pestisida Komoditas Sayuran DKPPP
Kabupaten Temanggung

No	Nama Komoditas	Hasil Tes di Pasar				
		Temanggung	Parakan	Ngadirejo	Kranggan	Selopampang
1	Cabai Rawit	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif
2	Cabai Keriting	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif
3	Sawi Cesim	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif
4	Kubis	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif
5	Jipang	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif
6	Tomat	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif
7	Kentang	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif
8	Wortel	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif
9	Buncis	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif
10	Bawang Putih	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif
11	Bawang Merah	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2021

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

1) Persentase Penyelesaian Fasilitasi Pertanahan

Tabel 2.148
Capaian Persentase Penyelesaian Fasilitasi Pertanahan

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah permasalahan sengketa tanah yang	Na	Na	8	8	39

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
	teratasi					
2	Jumlah permasalahan sengketa	Na	Na	8	8	39
3	Persentase	Na	Na	100	100	100

Sumber : DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui mulai tahun 2019 capaian indikator program persentase penyelesaian fasilitasi pertanahan dapat terealisasi 100%, dengan kata lain seluruh permasalahan sengketa tanah dapat diselesaikan. Faktor pendorong capaian indikator ini adanya koordinasi yang baik antar instansi Perangkat Daerah terkait.

Berkaitan dengan adanya Reforma Agraria, di Kabupaten Temanggung terdapat kegiatan Akes Reforma Agraria di Desa Ketintang Kecamatan Jumo. Reforma Agraria ini untuk mengatasi persoalan umum di bidang agraria, sosial, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan yang melibatkan berbagai stakeholder. Kegiatan ini juga melibatkan pemberdayaan masyarakat maupun peningkatan UMKM untuk kemakmuran rakyat melalui penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

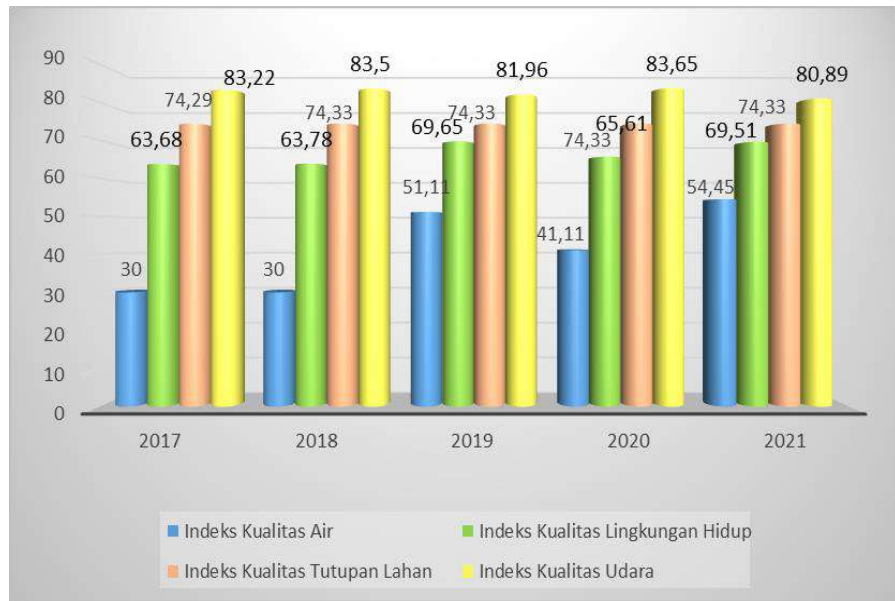
Klasifikasi dan rentang nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai berikut:

Tabel 2.149
Klasifikasi Dan Rentang Nilai IKLH

Klasifikasi	Rentang Nilai
Sangat Baik	90 - 100
Baik	70 - 89,9
Sedang	50 - 69,9
Buruk	25 - 49,9
Sangat Buruk	0 - 24,9

Sumber: Metode Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2020 -2024 KLHK

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat dari grafik berikut.



Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2021

Gambar 2.40
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung tahun 2021 sebesar 69,51 dengan kategori sedang. Capaian tahun 2021 apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 mengalami peningkatan. Faktor pendorong capaian IKLH adalah capaian nilai IKA tahun 2021 lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020, untuk nilai IKL sama dengan tahun 2020. Sebagai rekomendasi dan tindak lanjutnya adalah tindak lanjut aksi untuk peningkatan kualitas air dan udara baik dengan cara meminimalisir potensi terjadinya pencemaran air sungai di Kabupaten Temanggung maupun dengan cara penghijauan di wilayah Kabupaten Temanggung.

2) Persentase Dokumen Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tabel 2.150
Persentase Dokumen Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2017-2021

Tahun	Kegiatan dan/atau Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan	Kegiatan dan/atau Usaha di Kabupaten Temanggung	Persentase
2017	740	1662	44,52
2018	1012	1934	52,33

Tahun	Kegiatan dan/atau Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan	Kegiatan dan/atau Usaha di Kabupaten Temanggung	Persentase
2019	1694	2.760	61,38
2020	1.892	6.033	36,43
2021	1.892	6.033	36,43

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2021

Capaian persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, untuk tahun 2021 ada perubahan perhitungan indikator tersebut di atas sehingga capaian tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020.

Tabel 2.151
Capaian Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2021

Uraian	Capaian Tahun 2021
Jumlah Dokumen RPPLH yang Tersusun (Dokumen)	1
Jumlah Dokumen RPPLH yang Wajib ada (Dokumen)	1
Persentase (%)	100

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2021

Pada Tahun 2021 Kabupaten Temanggung menyusun Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2051 sebagai upaya perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2051.

- 3) Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup

Tabel 2.152
Capaian Persentase Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Persetujuan UKL UPL dan AMDAL yang dikeluarkan	Na	Na	Na	Na	0
2	Jumlah Perusahaan atau kegiatan yang mengajukan persetujuan	Na	Na	Na	Na	0
3	Persentase	Na	Na	Na	Na	0

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2021

Capaian persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup belum mencapai target, karena: (a) Kurangnya kesadaran beberapa pemrakarsa/pelaku usaha /kegiatan untuk mengajukan persetujuan sesuai dengan klasifikasi kegiatan/usahanya; (b) Transisi kebijakan OSS terkait UU Cipta Kerja ke dalam aplikasi menjadi OSS berbasis resiko sehingga penerapan di lapangan masih terhambat; (c) Terbitnya peraturan perundangan baru sehingga ada perubahan mekanisme pengajuan persetujuan; (d) Pengajuan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) yang berada di DPM sedangkan sistem tersebut belum terintegrasi dengan sistem informasi Lingkungan Hidup; (e) Pada tahun 2021 persentase capaian 0 bukan berarti target tidak dapat tercapai akan tetapi disebabkan karena belum ada perusahaan yang mengajukan Persetujuan UKL-UPL dan AMDAL. Sebagai upaya rekomendasi dan tindak lanjut dari indicator program ini adalah melaksanakan sosialisasi PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4) Indeks Kualitas Air

Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Temanggung sejak tahun 2017-2021 cenderung fluktuatif.

Tabel 2.153
Nilai IKA Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

IKA	Capaian Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
	30,00	30,00	51,11	41,11	54,45

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2021

Pada Tahun 2021 nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 54,45. Capaian di tahun 2021 mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 46,00. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 Nilai IKA mengalami kenaikan. Faktor

pendorong capaian adalah adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaan pengujian kualitas air di Kabupaten Temanggung.

5) Indeks Kualitas Udara

Perkembangan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Temanggung tahun 2017-2021 cukup fluktuatif.

Tabel 2.154
Nilai IKU Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

IKU	Capaian s.d Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
	83,22	83,50	81,96	83,65	80,89

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2021

Pada tahun 2021 nilai IKU sebesar 80,89, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai IKU Kabupaten Temanggung mengalami penurunan. Capaian tahun 2021 mencapai 95,16% dibandingkan dengan target di tahun 2021.

6) Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Perkembangan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Temanggung tahun 2017-2021 yaitu:

Tabel 2.155
Capaian IKTL Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

IKTL	Capaian s.d Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
	74,29	74,33	74,33	74,33	74,33

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2021

Dari tahun 2017 capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Temanggung meningkat sampai dengan tahun 2018 sedangkan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Temanggung sama yaitu sebesar 74,33%.

7) Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.156
Luas Kekritisian Lahan di Kabupaten Temanggung

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)						Jumlah
		Tdk Kritis (TK)	Potensial Kritis (PK)	Agak Kritis (AK)	Kritis (K)	Sangat Kritis (SK)	Non Pertanian	
1	Bansari	472.64	1,394.76	192.50	-	-	-	2,059.90

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)						Jumlah
		Tdk Kritis (TK)	Potensial Kritis (PK)	Agak Kritis (AK)	Kritis (K)	Sangat Kritis (SK)	Non Pertanian	
2	Bulu	1,694.31	2,156.60	495.16	67.70	-	-	4,413.77
3	Kledung	131.50	2,536.51	1,198.24	258.35	-	-	4,124.60
4	Ngadirejo	2,179.61	1,133.81	261.11	-	-	-	3,574.53
5	Parakan	1,554.84	540.89	135.15	85.21	-	-	2,316.09
6	Selopampang	905.29	1,213.84	305.04	-	-	-	2,424.17
7	Tembarak	890.07	1,026.91	323.56	7.64	-	-	2,248.18
8	Tlogomulyo	27.03	2,447.35	328.19	51.11	-	-	2,853.68
9	Bejen	1,212.44	1,804.12	1,788.04	1,223.06	-	573.64	6,601.30
10	Candiroto	937.91	3,199.71	828.12	386.45	-	411.63	5,763.82
11	Gemawang	1,202.28	2.20	2,708.91	3,129.66	-	523.34	7,566.39
12	Jumo	1,982.51	742.65	28.58	-	-	372.40	3,126.14
13	Kaloran	279.63	3,412.00	1,336.41	-	722.64	798.03	6,548.71
14	Kandangan	2,735.35	2,537.66	1,215.83	-	-	696.91	7,185.75
15	Kedu	1,489.28	712.66	946.36	-	-	620.94	3,769.24
16	Kranggan	-	-	2,288.98	69.93	1,991.28	855.79	5,205.98
17	Pringsurat	-	13.88	3,282.69	1,458.40	0.04	1,375.21	6,130.22
18	Temanggung	912.33	1,432.36	-	-	-	980.15	3,324.84
19	Tretep	-	-	2,800.32	828.99	-	93.90	3,723.21
20	Wonoboyo	-	-	4,008.03	-	-	256.97	4,265.00
TOTAL		8,607.02	26,307.91	4,471.22	7,566.50	2,713.96	7,558.91	87,225.52

Sumber: Inventarisasi Kekritisan Lahan TA 2017 Kab. Temanggung

Kabupaten Temanggung memiliki luas lahan tidak kritis sebesar 8,607.02 Ha, lahan potensial kritis sebesar 26,307.91 Ha, lahan agak kritis sebesar 4,471.22 Ha, lahan kritis sebesar 7,566.5 Ha dan lahan sangat kritis sebesar 2,713.96 Ha. Pada tahun 2021 upaya yang dilakukan untuk penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung seluas 10,4716 Ha dari 10.280,46 Ha lahan kritis di Kabupaten Temanggung. Luasan lahan kritis yang diupayakan penanganannya pada tahun 2021 melebihi target yang telah ditetapkan yaitu seluas 5 Ha tiap tahunnya.

Tabel 2.157

Capaian Proporsi Luas Lahan Kritis
Terhadap Total Luas Lahan Temanggung Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian s.d Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Proporsi Luas Lahan Kritis tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	%	Na	Na	0,17	0,17	0,10

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2021

Faktor pendorong capaian upaya penanganan lahan kritis

di Kabupaten Temanggung antara lain: (a) Adanya komitmen dari Kepala Daerah dalam upaya penanganan lahan kritis melalui Gerakan Konservasi Air dan Tanah Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung; dan (b) Adanya dukungan dari berbagai pihak dalam upaya penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung (Pemerintah Daerah, BPDAS, CSR, Pemerintah Desa, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Relawan dll).

Faktor penghambat terkait upaya penanganan lahan kritis antara lain masih minimnya kesadaran sebagian masyarakat terkait penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung, masih fokus hanya pada keuntungan nilai ekonomi semata, pengelolaan lahan sebagian masyarakat belum menunjukkan kesadaran tentang perlindungan lingkungan hidup khususnya konservasi tanah dan air serta budaya masyarakat dalam penggunaan dan pengolahan tanah di area lereng gunung yang sulit untuk diubah. Rekomendasi dan tindaklanjut yang akan dilaksanakan dalam upaya penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung antara lain dengan melaksanakan Gerakan Konservasi Air dan Tanah Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung pada tahun-tahun berikutnya.

8) Cakupan RTH Publik

Cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dari tahun 2017 hingga tahun 2021 cenderung stabil. Luas Ruang Terbuka Hijau Publik di Kabupaten Temanggung hingga tahun 2021 sebesar 79.628,31 m².

Tabel 2.158
Cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan RTH Publik	1,06	1,08	1,10	1,10	1,10

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2021

Capaian cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik tahun 2021 sebesar 1,10 dengan perhitungan jumlah RTH Publik (79.628,31 m²) dan 20% Luas IKK yang mempunyai RTH (72.341,03 m²) sehingga diperoleh hasil 1,10. Faktor pendorong

capaian tersebut karena responsibilitas masyarakat terhadap RTH Publik, sedangkan faktor penghambatnya antara lain (a) Keterbatasan lahan RTH; (b) Keterbatasan anggaran untuk penyediaan RTH Publik / taman; (c) Pengelolaan dan penataan terbatas; (d) Jumlah SDM yang terbatas. Rekomendasi dan tindak lanjut dari indikator cakupan ruang terbuka hijau (RTH) publik yaitu dengan melakukan pengelolaan RTH Publik yang sudah ada.

9) Persentase Usaha yang Memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3

Jumlah permohonan izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) dan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan DPRKPLH Kabupaten Temanggung tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 cenderung fluktuatif.

Tabel 2.159
Persentase Rekomendasi Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) Tahun 2017-2020

No	Tahun	Capaian Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	4	1	4	3
2	Jumlah Permohonan Izin Penyimpanan LB3 yang diajukan	7	7	6	6
3	Capaian (%)	57,14	14,29	66,67	50,00

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2021

Perkembangan capaian indikator program ini cenderung fluktuatif dengan capaian tertinggi yaitu tahun 2019 dari 6 permohonan izin yang diajukan sebanyak 4 rekomendasi dikeluarkan dengan persentase sebesar 66,67%, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 6 permohonan izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) yang diajukan sebanyak 3 rekomendasi yang dikeluarkan dengan persentase sebesar 50,00% sehingga capaian tahun 2020 lebih rendah dari capaian tahun 2019.

Karena diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PPLH tahun 2021 maka indikator tentang pengelolaan limbah B3 berubah menjadi

Persentase Kajian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan formulasi perhitungan baru.

Tabel 2.160
Persentase Kajian Teknis Penyimpanan Limbah B3

No	Tahun	Tahun 2021
1	Jumlah kajian terhadap rincian teknis Limbah B3	0
2	Jumlah rincian teknis Limbah B3 yang diajukan	0
3	Capaian (%)	0

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2021

Sampai dengan akhir tahun 2021 persentase kajian teknis penyimpanan limbah B3 nihil dengan faktor penghambat sebagai berikut: (a) Ketidaktaatan Usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3; (b) Peraturan baru keluar tahun 2021 yaitu Permen LHK dan PP Nomor 22 Tahun 2021; dan (c) Pada tahun 2021 capaian indikator tersebut 0% karena tidak ada kegiatan dan/atau usaha yang mengajukan rincian teknis Limbah B3 sehingga tidak ada kajian terhadap rincian teknis limbah B3. Rekomendasi dan tindak lanjut dalam mendukung indikator program ini yaitu dengan mendorong kegiatan dan/atau usaha untuk membuat rincian teknis limbah B3.

10) Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup

Tabel 2.161
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang Memiliki Izin

No	Tahun	Capaian Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	69	78	52	20
2	Jumlah Usaha/Kegiatan yang memiliki izin Lingkungan dan Izin PPLH	104	116	125	136
3	Capaian (%)	66,35	67,24	41,60	14,71

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2021

Tabel 2.162
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang Memiliki Dokumen Lingkungan di Terbitkan oleh Pemkab

No	Tahun	Capaian Tahun 2021
1	Jumlah usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan	50
2	Target usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan	50

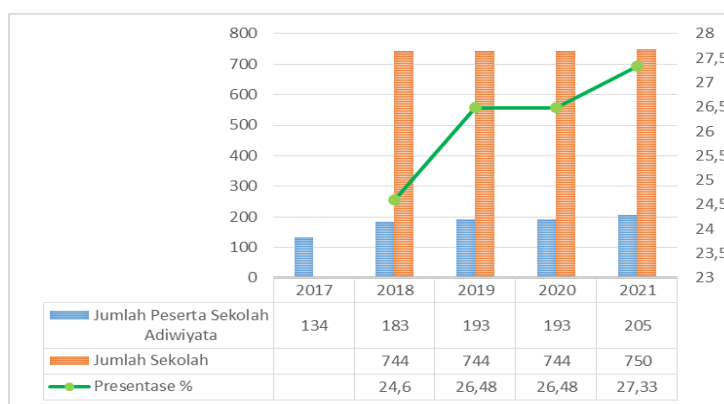
No	Tahun	Capaian Tahun 2021
	pengawasan	
3	Capaian (%)	100

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2021

Capaian kinerja mulai tahun 2017-2018 cenderung meningkat, sedangkan mengalami penurunan di tahun 2019. Capaian terendah yaitu pada tahun 2020 hal ini disebabkan karena anggaran untuk pengawasan kegiatan/usaha dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Temanggung, sehingga dari 136 kegiatan/usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH hanya terlaksana pembinaan dan pengawasan sebanyak 20 kegiatan/usaha dengan persentase sebesar 14,71%. Pada tahun 2021 dilakukan pembinaan dan pengawasan sebanyak 50 kegiatan dan/atau usaha dari target yang ditetapkan sebanyak 50 kegiatan dan/atau usaha (100%).

11) Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan

Sampai akhir tahun 2021 capaian Sekolah Adiwiyata sebesar 27,33% apabila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,85 persen ini disebabkan karena Adanya tambahan sekolah berpredikat Adiwiyata Kabupaten sebanyak 12 sekolah, untuk rekomendasi dan tindak lanjutnya sekolah yang sudah mendapatkan predikat Adiwiyata bisa meng-*upgrade* tingkatannya dan membina sekolah yang ada di Kabupaten Temanggung.



Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2021

Gambar 2.41
Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

12) Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup

Tabel 2.163
Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup yang Diusulkan Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja	Capaian s.d Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah yang mendapatkan penghargaan	na	na	na	na	14
Jumlah usulan penghargaan yang diusulkan tiap tahun	na	na	na	na	17
Persentase (%)	na	na	na	na	82,35

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2021

Realisasi sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar 14 penghargaan, terdiri dari 2 penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional dan 12 penghargaan Sekolah Adiwiyata Kabupaten atau secara persentase sebesar 82,35%.

13) Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti

Tabel 2.164
Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti Tahun 2017- 2021

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kasus Lingkungan	9	14	15	7	12
Jumlah Kasus Lingkungan yang ditindaklanjuti	9	14	15	7	12
Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2021

Setiap aduan yang masuk seluruhnya dapat diselesaikan sehingga capaian persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti sebesar 100%. Faktor pendorong dalam upaya penyelesaian kasus aduan lingkungan antara lain adanya koordinasi antar SKPD terkait dalam penyelesaian aduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung. Rekomendasi dan tindak lanjut dalam upaya meminimalisir terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup adalah memberikan edukasi kepada

masyarakat dalam melaksanakan kegiatan agar meminimalisir dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

14) Persentase Sampah yang Tertangani

Pada tahun 2021 timbulan sampah total sebesar 182.562,96 ton per tahun meningkat sebesar 922,88 ton atau 0,5%, hal ini disebabkan karena penambahan jumlah penduduk. Hingga Triwulan IV Tahun 2021 penanganan sampah yang dilakukan sebesar 40.111,63 ton/tahun atau 21,97% dari total timbulan sampah, sedangkan pengurangan sampah yang sudah dilakukan oleh masyarakat sebesar 18.306,91 ton/tahun atau 10,03% dari total timbulan sampah, sehingga total pengelolaan sampah yang telah dilakukan di Kabupaten Temanggung baik penanganan sampah dan pengurangan sampah adalah sebesar 58.418,55 ton/tahun atau 32,00%. Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung baik penanganan maupun pengurangan mengalami peningkatan dibanding pada tahun-tahun sebelumnya. Secara persentase tidak terlihat kenaikan yang signifikan dikarenakan terjadi kenaikan jumlah penduduk yang berpengaruh pada jumlah timbulan sampah.

Tabel 2.165
Persentase Sampah yang Tertangani Tahun 2017-2021

	Uraian	Capaian s.d Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengurangan sampah					
	Jumlah sampah terkelola di Bank Sampah (Ton/tahun)	6,02	6,77	7,22	164,00	49,90
	Jumlah Sampah Terkelola di TPSD (Ton/tahun)	-	-	-	-	18.256,30
	Persentase pengurangan sampah (%)	-	-	-	-	10,03

	Uraian	Capaian s.d Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
2	Penanganan sampah					
1	Jumlah sampah tertangani (Ton/tahun)	127,68	141,8	154,74	43.839,97	40.112,11
	Jumlah sampah terkelola di TPS 3R (Ton/tahun)	77,18	64,72	71,49	8.689,15	1.887,63
	Jumlah sampah tertangani di TPA (Ton)	50,50	77,08	83,25	35.150,82	38.224,48
2	Jumlah Timbulan sampah (Ton/hari)	482,68	486,78	490,92	497,64	500,17
	Jumlah Timbulan Sampah (Ton/tahun)	173.765	175.241	176.731	181.640,08	182.562,96
	Persentase penangan sampah (%)	27,70	30,52	32,99	24,23	21,97

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2021

Pengelolaan sampah yang intensif baik melalui TPS 3R, bank sampah relatif sudah baik, akan tetapi kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dimulai dari sumbernya masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target-target yang telah ditentukan. Adanya TPSD diharapkan menjadi salah satu sarana pengelolaan sampah yang efisien sehingga dapat mengurangi jumlah sampah masuk TPA. Penanganan sampah di TPA yang mencakup 38.224,48 ton/tahun mencapai rata-rata berkisar 20,94% dari total timbulan sampah. Apabila dibandingkan dengan data Triwulan III mengalami kenaikan. Secara umum penanganan sampah di TPA ke depan diharapkan semakin berkurang, dan lebih banyak penanganan pada sumbernya, TPS 3R, bank sampah atau penanganan lainnya. Secara umum pemrosesan sampah di TPA meliputi pemilahan sampah plastik dan sampah organik yang berupa daun untuk dikompos, sementara penanganan gas metan masih rendah.

Kondisi TPA Sanggrahan dengan luas 4,72 ha diperkirakan umur teknis sampai tahun 2020, akan tetapi akhir tahun 2020 adanya perluasan tanah TPA melalui tukar guling tanah Bengkok

Desa Sanggrahan Kranggan dengan tanah milik Pemda Kabupaten Temanggung sehingga TPA Sanggrahan masih dapat beroperasi.

15) Cakupan Pelayanan Persampahan

Tabel 2.166
Cakupan Area Layanan Sampah Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah desa dan kelurahan terlayani sampah	86	88	136	131	155
Jumlah desa / kelurahan	289	289	289	289	289
Rata-rata	29,76	30,44	47,06	45,33	53,63

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2021

Tahun 2021, jumlah desa dan kelurahan terlayani Pemda sebanyak 128 desa/kelurahan dan swasta/mandiri sebanyak 27 desa/kelurahan, sehingga total sebanyak 155 desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung yang mendapat pelayanan persampahan atau sebesar 53,63% dari total jumlah desa/kelurahan. Capaian sebesar 53,63% sudah memenuhi target yang dibebankan, yaitu sebesar 50% pada tahun 2021.

Berkaitan dengan data yang dibutuhkan untuk aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, beberapa hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung:

a. Mitigasi emisi Gas Rumah Kaca

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung telah melakukan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Temanggung tahun 2016-2020 sebagai laporan tahun 2021. Emisi dan serapan GRK berdasarkan kategori atau masing-masing sub sektor dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.167
Emisi dan Serapan GRK Kabupaten Temanggung Berdasarkan Kategori

Sektor	Emisi GRK (Gg CO ₂ e)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Energi	779,28	401,82	433,06	771,09	433,06
Produk dan Proses	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37

Sektor	Emisi GRK (Gg CO ₂ e)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Industri					
Pertanian, Kehutanan dan Penggunaan Lahan	295,27	612,01	2.209,67	274,56	274,56
Pengelolaan Limbah	102,64	105,30	103,03	103,34	103,34
Total	1.177,53	1.119,50	2.746,12	1.149,35	1.149,35

Sumber: Buku Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Temanggung, 2021

Emisi GRK Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, sedangkan mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan emisi Tahun 2018. Emisi di Tahun 2019 termasuk kategori tinggi dikarenakan keberadaan data tentang sektor peternakan, lahan dan pertanian (terutama pada sub sector perubahan lahan yang tinggi). Emisi Kabupaten Temanggung berfluktuatif dengan emisi tertinggi pada tahun 2019 sebesar 2.746,1 Gg CO₂e. Sektor AFOLU (Agriculture, Forestry, and Land Use) berkontribusi paling besar terhadap emisi GRK di Kabupaten Temanggung disusul oleh sektor pengadaan dan penggunaan energi, pengelolaan limbah, kemudian IPPU (Industrial Process and Product Use). Data pada tahun 2021 masih diasumsikan sama dengan tahun 2020. Berikut merupakan sumber yang menjadi prioritas dalam sistem inventarisasi GRK, yaitu: 1) Transportasi, 2) Industri Pengolahan, 3) Ternak, 4) Pengolahan limbah cair, 5) N₂O langsung dari pengolahan tanah, 6) Pengolahan Sawah, 7) Pembakaran Biomassa, 8) N₂O Tak langsung dari pengolahan tanah dan 9) Limbah Padat. Keselerasan data terkait penurunan emisi GRK ini perlu juga melihat capaian kinerja provinsi tahun 2021 sebesar 6.028,02 ton CO₂e yang berasal dari sektor pengelolaan limbah.

b. Konservasi Lingkungan

Mulai akhir tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menanam pohon konservasi sekurangnya ada 500 ribu pohon dan dari non pemerintah 220 ribu pohon. Kebutuhan riil pohon untuk penanaman ini di atas 15 juta bibit pohon untuk seluruh Kabupaten Temanggung, sebagai upaya dalam penataan lingkungan hidup sehingga dengan konservasi lahan, diharapkan

dapat meminimalkan polusi dan pencemaran lainnya, sehingga bumi ini menjadi lestari.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Dokumen kependudukan yang ditingkatkan kualitas pelayanannya yaitu: (a) Kartu Keluarga (KK); (b) KTP-el; (c) Akta Kelahiran; (d) Akta perkawinan; (d) Akta Kematian; (e) Surat keterangan Pindah.

Dengan dasar diatas maka untuk penilaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan 6 pelayanan di atas sebagai sampel pelayanan Kependudukan dan pencatatan Sipil.

Tabel 2.168
Kategorisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 - 64,99	D	tidak baik
65,00 - 76,60	C	kurang baik
76,61 - 88,30	B	baik
88,31 - 100,00	A	sangat baik

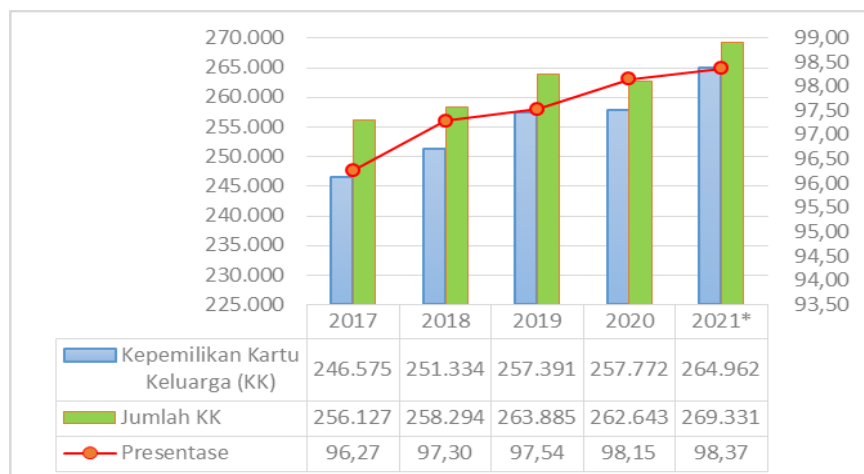
Sumber : PermenPAN & RB No. 14 Tahun 2017

Tabel 2.169
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan	Nilai IKM Tahun 2021
1	Kartu Keluarga (KK)	83,88
2	KTP-el	84,12
3	Akta Kelahiran	83,22
4	Akta Perkawinan	83,52
5	Akta Kematian	84,78
6	Surat Keterangan Pindah	83,52
	rata2 nilai IKM	83,84

Sumber: Dindikcapil Kabupaten Temanggung, 2021

2) Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga



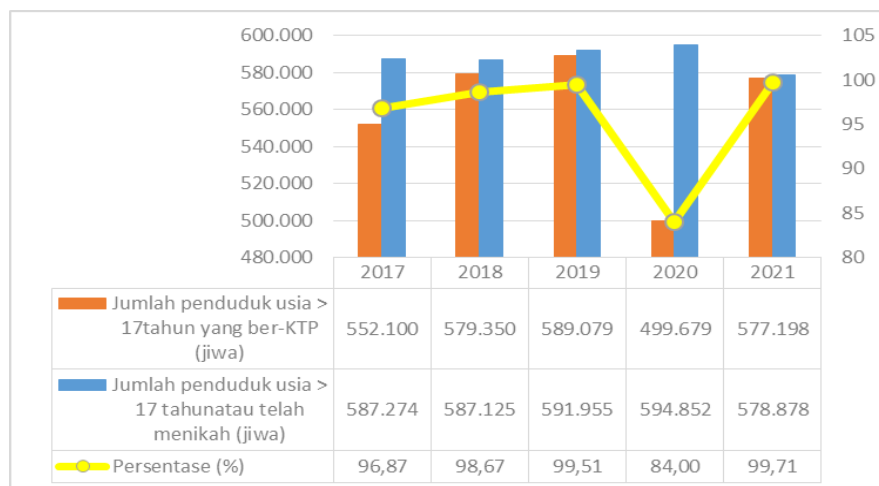
Sumber: Dindikcapil Kabupaten Temanggung, 2021

Gambar 2.42
Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2017-2021

Jumlah penduduk yang belum mempunyai Kartu Keluarga pada tahun 2021 sebanyak 4.369 Kepala Keluarga diantaranya disebabkan oleh: (a) Pasangan baru menikah belum mengajukan permohonan pisah KK; dan (b) Dalam satu rumah harusnya terdapat dua kepala keluarga tapi tidak mengajukan pisah KK.

3) Persentase Kepemilikan KTP Elektronik

Persentase kepemilikan KTP Elektronik sebagai berikut:



Sumber: Dindikcapil Kabupaten Temanggung, 2021

Gambar 2.43
Persentase Penduduk ber-KTP el per satuan penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Pada tahun 2018 dan 2019 terjadi peningkatan penduduk yang memiliki KTP elektronik, sementara pada tahun 2020

menurun dikarenakan covid-19. Pelayanan perekaman KTP-el sempat berhenti, namun Dindikcapil melaksanakan perekaman kembali dengan menerapkan *social distancing* sehingga menyebabkan belum semua wajib KTP dapat melaksanakan rekam data KTP-el. Pada tahun 2021 presentase kepemilikan KTP-el sudah naik kembali Karena Dindikcapil sudah melaksanakan pelayanan perekaman KTP-el. Dapat diketahui jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP-el pada tahun 2021 semester 1 adalah 1.680 jiwa, yang tersebar di 20 Kecamatan.

4) Persentase kepemilikan KIA

Tabel 2.170
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	65.321	76.625	117.231	132.497	240.880
2	Jumlah wajib KIA	185.015	193.137	221.911	232.772	156.621
3	Presentase Kepemilikan KIA	35,30	45,51	52,83	56,92	65,02

Sumber: Dindikcapil Kabupaten Temanggung, 2021

Kepemilikan KIA selama 5 tahun terdapat kenaikan yang signifikan karena pelayanan KIA di sekolah dan di keramaian dilakukan secara jemput bola. Dasar dari Kegiatan Penerbitan KIA adalah Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Pada tahun 2016 Kabupaten Temanggung merupakan satu dari enam belas kabupaten/kota yang diujicobakan untuk penerbitan KIA tingkat Nasional dikarenakan persentase kepemilikan Akta kelahiran yang tinggi. Dapat dilihat presentase kepemilikan KIA dari tahun 2017 hingga tahun 2021 terus meningkat.

5) Persentase Pelayanan Surat Pindah dan Datang Tepat Waktu

Surat Keterangan Penduduk Pindah dan Datang adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana Dindikcapil untuk Warga Negara Indonesia yang melaporkan kedatangannya guna masuk menjadi penduduk di Kabupaten

Temanggung dan pindah ke luar Kabupaten/Provinsi. Batasan waktu pelayanan surat pindah datang tepat waktu yaitu 7 hari.

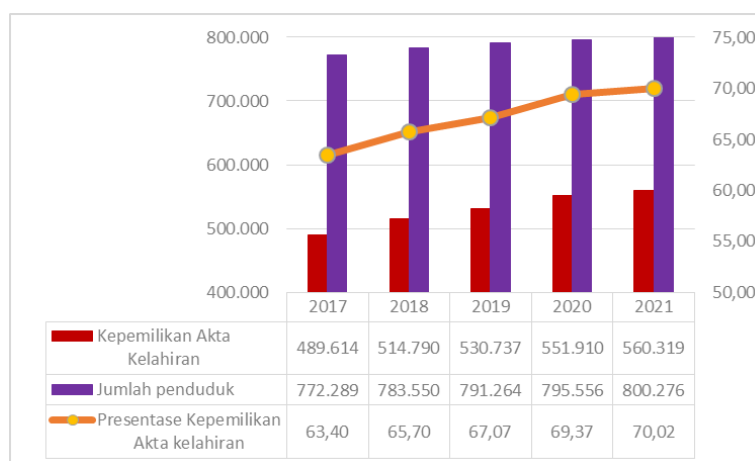
Tabel 2.171
Persentase Pelayanan Surat Pindah dan Datang Tepat Waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penerbitan pindah datang tepat waktu	6.027	6.470	9.176	13.494	18.722
2	Jumlah pemohon surat pindah dan datang	6.027	6.470	9.176	13.494	18.722
3	Presentase Pelayanan surat pindah dan datang tepat waktu	100	100	100	100	100

Sumber: Dindikcapil Kabupaten Temanggung, 2021

Semua pemohon surat pindah dan datang sudah terlayani secara tepat waktu dan tidak ada pemohon yang tidak terlayani.

6) Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran



Sumber: Dindikcapil Kabupaten Temanggung, 2021

Gambar 2.44
Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Peningkatan angka kepemilikan akta kelahiran menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat akan tertib administrasi kependudukan khususnya dalam pembuatan akta kelahiran serta adanya perubahan regulasi pemerintah pusat yang mempermudah beberapa syarat pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Jumlah jiwa yang belum mempunyai akta kelahiran adalah 243.646 jiwa dan tersebar di 20 Kecamatan.

7) Persentase Penerbitan Akta Kematian

Tabel 2.172
Persentase Penerbitan Akta Kematian Kabupaten Temanggung
Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah penerbitan akta kematian	12.245	14.797	8.666	5.023	6.507
Jumlah pemohon akta kematian	12.245	14.797	8.666	5.023	6.507
Persentase penerbitan akta kematian	100	100	100	100	100

Sumber: Dindikcapil Kabupaten Temanggung, 2021

Penerbitan akta kematian pada dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Temanggung baru tersaji pada tahun 2017 yang pencapaiannya cukup tinggi karena adanya jemput bola akta kematian. Pada tahun 2018 terjadi penurunan dan pada tahun 2019 kembali karena adanya PROGRAM SANKA program pemberian santunan kematian bagi penduduk miskin sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa kematian keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk tahun 2020 pelaporan kematian pada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil menurun karena pelayanan secara tatap muka dilaksanakan secara terbatas dan lebih mengutamakan pelayanan secara online sementara masyarakat masih beranggapan bahwa pelayanan secara online sulit dan itu sangat berpengaruh pada pelaporan akta kematian. Dengan adanya kegiatan sosialisasi adminduk baik pelayanan secara online maupun offline (langsung datang ke Dindikcapil) secara berkelanjutan dan juga adanya inovasi dalam rangka peningkatan pelayan adminduk maka penerbitan Akta kematian meningkat kembali.

8) Persentase Pelayanan Akta Perkawinan Tepat Waktu

Batasan waktu Pelayanan Akta Perkawinan Tepat Waktu adalah 3 hari. Semua permohonan pencatatan perkawinan telah diterbitkan akta perkawinannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.173
Persentase Pelayanan Akta Perkawinan Non Muslim Tepat Waktu
Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kutipan akta perkawinan yang diterbitkan	174	172	133	151	200
2	Jumlah permohonan pencatatan perkawinan	174	172	133	151	200
3	Persentase pelayanan akta perkawinan non muslim	100	100	100	100	100

Sumber: Dindikcapil Kabupaten Temanggung, 2021

9) Persentase Pelayanan Akta Perceraian Tepat Waktu

Akta Perceraian diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri. Batasan waktu Pelayanan Akta Perceraian Tepat Waktu adalah 4 hari. Hingga saat ini tidak ada permohonan pencatatan perceraian yang didaftarkan yang tidak diterbitkan akta perceraiannya sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.174
Persentase Pelayanan Akta Perceraian Non Muslim Tepat Waktu
Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kutipan akta perceraian yang diterbitkan	41	27	32	40	42
2	Jumlah permohonan pencatatan perceraian	41	27	32	40	42
3	Persentase pelayanan akta perceraian non muslim	100	100	100	100	100

Sumber: Dindikcapil Kabupaten Temanggung, 2021

10) Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

Pada tahun 2021 belum semua perangkat daerah pengguna data kependudukan telah melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan data dengan Dindikcapil Karena sebagian perangkat daerah masih belum mempunyai aplikasi, dan sebagian lagi sudah mempunyai aplikasi tetapi dipegang oleh pihak ketiga sehingga masih sulit untuk mengintegrasikan aplikasi.

Tabel 2.175
 Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
 Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah perangkat daerah yang telah melaksanakan PKS pemanfaatan data	3	7	21	21	26
2	Jumlah perangkat daerah pengguna data kependudukan	21	21	21	21	31
3	Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	14,29	33,3	100	100	83,87

Sumber: Dindikcapil Kabupaten Temanggung, 2021

Perangkat daerah yang belum melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan Dindikcapil adalah BKPSDM, Dindikpora, BKBPPPPA, Dinas Pertanian, Disnakan, Disnakertran, Disperindagkop dan UKM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Bappeda, BPBD, Kantor Kesbang, Satpol PP dan Damkar, juga Inspektorat.

11) Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Nomor 060/047/2021 tanggal 7 juni 2021 terdapat 24 jenis pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil terus mengembangkan inovasi untuk semua pelayanan guna memberikan kemudahan dalam mengurus administrasi kependudukan.

Tabel 2.176
 Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah inovasi layanan	6	12	20	29	19
2	Jenis Layanan	31	31	31	31	24
3	Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	19,36	38,71	64,52	93,55	79,16

Sumber: Dindikcapil Kabupaten Temanggung 2021

Hingga tahun 2021 sudah ada 20 pelayanan yang di inovasi dan satu pelayanan belum di inovasi namun demikian Dindukcapil selalu melaksanakan inovasi sesuai arahan dari pusat guna kemudahan pelayanan.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1) Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun

Klasifikasi status desa berdasarkan rentang nilai pada Indeks Desa Membangun (IDM) sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.177

Klasifikasi Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)

STATUS DESA	RENTANG NILAI
Mandiri	IDM > 0,8155
Maju	0,7072 < IDM < 0,8155
Berkembang	0,5989 < IDM < 0,7072
Tertinggal	0,4907 < IDM < 0,5989
Sangat tertinggal	IDM < 0,4907

Sumber : Kementerian Desa PDTT, 2020.

Tabel 2.178

Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Kondisi Desa	2017	2018	2019	2020	2021
Rata-rata nilai IDM	0,65	0,65	0,67	0,68	0,69

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2021

Nilai rata-rata IDM di Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan capaian 0,1 dari angka Tahun 2020 yaitu sebesar 0,69 dengan predikat desa berkembang.

2) Persentase Desa yang Berpredikat Mandiri

Persentase desa yang berpredikat Mandiri/Maju di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.179

Persentase Desa yang berpredikat Mandiri di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Kondisi Desa	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Desa Mandiri	n.a	1	0	10	15
Jumlah Desa	266	266	266	266	266

Kondisi Desa	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase	n.a	0,37	0	3,76	5,64

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2021

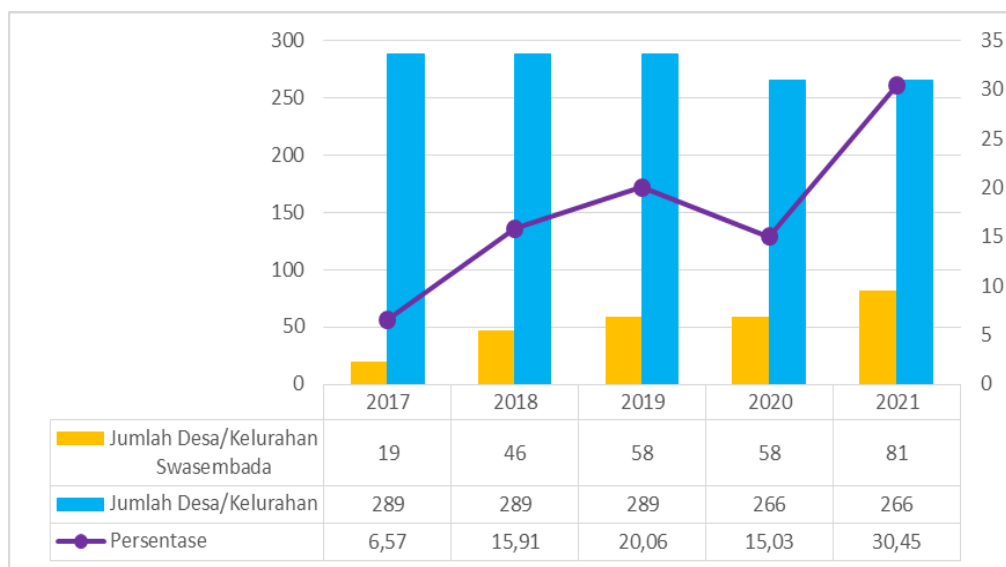
Terdapat peningkatan desa dengan status mandiri dari yang semula tahun 2020 sebanyak 10 desa menjadi 15 desa di tahun 2021. Kenaikan status desa tersebut disebabkan karena terdapat kenaikan pada beberapa indikator perbaikan akses pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Tabel 2.180
Jumlah desa berdasarkan klasifikasi IDM Tahun 2017-2021

Kondisi Desa	2017	2018	2019	2020	2021
Desa Mandiri	n.a	1	0	10	15
Desa Maju	n.a	27	48	61	76
Desa Berkembang	n.a	212	211	195	175
Desa Tertinggal	n.a	25	7	0	0
Desa Sangat Tertinggal	n.a	1	0	0	0

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2021

3) Persentase Desa yang Berklasifikasi Swasembada



Sumber: Dinpermades, 2021

Gambar 2.45
Persentase Desa/Kelurahan Swasembada
di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Peningkatan perkembangan desa dan kelurahan tergolong sangat pesat, hal ini menunjukkan bahwa desa dan kelurahan

telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga desa dan kelurahan dalam mencukupi kebutuhannya dapat dilaksanakan secara mandiri.

4) Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa

Berikut ini capaian persentase desa cepat berkembang di Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

Tabel 2.181
Persentase Desa Cepat Berkembang Berdasarkan Indeks Pembangunan Desa dan Kelurahan Tahun 2019-2021

Kondisi Desa	2019	2020	2021
Jumlah Desa Cepat Berkembang	58	40	95
Jumlah Desa dan kelurahan	289	266	266
Persentase	20,06	15,03	35,71

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2021

Persentase desa yang cepat berkembang di Kabupaten Temanggung tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020. Berdasarkan Indeks Pembangunan Desa rata-rata di Kabupaten Temanggung menunjukkan desa cepat berkembang sejumlah 95 desa, desa berkembang ada 163 desa dan desa kurang berkembang ada 8 desa.

5) Persentase Desa yang Menetapkan RKPDesa Tepat Waktu dan Sesuai Aturan

RKP Desa menjadi dasar dan syarat mutlak bagi desa untuk menetapkan APBDDesa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa. RKPDesa yang disusun tepat waktu bila ditetapkan selambatnya tanggal 30 September.

Tabel 2.182
Persentase Desa yang Menetapkan Penyusunan RPKDesa Tepat Waktu dan Sesuai Aturan Tahun 2017-2021

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu	n.a	56	117	205	256
Jumlah Desa	266	266	266	266	266

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase	-	21,5	43,98	77,07	96,24

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2021

Desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu dan sesuai aturan mengalami peningkatan, dikarenakan perangkat desa dan masyarakat desa yang semakin memahami pentingnya perencanaan dalam proses pembangunan desa.

6) Persentase Desa yang Menetapkan APBDes Tepat Waktu dan Sesuai Aturan

Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa/BPD menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember.

Tabel 2.183
Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tepat Waktu dan Sesuai Aturan Tahun 2017-2021

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	n.a	62	228	228	266
Jumlah desa	266	266	266	266	266
Persentase	-	23,7	85,71	85,71	100

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2021

Pada tahun 2021 persentase desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu yaitu 266 desa atau sudah mencapai 100%.

7) Persentase Desa yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Desa yang Sesuai Aturan

Kabupaten Temanggung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menjalin kerjasama dengan Badan Pemeriksa Pembangunan dan Keuangan Provinsi Jawa Tengah untuk menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diterapkan mulai Tahun 2018. Penerapan Siskeudes berbasis aplikasi ini dilaksanakan di 266 desa se-Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.184
Persentase Desa yang Menerapkan Siskeudes Tahun 2017-2021

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Desa yang menerapkan siskeudes	n.a	266	266	266	266
Jumlah desa	266	266	266	266	266
Persentase	-	100	100	100	100

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2021

Persentase desa yang menerapkan siskeudes sudah mencapai 100%. Hal tersebut dikarenakan aplikasi siskeudes yang diterapkan mulai Tahun 2018 sudah dapat digunakan oleh pemerintah desa melalui pelatihan dan pendampingan. Siskeudes ini sudah ada yang online dan masih ada yang off line karena terkendala jaringan yang belum masuk desa.

8) Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan Semua Kegiatan di APBDes Tepat Waktu

Persentase Desa yang menyelesaikan semua kegiatan tepat waktu mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.185
Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan Semua Kegiatan di APBDes Tepat Waktu Tahun 2017-2021

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Desa yang menyelesaikan semua kegiatan tepat waktu	n.a	217	266	266	255
Jumlah Desa	266	266	266	266	266
Persentase	0	81,8	100	100	95,86

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2021

Belum semua desa menyelesaikan kegiatannya tepat waktu, pada Tahun 2021 masih ada 11 desa yang belum menyelesaikan kegiatannya.

9) Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif

Adapun capaian persentase lembaga kemasyarakatan desa/kel yang aktif tahun 2017-2021, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.186
 Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel yang Aktif
 Tahun 2017-2021

No	Lembaga Kemasyarakatan desa/kel	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah LKD aktif					
	Rukun Tetangga (RT)	5.178	5.178	5.178	5.201	5.201
	Rukun Warga (RW)	1.348	1.348	1.348	1.350	1.350
	TP. PKK	310	310	310	310	310
	LPMD/K	289	289	289	289	289
	Posyandu	289	289	289	578	1489
2	Jumlah LKD					
	Rukun Tetangga (RT)	5.178	5.178	5.178	5.201	5.201
	Rukun Warga (RW)	1.348	1.348	1.348	1.350	1.350
	TP. PKK	310	310	310	310	310
	LPMD/K	289	289	289	289	289
	Posyandu	289	289	289	578	1489
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2021

Data capaian tahun 2021 ada peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2020 dikarenakan adanya pemekaran jumlah RW/RT dan semua lembaga yang ada di desa hampir sebagian besar aktif pada Tahun 2021 ada tambahan data Posyandu sebagai Lembaga Kemasyaratan Desa.

10) Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang Aktif

Tabel 2.187
 Persentase BUMDesa yang Aktif Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah BUMDesa yang aktif	121	154	163	227	227
Jumlah BUMDesa	121	154	266	266	227
Persentase BUMDesa yang aktif	100	100	61,28	85,34	100

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2021

Persentase BUMDesa yang aktif pada tahun 2017 sampai tahun 2021 cenderung meningkat, karena adanya tindak lanjut dukungan kegiatan mulai dari dari perencanaan, pembinaan serta pendampingan pembentukan BUMdesa, adanya penyertaan modal BUMDesa baik yang bersumber dari Dana Desa maupun APBD. Data capaian tahun 2021 persentase BUMDesa yang aktif adalah 100%.

11) Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif

Tabel 2.188
Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif
Tahun 2017-2021

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat desa yang aktif	109	109	118	118	118
- UP2K-PKK	21	21	30	30	30
- UED-SP	35	35	35	35	35
- Pasar Desa	24	24	24	24	24
- CPPD	29	29	29	29	29
jumlah Lembaga Ekonomi masyarakat desa	109	109	118	118	118
- UP2K-PKK	21	21	30	30	30
- UED-SP	35	35	35	35	35
- Pasar Desa	24	24	24	24	24
- CPPD	29	29	29	29	29
Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2021

Lembaga ekonomi masyarakat desa dari UP2K-PKK, UED-SP, Pasar Desa dan CPPD seluruhnya aktif karena selalu dilakukan pembinaan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi setiap tahunnya.

12) Persentase Pemberdayaan di Kawasan yang Telah Ditetapkan

Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.189
Persentase Pemberdayaan di Kawasan yang Telah Ditetapkan
Tahun 2017-2021

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
jumlah kawasan yang dikembangkan	2	3	3	3	3
jumlah kawasan yang telah ditetapkan dengan perbup	2	3	3	3	3
persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2021

Upaya pemberdayaan berupa fasilitasi kegiatan pengembangan kawasan perdesaan mulai dari tahap persiapan,

perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengembangan kawasan sudah dilaksanakan pada Tahun 2017 hingga tahun 2021, dimana arah pengembangan kawasan perdesaan yang dilakukan pada tahun ini fokus di Kecamatan Bansari, Candiroto dan Kranggan dengan konsep pengembangan Eduwisata Bansari, pengembangan Pedesaan kawasan Agropolitan Kecamatan Candiroto dan Kranggan.

13) Persentase Laporan Administrasi Desa yang Tepat Waktu

Persentase desa yang tertib administrasi mengalami peningkatan tiap tahun ditunjukkan pada tabel:

Tabel 2.190
Persentase Laporan Administrasi Desa yang Tepat Waktu
Tahun 2017-2021

Kondisi Desa	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah desa yang tertib administrasi	200	213	234	264	266
Jumlah Desa	266	266	266	266	266
Persentase	75	80	87,97	86,84	100

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2021

Data capaian tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 menunjukkan bahwa sebagian besar desa sudah tertib administrasi dan mengisi buku-buku administrasi yang ada sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Terdapat 266 desa yang sudah tertib administrasi dengan menyusun LPPD dan LKPD.

14) Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa

Jumlah aparatur desa yang disiplin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.191
Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa Tahun 2017-2021

Kondisi Desa	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kepala desa dan perangkat desa yang melanggar disiplin	0	0	36	18	0
Jumlah kepala desa dan Perangkat desa	3.123	3.123	3.186	3.285	3.285
Persentase	0	0	1,12	0,55	0

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2021

Implementasi karakter disiplin pada perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsi dapat diukur dengan menggunakan indikator tertib dengan aturan-aturan yang ada, melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, tanpa ada paksaan dari siapapun, dan taat untuk menjalankan tugas dan fungsi.

15) Persentase Desa yang Tertib Pengelolaan Aset

Tabel 2.192
Persentase Desa yang Tertib Mengelola Aset Desa Tahun 2017-2021

Kondisi Desa	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah desa yang tertib mengelola asset	161	191	212	264	266
Jumlah Desa	266	266	266	266	266
Persentase	60,52	71,80	79,69	99,24	100

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2021

Dari 266 desa semua sudah melakukan pencatatan aset tetap, Kartu inventaris barang, label stiker kode klasifikasi barang, tersusunnya Perda pengelolaan kekayaan/aset desa, SK Kepala desa penetapan pengguna aset desa, Sistem Aplikasi Aset desa secara manual dan Siskeudes sudah dilaksanakan tetapi masih ada desa yang kurang lengkap.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1) Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertambahan penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.193
Pertambahan Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Kondisi Desa	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk	758.980	765.659	791.264	791.264	791.264
Laju Pertumbuhan Penduduk	0,86	0,88	0,98	0,98	0,98

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2022

Selama periode 5 tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung mengalami kenaikan.

2) Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kelurahan

Data mikro keluarga merupakan data hasil pengumpulan, pengolahan, berdasarkan pendataan keluarga atau mutasi data keluarga tentang ciri-ciri keluarga meliputi KB (Keluarga Berencana) dan KS (Keluarga Sejahtera) di suatu wilayah sesuai dengan kondisi lapangan dilakukan setiap tahun sekali.

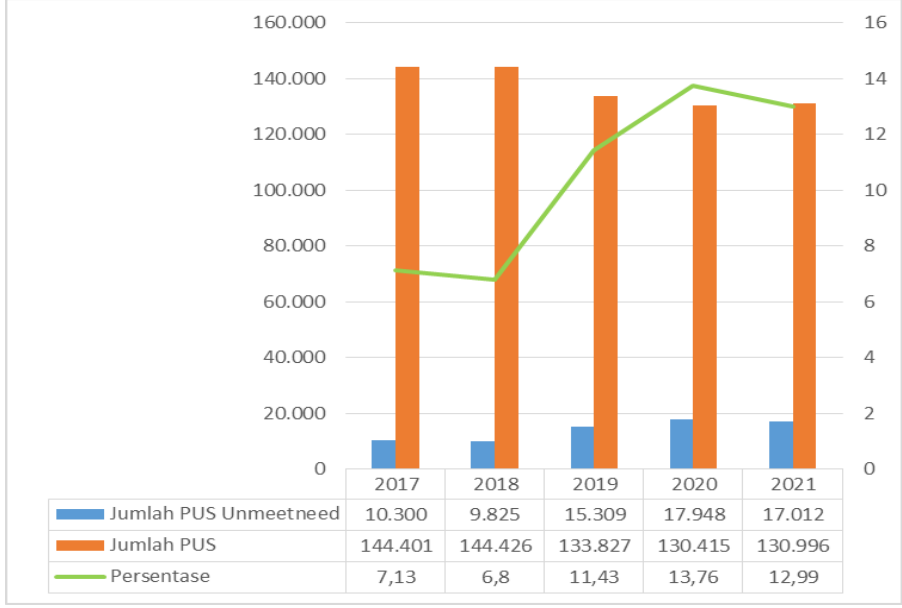
Tabel 2.194
Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/Kelurahan
Kabupaten Temanggung tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah dokumen keluarga yang ada dan yang disajikan	289	289	289	289	289
2	Jumlah desa	289	289	289	289	289
Persentase		100	100	100	100	100

Sumber : DPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2021

3) Persentase Pasangan Usia Subur yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi/Unmetneed

Semakin kecil jumlah persentase *unmetneed* maka nilainya semakin baik. Selama periode tahun 2017-2021, *unmetneed* tertinggi di tahun 2020 sebesar 13,76 dari PUS 130.415, dan terendah di tahun 2018 yaitu 6,8 dari PUS 144.426.



Sumber : DPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2021

Gambar 2.46
PUS yang Ingin Ber-KB tapi Tidak Terlayani (Unmetneed)
Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-2021

Harapan dari *Unmetneed* dari tahun ke tahun adalah menurun, namun pada tahun 2020 angkanya naik terus dikarena ada pemutahiran data yang dilaksanakan di lini lapangan, untuk pencapaian pada tahun 2021 angka *unmetneed* sudah ada penurunan 0,77 dari 13,76% menjadi 12,99%. Salah satu penyebabnya adalah dampak dari pandemi covid 19, yang mana pelayanan tidak bisa dilaksanakan secara optimal khususnya pelayanan MKJP, yang mendukung kelestarian Peserta KB aktif.

4) Persentase Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah 20 Tahun

Tabel 2.195
PUS dengan Istri dibawah 20 Tahun Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PUS < 20 TH	3.756	3.861	2.995	2.038	2.823
2	Jumlah PUS	144.210	143.639	143.830	133.827	130.145
3	Prosentase	2.60	2,69	2.08	1,52	2,16

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung, 2021

Pada tahun 2020 sudah ada upaya peningkatan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat tentang kesehatan reproduksi sehat (KRR) bagi remaja dalam kegiatan PIK Remaja dari jalur organisasi remaja dan jalur sekolah dengan kegiatan SSK (Sekolah Siaga Kependudukan). Pencapaian untuk tahun 2021 angkanya turun berdasarkan hasil PK 2021 dan hasil perkembangan laporan dari Kecamatan.

5) Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun)

Perhitungan ASFR kabupaten Temanggung bersumber dari dinas PPKBPPPA dihitung berdasar hasil Pendataan keluarga yang dilaksanakan pada 5 tahun sekali.

Tabel 2.196
Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kelahiran	n.a	n.a	n.a	616	276
2	Jumlah wanita usia 15 - 19 th	n.a	n.a	n.a	28.899	28.166
3	Persentase				21,32	9,80

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung, 2021

ASFR 15 – 19 tahun di Kabupaten Temanggung perlu juga penanganan lebih lanjut. Hal ini bisa dilihat dari prosentase pernikahan dini yang masih tinggi. Upaya penurunannya dengan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) melalui jalur sekolah (SSK/sekolah siaga kependudukan) dan KIE kepada remaja melalui kegiatan di kelompok pusat informasi konseling remaja (PIK-Remaja). Pencapaian variabel PUS dibawah usia 20 tahun angkanya semakin menurun.

- 6) Persentase PUS yang Mempunyai Pengetahuan dan Pemahaman tentang Semua Jenis Kontrasepsi Modern

Tabel 2.197
PUS yang Mengetahui dan Memahami Tentang Alat Kontrasepsi Modern Kabupaten Temanggung Tahun 2017- 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PUS yang tahu dan memahami alokon modern	118.402	119.774	111.117	107.739	98.622
2	Jumlah PUS	143.639	143.830	133.827	130.415	130.966
3	Persentase	82,43	83,27	83,03	82,61	75,29

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung, 2021

Pengetahuan PUS tentang alokon modern semakin meningkat supaya PUS mau menggunakan alat kontrasepsi dan paham tentang jenis, jangka waktu dan efek samping alokon yang akan digunakan.

- 7) Indeks Pembangunan Keluarga (IPK/I Bangga)

Indek Pembangunan Keluarga/i Bangga Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 sebesar 55,97. Perhitungan ini dilakukan oleh BKKBN dengan menggunakan dasar PK21 atau pendataan tahun 2021. Angka tersebut sudah menunjukkan angka yang baik dibandingkan beberapa kota di Jawa Tengah.

Tabel 2.198
Indek Pembangunan Keluarga/i Bangga Tahun 2021

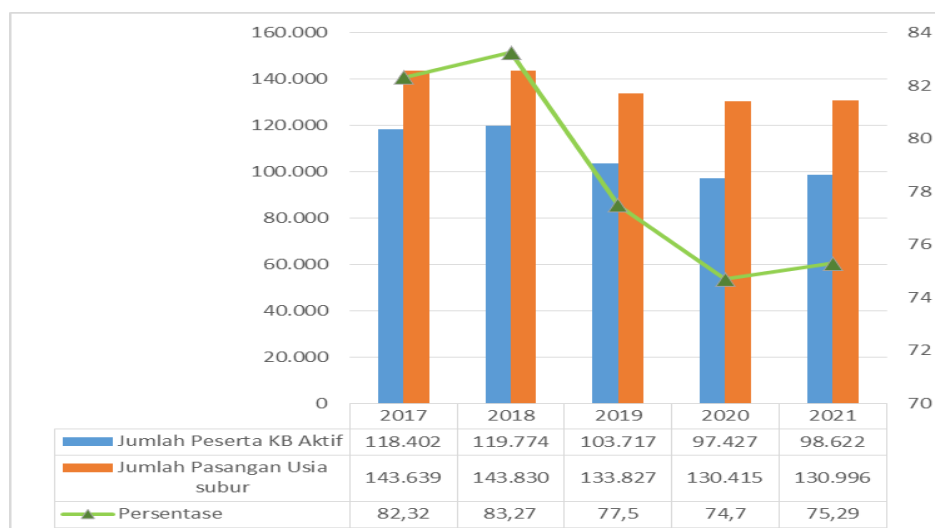
PROVINSI/ KOTA	Indeks Ketentraman	Indeks Kemandirian	Indeks Kebahagiaan	Ibangga
BANYUMAS	58,55	54,68	55,40	56,21
PURBALINGGA	57,47	54,38	54,71	55,52
CILACAP	58,41	54,65	55,26	56,11
BANJARNEGARA	57,69	54,54	54,95	55,73

PROVINSI/ KOTA	Indeks Ketentraman	Indeks Kemandirian	Indeks Kebahagiaan	Ibangga
MAGELANG	58,84	54,68	55,29	56,27
TEMANGGUNG	58,04	54,60	55,28	55,97
WONOSOBO	57,98	54,57	55,15	55,90
PURWOREJO	60,00	55,00	56,08	57,03
KEBUMEN	58,51	54,65	55,11	56,09
PEKALONGAN	57,66	54,34	54,52	55,51
PEMALANG	57,38	54,28	54,45	55,37
TEGAL	56,78	54,01	53,93	54,91
BREBES	56,24	54,02	53,70	54,65
SEMARANG	58,58	54,64	55,40	56,21
KENDAL	58,78	54,67	55,36	56,27
DEMAK	58,03	54,38	54,77	55,73
GROBOGAN	58,87	54,79	55,86	56,51
PATI	59,66	54,85	55,99	56,83
JEPARA	58,13	54,25	54,98	55,79
REMBANG	57,98	54,55	55,06	55,86
BLORA	59,03	54,87	55,98	56,63
KUDUS	58,70	54,46	55,00	56,05
KLATEN	60,06	54,95	56,05	57,02
BOYOLALI	58,57	54,72	55,43	56,24
SRAGEN	59,49	54,89	55,98	56,79
SUKOHARJO	58,69	54,68	55,19	56,19
KARANGANYAR	58,42	54,69	55,28	56,13
WONOGIRI	59,26	55,20	56,34	56,93
BATANG	57,74	54,48	54,91	55,71
KOTA SEMARANG	58,86	54,61	55,04	56,17
KOTA SURAKARTA	61,41	55,08	56,42	57,63
KOTA PEKALONGAN	59,15	54,47	55,18	56,27
KOTA MAGELANG	61,22	55,07	56,20	57,50
KOTA TEGAL	59,48	54,56	55,61	56,55
KOTA SALATIGA	59,69	54,76	55,65	56,70

Sumber: BKKBN, 2021

- 8) Persentase Kepesertaan KB aktif/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49th

Kecenderungan kepesertaan KB aktif fluktuatif selama tahun 2017 – 2021, terendah di tahun 2020 dengan kepesertaan KB 74,70% dari PUS 130.415 dan tertinggi di tahun 2018 dengan total 83,27% dari PUS 143.830. Angka ini merupakan capaian diatas target nasional yaitu sebesar 75%, sampai tahun 2021, capaian Kabupaten Temanggung sudah sebesar 75,29%.



Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2021

Gambar 2.47
Jumlah Peserta KB Aktif Kabupaten Temanggung
Tahun 2017-2021

Secara serentak seluruh Indonesia dilaksanakan kegiatan pendataan keluarga /PK21, yang dilakukan oleh kader Institusi Masyarakat Pedesaan [IMP] bersama dengan PKB. Hasil kegiatan ini baru diperoleh angkanya pada bulan November 2021, namun belum dipublikasikan. Namun angka tersebut sudah bisa dipakai sebagai acuan kegiatan dilini lapangan, dan diikuti perkembangannya sampai bulan Desember 2021. Dari hasil pendataan PK21 dan sampai kondisi bulan Desember 2021 peserta KB di Kabupaten Temanggung sejumlah 98.622 atau 75,29 dari jumlah PUS 130.966.

9) Persentase Keberhasilan Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

Jumlah peserta KB MKJP meningkat dari tahun 2017-2020, namun di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 45,21%. Hal ini disebabkan karena turunnya PUS yang menggunakan alat kontrasepsi



Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2021

Gambar 2.48
Jumlah PUS MKJP Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

10) Persentase Kampung KB yang Memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)

Kampung KB di Kabupaten Temanggung dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.199
Presentase Kampung KB yang Memenuhi IDM Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kampung KB	20	40	65	66	66
2	Jumlah Desa dengan kriteria desa berkembang dan tertinggal	219	219	218	195	195
Persentase		9,13	18,26	29,82	33,85	33,85

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2021

Di Kabupaten Temanggung terdapat 66 desa yang memenuhi IDM. Kampung KB yang sudah terbentuk belum semua memenuhi IDM yang ada. Untuk tahun pertama tahun 2016 jumlah kampung yang terbentuk yang ada sebanyak 20 yang memenuhi IDM baru 6 desa. Selanjutnya pada tahun 2017 ada 20 kampung, 2018 jumlahnya bertambah 21 kampung KB dan pada tahun 2020 bertambah 1 kampung KB.

Menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan serta Surat Mendagri Nomor 470/3376/SJ dan 470/3375/SJ tanggal 5 Juni 2020 untuk menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) pada tahun 2023 akan menyusun dokumen tersebut.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

1) Persentase Penurunan Angka Kecelakaan

Pada kurun tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 angka kecelakaan lalu lintas cenderung fluktuatif

Tabel 2.200
Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Kabupaten Temanggung
Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah angka kecelakaan lalu lintas	337	329	328	309	304
Persentase penurunan angka kecelakaan	18,80	2,37	0,30	5,79	1,62

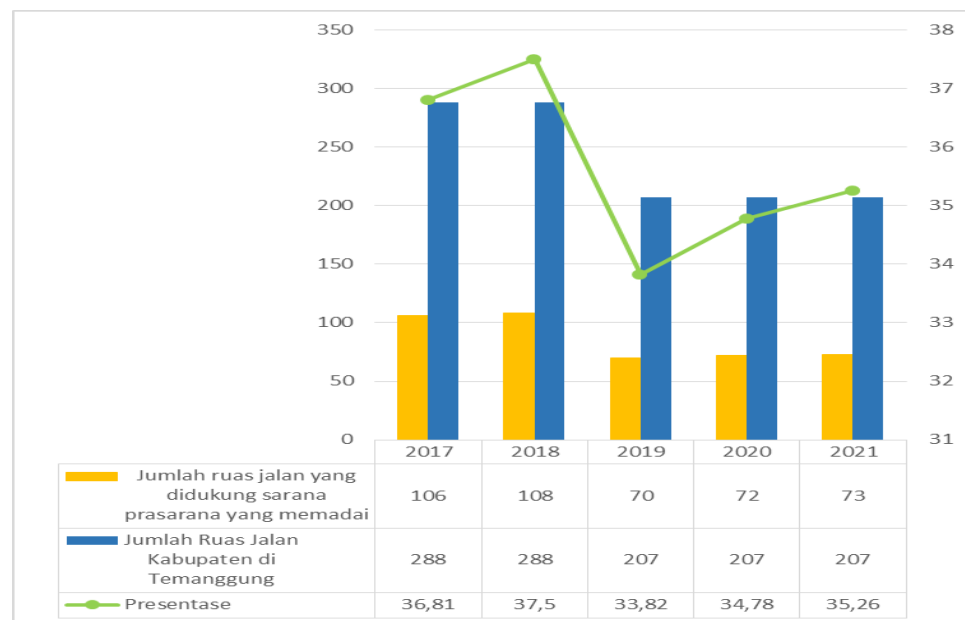
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, 2021

Pada tahun 2020 tercatat sejumlah 309 kejadian kecelakaan sehingga sampai dengan saat ini terjadi penurunan angka kecelakaan yang cukup signifikan yaitu sebesar 5,79%. Penurunan angka kecelakaan disebabkan karena dampak dari pandemic Covid – 19 dimana terjadi pembatasan sosial yang berdampak pada turunnya aktivitas perjalanan masyarakat, semakin rendah aktivitas perjalanan maka akan semakin rendah pula potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk tahun 2021 tercatat sejumlah 304 sehingga sampai dengan saat ini terjadi penurunan angka kecelakaan yaitu sebesar 1,62%.

2) Persentase Ruas Jalan yang Didukung Perlengkapan Jalan Memadai

Dalam kurun 2017-2021 kondisi prosentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan

yang memadai cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan karena tersedianya anggaran untuk kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan memadai. Penurunan ini karena adanya penyesuaian jumlah ruas jalan kabupaten berdasarkan surat keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/405 tahun 2018 tanggal 22 November tahun 2018 tentang ruas-ruas jalan yang berstatus sebagai jalan kabupaten. Dari total 207 ruas jalan kabupaten yang didukung perlengkapan jalan memadai sampai dengan 2020 telah tercapai 34,78%.



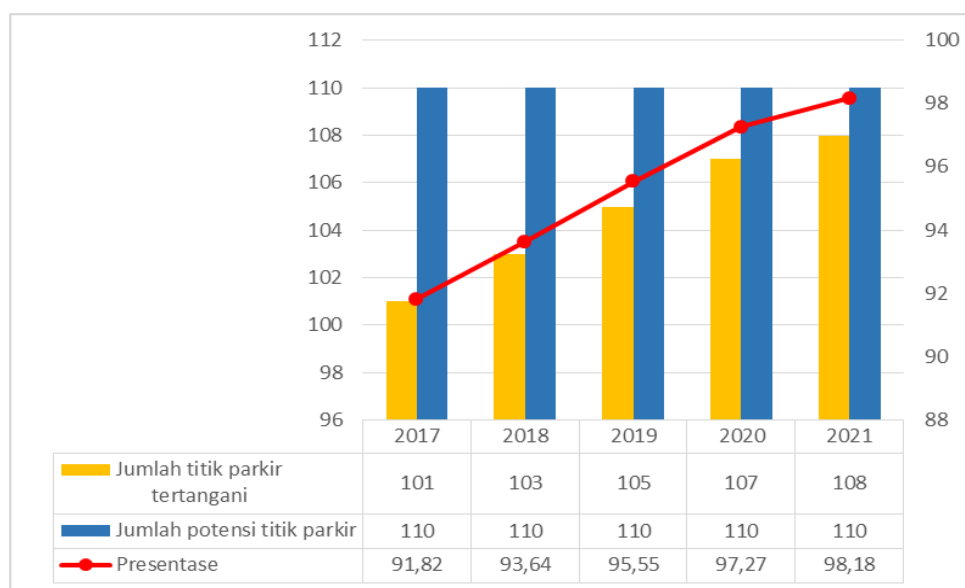
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, 2021

Gambar 2.49
Persentase Ruas Jalan yang Didukung Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai Tahun 2017-2021

Pada tahun 2021 prosentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai yaitu sebesar 35,26%. Adapun skala prioritas dalam pemasangan perlengkapan jalan yaitu (a) Jalan Kabupaten yang rawan kecelakaan; (b) Jalan Kabupaten yang rawan kemacetan; (c) Jalan Kabupaten yang Dilalui Angkutan Umum; dan (d) Jalan Kabupaten yang menuju lokasi wisata.

3) Persentase Potensi Titik Parkir yang Tertangani

Pengelolaan parkir yang baik menjadi tolok ukur keberhasilan Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan lalu lintas yang baik, disamping sebagai salah satu sumber PAD di Kabupaten Temanggung. Ruang lingkup lokasi parkir tertangani dalam hal ini adalah Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir yang di kelola retribusinya oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, 2021

Gambar 2.50
Persentase Potensi Titik Parkir yang Tertangani di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Dari tahun ke tahun jumlah titik parkir tertangani semakin meningkat. Hal ini disebabkan adanya peningkatan lokasi potensi parkir yang dapat tertangani dalam hal ini dapat dikelola oleh Dinas Perhubungan melalui petugas parkir dan retribusinya masuk ke kas Daerah.

Kondisi tahun 2021 terdapat kenaikan pada jumlah potensi titik parkir yang tertangani sebanyak 108 lokasi dengan capaian sebesar 98,18%. Masih terdapat 2 titik parkir yang belum tertangani, hal ini disebabkan karena di potensi titik parkir dimaksud terdapat kendala konflik lalu lintas dimana area parkir tepi jalan umum dimaksud perlu dikaji lebih lanjut terkait

manajemen dan rekayasa lalu lintas sebelum di tetapkan sebagai titik parkir sebagaimana semangat dari UU 22 Tahun 2009 bahwa transportasi diselenggarakan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

4) Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan

Jumlah kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Temanggung setiap tahun berubah, dimana hal ini adalah faktor dari adanya kendaraan uji baru, kendaraan mutasi masuk, dan kendaraan mutasi keluar.

Tabel 2.201
Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan
di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kendaraan Bermotor Laik Jalan	Unit	8.016	8.089	7.504	5.487	4.505
KBWU	Unit	7.727	7.429	7.342	6.563	4.679
Numpang Uji	Unit	289	660	162	79	98
Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Unit	7.727	7.429	7.342	6.563	4.679
Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	%	103,74	108,88	102,21	83,60	96,28

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, 2021

Dalam kurun waktu 2017 s.d 2020 jumlah kendaraan wajib uji fluktuatif naik dan turun dan terkadang jumlahnya melebihi dari jumlah kendaraan wajib uji. Hal ini disebabkan oleh adanya kendaraan dari luar daerah yang melakukan numpang uji di Kabupaten Temanggung dan tercatat sebagai kendaraan laik jalan. Pada tahun 2021 tercatat 96,28% kendaraan Bermotor yang laik jalan, dimana dari total 4.679 Kendaraan Bermotor Wajib Uji terdapat 4.505 kendaraan yang dinyatakan laik jalan.

5) Persentase Bengkel Umum Kelas 1 yang Memenuhi Standar

Standar bengkel umum kelas 1 diantaranya telah memiliki ijin/rekomendasi dari lembaga yang berwenang, memiliki fasilitas umum, penyimpanan, peralatan *safety*, penampungan limbah, memiliki persyaratan minimum, mekanik bengkel yang sudah bersertifikat master mekanik, senior mekanik dan junior mekanik serta memiliki sistem informasi manajemen

perbengkelan berbasis teknologi informasi (Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bengkel Umum). Pengukuran indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.202
Persentase Bengkel Umum Kelas 1 yang Memenuhi Standar di Kabupaten Temanggung 2017-2021

INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar	Lokasi	1	1	1	1	1
Jumlah bengkel umum kelas 1	Lokasi	4	4	4	4	4
Persentase bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar	%	25	25	25	25	25

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, 2021

6) Persentase Bengkel Umum Kelas 2 yang Memenuhi Standar

Pengukuran indikator ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini dan ditampilkan data dimulai pada tahun 2019.

Tabel 2.203
Persentase Bengkel Umum Kelas 2 yang Memenuhi Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

INDIKATOR	SAT	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar	Lokasi	n.a	n.a	1	2	3
Jumlah bengkel umum kelas 2	Lokasi	n.a	n.a	8	8	8
Persentase bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar	%	n.a	n.a	12,5	25	37,5

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, 2021

Persentase Bengkel Umum Kelas 2 yang Memenuhi Standar merupakan indikator program baru pada RPJMD 2018 – 2023 sehingga data dasar 2017 – 2018 baru sebatas jumlah bengkel kelas 1 yang ada di Kabupaten Temanggung saja. Kondisi sampai dengan tahun 2021 dari kegiatan penataan perbengkelan didapatkan ada 1 (satu) bengkel umum kelas 2 yang telah memenuhi standar. Adapun realisasi pencapaian sampai dengan Tahun 2021 adalah 37,5%.

7) Persentase Bengkel Umum Kelas 3 yang Memenuhi Standar

Pengukuran indikator baru dimulai pada tahun 2019 dengan data sebagai berikut.

Tabel 2.204
Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar
di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

INDIKATOR	SAT	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar	Lokasi	n.a	n.a	20	22	26
Jumlah bengkel umum kelas 3	Lokasi	n.a	n.a	46	46	46
Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar	%	n.a	n.a	43,48	47,82	56,52

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, 2021

Persentase Bengkel Umum Kelas 3 yang Memenuhi Standar merupakan indikator program baru pada RPJMD 2018 – 2023 sehingga data 2017 – 2018 baru sebatas jumlah bengkel kelas 1 yang ada di Kabupaten Temanggung saja. Kondisi sampai dengan tahun 2021 dari kegiatan penataan perbengkelan didapatkan ada 1 (satu) bengkel umum kelas 3 yang telah memenuhi standar. Adapun realisasi pencapaian sampai dengan Tahun 2021 adalah 56,52%.

- 8) Persentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah Tersedia Jaringan Trayek

Tabel 2.205
Persentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah Tersedia
Jaringan Trayek di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah trayek yang terlayani angkutan umum	35,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Jumlah trayek se Kab. Temanggung	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Persentase Pelayanan Angkutan Umm	77,78	80,00	80,00	80,00	80,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, 2021

Dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2018 terdapat perubahan jumlah trayek di Kabupaten Temanggung dengan total trayek sebanyak 45 trayek sebagaimana Keputusan Bupati Temanggung Nomor 551.2/395 tahun 2016 tentang Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Temanggung. Sampai dengan tahun 2020 trayek yang terlayani angkutan umum sebanyak 36 trayek. Pada tahun 2021 ini jumlah trayek yang terlayani angkutan umum masih sama dengan tahun 2020.

Mengingat belum semuanya wilayah terlayani oleh angkutan umum, maka sebagai upaya memenuhi pelayanan angkutan umum yang merata dan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Temanggung, perlu dilakukan optimalisasi pelayanan angkutan umum.

9) Persentase Terminal Tipe C yang Aktif

Tabel 2.206
Persentase Terminal Tipe C yang Aktif
di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Terminal Tipe C Aktif	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00
Jumlah Terminal Tipe C	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Persentase Terminal Tipe C yg Aktif	85,71	85,71	85,71	100	100

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, 2021

Jumlah Terminal tipe C di Kabupaten Temanggung berkurang pada tahun 2018 karena 1 unit terminal Mudal yang dialihfungsikan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tahun 2017. Sedangkan terminal tipe C yang aktif cenderung tetap. Hingga tahun 2019 terminal yang belum aktif adalah terminal maron. Sejak tahun 2016 terminal maron sudah ditangani secara terus menerus, akan tetapi dari awak angkutan tidak mau masuk terminal. Pada tahun 2021 kondisi masih sama dengan 2019 dimana terminal maron belum aktif

10) Persentase Terminal Tipe C dalam Kondisi Baik

Tabel 2.207
Persentase Terminal Tipe C dalam Kondisi Baik
di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Terminal Tipe C dalam Kondisi Baik	4,00	4,00	5,00	5,00	6,00
Jumlah Terminal Tipe C	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	57,14	57,14	71,43	71,43	85,71

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, 2021

Sampai dengan tahun 2018 terminal yang kondisinya belum baik adalah terminal Maron, Ngadirejo dan Candiroto. Pada tahun 2019 terdapat 1 terminal dilakukan perbaikan yaitu terminal Ngadirejo, Sedangkan terminal Maron dan Candiroto

akan dilaksanakan rehab pada kurun tahun 2020-2023. Pada tahun 2021 terdapat 1 terminal kondisi Terminal C dalam kondisi baik yaitu terminal Maron.

11) Persentase Penerangan Jalan di Jalan Kabupaten

Tabel 2.208
Persentase Penerangan Jalan di Jalan Kabupaten
Tahun 2017-2021

INDIKATOR	Sat.	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penerangan jalan di jalan kabupaten	Unit	n.a	n.a	4.121	4.123	4.123
Panjang jalan kabupaten dibagi 50 m (jarak antar lampu)	Unit	n.a	n.a	13.009,52	13.009,52	13.009,52
Prosentase Penerangan Jalan di Jalan Kabupaten	%	n.a	n.a	31,68	31,69	31,69

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, 2021

Pada prosentase penerangan jalan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 sebesar 31,68% sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 31,69%. Sedangkan sampai dengan tahun 2021 kondisinya masih sama dengan tahun 2020 yaitu sebesar 31,69% karena tidak ada kegiatan pemasangan PJU baru. Panjang jalan kabupaten sebagaimana surat keputusan Bupati Temanggung Nomer 050/405 tahun 2018 tanggal 22 November tahun 2018 tentang ruas-ruas jalan yang berstatus sebagai jalan kabupaten total 650.476 Km atau 650.476.000 m. Dengan jarak ideal antar PJU adalah 50 meter maka perkiraan total kebutuhan PJU pada ruas jalan kabupaten sebesar 13.009,52.

Dalam rangka mensinergikan dan menyelaraskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Perhubungan secara bertahap mulai melengkapi data-data capaian dimaksud, dimana capaian hingga tahun 2021¹ antara lain:

¹ Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

- a) Rasio konektivitas transportasi Kabupaten Temanggung sebesar 80%;
- b) Rasio kejadian kecelakaan transportasi Kabupaten Temanggung sebesar 62%;
- c) Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi sebesar 84%;
- d) *On time performance* layanan transportasi sebesar 78%; dan
- e) Persentase penurunan emisi GRK sektor transportasi sebesar 68%.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

1) Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat seperti tertera pada Tabel berikut.

Tabel 2.209
Nilai Indek Tingkat Kematangan SPBE

NILAI INDEKS	PREDIKAT
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 – < 4,2	Sangat baik
2,6 – < 3,5	Baik
1,8 – < 2,6	Cukup
< 1,8	Kurang

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2021

Realisasi Indeks SPBE Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.210
Indeks SPBE Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	n.a	1,84	2,82	3,61	2,78

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2021

Nilai kematangan penyelenggaraan SPBE yang diperoleh Kabupaten Temanggung tentunya menjadikan penyelenggaraan SPBE masih perlu ditingkatkan dengan upaya perbaikan, baik didomain kebijakan SPBE, pelaksanaan tata kelola SPBE maupun layanan SPBE. Salah satu strateginya adalah dengan

mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Temanggung akan diukur dengan beberapa parameter antara lain Indeks Pelaksanaan SPBE, indeks ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Dalam rangka mendukung keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung telah dibentuk Tim *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) dengan *leading sector* di Dinas Kominfo. Hal ini dalam rangka mendukung implementasi SPBE Kabupaten Temanggung. Tim ini melibatkan seluruh perangkat daerah dengan tujuan adanya dukungan keamanan informasi di internal perangkat daerah. Tim CSIRT Kabupaten senantiasa berkolaborasi dengan Tim CSIRT Provinsi dan Badan Siber Sandi Negara dalam penanganan insiden keamanan informasi.

2) Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan keterbukaan dan pelayanan publik pada masyarakat salah satunya dapat diukur dari Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan pemeringkatan keterbukaan badan publik kabupaten/kota terhadap implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.

Fokus utama evaluasi dan penilaian badan publik dengan hasil akhir adalah kepatuhan badan publik menjalankan standar pelayanan informasi publik, terutama menyangkut keterbukaan program, kegiatan, kinerja dan anggaran.

Tabel 2.211
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	70,8	77,9	80,03	95,5	89,56
2	Kategori	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2021

Selama kurun waktu lima tahun pelaksanaan pemeringkatan keterbukaan badan publik, nilai PPID Kabupaten Temanggung dapat dikatakan mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan oleh upaya dan kerja keras dari seluruh pemangku keterbukaan informasi publik di pemerintah Kabupaten Temanggung, baik PPID Utama, PPID Pembantu dan semua stakeholder.

Upaya tersebut antara lain dengan penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana PPID, pengesahan regulasi dan SOP, pendampingan, monitoring dan evaluasi rutin PPID Pembantu, pengembangan website dan dashboard PPID serta peningkatan layanan kepada masyarakat.

3) Persentase PPID Badan Publik yang Aktif

Melalui PPID masyarakat dapat menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Penilaian PPID Badan Publik yang aktif baru dilaksanakan mulai tahun 2017. Realisasi persentase PPID badan publik yang aktif Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.212
Persentase PPID Badan Publik Aktif Kabupaten Temanggung
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PPID badan publik yang aktif	5	26	38	45	50
2	Jumlah PPID badan publik	355	355	355	341	341
3	Persentase PPID badan publik yang aktif (%)	1,4	7,3	11,34	13,20	14,66

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase PPID badan publik yang aktif dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Secara lebih rinci, keaktifan PPID Pembantu Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.213
PPID Badan Publik Aktif Kabupaten Temanggung Tahun 2021

No	Nama Badan Publik	2021
1	Sekretaris DPRD	Aktif
2	Dinas Kesehatan	Aktif
3	Dinas Pendidikan	Aktif
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Aktif
5	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Aktif
6	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Aktif
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Aktif
8	Dinas Pertanian Dan Pangan	Aktif
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Aktif
10	Dinas Tenaga Kerja	Aktif
11	Dinas Perhubungan	Aktif
12	Dinas Perikanan Dan Peternakan	Aktif
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Aktif
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Aktif
15	Dinas Lingkungan Hidup	Aktif
16	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Aktif
17	Dinas Satuan Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Aktif
18	Inspektorat	Aktif
19	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Aktif
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Aktif
21	Badan Kepegawaian Pengembangan Daerah	Aktif
22	Rumah Sakit Umum Kab. Temanggung	Aktif
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Aktif
24	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	Aktif
25	Kecamatan Tembarak	Aktif
26	Kecamatan Pringsurat	Aktif

No	Nama Badan Publik	2021
27	Kecamatan Kaloran	Aktif
28	Kecamatan Parakan	Aktif
29	Kecamatan Kedu	Aktif
30	Kecamatan Bulu	Aktif
31	Kecamatan Kandangan	Aktif
32	Kecamatan Candiroto	Aktif
33	Kecamatan Jumo	Aktif
34	Kecamatan Wonobojo	Aktif
35	Kecamatan Ngadirejo	Aktif
36	Kecamatan Bejen	Aktif
37	Kecamatan Tretep	Aktif
38	Kecamatan Kledung	Aktif
39	Kecamatan Selopampang	Aktif
40	Kecamatan Tlogomulyo	Aktif
41	Kecamatan Gemawang	Aktif
42	Kecamatan Bansari	Aktif
43	Desa Joho	Aktif
44	Desa Lungge	Aktif
45	Desa Kupen	Aktif
46	Desa Tlogowungu	Aktif
47	Desa Pandemulyo	Aktif
48	Desa Ngemplak	Aktif
49	PDAM Tirta Agung	Aktif
50	PD BPR BKK Temanggung	Aktif

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2021

Persentase PPID badan publik yang aktif dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan, namun demikian masih terbilang kecil. Faktor pendorong capaian Jumlah PPID badan publik yang aktif adalah keaktifan dari PPID utama Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan pendampingan, pembinaan dan jemput bola kepada PPID pelaksana dilingkungan Pemkab Temanggung. Dalam hal pendampingan diwujudkan dengan monev rutin terkait kelengkapan kelembagaan dan data PPID pelaksana yang dilaksanakan tiap triwulan. Pembinaan dilaksanakan dengan kegiatan peningkatan kapasitas pengelola PPID Pelaksana, meliputi bimtek, workshop, dan pelatihan.

Mulai tahun 2021 terdapat inovasi Sistem Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (SIMONEV KIP) yang merupakan aplikasi untuk membantu memonitor capaian updating data dan informasi oleh PPID Pelaksana. SIMONEV KIP juga menjadi solusi atas permasalahan seringnya mutasi/perpindahan tugas admin PPID Pelaksana.

Sedangkan faktor penghambat adalah masih belum kuatnya kesadaran di tingkat PPID Pembantu Badan Publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, juga kendala keterbatasan kompetensi SDM pelaku PPID. Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan capaian prosentase keaktifan ini adalah sejalan dengan upaya untuk meningkatkan nilai keterbukaan Informasi Publik, yaitu dengan penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pelaksana PPID, pengesahan regulasi dan SOP, pendampingan, monitoring dan evaluasi rutin PPID Pembantu, pengembangan website dan dashboard PPID serta peningkatan layanan kepada masyarakat.

4) Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang Aktif

Indikator keaktifan KIM adalah melaksanakan kegiatan rutin dalam peningkatan literasi media masyarakat, diseminasi informasi dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.214
Persentase KIM Aktif Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kelompok informasi masyarakat yang aktif	1	2	5	5	7
2	Jumlah kelompok informasi masyarakat	19	32	32	32	32
3	Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	3,2	6,25	15,63	15,63	21,88

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2021

Persentase KIM yang aktif pada tahun 2017 masih relatif kecil, oleh sebab itu mulai tahun 2017, Dinas Kominfo melakukan strategi untuk menggandeng kader-kader KPMD/LKMD (Kader/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) untuk membentuk KIM, strategi ini diambil karena dirasa ada

kesamaan visi dan tujuan antara KPMD/LPMD dengan KIM yaitu pemberdayaan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Pembentukan dimulai dari Kecamatan Bulu, dengan jumlah 19 KIM yang berhasil terbentuk, dilanjutkan dengan Kecamatan Jumo dengan jumlah 13 KIM yang terbentuk. Rencana kedepan dilanjutkan dengan Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Kranggan, serta menyeluruh di seluruh 20 kecamatan.

Pola Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan keaktifan KIM adalah dengan mengadakan pertemuan- pertemuan rutin, sarasehan, diskusi, workshop dan bimtek, dengan materi yang bersifat teknis maupun peningkatan kesadaran anggota dan masyarakat terhadap literasi informasi.

5) Persentase Kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Terhadap Norma Siaran

Persentase kepatuhan LPP terhadap norma siaran selalu 100%, artinya setiap ada pengaduan selalu dapat ditindaklanjuti. Persentase kepatuhan LPP terhadap norma siaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.215
Persentase Kepatuhan LPP Terhadap norma Siaran
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang patuh	8	8	8	8	8
2	Jumlah Lembaga Penyiaran Publik (LPP)	7	7	8	8	8
3	Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2021

Di wilayah Kabupaten Temanggung terdapat total 8 Lembaga Penyiaran Publik, terdiri dari 5 Radio Swasta, 1 Radio Komunitas, 1 Radio Publik Lokal, 1 Televisi Publik Lokal yang secara lengkap disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.216
Lembaga Penyiaran Publik di Kabupaten Temanggung

No	NAMA LPP	ALAMAT	FREK
1	Radio Erte FM	Jl. Gerilya Kowangan, Temanggung	94.8 Mhz
2	Radio Angkasa 7	JL. Gilingsari Kav. 2-3 Tegaltemu Manding, Temanggung	88.1 Mhz
3	Radio O2	Jl. Jenderal Sudirman No.164, Rejosari, Kowangan, Temanggung	98.1 MHz
4	Radio Ofa	Komplek Wisma Soemodilogo, Kranggan, Temanggung	101.5 MHz
5	Radio Best/Pop FM	Jl. Randusari No. 5 Temanggung	103.1 MHz
6	Radio Shofar	Jl. Soepono No. 11 Temanggung	107.7 MHz
7	Radio Shantika	Jl. Jenderal Sudirman No.60, Jampirejo barat, Jampirejo, Temanggung	96.4 FM
8	Temanggung TV	Jl. S. Kadar Maron No.21, Sawah & Hutan, Kedungumpul, Kandangan, Temanggung	3970.8/H/03000

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2021

Dalam rangka pengawasan isi siaran masyarakat dilaksanakan secara langsung dan melaporkan kepada Dinas Kominfo atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah. Untuk menguatkan peran pengawasan isi siaran ini, KPID Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Dinas Kominfo membentuk kelompok masyarakat pemantau isi siaran dengan beranggotakan organisasi masyarakat, unsur mahasiswa dan birokrasi. Mulai tahun 2018 kelompok pemantau beranggotakan unsur birokrasi, GP Anshor, KNPI dan Karang Taruna.

Tingkat kepatuhan lembaga penyiaran terhadap norma siaran di Kabupaten Temanggung tergolong baik, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat berat dan serius, apabila ada hanya pelanggaran yang bersifat ringan terkait konten siaran yang langsung ditindaklanjuti oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan.

6) Persentase Ketersediaan Jaringan Internet

Sistem ini merupakan jalan utama interkoneksi untuk pemanfaatan layanan SPBE. Adapun capaian hingga tahun 2021 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.217
Persentase Ketersediaan Jaringan Internet Kabupaten Temanggung
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	OPD pengguna jaringan intranet	146	235	317	324	348
2	Jumlah OPD, UPT (eks UPT) dan Desa/Kel.	395	395	395	395	395
3	Ketersediaan jaringan intranet	36,96	59,49	80,25	82,03	88,10

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2021

Ketersediaan jaringan internet sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 cenderung meningkat, karena tahapan pengembangan distribusi jaringan sesuai dengan perencanaan serta dukungan penganggaran.

7) Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi

Tingkat laporan Perangkat dari terintegrasi pada sistem informasi, yang merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Realisasi persentase sistem informasi yang terintegrasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.218
Persentase Sistem Informasi yang Berfungsi Optimal Kabupaten
Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi	19	31	61	82	87
2	Jumlah sitem informasi	398	456	461	507	512
3	Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi	4,7%	6,79%	13,23%	16,17%	16,99%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase sistem informasi yang terintegrasi pada tahun 2017-2021 cenderung mengalami peningkatan, karena adanya pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi

lainnya. Namun demikian masih diperlukan regulasi yang mengatur pengembangan sistem informasi sebagai acuan dasar dalam perencanaan integrasi sistem informasi.

Tabel 2.219
Sistem Informasi yang Terintegrasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2021

NO	NAMA SISTEM INFORMASI	JUMLAH	KETERANGAN (TERINTEGRASI DENGAN)
1	Simbada	1	e-movev
2	Sibangda	1	mapatda
3	Lpse	1	sirup
4	Jdih	1	e-dokum (dokumen hukum)
5	p2kp	1	simpeg
6	Portal VPN dan SSO	1	sistem informasi lain
7	Dindikpora	1	sistem informasi kemendikbud
8	Sipd	1	Gandem (Gabungan Data Temanggung)
9	dinducapil	1	layanan kependudukan online
10	perizinan-dpmptsp	1	data kependudukan
11	monitorabsen	1	Simpeg, e-tp, e-kinerja
12	Gabungan Data (Gandem)	1	bank data, sipd, data
13	e-kinerja	1	simpeg, e-tp, monitor absen
14	Simpeg	1	e-kinerja, e-tp, monitor absen, p2kp
15	Bankdata	1	Gandem (Gabungan Data Temanggung)
16	Gis Tata Ruang	1	GIS Terintegrasi
17	e-TPP	1	simpeg, e-kinerja, monitor absen
18	Portal Web BKPSDM	1	simpeg, e-kinerja, e-tp, monitor absen, p2kp
19	e-retribusi	1	bank BPD Jateng
20	inbox.bkd	1	simpeg
21	e-peluk ASN	1	simpeg
22	Mapatda	1	sibangda, sig-mapatda
23	sig-mapatda-bppkad	1	mapatda
24	Data	1	Gandem (Gabungan Data Temanggung)
25	Layanan kependudukan online	1	data kependudukan
26	e-planning	1	e-budgeting, e-monev
27	e-budgeting	1	e-planning, e-monev
28	Sirup	1	lpse
29	e-monev	1	e-budgeting, e-planning
30	e-dokum (katalog dokumen hukum)	1	jdih
31	GIS Terintegrasi	1	gis tataruang
32	SMS	1	Lapor SP4N
33	Simpus (24 aplikasi)	26	Data kependudukan

NO	NAMA SISTEM INFORMASI	JUMLAH	KETERANGAN (TERINTEGRASI DENGAN)
34	e-risalah	1	Jdih
35	Sanka	1	Gandem
36	e-statistik	1	PPID
37	Data Kemiskinan Daerah (Santunan Kematian)	1	Temanggung Gandem
38	Temanggung Gandem	1	e-statistik, santunan kematian
39	Web Corona	1	Web PT. DSN
40	E-Office	1	Simpeg, jdih
41	E-Keuangan	1	e-budgeting
42	SDS	1	SDS Provinsi Jateng
43	Dashboard SIMPUS	1	Simpus masing-masing puskesmas
44	Restribusi DPUPKP	1	Gis Terintegrasi
45	Layanan 24/7	1	Smart office DPUPKP
46	SIMBOS	1	SIMBOS pusat
47	PPDB Online	1	PPDB pusat
48	Aplikasi pendataan pemudik	1	Data kependudukan
49	SIK	1	Data kependudukan
50	Aplikasi Android Temanggung Gandem	1	Gandem, E-Statistik, PPID, JDIH
51	Aplikasi Android Kependudukan Temanggung Gandem Pol	1	Data kependudukan
52	Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)	1	MAPATDA
53	Aplikasi Dashboard Geospasial	1	GIS Tata Ruang
54	Aplikasi SANKA Android	1	Data Kependudukan
55	Aplikasi SANKA Web	1	Data Kependudukan
56	SIM DKD	1	Data Kependudukan
57	SIMRS	1	BPJS
58	SIMPCK	1	Data Kependudukan
59	SIMKB	1	Data Kependudukan
60	E-Kinerja android	1	E-TPP, Monitor Absen
61	JDIH Setwan	1	JDIH BPHN
62	Sinkronisasi Vaksinasi	1	Data Kependudukan, KPCPEN
	Jumlah Total	87	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2021

Dalam hal perencanaan pembangunan, pemerintah Kabupaten Temanggung telah menerapkan sistem *e-planning*. Sistem *e-planning* yang dibangun oleh Pemerintah Temanggung digunakan mulai tahun 2019 untuk penyusunan RKPD tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Untuk penyusunan RKPD tahun 2022 sampai sekarang menggunakan *e-planning* dari Kemendagri yang terintegrasi dalam SIPD. Penggunaan *e-planning*

lebih bertujuan untuk lebih menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan, dimulai dari dokumen RPJMD, Renstra PD, dokumen RKPD dan dokumen Renja PD.

Sedangkan, dalam aspek pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Temanggung juga telah menggunakan sistem *e-budgeting*. *E-budgeting* yang dibangun oleh Pemerintah Temanggung digunakan mulai tahun 2019 untuk penyusunan APBD tahun 2020 sampai dengan APBD tahun 2021. Untuk penyusunan APBD tahun 2022 sampai sekarang menggunakan sistem *e-budgeting* dari Kemendagri yang terintegrasi dalam SIPD. Dalam sistem *e-budgeting* tersebut sudah terintegrasi dengan e-ASB yaitu standar yang digunakan untuk menentukan anggaran belanja daerah yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan. Penggunaan *e-budgeting* juga telah terkoneksi dengan *e-planning* dengan tujuan untuk lebih menjamin konsistensi program dan sub kegiatan dari proses perencanaan sampai dengan penganggaran.

Selain *e-planning* dan *e-budgeting*, pemerintah Kabupaten Temanggung juga telah menerapkan *e-procurement*. *E-procurement* adalah suatu sistem yang digunakan untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang bertujuan untuk menjamin transparansi, mudah diakses informasinya dan memberikan rasa keadilan dalam pelaksanaannya. Sedangkan sistem aplikasi yang digunakan adalah menggunakan website yang disediakan oleh LKPP yang terdiri dari SIRUP dan LPSE yang saling terkoneksi. SIRUP sendiri merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat rencana pengadaan barang dan jasa secara elektronik sedangkan LPSE merupakan sistem pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Dengan penggunaan sistem SIRUP dan LPSE ini, semua kegiatan pengadaan barang dan jasa terpublikasikan secara transparan mulai dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaannya.

8) Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal

Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal pada tahun 2017-2020 mengalami peningkatan, karena telah diadakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan sistem informasi. Namun pada tahun 2021 terjadi sedikit penurunan dari tahun 2020. Oleh karena itu masih diperlukan peningkatan kemauan dan kemampuan bagi pengelola agar sistem informasi dapat berfungsi secara optimal.

Tabel 2.220
Persentase Sistem Informasi yang Berfungsi Optimal
Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah sistem informasi yang berfungsi optimal	29	175	185	265	267
2	Jumlah sistem informasi	398	456	461	507	512
3	Persentase Sistem Informasi yang berfungsi optimal	7,2	38,38	40,13	52,27	52,15

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2021

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Persentase Koperasi Sehat

Dalam rangka mengetahui kondisi Kesehatan koperasi dilaksanakan dengan penilaian laporan tutup buku dari masing masing koperasi setiap tahun.

Tabel 2.221
Persentase Koperasi Sehat Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Koperasi Sehat	40	45	53	6	10
2	Jumlah Koperasi Aktif	154	104	79	88	136
	Jumlah Koperasi	604	608	608	637	595
3	Persentase	25,7	43,27	67,09	6,82	7,35

Sumber: Dinkopdag Kabupaten Temanggung, 2021

Mulai tahun 2019 jumlah koperasi secara keseluruhan mengalami penurunan karena pandemi covid. Data koperasi Tahun 2021 sebanyak 595 koperasi dan menurun dari tahun sebelumnya dikarenakan penyesuaian data koperasi dalam Online Data Sistem khusus binaan Kabupaten. Sedangkan data sebelumnya merupakan jumlah keseluruhan koperasi di

Temanggung baik koperasi binaan Kabupaten, Provinsi maupun Nasional.

Jumlah koperasi pada triwulan I dan II tahun 2021 adalah sebanyak 600 koperasi, mengalami penurunan pada Triwulan IV tahun 2021 sebanyak 5 koperasi dikarenakan terdapat koperasi yang melakukan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) dari tingkat primer kabupaten ke tingkat primer provinsi. Selain itu, terdapat dobel data di *Online Data System* (ODS) yang menyebabkan penurunan jumlah koperasi di Kabupaten Temanggung.

Jumlah koperasi sehat di Triwulan IV mengalami peningkatan sejumlah 10 koperasi terdiri dari 2 koperasi kategori sehat dengan nilai minimal 80 dan 8 koperasi kategori koperasi cukup sehat dengan nilai 66 sampai dengan 79. Persentase koperasi sehat tahun 2021 Triwulan IV perhitungannya dengan membandingkan jumlah koperasi sehat dengan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT dikali 100. Sedangkan untuk koperasi aktif sampai dengan Triwulan IV sejumlah 136 sudah sesuai dengan ODS binaan Kabupaten.

Koperasi yang sudah dinilai kesehatannya pada Triwulan IV sebanyak 10 koperasi dari 36 Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan koperasinya, adapun sisanya masih menunggu kebijakan dikarenakan pembatasan kegiatan akibat pandemi covid-19.

2) Persentase Usaha Mikro Aktif

Persentase Usaha Mikro Aktif tahun 2017 sampai 2021 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.222
Persentase Usaha Mikro Aktif Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Usaha Mikro Aktif	6.500	8.912	9.150	9.177	9.426
2	Jumlah Usaha Mikro Keseluruhan	25.000	25.464	25.464	28.500	28.500
3	Persentase	26	35	35,93	32,20	33,07

Sumber: Dinkopdag Kabupaten Temanggung, 2021

Persentase Usaha Mikro aktif di Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 33,07 %. Capaian hingga tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 karena pelaku usaha sudah bisa menjalankan produksinya kembali dengan adanya program Bantuan Presiden bagi Usaha Mikro (BPUM) sehingga bisa menambah modal usaha para pelaku UMKM.

3) Persentase Penambahan Nilai Aset dan Omset Koperasi

Tabel 2.223
Penambahan Nilai Aset Koperasi Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai aset	1.886.857.606.400	2.358.572.008.000	2.453.025.500.000	292.174.887.783	335.559.001.286
Nilai aset tahun sebelumnya	1.603.838.965.100	1.886.857.606.400	2.524.899.147.000	250.808.716.184	292.174.887.783
Penambahan nilai aset	283.018.641.300	471.713.401.600	71.873.647.000	41.366.171.599	43.384.113.503
Persentase penambahan nilai aset	17,64	24,99	29,30	16,49	14,85

Sumber: Dinkopdag Kabupaten Temanggung, 2021

Nilai aset koperasi pada tahun 2020 mengalami penurunan karena perbedaan rumus perhitungan. Perhitungan tahun-tahun sebelumnya, dihitung dari nilai aset keseluruhan koperasi baik koperasi aktif maupun tidak aktif. Sedangkan perhitungan pada tahun 2020 berdasarkan pada nilai aset koperasi yang melaksanakan RAT. Nilai aset koperasi pada tahun 2021 adalah 14,85%. Dihitung berdasarkan pada nilai aset koperasi yang melaksanakan RAT.

Tabel 2.224
Penambahan Nilai Omset Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai Omset	1.797.066.655.200	2.246.333.319.000	2.246.333.319.000	205.610.500.000	229.765.049.514
Nilai Omset tahun sebelumnya	1.527.506.656.750	1.797.066.655.200	2.710.201.149.000	197.463.562.374	205.610.500.000
Penambahan nilai Omset	269.559.998.450	449.266.663.800	463.867.830.000	53.146.937.626	24.154.549.514
Persentase penambahan nilai Omset	17,64	25	20,65	26,91	11,75

Sumber: Dinkopdag Kabupaten Temanggung, 2021

Nilai omset koperasi pada tahun 2021 adalah 11,75%. Dihitung berdasarkan pada nilai omset koperasi yang melaksanakan RAT.

4) Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas

Tabel 2.225

Persentase Usaha Mikro Naik Kelas Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2021	2021
						TW1	TW2	TW3	TW4
	Target					0,013			
1	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	n.a	n.a	n.a	n.a	0	1	0	0
2	Jumlah Usaha Mikro	n.a	n.a	n.a	n.a	28.500	28.500	28.500	28.500
3	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	0	0,0035	0	0

Sumber: Dinkopdag Kabupaten Temanggung, 2021

Persentase usaha mikro naik kelas merupakan indikator baru pada perubahan RPJMD 2018-2023 dimana perhitungannya dimulai pada tahun 2021. Usaha mikro yang naik kelas tahun 2021 sampai dengan Triwulan IV sebesar 0,0035%, ini merupakan capaian di Triwulan II tahun 2021, capaian ini masih rendah, karena perhitungan tersebut berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja nomor VII tahun 2020 dimana kriteria Usaha Mikro naik kelas adalah beromset lebih dari 2 Milyar Rupiah pertahun.

5) Persentase Koperasi Aktif

Koperasi Aktif yaitu koperasi yang dalam 3 tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.

Tabel 2.226

Persentase Koperasi Aktif Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	Jumlah Koperasi Aktif	154	104	79	88	58	96	114	136
2	Jumlah Koperasi	604	608	608	637	600	600	593	593
3	Persentase	25,50	17,11	12,99	13,81	9,67	16,00	19,22	22,93

Sumber: Dinkopdag Kabupaten Temanggung, 2021

6) Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif

Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif Tahun 2021 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.227
 Persentase Pembinaan, Pendidikan Dan Pelatihan Dalam
 Pengembangan dan Pemasaran Usaha Koperasi Aktif
 Tahun 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	Jumlah Koperasi Aktif	154	104	79	88	58	96	114	136
2	Jumlah Koperasi yang Dibina/Ikut Pelatihan	na	na	na	na	na	na	na	73
3	Persentase								53,68

Sumber: Dinkopdag Kabupaten Temanggung, 2021

Jumlah koperasi yang dibina melalui kegiatan pembinaan di Dinas (72 Koperasi + 1 Koperasi) / 136 Koperasi aktif x 100 = 53.68%.

7) Persentase Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pengembangan Usaha

Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitas pengembangan usaha merupakan indikator baru, pelaksanaan dimulai pada Tahun 2021 triwulan 2, yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan atau perkembangan usaha para pelaku UMKM. Fasilitas pengembangan usaha antara lain pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada para pelaku UMKM baik itu pelatihan yang bersumber dari dana APBN Pusat, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten. Fasilitas pengembangan usaha antara lain pelatihan membuat batik, pelatihan barista kopi, pelatihan furniture, pelatihan kerajinan hantaran, pelatihan kemasan, pelatihan pemasaran baik secara offline maupun online, pelatihan digitalisasi produk, pelatihan tata boga, fasilitas sertifikasi (merk, halal, Pirt).

Di harapkan setelah diberikan pelatihan-pelatihan para pelaku usaha bisa meningkatkan kreatifitasnya dalam memproduksi misalkan diversifikasi produk. Bisa memasarkan produknya secara online maupun offline.

Tabel 2.228
 Persentase Usaha Yang Diberikan Dukungan Fasilitas
 Pengembangan Usaha Tahun 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitas pengembangan usaha	na	na	na	na	265
2	Jumlah Usaha Mikro					28.500
3	Persentase					0,92

Sumber: Dinkopdag Kabupaten Temanggung, 2021

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

1) Indeks Kemudahan Berusaha

Perekonomian daerah dapat menjadi modal pembangunan daerah serta mewujudkan tujuan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perekonomian secara makro ditunjang oleh adanya usaha yang dilakukan oleh masyarakat sehingga bisa meningkatkan investasi dan penyerapan investasi. Hal ini diperlukan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai tujuan ke-3 RPJMD Kabupaten Temanggung 2018-2023. Peningkatan tersebut dapat ditingkatkan melalui intervensi pemerintah dalam mewujudkan kemudahan berusaha. Fokus penjasar kemudahan berusaha adalah ketika proses berusaha dapat berjalan secara sederhana secara prosedur, mudah secara akses dan cepat. Dengan tujuan kebijakan kemudahan berusaha melalui “Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila”.

Perhitungan Indeks kemudahan Berusaha dilaksanakan oleh pihak ke 3 (akademisi), dalam perhitungan tersebut indeks kemudahan berusaha menggunakan rentang angka maksimal 5, sedangkan pada Perubahan RPJMD rentang angka yang

digunakan maksimal 100, maka untuk menyesuaikan hasil perhitungan yang diperoleh dikalikan 20.

Tabel 2.229
Indeks Kemudahan Berusaha

NO	TAHUN	Indeks Kemudahan Berusaha
1	2017	n.a
2	2018	n.a
3	2019	n.a
4	2020	n.a
5	2021	78

Sumber: Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung, 2021

Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 tidak dapat ditampilkan Indeks Kemudahan Berusaha dikarenakan memang tidak pernah dilakukan pengukuran Indeks Kemudahan Berusaha, Indeks Kemudahan Berusaha merupakan indikator baru, dan baru dapat dilaksanakan pengukuran pada triwulan 4 Tahun 2021 dengan hasil yang diperoleh adalah 78, angka tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan, pada tahun 2021 target Indeks Kemudahan Berusaha adalah pada angka 60, hal ini dikarenakan banyaknya regulasi yang mendukung kemudahan berusaha baik dari Pusat maupun Daerah.

2) Nilai Realisasi Investasi

Ruang Lingkup realisasi investasi meliputi realisasi investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

Tabel 2.230
Realisasi Investasi di Kabupaten Temanggung
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai investasi tahun berjalan (Milyar)	164,65	760,49	375,6	1.245,66	1.496,68
2	Nilai investasi PMDN (Milyar)				1.245,66	1.486,42
3	Nilai investasi PMA (Milyar)				0	10,26

Sumber: Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung, tahun 2021

Dari tahun ke tahun realisasi investasi mengalami kenaikan. Angka kenaikan cukup signifikan tersaji pada tahun 2018 yakni sebesar Rp760,49 Milyar yang didorong oleh realisasi investasi pembangunan pabrik sepatu baru di wilayah Kecamatan

Kranggan. Sedangkan di periode 2019 ini tercatat nilai realisasi investasi menurun dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp375,6 Milyar. Pada tahun 2020 nilai realisasi investasi sebesar Rp1.245,66 Milyar, kenaikan nilai realisasi investasi tersebut dikarenakan sejak bulan April 2020 terdapat aplikasi NSWI yang memuat data investasi UMK dan Non UMK secara keseluruhan, serta stimulan bantuan Presiden untuk UMKM membuat pengusaha bergerak aktif mengurus perizinan sehingga membuat laju investasi meningkat tajam sedangkan pada tahun 2019 belum ada aplikasi yang memuat data UMK, juga masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus perizinan. Pada tahun 2021 nilai realisasi investasi sebesar Rp1.496,68 Milyar.

3) Persentase Tersedianya Kajian Teknis Potensi Investasi

Ruang lingkup meliputi aspek teknis dan analisa kelayakan atau menghitung kelayakan. Aspek teknis meliputi penentuan lokasi, luas produksi, tata letak (*layout*) estimasi biaya investasi dan biaya operasional, sedangkan analisa kelayakan adalah perhitungan investasi yang dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan untuk mengetahui prospek dari suatu proyek investasi yang mendasari pengambilan keputusan diterima atau ditolaknya investasi tersebut sebelum mengambil keputusan investasi.

Tabel 2.231
Kajian Teknis Investasi Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah potensi Investasi yang sudah dikaji	na	1	6	9	9
2	Jumlah potensi Investasi	na	32	32	32	32
Persentase		na	3,13	18,75	28,13	28,13

Sumber: Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung, 2021

4) Persentase Ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih

SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan adalah ASN dan Supporting Staf DPMPPTSP Temanggung (SDM PATEN dan SDM DPMPPTSP). SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan

yang terlatih adalah Karyawan DPMPSTSP yang telah mengikuti pelatihan *Service Exelent*, dan petugas Pelayanan Kecamatan, operator Kecamatan yang telah mengikuti pelatihan OSS serta 12 Karyawan DPMPSTSP mengikuti pelatihan Drafter IMB.

Tabel 2.232
Persentase Ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah SDM yang terlatih	139	77	77	0	19
2	Jumlah SDM	139	77	77	40	43
Persentase		100	100	100	0	44,18

Sumber: Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung, 2021

SDM yang mengikuti pelatihan bidang PM dan Perizinan dari tahun 2017–2019 sudah 100%. Di tahun 2020 kegiatan pelatihan bidang PM dan Perizinan belum bisa dilaksanakan dikarenakan adanya wabah “Virus Corona”, untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan *Social* dan *Phisycal Distancing*, sehingga kegiatan yang melibatkan orang banyak tidak diperbolehkan.

Pada tahun 2021 kegiatan – kegiatan Pelatihan sudah mulai dilaksanakan walaupun dengan sistem daring namun dari 43 SDM bidang Penanaman Modal dan Perizinan pada tahun 2021 yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat sebanyak 19 orang hal ini dikarenakan karena kurangnya informasi dan ketersediaan waktu untuk mengikuti pelatihan dari masing masing SDM.

5) Persentase Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor/Bidang Unggulan

Ruang lingkup diantaranya sektor pariwisata, sektor pertanian, perkebunan, sektor peternakan dan sektor perikanan.

Tabel 2.233
Persentase Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor/Bidang Unggulan Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah informasi yang disediakan	na	1	3	3	3

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
2	Jumlah peluang usaha sektor unggulan	na	6	5	5	5
	Persentase	100	na	16,67	60	60

Sumber: Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung, 2021

Untuk indikator persentase tersedianya informasi peluang usaha/ sektor bidang unggulan di tahun 2020 masih 60 % tersedia yaitu bidang Pariwisata, UMKM dan Pertanian, sedangkan pada tahun 2021 belum ada penambahan informasi peluang usaha di karenakan keterbatasan anggaran. Data peluang usaha yang sudah diinformasikan yaitu sektor pariwisata, UMKM, pertanian/perkebunan, sedangkan peluang usaha yang belum diinformasikan yaitu sektor peternakan dan perikanan.



Gambar 2.51
Leaflet Informasi Peluang Usaha

6) Persentase Pelayanan Perizinan Online

Pelayanan ruang lingkup indikator ini meliputi data perizinan dan non perizinan dan Perizinan yang sifatnya komersial.

Tabel 2.234
Persentase Pelayanan Perizinan Online Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Permohonan on line	21	361	1272	6023	10.124
2	Jumlah pemohon	21	361	2753	6575	10.124
	Persentase	100	100	46,2	91,60	100

Sumber: Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung, 2021

Persentase pelayanan perizinan online pada tahun 2020 sebesar 91,60%. Kecenderungan perizinan online dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 meningkat karena selain perizinan berusaha yang melalui OSS juga ada perizinan selain izin berusaha yaitu melalui aplikasi sicantik cloud yang terus diusahakan penyempurnaan aplikasinya dengan tahapan pembuatan format izin yang belum pernah diterbitkan bisa dilayani secara online.

Pada tahun 2021 data perizinan online Dinas Penanaman modal yang terlayani sudah mencapai 100 %. Hal ini dikarenakan setiap pengajuan perizinan secara online langsung terlayani oleh sistem.

7) Persentase perizinan bebas calo

Ruang lingkup indikator untuk tercapainya perizinan yang bebas calo adalah SDM perizinan dan juga masyarakat.

Tabel 2.235
Persentase Permohonan Izin Bebas Calo Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah permohonan Izin bebas calo	n.a	1.912	2.753	6.575	10.223
2	Jumlah permohonan izin	n.a	1.912	2.753	6.575	10.223
3	Persentase	n.a	100	100	100	100

Sumber: Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung, 2021

Persentase Permohonan Izin Bebas Calo dari tahun 2018 s.d 2021 cenderung naik dan selalu 100 persen, hal ini dikarenakan adanya kemudahan dan transparansi dalam pelayanan perizinan sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan sendiri.

8) Persentase Perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu

Ruang lingkup indikator ini adalah semua pemohon ijin yang sifatnya komersial dan nonkomersial.

Tabel 2.236
Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu
Tahun 2017-2021

No	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Izin tepat waktu	910	1.042	1.232	6.091	10.223

No	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
2	Jumlah SK terbit	1.665	1.912	1.517	6.575	10.223
3	Persentase	54,65	54,5	49,28	92,64	100

Sumber: Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung, 2021

Dari tahun 2017-2020 perizinan yang tepat waktu masih belum mencapai 100 % ini dikarenakan adanya beberapa kendala teknis di Tim seperti peraturan perundangan teknis Perangkat Daerah lain dan kurangnya Sumber daya Manusia untuk melakukan verifikasi teknis. Pada tahun 2021 izin yang diterbitkan tepat waktu sudah melampaui target yaitu 100% (target 95%). Hal ini dikarenakan ada perubahan SOTK yang baru dimana sudah ada pembagian tugas perizinan berusaha dan non perizinan berusaha sehingga lebih efektif.

- 9) Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Perizinan yang Diterbitkan Ruang lingkup adalah izin dan non izin yang diterbitkan.

Tabel 2.237

Persentase Kesesuaian Perizinan Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah izin yang sesuai dengan pelaksanaan	n.a	173	110	155	159
2	Jumlah izin yang diterbitkan	n.a	174	110	166	170
	Persentase	n.a	99,43	100	93,37	93,53

Sumber: Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung, 2021

Persentase kesesuaian perizinan meningkat menjadi 100% karena pada Tahun 2019 telah dilaksanakan kegiatan pantauan terhadap kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan sejumlah 110 kegiatan Perizinan. Atas hasil pengawasan dan pengendalian tersebut didapat data bahwa seluruh Perizinan di Kabupaten Temanggung telah melaksanakan kepatuhan dengan prosentase 100% terhadap kesesuaian pelaksanaan perizinan di lapangan dengan izin yang telah diterbitkan. Pada tahun 2020 persentasenya baru mencapai 93,37%, hal ini karena adanya pandemi covid-19.

Pada tahun 2021 kesesuaian perizinan terutama IMB baru mencapai 93,53%, hal ini dikarenakan dari 170 permohonan

terdapat 11 permohonan yang tidak sesuai dengan pengajuan izin serta belum ada kesadaran masyarakat atau kurangnya sosialisasi Perda Nomor 11 tahun 2015.

10) Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan

DPMPTSP telah membentuk Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 melalui Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 034 Tahun 2018. Definisi terselesaikan adalah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang tertuang dalam berita acara penanganan pengaduan. Ruang lingkup data ini adalah pengelolaan aduan.

Tabel 2.238
Persentase Pengaduan Masyarakat yang Terselesaikan Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pengaduan terselesaikan	n.a	34	12	12	12
2	Jumlah Pengaduan	n.a	34	12	12	12
Persentase		n.a	100	100	100	100

Sumber: Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung, 2021

11) Persentase Tertanganinya Gugatan Hukum di Dalam Pengadilan

Ruang Lingkup gugatan terhadap perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal.

Tabel 2.239
Persentase Tertanganinya Gugatan Hukum di Dalam Pengadilan Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	1	1	0	0	0
2	Jumlah gugatan hukum	1	1	0	0	0
Persentase		n.a	100	100	100	100

Sumber: Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung, 2021

Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terdapat 1 gugatan hukum dan dapat diselesaikan di dalam pengadilan. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 belum ada gugatan hukum yang masuk ke Dinas Penanaman Modal. Data dukung diantaranya: (a) Relas Panggilan Dari Pengadilan Negeri Temanggung kepada Tergugat; (b) Surat Kuasa Khusus guna mewakili persidangan;

dan (c) Salinan Putusan Pengadilan Negeri Temanggung. Data dukung tersebut diperlukan apabila ada gugatan hukum.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

1) Indeks Pembangunan Pemuda

Indikator indek pembangunan pemuda terdiri dari (a) pendidikan, (b) kesehatan dan kesejahteraan, (c) kepemimpinan dan partisipasi, serta (d) gender dan diskriminasi.

Tabel 2.240
Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

NO	Variabel	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendidikan Dasar	n.a	n.a	3,5	3	4,00
2	Lapangan kerja dan kesempatan kerja	n.a	n.a	2,5	2,5	3,00
3	Partisipasi dan kepemimpinan	n.a	n.a	3,33	3,67	4,00
4	Gender dan diskriminasi	n.a	n.a	3,67	4,67	4,67
5	Kesehatan dan kesejahteraan	n.a	n.a	3,75	3,5	3,25
	Rata-rata	n.a	n.a	3,35	3,57	3,78

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2021

2) Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)

Indek pembangunan olahraga (Sport Development Index) adalah istilah baru dalam olahraga Indonesia. Ini semacam metode pengukuran yang diklaim sebagai alternatif baru untuk mengukur kemajuan pembangunan olahraga yang meliputi sembilan dimensi (variabel) yaitu ruang terbuka olahraga, sumberdaya manusia olahraga, partisipasi masyarakat, kebugaran, performa, kesehatan, literasi fisik, perkembangan performa, dan ekonomi. Pembangunan olahraga di suatu daerah tentunya memiliki peran penting dalam kemajuan olahraga secara umum di Indonesia.

Tabel 2.241
Indeks Pembangunan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2021

No	Variabel/Subvariabel	Nilai	Bobot	Nilai Sub-variabel	Total Nilai Subvariabel
1	Ruang Terbuka Olahraga	4,00			4,00

No	Variabel/Subvariabel	Nilai	Bobot	Nilai Sub-variabel	Total Nilai Subvariabel
1.1	Rasio ruang terbuka olahraga terhadap jumlah penduduk kecamatan	4,00			
2	SDM Olahraga	4,00			
2.1	Jumlah pelatih/instruktur olahraga dibandingkan dengan atlet/kelompok masyarakat peserta olahraga terkait	5,00			4,00
2.2	Jumlah Guru Olahraga SD-SMP dibandingkan dengan Jumlah Siswa SD-SMP	3,00			
3	Partisipasi Masyarakat	3,00			
3.1	Persentase masyarakat yang berolahraga dalam 1 minggu	2,00			3,00
3.2	Rata-rata intensitas olahraga masyarakat dalam 1 minggu	4,00			
4	Kebugaran	3,00			
4.1	Tingkat Kebugaran Masyarakat	3,00			3,00
5	Performa	4,00			
5.1	Persentase jumlah Cabang Olahraga Berprestasi	3,00			4,00
5.2	Persentase Jumlah Atlit Berprestasi	2,00			
6	Kesehatan	4,00			
6.1	Angka Kesakitan	4,00			4,00
6.2	Angka Harapan Hidup	4,00			
7	Literasi Fisik	3,25			
7.1	Tingkat Motivasi Berolahraga	3,00			3,25
7.2	Kemampuan Alat Gerak	4,00			
7.3	Pengetahuan Olahraga	2,00			
7.4	Penerapan Perilaku Hidup Sehat	4,00			
8	Perkembangan Persona	4,00			
8.1	Tingkat kepedulian masyarakat berolahraga	4,00			4,00
9	Ekonomi Olahraga	2,00			
9.1	Dampak sektor olahraga terhadap perekonomian	2,00			2,00
	Indeks Pembangunan Olahraga				3,47

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021

3) Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif

Batasan organisasi kepemudaan yang aktif adalah (a) ada kepengurusan, (b) ada program kerja, (c) ada kegiatan, dan (d) ada pertanggungjawaban.

Tabel 2.242
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten Temanggung
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif	17	17	17	27	27
2	Jumlah Organisasi Pemuda	27	27	27	28	29
	Persentase	62,96	62,96	62,96	96,43	93,10

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2021

Persentase organisasi pemuda yang aktif cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal tersebut menunjukkan perlunya peningkatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.

4) Persentase Pelatih Olahraga Bersertifikat

Tabel 2.243
Persentase Pelatih Olahraga Bersertifikat Kabupaten Temanggung
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pelatih olah raga bersertifikat	89	168	189	185	251
2	Jumlah pelatih olah raga	339	341	348	330	251
3	Persentase	26,25	49,27	54,31	56,06	100

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2021

Kenaikan persentase pelatih olahraga bersertifikat disebabkan karena ada kewajiban bagi para pelatih dalam mendampingi atlet diwajibkan memiliki sertifikat. Disamping hal tersebut Kabupaten Temanggung pada beberapa tahun terakhir banyak mengirimkan calon pelatih dalam diklat pelatih di Tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun nasional.

5) Persentase Prestasi Olahraga

Tabel 2.244
Persentase Prestasi Olahraga, Kabupaten Temanggung
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah cabang olah raga berprestasi	10	18	18	19	4
2.	Jumlah cabang olah raga	36	39	39	35	35
3.	Persentase	27,78	46,15	46,15	54,29	10,81

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2021

Persentase prestasi olah raga pada tahun 2017 sebesar 27,78% turun menjadi 10,81% pada tahun 2021. Adanya pandemi menyebabkan kurangnya pembinaan, juga berkurangnya cabang olahraga yang mengikuti kejuaraan. Dari 37 cabang olahraga sebanyak 20 (54,05%) yang mengikuti kejuaraan dan yang berprestasi tingkat Provinsi sebanyak 4 (10,81%) cabang olahraga. Oleh karena itu, perlu adanya dorongan bagi prestasi dalam olahraga serta peningkatan SDM melalui organisasi kepemudaan.

6) Persentase Atlet Berprestasi

Persentase atlet berprestasi di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.245
Persentase Atlet Berprestasi Kabupaten Temanggung
Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah atlet berprestasi (Medali)	29	111	281	254	12
Jumlah nomor yang dipertandingkan	174	884	399	399	167
Persentase	16,67	12,56	70,43	63,66	7,19

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2021

7) Persentase Gugus Depan yang Aktif

Dalam indikator ini yang dihitung hanya Gudep yang ada di SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK negeri dan swasta selain satuan pendidikan yang dikelola Majelis Muhammadiyah. Satuan pendidikan Muhammadiyah memiliki organisasi kepanduan tersendiri yaitu Hisbul Wathan.

Tabel 2.246
Persentase Gugus Depan yang Aktif Kabupaten Temanggung Tahun
2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Gugus Depan Yang Aktif	n.a	n.a	n.a	n.a	603
2.	Jumlah Gugus Depan	n.a	n.a	n.a	n.a	748
3.	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	80,61

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2021

Sebaran persentase Gugus Depan yang aktif disajikan pada Tabel 2.49.1. Jika dilihat dari satuan pendidikan maka

jenjang SD/MI memiliki persentase paling tinggi yaitu 85,08%, kemudian jenjang SMP/MTs 63,11, dan SMA/MA/SMK 56,86%. Jika dilihat dari sebaran antarwilayah maka kecamatan Selopampang, Bansari, Kledung, Candiroto, dan Jumo memiliki persentase paling tinggi yaitu 100%, dan yang paling rendah kecamatan Tembarak yaitu 58,06%.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

1) Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah

Jenis data makro daerah yang ditentukan menjadi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Temanggung sejumlah 7 (tujuh) yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita, TPAK dan Ketimpangan Pendapatan (berdasarkan kriteria Bank Dunia). Realisasi cakupan ketersediaan data makro daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.247

Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Data makro yang tersedia	6	6	5	5	7
2	Kebutuhan data makro	7	7	5	5	7
3	Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah (%)	85,7	85,7	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2021

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dilihat bahwa cakupan ketersediaan data makro daerah sudah tercapai 100%. Adapun jenis data makro yang diperlukan sebagai berikut.

Tabel 2.248

Detail Ketersediaan Data Makro Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Jenis Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	-
3	Laju Inflasi	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	-
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
5	Tingkat Pengangguran	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

No	Jenis Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Terbuka (TPT)					
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
7	Indeks Gini	tidak tersedia	tidak tersedia	-	-	-
8	Pertumbuhan Ekonomi	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
9	Pendapatan per kapita	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
10	Persentase Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
	TOTAL	6	6	5	5	7

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2021

Dari 10 data makro hanya ada 7 data makro yang tersedia di kabupaten Temanggung dikarenakan untuk data Nilai Tukar Petani (NTP), Laju Inflasi dan Indeks Gini sudah tidak dihitung untuk Kabupaten Temanggung.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

- 1) Tingkat Penilaian Persiapan/Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi

Tabel 2.249

Tingkat Penilaian Persiapan/Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko	n.a	5	7	7	14
2	Jumlah sistemelektronik	n.a	60	461	463	68
3	Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi	n.a	8,3	1,52	1,51	20,59

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2021

Tingkat kesiapan penilaian/ pengelolaan resiko keamanan informasi mulai tahun 2018. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yaitu dengan melakukan *Security Assessment*. Pada tahun 2019 dapat dikerjasamakan sejumlah 5 (lima) sistem informasi, namun mulai tahun 2020 dibatasi hanya 3 (tiga) sistem informasi akan tetapi tidak bisa dikerjasamakan dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah adanya pandemi corona virus 2019 (Covid-19) yang menyebabkan

terbatasnya keluar masuk manusia dari satu wilayah ke wilayah lainya. Solusinya yaitu dengan melakukan *asesment* mandiri.

Dikarenakan keterbatasan SDM di wilayah Kabupaten Temanggung untuk melakukan penilaian persiapan/ pengelolaan resiko keamanan informasi di Kabupaten Temanggung secara mandiri maka Dinkominfo Kabupaten Temanggung melakukan kerjasama dengan pihak luar dalam hal ini menggandeng PITSI (PT Pilar Teknotama Sinergi) untuk melakukan *vulnerability Assesment* pada aplikasi situs resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

1) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Dengan mengetahui pencapaian pembangunan kebudayaan, maka setiap pemerintah daerah dapat menentukan arah kebijakan agar dapat menaikkan pencapaian pembangunan kebudayaan di wilayah masing-masing. Untuk mengetahui berapa angka Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Kabupaten Temanggung, yang mulai tahun 2021 digunakan sebagai Indikator Sasaran pada sasaran Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung mengambil data yang telah diolah BPS. Indeks Pembangunan Kebudayaan masih dalam Proses Penyepakatan Pemahaman.

Tabel 2.250

Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	na	na	3,31

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, 2021

2) Persentase Kelompok Budaya yang Produktif

Untuk mengukur Kelompok Budaya yang aktif di Kabupaten Temanggung, sebagai tolok ukurnya adalah Kelompok budaya yang tercatat di Dinas kebudayaan dan Pariwisata.

Variabel persentase Kelompok Budaya yang produktif tahun 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.251
Persentase Kelompok Budaya Produktif Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase kelompok budaya yang Produktif	0	0	0	0	125,61
	▪ Jumlah kelompok budaya yang tercatat	0	0	0	0	363
	▪ Jumlah Desa	289	289	289	289	289

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, 2021

3) Persentase Pelestarian Cagar Budaya

Tabel 2.252
Persentase Pelestarian Cagar Budaya
Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah cagar budaya dilestarikan	5	7	7	7	7
2.	Jumlah cagar budaya yang ada	193	193	193	193	193
	Persentase	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, 2021

Persentase pelestarian cagar budaya pada tahun 2017-2021 masih terlihat kecil persentasenya, hal ini disebabkan oleh belum adanya regulasi yang mengatur tentang pelestarian Cagar Budaya dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih sangat terbatas.

4) Persentase Pelestarian Sejarah Lokal

Tabel 2.253
Persentase Pelestarian Sejarah Kabupaten Temanggung

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Sejarah dilestarikan (didokumentasikan)	4	5	6	6	6
2.	Jumlah Sejarah yang terinventarisir (Terdata)	0	0	0	227	227
	Persentase	0	0	0	2,64	2,64

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, 2021

Persentase pelestarian sejarah lokal pada tahun 2017-2021 masih 0, hal ini disebabkan oleh karena indikator sebelumnya menjadi 1 indikator dengan pelestarian cagar budaya dengan masih memakai angka pembanding yang belum terukur karena belum ada pendataan sumber sejarah melainkan dengan angka asumsi 1 kecamatan satu sumber sejarah lokal.

Berikut Sejarah Lokal telah dilestarikan sampai dengan tahun 2021 dengan capaian 6 sejarah lokal yaitu: (a) Sejarah Makukuhan; (b) Sejarah Wayang Kedu; (c) Sejarah Kyai Subkhi Parakan; (d) Sejarah Pembantaian di Kali Progo (Kesaksian Progo); (e) Sejarah Kyai Kramat Dusun Pete Kembangsari Kandangan; dan (f) Sejarah Tradisi Suran Traji.

5) Persentase Kelompok Kesenian yang Produktif

Adapun persentase kelompok kesenian yang produktif sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.254
Persentase Kelompok Seni Budaya yang Produktif Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase kelompok seni budaya yang Produktif	0	0	5.06	18.75	28.87
	▪ Jumlah kelompok seni terfasilitasi	0	0	0	237	307
				72	307	517
	▪ Jumlah kelompok seni budaya yang beregister	1046	1.190	1.383	1.648	1.791

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase Kelompok Seni Budaya yang produktif yang di hitung capaiannya adalah kelompok seni budaya yang terfasilitasi mulai tahun 2019, karena sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan pada tahun 2018 tidak boleh ada hibah kepada kelompok yang yang tidak berbadan hukum, dan dalam 2 tahun tidak boleh menerima hibah yang sama.

Tabel 2.255
Data Kelompok Kesenian Beregister Tahun 2017- Tahun 2021

NO	KECAMATAN	2017	2018	2019	2020	2021	Jumlah
1	Bansari	5	4	9	9	8	73
2	Bejen	3	3	3	9	6	37
3	Bulu	10	14	13	24	17	102
4	Candiroto	7	1	9	20	12	64
5	Gemawang	18	1	14	16	11	84
6	Jumo	4	5	1	8	2	37
7	Kaloran	24	9	17	8	6	76

NO	KECAMATAN	2017	2018	2019	2020	2021	Jumlah
8	Kandangan	8	7	9	8	2	79
9	Kedu	12	7	6	16	6	59
10	Kledung	11	9	2	9	7	69
11	Kranggan	28	10	12	22	14	114
12	Ngadirejo	12	18	10	6	3	83
13	Parakan	7	10	2	10	4	42
14	Pringsurat	10	7	21	14	6	93
15	Selopampang	13	5	7	19	3	60
16	Temanggung	7	5	25	9	5	87
17	Tembarak	3	8	10	20	7	73
18	Tlogomulyo	1	17	15	25	14	89
19	Tretep	4	0	1	6	7	27
20	Wonobojo	2	4	7	7	7	42
JUMLAH		189	144	193	1.648	101	3.143

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, 2021

6) Persentase Kelompok Pelestari dan Pecinta Bahasa/Sastra yang aktif

Jenis Kelompok pencinta bahasa/sastra dikelompokkan menjadi 4, antara lain: Sastra Jawa, Sastra Indonesia, Teater Modern dan Teater Tradisional.

Tabel 2.256

Persentase Kelompok Pelestari dan Pecinta Bahasa/Sastra yang Aktif Tahun 2017-2021

No	Uraian	Sat.	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kelompok pelestari dan pecintabahasa/sastra yang aktif	Kel	25	25	28	28	28
2	Jumlah kelompok pelestari dan pecinta bahasa/sastra	Kel	62	62	62	62	62
3	Persentase kelompok Pelestari dan Pecinta Bahasa/Sastra yang aktif	%	40,32	40,32	45,16	45,16	45,16

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, 2021

Persentase kelompok Pelestari dan Pecinta Bahasa/Sastra yang aktif tahun 2017-2021 stagnan karena belum optimalnya sentuhan penanganan kelompok pelestari dan Pecinta Bahasa/Sastra di Kabupaten Temanggung.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

1) Persentase Peminjam Perpustakaan

Bahwa persentase peminjam perpustakaan di Kabupaten Temanggung selama cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2021 mencapai 75,38% dari target sebesar 78%. Penurunan terjadi terutama disebabkan karena:

- a. Adanya pandemi Covid 19 sehingga pemustaka baik dari kalangan siswa (TK, SD, SMP, SMA dan Mahasiswa) dan Karyawan/PNS tidak masuk ke ruang perpustakaan sehingga mengurangi pengunjung dan sekaligus sebagai peminjam perpustakaan.
- b. Kurangnya promosi;
- c. Fasilitas kenyamanan untuk pemustaka kurang nyaman;
- d. Adanya wifi corner sehingga pemustaka tidak masuk ke ruang perpustakaan dan tidak melaksanakan absensi pengunjung;
- e. Selama ini sistem pengadaan buku dilaksanakan melalui lelang setahun sekali sehingga tidak dapat mengikuti perkembangan terbitan buku dan buku tidak *up to date*;
- f. Kemajuan teknologi Informatika yang memudahkan dalam membaca buku secara elektronik.

Tabel 2.257

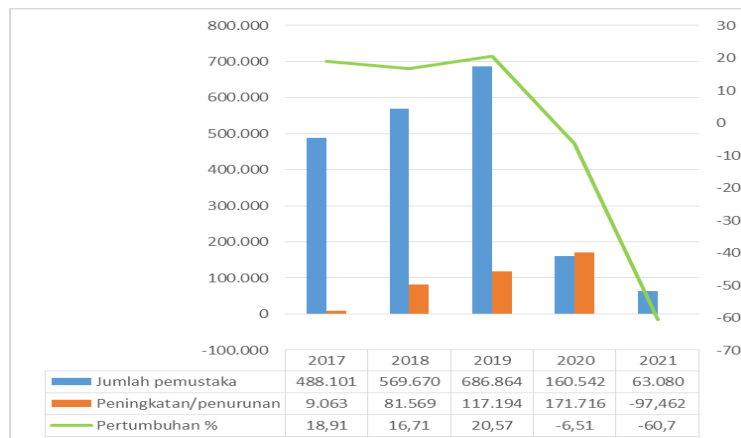
Persentase Peminjam Perpustakaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Peminjam					
	a. Perpustakaan Daerah	1 6.767	18,457	15.898	3.180	1.292
	b. Perpustakaan Sekolah	340.446	436.209	481.565	118.828	20.773
	c. Perpustakaan Desa	52.800	54.452	36.760	4.627	3.104
	Jumlah	410.013	509.118	5534.223	126.635	25.169
2	Jumlah Pemustaka					
	a. Perpustakaan Daerah	82.051	77.824	51.788	11.873	6.364
	b. Perpustakaan Sekolah	345.330	437.226	594.646	142.824	21.749
	c. Perpustakaan Desa	60.720	54.620	40.430	5.845	5.276
	Jumlah	488.101	569,670	686.864	160.542	33.389
3	Persentase Peminjam Perpustakaan	84,00	89,37	77,78	78,88	75,38

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, 2021

2) Persentase Pertumbuhan Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Persentase Pertumbuhan Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Temanggung fluktuatif dari tahun ke tahun, sebagaimana berikut:



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, 2021

Gambar 2.52

Pertumbuhan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Pada tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 menurun.

Adapun penurunan jumlah Pemustaka disebabkan:

- a. Fasilitas untuk kenyamanan pemustaka masih kurang;
- b. Adanya pandemi Covid 19 sehingga pemustaka baik dari kalangan siswa (TK, SD, SMP, SMA dan Mahasiswa) dan Karyawan/PNS tidak masuk ke ruang perpustakaan sehingga mengurangi pengunjung dan sekaligus sebagai peminjam perpustakaan.
- c. Kurangnya promosi;
- d. Fasilitas kenyamanan untuk pemustaka kurang nyaman;
- e. Adanya wifi corner sehingga pemustaka tidak masuk ke ruang perpustakaan dan tidak melaksanakan absensi pengunjung;
- f. Selama ini sistem pengadaan buku dilaksanakan melalui lelang setahun sekali sehingga tidak dapat mengikuti perkembangan terbitan buku dan buku tidak *up to date*; dan
- g. Kemajuan teknologi Informatika yang memudahkan dalam membaca buku secara elektronik.

Peningkatan persentase pertumbuhan jumlah pengunjung di perpustakaan perlu digalakkan dimana hal ini juga akan sejalan dengan upaya untuk mendorong literasi dan gemar membaca di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai upaya maupun inovasi yang dapat menarik kembali minat kunjungan dan minat baca masyarakat di perpustakaan Kabupaten Temanggung.

3) Persentase Perpustakaan yang Aktif

Tabel 2.258
Persentase Perpustakaan Aktif Kabupaten Temanggung
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah perpustakaan aktif	169	171	186	199	204
2	Jumlah perpustakaan	497	499	505	505	517
3	Persentase	34	34,27	36,83	39,41	39,46

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, 2021

Pertumbuhan perpustakaan aktif telah mencapai target kinerja 100% yaitu 39,46% sehingga telah melebihi target dimana target perpustakaan aktif di RPJMD tahun 2021 adalah sebesar 35,08 hal itu disebabkan oleh sebagai berikut.

- a. Adanya kegiatan supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat;
- b. Adanya kegiatan kegiatan penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca masyarakat;
- c. Adanya dana desa yang mendukung perpustakaan desa/kelurahan;
- d. Adanya dukungan dari kepala desa/kelurahan;
- e. Adanya dana BOS yang mendukung perpustakaan sekolah;
- f. Adanya DAK untuk pendirian gedung perpustakaan SD;
- g. Sumber daya manusia/ pengelola perpustakaan desa/sekolah.

4) Cakupan Naskah Kuno dan Koleksi Nasional di Kabupaten Temanggung yang dilestarikan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung telah merencanakan kegiatan melestarikan naskah kuno/koleksi budaya nusantara di Kabupaten Temanggung sebanyak 3 (tiga) naskah kuno selama 3 (tiga) tahun mulai tahun 2021 – 2023.

Tabel 2.259
Cakupan Naskah Kuno Kabupaten Temanggung dan Koleksi Nasional Tahun 2017 - 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dilestarikan	na	na	na	na	13
Koleksi perpustakaan kabupaten temanggung	na	na	na	na	33.646
Cakupan naskah kuno Kabupaten Temanggung dan koleksi nasional (%)	na	na	na	na	0,039%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, 2021

Jumlah naskah kuno pada tahun 2017 – 2020 tidak diketahui. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017 - 2019 belum terdapat anggaran kegiatan penelusuran naskah kuno , sedangkan anggaran yang tersedia sejak tahun 2020 telah difocusing karena adanya Pandemi COVID-19

Jumlah naskah kuno pada tahun 2021 sebesar 0,039%. Hal ini dikarenakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sudah mengidentifikasi dan melestarikan koleksi budaya enis nusantara sejumlah 13 judul. Sedangkan Jumlah koleksi naskah kuno belum ditemukan.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

1) Indeks Manajemen Kearsipan

Data dukung Indeks Manajemen Kearsipan terdiri dari laporan audit kearsipan eksternal tahun 2017 sampai dengan 2019 dan laporan audit kearsipan internal tahun 2019. Sedang tahun 2020 belum diadakan audit internal dan audit eksternal

dikarenakan adanya pandemi covid-19, sehingga nilai memakai hasil tahun 2019. Tahun 2021 telah dilaksanakan audit kearsipan internal dan audit kearsipan eksternal namun karena masih pandemi covid 19 sehingga dilakukan secara digital.

Tabel 2.260
Indeks Manajemen Kearsipan Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Hasil Audit Internal	n.a	n.a	49,59	49,59	37,12
Hasil Audit Eksternal	53	70	76	76	65,30
Indek Manajemen Kearsipan	n.a	n.a	62,80	65,44	54,02

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, 2021

Hasil audit kearsipan eksternal yang dilakukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung dan audit kearsipan internal yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Terhadap 24 (dua puluh empat) Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung tahun 2021 mengalami penurunan, karena:

- a. Masih adanya pandemi covid19
- b. Diberlakukannya PPKM sehingga audit dilakukan melalui online/tidak tatap muka.
- c. Tidak adanya sosialisasi tentang instrumen audit yang baru ditetapkan oleh ANRI tahun 2021, baik dari ANRI maupun dari Provinsi
- d. Tidak adanya masah sanggah dan tidak diberikannya RHAS oleh Provinsi
- e. Kurangnya pemahaman PD terhadap instrumen audit.

2) Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku

Arsip secara baku meliputi pengelolaan arsip dinamis aktif pada organisasi perangkat daerah dan desa dengan beberapa indikator: pencatatan, pendistribusian dan penyimpanan di filling kabinet.

Tabel 2.261
Persentase Cakupan Penerapan Arsip Secara Baku
Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah perangkat daerah, unit kerja, kelurahan dan desa yang melaksanakan arsip secara baku	55	55	89	105	112
Jumlah perangkat daerah, unit kerja, kelurahan dan desa	55	55	344	344	344
Cakupan penerapan arsip secara baku (%)	100	100	25,87	30,23	32,55

Keterangan:
Berdasarkan perhitungan IKD tahun 2017 sampai dengan 2018 jumlah penyebutnya berdasarkan OPD sebanyak 55 dan mulai tahun 2019 menjadi 344

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, 2021

Selama 3 tahun terakhir persentase pengelolaan arsip secara baku mengalami peningkatan. Mulai tahun 2019 target pencapaian pengelolaan arsip secara baku tidak hanya OPD tetapi unit kerja yang meliputi perangkat daerah, unit kerja, kelurahan dan desa.

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap unit kerja/pemerintahan Desa sebanyak 20 desa mewakili 20 kecamatan dan telah ditetapkan 7 (tujuh desa yang dapat melaksanakan arsip secara baku.

3) Persentase Arsip Vital Konvensional yang Dialih mediakan

Arsip vital konvensional meliputi BPKB, sertifikat tanah, dan batas wilayah desa, kecamatan dan kabupaten. Arsip Vital Konvensional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.262
Arsip Vital Konvensional yang Dialih mediakan Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah arsip vital konvensional yang dialihmediakan	n.a	0	490	980	1471
Jumlah arsip vital konvensional	n.a	n.a	4.900	4.900	4.900
Persentase	n.a	n.a	10	20	30,02

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, 2021

Arsip (vital) konvensional yang di alih mediakan telah dilaksanakan sejak tahun 2019 dan pada tahun 2021 telah mencapai target yaitu 1471 arsip vital konvensional atau

sebanyak 30,02%. Data dukung arsip (vital) konvensional yang sudah di alih mediakan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yaitu aset milik pemerintah Kabupaten Temanggung berupa BPKB. Metode tindakan alih media yang digunakan yaitu *scanning*.

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

1) Tingkat Konsumsi Ikan

Tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Temanggung dapat ditunjukkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 2.263
Tingkat Konsumsi Ikan di Kabupaten Temanggung Tahun 2017 – 2021

NO	JENIS DATA	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
PRODUKSI :						
1	-Perikanan Budidaya (kg)	9.000.403	11.007.550	12.532.540	13.419.744	13.873.974
	-Perikanan Tangkap (kg)	664.380	808.750	942.460	611.585	510.698
	-Pengolahan ikan (kg)	398.950	409.400	447.250	357.453	393.196
EKSPOR :						
2	- Ikan segar (kg)	-	-	-	1.125	1.237
	- Ikan olahan (kg)	95.748	98.256	107.340	53.283	58.611
IMPOR:						
3	- Ikan segar (kg)	1.975.556	1.137.383	1.167.220	1.144.100	1.887.765
	- Ikan olahan (kg)	964.880	794.240	762.720	734.530	1.101.795
4	Jumlah Penduduk (BPS)	769.169	780.148	791.264	795.556	800.276
5	TKI (kg/kapita/th)	19,73	20,91	22,96	23,42	24,34

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2021

Keterangan:

Ikan olahan dikonversikan ke ikan segar dengan dikalikan 1,7 per kilogramnya (1 kg ikan olahan disetarakan dengan 1,7 kg ikan segar); *: angka estimasi

Peningkatan tingkat konsumsi ikan dari tahun ke tahun, tapi tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Temanggung masih jauh dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Pada tahun 2021 tingkat konsumsi ikan Kabupaten Temanggung sebesar 24,34 kg/kapita/tahun, sedangkan pada tahun 2020 tingkat konsumsi ikan Provinsi Jawa Tengah 33,71 kg/kapita/tahun dan nasional telah mencapai 52,65

kg/kapita/tahun. Sehingga harapannya pada tiap tahun kampanye Gerakan Makan Ikan tetap dilaksanakan di Kabupaten Temanggung untuk mendorong peningkatan produksi perikanan daerah Produktifitas Ikan

Perkembangan sektor perikanan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan budidaya, produksi benih ikan serta produksi perikanan tangkap. Ruang lingkup dalam produksi perikanan budidaya adalah produksi ikan konsumsi di kolam air tenang, sawah dan karamba jaring apung. Tingkat produktivitas dari masing-masing jenis komoditas ikan dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2.264
Tingkat Produktivitas Ikan Kabupaten Temanggung Tahun 2017 – 2021

NO	JENIS DATA	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	IKAN NILA					
	– Produksi (ton)	1.136,58	1.795,43	1.975,00	2.039,68	2161,24
	– Luas lahan budidaya (Ha)	56,35	56,36	54,70	53,39	31,78
	– Produktivitas (Ton/Ha)	20,17	31,86	36,11	38,20	68,00
2.	IKAN LELE					
	– Produksi (ton)	3.570,31	3.827,88	4.210,74	4.711,35	4.624,56
	– Luas lahan budidaya (Ha)	43,64	43,84	43,71	44,78	44,78
	– Produktivitas (Ton/Ha)	81,81	87,32	96,33	105,21	68,24
3.	IKAN MAS					
	– Produksi (ton)	813,62	982,38	1.080,63	885,7	1.219,14
	– Luas lahan budidaya (Ha)	18,47	18,79	19,95	16,02	18
	– Produktivitas (Ton/Ha)	44,05	52,29	54,20	55,3	67,73
	– Produktivitas (Ton/Ha)	14,55	27,01	28,66	28,94	

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2021

2) Persentase Peningkatan Lokasi penebaran benih Ikan

Perairan umum Kabupaten Temanggung berupa sungai, embung, cekdam, dan genangan air lainnya. Jenis ikan yang ditebar meliputi ikan nila, ikan nilem, dan ikan uceng. Ikan berasal dari hasil pengadaan maupun hasil produksi sendiri dari Balai Benih Ikan Mungseng. Tingginya animo masyarakat dibuktikan oleh banyaknya permintaan akan penebaran benih

ikan di perairan umum yang diajukan oleh Kepala Desa. Dari tabel dibawah dapat dilihat peningkatan yang sangat signifikan baik dari segi jumlah benih maupun jumlah lokasi penebaran benih ikan. Hal ini juga membuktikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Tabel 2.265

Tabel Data Lokasi Penebaran Benih Ikan Tahun 2020 – 2021

No.	Jenis data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Lokasi Tebar	n.a	n.a	n.a	9	20
2.	Persentase Peningkatan lokasi penebaran benih ikan	n.a	n.a	n.a	n.a	122%

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2021

Target peningkatan lokasi penebaran benih ikan adalah 33% untuk tahun 2021, sehingga dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa target persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan telah tercapai.

Tabel 2.266

Tabel Data Jumlah Benih (Ekor) Yang Ditebar Di Perairan Umum Tahun 2020 – 2021

No.	Jenis Ikan	Tahun	
		2020	2021
1	Ikan Nila	10.750	13.600
2	Ikan Nilem	23.000	79.326
3	Ikan Uceng	900	1.000
Jumlah		34.650	93.926

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2021

3) Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum

Produksi perikanan tangkap menggambarkan jumlah ikan yang ditangkap di perairan umum (meliputi sungai, cekdam, rawa atau genangan) yang sebagian atau seluruh hasil tangkapan tersebut dijual, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.267

Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

NO	JENIS DATA	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Produksi (ton)	664,38	808,75	942,46	611,585	510,598

NO	JENIS DATA	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
2	Persentase peningkatan produksi (%)	55,49	21,73	16,53	(35,11)	(26,90)

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2021

Pada tahun 2020 produksi perikanan tangkap sejumlah 611.585 kg, sedangkan pada tahun 2021 produksi sebesar 510.598 kg, terjadi penurunan produksi tangkap sebesar 26,90% dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini antara lain disebabkan karena adanya predator berupa ikan Palung yang sudah tersebar hampir diseluruh perairan di Kabupaten Temanggung, sehingga jumlah ikan di perairan umum menjadi berkurang sehingga memerlukan upaya cukup keras untuk dapat meningkatkan produksi ikan tangkap.

Selain itu, adanya kondisi pandemi covid-19 dimana beberapa daerah melaksanakan lockdown lokal yang membatasi orang asing masuk ke suatu wilayah, menyebabkan terbatasnya area tangkapan dari para nelayan. Walaupun begitu kegiatan penangkapan ikan masih tetap berlangsung, karena didukung penebaran benih ikan di perairan umum yang diagendakan rutin setiap tahun oleh pemerintah dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak menangkap ikan secara ilegal turut berperan dalam peningkatan populasi ikan di perairan umum.

Adanya Perda Kabupaten Temanggung No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan yang mengatur tentang larangan penangkapan ikan secara ilegal telah ditindaklanjuti di tingkat desa dengan membuat Peraturan Desa yang mengatur hal tersebut.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

1) *Length of Stay* (Lama Tinggal Wisatawan)

Perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari rata-rata lama tinggal wisatawan sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.268
Length of Stay (Lama Tinggal Wisatawan) di Kabupaten Temanggung
 Tahun 2017 - 2021

No	INDIKATOR	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah hotel	14	14	14	17	17
2.	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan (hari)	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Lama Tinggal Wisatawan (*Length of Stay*) tahun 2017-2021 stagnan setiap tahunnya, hal ini disebabkan karena data yang dihimpun dari hotel baik bintang maupun non bintang yang ada di Kabupaten Temanggung bila di rata-rata hanya 1 hari.

2) Pertumbuhan Jumlah Wisatawan

Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan tahun 2017-2021 sebagaimana tersebut pada tabel berikut ini:

Tabel 2.269
 Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten
 Temanggung Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah wisatawan	491.114	566.853	636.592	223.765	198.953
2.	Jumlah wisatawan manca negara (jiwa)	107	161	104	40	0
	Jumlah wisatawan domestik (jiwa)	491.037	566.692	636.488	223.725	198.953
3.	Jumlah peningkatan	62.399	75.709	69.739	(-)1,84	(-) 11.09
	Pertumbuhan	14,55	15,41	12.30	0	0

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, 2021

Jumlah wisatawan di Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif tapi mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Peningkatan jumlah wisatawan karena adanya beberapa tempat wisata yang ramai dikunjungi, antara lain Pikatan Water Park dan Posong. Tempat wisata yang baru berkembang dan mampu menarik wisatawan berkunjung adalah tempat wisata berbasis alam, antara lain Sedengkeng, Sedhadap, Bukit Kembang Arum, Wagir Bawang, Bejen *Forest Park*, Sidengok, BCL (Banyu Ciblon Lestari), beraneka Curug, dan beraneka Embung maupun salah satu cagar

budaya yang menarik yakni Situs Liyangan. Sedangkan penurunan wisatawan disebabkan kurangnya inovasi dari pengelola obyek wisata serta keterbatasan kemampuan SDM pengelola objek wisata sehingga peran instansi terkait sangat berperan dalam peningkatan kunjungan wisatawan. Pada tahun 2021 jumlah wisatawan yang berkunjung mengalami penurunan dikarenakan belum semua Obyek Wisata/ destinasi wisata yang dibuka, akibat anjuran Pemerintah untuk menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM.

3) Persentase Obyek Wisata yang Berkembang

Persentase obyek wisata yang berkembang tahun 2017-2021 dapat dilihat sebagaimana tersebut pada tabel berikut ini:

Tabel 2.270
Persentase Obyek Wisata yang Berkembang Kabupaten Temanggung Tahun 2017 -2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah obyek wisata yang berkembang	13	15	18	22	30
2.	Jumlah potensi wisata	34	72	72	72	96
	Persentase	38,24	20,83	25,00	30,56	31,25

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, 2021

Persentase obyek wisata yang berkembang tahun 2017-2021 fluktuatif namun jumlah potensi wisata semakin meningkat. Diantaranya obyek wisata alam sangat mencolok perkembangannya dibanding dengan obyek wisata lainnya, dengan menyimpan keindahan yang cukup menarik bagi wisatawan, baik berupa gunung, air terjun maupun kondisi alam yang bisa menawarkan keindahan untuk dijadikan tempat rekreasi. Dari sisi karakteristik alam, Kabupaten Temanggung mempunyai 2 (dua) gunung yaitu gunung Sumbing dan gunung Sindoro yang disukai oleh para pendaki dan wisatawan dalam menikmati sejuknya udara dan keindahan alamnya. Berikut potensi wisata alam, budaya/sejarah dan wisata buatan yang berada di Kabupaten Temanggung.

4) Persentase Desa Wisata

Persentase Desa Wisata di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.271
Persentase Desa Wisata Kabupaten Temanggung
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa Wisata	13	14	17	19	20
2	Jumlah Desa	266	266	266	266	266
3	Persentase	4.89	5.26	6.39	7.14	7.51

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, 2021

Persentase desa wisata tahun 2017-2021 meningkat disebabkan karena animo dan kesadaran masyarakat terhadap manfaat keberadaan Desa Wisata meningkat. Melalui Desa Wisata diharapkan bisa meningkatkan ekonomi lokal/daerah dan berpotensi meningkatkan pendapatan. Berikut data desa wisata sesuai Keputusan Bupati Temanggung No. 180/188 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Temanggung tahun 2019 tentang Desa Wisata di Kabupaten Temanggung.

5) Persentase Desa Wisata Naik Klasifikasi

Penentuan kenaikan klasifikasi Desa wisata, Tim Assesmen Dinbudpar Kabupaten Temanggung mengadakan assesmen kepada Desa wisata yang akan naik klasifikasi dengan pemenuhan kriteria yang telah ditentukan oleh Provinsi.

Tabel 2.272
Persentase Desa Wisata naik klasifikasi Kabupaten Temanggung
Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Desa Wisata Naik Klasifikasi	0	0	0	17	0
Jumlah Desa Rintisan	13	14	17	19	20
% Deswita Berkembang	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, 2021

Dari variabel diatas terlihat pada Jumlah Desa wisata terklasifikasi mulai tahun 2020 sebanyak 17 Desa wisata dengan klasifikasi berkembang, dari sini untuk membangun sinergitas antara masyarakat Desa dengan pemangku

kebijakan (Pemkab) akan terlihat dengan peningkatan kualitas Desa Wisata yang ada, dengan kriteria Desa Wisata yakni Rintisan, Berkembang, Maju dan Mandiri.

6) Peningkatan Jumlah pelaku Ekraft

Pada tahun 2021, dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat sebagai salah satu tindak lanjut dari usaha penurunan angka kemiskinan Pemerintah Kabupaten Temanggung mengamanatkan kepada Dinbudpar 1 indikator program sebagai kontrol pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Temanggung, yaitu Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif.

Tabel 2.273
Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Pelaku Ekraft Tahun berjalan	na	na	na	95	107
Jumlah Pelaku Ekraft Tahun sebelumnya	na	na	na	na	95
Persentase Pelaku Ekraft	na	na	na	0	93,21

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, 2021

Sampai dengan Tahun 2021, persentase peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif bertambah 12 pelaku ekraf sehingga bertambah subsector di Kabupaten Temanggung.

3. Urusan Pemerintah Bidang Pertanian

1) Tingkat Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak per Kapita

Ketersediaan Energi per Kapita di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir yaitu:

Tabel 2.274
Tabel Ketersediaan Energi per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Ketersediaan Energi/Kapita	3.458	2.912	2.576	2.271	2934

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2021

Ketersediaan Energi per Kapita di kabupaten Temanggung cenderung fluktuatif. Ketersediaan protein perkapita adalah rata-rata banyaknya jenis bahan makanan/sumber protein yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk per kapita per tahun (dalam kilo kalori) dalam kurun waktu tertentu. Protein berasal dari bahan pangan nabati dan hewani. Produksi daging baik dari ternak besar seperti sapi, ternak kecil dan unggas, telur, dan susu menjadi sumber utama ketersediaan protein hewani. Sedangkan protein nabati sebagian besar berasal dari tanaman polong/kacang-kacangan, kelapa, dan buah/biji berminyak. Menurut WNPG X – 2012, Angka kecukupan protein adalah 57 gram/ kapita/ hari, sedangkan angka ketersediaan minimal 63 gram/kapita/hari.

Ketersediaan protein perkapita di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.275
Tabel Ketersediaan Protein per Kapita
Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Ketersediaan Protein gr/kapita	115,34	102,99	130,02	124,99	62,59

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2021

Ketersediaan protein per kapita di kabupaten Temanggung tahun 2021 mengalami penurunan (tidak mencapai target) karena penurunan produksi tanaman pangan dikarenakan serangan hama serta tidak adanya data bahan pangan impor. Selain itu produksi dari sektor peternakan berupa telur juga mengalami penurunan, sementara telur merupakan sumber protein hewani yang paling diminati oleh semua lapisan masyarakat yang dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau, terutama dalam kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya akibat pandemi COVID-19.

2) Produktivitas Tanaman Pangan

Produksi dan provitas komoditas tanaman pangan jika dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan luas panen disebabkan adanya peralihan komoditas dan peralihan peruntukan lahan dan pengaruh cuaca/iklim yang ekstrem (contoh: jagung sangat rentan mengalami kerusakan karena angin). Selain itu faktor benih sangat berpengaruh, dimana sebagian besar komoditas tanaman jagung bukan benih unggul karena penggunaannya untuk kebutuhan pangan lokal. Meningkatnya serangan hama tikus dan penyakit/OPT (blast, kresek), hal ini juga dapat disebabkan karena curah hujan tinggi menyebabkan pertumbuhan gulma yang cepat, yang disamping menjadi kompetitor nutrisi, juga menjadi habitat yang disukai tikus serta berpotensi menyebabkan serangan OPT. Pembusukan di ujung tongkol terkait tingginya curah hujan terjadi di beberapa wilayah, menyebabkan penurunan mutu dan produksi jagung. Adanya gangguan dari organisme pengganggu tanaman (OPT) menyebabkan mayoritas petani sulit mengubah pola tanam dan melaksanakan pola peningkatan IP guna meningkatkan panen dan produksi, utamanya padi. Untuk penanggulangan serangan hama dan penyakit telah dilaksanakan Gerdal (gerakan pengendalian hama dan penyakit) secara mandiri oleh kelompok, gerdal oleh dinas dan gerdal kolaborasi dengan laboratorium hama dan penyakit Kedu. Produktivitas tanaman ubi kayu juga mengalami fluktuasi setiap tahun dikarenakan umur panen ubi kayu yang relatif lama, dan penanaman dilakukan secara tumpang sari dengan tanaman lain. Selain itu sangat dipengaruhi faktor harga jual, dimana panen ubi kayu biasanya menunggu harga tinggi.

Produktivitas tanaman pangan diperoleh dari produktivitas tanaman pangan utama di Kabupaten Temanggung yakni tanaman padi, jagung dan ubi kayu. Produktivitas tanaman

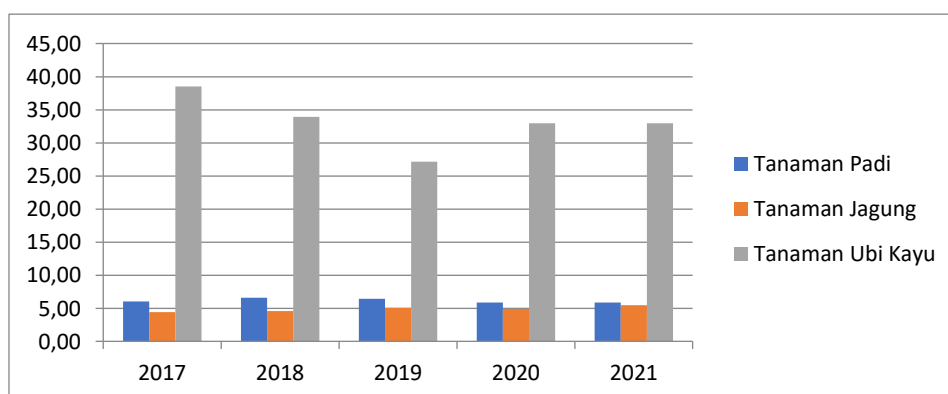


pangan di kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.276
Perkembangan Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2017 – 2021

NO	JENIS DATA	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tanaman Padi						
	Luas Panen	ha	31.552,10	31.465,50	30.567,1	26.458,5	20.553,80
	Produksi	ton	191.174,17	208.370,61	196.847	156.105,7	121.262,700
	Produktivitas	ton/ha	6,06	6,62	6,4	5,9	5,9
2.	Tanaman Jagung						
	Luas Panen	ha	17.226,00	17.967,00	14.369,1	11.211,5	8.580,3
	Produksi	ton	78.768,00	82.051,60	72.916	54.985,35	38.611,35
	Produktivitas	ton/ha	4,45	4,57	5,08	4,9	4,500
3.	Tanaman Ubi Kayu						
	Luas Panen	ha	1.042,70	740,2	740,7	365,6	278,30
	Produksi	ton	40.178,36	25.118,01	20.091	12.032,64	9.159,410
	Produktivitas	ton/ha	38,53	33,9	27,12	32,91	32,912

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2021



Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2021

Gambar 2.53
Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2017-2021

Berbagai upaya dilaksanakan oleh pemerintah di tahun 2021 melalui kegiatan fasilitasi guna meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam melaksanakan budidaya tanaman

pangan, mendorong masyarakat untuk meningkatkan penggunaan benih unggul serta gerakan pengendalian hama dan penyakit tanaman secara terpadu. Sehingga dengan kondisi serta berbagai hambatan yang terjadi di tahun 2021, produktivitas komoditas tanaman pangan di Kabupaten Temanggung masih dapat dipertahankan.

3) Produktivitas Tanaman Hortikultura

Produktivitas tanaman hortikultura diperoleh dari produktivitas tanaman hortikultura utama di Kabupaten Temanggung yaitu untuk sayuran: bawang putih, bawang merah, cabe rawit, cabe besar, dan kentang. Sedangkan untuk buah-buahan yaitu: buah durian dan jambu biji. Produktivitas tanaman hortikultura di kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di berikut ini.

Tabel 2.277
Perkembangan Komoditas Tanaman Hortikultura
Kabupaten Temanggung Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Bawang Putih					
	Luas panen (ha)	640	1.748	3.044	2.481	1.591
	Jumlah produksi(ton)	4.709,41	13.803,10	24.086,8	16.355,00	10.355,3
	Produktivitas (ton/ha)	7,36	7,90	7,91	6,58	6.51
2	Bawang Merah					
	Luas panen (ha)	1.439,50	1.313	1.590	1.246	1.555
	Jumlah produksi (ton)	11028,4	10.462,70	12.798	9.171,10	11.102,1
	Produktivitas (ton/ha)	7,66	7,97	8,05	7,36	7.140
3	Cabai Rawit					
	Luas panen (ha)	2843,5	3.202	2.506	2622	2.977,50
	Jumlah Produksi (ton)	15073,782	17.439,90	16.706	18.345,70	20.802.930
	Produktivitas (ton/ha)	5,3	5,45	6,66	7,00	6,987
4	Cabai Besar					
	Luas panen (ha)	3.761	4.733	3.175	2859	2.818,00
	Jumlah Produksi (ton)	25.950,3	33.079,40	23.022	20.613,80	19.886.640
	Produktivitas (ton/ha)	6,9	6,99	7,25	7,21	7.057

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2021

4) Produktivitas Tanaman Perkebunan

Produktivitas tanaman perkebunan diperoleh dari produktivitas tanaman perkebunan utama di Kabupaten Temanggung yaitu: tembakau, kopi robusta, kopi arabika, cengkeh, dan aren. Produktivitas tanaman perkebunan di kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di berikut ini.

Tabel 2.278
Perkembangan Komoditas Tanaman Perkebunan Kabupaten
Temanggung Tahun 2017 - 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tembakau				
Luas panen (ha)	15.865	16.716	18.869	115.980	18.293,08
Jumlah produksi (ton)	9.785	11.363,52	12.820	17.102	12.585,639
Produktivitas (ton/ha)	0,62	0,679	0,68	0,678	0,688
2	Kopi Robusta				
Luas panen (ha)	8.158,55	11.106,5	11.105,82	11.507	11.724,46
Jumlah produksi (ton)	3912,5	7.663,5	6.874,5	7.813,1	83.841,6
Produktivitas (ton/ha)	0,48	0,69	0,68	0,679	0,715
3	Kopi Arabika				
Luas panen (ha)	1.377,82	1.090,1	1.095,13	1369	1.564,36
Jumlah Produksi (ton)	741,41	2.349,1	675,6	848,8	955,24
Produktivitas (ton/ha)	0,54	0,67	0,617	0,62	0,611
4	Cengkeh				
Luas panen (ha)	869,96	1202	326,80	438	413,59
Jumlah produksi (ton)	145,91	245.2	144,1	132,4	95,95288
Produktivitas (ton/ha)	0,17	0,204	0,441	0,302	0,232
5	Vanili				
Luas panen (ha)	20,34	11,12	9,12	15	15,60
Jumlah produksi (ton)	10,01	7,03	2,35	3,1	4,571
Produktivitas (ton/ha)	0,492	0,283	0,258	0,209	0,293

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata produktivitas tanaman perkebunan di Kabupaten Temanggung cenderung meningkat namun masih terjadi fluktuasi.

Tanaman tembakau merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Temanggung yang memiliki cita rasa yang khas dan digunakan sebagai bahan baku rokok kretek, pemberi rasa dan aroma. Luas areal tanaman perkebunan tembakau di Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 menduduki peringkat pertama se-Jawa Tengah² seluas 15.443,88 ha, sedangkan produksi tembakau menduduki peringkat kedua se-Jawa Tengah³ sebesar 10.429,85 ribu ton.

Selain tembakau, komoditas kopi juga merupakan tanaman unggulan di Kabupaten Temanggung, karena kopi Temanggung terkenal dengan cita rasa yang khas serta sering menjuarai festival kopi baik di tingkat Nasional maupun Internasional. Luas areal dan produksi tanaman perkebunan kopi di Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 menduduki peringkat pertama se-Jawa Tengah⁴ seluas 13.346,76 ha serta produksi sebesar 10.925,98 ribu ton. Selain itu, luas areal kopi arabika (2.662,81 ha) dan kopi robusta (13.727,48 ha) menduduki peringkat pertama se-Jawa Tengah⁵.

Produktifitas tanaman cengkeh relatif tetap dari tahun ke tahun. Populasi Tanaman cengkeh di Kabupaten Temanggung banyak tersebar di Kecamatan Candiroto, Bejen, Tretep, Gemawang dan Wonobojo. Kendala dalam budidaya cengkeh diantaranya adalah serangan penyakit jamur akar putih yang menyebabkan tanaman cengkeh dalam satu kawasan mendadak mengalami layu dan mati.

Vanili adalah komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi yang belum dibudidayakan secara intensif oleh masyarakat petani

² Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2022, BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

³ Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2022, BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

⁴ Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2022, BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

⁵ Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2022, BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Temanggung. Tanaman yang cocok dikembangkan di pekarangan menjadi salah satu alternatif komoditas yang bisa dikembangkan, disamping dalam tata niaga, komoditas ini merupakan salah satu komoditas rempah rempah dengan harga relatif stabil. Pada tahun 2021 luas dan produksi vanili mengalami peningkatan dimana luas areal panili sebesar 60,61 ha paling luas diantara kabupaten/kota di Jawa Tengah⁶.

5) Persentase Perkembangan Lembaga Ekonomi Petani

Dari 2.241 kelompok tani yang terdaftar di tahun 2021, 12 kelompok telah tergabung secara aktif dalam Lembaga Ekonomi Petani sebagai berikut:

Tabel 2.279
Daftar Kelompok Tani yang Tergabung dalam
Kelompok Ekonomi Petani

No	Nama	Kelompok Tani	Alamat
1	Imam Sardjo	KT Raharjo	Desa Kalibanger Kec Gemawang
2	Solikhin	KT Ngudi Makmur	Desa Jambon Kec Gemawang
3	Mulyadi	KT Ngudi Makmur	Desa Karangseneng Kec Gemawang
4	Indriyanto	KT Rukun Raharjo	Desa Gesing Kec Kandangan
5	Sutrisno	KT Amrih Mulyo	Desa Muncar Kec Gemawang
6	Sufahani	KT Sumber Rejeki	Desa Tening Kec Wonobojo
7	Sujak	KT Sidomulyo	Desa Kebondalem Kec Bejen
8	Dahno	KT Ngudi Hasil	Desa Sucen Kec Gemawang
9	Ngateno	KT Konsetiti	Desa Krempong Kec Gemawang
10	Mudjijo	KT Tarumartani	Desa Jumo Kec Jumo
11	Sutanto	KT Panca Usaha	Desa Gemawang Kec. Gemawang
12	Sunardi	KT Ngesti Makmur	Desa Kemiriombo Kec. Gemawang

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2021

6) Produktivitas Ternak Ruminansia

Perkembangan produktivitas ternak sapi, kambing dan domba selama 5 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.280
Produktivitas Ternak Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No.	TERNAK	PRODUKTIVITAS (KG/EKOR)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Sapi					
	Jumlah Produksi daging (Kg)	615.498	657.241	671.099	637.468	775.372
	jumlah ternak yang dipotong (ekor)	3.642	3.889	3.971	3.772	4.588

⁶ Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2022, BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

No.	TERNAK	PRODUKTIVITAS (KG/EKOR)				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Konstanta	4	7,65	7,8	8	8,2
	Produktivitas (Kg/ekor)	173	176,65	176,80	177	177,20
2	Kambing					
	Jumlah Produksi daging	123.120	2.741	8.681	8.100	7.898
	jumlah ternak yang dipotong	9.120	203	643	600	585
	Konstanta	0,03	0,16	0,16	0,18	0,19
	Produktivitas	13,53	13,66	13,67	13,68	13,69
3	Domba					
	Jumlah Produksi daging	157.498	170.924	179.483	231.323	227.273
	jumlah ternak yang dipotong	11.665	12.661	13.295	17.123	16.835
	Konstanta	0,03	0,16	0,16	0,18	0,19
	Produktivitas	13,53	13,66	13,67	13,68	13,69

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2021

Produktivitas ternak potong di Kabupaten Temanggung tahun 2017-2019 mengalami kenaikan khususnya produktivitas ternak sapi, untuk produktivitas ternak sapi pada tahun tahun 2020 menjadi 177 kg/ekor dan tahun 2021 menjadi 177,20 kg/ekor, sedangkan untuk produktivitas ternak kambing dan ternak domba pada tahun 2019 dan 2020 msh tetap sama yaitu mencapai 13,67 kg/ekor dan tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan menjadi 13,69 kg/ekor. Populasi domba di Kabupaten Temanggung tahun 2021 paling banyak diantara kabupaten/kota se-Jawa Tengah⁷ sebanyak 406.556 ekor.

Berkaitan dengan adanya kasus penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak yang merebak di tahun 2022 perlu adanya antisipasi diantaranya penyemprotan desinfektan di pasar hewan serta pengobatan hewan yang terpapar PMK tersebut.

⁷ Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2022, BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

7) Produktivitas Ternak Unggas

Perkembangan produktivitas ternak unggas dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini.

Tabel 2.281
Produktivitas Ternak Unggas di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	TERNAK	PRODUKTIVITAS (KG/EKOR)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Ayam Ras Pedaging					
	Jumlah Produksi daging (Kg)	6.513.127	9.065.840	10.211.850	6.914.355	7.047.798
	jumlah ternak yang dipotong (ekor)	4.652.234	12.087.786	13.615.000	9.219.140	9.397.064
	Produktivitas (Kg/ekor)	1,4	0,75	0,75	0,75	0,75
2	Ayam Ras Petelur					
	Jumlah Produksi telur	7.364.796	8.048.417	8.434.221	7.886.499	7.259.257,8
	Jumlah populasi ternak	687.656	780.500	782.061	705.714	707.530
	Produktivitas	10,7	10,3	10,88	10,88	10,26
3	Ayam Buras					
	Jumlah Produksi daging	425.400	399.149	400.567	347.500	368.990
	jumlah ternak yang dipotong	567.200	570.213	572.239	496.429	527.128
	Produktivitas	0,75	0,7	0,7	0,70	0,70

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2021

Produktivitas ternak ayam ras pedaging di Kabupaten Temanggung tahun 2017-2021 berubah karena mengikuti kebutuhan pola konsumsi. Produktivitas ternak ayam buras stabil karena pematangan ternak menyesuaikan permintaan pasar.

8) Persentase Penanganan Penyakit Hewan

Persentase Penanganan penyakit hewan merupakan indikator baru di Perubahan RPJMD sehingga baru bisa dihitung di akhir tahun 2021. Penyakit yang sering terjadi di Kabupaten Temanggung antara lain: cacangan, gangguan reproduksi, demam tiga hari/BEF, Newcastle Disease, Avian Influenza, Kembung, Malnutrisi, Toxoplasmosis, Diare, Fraktur, Luka, Scabies, dll.

Sampai dengan 2021 terdapat 1.809 laporan kasus dan yang tertangani 1.749 kasus telah tertangani 96,68%.

Tabel 2.282
Persentase penanganan penyakit hewan
di Kabupaten Temanggung Tahun 2017 - 2021

No	uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penanganan kasus penyakit hewan	n.a	n.a	n.a	n.a	1.749,00
2	Jumlah laporan kasus penyakit hewan	n.a	n.a	n.a	n.a	1.809,00
	Persentase penanganan penyakit hewan (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	96,68

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2021

- 9) Persentase peningkatan pengawasan produk olahan asal hewan dan bahan asal hewan yang memenuhi syarat

Pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan bertujuan untuk menjamin kesehatan produk hewan dan bahan asal hewan sehingga terbebas dari penyakit yang dapat ditularkan melalui produk hewan/food borne disease.

Produk hewan yang diawasi meliputi telur, daging, susu, dan olahan BAH berupa bakso. Penjaminan produk hewan dapat dilakukan melalui pengaturan peredaran produk hewan dengan kegiatan melalui pengawasan, pemeriksaan dan pengujian, standarisasi, sertifikasi dan registrasi, untuk menjamin keamanan produk hewan sejak dalam proses budidaya hingga peredaran (*safe from farm to table*).

Pengawasan produk hewan dilakukan dengan mengambil sampel telur di pedagang/peternak; sampel susu di kios susu/peternak; sampel bakso di ambil dari pedagang bakso. Sedangkan sampel daging diambil dari para pedagang di pasar. Semua sampel diujikan di Laboratorium Kesmavet. Pengawasan produk daging juga dilakukan pada saat penyelenggaraan penyembelihan hewan qurban di Hari Raya Idul Adha.

10) Persentase pengendalian bencana pertanian

Bencana di bidang pertanian dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, kerusakan dan/atau kehilangan input produksi, kerusakan sarana, prasarana dan fasilitas umum, munculnya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan penyakit hewan. Dampak bencana pada petani berupa gagalnya panen dan rusaknya sarana usahatani, selain mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada masyarakat juga merugikan pemerintah karena pada akhirnya dapat berdampak pada terjadinya kekurangan pangan.

Tabel 2.283
Persentase pengendalian bencana pertanian
di Kabupaten Temanggung Tahun 2017 - 2021

No	uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas Cakupan pengendalian OPT Tanaman Pangan Utama melalui Gerakan Pengendalian OPT	n.a	n.a	n.a	n.a	377
2	Luas hamparan lokasi pengendalian yang terpapar (ha)	n.a	n.a	n.a	n.a	915
3	Persentase pengendalian bencana pertanian (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	0,81

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2021

11) Persentase kelompok tani yang naik kelas

Tabel 2.284
Persentase Kelompok tani yang Naik Kelas
Kabupaten Temanggung tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	jumlah kelompok tani yang naik kelas	n.a	n.a	12	15	22

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2021

Data 2021 kenaikan kelas kelompok sebesar 0,81% atau 22 kelompok tani dari total kelompok tani yang terdaftar 2.709. Beberapa faktor yang mendukung peningkatan kualitas kelompok tani diantaranya adalah: (a) Terselenggaranya Pembinaan dan pendampingan yang intensif oleh penyuluh pertanian dalam peningkatan kapasitas petani; (b) Penyelenggaraan pelatihan-

pelatihan dan bimbingan teknis bagi kelompok tani/Gapoktan; (c) Pemahaman petani dalam menggali kelompoknya; dan (d) Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani melalui sekolah lapang.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

1) Presentase ketersediaan Informasi Harga Bahan Pokok dan Bahan Lainnya Penyebab Inflasi

Ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi diperoleh dari 6 pasar daerah yaitu (a) Pasar Temanggung, (b) Pasar Parakan, (c) Pasar Ngadirejo, (d) Pasar Candiroto, (e) Pasar Kranggan, dan (f) Pasar Pingit.

Tabel 2.285
Persentase Ketersediaan Informasi Harga Bahan Pokok dan Bahan Lainnya Penyebab Inflasi Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah hari kerja yang tersedia informasi	248	244	243	242	253
2	Jumlah hari dalam satu tahun	365	365	365	365	365
3	Persentase ketersediaan informasi harga	67,94	66,84	66,57	66,3	69,32

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Temanggung, 2021

2) Kontribusi Nilai Ekspor Terhadap PDRB Sektor Perdagangan

Tabel 2.286
Persentase Kontribusi nilai ekspor terhadap PRDB Sektor Perdagangan Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Realisasi nilai ekspor non migas	96.578.151,47	114.351.350,48	179.724.438,04	897.471.264.096	1.393.541.923.933,96
2	PDRB sektor perdagangan	3.847.197,71	4.141.922,37	4.464.461,12	4.464.461,12	4.464.461,12
3	Persentase	36,77	40,39	58,90	20	31,21

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Temanggung, 2021

Nilai ekspor non migas tahun 2017–2019 cenderung naik, namun pada tahun 2020 sampai dengan 2021 nilai ekspor non migas mengalami penurunan karena negara tujuan ekspor mengurangi permintaan.dengan adanya pandemi covid-19.

3) Persentase Pedagang Kaki Lima yang Menempati Ruang Sesuai Peruntukan

Pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.287
Persentase Pedagang Kaki Lima yang Menempati Ruang Sesuai Peruntukan di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PKL yang menempati ruang sesuai peruntukan	106	150	161	161	106
2	Jumlah PKL	805	805	861	872	807
3	Persentase	13,17	18,63	18,69	18,46	13,13

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Temanggung, 2021

Sejak tahun 2020 jumlah PKL cenderung mengalami penurunan sekitar 34%, karena adanya masa pemberlakuan PPKM, dimana Kabupaten Temanggung berada pada level 3 dan 4 secara bergantian.

4) Cakupan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Ditera Ulang

Perkembangan capaian cakupan alat UTTP yang ditera ulang dapat dijelaskan melalui tabel dibawah ini:

Tabel 2.288
Cakupan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan yang Ditera Ulang

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah alat UTTP yang ditandai	201	350	765	2.394	4741
2	Jumlah alat UTTP	9584	9584	9584	5.500	6000
3	Persentase	2,09	3,65	15,3	43,53	79,02

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Temanggung, 2021

Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 cenderung meningkat karena dilakukannya tera dan tera ulang di SPBU dan alat-alat atau timbangan yang ada dipasar daerah.

5) Persentase Pasar dalam Kondisi Baik

Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik tahun 2017–2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.289
Persentase Pasar Daerah dalam Kondisi Baik di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pasar kondisi baik	2	2	3	3	3
2	Jumlah pasar daerah	6	6	6	6	6
3	Persentase	33,33	33,33	50	50	50

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Temanggung, 2021

Sejak tahun 2017-2021 Pasar daerah kondisi baik di Kabupaten Temanggung mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan adanya perbaikan Pasar secara keseluruhan dan himbauan kepada Pedagang untuk mendukung Pasar Sehat.

6) Persentase Kepatuhan Pedagang Pasar sesuai Zonasi Peruntukan Pedagang

Persentase kepatuhan pedagang sesuai zonasi peruntukan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.290
Persentase Kepatuhan Pedagang Pasar Sesuai Zonasi Peruntukan Pedagang di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pedagang pasar yang patuh sesuai zonasi	2.875	2.938	3.030	3090	3.140
2	Jumlah pedagang pasar	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613
3	Persentase	27,08	27,68	28,54	29,11	29,59

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Temanggung, 2021

Kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan cenderung meningkat karena dilakukan penataan pedagang dan penertiban di 6 pasar daerah utamanya di wilayah Pasar Temanggung. Jumlah pedagang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 tetap karena tidak ada penambahan fasilitas zonasi pedagang.

7) Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Pasar Daerah

Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.291
Persentase Realisasi Pendapatan Pasar Daerah Tahun 2017-2021

No	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2017	12.691.803.500	4.740.971.250	37,35
2	2018	11.523.022.000	6.846.373.470	59,41
3	2019	8.046.111.600	5.647.740.149	70,19
4	2020	4.481.750.000	4.423.841.071	98,70
5	2021	7.053.402.250	4.546.044.333	64,45

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Temanggung, 2021

Realisasi Pendapatan Pasar Daerah dari tahun 2017-2021 cenderung fluktuatif. Untuk tahun 2020 terdapat penurunan target dikarenakan adanya wabah Covid 19 dan pendapatannya mencapai 98,70 % dari target yang baru.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

1) Persentase IKM Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah

Industri kecil menengah yaitu IKM agro industri dan IKM aneka industri, dengan perkembangan sebagai berikut:

Tabel 2.292
Persentase IKM Industri yang Berbasis Komoditas Unggulan Daerah Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah IKM industri yang berbasis komoditas unggulan daerah	4.792	4.951	5.281	5.351	60
2	Jumlah IKM industri	16.812	16.902	17.273	17.318	325
3	Persentase	28,20	29,29	30,57	30,89	18,46

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2021

Persentase IKM industri yang berbasis komoditas unggulan daerah pada tahun 2017 sampai dengan 2020 cenderung meningkat dikarenakan adanya fasilitasi bantuan peralatan, fasilitasi sertifikasi usaha dan pelatihan serta pemagangan.

2) Persentase Pembinaan Industri Penghasil Cukai

IKM Industri Tembakau di Kabupaten Temanggung jumlahnya sangat besar, yaitu sebanyak 3.580 unit usaha, namun hanya 2 unit usaha yang menghasilkan cukai. Diharapkan produsen Tembakau lembutan kemasan semuanya dapat bercukai. Oleh karena itu Pemkab Temanggung sangat memperhatikan hal tersebut, dan melakukan pembinaan serta memfasilitasi unit usaha, agar dapat mempunyai cukai di produk lembutan berkemasannya. Sedangkan jumlah IKM lembutan berkemasan sama sekali belum ada yang bercukai, sehingga dilakukan pembinaan bagi produsen lembutan agar dapat dikemas dengan bagus dan mempunyai cukai.

Tabel 2.293
Persentase Pembinaan Industri Penghasil Cukai
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah IKM Tembakau yang Dibina	-	-	-	-	75
2	Jumlah IKM Tembakau	-	-	-	-	3.580
3	Persentase	-	-	-	-	2,09

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2021

Data jumlah IKM tembakau berjumlah 3.580, dan IKM tembakau yang dibina 75, sehingga prosentase 2,09%. Indikator ini adalah indikator baru, sehingga data series sebelumnya belum ada.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

1) Persentase Calon Transmigran yang Mendapatkan Pembekalan

Pembekalan berupa sosialisasi dan penjelasan tentang hak dan kewajiban di daerah penempatan dan dapat berupa pelatihan keterampilan untuk usaha di daerah penempatan.

Pembekalan selalu dilakukan terhadap calon transmigran, baik oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung maupun pembekalan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.294
Persentase Calon Transmigran yang Mendapatkan Pembekalan
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah calon transmigran yang mendapat pembekalan	5	4	5	0	0
2	Jumlah calon transmigran	5	4	5	0	0
3	Persentase	100	100	100	0	0

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2021

Untuk Tahun 2020 kegiatan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Pandemi Covid-19, dan untuk Tahun 2021 kepastian kuota transmigran juga belum ada, sehingga anggaran dialihkan untuk kegiatan lainnya.

2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Fungsi Sekretariat Daerah

- 1) Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Nilai EKPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.295
Nilai EKPPD Tahun 2017-2021

No	Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai	3,052	3,3453	3,3453	3,3453	3,3453
2	Kategori	ST	ST	ST	ST	ST
3	Kepmendagri	118-8840 Tahun 2018	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan
4	Tingkat	Nasional	Nasional	Nasional	Nasional	Nasional

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Temanggung, 2021

Berdasarkan tabel di atas, Nilai EKPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 berada pada posisi nilai diatas 3 dengan kategori Sangat Tinggi (ST), hal ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Temanggung berkinerja tinggi berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

- 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB atas capaian kinerja instansi pemerintah yang akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan

kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya. SAKIP diimplementasikan secara Self Assesment oleh masing-masing instansi pemerintah daerah. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Kabupaten Temanggung melakukan tahapan dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian hingga menyampaikan pelaporan akuntabilitas kerjanya kepada Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan Peraturan Kementrian PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa, rumus penghitungan dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah penggabungan nilai dari 5 indikator yaitu perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), capaian kinerja (20%).

Nilai AKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2017 sampai 2021 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.296
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2017-2021

No.	TAHUN	NILAI	KATEGORI
1	2017	58,32	CC
2	2018	59,05	CC
3	2019	60,16	B
4	2020	62,11	B
5	2021	63,84	B

Sumber: Bagian Ortala Setda Kabupaten Temanggung, 2021

Berdasarkan tabel di atas, Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Temanggung Tahun 2017 sampai Tahun 2021 cenderung meningkat dari 58,32 menjadi 63,84 dengan kategori meningkat dari C menjadi B.

3) Indeks Reformasi Birokrasi

Data penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.297
Penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung
Tahun 2017-2021

No.	TAHUN	NILAI
1	2017	58,45
2	2018	61,28
3	2019	62,76
4	2020	62,70
5	2021	63,42

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Temanggung, 2021

Selain penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan secara mandiri juga telah dilakukan penilaian dari Kementerian PAN dan RB di tahun 2021 dengan hasil Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah **63,42** dengan kategori "B" terinci sebagai berikut.

Tabel 2.298
Penilaian Reformasi Birokrasi Kab. Temanggung
Tahun 2020-2021 dari Kementerian PAN dan RB

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2020	2021
A	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	12,62	12,72
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,13	5,49
	III. Reform	30,00	13,26	13,61
	Total Komponen Pengungkit	60,00	31,00	31,82
B	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,21	7,35
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,48	8,21
3.	Pemerintahan yang Bersih dan bebas KKN	10,00	9,03	8,59
4.	Kinerja Organisasi	10,00	6,98	7,45
	Total Komponen Hasil	40,00	31,69	31,60
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit+Hasil)	100,00	62,70	63,42

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Temanggung, 2021

4) Kompetensi Penyelenggara Pelayanan Publik

Untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung, Bagian Organisasi Setda setiap tahun telah melaksanakan survey indeks kepuasan masyarakat di seluruh Perangkat Daerah yang memiliki layanan langsung kepada masyarakat sebagai berikut.

Tabel 2.299
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017-2021

No.	TAHUN	NILAI
1	2017	82
2	2018	75,38
3	2019	79,95
4	2020	80,41
5	2021	82,06

Sumber : Bagian Ortala Setda Kabupaten Temanggung, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menyatakan bahwa kinerja unit pelayanan dapat dikategorikan “baik”, dengan nilai yang tiap tahun naik, menandakan bahwa unit pelayanan selalu melaksanakan rekomendasi dan perbaikan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2021, Kabupaten Temanggung telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri terhadap Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh 65 unit pelayanan, sebagaimana berikut:

Tabel 2.300
Nilai IKM Unit Pelayanan di Kabupaten Temanggung Tahun 2021

No.	Unit Pelayanan	Tahun 2021		Ket.
		IKM Unit Pelayanan	Mutu	
1	Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga	88,22	B (Baik)	
2	Dinas Kesehatan	85,01	B (Baik)	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81,23	B (Baik)	
4	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	79,02	B (Baik)	
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	83,62	B (Baik)	
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	79,75	B (Baik)	
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84,12	B (Baik)	
8	Dinas Sosial	81,90	B (Baik)	
9	Dinas Perhubungan	79,03	B (Baik)	
10	Dinas Perumahan Rakyat, Kawassan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	71,71	C (Kurang Baik)	
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	78,24	B (Baik)	
12	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	85,50	B (Baik)	
13	Dinas Penanaman Modal	85,83	B (Baik)	
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian	79,03	B (Baik)	Baru pertama melaksanakan

No.	Unit Pelayanan	Tahun 2021		Ket.
		IKM Unit Pelayanan	Mutu	
	Penduduk, dan Keluarga Berencana			survei
15	RSUD	82,42	B (Baik)	
16	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	78,95	B (Baik)	Baru pertama melaksanakan survei
17	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	84,57	B (Baik)	
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	85,44	B (Baik)	
19	Bagian PBJ	81,00	B (Baik)	Baru pertama melaksanakan survei
20	Kecamatan Temanggung	85,20	B (Baik)	
21	Kecamatan Kranggan	83,07	B (Baik)	
22	Kecamatan Pringsurat	77,27	B (Baik)	
23	Kecamatan Kandangan	83,87	B (Baik)	
24	Kecamatan Kaloran	71,59	C (Kurang Baik)	
25	Kecamatan Kedu	88,39	A (Sangat Baik)	
26	Kecamatan Tlogomulyo	80,96	B (Baik)	
27	Kecamatan Tembarak	85,74	B (baik)	
28	Kecamatan Selopampang	80,70	B (Baik)	
29	Kecamatan Bulu	84,90	B (Baik)	
30	Kecamatan Parakan	81,024	B (Baik)	
31	Kecamatan Kledung	81,46	B (Baik)	
32	Kecamatan Bansari	79,67	B (Baik)	
33	Kecamatan Ngadirejo	88,41	A (Sangat Baik)	
34	Kecamatan Gemawang	82,32	B (Baik)	
35	Kecamatan Jumo	90,5	A (Sangat Baik)	
36	Kecamatan Candiroto	87,38	B (Baik)	
37	Kecamatan Bejen	84,08	B (Baik)	
38	Kecamatan Wonobojo	84,22	B (Baik)	
39	Kecamatan Tretep	83,99	B (Baik)	
40	Puskesmas Temanggung	83,55	B (Baik)	
41	Puskesmas Dharmarini	83,83	B (Baik)	
42	Puskesmas Kranggan	83,27	B (Baik)	
43	Puskesmas Pare	77,89	B (Baik)	
44	Puskesmas Pringsurat	81,40	B (Baik)	
45	Puskesmas Rejosari	78,95	B (Baik)	
46	Puskesmas Kaloran	79,30	B (Baik)	
47	Puskesmas Tepusen	82,01	B (Baik)	
48	Puskesmas Kandangan	82,41	B (Baik)	
49	Puskesmas Jumo	88,68	B (Baik)	
50	Puskesmas Gemawang	80,00	B (Baik)	
51	Puskesmas Kedu	77,75	B (Baik)	
52	Puskesmas Tlogomulyo	81,35	B (Baik)	
53	Puskesmas Tembarak	84,31	B (Baik)	
54	Puskesmas Selopampang	76,74	B (Baik)	
55	Puskesmas Bulu	89,09	B (Baik)	
56	Puskesmas Parakan	84,024	B (Baik)	
57	Puskesmas Traji	80,19	B (Baik)	
58	Puskesmas Kledung	80,10	B (Baik)	
59	Puskesmas Bansari	80,93	B (Baik)	
60	Puskesmas Ngadirejo	81,81	B (Baik)	
61	Puskesmas Banjarsari	82,21	B (Baik)	
62	Puskesmas Candiroto	84,92	B (Baik)	
63	Puskesmas Bejen	85,03	B (Baik)	

No.	Unit Pelayanan	Tahun 2021		Ket.
		IKM Unit Pelayanan	Mutu	
64	Puskesmas Wonobojo	81,83	B (Baik)	
65	Puskesmas Tretep	81,00	B (Baik)	
Nilai Rata-rata IKM Tahun 2021		82,06	B (Baik)	

Sumber: Bag. Organisasi, Setda Kabupaten Temanggung, 2021

2. Fungsi Sekretariat DPRD

1) Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dengan persetujuan bersama Bupati. Realisasi persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu di Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2.301
Persentase RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu
Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah PERDA yang ditetapkan	18	15	19	19	16
2.	Jumlah RAPERDA yang diajukan	18	16	26	21	20
	% RAPERDA yang disahkan tepat waktu	100	93,75	73,08	90,48	80,00

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, 2021

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu fluktuatif. Pada tahun 2021 jumlah PERDA yang ditetapkan sebanyak 16 RAPERDA dari yang diajukan sebanyak 20 PERDA, sehingga masih terdapat 4 RAPERDA yang belum dibahas.

2.1.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

1) Tingkat Konsistensi Program Pembangunan

Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 membagi ruang lingkup perencanaan secara sistematis dan terintegrasi. Setiap tahun pemerintah daerah menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai bentuk dokumen

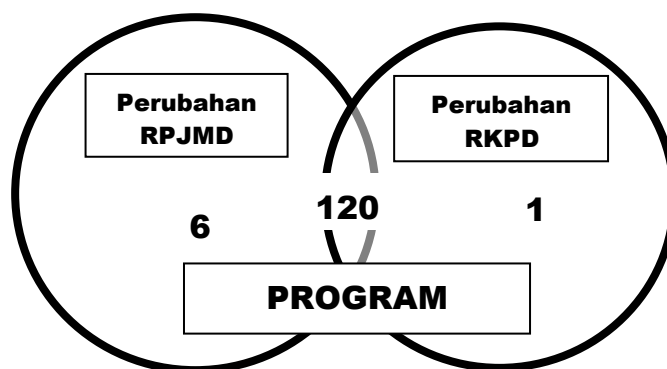
perencanaan jangka pendek. RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 tahun yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan program tahunan yang ada di dalam RPJMD

Tabel 2.302
Tingkat Konsistensi Program Pembangunan
di Kabupaten Temanggung Tahun 2017- 2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Program Pembangunan dalam RKPD sesuai dengan RPJMD	n.a	127	121	124	120
2.	Jumlah Program Pembangunan dalam RPJMD	n.a	146	125	125	126
3.	Persentase (%)	100	86,9	96,8	99,2	95,2

Sumber : RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2017 – 2021

Kesesuaian program RPJMD dan RKPD dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.54
Irisan Kesesuaian Jumlah Program RPJMD Tahun 2018-2023
dengan Program RKPD Tahun 2021

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa jumlah program dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023 yang sesuai dengan RKPD Tahun 2019 sebanyak 120 program.

Tabel 2.303
Program Pada RPJMD yang Tidak Dilaksanakan di RKPD

No.	Program pada RPJMD tidak dilaksanakan di RKPD	PD Pengampu
1	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	DPRKPLH
2	Program penanganan kerawanan pangan	DKPPP
3	Program pengembangan kawasan transmigrasi	DINPERINAKER

No.	Program pada RPJMD tidak dilaksanakan di RKPD	PD Pengampu
4	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	DINKOPDAG
5	Program pengembangan UMKM	
6	Program pembinaan sejarah	DINBUDPAR

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2021 (data diolah)

Dari 6 program RPJMD yang tidak dilaksanakan di RKPD, karena keterbatasan keuangan pemerintah daerah untuk membiayai program tersebut. Pada tahun 2021 adanya pandemi covid-19 menyebabkan sebagian besar anggaran digunakan untuk menangani dampak pandemi sehingga banyak kegiatan yang di *refocusing*.

Tabel 2.304
Program Pada RKPD Diluar RPJMD

No.	Program pada RKPD diluar RPJMD	PD Pengampu
1	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	DPRKPLH

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2021 (data diolah)

2. Keuangan

1) Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari hasil audit BPK RI atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Terdapat 4 jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK-RI, yakni opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*).

Adapun Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 Tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.305
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Opini LKPD (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPPKAD Kabupaten Temanggung, 2021



Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir (Tahun 2017 sampai 2021) memperoleh opini WTP yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan maka skor tertinggi dengan bobot 15. Data dukung Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan piagam penghargaan dari Menteri Keuangan RI.

2) Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan

Persentase dari realisasi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah Tahun Anggaran 2017-2021 di Kabupaten Temanggung pada tabel berikut ini.

Tabel 2.306

Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Total Pendapatan Daerah	Persentase
2017	308.466.748.340	1.779.850.394.321	17,33
2018	252.019.934.778	1.731.235.867.161	14,56
2019	278.306.408.650	1.840.953.306.303	15,12
2020	307.456.823.576	1.830.815.032.558	16,79
2021	364.099.510.273	1.950.257.238.731	18,67

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung, 2021

Pendapatan asli daerah tahun 2021 tercapai sebesar 18,67% dari realisasi pendapatan daerah, persentase triwulan IV 2021 ini meningkat ketika dibandingkan dengan capaian persentase tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas tren penurunan pendapatan asli daerah secara signifikan terjadi pada tahun 2018 dimana terjadi peralihan hak atas pengelolaan pajak air tanah, dimana kewenangan pemungutan pajak jenis tersebut diambil alih oleh provinsi, sehingga menurunkan penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun tersebut, pada tahun 2019 persentase meningkat dari pada tahun 2018 sebesar 3%, pada tahun 2020 persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah mengalami peningkatan

dibandingkan dengan tahun 2019 tetapi capaian realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp10.163.398.745 dari tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2021 capaian realisasi pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah telah mencapai 18,67%.

3) Ketepatan Waktu dalam Pengesahan APBD

Dalam kurun waktu 5 tahun penetapan dan pengesahan APBD Kabupaten Temanggung selalu tepat waktu, dan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.307
Tanggal dan Nomor Peraturan Daerah tentang Penetapan APBD Kabupaten Temanggung

Tahun Anggaran	Tanggal Perda	Nomor Perda
2017	28 Desember 2016	11 Tahun 2016
2018	27 Desember 2017	22 Tahun 2017
2019	28 Desember 2018	12 Tahun 2018
2020	16 Desember 2019	14 Tahun 2019
2021	28 Desember 2020	25 Tahun 2020
2022	28 Desember 2021	11 Tahun 2021

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022

3. Kepegawaian

1) Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.308
Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No.	Dimensi Pengukuran	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kualifikasi	n.a	9	10,34	10,82	11,907
2.	Kompetensi	n.a	7	11,48	9,15	9,343
3.	Kinerja	n.a	25	25,07	25,09	25
4.	Disiplin	n.a	5	4,95	4,97	4,997
TOTAL			46	51,74	50,03	51,247

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2018. Penghitungan mandiri BKPSDM, 2019, 2020

Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa meskipun masih tetap berada dalam kategori sangat rendah namun terjadi peningkatan angka IP ASN. Untuk mengetahui penyebab masih rendahnya angka IP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung di tahun 2019, perlu dilihat pencapaian skor masing-masing dimensi IP ASN sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.309
Pencapaian skor dimensi IP ASN Tahun 2020 dibandingkan dengan prosentase pengukuran

Dimensi IP	Bobot	Skor riil	Capaian (dengan pembulatan)
Kualifikasi	25% (0,25)	11,816	48%
Kompetensi	40% (0,40)	9,157	23%
Kinerja	30% (0,30)	25,089	83%
Disiplin	5% (0,05)	4,967	99%

Sumber: BKPSDM Kabupaten Temanggung, 2019

Pencapaian dimensi IP ASN diatas, terlihat bahwa pencapaian skor paling rendah terlihat pada dimensi kompetensi yaitu sebesar 23%, padahal bobot dimensi kompetensi menyumbang nilai paling besar terhadap pengukuran IP ASN yaitu sebesar 40%. Skor dimensi kompetensi diperoleh melalui pendataan terhadap riwayat keikutsertaan PNS dalam kegiatan diklat atau bimbingan teknis minimal 20 JP selama 1 tahun terakhir dan seminar selama 2 tahun terakhir yang relevan dengan tugas dan jabatannya. Adanya Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap pengurangan anggaran pengembangan kompetensi. hal ini akan berpengaruh terhadap capaian IP ASN di tahun tahun mendatang.

Meskipun capaian IP ASN tahun 2021 meningkat dari tahun 2020 dan telah mencapai dari target yang direncanakan, akan tetapi masih tergolong dalam kategori sangat rendah.

2) Indeks Sistem Merit

Penilaian sistem merit dilakukan dengan sistem penilaian mandiri, yaitu setiap instansi melaporkan hasil penilaian mandiri beserta data dukung kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) secara online melalui aplikasi sipinter yang dilakukan setiap tahun di akhir tahun. Hasil indeks sistem merit akan dijadikan dasar rekomendasi dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut implementasi sistem merit. Pengukuran indeks sistem merit dinilai berdasarkan/mencakup 8 aspek yang terdiri atas 47 sub aspek, dengan cara mengalikan bobot masing-masing sub aspek dengan skor. Bobot masing-masing sub aspek telah ditetapkan oleh KASN. Skor juga ditetapkan oleh KASN berdasarkan kondisi riil sub aspek pada tiap-tiap instansi. Hasil Pengukuran mandiri penilaian Sistem Merit yang telah mendapatkan verifikasi dari KASN dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2.310
Indeks Sistem Merit Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Penilaian Sistem Merit	n.a	n.a	n.a	218	113
2.	Indeks Sistem Merit	n.a	n.a	n.a	0,52	0,259

*Sumber : Download Aplikasi sipinter
=Penilaian mandiri

Penilaian/skore indeks merit system pada tahun 2021 sangat jauh menurun capaian skorenya dibandingkan capaian tahun 2020. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 penilaian merit system dilakukan secara mandiri lewat aplikasi sipinter, namun penilaian mandiri yang kita laksanakan belum mendapatkan verifikasi dari KASN.

Capaian aspek-aspek dalam penilaian mandiri tahun 2020, oleh KASN dilakukan verifikasi untuk penilaian capaian indeks merit system di tahun 2021, adapun tambahan kinerja setiap aspek penilaian merit system yang telah dilakukan di tahun 2021 belum dapat ditambahkan untuk penambahan skore merit

system tahun 2021 karena dokumen pendukung/pelaksanaan kegiatannya baru dilaksanakan pada akhir tahun 2021.

4. Pendidikan dan Pelatihan

- 1) Persentase Pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memenuhi kompetensi diklat kepemimpinan.

Tabel 2.311
Persentase Pejabat yang Telah Lulus Diklat Kepemimpinan
sesuai Jenjang Jabatan

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pejabat yang telah lulus diklat PIM	380	253	240	169	157
2	Jumlah pejabat	784	710	633	624	626
3	Persentase pejabat yang memenuhi kompetensi diklat PIM (%)	48,47	35,63	37,91	27,08	25,08

Sumber: BKPSDM Kabupaten Temanggung (data diolah, Tahun 2021)

Pencapaian target indikator ini dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuatif baik dari jumlah pejabat maupun dari jumlah pejabat yang mengikuti diklat. Jumlah pejabat mengalami perubahan naik atau turun setiap tahun dikarenakan antara lain adanya perubahan SOTK, adanya mutasi dan pensiun pejabat serta kebijakan pengisian jabatan yang kosong. Sementara itu, untuk jumlah pejabat yang telah mengikuti diklat kepemimpinan mengalami penurunan di tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Hal ini antara lain disebabkan pertama, ketersediaan anggaran yang berbeda dan fluktuatif dari tahun ke tahun, serta karena adanya proses manajemen kepegawaian yaitu adanya pejabat yang pensiun, promosi maupun mutasi, promosi jabatan berdampak pada pengurangan jumlah pejabat yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan (Pejabat yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan pada eselon sebelumnya tidak ikut dihitung lagi jika yang bersangkutan promosi ke eselon yang lebih tinggi) dan penambahan jumlah pejabat yang belum mengikuti diklat kepemimpinan (pejabat baru yang promosi ke eselon lebih tinggi).

- 2) Persentase ASN yang memiliki kompetensi diklat teknis dan fungsional

Pada tahun 2021 pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri dilaksanakan secara kolaborasi antar perangkat daerah (Bintek Smart City).

Tabel 2.312
Persentase Pejabat yang Telah Lulus Diklat Kepemimpinan
sesuai Jenjang Jabatan

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PNS yang ikut diklat teknis/fungsional	446	678	325	462	861
2	Jumlah PNS	7.213	6.778	6.670	6.280	5.910
3	Persentase PNS yang ikut diklat teknis/fungsional	6,18	10,00	4,87	7,36	14,57

Sumber: BKPSDM Kabupaten Temanggung (data diolah, Tahun 2021)

Persentase PNS yang mengikuti diklat teknis/fungsional dari tahun 2017-2021 cenderung meningkat, meskipun angka tersebut tergolong rendah (kurang dari 20%), karena data tersebut berasal dari diklat yang menggunakan anggaran yang dikelola oleh BKPSDM. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan relatif meningkatnya anggaran untuk pengembangan kompetensi mulai tahun 2017, meskipun masih fluktuatif tiap tahun, yang direalisasikan dengan mengadakan kegiatan bimbingan teknis secara mandiri selain tetap mengirimkan peserta pengembangan kompetensi ke badan pelaksana diklat terakreditasi

5. Penelitian dan Pengembangan

- 1) Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah pada Pasal 35 menyebutkan bahwa Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan berwenang dan bertanggung jawab atas kelitbangan pemerintahan dalam negeri di kabupaten/kota, sehingga Bappeda juga harus memastikan bahwa setiap perumusan kebijakan dan regulasi

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung harus memanfaatkan hasil-hasil kelitbangan.

Dalam hubungannya dengan perencanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Temanggung yang berbasis kelitbangan sesuai Perbub yang telah disebutkan sebelumnya, maka beberapa fungsi utama Bidang Litbang antara lain pelaksanaan pengkajian, pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di kabupaten serta penyusunan kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten. Oleh sebab itu salah satu indikator kinerja sasaran yang dibebankan kepada bidang litbang adalah prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan.

Tabel 2.313
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan di Kabupaten Temanggung
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pemanfaatan hasil kelitbangan	10	3	19	3	6
2	Jumlah hasil kelitbangan	10	3	10	3	6
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, 2021

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan tahun 20 sebesar 100%. Hal ini berarti Bappeda sebagai unsur penunjang perencanaan dan kelitbangan daerah mampu mengarahkan stakeholder untuk berkomitmen dalam melakukan pembangunan daerah dengan berdasar hasil penelitian dan pengembangan yang telah ada.

2) Persentase hasil Krenova yang dikembangkan

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menumbuhkembangkan inovasi, memberikan stimulasi dan fasilitasi, menciptakan iklim kondusif di wilayahnya serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

inovasi daerah oleh Kabupaten/Kota. Upaya menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi telah dilakukan melalui penyelenggaraan Lomba Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA) Tingkat Kabupaten Temanggung yang diselenggarakan secara rutin sejak tahun 2012. Selanjutnya upaya dan langkah-langkah pengembangan dan stimulasi kepada para inventor/inovator dilaksanakan melalui : (a) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual; (b) Diseminasi dan pengenalan hasil-hasil invensi/inovasi kepada masyarakat luas agar bermanfaat dalam bentuk penyertaan Pameran; (c) Pelatihan hilirisasi teknologi / inkubator bisnis; (d) Mendorong inventor/inovator menjadi wirausaha-wirausaha baru berbasis teknologi dalam wadah Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) dari Kemenristekdikti.

Tabel 2.314
Persentase Hasil Krenova Yang Dikembangkan di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Hasil Krenova yang dikembangkan	7	12	4	5	10
2	Hasil Krenova terjaring	17	21	6	5	10
3	Persentase	41,17	57,14	66,67	100	100

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, 2021

Lomba Kreatifitas dan Inovasi (Krenova) Masyarakat di Kabupaten Temanggung merupakan kegiatan rutin yang telah dilaksanakan sejak tahun 2012 sebagai bentuk apresiasi kepada para mitra dan inovator yang secara nyata mendukung dalam memajukan produk inovasi untuk masyarakat luas. Jumlah peserta cenderung naik setiap tahun, berkat berbagai upaya sosialisasi dan publikasi ke berbagai sekolah, media elektronik, sosial media maupun lewat koordinasi dengan para P3MD (pendamping desa) sebagai pihak yang diharapkan dapat menjaring karya-karya inovasi di tingkat desa. Selanjutnya para pemenang KRENOVA dikirim ke lomba Krenova tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Temanggung beberapa kali meraih penghargaan sebagai pemenang, diantaranya tahun 2012 Mesin

Rajang Two In One, Tahun 2016 Guava Leaf Antiseptic dan Tahun 2018 Mesin Sangan Kopi. Dari tingkat Propinsi inovasi Antiseptic Guava Leaf dan Mesin Sangan Kopi mendapatkan hibah pendanaan dari Kemenristekdikti melalui program Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT). Di tahun 2021 Kabupaten Temanggung mengirimkan 10 inovator untuk mengikuti lomba Krenova dan Penova (Penjaringan Inovasi) tingkat Propinsi Jawa Tengah. Inovasi Pewarna Alam Shibiru menjadi Juara Dua lomba Krenova Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

2.1.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Fungsi Inspektorat Daerah

1) Indeks Persepsi Anti Korupsi

Tabel 2.315
Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Temanggung
Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,34	3,38	3,92	3,92	3,61

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung, 2021

Dari hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2021 Nilai IPAK Kabupaten Temanggung mendapatkan Nilai 3,61 diatas nilai rata rata nasional yaitu 3,50. Nilai IPAK Tahun 2021 turun 0,31 dari indeks 3,92 di Tahun 2020. Hasil survey persepsi korupsi tahun 2021 merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan, menunjukkan hasil 3.61 dari skala 4, sedikit diatas rata-rata nasional. Apabila dibandingkan dengan hasil survei pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,92, maka terdapat penurunan yang cukup signifikan persepsi stakeholders terhadap pembangunan anti korupsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap integritas aparatur pembeli layanan masih perlu ditingkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin berperilaku anti korupsi.

2) Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tabel 2.316
Level Penilaian SPIP Kabupaten Temanggung
Tahun 2017-2020

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Level SPIP	2,28	3,045	3,045	3,045	3,045

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung, 2021

Level SPIP Kabupaten Temanggung yang mengalami kecenderungan positif meningkat nilainya. Angka tersebut merupakan hasil assessment oleh Badan Pengawasan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan pengendalian intern dan perlu untuk terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Adapun kenaikan nilai dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.317
Table Hasil Penilaian Maturitas SPIP Kabupaten Temanggung

No.	Fokus Penilaian	Bobot (%)	2021
			Nilai
I.	Unsur Lingkungan Pengendalian		
1	Penegakan Integritas dan Penegakan Etika	3,75	0,113
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	3,75	0,038
3	Kepemimpinan yang Kondusif	3,75	0,15
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	3,75	0,15
5	Delegasi Wewenang dan Tanggung Jawab	3,75	0,113
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3,75	0,113
7	Peran APIP Terhadap Efektivitas SPIP	3,75	0,113
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3,75	0,113
II.	Penilaian Risiko		
1	Identifikasi Risiko	10	0,3
2	Analisis Risiko	10	0,3
III.	Unsur Kegiatan Pengendalian		
1	Reviu Kinerja	2,27	0,091
2	Pembinaan SDM	2,27	0,068
3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	2,27	0,068
4	Pengendalian Fisik atas Aset	2,27	0,091
5	Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja	2,27	0,068
6	Pemisahan Fungsi	2,27	0,068
7	Otorisasi Transaksi	2,27	0,068
8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	2,27	0,068
9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	2,27	0,068
10	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	2,27	0,068
11	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting	2,27	0,068
IV.	Unsur Informasi dan Komunikasi		
1	Informasi yang Relevan	5	0,15

No.	Fokus Penilaian	Bobot (%)	2021
			Nilai
2	Komunikasi yang Efektif	5	0,15
V.	Unsur Pemantauan		
1	Pemantauan Berkelanjutan	7,5	0,225
2	Evaluasi Terpisah	7,5	0,225
Jumlah Skor		100	3,045

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung, 2021

2.1.3.7 Unsur Kewilayahan

1. Fungsi Kecamatan

1) Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan

Tabel 2.318
Capaian Rata-Rata IKM di Kecamatan Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Temanggung	76,51	81,08	81,68	82,58	85,20
2	Tembarak	n.a	n.a	84,33	84,83	85,75
3	Pringsurat	n.a	n.a	76,67	76,67	77,27
4	Kaloran	n.a	n.a	n.a	84,00	84,00
5	Parakan	n.a	n.a	71,83	85,97	85,97
6	Bulu	n.a	n.a	82,90	82,53	84,90
7	Kedu	75	80	81	83	83
8	Kandangan	n.a	n.a	n.a	85,97	85,97
9	Candiroto	n.a	n.a	71,83	81,25	87,38
10	Ngadirejo	n.a	n.a	81,08	81,08	88,40
11	Jumo	n.a	n.a	81,08	90,52	90,52
12	Wonoboyo	n.a	n.a	84,00	84,19	84,22
13	Kranggan	n.a	n.a	71,83	71,83	83,07
14	Bejen	n.a	n.a	71,83	78,19	84,08
15	Kledung	n.a	n.a	n.a	79,95	81,50
16	Bansari	n.a	n.a	n.a	82,95	79,91
17	Tlogomulyo	n.a	n.a	79,53	83,06	83,06
18	Selopampang	n.a	n.a	75,00	82,41	80,71
19	Gemawang	n.a	n.a	n.a	81,50	82,33
20	Tretep	n.a	n.a	71,83	83,47	83,47

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

2) Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan

Tabel 2.319
Capaian Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Temanggung	95,43	98,14	99,98	84,51	99,91
2	Tembarak	92,81	96,63	98,34	99,34	99,56
3	Pringsurat	97,00	96,00	97,24	95,63	99,72
4	Kaloran	99,13	95,21	95,04	99,36	99,38
5	Parakan	93,94	98,75	97,42	99,81	99,76
6	Bulu	97,15	97,09	99,65	96,29	99,86
7	Kedu	95,72	94,83	94,28	99,41	99,68
8	Kandangan	96,25	96,16	96,73	95,31	99,76
9	Candiroto	98,23	97,82	97,39	96,66	99,79
10	Ngadirejo	99,9	99,8	87,48	97,50	99,76
11	Jumo	94	96	99,40	99,39	99,62
12	Wonoboyo	92,42	96,56	95,84	99,24	99,57
13	Kranggan	94	96,5	100	99,52	99,70
14	Bejen	91,8	90,6	89,9	99,38	99,48



No	Kecamatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
15	Kledung	98	97	97	96	99,10
16	Bansari	94,40	97,83	97,83	99,70	99,78
17	Tlogomulyo	97,50	97,08	98,85	96,01	99,62
18	Selopampang	96,3	95,8	96,8	96,28	99,61
19	Gemawang	92,73	96,71	98,39	99,21	99,60
20	Tretep	71,35	72,76	74,64	76,04	76,38

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

3) Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Tabel 2.320
Capaian Persentase Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Temanggung	93,95	94,44	93,22	93,89	93,44
2	Tembarak	100	100	100	100	100
3	Pringsurat	98,11	95,55	99,24	96,98	99,67
4	Kaloran	100	100	100	100	96,68
5	Parakan	97,95	98,06	97,73	91,49	97,89
6	Bulu	100	100	100	100	100
7	Kedu	98,83	97,57	97,32	100	100
8	Kandangan	100	100	100	100	99,10
9	Candiroto	100	100	100	100	100
10	Ngadirejo	100	100	100	97,69	100
11	Jumo	100	100	100	100	100
12	Wonoboyo	100	100	100	100	100
13	Kranggan	95,95	90,04	97,63	95,63	96,93
14	Bejen	100	100	100	100	100
15	Kledung	100	100	100	100	100
16	Bansari	100	100	100	100	100
17	Tlogomulyo	100	100	100	100	100
18	Selopampang	100	100	100	100	100
19	Gemawang	100	100	100	100	100
20	Tretep	100	100	100	100	100

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

4) Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Tabel 2.321
Capaian Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Temanggung	0	0	100	66,67	100
2	Tembarak	100	100	100	100	84,62
3	Pringsurat	0	7,14	7,14	100	100
4	Kaloran	100	100	100	100	100
5	Parakan	100	100	100	100	100
6	Bulu	6,00	0	84,00	100	100
7	Kedu	78,5	100	0	100	100
8	Kandangan	0	0	12,5	100	100
9	Candiroto	93,00	86,00	100	71,43	100
10	Ngadirejo	100	100	100	100	100
11	Jumo	100	100	100	100	100
12	Wonoboyo	100	100	92,30	100	100
13	Kranggan	75	83,3	33,33	91,66	100
14	Bejen	100	100	100	100	100



No	Kecamatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
15	Kledung	100	100	100	92,31	92,31
16	Bansari	77,00	85,00	100	92,31	100
17	Tlogomulyo	100	100	100	75,00	92,00
18	Selopampang	100	100	16,67	83,33	83,33
19	Gemawang	100	100	100	100	100
20	Tretep	100	100	100	100	100

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

5) Persentase Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Kondisi Layak

Tabel 2.322

Capaian Sarpras Lokal Kelurahan Kondisi Layak Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Temanggung	71,58	72,63	73,42	62,82	68,69
2	Parakan	n.a	n.a	86,30	90,79	90,79
3	Ngadirejo	100	100	100	100	100
4	Kranggan	100	100	100	100	85,71

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

6) Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Aktif

Tabel 2.323

Capaian Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Aktif Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Temanggung	100	100	100	100	93,37
2	Parakan	99,26	99,26	99,26	98,73	98,73
3	Ngadirejo	100	100	100	100	100
4	Kranggan	100	100	100	100	100

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

7) Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Tabel 2.324

Capaian Penanganan Laporan Kejadian Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Temanggung	100	100	100	100	95,24
2	Tembarak	n.a	n.a	100	100	100
3	Pringsurat	100	100	100	100	100
4	Kaloran	100	100	100	100	100
5	Parakan	n.a	n.a	100	100	100
6	Bulu	100	100	100	100	100
7	Kedu	100	100	100	100	100
8	Kandangan	0	0	0	100	100
9	Candiroto	100	100	100	100	100
10	Ngadirejo	100	100	n.a	100	100
11	Jumo	0	0	100	0	100
12	Wonoboyo	100	100	90,90	100	100
13	Kranggan	100	100	100	100	100
14	Bejen	100	100	100	100	100
15	Kledung	n.a	n.a	100	100	100
16	Bansari	100	100	100	100	100
17	Tlogomulyo	100	100	n.a	100	100
18	Selopampang	100	100	100	100	0
19	Gemawang	n.a	100	100	100	100
20	Tretep	50,00	51,1	100	100	100

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah



8) Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik

Tabel 2.325
Capaian Penanganan Laporan Kejadian Tahun 2017-2021

/7	Kecamatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Temanggung	n.a	n.a	94,33	95,02	90,32
2	Tembarak	n.a	n.a	74,42	74,42	86,90
3	Pringsurat	96,68	97,78	97,14	96,85	96,85
4	Kaloran	100	100	100	96,50	96,50
5	Parakan	80	80	94,24	97,41	100
6	Bulu	98,47	97,70	90,77	85,44	85,44
7	Kedu	92,5	92,05	92,05	92,79	91,94
8	Kandangan	73,4	75,00	95,86	89,47	87,34
9	Candiroto	100	100	97,69	97,69	87,71
10	Ngadirejo	97,35	97,80	98,86	98,70	98,73
11	Jumo	93,7	93,7	93,7	98,03	98,03
12	Wonoboyo	n.a	100	98,55	99,28	100
13	Kranggan	100	100	100	100	100
14	Bejen	88	88	87	86,24	100
15	Kledung	100	100	100	100	100
16	Bansari	83	83	83	83	100
17	Tlogomulyo	100	100	90,90	94,36	94,36
18	Selopampang	74,44	69,89	71,5	80,68	80,68
19	Gemawang	83,42	83,60	84,15	84,15	100
20	Tretep	n.a	100	100	92,46	92,47

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

9) Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa/Kelurahan

Tabel 2.326
Capaian Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa/Kelurahan Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Temanggung	0	0	0	0	0
2	Tembarak	0,63	0,63	0,63	0,63	0,64
3	Pringsurat	0	0	0	0	0
4	Kaloran	0	0	0	0	0
5	Parakan	0	0	0	0	0
6	Bulu	0,4	0,0	0	0,4	0
7	Kedu	0	0	0	0	0
8	Kandangan	0	0,89	0	0,4	0
9	Candiroto	0	0	0	0	0
10	Ngadirejo	0	0,4	0	0	0
11	Jumo	0	0	0	1,29	0
12	Wonoboyo	n.a	0	0,76	0	0,68
13	Kranggan	1,37	1,34	0	0	0,51
14	Bejen	0,77	2,22	0,65	0,65	0
15	Kledung	0	0	0	0	0
16	Bansari	0,75	0,75	0	2,92	0
17	Tlogomulyo	0,85	1,42	100	100	100
18	Selopampang	0	0	0	0	0
19	Gemawang	1,39	0	0	0	0
20	Tretep	0	0	0	0	0

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

10) Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APBDesa Tepat Waktu

Tabel 2.327
Capaian Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APBDesa Tepat waktu Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Temanggung	0	0	100	100	100
2	Tembarak	100	100	100	100	100
3	Pringsurat	0	7,14	100	100	100
4	Kaloran	100	100	100	100	100
5	Parakan	100	100	100	100	100
6	Bulu	52,64	89,49	0	100	100
7	Kedu	71,4	92,8	50	100	100
8	Kandangan	0	0	100	100	100
9	Candiroto	86,00	86,00	100	100	100
10	Ngadirejo	100	100	100	100	100
11	Jumo	100	100	100	100	100
12	Wonoboyo	100	100	100	100	100
13	Kranggan	83,3	91,6	100	100	100
14	Bejen	100	100	100	100	100
15	Kledung	100	100	100	100	100
16	Bansari	85,00	90,00	100	100	100
17	Tlogomulyo	100	100	91,6	100	100
18	Selopampang	100	100	100	100	100
19	Gemawang	100	100	100	100	100
20	Tretep	100	100	100	100	100

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

2.1.3.8 Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

1) Persentase Sekolah yang Mendapatkan Pemahaman Kebangsaan

Tabel 2.328
Capaian Persentase Sekolah yang Mendapatkan Pemahaman Kebangsaan Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah sekolah yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	n.a	n.a	0	0	0
2	Jumlah keseluruhan sekolah yang ada	n.a	n.a	80	80	80
3	Prosentase sekolah yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	n.a	n.a	0	0	0

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Temanggung, 2021

Pada tahun 2019 tidak dilaksanakan sosialisasi pemahaman kebangsaan di tingkat sekolah karena minimnya anggaran dan dialihkan ke sosialisasi pemahaman kebangsaan di desa. Pada tahun 2020 juga tidak dilaksanakan karena anggaran di refocusing. Pada tahun 2021 sosialisasi wawasan kebangsaan

pada sekolah di Kabupaten Temanggung belum dilaksanakan, hal ini karena fokus pelaksanaan sosialisasi pada tahun 2019 s.d 2021 adalah di tingkat desa. Sedangkan sosialisasi di sekolah akan dilaksanakan pada tahun 2022.

- 2) Cakupan Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan

Tabel 2.329
Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa/Kel yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	21	23	3	0	14
2	Jumlah keseluruhan Desa/Kel yang ada	289	289	289	289	289
3	Prosentase Desa/Kel yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	7,2	7,95	1,03	0	4,8

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Temanggung, 2021

Pada tahun 2019 ada 3 desa yang mendapat sosialisasi wawasan kebangsaan, sedangkan jumlah desa sebanyak 25 pada data pokok triwulan IV tahun 2019 adalah jumlah akumulasi desa yang mendapat sosialisasi wawasan kebangsaan dari tahun 2014. Di tahun 2020 tidak ada sosialisasi wawasan kebangsaan di desa/kelurahan karena anggaran di refocusing. Di tahun 2021 sampai dengan triwulan IV ada 14 desa yang mendapat sosialisasi wawasan kebangsaan. Saat ini, telah ada 17 desa dari total 289 desa/kelurahan yang mendapat sosialisasi wawasan kebangsaan.

- 3) Cakupan Terbentuknya FKUB di Kecamatan

Tabel 2.330
Persentase Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah FKUB di kecamatan	0	0	0	0	0
2	Jumlah kecamatan di kab. Temanggung	20	20	20	20	20
3	Persentase Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan (%)	0	0	0	0	0

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Temanggung, 2021

Pembentukan FKUB di tingkat Kecamatan sampai dengan tahun 2021 belum dapat terbentuk, dikarenakan belum adanya petunjuk/belum adanya regulasi yang menjadi rujukan untuk membentuk FKUB di tingkat Kecamatan, sehingga prosentase terbentuknya FKUB di tingkat Kecamatan 0%.

- 4) Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Pembinaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Tabel 2.331
Persentase Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan Pembinaan Pencegahan, Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	9	10	1	183	106
2	Jumlah keseluruhan Desa / Kelurahan yang ada	289	289	289	289	289
3	Prosentase Desa/Kel yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	1,03	0,34	0,35	63,32	36,68

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Temanggung, 2021

Pada tahun 2019, terdapat 1 desa yang mendapat sosialisasi P4GN karena digunakan penghitungan target tahunan bukan akumulasi. Di tahun 2020 sebanyak 183 desa di Kabupaten Temanggung mendapat sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Di tahun 2021 sampai dengan triwulan IV ada 106 desa yang mendapatkan sosialisasi pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Jumlah keseluruhan desa yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak tahun 2019 s.d 2021 adalah 289 desa dari total 289 desa/kelurahan.

- 5) Cakupan Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Pada tahun 2019, terdapat 0 sekolah yang mendapat sosialisasi P4GN karena pada tahun 2019 tidak ada sekolah yang mendapatkan sosialisasi P4GN dan digunakan penghitungan target tahunan bukan akumulasi. Sejak tahun 2019 sampai

dengan triwulan III tahun 2021 belum ada pelaksanaan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah karena fokus pelaksanaan baru di desa/kelurahan.

Tabel 2.332
Persentase jumlah sekolah yang telah Mendapatkan Pembinaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah sekolah yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	81	101	0	0	0
2	Jumlah sekolah yang ada	113	113	80	80	80
3	Prosentase sekolah yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	17	17	0	0	0

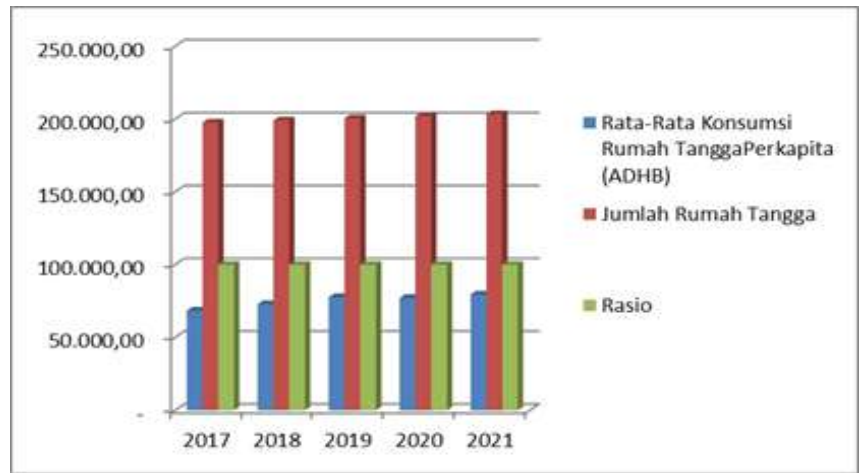
Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Temanggung, 2021

Dalam rangka persiapan Pemilu 2024, maka perlu penguatan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik melalui kerjasama lintas sektor diantaranya (a) Persiapan kegiatan identifikasi dan penguatan linmas hingga desa sehingga linmas siap untuk mensukseskan kerjasama tersebut (kolaborasi dengan Satpol PP dan Damkar); (b) Persiapan penyediaan sarana prasarana untuk bendera parpol dan fasilitasi sosialisasi terkait pemilu (oleh Kesbangpol); serta (c) Perekaman e-KTP bagi anak sekolah pada tahun 2024 sebagai syarat untuk pemilu melalui kerjasama Dindikcapil dan sekolah dengan cara jemput bola ke sekolah.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Rata-rata Per Kapita Tiap Bulan

Pengeluaran konsumsi rumah tangga rata-rata per kapita tiap bulan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi banyaknya jumlah anggota rumah tangga. Angka konsumsi rumah tangga rata-rata per kapita tiap bulan dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2021.

Gambar 2.55
Angka Konsumsi Rumah Tangga Rata-Rata Per Kapita Tiap Bulan Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Pengeluaran konsumsi rumah tangga rata-rata per kapita tiap bulan penduduk Kabupaten Temanggung tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya angka konsumsi rumah tangga rata-rata tiap bulan dari 0,35 di tahun 2017 menjadi 0,39 di tahun 2021.



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2020

Gambar 2.56
Persentase Konsumsi Rumah Tangga Bahan Makanan dan Non Bahan Makanan Rata-Rata Per Kapita Tiap Bulan Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Persentase konsumsi rumah tangga didominasi oleh konsumsi bukan makanan. Kelompok konsumsi bukan makanan sebagian besar untuk pengeluaran kelompok perumahan, bahan bakar, penerangan,

dan air. Sedangkan kelompok konsumsi bahan makanan lebih banyak pada kelompok makanan dan minuman jadi.

2.1.4.2 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Temanggung tahun 2021 sebesar 1,05 Km untuk setiap 1.000 kendaraan bermotor. Perkembangan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Temanggung tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.333
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Panjang jalan (Km)	650.467	650.467	650.467	650.467	650.467
Jumlah kendaraan (unit)	128.535	151.694	102.519	102.519	317.240
Ratio (Km/1000 kendaraan)	5,06	4,29	6,34	6,34	2,050

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2021.

2.1.4.3 Perkembangan Pelanggan Listrik

Jumlah pelanggan listrik adalah banyaknya pelanggan di suatu daerah yang memakai fasilitas listrik. Data yang digunakan adalah data pelanggan PLN di Kabupaten Temanggung. Perkembangan pelanggan listrik di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Jumlah pelanggan listrik di tahun 2021 mencapai 234.737 pelanggan, sebagaimana tersebut pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2021

Gambar 2.57
Perkembangan Pelanggan Listrik Di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

2.1.4.4 Perkembangan Hotel

Kabupaten Temanggung dengan sumber daya alamnya yang menonjol dapat menjadi modal untuk pengembangan pariwisata. Dukungan infrastruktur yang mendukung obyek wisata terutama adalah jasa akomodasi. Perkembangan hotel di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan sejak tahun 2017. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini bahwa hingga saat ini terdapat 19 hotel di Kabupaten Temanggung yang terdiri dari 14 hotel non bintang, 2 hotel bintang dan 3 akomodasi lainnya.



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, 2021

Gambar 2.58

Perkembangan Hotel di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

2.1.4.5 Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas di Kabupaten Temanggung adalah 0,83, berikut ini perkembangan angka kriminalitas di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021.

Tabel 2.334

Perkembangan Angka Kriminalitas Di Kabupaten Temanggung Tahun 2017- 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kasus Narkoba	23	19	22	27	26
2	Jumlah kasus Pembunuhan	1	0	1	3	2
3	Jumlah Kejahatan Seksual	19	3	0	6	10
4	Jumlah kasus Penganiayaan	19	11	0	17	0
5	Jumlah kasus Pencurian	93	51	40	62	30
6	Jumlah kasus Penipuan	23	10	0	4	10

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
7	Jumlah kasus Pemalsuan uang	0	2	3	1	1
8	Total Jumlah Tindak Kriminal	178	96	66	127	79
9	Jumlah Penduduk	772.289	783.550	791.264	795.556	800.276
10	Angka Kriminalitas	2,30	1,23	0,83	1,60	0,01

Sumber: Polres Temanggung, BNN, 2021.

Angka Kriminalitas Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021 mengalami penurunan dari 2,30 di tahun 2017 menjadi 0,01 di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah angka kriminalitas, maka tingkat keamanan di Kabupaten Temanggung semakin baik.

2.1.4.6 Jenis Pajak dan Retribusi Daerah

a. Pajak Daerah

Berikut merupakan jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten Temanggung:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran dan sejenisnya
3. Pajak rumah makan dan sejenisnya
4. Pajak kantin dan sejenisnya
5. Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya
6. Pajak permainan billiar dan bowling
7. Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron
8. Pajak reklame kain
9. Pajak reklame selebaran
10. Pajak penerangan jalan sumber lain
11. Pajak parkir
12. Pajak air tanah
13. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2)
14. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

b. Retribusi Daerah

Berikut merupakan jenis retribusi daerah di Kabupaten Temanggung:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
4. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
5. Retribusi Pelataran
6. Retribusi Kios
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
9. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
10. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan
11. Retribusi Penyewaan Bangunan
12. Retribusi Pemakaian Ruangan
13. Retribusi Pemakaian Alat
14. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
15. Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
16. Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
17. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir
18. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan
19. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
20. Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
21. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
22. Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing

2.1.4.7 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha merupakan peraturan daerah yang memberikan kemudahan dalam melaksanakan usaha antara lain sebagai berikut:



- a. Perda Nomor 12 Tahun 2004 tentang Upaya Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- b. Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
- c. Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- d. Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang RTRW Kab. Temanggung 2011 – 2031;
- e. Perda Nomor 21 tahun 2013 tentang Penanaman Modal;
- f. Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
- g. Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tabel 2.335
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten
Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Perda	5	7	7	7	7

Sumber: DPM Kabupaten Temanggung, 2021.

Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 belum ada penambahan Perda yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Temanggung.

2.1.4.8 Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja diukur dengan menghitung rasio lulusan S1/S2/S3 terhadap jumlah penduduk. Rasio lulusan S1/S2/S3 mengalami peningkatan tiap tahunnya, dari 0,038 di tahun 2017 menjadi 0,045 pada tahun 2019 namun pada tahun 2020 dan 2021 menurun.

Tabel 2.336
Kualitas Tenaga Kerja di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah lulusan Perguruan Tinggi	29.645	31.935	35.296	29.928	30.586
2.	Jumlah Penduduk	772.289	783.550	791.264	795.556	800.276
3.	Rasio lulusan S1/S2/S3	0,038	0,041	0,045	0,038	0,038

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2021

2.1.4.9 Rasio Ketergantungan

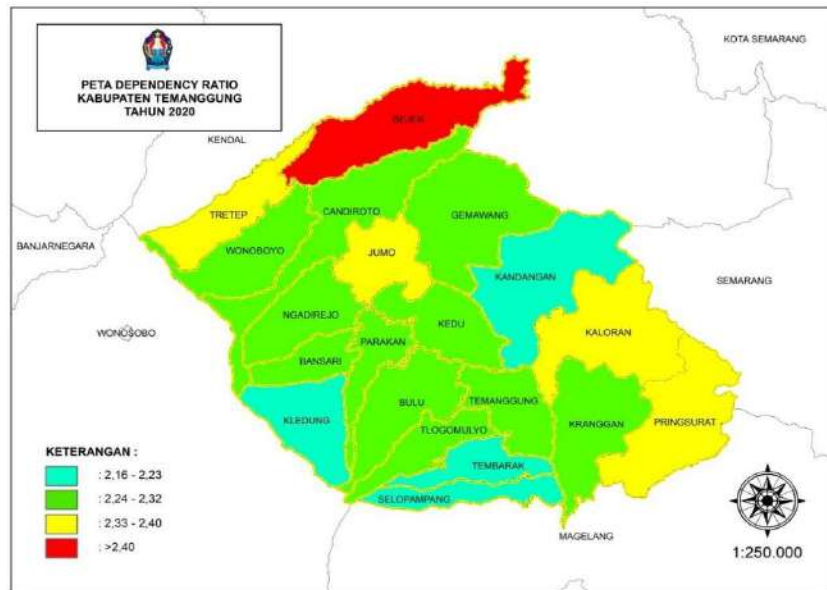
Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk produktif adalah penduduk usia 15-64 tahun, sedangkan penduduk tidak produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun. Kondisi Rasio Ketergantungan di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.337
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Temanggung
Tahun 2017- 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Penduduk Usia <15 tahun	164.447	172.153	176.538	177.988	178.179
2.	Jumlah Penduduk usia >64 tahun	58.131	63.453	67.615	64.267	67.131
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif	222.578	235.606	244.153	242.247	245.310
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	547.265	547.945	547.111	553.309	555.119
5.	Rasio ketergantungan	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1
6.	Persentase	40,67	42,99	44,62	43,79	44,19

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Temanggung, 2021

Angka ketergantungan pada Tahun 2021 sebesar 44,19% turun dari Tahun 2020 sebesar 43,79%. Semakin naik angka ketergantungan mengandung arti semakin naik pula beban tanggungan bagi kelompok usia produktif dalam menanggung kelompok usia non produktif. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa di Kabupaten Temanggung setiap dua orang penduduk berusia produktif harus menanggung beban satu orang penduduk yang tidak produktif.



Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2021




Gambar 2.59
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Rasio ketergantungan di Kabupaten Temanggung relatif sama yaitu setiap dua orang penduduk berusia produktif harus menanggung beban satu orang penduduk yang tidak produktif. Dari peta persebaran *dependency ratio* bahwa di semua Kecamatan merata sama yaitu 2 : 1 hanya selisih dua angka di belakang koma. Bila selisih dua angka di belakang koma dipetakan terlihat bahwa Kecamatan Bejen memiliki *dependency ratio* lebih tinggi dari kecamatan yang lain dan ada 4 (empat) kecamatan yang memiliki *dependency ratio* lebih rendah yaitu Kecamatan Kandangan, Kledung, Tembarak dan Selopampang.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKP SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan membandingkan target, realisasi dan capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja misi pada tahun N-2, N-1 terhadap target RPJMD 2018-2023 dengan mencantumkan status capaiannya. Adapun status capaian digambarkan dalam simbol penanda dengan bentuk dan warna yang berbeda untuk memudahkan evaluasi. Simbol penanda yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.338
Simbol dan Status Capaian Kinerja RPJMD

Simbol	Status capaian kinerja RPJMD
	Telah tercapai (100)
	Akan tercapai (60 sampai dengan 99,99)
	Upaya keras (<59,99)

2.2.1 Evaluasi Kinerja Utama

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2018-2023, bahwa indikator tujuan merupakan indikator kinerja utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Berikut adalah capaian kinerja 8 indikator kinerja utama sampai dengan tahun 2021 (Triwulan IV).



Gambar 2.60
Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Tabel 2.339
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi s.d 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d. Tw IV			
1	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkeadilan dan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*	-	70,49	69,57	69,54	69,88	100	99,13	
		Angka Kemiskinan*	%	9,80	9,96	10,36	10,17	100	96,22	

No	Tujuan	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi s.d 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d. Tw IV			
	berdaya									
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi*	%	4,8	-2,13	2,50	3,34	100	69,58	▲
		Pendapatan Perkapita*	Jutaan rupiah	29,570	27,702	27,68	28,484	100	96,33	▲
		Tingkat pengangguran terbuka (TPT)*	%	3,50	3,85	3,50	2,62	100	100	●
		Ketimpangan Pendapatan*	%	18,70	17,54	18,30	18,78	100	100	●
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks reformasi Birokrasi*	Angka	65	62,70	64	63,42	99,09	97,57	▲
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	Angka	82	80,41	86	82,06	100	100	●
RATA - RATA								99,88	94,85	▲

Sumber: *) BPS kabupaten Temanggung.

**) Bagian Organisasi, Setda Kabupaten Temanggung
BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

Pada tahun 2021 sampai dengan semester II, capaian indikator kinerja utama RPJMD s.d. 2021 sebesar 94,85% dengan status akan tercapai. Penjelasan terkait peningkatan kinerja dari indikator kinerja utama (8 indikator), sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana angka ini mengindikasikan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan. IPM pada tahun



2021 (69,88)⁸ meningkat daripada tahun 2020 (69,57), capaian angka ini melebihi dari target yang ditetapkan pada RPKD 2021 dan akan tercapai sesuai dengan target Perubahan RPJMD 2018-2023. Akan tetapi, IPM Kabupaten Temanggung masih berada dibawah IPM Jawa Tengah dan Nasional.

Pencapaian IPM ini dipengaruhi oleh 4 komponen yang memerlukan perhatian untuk dapat ditingkatkan kembali. Angka Harapan Hidup (AHH) yang berkaitan dengan derajat kesehatan masyarakat perlu didukung peningkatan asupan gizi yang baik serta perawatan terhadap kesehatan. Selain itu, komponen angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sangat berkaitan erat dengan peningkatan dimensi pengetahuan serta komponen Pengeluaran per Kapita yang berkaitan erat dengan dimensi hidup layak dengan ditunjukkan melalui kemampuan daya beli masyarakat atau angka konsumsi rumah tangga yang dapat menggambarkan peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Hal ini didukung dari indikator perhitungan IPM tersebut yaitu Angka Harapan Hidup di Kabupaten yang cukup baik (75,64) yang lebih tinggi daripada capaian Provinsi Jawa Tengah (74,47), capaian Harapan Lama Sekolah masih dapat tumbuh menguat di tengah pandemi (capaian 12,32) dan Rata-Rata Lama Sekolah dapat meningkat (capaian 7,25), serta pengeluaran per kapita mulai meningkat kembali (9.408 ribu rupiah/tahun) setelah tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan.

Dalam pengukuran kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun dimana pertumbuhan IPM ini menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya, dan semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya. Berdasarkan masing-masing data komponen IPM, dapat disimpulkan bahwa dari capaian dimensi

⁸Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2021

pengetahuan terutama pada capaian RLS yang masih harus berupaya keras untuk mencapai angka optimal. Hal ini ditunjukkan bahwa RLS Kabupaten Temanggung dalam posisi paling rendah apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Purwomanggung).

2. Angka Kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Kabupaten Temanggung tahun 2021 mencapai 79,09 ribu orang⁹ (10,17%) lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk miskin tahun 2020 yang tercatat sebesar 77,33 ribu orang (9,96%). Angka kemiskinan Kabupaten Temanggung tahun 2021 (10,17%) lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah (11,79%) dimana indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Temanggung tahun 2021 relatif lebih kecil (0,82%) daripada Provinsi Jawa Tengah (1,91%), serta indeks keparahan kemiskinan tahun 2021 relatif lebih kecil (0,39%) daripada Provinsi Jawa Tengah (0,45%)¹⁰.

3. Pertumbuhan Ekonomi.

Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak perubahan pada kinerja ekonomi, termasuk juga pada kondisi kinerja ekonomi di Pemerintah Kabupaten Temanggung. Kontraksi ekonomi yang ditunjukkan melalui penurunan PDRB menyebabkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 menjadi -2,13%. Akan tetapi, peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi 3,34%¹¹. Geliat perekonomian sudah mulai terlihat membaik walaupun capaian tersebut apabila disandingkan dengan kabupaten/kota wilayah Purwomanggung, Kabupaten Temanggung berada pada posisi dua terendah. Upaya pemerintah daerah menggenjot semua sektor lapangan usaha dan tetap dilakukan perbaikan infrastruktur dasar masyarakat seperti perbaikan jalan di

⁹Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2021

¹⁰Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2021

¹¹Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, "Kabupaten Temanggung dalam Angka 2022".

beberapa titik pusat kegiatan ekonomi guna memperlancar roda perekonomian.

Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi didasarkan atas aktivitas ekonomi pada masing-masing sektor atau lapangan usaha. Tiga sektor utama yang menjadi penggerak utama ekonomi di Kabupaten Temanggung, yaitu sektor pertanian, industri manufaktur dan perdagangan¹². Sementara itu faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung adalah investasi baik itu investasi fisik maupun investasi modal manusia berupa pendidikan¹³. Pertumbuhan ekonomi bisa naik dengan meningkatkan produktivitas pada setiap sektor perekonomian di Kabupaten Temanggung.

4. Pendapatan per Kapita.

Angka ini menggambarkan pendapatan per individu penduduk per tahun yang dihitung dari PDRB ADHB dibagi dengan jumlah penduduk. Pada tahun 2020, pendapat per kapita cenderung menurun (tahun 2019 sebesar 28,04 juta rupiah menjadi 27,10 juta rupiah di tahun 2020) dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Akan tetapi, dalam upaya percepatan pemulihan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, maka pada tahun 2021 pendapatan per kapita meningkat menjadi 28,484¹⁴ juta rupiah. Hal ini dipengaruhi oleh nilai PDRB yang ikut naik karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung meningkat cukup signifikan di tahun 2021.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Pada kurun lima tahun terakhir, TPT Kabupaten Kabupaten Temanggung tergolong rendah (<5%) serta pencapaian TPT Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan pencapaian TPT Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. TPT pada tahun 2021 (2,62) turun 1,23% dibandingkan tahun 2020 (dari 100 penduduk usia produktif Kabupaten Temanggung terdapat 2-3 orang pengangguran)¹⁵.

¹² “Laporan Akhir Analisis Ekonomi Makro Kabupaten Temanggung Tahun 2021”. Kerjasama antara Magister Ekonomika Pembangunan FEB UGM dan BAPPEDA Kabupaten Temanggung

¹³ “Laporan Akhir Analisis Ekonomi Makro Kabupaten Temanggung Tahun 2021”. Kerjasama antara Magister Ekonomika Pembangunan FEB UGM dan BAPPEDA Kabupaten Temanggung

¹⁴Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2021

¹⁵Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2021



Meskipun demikian, hal tersebut tidak akan mengendorkan semangat kinerja Kabupaten Temanggung untuk dapat mengurangi pengangguran.

6. Ketimpangan Pendapatan.

Pada tahun 2020 nilai ketimpangan pendapatan menurun karena adanya pandemi Covid-19, kemudian naik kembali pada tahun 2021 menjadi 18,78. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, maka pencapaian ketimpangan pendapatan Kabupaten Temanggung tahun 2021 dianggap rendah. Ketimpangan pendapatan tersebut diukur dari distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia dengan jumlah pendapatan dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibagi total keseluruhan pendapatan seluruh penduduk dikali 100%. Pemerintah Kabupaten Temanggung tetap terus berupaya melaksanakan strategi untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan untuk menanggulangi terjadinya ketimpangan.

7. Indeks Reformasi Birokrasi.

Pada tahun 2021, capaian indeks reformasi birokrasi (63,42) mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 (62,70). Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik. Pencapaian tahun 2021 perlu ditingkatkan lagi dengan strategi peningkatan kapasitas, manajemen, dan kinerja Pemerintah Daerah serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, serta peningkatan kapaistas manajemen dan kinerja Pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat.

8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Realisasi indeks kepuasan masyarakat terlihat meningkat pada tahun 2021 (82,06) dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 (80,41). Pengukuran IKM ini menggunakan survei kepuasan masyarakat secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik. Nilai IKM Kabupaten Temanggung tahun 2021 sudah menggunakan hasil

pengolahan data Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh 65 unit pelayanan. Guna peningkatan indeks kepuasan masyarakat maka perlu adanya inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik, pemanfaatan kemajuan teknologi informasi maupun peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pelayanan publik (Pemerintah).

2.2.2 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Evaluasi kinerja pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang pendidikan diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui 2 indikator kinerja sasaran dan 29 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut.

Tabel 2.340
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2021

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD (2023)	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d Tw IV			
	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	tahun	7,80	7,24	7,50	7,25	96,67	92,95	▲
		Angka Harapan Lama Sekolah (AHLs)	tahun	12,49	12,14	12,35	12,35	99,76	98,64	▲
	RATA-RATA							98,21	95,79	▲
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APK SD Sederajat	%	105,05	106,86	107,41	98,07	91	93	▲
		Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A	%	0,965	0,984	0,955	0,972	100	100	●
		Persentase APM SD Sederajat	%	98,30	97,62	97,50	91,24	93,58	92,82	▲
		Rasio APM Perempuan/Laki-laki	angka	0,975	0,993	0,965	0,986	100	100	

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD (2023)	Realisas i 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisa si s.d Tw IV			
		ki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A								●
		Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	%	79,50	78,13	78,50	43,21	55,04	54,35	▼
		Persentase SD terakreditasi minimal B	%	96,97	95,39	95,17	97,93	100	100	●
		Angka kelulusan SD	%	100	100	100	100	100	100	●
		Angka putus sekolah SD sederajat	%	0,03	0,03	0,05	0,03	100	100	●
		Persentase Pendidikan SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	53,90	50,61	50,71	56,13	100	100	●
		Persentase APK SMP Sederajat	%	98,59	98,17	98,45	98,56	100	99,97	▲
		Rasio APK Perempuan/K ali-laki SMP/SMPLB/ MTs/Paket B	%	1	1,003	1,004	0,990	100	100	●
		Persentase APM SMP sederajat	%	88	85,25	86,26	77,18	89,48	87,71	▲
		Rasio APM Perempuan/La ki-laki SMP/SMPLB/ MTs/ Paket B	%	1,055	1,009	1,065	0,996	100	100	●
		Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	%	98,50	97,79	98,10	93,09	94,89	94,50	▲
		Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	%	95,17	92,25	93,67	53,68	57,31	56,41	▼
		Prosentase SMP terakreditasi minimal B	%	97,20	91,03	91,59	88,75	96,90	91,31	▲
		Angka kelulusan SMP	%	100	100	100	100	100	100	●
		Angka putus	%	0,20	0,21	0,24	0,37	46,94	16,33	▼

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD (2023)	Realisas i 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisa si s.d Tw IV			
		sekolah SMP sederajat								
		Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	63,21	62,48	62,74	62,48	99,58	92,63	▲
		Jumlah warga negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar(SD/MI, SMP/MTs)	%	100	98,36	100	93,38	93,38	93,38	▲
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	%	76,60	74,16	75,44	72,07	95,54	94,09	▲
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	%	40,41	38,27	37,41	40,31	100	99,76	▲
		Jumlah warga negara usia 5- 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	91,17	100	81,35	81,35	81,35	▲
		Prosentase TK terakreditasi minimal B	%	51	56,75	49,43	55,89	100	100	●
		Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	%	47,47	44,51	45,53	37,87	83	80	▲
		Persentase Angka Melek Huruf usia ≥ 15 tahun	%	98,64	98,51	98,57	98,71	100	100	●
		Persentase angka kelulusan Pendidikan kesetaraan	%	97,19	98,10	96,99	85,86	88,52	88,34	▲
		Jumlah warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau	%	100	35,42	100	25,52	25,52	25,52	▼



No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD (2023)	Realisasi i 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d Tw IV			
		menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan								
		Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	%	15,80	24,04	15,80	8,44	100	100	●
RATA-RATA								89,18	87,64	▲

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

Kinerja urusan pendidikan pada indikator sasaran tahun 2021 rata-rata capaian dengan status Akan Tercapai sebesar 95,79%, sedangkan indikator program tahun 2021 rata-rata capaian dengan status Akan Tercapai sebesar 87,64%. Selain itu, masih terdapat target yang masih Upaya Keras diantaranya persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik dan persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik. Kendala yang ada diantaranya belum adanya tenaga yang kompeten di satuan pendidikan untuk melakukan penilaian terhadap kondisi bangunan gedung, perubahan Standart Nasional Pendidikan (SNP) yang mengatur kelayakan sarpras sehingga beberapa bangunan yang telah ada sebelumnya belum sesuai dengan SNP yang ditetapkan, dan terbatasnya kontribusi APBD dalam kegiatan Rehab, RKB dan pemenuhan sarpras lainnya. Sedangkan status upaya keras pada persentase angka putus sekolah SMP sederajat dikarena faktor ekonomi yang rendah serta faktor pergaulan dan lingkungan. Status upaya keras pada indikator Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar disebabkan umumnya anak yang tidak tertampung di jalur formal minat dan motivasi belajarnya sangat rendah. Disamping itu ada yang merasa tidak butuh pendidikan (ijazah), dan ada beberapa yang sudah bekerja.

2. Urutan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Kinerja penyelenggaran pemerintah daerah layanan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan diimplementasikan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 44 indikator kinerja program. Dan RSUD ada 1 indikator kinerja sasaran dan 2 indikator kinerja program dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.341
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2021

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realis asi 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJM D s.d 2021	Status Cap
						Target	Realisa si s.d tw IV			
1	Terpenuhin ya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,53	75,58	75,49	75,64	100	100	●
		Indeks Kinerja RSUD	%	80	69,05	79,6	69,05	86,75	86,31	▲
RATA - RATA								93,38	93,16	▲
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	Angka Kematian Ibu	%	67,5	95,83	75,5	174,38	0	0	▼
		Angka kematian bayi (AKB)	%	12	12,65	12,4	12,72	97,43	94,01	▲
		Prevalensi ballita gizi buruk	%	0,5	0,18	0,5	0,18	100	100	●
		Prosentase rumah tangga yang memiliki jamban	%	83,8	97,72	81,84	127,87	100	100	●
		Persentase Puskesmas yang sarprasnya sesuai standar	%	100	96,15	90	100	100	100	●
		Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	%	98	98,41	97,4	97,73	100	99,72	▲
		Cakupan ibu hamil mendapatk an pelayanan kesehatan antenatal	%	100	100	100	100	100	100	●

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realis asi 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJM D s.d 2021	Status Cap
						Target	Realisa si s.d tw IV			
		sesuai standar								
		Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	●
		Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	100	100	1000	100	100	●
		Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	●
		Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	%	72	100	68	100	100	100	●
		Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup	%	7	9,77	7	9,54	63,72	63,72	▲
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	80,40	100	81,64	81,64	81,64	▲
		Angka Kematian Balita	%	13,6	13,90	13,8	14,05	98,17	96,67	▲
		Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang	%	100	30,95	100	84,92	84,92	84,92	▲



No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realis asi 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJMD D s.d 2021	Status Cap
						Target	Realisa si s.d tw IV			
		mendapatk an pelayanan kesehatan sesuai standar								
		Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatk an skrining kesehatan sesuai standar	%	100	51,81	100	69,25	69,25	69,25	▲
		Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatk an skrining kesehatan sesuai standar	%	100	62,64	100	89,52	89,52	90	▲
		Persentase kunjungan baru di pelayanan kesehatan dasar (Kunjunga n Rawat Jalan di Puskesmas)	%	43,5	38,09	42,5	33,83	79,61	77,78	▲
		Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah terakredita si utama	%	53,85	40	38,46	40	100	74,28	▲
		Persentase penderita Hipertensi mendapatk an pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	19,99	100	30,97	30,97	30,97	▼
		Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatk an pelayanan	%	100	77,37	100	92,50	92,50	92,50	▲

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realis asi 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJM D s.d 2021	Status Cap
						Target	Realisa si s.d tw IV			
		kesehatan sesuai standar								
		Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatk an pelayan an pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	83,06	100	100	100	100	●
		Persentase orang terduga TBC mendapatk an pelayan an pelayanan TBC sesuai standar	%	100	38,19	100	67,88	67,88	67,88	▲
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatk an pelayan an pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	74,42	100	73,49	73,49	73,49	▲
		Persentase Penangan an KLB 1x24 jam	%	100	100	100	100	100	100	●
		Angka penemuan kasus malaria	%	<1	0,000	<1	0,005	100	100	●
		Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	%	<20	51,13	<20	3,75	100	100	●
		Angka Penemuan Kasus Baru Kusta	%	<1	0,38	<1	0,00	100	100	●
		Persentase Desa/kelur ahan UCI	%	100	99,31	100	99,31	99,31	99,31	▲
		Persentase anak umur 1 tahun diimunisas i campak	%	95	95,75	95	81,16	85,43	85,43	▲
		Prevalensi gizi kurang (underweig th) pada	%	15,5	2,20	15,5	3,10	100	100	●

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realis asi 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJM D s.d 2021	Status Cap
						Target	Realisa si s.d tw IV			
		anak balita (0-60bulan)								
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0- 24 bulan)	%	27	14,23	28	13,13	100	100	●
		Persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatk an ASI Eksklusif	%	80	74,01	80	84,02	100	100	●
		Prevalensi anemia pada ibu hamil	%	20	14,18	20	13,64	100	100	●
		Persentase desa bebas rawan gizi	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase rumah sehat	%	82	83,75	81	83,75	100	100	●
3	Program Peningkata n Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	%	100	100	95	100	100	100	●
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman	Cakupan puskesmas melaksana kan pelayanan farmasi sesuai standar	%	62	n.a	62	19,23	31,02	31,02	▼
		Cakupan Pengguna an Obat Rasional (POR) di puskesmas	%	77	n.a	77	81	100	100	●
		Pengawasa n makanan minuman di pasar tradisional	%	100	n.a	100	100	100	100	●
		Persentase sarana pelayanan mendapatk an ijin kesehatan	%	100	n.a	100	100	100	100	●
		Cakupan Produksi Industri Rumah Tangga	%	100	n.a	100	94,17	94,17	94,17	▲

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realis asi 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJM D s.d 2021	Status Cap
						Target	Realisa si s.d tw IV			
		(PIRT) yang mendapat SPP-IRT								
5	Program Pemberday aan Masyarakat Bidang kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat (PHBS Rumah Tangga) Strata Utama dan Paripurna	%	83,09	92,92	83,05	93,26	100	100	●
6	Program pemuha n Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan nilai akreditasi RSUD	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase pemuha n kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit	%	54	50,73	50	56,99	100	100	●
RATA-RATA								88,99	88,78	●

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021 data diolah

Pencapaian kinerja urusan kesehatan pada tahun 2021 didasarkan pada rata-rata capaian indikator kinerja sasaran 93,16% dan rata-rata capaian indikator kinerja program 88,78%. Capaian kinerja urusan kesehatan tersebut belum seluruhnya mencapai target RPJMD yang ditunjukkan dengan pencapaian indikator dengan status upaya keras diantaranya:

- 1) Angka kematian ibu, disebabkan pelaksanaan ANC dan PNC tidak maksimal karena pandemi, kehamilan menjadi faktor komorbid (peningkatan kematian ibu karena kasus covid), tinggi kasus resiko tinggi pada ibu hamil, kapasitas kemampuan nakes dalam pertolongan kasus kegawatdaruratan maternal, dan kurangnya koordinasi dalam upaya percepatan penurunan kematian ibu.
- 2) Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, disebabkan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang paradigma sehat dimana pentingnya deteksi dini penyakit tidak menular dan datang ke layanan kesehatan sebelum jatuh sakit.

- 3) Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar, dikarenakan baru 5 dari 26 puskesmas yang mempunyai apoteker sebagai penanggungjawab ruang farmasi yang merupakan salah satu syarat pelayanan farmasi sesuai standar (Puskesmas Ngadirejo, Pringsurat, Gemawang, Bejen, dan Parakan).

Dari sekian indikator cakupan layanan kesehatan yang belum memenuhi target kinerja, kemungkinan dikarenakan pandemic Covid-19 sehingga layanan kesehatan tidak maksimal diberikan kepada masyarakat.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang diimplementasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan 2 indikator kinerja sasaran dan 9 indikator kinerja program penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.342
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisa si 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap
						Target	Realisasi s.d tw IV			
		Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	84	82,37	83,90	83,70	99,76	99,64	▲
		Persentase Pemanfaatan Tata Ruang Sesuai rencana tata ruang	%	89,50	89,32	89,40	88,54	98,93	98,93	▲
RATA-RATA								99,40	99,28	▲
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi (D.I)	%	97	91,89	96,80	95,29	98,44	98	▲
		Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%	59,32	59,970	58,32	58,11	99,65	97,97	▲
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan	%	90	93,90	88	94,52	100	100	●

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisa si 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap
						Target	Realisasi s.d tw IV			
	n Penyediaan Air Minum	akses air minum								
3.	Program Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Drainase	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	%	50	46,59	48	22,544	47	45	▼
4.	Program Pengembang an Pemukiman	Persentase desa terfasilitasi kegiatan bankeu/hibah	%	100	0	100	100	100	100	●
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase gedung Pemerintah kondisi Baik	%	80	63,10	75	86,82	100	100	●
6.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungann ya	Persentase trotoar kondisi baik	%	62	0	60	75,66	100	100	●
7.	Program Penyelenggar aan Jalan	Persentase jalan Kabupaten kondisi mantap	%	85	83,33	84,65	89,29	100	100	●
		Persentase jembatan Kabupaten kondisi baik	%	93,73	97,87	93,13	92,28	99,05	99,09	▲
8.	Program Pengembang an Jasa Konstruksi	Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi	%	90	100	90	100	100	100	●
9.	Program Penyelenggar aan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	%	88,1	89,32	87,9	88,54	100	100	●
Rata-Rata								97,16	94,58	▲

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021 data diolah.

Capaian kinerja indikator sasaran sebesar 99,28% sedangkan secara keseluruhan, rata-rata capaian indikator kinerja program sebesar 94,58% dimana masih terdapat 1 indikator upaya keras yaitu persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan. Adanya perubahan status jalan kabupaten menjadi jalan desa/jalan lingkungan/jalan kawasan khusus menjadikan panjang drainase kawasan/kota berubah.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman



Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman diimplementasikan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja pada tabel berikut:

Tabel 2.343
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJM D s.d 2021	Status Cap
						Target	Realisasi s.d tw IV			
1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	%	97,97	98,71	97,87	98,99	100	100	●
Rata-Rata								100	100	●
1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	5	9,76	7,72	8,85	85,41	92,59	▲
		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	%	86,8	92,38	86,78	92,98	100	100	●
2	Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	%	89,42	90,24	88,30	91,15	100	100	●
		Persentase kawasan kumuh perkotaan	%	18,25	7,09	18,75	5,55	100	100	●
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh	%	100	0	100	100	100	100	●
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	100	●
Rata-Rata								97,57	98,77	▲

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021 data diolah

Melihat capaian kinerja pada urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman relatif baik, beberapa indikator baik indikator kinerja sasaran maupun program mencapai



target yang ditetapkan pada tahun 2021, bahkan ada yang melebihi target yaitu persentase rumah layak huni yang didorong pencapaiannya melalui program-program di bidang perumahan dan permukiman khususnya penanganan RTLH menjadi RLH (baik dari sumber dana DAK, APBD Provinsi, APBN).

Secara keseluruhan, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran telah tercapai 100%, sedangkan rata-rata capaian indikator kinerja program sebesar 98,77%.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat diimplementasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melalui 1 indikator kinerja sasaran dan 8 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.344
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisa si 2020	2021		Cap. RKPD Tahun 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Indek Rasa Aman	Angka	4,44	4,36	4,42	4,48	100	100	●
RATA-RATA								100	100	●
1	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	%	100	100	100	100	100	100	●
		Rasio Linmas per RT	rasio	1,62	1,38	1,62	1,42	87,84	87,84	▲
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan	%	100	n.a	100	100	100	100	●

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisa si 2020	2021		Cap. RKPD Tahun 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada								
2	Program Pencegahan Penanggulan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan penangana n bencana kebakaran kabupaten	%	61	60,64	60,64	60,64	100	99,42	▲
		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	%	69,8	55,56	69,8	76,67	100	100	●
		Cakupan penangana n bencana non kebakaran kabupaten	%	44	n.a	42	310	100	100	●
		Persentase aparatur yang memenuhi standar kualifikasi	%	44	35,19	42	32,14	76,53	73,05	▲
		Persentase warga negara yang memperole h layanan penyelamat an dan evakuasi korban kebakaran	%	100	n.a	100	47,73	47,73	47,73	▼
RATA-RATA								89,01	88,50	▲

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021 data diolah.

Indikator kinerja sasaran indeks rasa aman telah melebihi target yang ditetapkan (capaian 100%). Sementara itu, indikator kinerja program rata-rata capaian sebesar 88,50% (akan tercapai), masih terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target sehingga memerlukan upaya keras pada persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan faktor penghambat berupa wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan/portal/jalan sepi dll, lokasi pos pemadam kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi



kebakaran, luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah pos pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candirototo serta minimnya sarpras untuk mendukung penyelamatan dan evakuasi, serta terbatasnya sumber air dan belum tersedianya sumber air (groundtank) di masing-masing pos untuk mempercepat proses pelayanan kebakaran.

Sementara itu, capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi Penanggulangan Bencana yang diimplementasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan 1 indikator kinerja sasaran, dan 9 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana berikut ini.

Tabel 2.345
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Lainnya Penanggulangan Bencana Tahun 2021

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD Tahun 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Indek Resiko Bencana	%	192,08	214,81	220,1	251,07	85,93	69,29	▲
RATA-RATA								85,93	69,29	▲
1	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan desa tangguh bencana	%	10,47	7,04	8,57	8,29	96,79	79,23	▲
		Persentase tertangannya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100	90	100	100	100	100	●
		Persentase Tertangannya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	●

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD Tahun 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	%	86,4	65,73	70,1	67,74	96,64	78,41	▲
		Persentase tertangani nya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase tertangani nya korban bencana pada pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase Warga Negara yang memperole h layanan informasi rawan bencana	%	100	n.a	100	100	100	100	●
		Persentase Warga Negara yang memperole h layanan pencegaha n dan kesiapsiaga an terhadap bencana	%	100	n.a	100	100	100	100	●
		Persentase Warga Negara yang memperole h layanan penyelama tan dan evakuasi korban bencana	%	100	n.a	100	100	100	100	●
RATA-RATA								99,27	95,29	▲




Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021 data diolah

Indeks resiko bencana belum mencapai target sehingga rata-rata capaian indikator kinerja sasaran 69,29% (akan tercapai). Kinerja penyelenggaraan program, hampir seluruhnya mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2021 kecuali Cakupan desa tangguh bencana dan Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana, sehingga rata-rata capaian pada indikator kinerja program 95,29%. Peran serta masyarakat, edukasi terhadap masyarakat serta koordinasi yang baik antar instansi dan masyarakat dapat meningkatkan upaya tanggap bencana

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial diimplementasikan oleh Dinas Sosial dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 14 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.346
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2021

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realis asi 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap
						Target	Realisasi s.d tw IV			
1	Meningkat nya Penangan an, Pemberday aan, Perlindung an, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahter aan Sosial (PPKS) Sosial (PMKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraa n Sosial (PPKS) yang ditangani	%	63	n.a	63	111,79	100	100	
RATA-RATA								100	100	
1	Program Pemberday aan Sosial	Cakupan pemberdayaa n PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha	%	100	100	100	100	100	100	

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realis asi 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap
						Target	Realisasi s.d tw IV			
		kesejahteraan sosial								
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100	0	100	100	100	100	●
3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	●
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan		1,22	2,20	1,22	1,91	100	100	●



No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realis asi 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap
						Target	Realisasi s.d tw IV			
		n sosial di luar panti sosial								
4	Program perlindung an dan jaminan sosial	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100	0	100	100	100	100	●
		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%	85	63,8	75	98,78	100	100	●
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	%	95	85	100	78,44	92,29	82,57	▲
		Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanja n	%	10,2	0	10	63,72	100	100	●
		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	48	83	48	83	100	100	●
5	Program Penangana n Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%	100	100	100	100	100	100	●
6	Program Pengelolaa n Taman Makam Pahlawan	Persentase terpeliharany a Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	100	100	●
		RATA-RATA						99,72	98,76	▲

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021 data diolah

Kinerja urusan Sosial pada tahun 2021 cukup bagus di mana rata-rata capaian indikator kinerja sasaran sebesar 100% dan rata-



rata capaian indikator kinerja program 99,38% dengan status Akan Tercapai. Hal yang menjadi perhatian dikarenakan satu indikator yang belum tercapai sepenuhnya yaitu cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota dikarenakan jumlah penduduk yang masuk di DTKS naik 127.157 jiwa dari tahun 2020 sedangkan kepesertaan PBI APBN sebanyak 37.973 jiwa mengalami penonaktifan, berkaitan dengan hal tersebut perlu tindak lanjut berupa reaktivasi untuk kepesertaan yang dinonaktifkan dan mengusulkan peserta tersebut ke PBI APBD II serta mengusulkan peserta non aktif ke DTKS kemudian mengusulkannya ke PBI APBN.

2.2.3 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Evaluasi kinerja pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang Ketenagakerjaan diimplementasikan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melalui 1 indikator kinerja sasaran dan 10 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana berikut:

Tabel 2.347
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2021

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisa si 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap
						Target	Realisasi s.d tw IV			
	Meningkat nya investasi sektor riil	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	75	76,09	74,37	76,09	100	100	●
Rata - Rata								100	100	●
1	Program Perluasan Kesempat an Kerja	Presentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru	%	75	19,06	65	52,68	81,04	70,24	▲
		Presentase pencari kerja terdaftar	%	80	55,33	75	78,01	100	97,51	▲

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisa si 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap
						Target	Realisasi s.d tw IV			
		yang ditempatkan								
		Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	65	58,72	60	34,78	57,97	53,51	▼
		Tingkat setengah pengangguran	%	5,7	5,10	5,9	11,66	100	100	●
		Persentase Tenaga Kerja formal	%	31	31,69	29	24,17	83,35	77,97	▲
2	Proogram Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Proporsi kepesertaan BPJS ketenagakerjaan	%	79	65,67	77	61,08	79,33	77,32	▲
		Persentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%	87	21,16	83	57,27	69,00	65,83	▲
		Persentase perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	%	40	25,42	30	33,96	100	84,91	▲
		Persentase perselisihan hubungan industry di luar pengadilan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	100	92,86	100	82,35	82,35	82,35	▲
		Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang	%	45	20	35	54	100	100	●
RATA-RATA								85,30	80,96	▲

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021 data diolah



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang menjadi indikator kinerja sasaran, pada tahun 2021 capaian kinerjanya melebihi dari target yang ditetapkan (capaian 100%). Sementara itu, kinerja program urusan pemerintahan bidang tenaga kerja memiliki rata-rata capaian sebesar 80,96%. Pelatihan berbasis kompetensi belum dilaksanakan karena anggaran DBHCHT menyesuaikan PMK baru sehingga menyebabkan indikator persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi. Selain itu, permasalahan belum semua perusahaan mampu dan mematuhi peraturan pembayaran upah sesuai UMK menjadikan perlunya upaya keras pada indikator persentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diimplementasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 2 indikator kinerja sasaran dan 8 (delapan) indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel:

Tabel 2.348
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJM D s.d 2021	Status Cap
						Target	Realisasi s.d tw IV			
1	Meningkatnya peran dan tanggung jawab perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	95,65	95,62	95,64	95,31	99,65	99,64	▲
		Persentase perempuan dan anak korban kekerasan	%	0,004	0,008	0,004	0,002	100	100	●
RATA-RATA								99,83	99,82	▲

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJM D s.d 2021	Status Cap
						Target	Realisasi s.d tw IV			
1	Program Pengarust amaan Gender dan Pemberda yaan Perempua n	presentase keterwakila n perempuan di lembaga pemerintah	%	2,34	2,02	2,33	1,79	76,97	76,31	▲
		Rasio Perangkat daerah yang menerapka n kebijakan responsif gender dalam <i>penyusuna n</i> renja PD	%	45,71	45,65	38,57	82,61	100	100	●
2	Program Perlindun gan Perempua n	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	%	0,011	0,022	0,011	0,0021	100	100	●
		Persentase perempuan korban kekerasan	%	0,011	0,0002	0,013	0,0013	100	100	●
3	Program peningkat an kualitas keluarga	Persentase desa sayang ibu dan bayi	%	62,28	30,83	20,76	31,49	100	50,56	▼
		Persentasre rumah sakit sayang ibu dan bayi	%	100	100	100	100	100	100	●
4	Program Pemenuh an Hak Anak (PHA)	Persentase terbentukn ya kota layak anak	%	60	60	30	80	100	100	●
5	Program perlindun gan khusus anak	Persentase anak korban kekerasan	%	0,011	0,04	0,012	0,0026	100	100	●
RATA-RATA								97,12	90,86	▲

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah.

Kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2021 cukup baik karena telah mencapai target tahun 2021, dimana sebagian besar rata-rata capaian indikator



kinerja sasaran (99,82%) maupun rata-rata capaian indikator kinerja program (90,86%) dalam status akan tercapai.

Meskipun demikian, terdapat satu indikator yang perlu perhatian karena masih termasuk upaya keras yaitu persentase desa sayang ibu dan bayi, hal ini dikarenakan masih adanya budaya masyarakat yang beranggapan bahwa kehamilan dan melahirkan menjadi urusan perempuan. Penguatan, advokasi dan sosialisasi tentang Gerakan Sayang Ibu (GSI) perlu dilakukan bersama-sama baik oleh Pemerintah, mitra kerja maupun masyarakat.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang Pangan diimplementasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 4 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.349
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2021

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKP 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap
						Target	Realisasi s.d tw IV			
1	Meningkatnya kedaulatan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-	78,30	77,9	78,10	79,70	100	100	●
RATA - RATA								100	100	●
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rasio ketersediaan pangan	%	100	n.a	100	147,06	100	100	●
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	persentase desa pelaksana program ketahanan pangan	%	27,68	17,3	20,76	28,03	100	100	●
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rasio lumbung pangan masyarakat	%	56	0	48	56	100	100	●
4	Program Pengawasan Keamanan	Persentase bahan pangan	%	90	n.a	90	100	100	100	

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap
						Target	Realisasi s.d tw IV			
	Pangan	segar asal tumbuhan yang aman								●
RATA-RATA								100	100	●

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021 data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran dan kinerja program pada urusan pangan telah tercapai 100 %, sehingga untuk ketersediaan pangan dikabupaten temanggung dapat terpenuhi untuk masyarakat Temanggung.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang pertanahan diimplementasikan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dengan 1 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.350
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2021

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap
						Target	Realisasi sd TW IV			
1.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	%	100	0	100	100	100	100	●
RATA-RATA								100	100	●

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021 data diolah.

Dari tabel diatas diketahui bahwa status capaian indikator Urusan Pemerintahan bidang pertanahan sampai Tahun 2021 sudah 100% dengan status Telah Tercapai artinya semua permasalahan pada fasilitasi pertanahan telah terselesaikan.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup diimplementasikan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 14 indikator kinerja program daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel:

Tabel 2.351
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2021

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJM D s.d 2021	Status Cap
						Target	Realisa si s.d tw IV			
1	Meningkat nya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkunga n Hidup (IKLH)	%	70,53	65,61	69,03	69,51	100	98,56	▲
RATA - RATA								100	98,56	▲
2	Program Perencana an Lingkunga n Hidup	Persentase dokumen perlindung an dan pengelolaa n lingkungan hidup	%	62,73	31,36	58,45	100	100	100	●
		Persentase persetujua n pernyataan kesanggup an pengelolaa n dan pemantaua n lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkunga n Hidup	%	100	0	95	0	0	0	▼
3	Program Pengendali an dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Angk a	46	41,11	46	54,45	100	100	●
		Indeks kualitas udara	Angk a	86	83,65	85	80,89	95,16	94,06	▲
4	Program Pengelolaa n Keanekara gaman Hayati	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	74,33	74,33	74,33	74,33	100	100	●
		Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap total luas	%	0,067	0,17	0,067	0,1	100	100	●

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJM D s.d 2021	Status Cap
						Target	Realisa si s.d tw IV			
		lahan di Kabupaten Tmg								
		Cakupan RTH Publik	%	0,07	1,10	0,07	1,10	100	100	●
5	Program Pengendali an Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah bahan berbagaha ya dan beracun (limbah B3)	Persentase usaha yang memiliki persetujua n teknis pengelolaa n limbah B3	%	100	0	80	0	0	0	▼
6	Program Pembinaan dan Pengawasa n terhadap izin lingkungan dan izin perlindung an dan pengelolaa n lingkungan hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasa n Usaha/Kegi atan yang memiliki Dokumen Lingkunga n Hidup	%	100	n.	80	100	100	100	●
7	Program Peningkata n Pendidikan , Pelatihan dan Penyuluha n Lingkunga n Hidup untuk Masyaraka t	Cakupan sekolah berwawasa n lingkungan	%	26,88	26,48	26,61	27,33	100	100	●
8	Program Pengharga an Lingkunga n Hidup untuk Masyaraka t	Persentase penghargaa n bidang lingkungan hidup	%	66,67	0	66,67	82,35	100	100	●
9	Program Penangana n Pengaduan Lingkunga n Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemara n dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklan juti	%	100	100	100	100	100	100	●

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJM D s.d 2021	Status Cap
						Target	Realisa si s.d tw IV			
10	Program Pengelolaa n Persampaha n	Persentase sampah yang tertangani	%	38,2	24,23	35,04	21,97	62,70	57,52	▼
		Cakupan layanan persampaha n	%	55	45,33	52	53,63	100	97,51	▲
RATA-RATA								95,07	82,08	▲

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2021 data diolah.

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran 98,56% (akan tercapai). Selain itu terdapat 14 indikator kinerja program urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dimana ada 9 indikator yang telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2021, sebanyak 2 indikator akan mencapai target yang ditetapkan, dan masih ada 3 indikator dengan status upaya keras diantaranya adalah :

- a. Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup, kendala yang ada adalah pengajuan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) yang berada di DPM sedangkan sistem tersebut belum terintegrasi dengan sistem informasi Lingkungan Hidup;
 - b. Persentase usaha yang memiliki persetujuan teknis pengelolaan limbah B3, permasalahan yang ada diantaranya yaitu pada tahun 2021 tidak ada kegiatan dan/atau usaha yang mengajukan rincian teknis Limbah B3 sehingga tidak ada kajian terhadap rincian teknis limbah B3;
 - c. Persentase sampah yang tertangani, permasalahan yang ada diantaranya yaitu kurangnya tenaga dan sarana prasarana pengelolaan persampahan untuk menjangkau seluruh wilayah.
6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang

Administrasi Kependudukan dan Kependudukan dan Catatan Sipil diimplementasikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 10 indikator kinerja program, dengan capaian sebagaimana tertuang pada tabel:

Tabel 2.352
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi
Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2021

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD Tahun 2021	Cap. RPMJD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisa si s.d. TW IV			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Angka	80	n.a	79	83,84	100	100	●
Rata - Rata								100	100	●
1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	97,4	98,15	97,2	98,38	100	100	●
		Persentase kepemilikan KTP el	%	99	84,00	98,2	99,71	100	100	●
		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	72	56,92	62	65,02	100	90,31	▲
		Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	●
2	Program pencatatan sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	75	69,37	71	70,02	98,61	93,35	▲
		Persentase penerbitan akta kematian	%	99	100	97	100	100	100	●
		Cakupan pelayanan akta perkawinan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	●
		Cakupan pelayanan akta perceraian tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	●
3	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	60	100	20	83,87	100	100	●

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD Tahun 2021	Cap. RPMJD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisa si s.d. TW IV			
	an	an								
		Persentase inovasi pelayanan kependuduk an dan pencatatan sipil	%	90	93,55	70	79,17	100	87,96	▲
RATA-RATA								99,86	97,16	▲

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2021 data diolah

Secara keseluruhan, kinerja sasaran maupun program pada urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil dapat dikatakan telah cukup baik. Hal tersebut ditandai dengan capaian 100% pada indikator kinerja sasaran serta rata-rata capaian indikator kinerja program sebesar 97,16%. Pencapaian tersebut dengan erat kaitannya terhadap pedoman pelayanan publik sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat lebih khususnya dalam bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diimplementasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan 2 indikator kinerja sasaran dan 13 indikator kinerja program, dengan capaian sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.353

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD Tahun 2021	Cap. RPJMD s/d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	Angka	0,71	0,68	0,69	0,69	100	97,18	▲
		Persentase desa yang berpredikat mandiri	%	6,39	3,76	5,26	5,64	100	88,25	▲

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKP Tahun 2021	Cap. RPJMD s/d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
RATA-RATA								100	92,72	
1	Program penataan Desa	Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada	%	40	20,069	30	30,45	100	76,13	
		Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Indek Pembangunan Desa	%	37	20,069	33	35,71	100	96,53	
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah di tetapkan	%	100	100	100	100	100	100	
3	Program Administrasi Pemerintah n Desa	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	90	43,61	70	96,24	100	100	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	90	84,21	70	100	100	100	
		Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	%	85	100	75	100	100	100	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	%	100	100	95	95,86	100	95,85	
		Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu	%	85	86,84	80	100	100	100	
		Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa	%	10	0,55	10	0,00	100	100	

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKP Tahun 2021	Cap. RPJMD s/d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		Persentase desa yang tertib pengelolaan aset	%	85	86,84	80	100	100	100	●
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	%	35	100	25	100	100	100	●
		Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif	%	32	61,28	26	85,34	100	100	●
		Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	%	10	100	10	100	100	100	●
RATA - RATA								100	97,58	▲

Sumber: BAPPEDA Temanggung, 2021 data diolah.

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran sebesar 92,72% (akan tercapai) dimana pada indikator rata-rata nilai indeks desa membangun dan persentase desa yang berpredikat mandiri ke depannya perlu dilakukan pembinaan dan pembinaan. Sementara itu, kinerja program urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dikatakan cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan 10 indikator kinerja program telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2021 dan 3 (tiga) indikator kinerja program akan mencapai target tersebut. Sama halnya dengan indikator kinerja sasaran, peran pembinaan dan pendampingan sangat penting untuk dapat mengupayakan pencapaian target kinerja.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diimplementasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 9 indikator kinerja program, dengan



capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel:

Tabel 2.354
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realis asi 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap
						Target	Realis asi s.d tw IV			
1	Terkendali nya laju pertumbu han penduduk	<i>Laju Pertumbuh an Penduduk (LPP)</i>	%	0,80	0,98	0,82	0,98	80,49	77,50	▲
RATA-RATA								80,49	77,50	▲
1	Program pengendali an penduduk dan informasi keluarga	Persentase Penyediaa n Data Mikro Keluarga di Desa/Kelu rahan	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetnee d	%	9,19	13,76	9,83	12,99	67,89	58,38	▼
		Persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	2,04	2,16	2,06	1,02	100	100	●
		Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 th (ASFR 15-19 th)	%	26,3	21,32	26,8	9,80	100	100	●
2	Program Pembinaa n Keluarga Berencana /KB	presentase PUS yang memiliki pengetahu an dan pemahama n tentang semua jenis metode kontraseps i modern	%	76,2	82,61	75,6	75,29	99,62	98,79	▲

BAB II



No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realis asi 2020	2021		Cap. RKP 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap
						Target	Realis asi s.d tw IV			
		Persentase kepesertaan KB aktif	%	76,21	74,71	75,6	75,29	99,62	98,79	▲
		Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	49,2	45,38	48,5	45,21	93,14	91,91	▲
		Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membang un (IDM)	%	33,9	33,85	33,9	33,85	99,84	99,84	▲
3	Program Pemberday aan dan Peningkat an Keluarga Sejahtera (KS)	Indek Pembangu nan Keluarga	%	50	0	40	55,97	100	100	●
RATA-RATA								95,61	94,19	▲

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

Kinerja urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana masih perlu penekanan terhadap implementasi kinerja sasaran pada laju pertumbuhan penduduk (rata-rata capaian 77,50%) melalui peningkatan jejaring dalam pelaksanaan program KKBPK baik Pemerintah maupun swasta serta melakukan advokasi dan bintek kepada Kades dalam program KKBPK. Selain itu, berdasarkan tabel diatas, kinerja program pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana relatif baik dengan status akan tercapai (94,19%). Meskipun demikian, terdapat satu indikator kinerja yang tergolong Upaya Keras yaitu ersentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/*unmetneed* disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya ikut KB dan rendahnya pemahaman batasan PUS bisa



hamil (merasa tua tidak perlu KB). Upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan diantaranya penyuluh KB melakukan koordinasi dan meningkatkan pendekatan dengan tokoh agama/tokoh masyarakat/pimpinan wilayah yang dianggap dapat mensukseskan program KB serta perubahan pola pikir masyarakat terhadap pemahaman kesehatan reproduksi.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 10 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel:

Tabel 2.355
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2021

No	Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap
						Target	Realisasi s.d tw IV			
1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	%	1,61	5,79	1,56	1,62	100	100	●
RATA-RATA								100	100	●
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadahi	%	38,65	34,78	36,23	35,27	97,34	91,24	▲
		Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	100	97,27	97,27	98,18	100	98,18	●
		Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan	%	99,5	83,61	99,68	96,28	96,59	96,76	▲
		Persentase bengkel umum kelas 1 yang	%	50	25	25	25	100	50	▼

No	Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap
						Target	Realisasi s.d tw IV			
		memenuhi standar								
		Persentase bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar	%	62,5	25	37,5	37,50	100	60	▲
		Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar	%	65,22	47,83	56,52	56,52	100	86,67	▲
		Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	%	87,18	80	84,62	80	94,54	91,76	▲
		Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	100	71,43	85,71	85,71	100	85,71	▲
		Persentase penerangan jalan di ruas jalan Kabupaten	%	14,26	31,69	11,56	31,69	100	100	●
RATA-RATA								98,85	86,03	▲

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021 data diolah.

Berdasarkan tabel diatas sampai dengan tahun 2021, indikator kinerja sasaran pada urusan perhubungan telah 100% mencapai target. Sedangkan rata-rata capaian indikator kinerja program 86,03% (akan tercapai), terdapat 3 indikator yang telah mencapai target dan 6 indikator akan mencapai target yang ditetapkan, serta 1 indikator yang tergolong upaya keras adalah persentase bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar. Permasalahan yang dihadapi pada upaya keras tersebut yaitu kualitas baik disisi sarana, prasarana maupun SDM yang memadai, sehingga perlu adanya kegiatan Pembinaan, Pelatihan, dan Penataan Perbengkelan guna meningkatkan kapasitas Bengkel Umum agar memenuhi standar.



10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika diimplementasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan 2 indikator kinerja sasaran dan 7 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.356
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Tahun 2021

No	Sasaran / Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPDP Tahun 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d. TW IV			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,0	3,61	2,85	2,78	97,54	92,67	▲
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	96,00	95,50	95,60	89,56	93,68	93,3	▲
RATA - RATA								95,61	92,98	▲
1.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase PPID badan publik yang aktif	%	20	13,20	15	14,66	97,75	73,31	▲
		Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	%	30	15,63	20	21,88	100	72,92	▲
		Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	%	100	100	100	100	100	100	●
2.	Program pengelolaan aplikasi informatika	Persentase ketersediaan jaringan intranet	%	100	82,03	100	88,10	88,10	88,10	▲
		Persentase sistem informasi yang terintegrasi	%	50	16,17	30	16,99	56,64	33,98	▼
		Persentase sistem informasi yang berfungsi	%	60	52,27	50	52,15	100	86,91	▲

No	Sasaran / Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD Tahun 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d. TW IV			
		optimal								
		Persentase ketersediaan akses internet publik	%	100	73,33	100	73,33	73,33	73,33	▲
RATA-RATA								87,98	75,51	▲

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021 data diolah

Indikator kinerja sasaran belum mencapai target (92,98%). Hal ini menjadi perhatian karena kebutuhan yang tinggi akan penggunaan layanan SPBE yang dapat menjadi faktor pendorong untuk peningkatan capaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta indikator nilai keterbukaan informasi publik yang dapat ditingkatkan melalui peningkatan frekuensi pendampingan dengan PPID Badan Publik.

Capaian kinerja indikator program (75,51%), terdapat 1 indikator yang memerlukan upaya keras yaitu persentase sistem informasi yang terintegrasi, dimana menyebabkan capaiannya jauh dari target karena belum adanya standar baku pembangunan dan pengembangan sistem informasi, serta belum tercukupinya peralatan jaringan di seluruh Perangkat Daerah. Selain itu, permasalahan website yang sama atau sejenis penghitungannya 1-1 (belum dikelompokkan menurut jenisnya), sebagai contoh website SID sejumlah 289 (seharusnya 1), website kecamatan sejumlah 20 (seharusnya 1), website OPD/dinas/badan sejumlah 23 (seharusnya 1), dll sehingga total pengurangan jumlah website berkisar 443.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diimplementasikan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dengan 2 indikator kinerja sasaran dan 5 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.357
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021

No	Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap
						Target	Realisasi s.d tw IV			
1	Meningkatnya investasi sektor riil	Persentase Koperasi sehat	%	10,71	5,95	8,3	7,35	88,59	68,65	▲
		Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	%	0,015	0,012	0,013	0,0035	26,92	23,33	▼
RATA - RATA								57,75	45,99	▼
1.	Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase koperasi aktif	%	12	13,81	18	22,86	100	100	●
2	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi	%	30	21	22	3,98	18,09	13,27	▼
3	Program Pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif	%	75	na	6,25	57,35	100	76,47	▲
4	Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro UKM	Persentase usaha mikro aktif	%	35	32,20	33,5	33,07	98,73	94,50	▲
		Persentase Usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha	%	1,07	n.a	0,36	0,92	100	85,98	▲
RATA-RATA								83,36	74,04	▲

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah.

Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah memiliki 2 indikator kinerja sasaran yang secara rata-rata capaiannya dalam status perlu upaya keras (45,99). Kinerja sasaran yang akan mencapai target yaitu persentase koperasi sehat, berkaitan hal tersebut hal yang perlu ditindaklanjuti untuk pencapaian target



ke depan diantaranya pelatihan perkoperasian, meningkatkan frekuensi pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi koperasi. Sedangkan indikator kinerja sasaran yang perlu upaya keras yaitu persentase usaha mikro yang naik kelas, permasalahan yang ada diantaranya klasifikasi aset dan omset bagi skala usaha mikro untuk naik kelas menjadi usaha kecil sangat kecil sehingga perlu adanya pendampingan dan pembinaan bagi usaha mikro potensial agar dapat meningkatkan skala usahanya. Adapun rata-rata capaian pada indikator kinerja program sebesar 74,04% (akan tercapai), dengan rincian 1 indikator telah mencapai target yang ditetapkan, 3 indikator dengan status akan mencapai target, dan 1 indikator perlu upaya keras. Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi memerlukan upaya keras yang disebabkan oleh masih banyaknya koperasi yang belum melaporkan laporan keuangan dan data terekap sampai bulan Desember 2021, sementara itu laporan RAT sesuai Permendakop sampai dengan 31 Maret 2022.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Kinerja penyelenggaran pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal diimplementasikan oleh Dinas Penanaman Modal dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 10 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel:

Tabel 2.358
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Tahun 2021

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJM D 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJM D s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d tw IV			
1	Meningkatnya investasi sektor riil	Indeks Kemudahan Berusaha	Angka	65	na	60	78,00	100	100	●
Rata - Rata								100	100	●
1.	Program Pengembangan Iklim penanaman modal	Nilai realisasi investasi	Milyar	625	1245,66	432	545,01	100	100	●
		Persentase sedianya kajian teknis potensi investasi	%	10	28,13	10	28,13	100	100	●

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJM D 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJM D s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d tw IV			
		Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan perizinan yang terlatih	%	100	0	100	44	44,19	44,19	▼
2	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sector/bidang unggulan	%	100	60	100	60	60	60	▲
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan online	%	100	98,48	100	100	100	100	●
		Persentase perijinan yang bebas calo	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	95	96,20	95	100	100	100	●
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Perzinan yang diterbitkan	%	100	93,37	100	93,53	93,53	93,53	●
		Persentase Pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	100	100	100	100	100	100	●
RATA-RATA								89,77	89,77	▲

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

Kinerja sasaran relatif baik yang ditunjukkan melalui capaian indikator indeks kemudahan berusaha tahun 2021 melebihi target yang telah ditetapkan (100%). Hal ini didorong adanya kemudahan pelayanan perizinan dan kepastian hukum keterkaitan zonasi industri dan tata ruang. Indikator kinerja program rata-rata capaian targetnya sebesar 89,77% (akan tercapai) dimana capaian kinerja dibawah target yaitu persentase ketersediaan SDM bidang PM dan perizinan yang terlatih (44,19%) sehingga memerlukan upaya keras. Faktor penghambat pada persentase ketersediaan SDM di bidang PM



dan perizinan yang terlatih yaitu SDM di DPM belum memiliki standar teknis pelayanan dan belum semua SDM di akomodir BKPSDM selaku pembina kepegawaian.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan 2 indikator kinerja sasaran dan 5 indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.359
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2021

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisa si 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap
						Target	Realis asi sd TW IV			
1	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	3,56	3,57	3,50	3,57	100	100	●
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)		3,41	n.a	3,00	3,31	100	97,06	▲
RATA-RATA								100	98,53	▲
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	80,76	96,43	73,00	93,10	100	100	●
2	Program pembinaan dan pemyarakatan olahraga	Prosentase pelatih olahraga bersertifikat	%	35,40	56,06	33,60	56,06	100	100	●
		Persentase prestasi olah raga	%	59,00	54,29	53,80	10,81	20,09	18,32	▼
		Persentase atlet berprestasi	%	21,00	63,66	19,00	23,28	100	100	●
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif	%	92,89	n.a	87,31	80,61	92,33	86,79	▲
RATA-RATA								82,49	81,02	▲

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021 data diolah.

Capaian kinerja urusan kepemudaan dan olah raga pada indikator sasaran tahun 2021 rata-rata capaian dengan status Akan Tercapai (98,50%) sedangkan rata-rata capaian indikator program dengan status Telah Tercapai (81,02%). Meskipun demikian, masih ada 1 indikator dengan status Upaya Keras pada indikator persentase prestasi olahraga dikarenakan kurang maksimalnya pelaksanaan perlombaan sebagai dampak adanya pandemi covid-19 sehingga pelaksanaan perlombaan dilaksanakan secara online, dimana dari 20 yang mengikuti perlombaan terdapat 4 cabang olahraga yang berhasil menyumbangkan prestasi baik tingkat Provinsi maupun Nasional.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang Statistik diimplementasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan 1 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.360
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2021

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD Tahun 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1.	Program Penyeleng garaan Statistik Sektoral	Cakupan ketersedia an data makro daerah	%	100	100	100	66,67	66,67	66,67	▲
Rata - rata								66,67	66,67	▲

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021 data diolah

Kinerja program melalui capaian cakupan ketersediaan data makro daerah dengan memperoleh capaian sebesar 66,67% (akan tercapai). Hal tersebut dapat didorong melalui sinergitas kerjasama Dinkominfo dan BPS Kabupaten Temanggung serta ketersediaan data di tiap OPD mengingat beberapa data statistik yang terkumpul tidak tepat waktu karena ada perubahan rekonsiliasi dari provinsi sementara OPD tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pendataan secara mandiri (menunggu dari BPS).

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang Persandian diimplementasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan 1 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.361
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2021

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD Tahun 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d. TW IV			
1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan	Tingkat penilaian persiapan/ pengelolaan resiko keamanan informasi	%	19,5	10,29	12,5	20,59	100	100	
RATA-RATA								100	100	

Sumber: BAPPEDA Temanggung, 2021 data diolah

Kinerja program dapat dikatakan relatif baik dikarenakan realisasi pada tahun 2021 melebihi target yang ditetapkan sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 100%. Tingkat penilaian persiapan/pengelolaan resiko keamanan informasi didukung oleh adanya kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara serta Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah yang bersedia melakukan assessment keamanan informasi di Kabupaten Temanggung.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Kinerja penyelenggaran pelayanan umum Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan diimplementasikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan 1 Indikator kinerja Sasaran dan 4 indikator kinerja program daerah berikut:

Tabel 2.362
Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan
Bidang Kebudayaan Tahun 2021

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisa si 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Statu s Cap
						Target	Realisasi s.d tw IV			
1	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	%	3,51	n.a	3,31	3,31	100	94,30	▲
RATA-RATA								100	94,30	▲
1	Program pengelolaan kebudayaan	Persentase kelompok Budaya yang produktif	%	3,51	n.a	64,51	125,61	100	100	●
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kelompok kesenian yang produktif	%	32,16	18,63	20,02	28,98	100	90,11	▲
3	Program Pembinaan Sejarah	Persentase pelestarian Sejarah Lokal	%	6,73	2,64	4,04	2,64	65,43	39,27	▼
4	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	%	5,18	3,63	4,15	3,63	87,40	70,02	▲
RATA-RATA								88,21	74,85	▲

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021 data diolah.

Target indikator kinerja sasaran urusan kebudayaan akan tercapai pada tahun 2021 (94,30%). Sedangkan kinerja pada indikator kinerja program rata-rata capainnya 88,21 %. Capaian kinerja tersebut masih terdapat 1 indikator dengan upaya keras yaitu persentase pelestarian sejarah lokal dikarenakan belum tergalinya dan terdokumentasinya sejarah lokal di Temanggung, serta makin berkurangnya narasumber yang menggali sejarah lokal. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu ada upaya untuk meningkatkan pengembangan, perlindungan dan pemanfaatan sejarah lokal sebagai upaya pelestarian, mendokumentasikan sejarah lokal dalam bentuk buku/video serta diseminasi informasi sejarah lokal kepada generasi penerus.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan diimplementasikan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 3 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.363
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2021

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d tw IV			
1	Meningkat nya budaya literasi masyarak at	Persentase peminjam di perpustak aan	%	82	78,88	78	75,38	96,64	91,93	▲
RATA-RATA								96,64	91,93	▲
1	Program pengelolaa n dan pengemban gan perpustak aan	Persentase pertumbu han jumlah pengunju ng perpustak aan	%	40	(6,51)	30	(79,20)	0	0	▼
		Persentase perpustak aan yang aktif	%	35,62	39,41	35,08	39,45	100	100	●
		Cakupan naskah kuno Kabupaten Temanggu ng dan koleksi nasional yang dilestarikan	%	100	0	50	0,039	0,077	0,039	▼
RATA-RATA								50,00	33,35	▼

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021 data diolah.

Kinerja urusan perpustakaan pada indikator sasaran tahun 2021 sebesar 91,93% dengan status Akan Tercapai. Sedangkan

indikator program dengan rata-rata capaian 33,35 % dengan status Upaya Keras diantaranya persentase pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan serta cakupan naskah kuno Kabupaten Temanggung dan koleksi nasional yang dilestarikan, hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan menurunnya pengunjung perpustakaan di desa/kelurahan, sekolah, TBM dan Perpustakaan daerah.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Kinerja penyelenggaran pemerintah daerah Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan diimplementasikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan 1 indikator sasaran dan 2 indikator, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.364
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2021

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realis asi 2020	2021		Cap. RKPD Tahun 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realis asi s.d TW IV			
1	Meningkat nya kualitas manajeme n pemerinta han	Indeks Manajeme n Kearsipan	Angk a	67	65,44	66	54,02	81,85	80,63	▲
Rata - Rata								81,85	80,63	▲
1	Program pengelolaa n dan pelestaria n arsip daerah	Persentase Pengelolaa n Arsip Secara Baku	%	31,98	30,52	26,16	32,55	100	100	●
		Persentase arsip vital konvensio nal yang dialihmedi akan	%	50	10	30	30,02	100	60,04	▲
RATA-RATA								100	80,02	▲

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2021 data diolah

Capaian indeks manajemen kearsipan pada tahun 2021 sebesar 80,63% (akan tercapai), perlu untuk ditingkatkan dengan terus melakukan pembinaan dan pembenahan kearsipan pada OPD di Kabupaten Temanggung sehingga indikator kinerja sasaran urusan pemerintahan bidang kearsipan dapat tercapai sesuai target. Kinerja

program perlu ditingkatkan kembali (rata-rata capaian sebesar 80,02%). Indikator yang masih perlu ditingkatkan adalah persentase arsip vital konvensional yang dialihmediakan supaya dapat mencapai target dengan pemenuhan sarana prasana agar arsip yang dialihmediakan bisa menjangkau juga sampai tingkat desa.

2.2.4 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Pilihan

Evaluasi kinerja urusan pemerintahan pilihan antara lain:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Kinerja penyelenggaran pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang perikanan diimplementasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan melalui 1 indikator kinerja sasaran dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.365
Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

No	Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RPKD 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap
						Target	Realisasi s.d tw IV			
1		Tingkat konsumsi ikan	kg/kap/th	21,34	23,34	21,23	24,34	100	100	●
RATA - RATA								100	100	●
1.	Program pengelolaan perikanan budidaya	Produktivitas Ikan Nila	Kg/m ²	6,20	3,820	4,70	4,05	86,09	65,26	▲
		Produktivitas Ikan Lele	Kg/m ²	13,8	10,52	11,5	10,76	93,55	77,96	▲
		Produktivitas Ikan Mas	Kg/m ²	6	5,5	5,7	5,62	98,59	93,66	▲
2.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase nelayan perairan umum yang terbina	%	30	n.a	10	12,48	100	41,59	▼
3.	Program pengawasan sumber daya kelautan dan Perikanan	Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	%	33	n.a	33	222,22	100	100	●
3.	Program	Persentase	%	100	n.a	100	100	100		●

No	Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap
						Target	Realisasi s.d tw IV			
	pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	tersedia data dan informasi produksi olahan hasil perikanan							100	
RATA-RATA								98,19	79,74	△

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021 data diolah.

Berdasarkan tabel diatas sampai dengan tahun 2021, indikator kinerja sasaran berupa tingkat konsumsi ikan melebihi target yang ditetapkan, hal ini didorong oleh meningkatnya ketersediaan ikan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan. Sedangkan rata-rata capaian indikator kinerja program sebesar 89,87% (akan tercapai). Indikator persentase nelayan perairan umum yang terbina masuk ke dalam kategori upaya keras, hal ini dikarenakan tidak adanya anggaran khusus untuk sosialisasi dimaksud dan hanya bisa dilaksanakan pada saat penebaran benih ikan di perairan umum.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Kinerja penyelenggaraan pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang pariwisata diimplementasikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui 1 indikator kinerja sasaran dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja berikut ini

Tabel 2.366

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2021

No	Sasaran/program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap
						Target	Realisasi s.d tw IV			
1		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	1,65	0,50	1,62	1,53	94,44	92,73	△
RATA-RATA								94,44	92,73	△
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase obyek wisata yang berkembang	%	41,66	30,56	33,33	31,29	93,75	77,51	△
		Pertumbuhan jumlah	%	21	0,13	19	0	0	0	▽

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisa si 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap
						Target	Realisa si s.d tw IV			
		wisatawan								
		Lama tinggal wisatawan	%	1	1	1	1	100	100	●
2	Program Pengemba ngan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkata n desa wisata	%	11,76	6,57	8,30	7,27	87,55	61,79	▲
		Persentase desa wisata naik klasifikasi	%	5	89,47	5	0,00	0,00	0,00	▼
		Persentase Peningkata n Pelaku Ekonomi Kreatif	%	9,02	na	7,51	7	93,21	77,61	▲
Rata-Rata								62,94	52,82	▼

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021 data diolah.

Capaian kinerja sasaran maupun capaian kinerja program sebagaimana tabel diatas, pada tahun 2021, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran sebesar 92,73% (akan tercapai).

Secara tahunan, rata-rata capaian indikator kinerja program sebesar 52,82% (upaya keras) dengan rincian terdapat 1 indikator kinerja program yang telah mencapai target yaitu lama tinggal wisatawan, 3 (tiga) indikator akan mencapai target, serta 2 indikator pertumbuhan jumlah wisatawan (0%) dan persentase desa wisata naik klasifikasi (0%). Upaya keras dimaksud disebabkan oleh belum tersedianya sarana prasarana yang memadai di destinasi serta dinamika kebijakan seperti pembatasan kegiatan masyarakat sehingga menjadikan capaian pertumbuhan jumlah wisatawan 0%, sedangkan persentase desa wisata naik klasifikasi dikarenakan oleh mekanisme assessment desa wisata dilakukan setiap 4 tahun sekali sesuai perundang-undangan yang mengakibatkan jumlah desa wisata naik klasifikasi hanya 4 tahun sekali.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pertanian diimplementasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan



Perikanan dengan 3 indikator kinerja sasaran dan 23 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.367
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2021

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisa si 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap
						Target	Realisasi s.d tw IV			
1		Tingkat ketersediaan energi perkapita		2935	2271	2925	2934	100	99,97	▲
		Tingkat ketersediaan protein perkapita		103,8	124,99	103,4	62,59	60,53	60,53	▼
		Tingkat ketersediaan lemak perkapita		37,50	n.a	37	78,97	100	100	●
RATA - RATA								86,84	86,84	▲
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produktivitas Padi	kwin tal/ha	63,3	59	63	59	93,65	93,20	▲
		Peningkatan Produktivitas Jagung	kwin tal/ha	46	49	45,85	45	98,15	97,83	▲
		Peningkatan Produktivitas Ubi Kayu	kwin tal/ha	339,8	329,12	339,6	329,12	96,91	96,86	▲
		Produktivitas bawang putih	kwin tal/ha	79,6	65,84	79,35	65,1	82,02	81,77	▲
		Produktivitas bawang merah	kwin tal/ha	80,15	73,60	79,95	71,40	89,30	89,30	▲
		Produktivitas cabai rawit	kwin tal/ha	55,00	69,97	54,85	69,87	100	100	●
		Produktivitas cabai besar	kwin tal/ha	69,5	72,10	69,35	70,57	100	100	●
		Prokduktivitas tembakau	kwin tal/ha	6,8	6,78	6,7	6,88	100	100	●
		Produktivitas kopi robusta	kwin tal/ha	7,25	6,79	7,1	7,15	100	98,62	▲
		Produktivitas kopi arabika	kwin tal/ha	7	6,20	6,8	6,11	89,85	87,29	▲
		Produktifitas Cengkeh	kwin tal/ha	2,45	3,025	2,25	2,32	100	94,69	▲
		Produktivitas Vanili	kwin tal/ha	2,95	2,09	2,9	2,93	100	99,32	▲
		Produktivitas ternak	Kg/Ekor	177,60	176,95	177,2	177,20	100	99,77	▲



No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisa si 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap
						Target	Realisasi s.d tw IV			
		sapi								
		Produktivita s ternak domba	Kg/ Ekor	13,71	13,68	13,39	13,69	100	99,85	▲
		Produktivita s ternak kambing	Kg/ Ekor	13,71	13,68	13,69	13,69	100	99,86	▲
		Produktivita s ternak ayam ras pedaging	Kg/ Ekor	0,75	0,75	0,75	0,75	100	100	●
		Produktivita s ternak ayam ras petelur	Kg/ Ekor	10,88	10,88	10,88	10,26	94,30	94,30	▲
		Produktivita s ternak ayam buraas	Kg/ Ekor	0,7	0,70	0,7	0,70	100	100	●
2.	Program Penyediaan dan Pengemba ngan Prasarana Pertanian	Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	%	76,55	n.a	76,45	76,64	100	100	●
3.	Program Pengendali an Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penanganan penyakit hewan	%	90	n.a	85	96,68	100	100	●
		Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	70	n.a	65	82,96	100	100	●
4.	Program Pengendali an dan Penanggul angan Bencana Pertanian	Persentase pengendalia n bencana pertanian	%	40,30	0	40,20	41,20	100	100	●
5.	Program Penyuluha n Pertanian	Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	0,98	0,678	0,78	0,81	100	82,87	▲
RATA-RATA								97,57	96,32	▲

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2021 data diolah.



Capaian kinerja pada indikator kinerja sasaran sebesar 86,84% (akan tercapai). Sementara itu masih terdapat 1 indikator yang memerlukan upaya keras yaitu tingkat ketersediaan protein per kapita yang disebabkan oleh tingkat produksi bahan pangan sumber protein yang dipengaruhi oleh iklim budaya masyarakat dan pola konsumsi. Hal ini perlu adanya peningkatan produksi bahan pangan sumber protein yang beragam melalui pengembangan sumber daya lokal yaitu pangan lokal yang menjadi sumber protein dengan optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai penyedia sumber pangan rumah tangga.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian indikator kinerja program 96,32% (akan tercapai), dimana 10 indikator telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2021 dan 14 (empat belas) indikator dengan status akan tercapai.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang perdagangan diimplementasikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 7 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.368
Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang
Perdagangan Tahun 2021

No	Program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap
						Target	Realisasi s.d tw IV			
1.		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	20	20,14	19	20,14	100	100	●
Rata - Rata								100	100	●
1.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik	%	67	50	50	50	100	74,63	▲

No	Program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap
						Target	Realisasi s.d t w IV			
n		Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	%	70	29,12	50	29,59	59,17	42,27	▼
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	%	90	98,71	85	64,45	75,83	71,61	▲
		Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	%	34	18,46	30	13,17	43,89	38,73	▼
2.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi	%	68,41	66,30	68,42	69,32	100	100	●
3.	Program Pengembangan ekspor	Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB Sektor Perdagangan	%	2,56	20,42	2,21	10,40	100	100	●
4.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang di tera ulang	u n i t	95	39,90	85	79,02	92,96	83,18	▲
Rata-Rata								81,69	72,92	▲

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021 data diolah

Capaian kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada indikator kinerja sasaran dapat melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2021, sehingga rata-rata capaiannya 100%. Sedangkan rata-rata capaian indikator kinerja program baru mencapai 72,92% (akan tercapai) dimana terdapat 2 indikator yang capaian kerjanya memerlukan upaya keras. Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan perlu upaya keras untuk mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh tidak lakunya jenis usaha nya sehingga pedagang mengganti jenis usaha nya di lokasi yang sama, zonasi pedagang pasar baru dilaksanakan di beberapa pasar saja, dan



terdapat pedagang yang membeli/meneruskan los akan tetapi tidak bisa berjualan sesuai zonasi. Upaya keras lainnya, pada persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukannya yang disebabkan oleh sarana prasarana kurang mendukung misalnya lampu penerangan dan kurangnya daya tarik pembeli karena lokasi tidak strategis (misalnya di Taman Pengayoman).

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Kinerja penyelenggaraan pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang perindustrian diimplementasikan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 2 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.369
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2021

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap
						Target	Realisasi s.d tw IV			
1	Meningkatnya investasi sektor riil	Kontribusi sektor perindustrian Terhadap PDRB	%	27	27,47	25	100	100	100	●
Rata-Rata								100	100	●
1.	Program Perencanaan dan Pengembangan Industri	Persentase IKM industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	35	n.a	32	18,46	57,69	52,75	▼
2.	Program Pengembangan ijin usaha industri Kab/Kota	Prosentase pembinaan industri penghasil cukai	%	5,3	na	3,18	2,09	65,88	39,53	▼
Rata-Rata								61,79	46,14	▼

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021 data diolah

Pada urusan pemerintahan bidang perindustrian, capaian indikator kinerja sasaran kontribusi sektor perindustrian terhadap

PDRB jauh melebihi target yang ditetapkan di tahun 2021 (capaian 100%). Sedangkan 2 indikator kinerja program tidak mencapai target yaitu persentase IKM industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah dan prosentase pembinaan industri penghasil cukai sehingga memerlukan upaya keras (rata-rata capaian 46,14%). Permasalahan terbatasnya anggaran yang tidak mencukupi untuk pelaksanaan pembinaan pada IKM di 9 komoditas unggulan (hanya bisa dilakukan di 4 komoditas unggulan) menjadikan realisasi persentase IKM industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah dibawah target yang ditetapkan. Sementara itu, rendahnya capaian prosentase pembinaan industri penghasil cukai disebabkan oleh terbatasnya jumlah industri penghasil tembakau di Kabupaten Temanggung (3 unit) dimana sebagian besar IKM tembakau (lembutan) belum bisa dijadikan penghasil cukai.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi diimplementasikan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melalui 1 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.370
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Tahun 2021

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap
						Target	Realisasi s.d tw IV			
1	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase calon transmigran yang mendapatkan pembekalan	%	100	100	100	100	100	100	●
Rata - rata								100	100	●

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021 data diolah

Kinerja program urusan pemerintahan bidang transmigrasi dapat dikatakan relatif baik dikarenakan capaian indikator kinerja program pada persentase calon transmigran yang mendapatkan pembekalan sebesar 100%. Hal ini berarti calon transmigran yang

akan ditempatkan mendapatkan pembekalan sehingga tidak mengundurkan diri.

2.2.5 Evaluasi Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Evaluasi kinerja unsur pendukung urusan pemerintahan antara lain:

1. Fungsi Sekretariat Daerah

Kinerja penyelenggaraan pelayanan umum urusan pemerintahan fungsi Sekretariat Daerah diimplementasikan oleh Sekretariat Daerah dengan 2 indikator kinerja sasaran dan 21 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.371

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2021

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD Tahun 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkat nya kualitas manajeme n pemerinta han	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintah Daerah (EKPPD)	Ang ka	3,5	3,35	3,40	3,35	98,53	95,71	▲
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	%	25	0	10	50	100	100	●
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	-	BB	B	B	B	100	88,60	▲
RATA-RATA								99,51	94,77	▲
1	Program pemerinta han dan kesejahter aan rakyat	Cakupan pilar batas yang terinventarisir	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	●
		Cakupan kecamatan tertib administrasi	%	100	95	100	100	100	100	●
		Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan	%	90	89	86	89,31	100	98,89	●



No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD Tahun 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		keagamaan kondisi baik								
		Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	%	30	16	30	27,27	90,91	90,91	▲
		Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	100	59,78	100	82,22	82,22	82,22	▲
		Presentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	%	90	100	90	100	100	100	●
		Persentase permasalahan hukum yang ditangani secara litigasi	%	75	100	75	100	100	100	●
2	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100	85,52	100	100	100	100	●
		Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	80	50	50	50	100	62,50	▲
		Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	●
3	Program pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah	persentase pengadaan barang/jasa yang berhasil dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan	%	100	30,07	100	100	100	100	●
		persentase kegiatan Perangkat Daerah yang	%	100	0	10	18,13	100	18,13	▼

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD Tahun 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		melakukan pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa								
		Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	%	95	100	90	96,50	100	100	●
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LKjIP		74,5	58,70	64,57	100	100	100	●
		Persentase pemenuhan Pelayanan kedinasan pimpinan Daerah	%	100	n.a	100	100	100	100	●
RATA-RATA								98,72	94,58	▲

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021 data diolah

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran 94,77% (akan tercapai), terdapat 1 indikator yang jauh melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu Indeks tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa yang didorong oleh penambahan formasi JF PBJ dengan terus dapat memenuhi syarat administrasi untuk penambahan nilai kematangan. Sementara itu, rata-rata ketercapaian indikator kinerja



program 92,98%, terdapat 1 indikator yang memerlukan upaya keras yaitu persentase kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Hal ini dikarenakan keterbatasan personil PPK untuk melakukan pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

2. Fungsi Sekretariat DPRD

Kinerja penyelenggaraan pelayanan umum fungsi Sekretariat DPRD yang diimplementasikan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 3 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana berikut:

Tabel 2.372
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan
Pemerintahan Sekretariat DPRD Tahun 2021

No	Sasaran /Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPDP Tahun 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan	Persentase RAPER DA yang disahkan tepat waktu	%	91,50	90,48	90,50	80	88,40	87,47	▲
RATA-RATA								88,40	87,47	▲
1	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda	%	26,67	14,29	26,67	10	37,50	37,50	▼
		Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	58	78,86	56	82,16	100	100	●
RATA-RATA								79,17	79,17	▲

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021 data diolah.

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran pada fungsi sekretariat DPRD sebesar 87,47% (akan tercapai) terkait persentase pengesahan raperda tepat waktu, sehingga penting bagi Perangkat Daerah untuk lebih awal dalam menyusun Raperda yang masuk dalam judul Raperda Propempera (N-1).

Kinerja penyelenggaraan program mencapai 79,17% (akan tercapai), masih terdapat 1 indikator yang masih perlu upaya keras yaitu persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah Raperda. Permasalahan yang terjadi yaitu proses fasilitasi di lembaga yang menangani bidang hukum sehingga perlu ada koordinasi secara intensif bersama stakeholder terkait.

2.2.6 Evaluasi Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Evaluasi kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan antara lain:

1. Perencanaan

Kinerja penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan pembangunan diimplementasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan 4 indikator kinerja sasaran, dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.373
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Perencanaan Tahun 2021

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD Tahun 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	%	4,2	n.a	4	4,5	100	100	●
		Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	%	90	84,57	88	84,57	96,10	93,96	▲

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD Tahun 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		Managem en Risiko Indeks	Level	Level 2	Level 1	Level 2	Level 2	100	100	●
		Indeks Inovasi Daerah	predik at	Sangat inovatif	Sangat Inovatif	Sangat inovatif	Inovatif	75	75	▲
Rata-Rata								92,77	92,17	▲
1	Program perencanaan, evaluasi, dan informasi pembangan daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangan daerah yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangan daerah tepat waktu	%	95	84,18	85	87,22	100	91,81	●
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pembangan manusia	%	90	n.a	90	100	100	100	●
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah	%	90	n.a	90	100	100	100	●

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD Tahun 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		sub bidang pemerint ahan dan kesejahte raan rakyat								
		Tingkat konsisten si kegiatan rencana kerja perangka t daerah terhadap renstra perangka t daerah sub bidang ekonomi	%	90	n.a	90	100	100	100	●
		Tingkat konsisten si kegiatan rencana kerja perangka t daerah terhadap renstra perangka t daerah sub bidang infrastru ktur	%	90	n.a	90	100	100	100	●
RATA-RATA								100	98,63	●

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021 data diolah.

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran sebesar 92,77% dimana terdapat 1 indikator yang pencapaiannya melebihi target yang ditetapkan di tahun 2021 yaitu indeks perencanaan pembangunan daerah. Kinerja program fungsi penunjang perencanaan relatif baik, terbukti seluruh indikator kinerja program yang terdiri dari 6 (enam) indikator capaiannya sesuai dengan target. Hal ini didorong oleh komitmen Perangkat Daerah, fasilitasi dan pendampingan secara intensif yang dilakukan verifikator BAPPEDA dan telah terintegrasinya *e-planning* dan *e-budgeting* serta komitmen daerah

dalam menjaga konsistensi perencanaan s.d. penganggaran. Perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung dengan mempertimbangkan kebijakan nasional dan provinsi sehingga penunjang perencanaan dapat terlaksana dengan baik.

2. Keuangan

Kinerja penyelenggaran Fungsi penunjang keuangan diimplementasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan 2 indikator kinerja sasaran, dan 14 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.374
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Keuangan
Tahun 2021

No	Sasaran / program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD Tahun 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan	%	15	16,79	15	18,67	100	100	●
		Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)		79,5	69,52	79,3	69,52	87,68	87,46	▲
RATA-RATA								93,84	93,73	▲
1.	Program pengelolaan Keuangan daerah (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	100	96,49	100	99,77	99,77	99,77	▲
		Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%	89,96	100	89,96	100	100	100	●
		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	85,71	100	100	100	100	●

No	Sasaran / program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPd Tahun 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase realisasi keuangan	%	93	93,68	93	89	95,70	95,70	▲
		Cakupan Laporan keuangan daerah yang akuntabel	%	90	85,11	90	89,13	99,03	99,03	▲
		Opini BPK atas LKPD	%	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	●
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	88,1	81,55	84,52	84,52	100	95,94	●
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	99,1	78,75	98,7	78,83	79,87	79,55	▲
3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	1,27	1,053	0,72	0,70	97,22	55,12	▼
		Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	95	100	90	103,54	100	100	●

No	Sasaran / program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD Tahun 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	95	100	95	100	100	100	●
RATA-RATA								97,97	94,65	▲

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021 data diolah

Dalam rangka penyelenggaraan kinerja keuangan daerah, capaian Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan pada tahun 2021 melebihi target yang ditetapkan, hal ini didorong oleh mulai bergeliatnya usaha lokal penyumbang PAD yang diharapkan dapat mengalami peningkatan yang signifikan. Sementara itu indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) masih belum dapat mencapai target dan perlu adanya tindak lanjut untuk koordinasi perhitungan IPKD dengan provinsi. Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran dimaksud sebesar 93,73% (akan tercapai). Berdasarkan indikator kinerja program yang telah tercapai dengan rata-rata capaian 94,65% (akan tercapai), masih terdapat 1 indikator yang masih memerlukan upaya keras yaitu persentase peningkatan data jumlah obyek pajak yang dikarenakan pelaksanaan kegiatan pendataan massal SISMIOP objek dan subjek PBB-P2 yang menyumbangkan kenaikan objek pajak tersebar dibutuhkan anggaran yang lumayan besar untuk kegiatan tersebut.

3. Kepegawaian

Kinerja penyelenggaraan kepegawaian diimplementasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan 2 indikator kinerja sasaran dan 9 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel:

Tabel 2.375
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Kepegawaian Tahun 2021

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD Tahun 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkatnya	Indeks Profesionalita	Angka	50,09	50,03	50,05	51,24	100	100	●



No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD Tahun 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
	kualitas manajemen pemerintahan	sme ASN								
		<i>Indeks Merit System</i>	Angka	0,61	0	0,41	0,259	63,17	42,46	▼
Rata-rata								81,59	71,23	▲
1	Program Kepegawaian Daerah	Persentase penyusunan formasi pegawai	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	%	80	76,38	80	90,33	100	100	●
		Persentase Perempuan pada Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	%	48	46,79	47	46,96	99,93	97,84	▲
		<i>Persentase pelanggaran disiplin ASN</i>	%	0,2	0,25	0,3	0,25	100	100	●
		Persentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN	%	90	100	90	86,67	96,30	96,30	▲
		Persentase pelaksanaan updating data kepegawaian	%	95	100	90	100	100	100	●

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD Tahun 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		Persentase penyelesaian pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional	%	100	n.a	100	100	100	100	●
RATA-RATA								99,58	99,35	▲

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021 data diolah

Indeks Profesionalitas (IP) ASN realisasinya melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2021, didorong oleh update data kepegawaian yang dilakukan oleh pengelola kepegawaian di Perangkat Daerah dan meningkatnya jumlah responden/PNS yang mengisi data IP serta keikutsertaan ASN mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara mandiri. Sementara itu, masih ada upaya keras dalam pencapaian target Indeks Merit System dimana belum adanya kebijakan internal yang mengatur beberapa aspek dalam sistem merit dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia pelaksana manajemen PNS. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung menggunakan sistem merit dalam pengelolaan manajemen PNS maka perlu ada kerja sama dan komitmen baik dalam internal BKPSDM maupun dengan instansi terkait penerapan sistem merit. Oleh karena itu, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran dalam status akan tercapai (71,23%). Kinerja penyelenggaraan program memiliki rata-rata ketercapaian 99,35% (akan tercapai), dengan 7 indikator telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2021 dan 1 indikator masih berada dibawah target capaian meskipun tidak terlalu jauh.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diimplementasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan 2 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.376
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD Tahun 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Program Pengemban- gan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administra- si, dan Pejabat Pengawas yang memiliki Kompetensi Diklat Kepemimpi- nan	%	35	27,08	29,69	25,08	84,47	71,66	▲
		Persentase ASN yang memiliki kompetensi Teknis dan Fungsional sesuai jabatannya	%	18	7,36	9	14,57	100	80,94	●
RATA-RATA								92,24	76,30	▲




Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021 data diolah

Berkaitan dengan evaluasi kinerja di bidang pendidikan pelatihan, masih perlu peningkatan untuk kompetensi diklat kepemimpinan maupun kompetensi diklat teknis dan fungsional sesuai jabatannya. Oleh karena itu, capaian kinerja indikator program bidang pendidikan dan pelatihan berada pada 76,30% (akan tercapai).

5. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja penyelenggaran Fungsi penunjang penelitian dan pengembangan diimplementasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan 2 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.377
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat. .	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD Tahun 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1.	Program penelitian dan pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentase hasil kreasi dan inovasi yang dikembangkan	%	65	100	55	100	100	100	
RATA-RATA								100	100	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

Kinerja penyelenggaraan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan bahwa seluruh indikator kinerja program dapat dicapai sesuai target tahun 2021. Hal ini didorong dengan komitmen stakeholder dalam memanfaatkan hasil kelitbangan dan dukungan pemerintah dari lingkup kabupaten sampai dengan pusat dalam mendorong pengembangan hasil krenova. Beberapa tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk dapat mempertahankan kinerja yang baik diantaranya memanfaatkan rekomendasi hasil kelitbangan sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan secara maksimal dan mendorong lahirnya inovasi baru dengan diseminasi informasi inovasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

2.2.7 Evaluasi Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Kinerja pengawasan diimplementasikan oleh Inspektorat dengan 1 satu indikator kinerja sasaran dan 9 indikator kinerja program daerah, dengan capaian kinerja tertuang pada tabel:

Tabel 2.378
Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Tahun 2021

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD Tahun 2021	Cap. RPJMD Tahun s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Angka	3,95	3,92	3,93	3,61	91,86	91,39	▲
RATA-RATA								91,86	91,39	▲
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	%	100	100	100	100	100	100	●
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	46	n.a	35	35,21	100	76,55	●
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	23	n.a	10	12,37	100	53,76	▼
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa,	%	48	n.a	15	15,46	100	32,20	▼

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD Tahun 2021	Cap. RPJMD Tahun s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa								
2	Program Perumus an Kebijakan , Pendampi ngan Dan Asistensi	Nilai maturitas SPIP	An gk a	3,3	3,045	3,15	3,045	96,67	92,27	▲
Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) / Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)		%	60	n.a	20	40	100		●	
Persentase tindak lanjut aduan Whistle blowing, Benturan Kepentinga n, dan Unit Pengendalian Gratifikasi		%	100	n.a	100	100	100	67	▲	
Nilai Survey Penilaian Integritas		An gk a	81,97	n.a	81,57	78,70	96,48	96,01	▲	
Prosentase penanganan aduan masyarakat		%	100	n.a	100	100	100	100	●	
RATA-RATA								99,14	77,18	▲

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021 data diolah

Indikator kinerja sasaran berupa indeks persepsi anti korupsi (IPAK) memiliki rata-rata capaian sebesar 91,39%, perlu ditindaklanjuti dengan melaksanakan penyusunan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi serta penguatan regulasi dan kelembagaan pencegahan korupsi, serta perbaikan tata Kelola birokrasi yang



transparan dan bebas korupsi. Kinerja penyelenggaraan program terdapat 1 indikator yang memerlukan upaya keras yaitu Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa yang disebabkan oleh belum sepenuhnya auditor telah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa, keterbatasan jumlah personil dan belum semuanya dapat dilakukan pengawasan. Sehingga, rata-rata capaian indikator kinerja program pada fungsi pengawasan sebesar 77,18%.




2.2.8 Evaluasi Kinerja Unsur Kewilayahan

Capaian Kinerja Penyelenggaran Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi Kecamatan diimplementasikan Kecamatan dengan 1 indikator sasaran kinerja daerah dan 9 indikator kinerja program daerah, dengan capaian kinerja berikut:

Tabel 2.379

Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Fungsi Kecamatan Tahun 2021

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD Tahun 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata IKM di Kecamatan	%	84,00	82,34	83,00	83,24	100	97,73	●
		1. Temanggung	%	84,00	82,58	83,00	85,20	100	100	
		2. Tembarak	%	84,00	84,83	83,00	85,75	100	100	
		3. Pringsurat	%	84,00	82	83,00	77,27	93,10	91,99	
		4. Kaloran	%	84,00	81,08	83,00	71,59	86,25	85,23	
		5. Parakan	%	84,00	85,97	83,00	81,02	97,61	96,45	
		6. Bulu	%	84,00	82,53	83,00	84,9	100	100	
		7. Kedu	%	84,00	83	83,00	88,39	100	100	
		8. Kandangan	%	84,00	85,97	83,00	83,87	100	99,85	
		9. Candiroto	%	84,00	81,25	83,00	87,38	100	100	
		10. Ngadirejo	%	84,00	81,08	83,00	88,41	100	100	
		11. Jumo	%	84,00	90,52	83,00	90,52	100	100	
		12. Wonoboyo	%	84,00	84,19	83,00	84,22	100	100	
		13. Kranggan	%	84,00	71,83	83,00	83,07	100	98,89	
		14. Bejen	%	84,00	78,19	83,00	84,08	100	100	
		15. Kledung	%	84,00	79,53	83,00	81,46	98,14	96,98	
		16. Bansari	%	84,00	82,95	83,00	79,67	95,98	94,85	


No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD Tahun 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		17. Tlogomulyo	%	84,00	83,06	83,00	80,96	97,54	96,38	
		18. Selopampang	%	84,00	82,41	83,00	80,71	97,24	96,08	
		19. Gemawang	%	84,00	81,5	83,00	82,33	99,19	98,01	
		20. Tretep	%	84,00	n.a	83,00	83,99	100	99,99	
Rata - Rata						83,00	83,24	100	97,73	
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	%	100	93,35	100	98,32	98,32	98,32	
		1. Temanggung		100	96,87	100	99,91	99,91	99,91	
		2. Tembarak		100	99,34	100	99,56	99,56	99,56	
		3. Pringsurat		100	95,63	100	99,72	99,72	99,72	
		4. Kaloran		100	99,34	100	98,12	98,12	98,12	
		5. Parakan		100	99,81	100	99,76	99,76	99,76	
		6. Bulu		100	96,29	100	99,86	99,86	99,86	
		7. Kedu		100	99,41	100	99,68	99,68	99,68	
		8. Kandangan		100	95,31	100	99,76	99,76	99,76	
		9. Candiroto		100	96,66	100	99,79	99,79	99,79	
		10. Ngadirejo		100	97,50	100	99,76	99,76	99,76	
		11. Jumo		100	99,39	100	99,62	99,62	99,62	
		12. Wonobojo		100	99,24	100	99,57	99,57	99,57	
		13. Kranggan		100	100	100	99,70	99,70	99,70	
		14. Bejen		100	99,38	100	99,48	99,48	99,48	
		15. Kledung		100	96,94	100	97,10	97,10	97,10	
		16. Bansari		100	99,70	100	99,78	99,78	99,78	
		17. Tlogomulyo		100	96,01	100	99,62	99,62	99,62	
		18. Selopampang		100	96,83	100	99,61	99,61	99,61	
		19. Gemawang		100	99,21	100	99,60	99,60	99,60	
		20. Tretep		100	99,24	100	76,39	76,39	76,39	
2.		Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	93,78	100	97,95	97,95	97,95	
		1. Temanggung		100	93,89	100	93,44	93,44	93,44	
		2. Tembarak		100	100	100	100	100	100	
		3. Pringsurat		100	96,98	100	92,38	92,38	92,38	
		4. Kaloran		100	100	100	79,21	79,21	79,21	
		5. Parakan		100	91,49	100	97,88	97,88	97,88	
		6. Bulu		100	100	100	100	100	100	

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD Tahun 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		7. Kedu		100	97,32	100	100	100	100	
		8. Kandangan		100	100	100	99,10	99,10	99,10	
		9. Candirototo		100	100	100	100	100	100	
		10. Ngadirejo		100	93,97	100	100	100	100	
		11. Jumo		100	100	100	100	100	100	
		12. Wonobooyo		100	100	100	100	100	100	
		13. Kranggan		100	95,63	100	96,93	96,93	96,93	
		14. Bejen		100	100	100	100	100	100	
		15. Kledung		100	100	100	100	100	100	
		16. Bansari		100	100	100	100	100	100	
		17. Tlogomulyo		100	100	100	100	100	100	
		18. Selopampang		100	100	100	100	100	100	
		19. Gemawang		100	100	100	100	100	100	
		20. Tretep		100	100	100	100	100	100	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP- Desa tepat waktu	%	100	90,95	100	93,84	93,84	93,84	▲
		1. Temanggung		100	100	100	100	100	100	
		2. Tembarak		100	84,62	100	100	100	100	
		3. Pringsurat		100	100	100	100	100	100	
		4. Kaloran		100	100	100	92,86	92,86	92,86	
		5. Parakan		100	100	100	100	100	100	
		6. Bulu		100	100	100	100	100	100	
		7. Kedu		100	0	100	100	100	100	
		8. Kandangan		100	100	100	100	100	100	
		9. Candirototo		100	100	100	100	100	100	
		10. Ngadirejo		100	100	100	100	100	100	
		11. Jumo		100	100	100	100	100	100	
		12. Wonobooyo		100	100	100	100	100	100	
		13. Kranggan		100	91,67	100	100	100	100	
		14. Bejen		100	100	100	0	0	0	
		15. Kledung		100	100	100	92,31	92,31	92,31	
		16. Bansari		100	100	100	100	100	100	
		17. Tlogomulyo		100	75,00	100	91,67	91,67	91,67	
		18. Selopampang		100	16,67	100	100	100	100	

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD Tahun 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		19. Gemawang		100	100	100	100	100	100	
		20. Tretep		100	100	100	100	100	100	
		Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi layak	%	100	86,32	100	86,30	86,30	86,30	▲
		1. Temanggung		100	54,49	100	68,69	68,69	68,69	
		2. Parakan		100	90,79	100	90,79	90,79	90,79	
		3. Ngadirejo		100	100	100	100	100	100	
		4. Kranggan		100	100	100	85,71	85,71	85,71	
		Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	99,68	100	98,02	98,02	98,02	▲
		1. Temanggung		100	100	100	93,37	93,37	93,37	
		2. Parakan		100	98,73	100	98,73	98,73	98,73	
		3. Ngadirejo		100	100	100	100	100	100	
		4. Kranggan		100	100	100	100	100	100	
4.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	90	100	99,76	99,76	99,76	▲
		1. Temanggung		100	100	100	95,24	95,24	95,24	
		2. Tembarak		100	100	100	100	100	100	
		3. Pringsurat		100	100	100	100	100	100	
		4. Kaloran		100	100	100	100	100	100	
		5. Parakan		100	100	100	100	100	100	
		6. Bulu		100	100	100	100	100	100	
		7. Kedu		100	100	100	100	100	100	
		8. Kandangan		100	100	100	100	100	100	
		9. Candiroto		100	100	100	100	100	100	
		10. Ngadirejo		100	100	100	100	100	100	
		11. Jumo		100	100	100	100	100	100	
		12. Wonobojo		100	100	100	100	100	100	
		13. Kranggan		100	100	100	100	100	100	
		14. Bejen		100	100	100	100	100	100	
		15. Kledung		100	100	100	100	100	100	
		16. Bansari		100	100	100	100	100	100	

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD Tahun 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		17.Tlogomulyo		100	100	100	100	100	100	
		18.Selopampang		100	100	100	100	100	100	
		19.Gemawang		100	100	100	100	100	100	
		20.Tretep		100	100	100	100	100	100	
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	80	87,19	80	93,94	100	100	●
		1. Temanggung		80	95,02	80	90,32	100	100	
		2. Tembarak		80	74,42	80	86,90	100	100	
		3. Pringsurat		80	96,85	80	96,85	100	100	
		4. Kaloran		80	96,53	80	84,94	100	100	
		5. Parakan		80	97,41	80	100	100	100	
		6. Bulu		80	85,44	80	85,44	100	100	
		7. Kedu		80	93,39	80	94,92	100	100	
		8. Kandangan		80	89,47	80	87,34	100	100	
		9. Candiroti		80	97,69	80	87,71	100	100	
		10. Ngadirejo		80	98,72	80	98,73	100	100	
		11. Jumo		80	98,03	80	98,03	100	100	
		12. Wonobojo		80	99,28	80	100	100	100	
		13. Kranggan		80	94,92	80	100	100	100	
		14. Bejen		80	85,45	80	100	100	100	
		15. Kledung		80	100	80	100	100	100	
		16. Bansari		80	83,33	80	100	100	100	
		17. Tlogomulyo		80	94,37	80	94,37	100	100	
		18. Selopampang		80	71,58	80	80,68	100	100	
		19. Gemawang		80	84,15	80	100	100	100	
		20. Tretep		80	92,47	80	92,47	100	100	
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	%	1	0,53	1	0,06	100	100	●
		1. Temanggung		1	0	1	0	100	100	
		2. Tembarak		1	0	1	0	100	100	
		3. Pringsurat		1	0,96S	1	0	100	100	
		4. Kaloran		1	0	1	0	100	100	
		5. Parakan		1	1,49	1	0	100	100	
		6. Bulu		1	0	1	0	100	100	



No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD Tahun 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		7. Kedu		1	0	1	0	100	100	
		8. Kandangan		1	0	1	0	100	100	
		9. Candiroto		1	0	1	0	100	100	
		10. Ngadirejo		1	0,69	1	0	100	100	
		11. Jumo		1	0,76	1	0	100	100	
		12. Wonobojo		1	0	1	0,68	100	100	
		13. Kranggan		1	0	1	0,51	100	100	
		14. Bejen		1	2,70	1	0	100	100	
		15. Kledung		1	1,24	1	0	100	100	
		16. Bansari		1	2,92	1	0	100	100	
		17. Tlogomulyo		1	0,414	1	0	100	100	
		18. Selopampang		1	1,93	1	0	100	100	
		19. Gemawang		1	0,003	1	0	100	100	
		20. Tretep		1	0	1	0	100	100	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDesa tepat waktu	%	100	94,17	100	100	100	100	
		1. Temanggung		100	100	100	100	100	100	
		2. Tembarak		100	100	100	100	100	100	
		3. Pringsurat		100	100	100	100	100	100	
		4. Kaloran		100	100	100	100	100	100	
		5. Parakan		100	100	100	100	100	100	
		6. Bulu		100	100	100	100	100	100	
		7. Kedu		100	100	100	100	100	100	
		8. Kandangan		100	100	100	100	100	100	
		9. Candiroto		100	100	100	0	100	100	
		10. Ngadirejo		100	100	100	100	100	100	
		11. Jumo		100	100	100	100	100	100	
		12. Wonobojo		100	100	100	100	100	100	
		13. Kranggan		100	83,33	100	100	100	100	
		14. Bejen		100	100	100	0	100	100	
		15. Kledung		100	100	100	100	100	100	
		16. Bansari		100	100	100	100	100	100	
		17. Tlogomulyo		100	100	100	100	100	100	
		18. Selopampang		100	100	100	100	100	100	



No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD Tahun 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		19. Gemawang		100	100	100	100	100	100	
		20. Tretep		100	100	100	100	100	100	
RATA-RATA								97,13		

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021 data diolah.

Berdasarkan tabel diatas, secara keseluruhan capaian kinerja baik indikator kinerja sasaran maupun indikator kinerja program relatif cukup baik. Secara rata-rata capaian, beberapa indikator masih perlu upaya untuk peningkatan target walaupun tidak terlalu jauh dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2021.

2.2.9 Evaluasi Kinerja Unsur Pemerintahan Umum

Capaian Kinerja pemerintahan Umum diimplementasikan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan 1 indikator kinerja sasaran, dan 10 indikator kinerja program daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.380

Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2021

No	Sasaran/ program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD Tahun 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	Indeks Gotong Royong	Angka	4,22	0,83	4,2	4,33	100	100	
		Indeks toleransi	angka	4,19	4,00	4,15	4,5	100	100	
RATA-RATA								100	100	
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	%	62	0	62	0	0	0	
		Cakupan desa/ kelurahan yang mendapatkan	%	10	0	10	4,84	48,4	48,44	

No	Sasaran/ program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD Tahun 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		pembinaan wawasan kebangsaan								
2	Program Peningkat an Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidika n Melalui Pendidika n Politik dan Pengemban gan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pemilih yang mengguna kan hak pilihnya	%	87	87,21	87	87,21	100	100	●
		Persentase keterwakila n perempuan di lembaga politik	%	30	25	30	25	83,33	83,33	▲
		Persentase keterwakila n perempuan di DPRD	%	30	33,33	30	33,33	100	100	●
3	Program Pemberda yaan dan Pengawa san Organisas i Kemasyar a katan	Cakupan terbentuk nya FKUB di Kecamatan	%	100	0	100	0	0	0	▼
4	Program Pembinaa n dan Pembangu nan Ketahan an Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase terdeteksi dan tertangani nya konflik seni, budaya, agama, kemasyara katan, dan ekonomi	%	100	100	100	100	100	100	●
5	Program Peningkat an Kewaspada an Nasional dan Peningkat an Kualitas dan Fasilitasi Penangan an Konflik Sosial	Persentase terdeteksi dan tertangani nya konflik politik dan keamanan daerah	%	100	100	100	100	100	100	●
		Cakupan desa/kelu rahan yang mendapat kan pembinaan pencegahan penyalahgu naan narkoba	%	10	63,32	10	36,68	100	100	●

No	Sasaran/ program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	2021		Cap. RKPD Tahun 2021	Cap. RPJMD s.d 2021	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		Cakupan sekolah yang mendapat kan pembinaan pencegahan penyalahgu naan narkoba	%	35	0	35	0	0	0	▼
RATA-RATA								63,18	63,18	▲

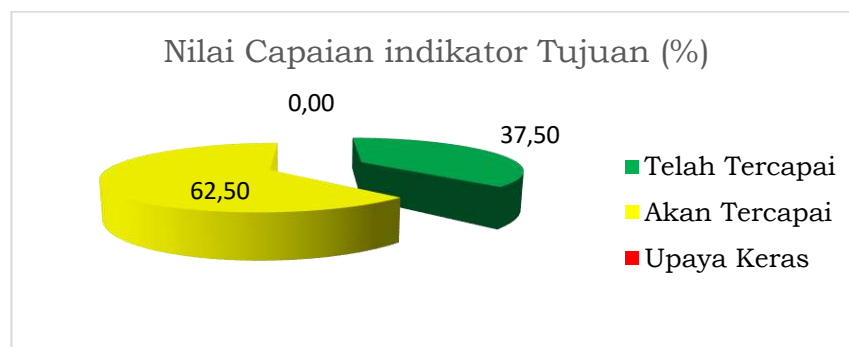
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021 data diolah

Indeks gotong royong dan indeks toleransi jauh melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2021, sehingga rata-rata capaian indikator kinerja sasaran 100%. Hal ini didorong oleh budaya masyarakat Temanggung yang masih tinggi rasa tepo seliro sehingga rasa gotong royong dan toleransi yang tercipta masih tinggi. Kinerja program diketahui 4 indikator masih memerlukan upaya keras diantaranya Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan, Cakupan desa/ kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan, Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan, dan Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat ketercapaian target tersebut diantaranya pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan di sekolah akan dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023, sehingga periode tahun 2019 s.d. 2021 belum dapat terealisasi. Selain itu, adanya kebijakan PPKM pada pertengahan tahun 2021 yang menyebabkan jadwal sosialisasi wawasan kebangsaan di tingkat desa menjadi mundur pelaksanaannya sehingga cakupan pembinaan wawasan kebangsaan menjadi rendah. Berkaitan dengan pembentukan FKUB di Kecamatan terdapat permasalahan belum adanya regulasi/undang undang terbentuknya FKUB di Kecamatan. Pelaksanaan P4GN di sekolah akan dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023 sehingga periode tahun 2019 s.d. 2021 belum terealisasi sehingga belum ada pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah.

2.3 RINGKASAN HASIL EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Hasil evaluasi kinerja program penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 diketahui bahwa pada setiap misi ada beberapa program dengan status telah tercapai, akan tercapai dan upaya keras, sebagaimana berikut :

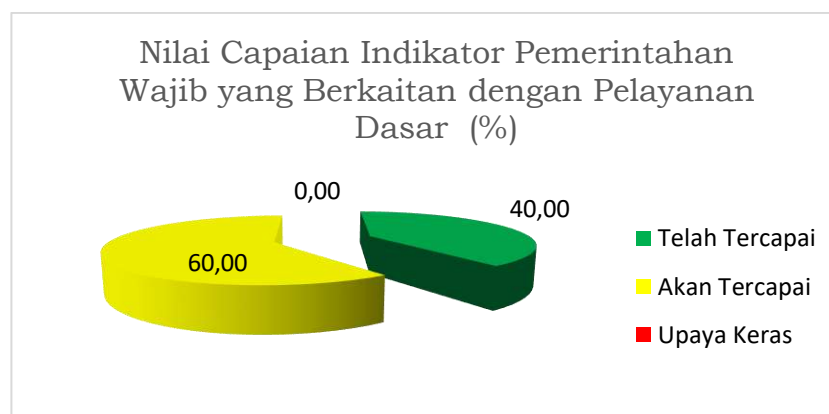
1. Capaian indikator tujuan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ada 8 indikator dengan status Telah Tercapai sejumlah 3 indikator (37,50%) dan 5 indikator dengan status Akan Tercapai (62,50%).



Gambar 2.61

Capaian Indikator Kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2021

2. Capaian indikator sasaran urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada Tahun 2021 ada 10 indikator sasaran, dengan status Telah Tercapai sejumlah 4 indikator (33,33%) dan 6 indikator dengan status Akan Tercapai (66,67%) sebagaimana dalam gambar berikut ini:



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

Gambar 2.62

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sampai dengan Tahun 2021

Rincian capaian sasaran urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dapat di lihat pada tabel berikut:

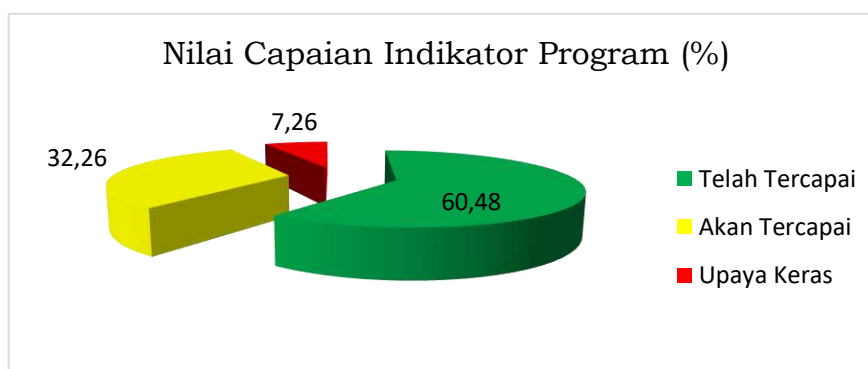
Tabel 2.381

Capaian Sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2021

NO	Urusan / Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD			
			TT	AT	UK	JML
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		4	6	0	10
1	Bidang Pendidikan	95,79	0	2	0	2
2	Bidang Kesehatan – Dinkes	100	1	0	0	1
3	Bidang Kesehatan - RSUD	86,31	0	1	0	1
4	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	99,28	0	2	0	2
5	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	1	0	0	1
6	Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat – Satpol PP Damkar	100	1	0	0	1
7	Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat – BPBD	69,29	0	1	0	1
8	Bidang Sosial	100	1	0	0	1

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

Dari 124 indikator kinerja program yang mendukung urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di tahun 2021 terdapat 75 indikator dengan status Telah Tercapai (60,48%), 40 indikator dengan status Akan Tercapai (32,26%) dan 9 indikator dengan status perlu Upaya Keras (7,26%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

Gambar 2.63

Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sampai dengan Tahun 2021

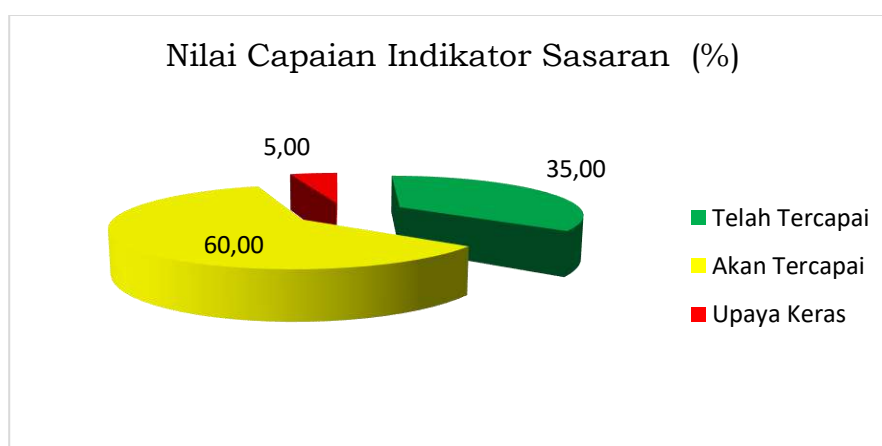
Rincian capaian program perbidang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.382
Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2021

NO	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD			
			TT	AT	UK	JML
	Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar		75	40	9	124
1	Bidang Pendidikan	87,64	12	13	4	29
2	Bidang Kesehatan – Dinkes	88,78	25	16	3	44
3	Bidang Kesehatan - RSUD	100	2	0	0	2
4	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	94,40	7	4	1	12
5	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	98,77	5	1	0	6
6	Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat – Satpol PP Damkar	88,50	4	3	1	8
7	Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat - BPBD	95,29	7	2	0	9
8	Bidang Sosial	98,76	13	1	0	14

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

3. Capaian indikator sasaran yang mendukung Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Tahun 2021 ada 20 indikator sasaran, dengan status telah tercapai sejumlah 7 indikator (35,00%), status Akan Tercapai ada 12 indikator (60,00%) dan 1 indikator perlu Upaya Keras (5%) sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut ini.



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

Gambar 2.64

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sampai dengan Tahun 2021

Rincian capaian sasaran Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar perbidang sebagaimana table berikut:

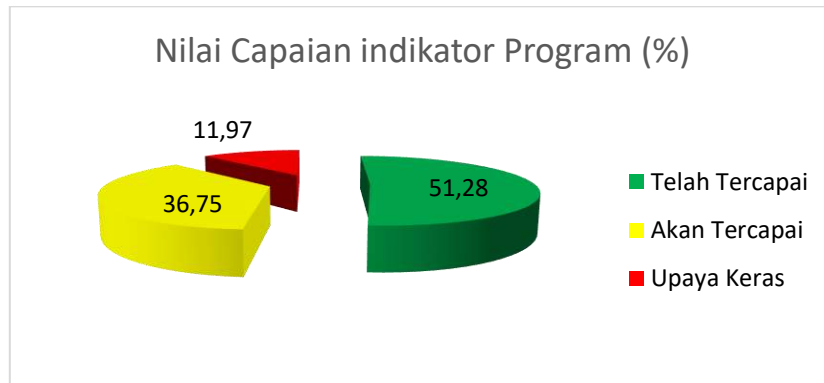
Tabel 2.383
Capaian Sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2021

NO	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD			
			TT	AT	UK	JML
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		7	12	1	20
1	Bidang Tenaga Kerja	100	1	0	0	1
2	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	99,82	1	1	0	2
3	Bidang Pangan	100	1	0	0	1
4	Bidang Lingkungan Hidup	98,56	0	1	0	1
5	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	1	0	0	1
6	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	92,72	0	2	0	2
7	Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	77,50	0	1	0	1
8	Bidang Perhubungan	100	1	0	0	1
9	Bidang Komunikasi dan Informatika	92,98	0	2	0	2
10	Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	45,99	0	1	1	2
11	Bidang Penanaman Modal	100	1	0	0	1
12	Bidang Pemuda dan Olahraga	98,53	1	1	0	2
13	Bidang Kebudayaan	94,30	0	1	0	1
14	Bidang Perpustakaan	91,93	0	1	0	1
15	Bidang Kearsipan	80,63	0	1	0	1

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

Dari 117 indikator program yang mendukung Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Tahun 2021 terdapat 60 indikator program Telah Tercapai (51,28%), 43 indikator Akan Tercapai (36,75%), dan 14 indikator perlu Upaya Keras (11,97%).





Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

Gambar 2.65

Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sampai dengan Tahun 2021

Rincian capaian program per bidang sebagaimana tabel berikut:

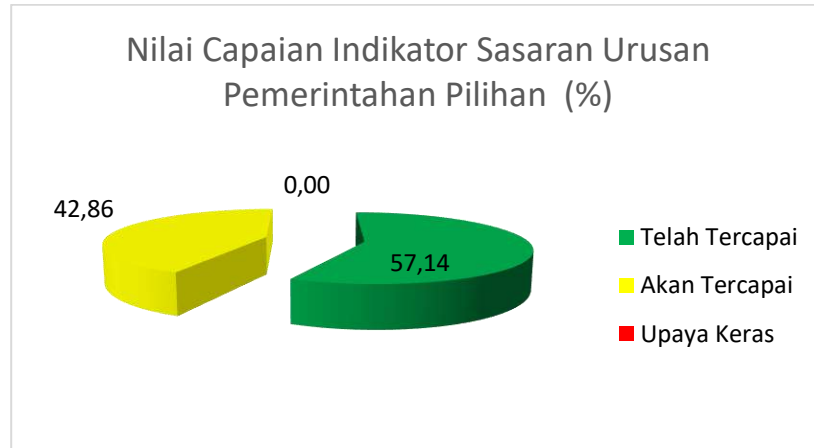
Tabel 2.384

Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan
Dasar Tahun 2021

NO	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD			
			TT	AT	UK	JML
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		60	43	14	117
1	Bidang Tenaga Kerja	80,96	2	7	1	10
2	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	90,86	6	1	1	8
3	Bidang Pangan	100	4	0	0	4
4	Bidang Pertanahan	100	1	0	0	1
5	Bidang Lingkungan Hidup	82,08	9	2	3	14
6	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	97,16	7	3	0	10
7	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	97,58	10	3	0	13
8	Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	94,19	4	4	1	9
9	Bidang Perhubungan	86,03	2	7	1	10
10	Bidang Komunikasi dan Informatika	75,51	1	5	1	7
11	Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	74,04	0	4	1	5
12	Bidang Penanaman Modal	79,77	7	2	1	10
13	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	81,02	3	1	1	5
14	Bidang Statistik	67	0	1	0	1
15	Bidang Persandian	100	1	0	0	1
16	Bidang Kebudayaan	74,85	1	2	1	4
17	Bidang Perpustakaan	33,35	1	0	2	3
18	Bidang Kearsipan	80,02	1	1	0	2

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

4. Capaian indikator sasaran yang mendukung urusan pemerintahan pilihan pada tahun 2021 ada 7 indikator. Terdapat 4 (empat) indikator dengan status telah tercapai (57,14%) dan 3 (tiga) indikator dengan status akan tercapai (42,86%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

Gambar 2.66

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun 2021

Rincian capaian sasaran urusan pemerintahan pilihan perbidang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

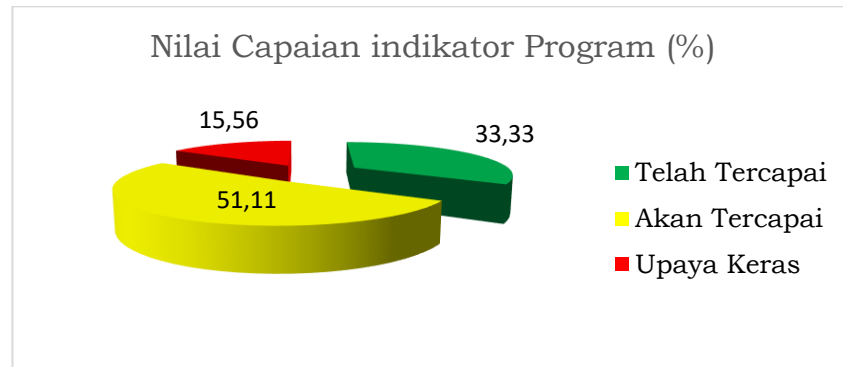
Tabel 2.385

Capaian Sasaran Penyelenggaran Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun 2021

NO	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD			
			TT	AT	UK	JML
	Urusan Pemerintahan Pilihan		4	3	0	7
1	Bidang Kelautan dan Perikanan	100	1	0	0	1
2	Bidang Pariwisata	92,73	0	1	0	1
3	Bidang Pertanian	86,84	1	2	0	3
4	Bidang Perdagangan	100	1	0	0	1
5	Bidang Perindustrian	100	1	0	0	1

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

Dari 45 indikator program yang mendukung urusan pemerintahan pilihan di Tahun 2021 terdapat 15 indikator telah tercapai (33,33%), 23 indikator akan tercapai (51,11%) dan 7 indikator perlu upaya keras (15,56%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

Gambar 2.67

Capaian Indikator Kinerja Sasaran urusan pemerintahan pilihan Tahun 2021

Rincian capaian program perbidang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

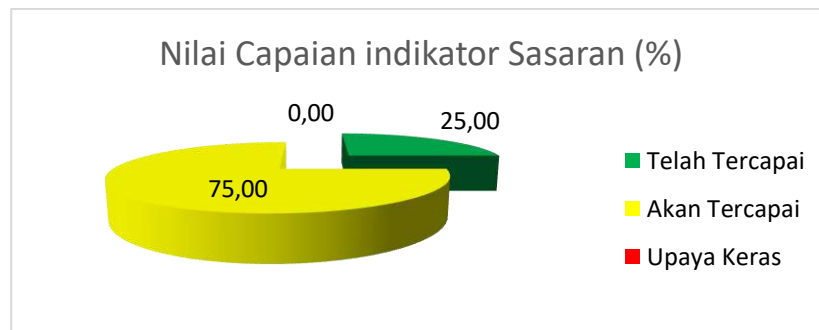
Tabel 2.386

Capaian Program Penyelenggaran Pemerintah Daerah urusan pemerintahan pilihan Tahun 2021

NO	/Bidang	Urusan	Rata-Rata Capaian (%)	IKD			
				TT	AT	UK	JML
		Urusan Pemerintahan Pilihan		15	23	7	45
1	Bidang Kelautan dan Perikanan		79,74	2	3	1	6
2	Bidang Pariwisata		52,82	1	3	2	6
3	Bidang Pertanian		96,32	9	14	0	23
4	Bidang Perdagangan		72,92	2	3	2	7
5	Bidang Perindustrian		46,14	0	0	2	2
6	Bidang Transmigrasi		100	1	0	0	1

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

- Bahwa capaian indikator sasaran yang mendukung unsur pendukung urusan pemerintahan pada tahun 2021 ada 4 indikator. Terdapat 1 indikator dengan status telah tercapai (25,00%) dan 3 indikator dengan status akan tercapai (75,00%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

Gambar 2.68

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2021

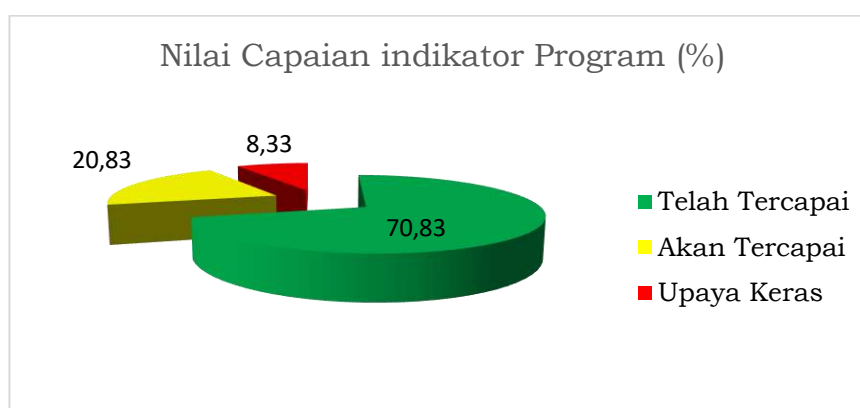
Rincian capaian sasaran unsur pendukung urusan pemerintahan perbidang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.387
Capaian Program Penyelenggaran Pemerintah Daerah
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2021

NO	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD			
			TT	AT	UK	JML
	Unsur pendukung urusan pemerintahan		1	3	0	4
1	Sekretariat Daerah	94,77	1	2	0	3
2	Sekretariat DPRD	87,74	0	1	0	1

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

Dari 24 indikator program yang mendukung Unsur pendukung urusan pemerintahan di Tahun 2021 terdapat 17 indikator telah tercapai (70,83%), 5 indikator akan tercapai (20,83%) dan 2 indikator perlu upaya keras (8,33%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

Gambar 2.69
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Unsur pendukung urusan pemerintahan Tahun 2021

Rincian capaian program perbidang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

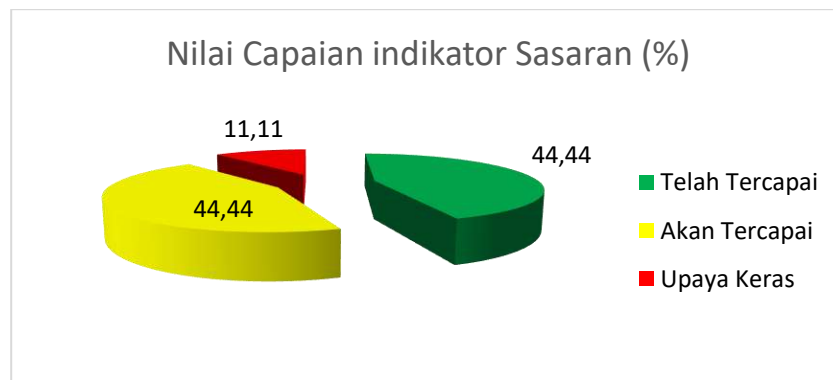
Tabel 2.388
Capaian Program Penyelenggaran Pemerintah Daerah
Unsur pendukung urusan pemerintahan Tahun 2021

NO	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD			
			TT	AT	UK	JML
	Unsur pendukung urusan pemerintahan		17	5	2	24
1	Sekretariat Daerah	94,58	15	5	1	21

NO	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD			
			TT	AT	UK	JML
	Unsur pendukung urusan pemerintahan		17	5	2	24
2	Sekretariat DPRD	79,17	2	0	1	3

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

6. Bahwa capaian indikator sasaran yang mendukung unsur penunjang urusan pemerintahan pada tahun 2021 ada 9 indikator. Terdapat 4 indikator dengan status telah tercapai (44,44%), 4 indikator dengan status akan tercapai (44,44%) dan 1 indikator dengan status upaya keras (11,11%)



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

Gambar 2.70

Capaian Indikator Kinerja Sasaran unsur penunjang urusan pemerintahan Tahun 2021

Rincian capaian sasaran unsur pendukung unsur penunjang urusan pemerintahan perbidang dapat di lihat pada tabel:

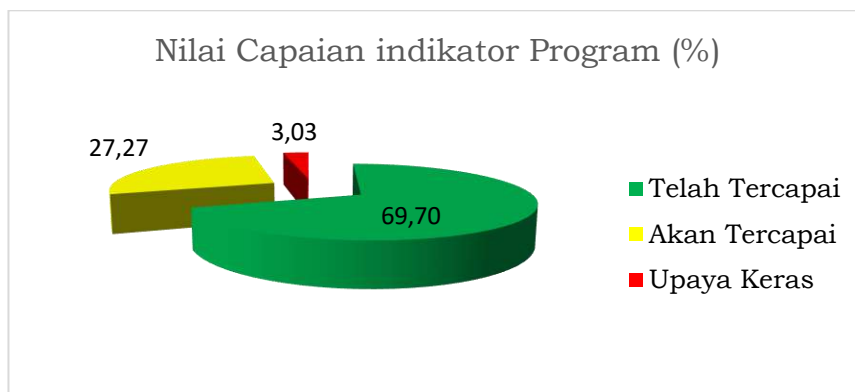
Tabel 2.389

Capaian sasaran Penyelenggaran Pemerintah Daerah Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2021

NO	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD			
			TT	AT	UK	JML
	Unsur penunjang urusan pemerintahan		4	4	1	9
1	Perencanaan	97,99	2	2	0	4
2	Keuangan	93,73	1	1	0	2
3	Kepegawaian	71,23	1	0	1	2
4	Penelitian dan pengembangan	75,00	0	1	0	1

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

Dari 33 indikator program yang mendukung unsur penunjang urusan pemerintahan di Tahun 2021 terdapat 23 indikator telah tercapai (69,70%), 9 indikator akan tercapai (27,27%) dan 1 indikator perlu upaya keras (3,03%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

Gambar 2.71

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2021

Rincian capaian program perbidang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

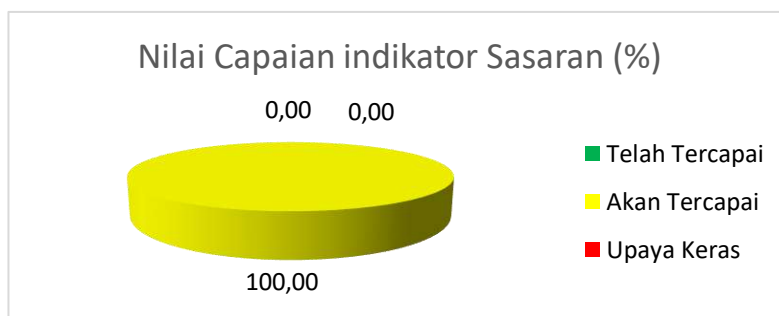
Tabel 2.390

Capaian Program Penyelenggaran Pemerintah Daerah unsur penunjang urusan pemerintahan Tahun 2021

NO	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD			
			TT	AT	UK	JML
	Unsur penunjang urusan pemerintahan		23	9	1	33
1	Perencanaan	98,63	5	1	0	6
2	Keuangan	94,24	9	4	1	14
3	Kepegawaian	99,35	7	2	0	9
4	Pendidikan dan Pelatihan	76,30	0	2	0	2
5	Penelitian dan Pengembangan	100	2	0	0	2

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

- Bahwa capaian indikator sasaran yang mendukung unsur pengawasan urusan pemerintahan pada tahun 2021 ada 1 indikator dengan status akan tercapai (100%)



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

Gambar 2.72

Capaian Indikator Kinerja Sasaran unsur pengawasan urusan pemerintahan Tahun 2021

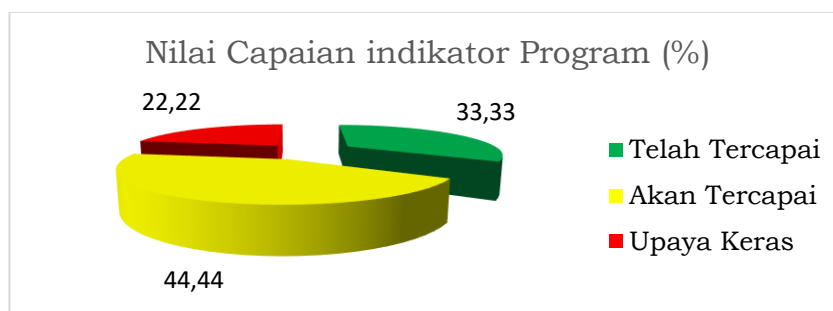
Rincian capaian sasaran unsur pengawasan urusan pemerintahan perbidang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.391
Capaian Program Penyelenggaran Pemerintah Daerah
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2021

NO	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD			
			TT	AT	UK	JML
	Unsur pengawasan urusan pemerintahan		0	1	0	1
1	Inspektorat Daerah	91,39	0	1	0	1

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

Dari 9 indikator program yang mendukung unsur pengawasan urusan pemerintahan di Tahun 2021 terdapat 3 indikator telah tercapai (33,33%), 4 indikator akan tercapai (44,44%) dan 2 indikator perlu upaya keras (22,22%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

Gambar 2.73
Capaian Indikator Kinerja Sasaran unsur pengawasan urusan pemerintahan Tahun 2021

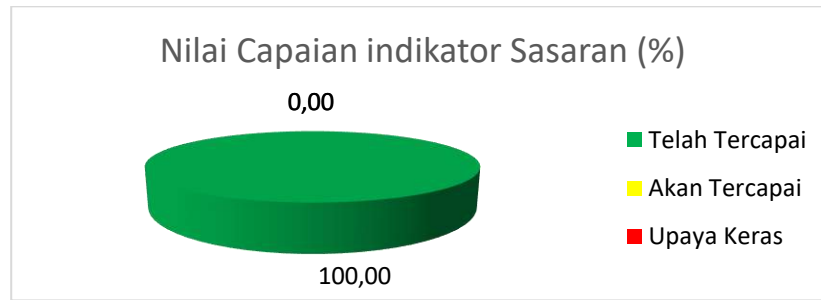
Rincian capaian program perbidang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.392
Capaian Program Penyelenggaran Pemerintah Daerah
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2021

NO	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD			
			TT	AT	UK	JML
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan		3	4	2	9
1	Inspektorat Daerah	77,18	3	4	2	9

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

- Bahwa capaian indikator sasaran yang mendukung unsur kewilayahan pada tahun 2021 ada 1 indikator dengan status telah tercapai (100%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

Gambar 2.74

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Unsur Kewilayahan Tahun 2021

Rincian capaian sasaran unsur kewilayahan perbidang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

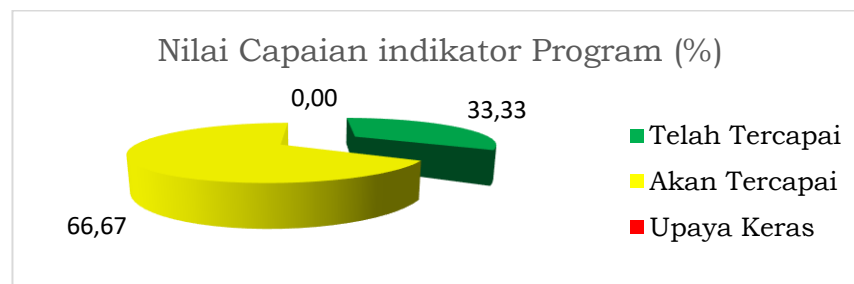
Tabel 2.393

Capaian Program Penyelenggaran Pemerintah Daerah Unsur Kewilayahan Tahun 2021

NO	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD			
			TT	AT	UK	JML
	Unsur kewilayahan		1	0	0	1
1	Kecamatan	100	1	0	0	1

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

Dari 9 indikator program yang mendukung Unsur kewilayahan di Tahun 2021 terdapat 3 indikator telah tercapai (33,33%) dan 6 indikator akan tercapai (66,67%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

Gambar 2.75

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Unsur kewilayahan Tahun 2021

Rincian capaian program perbidang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

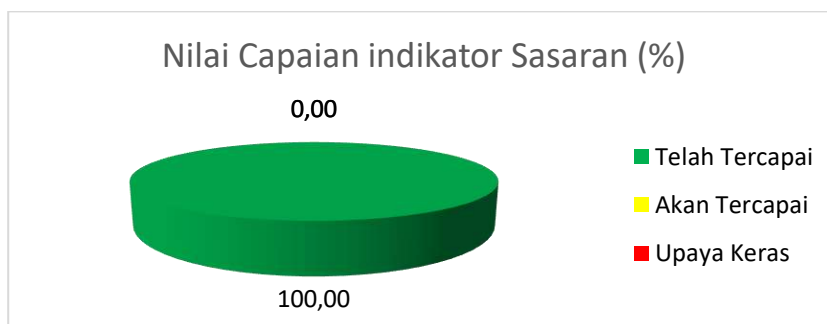
Tabel 2.394

Capaian Program Penyelenggaran Pemerintah Daerah Unsur kewilayahan Tahun 2021

NO	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD			
			TT	AT	UK	JML
	Unsur kewilayahan		3	6	0	9
1	Kecamatan	97,13	3	6	0	9

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

9. Bahwa capaian indikator sasaran yang mendukung unsur pemerintahan umum pada tahun 2021 ada 2 indikator dengan status telah tercapai (100%)



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

Gambar 2.76

Capaian Indikator Kinerja Sasaran unsur pemerintahan umum Tahun 2021

Rincian capaian sasaran unsur pemerintahan umum perbidang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

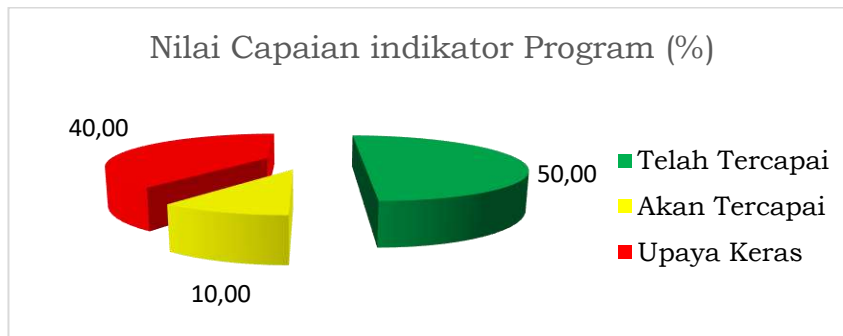
Tabel 2.395

Capaian Program Penyelenggaran Pemerintah Daerah Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2021

NO	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD			
			TT	AT	UK	JML
	Unsur Pemerintahan Umum		2	0	1	2
1	Fungsi Lainnya - Kesatuan Bangsa Politik	100	2	0	0	2

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

Dari 10 indikator program yang mendukung unsur pemerintahan umum di Tahun 2021 terdapat 5 indikator telah tercapai (50,00%), 1 indikator akan tercapai (10,00%) dan 4 indikator perlu upaya keras (40,00%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

Gambar 2.77

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2021

Rincian capaian program perbidang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.396
Capaian Program Penyelenggaran Pemerintah Daerah
Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2021

NO	/Bidang	Urusan	Rata-Rata Capaian (%)	IKD			
				TT	AT	UK	JML
	Unsur Pemerintahan Umum			5	1	4	10
1	Fungsi Lainnya - Kesatuan Bangsa Politik		63,18	5	1	4	10

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

Kinerja pembangunan daerah Kabupaten Temanggung diukur dari ketercapaian program pembangunan daerah. RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 memuat 8 indikator tujuan, 53 indikator sasaran dan 371 indikator program. Hasil evaluasi pencapaian target kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.397
Rangkuman Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Temanggung Tahun 2021

No	Indikator	Jumlah	Status Capaian	Persentase
1	Indikator Tujuan	3	Telah Tercapai	37,50
		5	Akan Tercapai	62,50
		0	Upaya Keras	0
2	Indikator Sasaran	23	Telah Tercapai	43,40
		28	Akan Tercapai	52,83
		2	Upaya Keras	3,77
3	Indikator Program	201	Telah Tercapai	54,18
		131	Akan Tercapai	35,31
		39	Upaya Keras	10,51

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

2.4 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

2.4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diidentifikasi dari permasalahan yang berkaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta adanya pencapaian yang mempunyai gap terhadap kondisi ideal (dalam status upaya keras). Adapun hasil identifikasi permasalahan pembangunan

dapat diuraikan sebagai berikut:

2.4.1.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Beberapa identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah diantaranya:

1. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung
2. Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Temanggung
3. Masih adanya kasus gizi buruk
4. Masih tingginya kasus kematian ibu
5. Masih adanya kasus kematian bayi dan balita
6. Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal
7. Perlunya peningkatan penanganan persampahan di Kabupaten Temanggung
8. Perlunya peningkatan konservasi lingkungan hidup

2.4.1.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 - 1) Bidang Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan mempunyai pengaruh penting terhadap kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan dalam pembangunan pendidikan dapat menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, berkarakter dan berdaya saing. Namun demikian, pembangunan pendidikan di Kabupaten Temanggung masih mempunyai permasalahan dan tantangan untuk penanganannya, diantaranya:

- a) Masih terdapat anak putus sekolah, anak tidak sekolah dan masih rendahnya angka partisipasi untuk mengikuti pendidikan kesetaraan;
- b) Belum optimalnya sarana prasarana fasilitas pembelajaran (seperti ruang kelas SD dan SMP) dalam kondisi baik;
- c) Masih rendahnya rata-rata lama sekolah;

- 2) Bidang Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan memiliki faktor strategis juga



dalam pembangunan manusia yang berkaitan dengan derajat kesehatan masyarakat. Pembangunan kesehatan tersebut sesuai siklus kehidupan manusia. Upaya peningkatan derajat kesehatan di Kabupaten Temanggung masih menemui berbagai permasalahan dan tantangan diantaranya:

- a) Masih ditemukan kasus kematian ibu yang cukup tinggi;
 - b) Masih ditemukan kasus kematian bayi dan balita;
 - c) Masih ditemukan kasus gizi buruk;
 - d) Masih rendahnya penemuan kasus TBC;
 - e) Masih perlunya peningkatan pada pelayanan kasus penyakit tidak menular terutama untuk penyakit hipertensi dan diabetes;
 - f) Perlunya peningkatan cakupan pelayanan farmasi sesuai standar di Puskesmas;
- 3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Beberapa permasalahan dan tantangan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain:
- a) Masih terdapat sarana prasarana jaringan irigasi yang rusak;
 - b) Masih perlu peningkatan pelayanan drainase;
- 4) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Beberapa permasalahan yang perlu diatasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman diantaranya:
- a) Masih terdapat keluarga yang belum mempunyai rumah tinggal;
 - b) Perlunya peningkatan rumah layak huni;
- 5) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan di Kabupaten Temanggung masih terdapat permasalahan yang perlu perhatian diantaranya:
- a) Masih perlu penambahan sarana prasarana pada cakupan penanganan bencana kebakaran;

6) Bidang Sosial

Pembangunan di bidang sosial untuk mewujudkan peningkatan taraf hidup manusia maupun masyarakat melalui upaya-upaya menuju kesejahteraan. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang menjadi tantangan untuk diperhatikan yaitu:

- a) Perlunya peningkatan upaya mendapatkan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial;
- b) Perlunya peningkatan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial diluar panti sosial;
- c) Perlunya peningkatan pengelolaan data dan pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh semua pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan;

7) Bidang Penanggulangan Bencana

Permasalahan yang dihadapi pada bidang penanggulangan bencana yaitu diperlukan upaya untuk pencapaian target indeks resiko bencana, cakupan desa tangguh bencana, desa mitigasi terhadap desa rawan bencana;

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Bidang Tenaga Kerja

Pembangunan di bidang tenaga kerja menjadi penting karena perlu adanya perhatian terhadap penduduk usia kerja, ketersediaan lapangan pekerjaan maupun kompetensi tenaga kerja sehingga Kabupaten Temanggung berupaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, meskipun masih terdapat beberapa tantangan dan permasalahan antara lain:

- a) Masih rendahnya pelatihan berbasis kompetensi yang didapat oleh pencari kerja;
- b) Belum optimalnya kesempatan kerja untuk menyerap angkatan kerja;
- c) Perlu adanya peningkatan terhadap pelatihan keterampilan untuk dapat membentuk embrio wirausaha baru maupun siap



- untuk dunia kerja;
- d) Masih perlunya peningkatan produktivitas kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang;
 - e) Perlu peningkatan monitoring penempatan pencari kerja yang terdaftar;
- 2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Pembangunan pemberdayaan perempuan bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, sedangkan pembangunan perlindungan anak bertujuan untuk memenuhi hak anak dan melindungi anak dari berbagai kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya, dimana pembangunan ini sinergi dari seluruh pihak. Namun demikian, masih ditemukan permasalahan dan tantangan sebagai berikut:
- a) Masih ditemukannya kasus kekerasan pada perempuan dan anak;
 - b) Masih terdapat budaya masyarakat bahwa kehamilan dan melahirkan menjadi urusan perempuan;
- 3) Bidang Pangan
- Terwujudnya kedaulatan pangan masyarakat melalui ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi, serta keamanan pangan menjadi tujuan dalam pembangunan di bidang pangan. Dalam mewujudkan hal tersebut, masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu:
- a) Perlu peningkatan optimalisasi Skor Pola Pangan Harapan;
 - b) Masih perlunya peningkatan ketersediaan protein per kapita;
- 4) Bidang Lingkungan Hidup
- Pengelolaan lingkungan hidup menjadi penting untuk mencegah kerusakan lingkungan, dimana dalam pelaksanaan pembangunannya terdapat beberapa permasalahan diantaranya:
- a) Masih perlunya peningkatan penanganan persampahan dan pelayanan persampahan di Kabupaten Temanggung;

- b) Perlu peningkatan ketaatan perusahaan terkait pengelolaan limbah B3 serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- 5) Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih ditemukan beberapa permasalahan di antaranya masih perlunya pembaharuan data terkait kepemilikan kartu keluarga terutama bagi pasangan baru menikah dan pengajuan pisah kartu keluarga;
- 6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa yang dapat berperan dalam pembangunan daerah, namun demikian masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain: perlunya peningkatan pada desa berpredikat mandiri, desa swasembada, dan desa cepat berkembang;
- 7) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Permasalahan yang masih dihadapi dalam upaya pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana antara lain:
- a) Masih perlunya peningkatan pelayanan KB bagi pasangan usia subur;
- b) Peningkatan optimalisasi kepesertaan KB;
- c) Penguatan optimalisasi penekanan laju pertumbuhan penduduk;
- 8) Bidang Perhubungan
Bidang perhubungan juga mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah, namun masih ditemukan beberapa permasalahan sektor perhubungan antara lain:
- a) Belum optimalnya sarana dan prasarana lalu lintas;
- b) Antisipasi kasus kecelakaan karena aktivitas masyarakat mulai kembali ramai setelah kurang lebih 2 tahun pembatasan pandemi;

9) Bidang Komunikasi dan Informatika

Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika perlu ditingkatkan dalam rangka pembangunan daerah, meskipun demikian, usaha tersebut masih menemui tantangan dan permasalahan sebagai berikut:

- a) Belum optimalnya integrasi sistem informasi sehingga memerlukan upaya keras.
- b) Perlu peningkatan perbaikan pada penyelenggaraan SPBE (baik kebijakan, tata kelola maupun layanan);
- c) Masih perlunya peningkatan keterbukaan informasi publik pada badan publik;
- d) Perlunya upaya peningkatan capaian prosentase keaktifan PPID badan publik serta keaktifan KIM;
- e) Optimalisasi pengembangan ketersediaan jaringan internet;

10) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pemberdayaan koperasi dan UKM mempunyai peran dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta pendistribusian hasil pembangunan. Akan tetapi, masih terdapat permasalahan beserta tantangan yang dihadapi Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- a) Masih perlunya peningkatan koperasi yang sehat dan aktif;
- b) Masih rendahnya usaha mikro yang naik kelas dan perlunya upaya peningkatan UKM aktif;
- c) Perlu upaya keras untuk peningkatan persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi;
- d) Penguatan peranan UMKM yang belum optimal

11) Bidang Penanaman Modal

Beberapa permasalahan dan tantangan yang masih ditemukan pada pembangunan di bidang penanaman modal yaitu:

- a) Masih perlu upaya keras terkait ketersediaan SDM bidang PM dan perizinan yang terlatih;
- b) Perlunya peningkatan ketersediaan informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan;



12) Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Kualitas dan kapasitas kepemudaan memiliki pengaruh yang cukup penting bagi pembangunan serta meningkatkan prestasi keolahragaan, meski demikian beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- a) Belum optimalnya prestasi olahraga;

13) Bidang Statistik

Permasalahan pembangunan di bidang statistik diantaranya:

- a) Masih adanya dualism data statistik yang berasal dari kegiatan sektoral yang dikelola Pemkab dan data statistik yang sama yang dikelola BPS dari kegiatan statistik dasar;
- b) Perlu peningkatan pengelolaan data statistik sektoral;
- c) Perlu peningkatan validitas data produsen;
- d) Perlunya peningkatan koordinasi dalam pengumpulan data dari produsen data diluar Pemkab Temanggung (karena keterbatasan kewenangan produsen data dalam diseminasi data statistik);
- e) Ketersediaan data statistik sektoral yang kurang mutakhir karena keterbatasan sarana prasarana;

14) Bidang Persandian

- a) Masih perlunya peningkatan sarana prasarana keamanan informasi;
- b) SDM di bidang persandian memerlukan pelatihan terkait keamanan informasi;

15) Bidang Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan dihadapkan pada permasalahan sebagai berikut:

- a) Belum optimalnya pelestarian cagar budaya dan sejarah lokal;
- b) Belum optimalnya sentuhan penanganan kelompok pelestari dan pecinta bahasa/sastra di Kabupaten Temanggung;
- c) Masih perlunya peningkatan kelompok seni budaya yang produktif;

16) Bidang Perpustakaan



Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam rangka pembangunan di bidang perpustakaan diantaranya:

- a) Penurunan pertumbuhan pengunjung dan peminjam di perpustakaan karena dampak pandemi COVID-19;
- b) Perlu adanya peningkatan pengelolaan naskah kuno dan koleksi nasional yang dilestarikan di Kabupaten Temanggung;

17) Bidang Kearsipan

Dalam penyelenggaraan kearsipan masih ditemui beberapa permasalahan antara lain:

- a) Perlu peningkatan indeks manajemen kearsipan;

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Bidang Kelautan dan Perikanan

Pembangunan di bidang kelautan dan perikanan masih mempunyai permasalahan yang masih dihadapi yaitu:

- a) Masih diperlukan upaya peningkatan pada tingkat konsumsi ikan;
- b) Perlu peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum;
- c) Masih perlunya peningkatan swasembada pada ikan konsumsi;

2) Bidang Pertanian

Pembangunan di bidang pertanian mempunyai peranan penting karena sebagai pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi pada bidang pertanian:

- a) Belum optimalnya produktivitas tanaman pangan;
- b) Perlu peningkatan produktivitas tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan;
- c) Menurunnya produktivitas berbagai macam komoditas pertanian seperti tembakau dan kopi;
- d) Masih terjadinya fluktuasi harga pada hortikultura;
- e) Masih perlunya peningkatan produktivitas ternak ruminansia dan ternak unggas;
- f) Masih perlunya upaya pemasaran pada produk bawang putih;

3) Bidang Pariwisata



Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berpotensi untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, sumber pendapatan daerah, pemberdayaan UKM, dan upaya penyediaan lapangan pekerjaan. Namun demikian, masih dihadapkan dengan permasalahan diantaranya:

- a) Masih perlunya peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung;
- b) Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata;
- c) Belum optimalnya perluasan jaringan dan promosi pariwisata;
- d) Masih rendahnya lama tinggal wisatawan;
- e) Peningkatan desa wisata yang naik klasifikasi;
- f) Peningkatan pelaku ekonomi kreatif;
- g) Amenitas, aksesibilitas dan atraksi pariwisata masih perlu ditingkatkan;

4) Bidang Perdagangan

Permasalahan yang masih dihadapi di bidang perdagangan diantaranya:

- a) Masih rendahnya pedagang kaki lima dan pedagang pasar yang menempati ruang sesuai peruntukannya;
- b) Perlunya peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan;
- c) Perlunya peningkatan manajemen pengelolaan pasar;

5) Bidang Perindustrian

Pembangunan di bidang perindustrian masih dihadapkan oleh beberapa permasalahan dan tantangan antara lain:

- a) Masih perlunya peningkatan IKM industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah;
- b) Perlunya peningkatan pembinaan industri penghasil cukai;

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Fungsi Sekretariat Daerah

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada fungsi sekretariat daerah antara lain:

- a) Perlu upaya untuk peningkatan Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dan Nilai

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP);

- b) Peningkatan pada pendokumentasian perundangan melalui JDIH;
 - c) Belum optimalnya pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - d) Upaya peningkatan indeks reformasi birokrasi;
- 2) Fungsi Sekretariat DPRD

Beberapa permasalahan yang ada pada fungsi Sekretariat DPRD antara lain:

- a) Raperda yang disahkan tepat waktu masih fluktuatif;
- b) Upaya keras pada jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah Raperda;

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan yang baik akan mampu menjamin terlaksananya pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu. Dalam proses pelaksanaan perencanaan pembangunan masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

- a) Perlunya peningkatan keoptimalan persentase ketercapaian kinerja pembangunan daerah;
- b) Perlunya peningkatan kualitas pengendalian monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan;

2) Keuangan

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain:

- a) Perlu peningkatan indeks pengelolaan keuangan daerah (IKPD);
- b) Peningkatan pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja;

3) Kepegawaian

Permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam pembangunan di bidang kepegawaian antara lain:

- a) Belum optimalnya indeks profesionalitas ASN;
- b) Perlu penerapan sistem merit secara optimal dalam pengelolaan kepegawaian di Kabupaten Temanggung;



4) Pendidikan dan Pelatihan

Adapun permasalahan yang masih ditemui pada pendidikan dan pelatihan diantaranya:

a) Perlu peningkatan pengikutsertaan ASN dalam diklat

5) Penelitian dan Pengembangan

Pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan dihadapkan dengan permasalahan:

a) Belum adanya sumber daya manusia khususnya fungsional peneliti bidang penelitian dan pengembangan;

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1) Fungsi Inspektorat Daerah

Penerapan sistem pengawasan masih dihadapkan permasalahan antara lain:

a) Upaya peningkatan indeks persepsi anti korupsi;

b) Perlu peningkatan optimalisasi maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

c) Perlu peningkatan pengawasan baik perencanaan, keuangan maupun penyelenggaraan kinerja;

7. Unsur Pemerintahan Umum

1) Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik

Beberapa permasalahan yang ada antara lain:

a) Perluasan terhadap sekolah dan desa/kelurahan yang mendapatkan pemahaman kebangsaan serta sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba;

b) Upaya pembentukan cakupan FKUB di kecamatan;

2.4.2 Isu Strategis

Perumusan isu strategis Kabupaten Temanggung tahun 2023 disusun berdasarkan gambaran kondisi daerah dan permasalahan perangkat daerah, memperhatikan capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja per misi, beserta dengan arah kebijakan. Adapun isu-isu strategis yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Menekan laju kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multi dimensi yang sangat kompleks, bukan hanya masalah pendapatan, akan tetapi juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang. Penanggulangan kemiskinan merupakan sasaran utama dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pada tingkat global, nasional, provinsi maupun di Kabupaten Temanggung. Bahkan dalam amanat SDGs di tahun 2030 diupayakan menjadi nol (zero poverty). Adanya pandemi Covid-19 tahun 2020 diprediksi angka kemiskinan akan melonjak secara signifikan terutama adanya PSBB di beberapa daerah tertentu, telah berimbas pada menurunnya permintaan produk pertanian Kabupaten Temanggung.

Angka kemiskinan Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 adalah 10,17% lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah (11,41%) namun masih dibawah capaian nasional (10,19%), sedangkan bila dilihat dari capaian angka kemiskinan kabupaten/kota se kawasan PURWOMANGGUNG, posisi Kabupaten Temanggung berada pada posisi kedua setelah Kota Magelang (7,75%). Apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan tahun 2020 (9,96%), sudah dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan.

Dalam rangka mengotimalkan ketepatan sasaran program dan kegiatan maupun lokasi intervensi penanganan kemiskinan, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung telah melakukan upaya yang komprehensif dalam penanggulangan kemiskinan dengan mensinergikan antara peran masyarakat, pemerintahan desa, dan kebijakan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2019 telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Kemiskinan juga dipengaruhi oleh dimensi politik yang dikarenakan oleh struktur ekonomi politik yang timpang sehingga pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan yang mengacu pada strategi penanggulangan

kemiskinan yaitu memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan menciptakan pembangunan yang merata dan berkeadilan, memperluas pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan dan kesempatan kerja, dan melakukan evaluasi efektivitas program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Kondisi kemiskinan semakin diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 yang membawa dampak langsung pada kehidupan baik dari perekonomian, kehidupan sosial, cara bekerja, dan pola interaksi. Dampak buruk ini terhadap perekonomian bersamaan dengan menurunnya harga komoditas dan gejolak pasar keuangan. Respon Pemerintah dan masyarakat yang melakukan upaya pencegahan, seperti penutupan kegiatan belajar mengajar di sekolah, *work from home* khususnya pekerja sektor formal, penundaan dan pembatalan berbagai even Pemerintah dan swasta membuat perputaran roda ekonomi melambat, sehingga kemungkinan besar juga menaikkan angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung. Masa pandemi COVID-19 yang berlangsung kurang lebih memasuki tahun ke-dua, belum dapat diketahui akhir dari pandemi ini sehingga perlu adanya penyesuaian strategi penanggulangan kemiskinan, sehingga dapat lebih realistis dan tepat guna.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan perlu juga memperhatikan isu lainnya yang sedang berkembang diantaranya masih tingginya kasus stunting di Kabupaten Temanggung dan masih ditemukannya kasus kematian ibu maupun kasus kematian bayi. Berkaitan dengan upaya untuk penurunan stunting juga perlu penguatan peran tim percepatan penurunan stunting dalam mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaran percepatan penurunan stunting secara konvergen (memperkuat intervensi gizi spesifik dan sensitif), peningkatan pelaporan e-PPGBM, dan optimalisasi sasaran untuk percepatan

penurunan stunting. Selain itu, penurunan kasus kematian ibu dan bayi perlu dilaksanakan melalui langkah konkrit seperti penguatan audit kematian (mencari akar masalah penyebab untuk perumusan intervensi), pembinaan dan peningkatan layanan di fasilitas kesehatan (pembinaan Puskesmas maupun penugasan dokter spesialis), menggalakkan kembali gerakan 5 Ng melalui kader desa/kelurahan, serta memperkuat kepesertaan KB. Hal ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk dapat mensinergikan upaya yang dilakukan untuk pengentasan kemiskinan serta penurunan angka stunting beserta menekan kasus kematian ibu dan bayi. Sinergi tersebut dapat berupa kolaborasi *pentahelix* yang melibatkan Pemerintah, dunia swasta, akademisi, masyarakat/komunitas dan media untuk dapat bekerja bersama-sama terkait hal tersebut.

2. Kualitas sumber daya manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data BPS pada tahun 2021, IPM Kabupaten Temanggung sebesar 69,88 dengan kategori sedang, yang meliputi (1) Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 75,64 tahun, (2) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,25 tahun, (3) Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 12,32 tahun dan (4) Pengeluaran per kapita sebesar Rp 9.408.000/tahun. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa angka IPM Kabupaten Temanggung berada di posisi dua terendah dibandingkan kabupaten/kota sekitar di wilayah PURWOMANGGUNG serta masih dibawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (72,16) dan nasional (72,69).

Angka IPM yang masih tergolong rendah dikarenakan masih adanya salah satu komposisi IPM yaitu dibidang pendidikan (ARLS dan AHLS) yang masih belum optimal walaupun kedua komposisi tersebut cenderung menguat dan meningkat bila dibandingkan data tahun 2020 (ARLS : 7,24 tahun dan AHLS : 75,58 tahun). Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Seperti cakupan

akses layanan angka lama sekolah misalnya, yang berdasarkan analisis disebutkan masih rendah. Demikian pula halnya dengan akses pendidikan 12 tahun yang belum mampu tercapai secara optimal. Selain itu, akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi dan pendidikan inklusi di Kabupaten Temanggung juga masih rendah.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan IPM Kabupaten Temanggung diwujudkan dengan peningkatan aksesibilitas serta optimalisasi kualitas pelayanan baik itu di bidang kesehatan, pendidikan maupun kebutuhan dasar lainnya perlu untuk menjadi skala prioritas, mengingat sumber daya manusia yang berkualitas merupakan wujud nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hendaknya ancaman serius akan kualitas sistem pendidikan sejak dirubahnya sistem tatap muka menjadi pembelajaran lewat daring, akan mempengaruhi kualitas Pendidikan selama pandemi, maka standar mutu Pendidikan di Kabupaten Temanggung harus tetap memenuhi syarat untuk kebutuhan abad 21, dengan mengubah sistem pola pembelajaran.

3. Percepatan pemulihan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat

Parameter keberhasilan pembangunan Kabupaten Temanggung salah satunya diukur dengan laju pertumbuhan ekonomi. Realisasi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung sampai dengan akhir tahun 2021 berada pada angka 3,34%, dimana hal ini menunjukkan geliat perekonomian mulai nampak bangkit setelah tahun 2020 menyentuh angka -2,13% yang terjadi karena dampak pandemi COVID-19 yang berdampak buruk terhadap sendi-sendi kehidupan. Dengan kondisi perekonomian Kabupaten Temanggung mulai kembali membaik pasca pandemi COVID-19, maka kesejahteraan masyarakat juga semakin membaik.

Dalam mengantisipasi peringatan *Food and Agriculture Organization* (FAO) terhadap ancaman baru dunia tentang krisis pangan dunia pasca Covid-19 yang belum jelas ujungnya, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah berupaya keras dalam pemenuhan ketahanan pangan dan tetap mengupayakan ada peningkatan

ekonomi dengan memacu lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha pertanian dan juga perbaikan infrastruktur dasar, sehingga diharapkan dapat memperlancar roda perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi dan daya saing akan lebih signifikan jika didorong pula peningkatan sarana dan prasarana penunjang produktivitas pertanian, dan pemasaran produksi pertanian yang difasilitasi dengan kemudahan akses pasar produk-produk pangan lokal yang sehat yang didukung dengan penyediaan jaringan informasi tepat guna hingga level desa guna memudahkan akses informasi pasar dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan pertanian lokal.

Dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah di Kabupaten Temanggung perlu distimulasi melalui penguatan peranan UMKM dalam peningkatan daya saing daerah, melalui Pembinaan dan pembekalan sumberdaya wirausahawan agar usaha mikro dan informal dapat meningkatkan produktivitas. Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada kelestarian lingkungan hidup.

Selain sektor pertanian dan sektor UMKM, pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah juga ditingkatkan melalui sektor pariwisata, khususnya pariwisata yang berbudaya dan berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan potensi geografis dan sosiografis yang dimiliki Temanggung dan diharapkan dapat dikembangkan menjadi daya tarik serta sektor unggulan yang memiliki keterkaitan ke depan (forward linkage) dan ke belakang (backward linkage) yang kuat sebagai motor penggerak produktivitas perekonomian daerah. Pengembangan pariwisata juga diarahkan dengan menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan serta didukung interkoneksi antar desa, pemerintah, swasta, perguruan tinggi, komunitas dan pelaku wisata.

Bukan hanya daya saing ekonomi, namun juga ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan merata untuk mengatasi kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Untuk itu membuka akses antar



wilayah menjadi isu penting, terutama untuk menghubungkan daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan, transportasi kota-desa, pergantian antar moda, serta untuk meningkatkan kemudahan distribusi barang dan jasa dengan penyediaan akses infrastruktur berupa prasarana jalan dan jembatan, dilengkapi dengan transportasi publik yang memadai, jaringan komunikasi, dan jaringan energi yang penting.

Pendapatan perkapita di Kabupaten Temanggung masih berada di bawah pendapatan perkapita provinsi dan nasional. Namun demikian belum dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki dan dinikmati oleh warga Temanggung saja, akan tetapi ada juga yang dimiliki dan dinikmati oleh penduduk dari luar Kabupaten Temanggung yang melakukan investasi di Kabupaten Temanggung. Disamping itu, angka pendapatan perkapita belum memperlihatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

TPT menunjukkan persentase orang yang mencari kerja terhadap penduduk angkatan kerja. Tingginya TPT merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. TPT Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah 2,62%.

4. Tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik

Tata kelola pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan publik yang berkualitas merupakan bagian dari manajemen pembangunan yang meliputi kualitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi relevan untuk menciptakan pelayanan publik yang prima dalam perijinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan

dan kesehatan.

Dengan dikembangkan teknologi informasi sebagai dasar pelayanan kepada masyarakat ruang komunikasi dengan masyarakat semakin terbuka dan mudah diakses sehingga dapat meningkatkan nilai Aparatur Sipil Negara, selain itu masyarakat dengan mudah dan cepat dapat memberikan masukan dan pengaduan.

Untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Temanggung akan diukur dengan beberapa kriteria yaitu:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi, penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan pada tahun 2021 yaitu 63,42 (nilai tahun 2020 sebesar 62,70) berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini menunjukkan terdapat peningkatan pada kapasitas, manajemen dan kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2021 telah mencapai 82,06. Capaian tersebut mencerminkan tingkat pelayanan publik yang akuntabel, transparansi, supremasi hukum serta mampu menjawab pengguna layanan.
- c. Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Nilai AKIP Kabupaten Temanggung tahun 2021 mencapai kategori B. Dengan hasil tersebut masih diperlukan perbaikan secara bertahap agar dapat meningkat menjadi kategori A (sangat baik).
- d. Pengukuran Nilai Kepatuhan terhadap Standar Layanan. Pada tahun 2021 mendapatkan nilai 71,23 termasuk ke dalam zona kuning.
- e. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), indeks ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan. Pada tahun 2021 mendapatkan nilai 2,78.

- f. Indeks Profesionalisme ASN digunakan untuk mengukur dan mewujudkan profesionalitas ASN.
- g. Indeks Manajemen Kearsipan (IMK) merupakan nilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan.
- h. Sistem Merit yang penerapannya bertujuan untuk memastikan jabatan yang ada di birokrasi pemerintah diduduki oleh pegawai yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung oleh ASN yang berkualitas dan professional, serta kelembagaan yang efektif. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan kualitas ASN serta penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya menjadi hal yang sangat penting yang harus dilakukan.

2.5 INOVASI DAERAH

Inovasi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan berorientasi untuk kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya serta tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Inovasi dalam pelaksanaannya melalui beberapa tahapan yang dimulai dari pengusulan, penetapan, uji coba, sampai pada penerapan inovasi terkait. Selanjutnya, terhadap penerapan inovasi dilakukan penilaian dan pemberian penghargaan oleh Menteri kepada Pemerintah Daerah atau oleh Pemerintah Daerah kepada individu dan Perangkat Daerah yang inovasinya berhasil diterapkan. Inisiatif inovasi dapat berasal dari Kepala Daerah, anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah maupun anggota masyarakat.

Pemerintahan pada era saat ini memberikan harapan besar terhadap upaya peningkatan kemandirian daerah yang berimplikasi pada pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup

masyarakat ke arah yang lebih baik. Agar Pemerintah Daerah dapat mandiri dan mensejahterakan masyarakatnya, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, serta mampu melakukan percepatan dalam rangka mendorong peningkatan pelaksanaan di seluruh aspek, melalui kebijakan-kebijakan yang kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan serta kearifan lokal di daerahnya masing-masing.

Diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui inovasi, mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan inovasi di Kabupaten Temanggung dalam upaya untuk mendukung program-program pemerintah maupun dalam mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi di masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Temanggung setiap tahunnya telah memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah dan masyarakat yang mempunyai inovasi-inovasi terbaiknya melalui ajang lomba Kreativitas dan Inovasi (Krenova) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Penerapan inovasi dari masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung dicantumkan di dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dan disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Program dan Kegiatan. Kreativitas dan inovasi (krenova) yang tercatat dalam dokumen RKPD sampai dengan bulan Maret 2022, berjumlah 394 krenova yang terdiri dari 168 krenova yang berasal dari masyarakat, 221 krenova yang berasal dari Perangkat Daerah, dan 5 krenova berasal dari penjangkaran masyarakat.

Tahun 2023 inovasi daerah Kabupaten Temanggung diharapkan selaras dengan Tema RKP Nasional maupun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Arah kebijakan inovasi daerah Kabupaten Temanggung yang diterapkan dan dikembangkan adalah inovasi yang mendorong reformasi birokrasi (*good*



governance), percepatan pengurangan kemiskinan, pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan hidup, dan pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi kerakyatan.



Gambar 2.78
Sinergitas Inovasi Daerah

Dalam mempercepat terwujudnya pencapaian sasaran (*goal*) yang diharapkan, Pemerintah Kabupaten Temanggung menggerakkan semua elemen masyarakat untuk bangkit bergerak bersama menuju masyarakat Temanggung yang kreatif dan inovatif, menguatkan kembali sinergitas kerjasama *academics, businessman, community, government, dan social media*. Salah satu upaya inovasi Kabupaten Temanggung dalam sinergitas kerjasama adalah dengan pemberian Penghargaan Inovasi Sumbing Sindoro 2023 (*SUSI Award 2023*) dalam lima kategori yaitu perangkat daerah inovatif, kecamatan inovatif, perusahaan inovatif, sekolah inovatif, dan masyarakat inovatif.

Tabel 2.398
Data Krenova Kabupaten Temanggung

No	ASAL KRENOVA	TAHUN PEROLEHAN INOVASI						JUMLAH
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Perangkat Daerah	91	5	22	23	31	49	221
2.	Masyarakat	-	29	50	30	33	26	168
3.	Penjaringan Masyarakat	-	-	-	-	5	-	5
	Jumlah Total	91	34	72	53	69	75	394

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022

Tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Temanggung saat ini adalah akselerasi ekonomi masyarakat, penyerapan tenaga kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelestarian

lingkungan. Dalam upaya menghadapi tantang Pemerintah Kabupaten Temanggung melakukan inovasi-inovasi dan terobosan melalui pembangunan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi masyarakat Temanggung pasca Covid-19, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah mencanangkan inovasi pembangunan melalui **GERBANG EMAS** yaitu **Gerakan Pembangunan untuk Peningkatan Kesehatan, Pelestarian Lingkungan dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat**. Melalui inovasi tersebut potensi-potensi desa sebagai sumber kekuatan daya saing yang dimiliki setiap desa terutama yang berada di desa pinggiran akan menjadi sasaran prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Temanggung, karena melalui inovasi tersebut secara tidak langsung akan terjadi pemerataan pembangunan wilayah dan akan berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian secara merata. Membangun desa pinggiran tidak terbatas pada kewilayahan, letak geografis, atau produk unggulan namun juga membangun sumber daya manusia, ekonomi, pendidikan, kesehatan, iptek, komunikasi dan informasi, serta sarana prasarana pendukung di wilayah tersebut.

Dengan program tersebut desa pinggiran menjadi subyek pembangunan bukan lagi menjadi obyek, sehingga desa diharapkan untuk bisa berdaya saing tinggi dalam membangun wilayahnya sendiri dengan kekuatan potensi kearifan lokal yang dimiliki, karena desa pinggiran merupakan salah satu sumber GERBANG EMAS Kabupaten Temanggung. Dalam mendukung program tersebut pemerintah Kabupaten Temanggung bersama semua stakeholder senantiasa bersinergitas dalam mendorong, memotivasi dan memfasilitasi pembangunan desa pinggiran, agar para pemangku desa beserta masyarakatnya mempunyai mental yang kuat, semangat tinggi dan saling bahu-membahu, saling bergotong-royong dalam membangun desanya menjadi lebih produktif dan menjadi tulang punggung ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam inovasi GERBANG EMAS tidak berdiri sendiri, mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring evaluasi melibatkan semua stakeholder dalam kerangka *pentahelix* yang terdiri dari unsur pemerintah, pelaku usaha, akademisi,



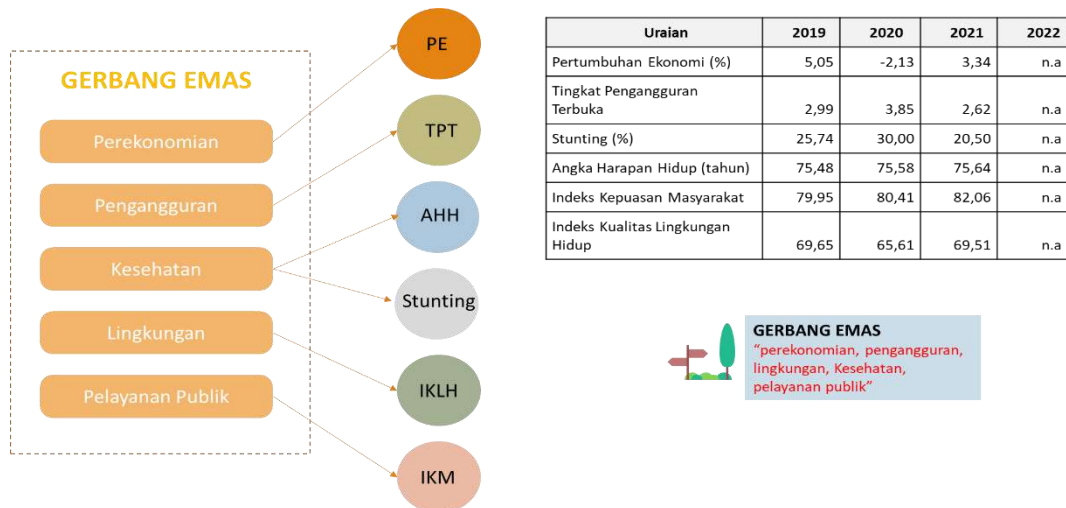
media dan masyarakat dengan bentuk kolaborasi semua stakeholder dalam inovasi GERBANG EMAS adalah sebagaimana diagram dibawah ini.



Gambar 2.79
Bentuk Kolaborasi Pentahelix GERBANG EMAS

GERBANG EMAS fokus pada dimensi pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari 4 pilar yaitu ekonomi, sosial, lingkungan dan kelembagaan melalui peningkatan produktivitas ekonomi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan kualitas kesehatan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan sehingga terwujud sumber daya manusia berdaya saing, akselerasi ekonomi dan respon terhadap perubahan iklim. Hal ini merupakan salah satu advokasi pimpinan daerah dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan daerah.

Multiplier effect dari GERBANG EMAS mempunyai pengaruh yang sangat besar karena berdampak pada ekonomi daerah (pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka), kesehatan masyarakat (stunting dan angka harapan hidup), pelayanan publik (indeks kepuasan masyarakat) dan kualitas lingkungan hidup (indeks kualitas lingkungan hidup). Pada tahun 2021 di Kabupaten Temanggung angka pertumbuhan ekonominya 3,34%, angka tingkat pengangguran terbuka 2,62, angka prevalensi stunting 20,50, angka Indeks Pembangunan Manusia 69,88, indeks kepuasan masyarakat 82,06 dan indeks kualitas lingkungan hidup 69,51.



Gambar 2.80
Keterkaitan Inovasi GERBANG EMAS dengan Indikator Kinerja Daerah

Ruang lingkup wilayah inovasi GERBANG EMAS adalah wilayah di Kabupaten Temanggung (khususnya bagi desa-desa pinggiran di Kabupaten Temanggung) yang tersebar di 20 kecamatan. Sedangkan lingkup penerima manfaat dari inovasi ini adalah seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Temanggung.

Himpunan gerakan dalam GERBANG EMAS diantaranya sebagai berikut:

1. SHIBIRU

Shibiru menjadi salah satu unggulan karena memanfaatkan potensi alam dari tanaman *Strobilanthes cusia* sehingga mampu diolah menjadi produk berkualitas dan bernilai ekspor serta ramah lingkungan dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat. *Strobilanthes cusia* telah populer dimasyarakat lereng Gunung Sindoro dan Gunung Prau utamanya di Kecamatan Tretep dan Wonoboyo, dimana tanaman ini telah dibudidayakan oleh sejumlah 179 petani dilahan ±65 ha, dan menjadi tanaman primadona karena merupakan tanaman sampingan bernilai ekonomi tinggi yang mudah dibudidayakan dan dikembangkan dilahan-lahan tidak produktif bahkan tumbuh dengan baik dibawah pohon kopi, jambu dan

berdampingan dengan tanaman lain, yang lebih istimewa lagi tanaman ini tidak memerlukan pemeliharaan secara khusus.

Pasta dan powder Shibiru yang dihasilkan dari tanaman *Strobilanthes cusia*, mempunyai kelebihan bila digunakan untuk pewarna tekstil atau kain dapat memberikan warna biru pekat, sehingga sangat digemari oleh para pengrajin tekstil maupun pengrajin bathik baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Shibiru telah memberikan nilai daya saing tinggi karena telah memenuhi kebutuhan para pengrajin batik dan tekstil nusantara dan kebutuhan pengrajin tekstil manca negara seperti halnya Jepang, Philipina, Australia, Amerika, dll.



Gambar 2.81
Inovasi Shibiru

Dengan adanya industri Shibiru memberikan dampak yang luar biasa bagi peningkatan ekonomi Kabupaten Temanggung, membuka lapangan kerja baru, membuka peluang usaha baru, meningkatkan kerjasama dengan akademisi dalam penelitian dan pengembangan Shibiru, perbankan dan komunitas pengembang pewarna alam serta meningkatkan daya saing Kabupaten Temanggung dalam perekonomian global.

Pemasaran internasional Shibiru sudah merambah ke Jepang, Malaysia, Hongkong, Amerika dan Spanyol. Sedangkan pemasaran domestik ke Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

2. SEKOLAH KOPI

Pada dasarnya kopi Temanggung sudah dikenal di dunia sejak perdagangan VOC. Industri kopi di Kabupaten Temanggung sejak 5

tahun terakhir berkembang dengan pesat setelah menjuarai kontes festival kopi di Atlanta, Amerika Serikat dan di Prancis. Kabupaten Temanggung merupakan penghasil kopi terbesar di Jawa Tengah dengan berkontribusi sebesar 41% pada tahun 2020 dan 40% pada tahun 2021 (sumber BPS diolah).

Kopi menjadi salah satu produk unggulan Temanggung, agar kopi Temanggung mempunyai daya saing ditingkat internasional maka diperlukan langkah strategis dalam peningkatan sumber daya manusia, kualitas produk, mendapat harga terbaik, tersedia secara kontinyu, dan jejaring pemasaran. Langkah Strategis yang ditempuh adalah melalui pendirian Sekolah Kopi.



Gambar 2.82
Pelepasan Ekspor Kopi

Sekolah Kopi adalah sebuah inovasi yang dibuat antara pemerintah bersama masyarakat sebagai mediasi transformasi ilmu tentang perkopian dari hulu sampai hilir, fasilitasi kerjasama, peningkatan produktifitas kopi yang berkualitas, peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan manajemen industry kopi. Melalui Sekolah Kopi diharapkan para petani kopi mampu mengelola kebun-kebun kopi yang menghasilkan produksi tinggi dan berkualitas, melahirkan pelaku-pelaku barista handal, dan mampu untuk ekspor kopi secara mandiri.

Siswa Sekolah Kopi terdiri dari berbagai kalangan baik dari para petani, pengusaha, pemuda-pemudi, komunitas, pelajar dan lain-lain, dimana materi disesuaikan dengan kebutuhan siswa, ada yang belajar di bidang perkebunan terkait dengan budidaya, pengolahan

produksi, marketing, barista, ataupun edukasi wisata. Adapun para pengajar didatangkan dari praktisi, akademisi, penyuluh pertanian, pembeli dan juga dari FTA (*Free Trade Agreement*).

Sekolah kopi telah melahirkan lulusan yang mampu mengelola kebun kopi dengan baik, selain mendapatkan dari hasil buah kopi juga mendapatkan dari hasil eduwisata kebun kopi, lahir para pemuda-pemuda yang membuka barista-barista baru baik di dalam kota Temanggung maupun luar wilayah Kabupaten, lahir para pelaku usaha baru yang berbasis komoditas kopi, lahir eksportir kopi yang sudah melaksanakan ekspor beberapa kali ke Korea, Mesir, India, Belanda dan Taiwan.

Dengan adanya Sekolah Kopi memberikan dampak yang luarbiasa bagi peningkatan ekonomi Kabupaten Temanggung, membuka lapangan kerja baru, membuka peluang usaha baru, meningkatkan kerjasama dengan akademisi, pengusaha, perbankan, dan meningkatkan daya saing kopi ditingkat internasional.

3. KENANGAN BANSARI

Kenangan Bansari adalah merupakan Inovasi dalam mendorong Ketahanan pangan di Kecamatan Bansari yang menjadi prioritas program Pemerintah Kabupaten Temanggung terutama di masa pasca pandemi agar terwujud kemandirian pangan keluarga. Salah satu bentuknya adalah pengembangan pangan terintegrasi yang berbasis pada hortikultura, perkebunan, peternakan dan tanaman pangan di suatu kawasan yang berbasis lingkungan, berkolaborasi menyatu dengan pengembangan wisata embung Bansari.

Tujuannya yaitu: 1) Pengembangan model kemitraan *closed loop* dengan jaminan harga dan pasar bagi petani; 2) Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP); 3) Peningkatan produksi nasional; 4) Stabilisasi pasokan dan harga komoditas strategis; dan 5) Kemandirian benih bermutu. Sasarannya adalah : 1) Penyediaan bahan baku industri makanan; 2) Penyediaan bahan baku benih bermutu; dan 3) Penyediaan pasar lokal, retail dan ekspor.



Gambar 2.83
Kegiatan Kenangan Bansari Bersama Presiden RI dan
Bupati Temanggung

Menteri Pertanian mengawal dalam penanganan persiapan lahan dan pengadaan bibit sampai di lokasi. Petani semakin termotivasi ketika dalam menanam bibit bawang dilaksanakan bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 26 Desember 2021 di lokasi Embung Bansari.

Berdasarkan hasil panen perdana bawang merah varietas batu ijo yang dilaksanakan para petani bersama Sekretaris Dirjen Hortikultura Kementerian di Bansari, pada hari Kamis (20/1/2022) menunjukkan hasil produksi meningkat, sebelumnya panen bawang merah hanya mencapai 12,5 ton/ha, dengan INFOSERIT dalam setiap hektar lahan mampu menghasilkan bawang merah sebanyak 15,7 ton, yang berarti mengalami kenaikan produksi bawang merah setiap hektar sebanyak 3,7 ton.

4. DESA WISATA

Kabupaten Temanggung yang berada di wilayah Pegunungan Sumbing, Sindoro dan Prau, kaya akan potensi yang dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata, potensi keindahan alam yang sangat menawan serta memiliki daya pesona keunikan tersendiri dibanding dengan daerah lain, menjadi nilai keunggulan dan daya saing untuk menjadi sasaran tujuan tourism dari dalam daerah maupun luar daerah bahkan manca negara. Kondisi tersebut juga didukung dengan posisi Kabupaten Temanggung yang sangat strategis karena terletak diantara jalur penghubung segitiga Candi Piramid, yaitu Candi Borobudur, Candi Dieng dan Candi Gedong Songo dan berada di tengah-tengah segitiga pusat kegiatan ekonomi

di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Semarang (77 km), Yogyakarta (64 km), dan Purwokerto (134 km) dimana keberadaan tersebut membawa dampak positif bagi perekonomian Kabupaten Temanggung.



Gambar 2.84
Pesona Alam Posong Kledung

Telah ditandatangani kesepakatan bersama antara Badan Pelaksana Otoritas Borobudur (BPOB) dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung di Pasar Papringan yang disaksikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia Sandiogo Uno, yang merupakan kesepakatan bersama terkait dengan sinergitas pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Temanggung dalam rangka mendukung program percepatan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kawasan pariwisata Borobudur. Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung siap mendukung program-program pemerintah pusat dengan menciptakan destinasi-destinasi wisata baru yang mempunyai keunikan dan mampu untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Temanggung.

Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi masyarakat Temanggung Pasca Covid-19, Pemerintah Kabupaten Temanggung mencanangkan inovasi pembangunan Daerah Pinggiran, melalui program tersebut potensi-potensi desa yang dimiliki setiap desa terutama yang berada di Daerah Pinggiran akan menjadi sasaran prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Temanggung, karena melalui program tersebut secara tidak langsung akan terjadi pemerataan pembangunan wilayah dan akan berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian secara merata.

Sebagai salah satu penyangga Kawasan Pariwisata Borobudur Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengembangkan Inovasi membangun kearifan lokal Daerah Pinggiran Di Kabupaten Temanggung, melalui program percepatan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 95 Tahun 2021 tentang Desa Wisata Di Kabupaten Temanggung, melalui dinas kebudayaan dan pariwisata siap untuk mendukung program-program pemerintah daerah dan pusat dengan menciptakan destinasi-destinasi wisata baru yang mempunyai keunikan dan mampu untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Temanggung. Adapun salah satu langkah yang dikembangkan oleh dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung adalah mengembangkan Desa Wisata. Melalui program tersebut desa-desa yang mempunyai potensi menjadi destinasi wisata akan tumbuh dan berkembang secara simultan, dimana dengan melalui dana desa sesuai dengan kewenangannya, pemerintah desa akan mampu lebih terbuka untuk bergerak, merencana, mengelola, melaksanakan, menganggarkan, dan mengembangkan wisata desa secara swakelola.

Ada 21 Desa Wisata yang sudah dikembangkan dikabupaten Temanggung diantaranya adalah Desa Wisata Tlahap dengan obyek wisata yang sudah memenuhi jagad maya yaitu Wista Alam Posong yang menawarkan pemandangan *golden sunrise* yang menghiasi *view of seven mountains* (Gunung Sumbing, Merapi, Ungaran, Telomoyo, Merbabu, Andong, dan Muria). Selain *view mountains*, wisatawan dapat berfoto di spot-spot dengan latar belakang yang begitu elok, bisa bersantai di digazebo-gazebo taman, dapat bermalam dengan tenda-tenda *camping* untuk meningmati keindahan posong diwaktu malam dan tentunya juga disediakan berbagai kuliner sebagai bentuk servis pelayanan dalam memberikan kepuasan pengunjung.



Gambar 2.85
Obyek Desa Wisata Tegalrejo

Air Suci Umbul Jumprit merupakan obyek wisata mata air yang berada di Desa Wisata Tegalrejo Kecamatan Ngadirjo Kabupaten Temanggung. Air suci tersebut menurut umat Budha dapat menjadi pembersih jiwa manusia, sehingga setiap menjelang perayaan waisak sejumlah bikhu akan mengambil air di mata air umbul jumprit lereng Gunung Sindoro untuk dibawa dan disemayamkan di Candi Mendut dan Candi Borobudur sebagai sarana puja kepada para dewa dan bodhisattva. Pengambilan air suci merupakan tradisi Tri Suci Waisak yang dilaksanakan oleh umat Budha Indonesia dan sudah berjalan dari tahun ke tahun. Lebih dari ribuan botol air suci umbul jumprit yang diambil untuk disakralkan dalam puja Tri Suci Waisak yang kemudian bisa dimanfaatkan siapa saja sebagai air berkah yang dapat membersihkan jiwa.

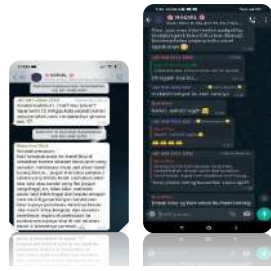
Dalam acara ritual pengambilan air suci dihadiri oleh puluhan Bikhu dari berbagai Sangha dan ratusan umat budha dari berbagai wilayah yang ada ditanah air bahkan jauga ada yang dari manca negara. Rangkaian acara menyambut Tri Suci Waisak tersebut membuat daya tarik masyarakat umum untuk ikut menyaksikan, sehingga menambah semaraknya acara ritual. Daya Tarik Wisata Umbul Jumprit selain agenda tahunan juga memiliki keunikan yang lain yang dapat dilihat setiap saat, diantaranya menikmati keindahan mata air, banyak dijumpainya ratusan satwa kera, Wahana alam jumprit dengan berbagai spot-spot dan game dibawah rindangnya hutan pinus. Lebih dari 1.000 tourism yang datang ke Desa Wisata Tegalrejo dalam setiap bulannya, yang tentunya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tegalrejo dan sekitarnya.

5. PUSKESMAS BERDAYA

Dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didalamnya ada dimensi kesehatan dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH) yang menunjukkan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh oleh seseorang sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat, yang merupakan Indikator Kinerja Utama dalam kinerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung mengambil suatu kebijakan PUSKESMAS BERDAYA mewajibkan 1 (satu) inovasi setiap Puskesmas untuk mendukung program pelayanan masyarakat. Kebijakan yang diambil Dinas Kesehatan direspon sangat positif oleh 26 (duapuluh enam) Puskesmas yang ada di Kabupaten Temanggung, dengan dibuktikan adanya inovasi yang telah dilaporkan. Inovasi-inovasi yang dilaksanakan oleh setiap puskesmas yang ada di Kabupaten Temanggung membuat pelayanan semakin efisien dan efektif dan sangat mendapat respon dari pemerintah desa dan masyarakat.

Secara lebih khusus, PUSKESMAS BERDAYA ini didorong untuk dapat melakukan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan penurunan angka stunting. Beberapa inovasi dalam PUSKESMAS BERDAYA yang berkontribusi dalam penurunan angka stunting diantaranya: Siaga Persalinan Aman Ojo Ucul Jemput Ibu Inpartu (SI PANJUL JITU) Plus, Optimalisasi Cegah Stunting sebelum Genteng (Ogah Ting Ting), Kesehatan Tradisional Gizi Pemberdayaan Masyarakat bersama Cegah Stunting (Ketan Isi Sak Ceting), Pemantauan Terpadu Ibu Hamil, Bayi dan Balita Resiko Tinggi (PEDULI HATI), Griya Gencar Gizi (Gregezi), Pendampingan Resiko Tinggi Ibu Hamil oleh Kader (Parestika), dan Sosialisasi dan Edukasi Timbang Anak Balita untuk Mencegah Stunting (Setan Bunting).





NGEMIL
Ngobrol Bareng 16Kamil
Forum diskusi terbuka
Multidisipliner
Lintas Program
24 jam online



Gambar 2.86
Monitoring dan Evaluasi Inovasi Sipanjul Jitu Plus di
Puskesmas Kedu Temanggung

6. SABUK GUNUNG

Pemerintah Kabupaten Temanggung merupakan daerah kawasan penyangga yang menjadi tumpuan pasokan air bagi daerah dibawahnya sehingga kelestarian lingkungan di lereng gunung sumbing, sindoro dan prau harus dijaga. Bupati Temanggung merupakan sosok penggiat lingkungan yang sangat memperhatikan konservasi alam dan senantiasa mengajak masyarakat untuk melestarikan alam. Salah satu programnya adalah Konservasi Alam Gerakan Sabuk Gunung yaitu suatu gerakan dalam upaya pelestarian alam, menghidupkan mata air yang telah kering, menanggulangi tanah longsor di kawasan gunung sumbing, sindoro dan prau yang dampaknya jangka panjang. Beliau terpilih mewakili Indonesia untuk nominator penerima penghargaan *Environmentally Sustainable City (ESC) Award* dari Sekretariat ASEAN, di depan tim Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Luas lahan kritis di Kabupaten Temanggung seluas 10.218.59 ha yang tersebar di 20 (dua puluh) Kecamatan, adapun luas lahan kritis yang terluas berada di Kecamatan Kledung dengan luas 1.772.34 ha. Sabuk Gunung dimaksudkan untuk mendorong semua unsur stakeholder agar termotivasi semangat peduli dalam berpartisipasi menjaga pelestarian lingkungan, agar alam kabupaten temanggung tetap terjaga dan terhindar dari krisis air bersih, serta menanggulangi dari bahaya tanah longsor. Gerakan Sabuk Gunung ini juga mendukung adanya kegiatan Kampung Pro Iklim di

Kabupaten Temanggung melalui desa-desa salah satunya Desa Gunung Gempol.



Gambar 2.87
Kegiatan Sinergitas Sabuk Gunung antara Pemerintah, FTJSLP, TNI, Ormas dan Mensos

Gerakan sabuk gunung di mulai dengan penanaman tanaman konservasi sejuta pohon, dimana tanaman ini diperoleh dari pemerintah, FTJSLP, Masyarakat, dan Relawan yang ditanam di lereng Sindoro, Sumbing dan Prau.

7. DESA BEBAS SAMPAH

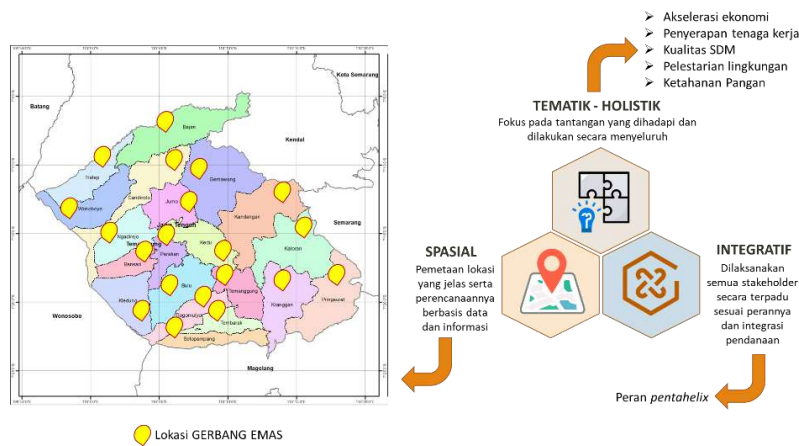
Pengelolaan sampah menurut UU No. 18 tahun 2008 menyebutkan bahwa pengelolaan sampah meliputi kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan meliputi upaya pengurangan dan penanganan sampah. Undang-undang tersebut mendorong perubahan paradigma pengelolaan sampah dari kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan di sumber (reduce at source) dan daur ulang sumber daya (resources recycle). Maka, untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Kabupaten Temanggung disusun sebuah inovasi Desa Bebas Sampah. Desa Bebas Sampah merupakan inovasi untuk dalam pengelolaan sampah. Dalam Pengelolaan sampah tersebut masyarakat diajak untuk dapat memilah dan menfaatkan sampah yang ada. Selain itu, keunggulan dari inovasi ini adalah telah terbentuknya Dewan Persampahan, fasilitator persampahan mulai dari tingkat kecamatan, desa, sampai Penggiat Sampah Rumah Tangga (PSRT). Mereka bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat masing-masing desa.



Gambar 2.88
Kegiatan Desa Bebas Sampah

Tema RKP Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, adapun keterkaitan inovasi dengan tema RKP Tahun 2023 adalah melalui GERBANG EMAS yang merupakan gerakan peningkatan produktivitas di sektor UMKM, pertanian, pariwisata yang berasal dari masyarakat dapat menciptakan akses dan kesempatan yang luas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan di bidang kesehatan dan lingkungan juga menjadi fokus dalam GERBANG EMAS dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Inovasi GERBANG EMAS relevan dengan konsep perencanaan berbasis THIS (Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial). Konsep tematik-holistik karena fokus pada tantangan yang dihadapi dan dilakukan secara menyeluruh. Konsep integratif karena dilaksanakan oleh semua stakeholder secara terpadu dalam bentuk kolaborasi sesuai dengan perannya masing-masing dan integrasi pendanaan. Konsep spasial karena pemetaan lokasi yang jelas serta perencanaannya berbasis data dan informasi.



Gambar 2.89
Keterkaitan Inovasi GERBANG EMAS dengan Konsep THIS

Kebaruan dari inovasi GERBANG EMAS adalah adanya **gerakan membangun dari desa pinggiran** dengan tujuan peningkatan kesehatan, pelestarian lingkungan dan pemulihan ekonomi masyarakat yang dilakukan semua stakeholder/*pentahelix* (Pemerintah dan Non Pemerintah) sesuai dengan peran masing-masing di lokus yang berbeda untuk meningkatkan perekonomian dan kesehatan masyarakat serta pelestarian lingkungan dan kualitas pelayanan publik. Stakeholder yang berkolaborasi saling bertukar pikiran, bergerak bersama dan terjadilah simbiosis mutualisme. Kolaborasi dilakukan mulai dari awal perencanaan sampai hasil akhir dari pembangunan. Disisi lain, kolaborasi dilakukan dengan pendekatan berbasis masyarakat dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Selain itu, informasi seputar inovasi didukung dengan **digitalisasi informasi** yang dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi Temanggung Gandem. Selain itu, kebaruan dari masing-masing inovasi yang terhimpun dalam Gerbang Emas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Shibiru, meliputi pelestarian lingkungan hidup dengan tanaman *Strobilathes cusia* penghasil pasta pewarna alam berwarna biru, pengolahan pewarna alam pasta SHIBIRU dengan gula singkong sebagai reduktor yang tidak diterapkan di daerah lain, produksi pewarna alam tanpa limbah (*zero waste*) dan manajemen koperasi khusus pengelolaan SHIBIRU dari hilir sampai dengan hulu (budidaya, produksi, pemasaran).

2. Sekolah Kopi, meliputi pusat pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan budidaya kopi dari hulu ke hilir dan potensi lokal lainnya, serta mendekatkan fasilitas pemberdayaan bagi masyarakat (fasilitasi pengemasan, pemasaran digital e-commerce, penerbitan PIRT, peningkatan kapasitas dan kelembagaan, serta pelatihan jurnalis remaja).
3. Kenangan Bansari, meliputi perpaduan antara teknologi pertanian dengan budaya lokal (Sadran Kali dan Sadran Gunung), kegiatan dikelola bersama dalam kelompok tani dengan sudah menjalin kerjasama berupa kemitraan penjualan dengan penjamin (off taker) sehingga untuk pasar hasil pertanian sudah ada dan terjamin, serta tersedianya Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) berupa korporasi, PT (Perseroan Terbatas), KUBE (Kelompok Usaha Bersama).
4. Desa Wisata, meliputi kekayaan intelektual komunal yang sudah diakui yaitu jaran kepeng, kearifan lokal berupa warisan budaya (benda dan tak benda), pelestarian adat, kesenian jaran kepeng terbanyak di Indonesia (721 kelompok), penerapan muatan lokal kesenian jaran kepeng pada kurikulum pembelajaran Sekolah Dasar dan Menengah (512 sekolah), daya tarik potensi bambu berupa sepeda bambu.
5. Puskesmas Berdaya, meliputi Kegiatan penanganan stunting berupa Si Panjul Jitu (Siaga Persalinan Aman Ojo Ucul Jemput Ibu Inpartu), Canting (Contoh Menu Makanan untuk Mencegah dan Menangani Stunting), Kelanting (Kelas Balita Stunting), dan Wisuda ASI.
6. Sabuk Gunung, meliputi gerakan konservasi dengan ekonomi produktif berbasis lingkungan, adanya pengendalian ekosistem, serta melibatkan relawan yang berasal dari lapisan masyarakat baik organisasi maupun individu. Selain itu, sebagai perwujudan menjaga konsistensi serta meningkatkan semangat dan komitmen masyarakat dalam menjaga alam dan lingkungan serta bentuk penghormatan kepada Bupati Temanggung Masjchun Sofwan diwujudkan dalam bentuk Masjchun Sofwan Awards.
7. Desa Bebas Sampah, meliputi Pengelolaan persampahan yang

mempunyai struktur kelembagaan dari kabupaten hingga rukun tetangga, dan adanya Layanan Aduan Pengelolaan Persampahan.

Kerangka Kerja Logis (KKL) inovasi dari tahap input sampai dengan dampak dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.399
Kerangka Kerja Logis (KKL) GERBANG EMAS

Uraian	Kriteria Keberhasilan (Ciri yang Relevan)	Indikator Kinerja
Dampak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ekonomi daerah 2. Peningkatan kesehatan masyarakat 1. Pelestarian lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Tingkat Pengangguran Terbuka 3. Indeks Pembangunan Manusia 4. Angka Harapan Hidup 5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Outcome Antara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan nilai PDRB 1. Penurunan jumlah pengangguran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai PDRB 2. Jumlah pengangguran
Outcome Langsung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pendapatan masyarakat 2. Pengurangan pengangguran 3. Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup 4. Peningkatan indeks kepuasan masyarakat 5. Peningkatan penanganan stunting 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Masyarakat 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 3. Indeks Kualitas Air 4. Indeks Kualitas Udara 5. Indeks Kepuasan Masyarakat 6. Prevalensi stunting
Output	1. Peningkatan volume produksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah produksi kopi 2. Jumlah produksi bawang merah 3. Jumlah produksi bawang putih 4. Jumlah produksi bawang cabai 5. Jumlah produksi pasta shibiru
	2. Peningkatan produk ekspor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah ekspor kopi 2. Jumlah ekspor pasta shibiru
	3. Keterlibatan masyarakat atau lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah masyarakat yang terlibat dalam Sekolah Kopi 2. Jumlah masyarakat yang terlibat pada produksi pertanian 3. Jumlah masyarakat yang terlibat pada produksi pasta shibiru 4. Jumlah keterlibatan donatur bibit Sabuk Gunung 5. Jumlah relawan yang terlibat dalam Sabuk Gunung
	4. Peningkatan jumlah kunjungan wisata	Jumlah wisatawan
	5. Peningkatan penjualan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penjualan kopi 2. Jumlah penjualan bawang merah 3. Jumlah penjualan bawang putih 4. Jumlah penjualan cabai 5. Jumlah penjualan pasta shibiru 6. Jumlah pendapatan kunjungan wisata
	6. Lahan kritis yang tertangani	Luasan lahan kritis yang tertangani
	7. Peningkatan jumlah bibit pohon yang terdistribusi	Jumlah bibit pohon yang terdistribusi
	8. Pengelolaan persampahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase cakupan pelayanan persampahan 2. Jumlah desa <i>zero waste</i> 3. Persentase sampah terkelola

Uraian	Kriteria Keberhasilan (Ciri yang Relevan)	Indikator Kinerja
Kegiatan/Proses	1. Pemerintah memetakan potensi baik SDA dan SDM serta permasalahan di Kabupaten Temanggung	Daftar potensi dan masalah
	2. Pengembangan wilayah berdasarkan potensi yang dimiliki untuk mengungkit ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berfokus di desa pinggir	Rencana pengembangan wilayah
	1. Pemerintah menetapkan suatu gerakan kolaboratif GERBANG EMAS (Gerakan Pembangunan untuk Peningkatan Kesehatan, Pelestarian Lingkungan dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat). a. Shibiru b. Sekolah Kopi c. Kenangan Bansari d. Desa Wisata e. Puskesmas Berdaya f. Sabuk Gunung g. Desa Bebas Sampah	SK Gerbang Emas
	2. Fasilitasi dan penguatan kelembagaan	SK Tim Pelaksana Inovasi
	3. Penyebarluasan informasi/sosialisasi inovasi	Foto/gambar sosialisasi
	4. Kolaborasi bersama stakeholder non pemerintah (pentahelix) sesuai dengan peran dan lokus masing-masing	Dokumentasi kegiatan
	5. Pemanfaatan teknologi untuk digitalisasi informasi	Foto/gambar pemanfaatan teknologi
	Input	1. Regulasi
2. Alokasi anggaran		APBN, APBD, APBDes, CSR
3. Sumber daya manusia		27 unsur yang tergabung dalam SK Tim Pelaksana Inovasi
4. Inisiator dan penanggungjawab		1. Inisiator: Perangkat Daerah 2. Penanggungjawab : Bupati Temanggung
5. Stakeholder yang terlibat		Perangkat Daerah, pelaku usaha, akademisi, media, ormas, komunitas, kelompok masyarakat, perorangan
6. Pemanfaatan teknologi		Jaringan internet desa, sistem Informasi yang tersedia, media sosial, teknologi ramah lingkungan
7. Sarana dan prasarana		Jaringan fiber optik, infrastruktur dasar, alat produksi

Uraian	Kriteria Keberhasilan (Ciri yang Relevan)	Indikator Kinerja
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan ekonomi belum optimal 2. Masih adanya pengangguran 3. Masih adanya lahan kritis 4. Masih adanya stunting 	
Penyebab permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian belum optimal 2. Adanya ketidaksesuaian ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan lapangan kerja 3. Kurangnya kesadaran pola asuh yang benar dalam keluarga 4. Belum optimalnya rehabilitasi lahan 5. Kurangnya kesadaran ibu hamil memeriksakan kesehatan terkait dengan penyakit penyerta 	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

Fase Inovasi

GERBANG EMAS ini sudah dilaksanakan di Kabupaten Temanggung yang dapat dijelaskan melalui tahapan inovasi sebagai berikut:



Gambar 2.90
Tahapan Inovasi GERBANG EMAS

Gambar di atas menunjukkan tahapan GERBANG EMAS yang telah dilaksanakan. Adapun tahapan rencana tindak lanjut dari inovasi GERBANG EMAS yang akan dilaksanakan meliputi peningkatan kualitas sistem digitalisasi informasi dan penguatan sumber daya manusia.

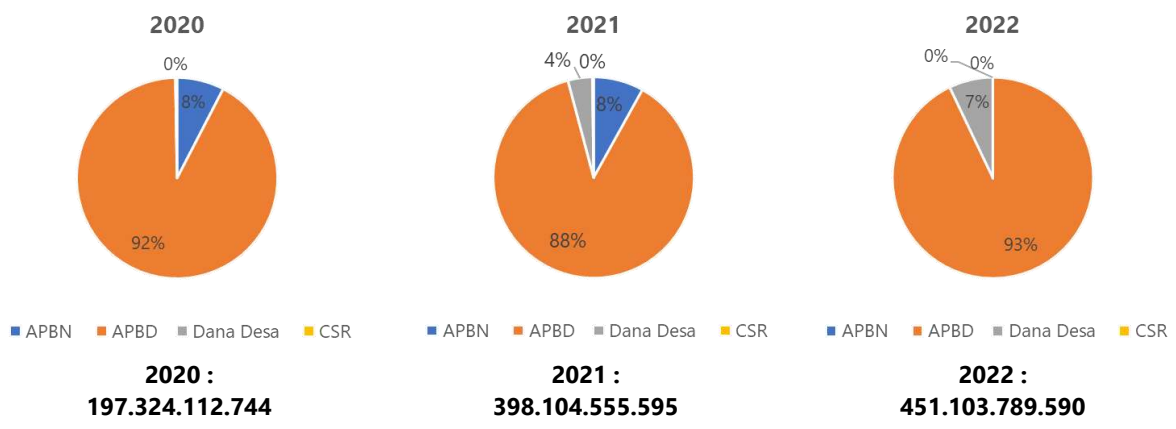
Input Inovasi

1. Regulasi

Regulasi yang dikeluarkan untuk mendukung inovasi adalah (1) Perda Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, (2) Perda Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah, (3)

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Temanggung dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, (4) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 95 Tahun 2021 tentang Desa Wisata, (5) Keputusan Bupati Temanggung Nomor 180/188 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 180/258 Tahun 2019 tentang Desa Wisata di Kabupaten Temanggung, (6) Keputusan Bupati Temanggung Nomor 072.3/0293 Tahun 2021 tentang Penetapan Nama-Nama Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021, (7) Keputusan Bupati Temanggung Nomor 072.3/002309 Tahun 2021 tentang Penetapan Nama-Nama Inovasi ASN dan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021, (8) Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/871 Tahun 2022 tentang Gerakan Pembangunan Untuk Peningkatan Kesehatan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat, (9) Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/872 Tahun 2022 tentang Tim Pelaksana Gerakan Pembangunan Untuk Peningkatan Kesehatan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat, dan (10) Surat Edaran Nomor 522.54/003 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Konservasi Tanah dan Air Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung.

2. Alokasi anggaran



Gambar 2.91
Alokasi Anggaran GERBANG EMAS

Selain alokasi anggaran diatas, terdapat dukungan yang berasal dari swadaya masyarakat berupa tenaga dan pemikiran, serta dukungan akademisi yang dibuktikan oleh MoU dengan 18 Perguruan Tinggi.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam inovasi GERBANG EMAS secara keseluruhan sejumlah 27 unsur (>10.000 orang) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/872 Tahun 2022 tentang Tim Pelaksana Gerakan Pembangunan Untuk Peningkatan Kesehatan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat.

4. Inisiator dan penanggungjawab pelaksana inovasi

Inisiator pelaksana inovasi adalah Perangkat Daerah, sedangkan penanggungjawab pelaksana inovasi adalah Bupati Kabupaten Temanggung.

5. Institusi/stakeholders lain yang terlibat

Institusi/stakeholders yang terlibat dalam GERBANG EMAS dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.92
SDM dan Peran Nyata dalam GERBANG EMAS

6. Pemanfaatan teknologi

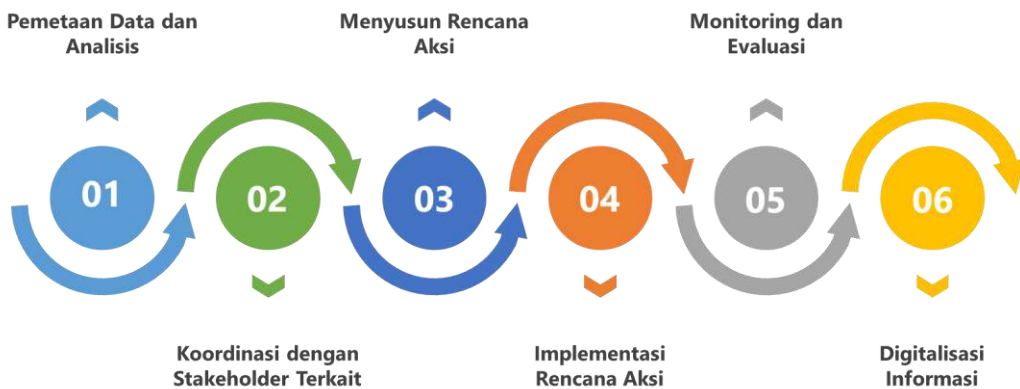
Jaringan internet desa (tersebar 207 desa), sistem informasi yang tersedia (Temanggung TV, eRTe FM, Temanggung Gandem), media sosial dan teknologi ramah lingkungan.

7. Sarana dan prasarana yang diperlukan

Alat produksi shibiru (perajang daun, bak dan mesin aerasi), kendaraan operasional, komputer, form monev, jaringan fiber optik

Metode Pelaksanaan Inovasi

Metode pelaksanaan inovasi dapat dijelaskan melalui tahapan pelaksanaan inovasi yang dilakukan pada inovasi GERBANG EMAS sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.93
Metode Pelaksanaan Inovasi

Alur dan tahapan pelaksanaan inovasi GERBANG EMAS, meliputi:

1. Pemetaan data dan analisis, mencakup pemetaan data potensi serta permasalahan yang ada di Kabupaten Temanggung. Permasalahan yang saat ini menjadi prioritas untuk ditangani adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat, stunting, dan konservasi lahan. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi menjadi kekuatan untuk menjawab permasalahan tersebut.
2. Koordinasi dengan stakeholder terkait (pentahelix), dalam rangka menyusun langkah-langkah strategi untuk dapat menjawab permasalahan melalui pemanfaatan potensi.
3. Menyusun rencana aksi, berupa gerakan yang dinamakan GERBANG EMAS yang diinisiasi dari masyarakat di desa pinggiran untuk pemerataan pembangunan. Gerakan ini bertujuan untuk peningkatan ekonomi, lingkungan dan kesehatan masyarakat
4. Implementasi rencana aksi, yang diwujudkan melalui SK Tim Pelaksana GERBANG EMAS untuk melaksanakan peran masing pada

gerakan yang terdiri dari Shibiru, Sekolah Kopi, Kenangan Bansari, Puskesmas Berdaya, Desa Wisata, dan Sabuk Gunung.

5. Monitoring dan evaluasi dengan pembentukan tim monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan inovasi Daerah menggunakan tools form offline maupun form online.
6. Digitalisasi informasi untuk informasi yang berkaitan dengan elemen-elemen pada GERBANG EMAS dapat diakses melalui aplikasi Temanggung Gadem dan media sosial.

Proses Inovasi

Proses inovasi GERBANG EMAS yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung secara garis besar dapat dijelaskan melalui poin sebagai berikut:

1. Pemerintah memetakan potensi baik SDA dan SDM serta permasalahan di Kabupaten Temanggung.
2. Pengembangan wilayah berdasarkan potensi yang dimiliki untuk mengungkit ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berfokus di desa pinggiran.
3. Pemerintah menetapkan suatu gerakan kolaboratif GERBANG EMAS.
 - a. Shibiru
 - Penanaman *Strobilanthes cusia*
 - Pengolahan tanaman *Strobilanthes cusia* menjadi pasta shibiru
 - Pelatihan dan pemberdayaan masyarakat untuk pewarnaan menggunakan pasta shibiru
 - Penjualan pasta shibiru melalui koperasi shibiru
 - Pemasaran baik domestic maupun mancanegara
 - b. Sekolah Kopi
 - Pembentukan sekolah kopi
 - Edukasi, pelatihan (barista, bisnis online, branding dan packaging), dan budidaya kopi
 - Pendampingan kegiatan maupun produk sekolah kopi
 - Penjualan dan pemasaran produk



- c. Kenangan Bansari
 - Penanaman benih komoditas bawang merah, bawang putih dan cabai
 - Pengelolaan komoditas bawang merah, bawang putih dan cabai
 - Penjualan komoditas bawang merah, bawang putih dan cabai
 - Pemasaran baik regional maupun nasional
 - d. Desa Wisata
 - Penetapan desa wisata
 - Publikasi desa wisata
 - Kunjungan ke desa wisata
 - e. Puskesmas Berdaya
 - Pencanaan program penanganan stunting
 - Implementasi program penanganan stunting
 - f. Sabuk Gunung
 - Pendistribusian bibit pohon/tanaman
 - Penanaman bibit pohon/tanaman
 - g. Desa Bebas Sampah
 - Cakupan pelayanan persampahan
 - Sampah yang terkelola
4. Fasilitasi dan penguatan kelembagaan melalui Tim Pelaksana Inovasi.
 5. Penyebarluasan informasi/sosialisasi inovasi.
 6. Kolaborasi bersama stakeholder non pemerintah (pentahelix) sesuai dengan peran dan fokus masing-masing.
 7. Pemanfaatan teknologi untuk digitalisasi informasi GERBANG EMAS melalui aplikasi Temanggung Gandem.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan inovasi GERBANG EMAS terjadi perkembangan pada kondisi sebelum dan sesudah adanya inovasi tersebut, sebagaimana penjelasan gambar berikut:





Gambar 2.94
Perkembangan Pelaksanaan GERBANG EMAS

Adapun masalah yang dihadapi dan tindak lanjut pelaksanaan GERBANG EMAS sebagaimana berikut:



Gambar 2.95
Masalah dan Tindak Lanjut dalam GERBANG EMAS

Kerangka pemantauan dan evaluasi kegiatan GERBANG EMAS menggunakan instrument evaluasi berupa kuesioner/angket dan wawancara, survei kepuasan masyarakat, testimoni masyarakat dan survei lapangan. Dalam pelaksanaan inovasi GERBANG EMAS diintegrasikan dengan pemanfaatan teknologi melalui media informasi Temanggung Gandem dan publikasi informasi melalui media sosial. Jaringan internet desa menjadi suatu dukungan akses bagi desa pinggiran terhadap inovasi.

Output Inovasi

Kesesuaian output inovasi dengan Kerangka Kerja Logis sebagaimana tabel 2.399 diatas, dapat dijelaskan bahwa output dari inovasi GERBANG EMAS dapat diukur melalui kriteria keberhasilan dari peningkatan volume produksi, peningkatan produk ekspor, pemberdayaan masyarakat, peningkatan jumlah kunjungan wisata, lahan kritis yang tertangani, peningkatan jumlah pohon yang ditanam, peningkatan indeks kualitas tutupan lahan, dan peningkatan penjualan. Kriteria keberhasilan tersebut didukung dengan data capaian indikator sebagai berikut:

produksi

	Satuan	2020	2021	2022*
Kopi	Ton	10.639,98	11.310,67	11.310,67
Bawang Merah	Kuintal	4.600	4.950	4.950
Bawang Putih	Kuintal	8.160	7.560	7.560
Cabai	Kuintal	1.358,5	40.331,0	40.331,0
Pasta Shibiru	Ton	3,84	8,50	8,50

*masih menggunakan data 2021, belum ada publikasi data 2022

jumlah penjualan

	Satuan	2020	2021	2022*
Kopi	Juta Rp	0	5.311	5.311
Bawang Merah	Juta Rp	11.500	12.375	12.375
Bawang Putih	Juta Rp	20.400	18.900	18.900
Cabai	Juta Rp	2.717	120.993	120.993
Pasta Shibiru	Juta Rp	477	1.056	1.056

*masih menggunakan data 2021, belum ada publikasi data 2022

ekspor

	Satuan	2020	2021	2022*
Kopi	Ton	7.276,86	7.742,01	7.742,01
Pasta Shibiru	Kg	0	750	750

*masih menggunakan data 2021, belum ada publikasi data 2022

pariwisata

	Satuan	2020	2021	2022*
Jumlah wisatawan	Orang	223.765	252.015	252.015
Jumlah pendapatan kunjungan pariwisata	Rp	1.118.825.000	1.260.075.000	1.260.075.000

*masih menggunakan data 2021, belum ada publikasi data 2022

lingkungan hidup

	Satuan	2020	2021	2022*
Jumlah bibit yang terdistribusi	Bibit	-	74.550	74.550
Luasan lahan kritis tertangani	Ha	-	186,375	186,375
Jumlah keterlibatan donatur	Lembaga	-	6	6
Jumlah relawan terlibat	Organisasi	-	70	70
Persentase cakupan pelayanan persampahan	Persen	45,33	53,63	53,63
Jumlah desa zero waste	Desa	3	4	4
Persentase sampah terkelola	Persen	24,32	32,00	32,00

*masih menggunakan data 2021, belum ada publikasi data 2022

pemberdayaan masyarakat

Jumlah masyarakat yang terlibat di Sekolah Kopi

	Satuan	2020	2021	2022*
Petani kopi	Orang	6.475	6.767	6.767
Peserta sekolah kopi	Orang	-	25	25

Jumlah masyarakat yang terlibat di produksi pertanian

	Satuan	2020	2021	2022
Petani	Orang	-	1.120	1.120

Jumlah masyarakat yang terlibat di produksi pasta Shibiru

	Satuan	2020	2021	2022*
Petani	Orang	179	107	107
Pegawai Produksi	Orang	6	9	9
Anggota Koperasi	Orang	184	113	113
Masyarakat Lain	Orang	870	2.250	2.250

*masih menggunakan data 2021, belum ada publikasi data 2022

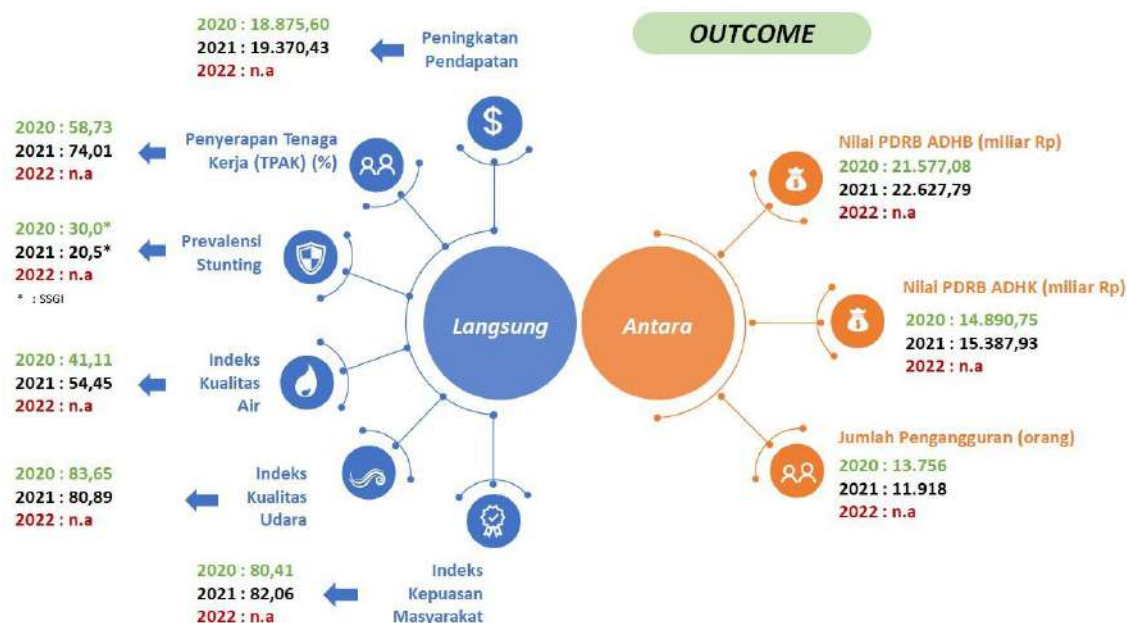
Gambar 2.96
Data Capaian Output GERBANG EMAS

Outcome Inovasi

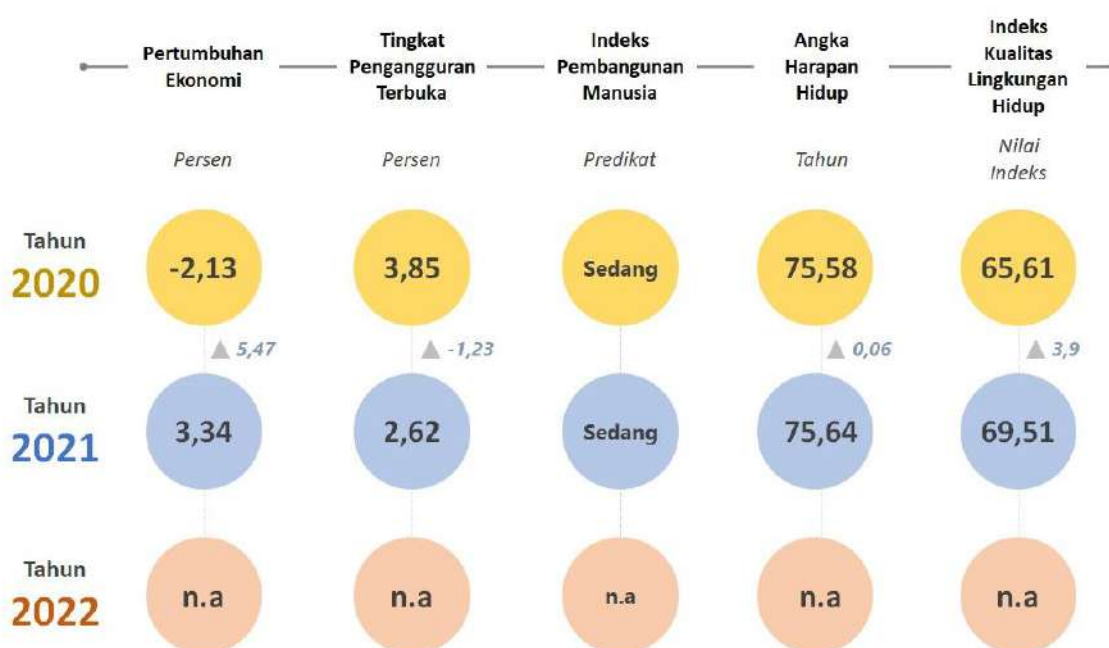
Kesesuaian outcome inovasi dengan Kerangka Kerja Logis sebagaimana tabel 2.399 diatas, terdiri dari outcome antara dan outcome langsung dari inovasi GERBANG EMAS dengan kriteria keberhasilan sebagai berikut:

1. Peningkatan nilai PDRB
2. Penurunan jumlah pengangguran
3. Peningkatan pendapatan masyarakat
4. Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup
5. Peningkatan indeks kepuasan masyarakat

Adapun dampak dari inovasi tersebut antara lain untuk peningkatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pelestarian lingkungan. Kriteria keberhasilan tersebut didukung dengan data capaian indikator sebagai berikut:



Gambar 2.97
Data Capaian Outcome GERBANG EMAS



Gambar 2.98
Data Capaian Dampak GERBANG EMAS

Kesesuaian outcome inovasi dan dampak inovasi dengan permasalahan daerah dalam RKPD Tahun 2023 yang berkaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.400
Kesesuaian Outcome Inovasi dan Dampak Inovasi
dengan Permasalahan Daerah dalam RKPD
Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Permasalahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023	Outcome Inovasi/ Dampak Inovasi GERBANG EMAS
1	Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan PDRB (nilai PDRB ADHB) • Peningkatan pendapatan masyarakat (pendapatan per kapita) • Penurunan jumlah pengangguran (jumlah pengangguran, penyerapan tenaga kerja) • Peningkatan ekonomi daerah (pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka)
2	Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas sumber daya manusia (IPM dan prevalensi stunting) • Peningkatan indeks kepuasan masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat)
3	Masih adanya kasus gizi buruk	
4	Masih tingginya kasus kematian ibu	
5	Masih adanya kasus kematian bayi dan balita	
6	Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan PDRB (nilai PDRB ADHB) • Peningkatan pendapatan masyarakat (pendapatan per kapita) • Penurunan jumlah pengangguran (jumlah pengangguran, penyerapan tenaga kerja) • Peningkatan ekonomi daerah (pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka)
7	Perlunya peningkatan penanganan persampahan di Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup (indeks kualitas air, indeks kualitas udara) • Pelestarian lingkungan (indeks kualitas lingkungan hidup)
8	Perlunya peningkatan konservasi lingkungan hidup	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

Keterkaitan inovasi GERBANG EMAS dengan peningkatan SDM dapat disampaikan bahwa gerakan GERBANG EMAS ini mendukung untuk peningkatan SDM yang berdaya saing melalui upaya penurunan prevalensi stunting dan penguatan di bidang kesehatan, penurunan jumlah pengangguran maupun peningkatan perekonomian masyarakat.

Selain itu, keterkaitan inovasi GERBANG EMAS dengan pertumbuhan berkualitas dapat dijelaskan bahwa produktivitas akselerasi ekonomi yang inklusif melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesehatan yang didukung dengan pelestarian lingkungan akan menghasilkan suatu transformasi baik dari sisi SDMnya, produktivitas ekonominya, maupun pemanfaatan teknologi dengan digitalisasi informasi. Inovasi GERBANG EMAS juga merupakan suatu upaya pemulihan ekonomi dengan tata Kelola pemerintahan yang menerapkan *good governance* maupun reformasi struktural dengan melibatkan sinergi pentahelix (Pemerintah, pelaku usaha, akademisi, masyarakat dan media). Monitoring dan evaluasi juga dilakukan baik dari Pemerintah, stakeholder pelaksana terkait, maupun pengguna inovasi yaitu masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung program pembangunan daerah agar berjalan efektif dan efisien melalui berbagai strategi diantaranya melaksanakan kajian, penelitian, kerjasama dengan akademisi melalui jejaring KKN dan Pengabdian Dosen. Adapun kajian, penelitian dan pengabdian yang dilaksanakan diantaranya adalah :

1. Melaksanakan Analisis indikator kinerja utama daerah yang meliputi 8 Indikator Kinerja Utama Daerah (IKUPD) yaitu Indek Pembangunan Pemuda, Gotong Royong, Rasa Aman, Toleransi, Pembangunan Kebudayaan, Pembangunan Olah Raga, Kemudahan Berusaha dan Perencanaan Pembangunan Daerah. Analisis Indikator Kinerja Utama Daerah (IKUPD) Kabupaten Temanggung dilaksanakan setiap tahun sekali dan sudah 3 (tiga) tahun berjalan bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Universitas Diponegoro (P5 UNDIP) Semarang. Penyusunan analisis Indikator Kinerja Utama Daerah tersebut dilaksanakan sebagai perwujudan strategi tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), IKUPD sebagai alat ukur dalam tata kelola pemerintah daerah sehingga dapat mengukur kinerja pemerintah daerah, dan berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi capaian perencanaan

pembangunan ke depan. Adapun hasil kajian analisis IKUPD dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.401
Hasil Kajian Analisis IKUPD

No.	Indikator	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Indeks Pembangunan Pemuda	3,35	3,57	3,78	<i>dalam proses perhitungan</i>
2	Indeks Gotong Royong	4,05	4,17	4,33	
3	Indeks Toleransi	4,14	4,00	4,50	
4	Indeks Rasa Aman	4,41	4,36	4,48	
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	-	-	3,62	
6	Indeks Pembangunan Olahraga	-	-	3,31	
7	Indeks Kemudahan Berusaha	-	-	3,90	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022

2. Melaksanakan Analisis Makro Ekonomi bekerjasama dengan Magister Ekonomika Pembangunan FEB UGM, yang merupakan telaah atas kinerja perekonomian di Kabupaten Temanggung serta kinerja pada bidang lainnya. Penyusunan dokumen ini untuk memberikan gambaran atau pendekatan yang dapat mempermudah perencanaan pembangunan bidang ekonomi Kabupaten Temanggung. Indikator-Indikator dalam analisis ekonomi makro yang digunakan diantaranya adalah PDRB, PDRB perkapita, inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Nilai Tukar Petani (NTP), pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan indikator lain yang terkait. Analisa ini sangat penting untuk menentukan arah pembangunan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyesuaian kebijakan, program, maupun kegiatan merupakan salah satu upaya adaptasi dan modifikasi atas perencanaan yang telah dibuat. Dari hasil Analisis Makro Ekonomi diperoleh beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dilaksanakan, yaitu :
 - a. Penentuan prioritas investasi
 - b. Penentuan daerah atau wilayah yang dikembangkan menjadi kawasan industri
 - c. Penggunaan sumberdaya lokal sebagai basis kegiatan industri
 - d. Menjamin keterlibatan sumberdaya lokal dalam mendukung pelaksanaan kegiatan industri

- e. Mendesain kebijakan pendidikan yang mampu mengatasi kesenjangan kemampuan pengetahuan dan keterampilan dari modal manusia.
 - f. Meningkatkan kemudahan terhadap akses pelayanan kesehatan untuk semua warga masyarakat, terutama di pedesaan.
 - g. Pada bidang infrastruktur, terutama di daerah pedesaan, pemerintah harus bisa memastikan infrastruktur jalan dan akses listrik sudah terpenuhi dengan kualitas yang baik.
 - h. Kebijakan mengenai pungutan pajak progresif bagi yang mampu.
3. Melaksanakan Program/Kegiatan terintegrasi dengan skala prioritas yang mendukung penanganan penurunan Kemiskinan dan Stunting, Pengembangan Desa Inovasi, Desa Wisata, Kawasan Perdesaan dan Konservasi lahan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam penempatan mahasiswa KKN dilokasi desa-desa yang menjadi sasaran program pembangunan daerah dilokasi desa-desa yang menjadi prioritas tersebut diatas. Selain KKN Pemerintah Kabupaten Temanggung juga kerjasama dengan Para Dosen untuk melaksanakan pengabdian penelitaian di Kabupaten Temanggung. Dengan program terintegrasi tersebut sangatlah membantu dalam mempercepat penyelesaian masalah pembangunan, sudah banyak program-program pengabdian dosen yang sangat membantu Pemerintah diantaranya diadakannya kajian-kajian /penelitian pengabdian seperti kajian terkait dengan stunting, BUMDesa, Pariwisata, program inovasi, Pertanian dan UMKM. Adapun Perguruan Tinggi yang telah melaksanakan kerjasama adalah Universitas Diponegoro, UGM, UNNES, UNY, IAIN Salatiga, AKPRIND, STAINU, UDINUS, dan UNTID.
4. Melaksanakan kegiatan *Workshop*/Seminar Kelitbangan, terkait hasil-hasil kajian, penelitian dan inovasi-inovasi yang telah dihasilkan pemerintah Kabupaten Temanggung yang dihadiri Bapak Bupati, Narasumber dari Perguruan Tinggi, Praktisi, DPRD, Stakholder, unsur Perusahaan, Komunitas, Ormas, masyarakat dan Media Sosial, Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyampaikan

informasi sekaligus publikasi terkait dengan hasil-hasil kelitbangan untuk bisa ditindaklanjuti kedepannya.

5. Dalam mendukung program kajian dan penelitian di Kabupaten Temanggung, BAPPEDA mengelola jurnal bhumi phala sebagai wadah untuk menyampaikan informasi berupa artikel ilmiah terkait pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Melalui kegiatan krenova, BAPPEDA Kabupaten Temanggung berupaya memfasilitasi inventor sebagai bentuk tindak lanjut dalam komersialisasi dan peningkatan perekonomian masyarakat, diantaranya:

1. Menginisiasi pembentukan inkubator bagi UKM yang dikelola bersama dengan melibatkan kerjasama dan kolaborasi antar dinas/instansi terkait.
2. Membantu fasilitasi inventor Krenova di antaranya SHIBIRU, minyak kopi, miniature motor gede, pelaku usaha kopi dalam mendapatkan hak kekayaan intelektual, menyelenggarakan pelatihan teknis terkait Melalui kegiatan Krenova, BAPPEDA Kabupaten Temanggung berupaya memfasilitasi inventor sebagai bentuk tindak lanjut dalam komersialisasi dan peningkatan perekonomian masyarakat, dengan menginisiasi pembentukan inkubator bagi UKM yang dikelola bersama dengan melibatkan kerjasama dan kolaborasi antar dinas/instansi terkait.
3. Membantu fasilitasi inventor krenova SHIBIRU, minyak kopi, miniature motor gede, pelaku usaha kopi dalam mendapatkan hak kekayaan intelektual, menyelenggarakan pelatihan teknis terkait peningkatan kualitas hasil produksi, *e-commerce* dan promosi/pameran dengan Dinas Perdagangan dan Koperasi, BLK, BI, BNI dan FTA (*Free Trade Agreement*) Semarang.

Kegiatan lomba krenova yang dilaksanakan setiap tahun, merupakan wadah dalam menghimpun kreativitas dan inovasi dari unsur Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa, Sekolah dan masyarakat untuk mendukung pencapaian indeks inovasi daerah.

Tabel 2.402
Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2022

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
1	MUSRENBANG KITA BEDA RKPD Tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemerataan Pembangunan Wilayah b. Kompetisi Perencanaan Pembangunan dalam Musrenbang lebih Hidup, karena didukung dengan anggaran Tematik c. Mengurangi permasalahan kemiskinan, Pengangguran, kesehatan dll, dapat diatasi secara bersama-sama (linsek) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Adaya Semangat Baru dalam kompetisi Perencanaan Pembangunan b. Adanya Inovasi Perencanaan Pembangunan Tematik Kecamatan. c. Penyeselasaan permasalahan Kemiskinan, Pengangguran dan Pembangunan bisa merata di 20 Kecamatan 	<p>Inventor : BAPPEDA</p> <p>DPRD, BUPATI, Semua Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, Lembaga Desa, Masyarakat Ormas, Komunitas, Akademisi, Media Sosial</p>
2	IKAT RAJUT (Inovasi Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Berkelanjutan) RKPD Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam ikut berpartisipasi penanggulangan kemiskinan b. Semua Elemen masyarakat, pemerintah dan Stakeholder dapat bekerja bersama dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pembangunan di Kabupaten Temanggung 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penurunan Kemiskinan dapat teratasi lebih cepat b. Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Temanggung dapat berjalan sesuai dengan harapan 	<p>Inventor : BAPPEDA,</p> <p>DPRD, BUPATI, Semua Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, Lembaga Desa, Masyarakat Ormas, Komunitas, Akademisi, Media Sosial</p>
3	MUSTIKA DESA (Masyarakat Unggul Sejahtera dengan Tani Pekarangan, Konservasi dan Desa Bebas Sampah) RKPD Tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Tumbuhnya Petani Pekarang di Semua Desa dan Kecamatan di Kabupaten Temanggung b. Terjadinya gerakan pelestarian lingkungan dengan penghijauan Sabuk Gunung c. Adanya Gerakan Masyarakat Pengelolaan Sampah Didesa dan Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Ekonomi masyarakat b. Tumbuhnya UMKM c. Penurunan lahan Kritis dan penurunan Lahan Longsor d. Lingkungan Desa sampai Kota terbentuk pengelola Sampah e. Terjadinya Penurunan kemiskinan 	<p>Inventor : BAPPEDA</p> <p>DPRD, BUPATI, Semua Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, Lembaga Desa, Masyarakat Ormas, Komunitas, Akademisi, Media Sosial, TJSLP/CSR</p>

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
4	KABAR PENTING DESAKU (Kerja Bareng Penanggulangan Stunting, Desa Bebas Sampah dan Konservasi Lingkungan Hidup) RKPD Tahun 2022	a. Penanganan stunting dapat dilaksanakan secara bersama-sama b. Terjadinya Peningkatan gerakan pelestarian lingkungan dengan penghijauan Sabuk Gunung c. Adanya Gerakan Masyarakat Pengelolaan Sampah Didesa dan Kecamatan	a. Terjadi Penurunan angka Stunting b. Penurunan lahan Kritis dan penurunan Lahan Longsor c. Lingkungan Desa sampai Kota terbentuk pengelola Sampah d. Terjadinya Penurunan kemiskinan	Inventor : BAPPEDA, DPRD, BUPATI, Semua Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, Lembaga Desa, Masyarakat Ormas, Komunitas, Akademisi, Media Sosial, TJSLP/CSR

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022

Tabel 2.403
Krenova Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
1.	SI MANTAP KON KB (Sistem Informasi Manajemen Pencatatan Dan Pelaporan Kontrasepsi KB)	Kader lebih mudah dalam melakukan pencatatan dan pelaporan serta beberapa sektor terkait juga lebih cepat dalam mendapatkan data kesertaan KB.	Data Pelaporan Kesertaan KB lebih Akurat dan diperoleh lebih cepat, Mendapat Respon dari kabupaten lain untuk mereplikasi	DPPAPPKB, Lintas Sektor, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa
2.	Posyandu Lansia Berbayar Sampah (POS BERKAH)	Meningkatnya keikutsertaan dan kehadiran lansia di Posyandu Lansia, Membantu biaya pemeriksaan dan pengobatan bagi anggota posyandu lansia	Meningkatnya kesehatan usia lanjut, Meningkatkan pengelolaan sampah oleh masyarakat yang bernilai jual, Meningkatkan kesehatan lingkungan	Pemerintah Desa, TP PKK Desa, Kader, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
3.	MENDOAN TEMANGGUNG (Mendongeng Anak Temanggung)	Meningkatnya jumlah pemustaka, Meningkatkan promosi cerita rakyat dan budaya lokal Temanggung, Menambah pengetahuan teknik teknik mendongeng / bercerita	Meningkatnya literasi dan minat baca masyarakat, Terwujudnya kelestarian cerita dan budaya lokal Temanggung	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, pustakawan, komunitas pendongeng,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
4.	Aplikasi Penilaian Angka Kredit (APPAK)	Meminimalisir kesalahan (error) data, Meningkatnya kemudahan penyimpanan data dan nilai pegawai, Meningkatkan kemudahan penilaian pegawai	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam penilaian angka kredit pegawai	Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung (Sub Koordinator SDMK dan Sub Bag Umum Kepegawaian), tim penilai Angka Kredit
5.	Jumatuk (Juru Pemantau Batuk) : Dengan Sistem "Cough Disease Total Examination" dalam Kegiatan Aktif Penemuan Kemungkinan Penderita Tuberculosis pada Program P2TB Paru	Meningkatnya kegiatan pemantauan batuk	Menurunnya jumlah penderita dan suspek/temuan TB	Camat, Danramil dan Kapolsek TP-PKK, Kepala Desa / Lurah Tokoh Masyarakat, Kepala Sekolah / Instansi, Organisasi Kemasyarakatan
6.	TOBAT RIDA : Temukan Orang Batuk dan Periksa Dahaknya	Meningkatnya kegiatan pemantauan batuk, Meningkatnya deteksi dini dan penemuan kasus/suspek Tuberculosis, Meningkatnya eliminasi TB	Terwujudnya pengendalian dan pemberantasan TB	Perangkat Desa, Puskesmas, Masyarakat (Kader, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama)
7.	Buru Stunting Sejak Usia Remaja (BUSUR)	Meningkatnya pemantauan stunting sejak usia remaja	Terwujudnya pengendalian stunting	Perangkat Desa, Puskesmas, Masyarakat (Kader, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama)
8	TEMPE KEMULAN (Temukan dan Pantau Perkembangan Bumil Anemia)	Meningkatnya pemantauan dan deteksi dini anemia pada ibu hamil, Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pentingnya pencegahan anemia pada ibu hamil, Menurunkan risiko komplikasi pada ibu hamil	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu hamil, Menurunnya angka prevalensi anemia pada ibu hamil, Menurunnya angka kematian ibu dan bayi	Puskesmas, Petugas Laboratorium, Petugas Gizi, Masyarakat
9	SEPUR SENJA (Senja Cepuk Dahak Gur Seminggu Siji Masyarakat Aman Sehat dan Bahagia)	Meningkatnya kegiatan pemantauan dan pemeriksaan batuk	Menurunnya jumlah penderita dan suspek/temuan TB di Kecamatan Kledung	Perangkat Desa, Puskesmas, Masyarakat (Kader)
10	SPASIE (Simbah Peduli ASI Eksklusif)	Meningkatnya pengetahuan, pemahaman serta peran keluarga dalam mendukung pemberian ASI Eksklusif	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, Terwujudnya kawasan bebas stunting (0 kasus baru)	Linsek, Pemdes, Bidan Desa, Kader motivator ASI dan Dinas Kesehatan



NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
11	RSUD RAMAH (Registrasi Aman dan Mudah dari Rumah Layanan Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung)	Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pasien Lebih Mudah mendapat Pelayanan	Tidak terjadinya Antri dalam pelayanan kesehatan, Pasien Lebih mudah mendapatkan pelayanan sesuai dengan hari yang diinginkan, Meningkatkan Indek Kepuasan Masyarakat.	DINKES, RSUD
12	Sekolah Kopi Gemawang	Meningkatnya promosi produk lokal (kopi Gemawang), Meningkatkan pengelolaan potensi dan produk lokal, Meningkatkan peluang dukungan pendanaan dan permodalan dari swasta/dunia usaha/perbankan	Meningkatnya perekonomian dan keberdayaan masyarakat lokal, Berkurangnya angka kemiskinan, Meningkatnya perkembangan ekonomi kreatif	Perangkat Daerah Terkait, Perangkat Kecamatan dan Desa, Penggiat KOPI Kecamatan Gemawang, UMKM, Masyarakat, Tim Komunitas Kreatif, Profesional bidang Pemasaran (e-commerce), barista trainer Jogjakarta, prosesor kopi Temanggung, Perbankan, Media
13	PEDULI HATI (Pemantauan Terpadu Ibu Hamil, Bayi dan Balita Resiko Tinggi)	Meningkatnya pemantauan dan deteksi dini ibu hamil dan bayi risiko tinggi	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan bayi, Menurunnya angka kematian ibu dan bayi	Dinas Kesehatan, Puskesmas Ngadirejo, Keluarga, Masyarakat
14	Pemanfaatan (Gregezi) : Griya Gencar Gizi untuk Peningkatan Status Gizi Balita di Wilayah Kandangan	Meningkatnya pemantauan status gizi dan stunting	Menurunnya angka gizi buruk, Menurunnya angka kesakitan dan kematian balita	Kecamatan, Puskesmas, DKK, Polsek Kandangan, Danramil Kandangan, Sub Koordinator Kesga dan Gizi, DPPPAPPKB, RSUD, Perangkat Desa
15	Si Asmara (Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar) Berbasis Website)	Meningkatkan kemudahan dalam pengelolaan dan administrasi persuratan, Meminimalisir adanya data ganda	Meningkatnya efisiensi dan perbaikan kinerja organisasi, Meningkatnya efisiensi kearsipan dan tata kelola persuratan, Terwujudnya tertib administrasi kesehatan	Dinas Kesehatan, Puskesmas, UPTD Labkes, Masyarakat, Dinkominfo
16	MEMENDAM RINDU (Mendorong dan Mendampingi Masyarakat Memanfaatkan Biopori untuk Hidup Sehat)	Meningkatnya pemanfaatan limbah organik	Meningkatnya kesehatan lingkungan masyarakat	Puskesmas Pringsurat

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
17	Pelita Hati (Penatalaksanaan Terpadu Hipertensi Terkendali)	Meningkatnya penemuan kasus hipertensi, Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya hipertensi	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi, Meningkatkan gerakan masyarakat hidup sehat untuk mencegah hipertensi	Dinas Kesehatan, Lintas sektoral, TOGA, TOMA, kader kesehatan, pembina wilayah dan RS
18	Tebas dengan Anter Aku TOGA (Temanggung Bagas Waras dengan Pelayanan Kesehatan Terpadu Obat Konvensional Akupresur dan Pemanfaatan Taman Obat Keluarga)	Menjadi pedoman pelayanan kesehatan terpadu dan pemanfaatan tanaman obat keluarga dan piat akupresur untuk mengatasi masalah kesehatan ringan dan menjaga kesehatan, Menjadi sarana/media edukasi tentang pengobatan tradisional sederhana dan keterampilan	Meningkatnya integrasi pelayanan kesehatan melalui Puskesmas Percontohan pelayanan terpadu metode konvensional dan non konvensional, Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	DKK, Puskesmas, Masyarakat
19	Training Anti Gabut	Meningkatnya keterampilan (softskill dan hardskill) peserta, Meningkatkan motivasi berusaha, Meningkatkan kemampuan komunikasi	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang unggul dan kompeten	Dinperinaker, Balai Latihan Kerja, Desa
20	OGAH TING TING (Optimalisasi Cegah Stunting Sebelum Genteng)	Meningkatnya pengetahuan dan peran serta remaja dalam penanganan stunting dengan adanya Duta Stunting, Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting	Menurunnya angka stunting	Dinas Kesehatan, Sekolah (SMP, SMA/SMK/MA)
21	Si Tutik Cerdas (Siap Tuntaskan Jentik Cegah Demam Berdarah Sekarang)	Menurunnya angka penularan penyakit menular, meningkatnya penerapan pola hidup sehat oleh masyarakat Meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan lingkungan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	TOGA dan TOMA, Linsek, Bidan Desa, Kader kesehatan, Puskesmas, Dinas Kesehatan
22	PASTAKARAN Temanggung	Meningkatkan perekonomian masyarakat	Masyarakat lebih bisa memanfaatkan pekarangan untuk lahan pertanian keluarga	DKPPP, UMKM, Masyarakat Temanggung
23	PANTI SARAS (Paguyuban Penderita Hipertensi Desa Tempuran Puskesmas Tepusen)	Meningkatkan pengetahuan masyarakat ttg bahaya hipertensi, cara mengatasi dan pengobatannya	Masyarakat mengetahui bahaya hipertensi, cara mengatasi dan pengobatannya	Dinas Kesehatan, PKM Tepusen, Masyarakat Tepusen



NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
24	JAMALI NYEDHAK RONDHO (Jadikan Masyarakat Peduli Nyetor Dahak Loro TB ne Endho)	Menurunkan jml penduduk yng menderita TBC	Masyarakat mengetahui bahaya TB, cara mengatasi dan pengobatannya	Dinas Kesehatan, PKM Tlogomulyo, Masyarakat Tlogomulyo
25	Parestika (Pendampingan Resiko Tinggi Ibu Hamil oleh Kader)	Menurunkan tingkat kematian ibu dan bayi	Menurunkan tingkat kematian ibu dan bayi	Dinas Kesehatan, PKM Tembarak, Masyarakat Tembarak
26	Si Pacar Amin (Siap Pemeriksaan Air Rutin Agar Mutu Terjamin)	Meningkatkan kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat	Masyarakat lebih sehat dg mengkonsumsi air minum yg brkualitas baik	Dinas Kesehatan, PDAM, Depo Air Minum
27	Kledung Pesona Wisata	Meningkatkan kerjasama antar pengelola wisata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat	Masyarakat lebih mandiri	Dinas Budpar, Kec. Kledung, Masyarakat Kledung, Para pelaku usaha di Kec. Kledung
28	Ramuan Jamu dan Akupresur (RAJAKU)	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengobatan dengan jamu tradisional dan akupresure	Tingkat kesehatan masyarakat meningkat	Dinas Kesehatan, PKM Selopampang, Masyarakat Selopampang
29	SETAN BUNTING (Sosialisasi dan Edukasi Timbang Anak Balita Untuk Mencegah Stunting)	Menekan tingkat stunting di lingkungan masyarakat	Masyarakat lebih bisa mengetahui bahaya stunting dan cara pencegahannya	Dinas Kesehatan, PKM Banjarsari, Masyarakat Banjarsari
30	Minti Jambul di Masa Pandemi COVID-19 (Kegiatan Inovasi Jambanisasi Langkah Sederhana Manfaat dan Mengena)	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membuat jamban	Tingkat kesehatan masyarakat meningkat	Dinas Kesehatan, PKM Wonoboyo, Masyarakat Wonoboyo
31	BATIK TULIS (BASMI JENTIK DAN TUBERKULOSIS)	Menurunkan jml penduduk yng menderita TBC	Tingkat kesehatan masyarakat meningkat	Dinas Kesehatan, PKM Temanggung, Masyarakat Temanggung
32	Jalan Bareng Puskesmas Rejosari	Masyarakat yang sakit akan mudah terobati	Tingkat kesehatan masyarakat meningkat	Dinas Kesehatan, PKM Rejosari, Masyarakat Rejosari
33	GARDU TAWA TINULAR (Integrasi Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa)	Menekan jumlah odg di masyarakat	Tingkat kesehatan jiwa masyarakat meningkat	Dinas Kesehatan, Puskesmas, masyarakat Temanggung
34	GEPREK HERMES (Gerakan Pencegahan dan Penanggulangan Resiko Hipertensi dan Diabetes Mellitus)	Meningkatkan kesadaran dan Pengetahuan Masyarakat terhadap Penyakit Hipertensi dan DM	Kesadaran dan Pengetahuan Masyarakat terhadap Penyakit Hipertensi dan DM meningkat	Dinas Kesehatan, PKM Tretep, Masyarakat Tretep



NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
35	SWORDIBUL dan GEPUKMASBUL	Mempermudah masyarakat utk swab, dan menurunkan tingkat penularan Covid 19 di masyarakat	Tingkat kesehatan masyarakat meningkat	Dinas Kesehatan, PKM Bulu, Masyarakat Bulu
36	Pendampingan Melekat Pasien Gangguan Jiwa (Pikat DJ)	Menekan jumlah odg di masyarakat	Tingkat kesehatan jiwa masyarakat meningkat	Dinas Kesehatan, PKM Kranggan, Masyarakat Kranggan
37	Temukan dan Basmi TBC (TEBAST)	Menurunkan jml penduduk yng menderita TBC	Tingkat kesehatan masyarakat meningkat	Dinas Kesehatan, PKM Candiroti, Masyarakat Candiroti
38	Kartu Menuju Sehat Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (KMS STBM)	Kesehatan masyarakat terdata di puskesmas	Tingkat kesehatan masyarakat meningkat	Dinas Kesehatan, PKM Temanggung, Masyarakat Temanggung
39	KETAN ISI SAKCETING (Kesehatan Tradisional Gizi Pemberdayaan Masyarakat Bersama Cegah Stunting)	Menurunkan jumlah stunting di masyarakat	Tingkat kesehatan masyarakat meningkat	Dinas Kesehatan, PKM Pare, Masyarakat Pare
40	Optimalisasi Pajak Daerah Melalui Aplikasi SIAP PAKDE	Mempermudah pelaku usaha dalam membayar pajak daerah	Masyarakat lebih taat membayar pajak	BPKPAD, Para Pelaku Usaha, masyarakat temanggung
41	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Bebas Masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah	Kota Temanggung menjadi lebih bersih, lebih sehat	DPRKPLH, masyarakat temanggung
42	Sistem Informasi Tata Ruang Kabupaten	Mempermudah pelaku usaha dalam mengetahui peruntukan ruang di Kabupaten Temanggung	RTRW Temanggung lebih tertata	DPUPR, Para Pelaku Usaha, masyarakat temanggung
43	Aplikasi SIPASDA UPT Pasar Ngadirejo, Sistem Informasi Pendapatan Pasar Daerah	Memberikan Informasi Terkait Pendapatan Pasar Daerah Yang Bersumber Dari Retribusi Dan Sewa Secara Update Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Yang Transparan Dan Bermanfaat Dalam Perumusan Kebijakan. Pengganti Buku Catatan P 5 Harian Dan P5 Bulanan. Memudahkan Kontroling Penjualan Karcis /Retribusi. Dan Realisasi Sewa Sebagai Bank Data registrasi Perpanjangan Sewa Los,Kios Dan Pertokoan Pasar Daerah Penghematan Biaya Anggaran perangkat daerah	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Dalam Memberikan Informasi Pelayanan Public (good governance) Terciptanya Suatu Arsip Elektronik Informasi Terkait Pendapatan Pasar Daerah Mudah Diakses	DINKOPDAG, UPTD PENGELOLAN PASAR DAERAH, BPPKAD BAPPEDA DAN MASYARAKAT



NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
44.	Masjchun Sofwan Awards (MSA) 2021	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Temanggung Bebas Sampah	Mendukung Program Unggulan Temanggung Bebas Sampah Adanya Pergerakan Desa Bebas Sambah,	DPRKPLH, Dewan Sampah, Camat se-Kabupaten Temanggung, Kepala Desa Se-Kabupaten Temanggung,
45.	SI PANJUL JITU (Siaga Persalinan Aman Ojo Ucul Jemput Ibu Inpartu)	a. Meningkatnya deteksi dini ibu hamil dengan risiko tinggi, b. Menurunnya komplikasi persalinan, c. Adanya Edukasi Kesehatan Ibu Hamil	a. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), b. Angka Harapan Hidup Meningkat	Puskesmas Kedu Instansi Pendukung; Pemerintah Daerah, Dinkes, Masyarakat, Pemdes, Akademisi, Pelaku Usaha, Media Sosial
46.	Inovasi Food Estate Embung Bansari (IFOESERI)	a. Meningkatkan nilai tambah produksi sektor pertanian lokal khususnya hortikultura (bawang merah dan cabai) serta olahan pangan hasil pertanian, seni budaya dan kearifan lokal setempat, b. Terintegrasinya sistem sentra produksi, pengolahan, perdagangan dan pariwisata	a. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja baik pertanian maupun pariwisata sehingga dapat menggerakkan perekonomian desa sekitar, b. Terwujudnya kawasan hortikultura terpadu sinergi dengan wisata embung yang berdaya saing, ramah lingkungan dan modern	DKPPP Instansi Pedukung; Kementan, Dinas Pertanian Provinsi, Kecamatan, Desa, Dinpermades, DPRKPLH, DPUPR, Dinbudpar, Dinkopdag, Perbankan, Eksportir, Pengusaha, Petani, Masyarakat, Akademisi, Media Sosial
47.	DESA PERMATA (Desa Perwujudan Masyarakat Tertib Adminduk)	a. Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan KIA, b. Terwujudnya efisiensi pelayanan administrasi yang dapat diselesaikan dalam satu hari serta penghematan biaya adminitrasi penduduk maupun penghematan anggaran perangkat daerah.	a. Meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang baik dan prima (good governance), b. Meningkatnya capaian Indeks Kepuasan Masyarakat, b. Mendukung tata kelola kependudukan yang bermanfaat dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.	DINDUKCAPIL, petugas registrasi di tingkat desa/kelurahan serta masyarakat.



NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
48.	APLIKASI E-SANKA (SIGANDEM)	1. Memudahkan masyarakat dalam mengusulkan permohonan SANKA dan mendapatkan akte kematian. 2. Memudahkan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat yang mengajukan SANKA 3. Membantu capaian peningkatan penerbitan dokumen kependudukan yaitu Akte Kematian	Masyarakat yang tidak mampu merasa terbantu, Meningkatkan Kepuasan Pelayanan, Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	DINSOS, DINDUKCAPIL, KOMINFO
49.	APLIKASI TEMANGGUNG BEBAS SAMPAH (TEBAS)	Tersedia data dan informasi data sampah yang valid, akurat, dan up to date Terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi data dan informasi dalam pelaksanaan dan pengendalian persampahan	Mempermudah dan mempercepat terkait dengan informasi persampahan, Mempercepat proses penanganan sampah	Masyarakat, Perangkat Desa, Perangkat Kecamatan, TPS Desa, TPA, DLH, Kominfo, Sosmed
50.	PENYUSUNAN DOLAN MIRAH UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN DATA KEMISKINAN DAERAH DI KABUPATEN TEMANGGUNG	Meningkatkan pelayanan stakeholder dengan memberikan program/ kegiatan secara tepat sasaran. Mempermudah bagi stake holder dalam mendapatkan Data By Name By Address yang akan mereka gunakan dalam program/kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Meningkatkan sasaran kinerja Perangkat Daerah Terkait, Meningkatnya pelayanan sosial, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Efektif dan efisiensi pelayanan, meningkatkan indeks kepuasan masyarakat	Perangkat Desa, Perangkat Kecamatan, DPRKPLH, Dinas Kesehatan, Dindikpora, Dinas Sosial, Masyarakat pelaku UMKM, Komunitas Sosial, BUMD, Akademisi, Sosmed
51	Layanan Si Patuh : Sirkulasi Tanpa Sentuh	Terpenuhinya kebutuhan informasi pemustaka di masa pandemi Covid-19; Terpenuhinya penyelenggaraan kegiatan layanan sirkulasi sesuai protokol kesehatan; Tergeraknya kembali minat baca masyarakat; dan Meningkatnya pemanfaatan koleksi perpustakaan.	Masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan untuk meminjam buku di perpustakaan, meningkatkan pengunjung perpustakaan, meningkatkan budaya literasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, Akademisi, Masyarakat
52	PENERTIBAN PKL/ PEDAGANG KAKI LIMA SECARA HUMANIS (TAPE MANIS)	Meningkatkan pendapatan masyarakat, Menciptakan keindahan tata ruang di Kecamatan Kledung, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Meningkatkan kerukunan dan keamanan Pedagang Kaki lima di wilayah Kecamatan Kledung	Penertiban PKL yang dilakukan secara Humanis (Tape Manis) yang tertata rapi, rukun, dan menjalin kerjasama yang baik antara pedagang dan pemerintah di daerah Kledung.	Pemerintah Desa Kledung, Pelaku PKL, Perangkat Kecamatan, Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekraf, Ahli IT, Sosmed, Wartawan lokal



NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
53	DAMKAR TEMANGGUNG SOBO DESO	Mencegah terjadinya kebakaran dilingkup masyarakat, Meminimalisir dampak korban jiwa dan materi dari kebakaran, Masyarakat lebih sadar dan peduli terhadap bahaya kebakaran.	Menurunkan angka kejadian kebakaran di Kabupaten Temanggung melalui pemberdayaan masyarakat dan program penyuluhan potensi kebakaran, serta pelatihan pemadam kebakaran.	Damkar, Masyarakat, Perangkat Desa, RT, RW
54	SATU PERANGKAT DAERAH SATU DESA DAMPINGAN KABUPATEN TEMANGGUNG	Meningkatnya kemampuan dan kreativitas Perangkat Daerah dalam melakukan assessment dan identifikasi potensi serta kebutuhan di desa dengan tingkat kesejahteraan rendah, Meningkatnya kolaborasi dengan para pihak (perguruan tinggi, dunia usaha, dan lainnya), Mendorong peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan kehidupan berkelanjutan serta menciptakan nilai tambah bagi produktivitas desa.	Meminimalisir angka kemiskinan di 20 desa dampingan yang berada di 20 Kecamatan lebih cepat, efektif, dan efisien.	Perangkat Desa, Dinas Pertanian, Masyarakat
55	FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN (FTJSLP) KABUPATEN TEMANGGUNG	Meningkatkan citra positif dan memperkuat brand perusahaan di mata publik, dapat membuka kesempatan kerja sama baru antara perusahaan dengan pihak lain, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi target CSR, dan memudahkan Pemerintah dalam memonitor jalannya TJSLP/CSR	Terbentuk forum yang menjadi wadah para pelaku perusahaan (FTJSLP), dan terbentuknya sinergitas antara Pemerintah, Perusahaan, dan Masyarakat melalui program FTJSLP.	Pelaku bisnis, Masyarakat, Ahli IT, Sosmed, Setda Temanggung, Dinsos,
56	BIMASENA (BIMBINGAN, ASISTENSI, SUPERVISI DAN AUDIT)	Memudahkan seluruh perangkat daerah untuk melakukan konsultasi pengawasan secara online, Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintahan terlebih di bidang keuangan.	Aplikasi BIMASENA dan peraturan Bupati yang mudah diakses dan konsultasi pengawasan secara online.	Inspektorat, Setda Temanggung, Perangkat Desa, Ahli IT, Sosmed.
57	SURVEY KEPUASAN LAYANAN BERBASIS TEKNOLOGI (SUKETEKI) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG	Kemudahan dalam pengisian survey kepuasan layanan, kemudahan dalam evaluasi layananm bagi pekerja kesehatan.	Melalui aplikasi kepuasan layanan terbentuk mekanisme kontrol layanan yang baik.	RSUD, Tenaga Kesehatan, Masyarakat, Sosmed, Dinas Kesehatan,



NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
58	OPTIMALISASI PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MELALUI SI-DIA (SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN) DI KABUPATEN TEMANGGUNG	Mendukung pencapaian indicator sasaran kinerja terkait dengan laporan SPJ barang yang tepat waktu dan tetap mutu, Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pelayanan public di BPKPAD, Penyajian nilai persediaan pada neraca sebagai salah satu laporan keuangan daerah Kabupaten Temanggung dapat dipertanggungjawabkan, Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan publik	Penatausahaan barang persediaan berbasis teknologi informasi melalui aplikasi Si-Dia (Sistem Informasi Persediaan).	BPKPAD, BPK, Dinkominfo, Ahli IT, Medsos,
59	MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH YANG AKUNTABEL DENGAN KERJA SOLID (KERTAS KERJA KONSOLIDASI) PADA BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG	Meningkatkan percepatan dan ketepatan laporan keuangan sehingga tercapai penyerapan anggaran sesuai target, Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pelayanan public di bidang akuntansi dan pelaporan terutama kegiatan penyusunan pelaporan keuangan daerah, Menjadi bahan pemeriksaan atas laporan keuangan daerah, Sebagai bahan pembahasan dan menindaklanjuti atas laporan keuangan daerah (laporan pertanggungjawaban APBD)	Kertas Kerja SKPD dengan menggunakan aplikasi Kerja Solid dalam bentuk kertas kerja konsolidasi untuk Menyusun laporan keuangan daerah yang akuntabel.	BPKPAD, BPK, Setda
60	GREEN HOSPITAL SEBAGAI SOLUSI DI RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG	Meningkatkan pembangunan kultur birokrasi, pelayanan rehabilitatif pasien. Ikut mensukseskan upaya kampanye hijau. Sebagai sarana penelitian dan kajian dalam kampanye hijau.	Terbangunnya gedung RSUD dengan konsep green hospital	RSUD, Pelaku kesehatan, Dinkes, Sosmed, Jurnalis lokal
61	OPTIMALISASI PENGEMBANGAN DESA WISATA DENGAN COMMUNITY BASED TOURISM DI KABUPATEN TEMANGGUNG	Bagi intansi memberikan dasar hukum yang jelas bagi penetapan desa wisata, desa wisata untuk meningkatkan SDM Pariwisata, Membantu promosi dan pengembangan wisata menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif.	Pengembangan wisata dengan pemberdayaan masyarakat (community based tourism) untuk keberlanjutan wisata	Dinbudpar, Perangkat Desa, Pelaku Pariwisata, Sosmed, Masyarakat Desa, Akademisi Pariwisata
62	PETA MELEK INTEN (PENYUSUNAN DATA MELALUI APLIKASI ELEKTRONIK INDUSTRI	Bagi Perangkat Daerah untuk menyusun data yang transparan dan akuntabel, terverifikasi, valid, cepat dan akurat. Memenuhi target	Web aplikasi PETA MELEK INTEN (penyusunan data melalui aplikasi elektronik industri di temanggung)	Ahli IT, Dinas Perindagkop & UMKM, Pelaku usaha dan UMKM, Sosmed



NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
	DI KABUPATEN TEMANGGUNG)	penyusunan data sebagai dasar memberikan pelayanan yang prima.Meningkatkan integritas dan komitmen kepada para stakeholder sehingga dapat menimbulkan ikatan kerjasama yang kuat.		
63	ATIPROTAPE (AKSI TEKNOLOGI INTENSIFIKASI PROGRAM TANI PEKARANGAN) DI KECAMATAN BEJEN KABUPATEN TEMANGGUNG	Tersedianya bahan pangan dan pemanfaatan lahan pekarangan yang optimal dengan teknologi, Meningkatnya system pengawasan yang efektif serta meningkatnya koordinasi antar stakeholder, Sebagai adopsi untuk direkomendasikan ke seluruh OPD dan wilayah kecamatan lain	Aksi teknologi intensifikasi program tani pekarangan di kecamatan bejen kabupaten temanggung	Perangkat Desa, Perangkat Kecamatan, Petani, Masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan,
64	TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK (TNDE) UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIFITAS, EFISIENSI, TERTIB ADMINISTRASI DAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN TEMANGGUNG	Mendukung program reformasi birokrasi, Meningkatkan ketertiban pengelolaan arsip melalui arsip elektronik sehingga terhindar dari kerusakan dan mudah dalam pencarian. Memudahkan masyarakat dan stakeholder dalam memperoleh informasi tentang agenda kegiatan.	Terciptanya aplikasi TNDE (Tata Naskah Dinas Elektronik)	Perangkat daerah, Kominfo, Bappeda, Ahli IT
65	PENGEMBANGAN DATABASE PEMANFAATAN RUANG BERBASIS DATA SPASIAL DALAM MEWUJUDKAN PERENCANAAN TATA RUANG TERINTEGRASI KABUPATEN TEMANGGUNG	Tersedianya data berbasis spasial yang bermanfaat untuk membantu dalam menentukan arah kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan daerah, Mendukung setiap kegiatan dan usaha yang berada di sekitar masyarakat, Sebagai bahan analisis dan kajian akademis yang ikut berperan dalam setiap perencanaan tata ruang, Membantu pelaku usaha dalam berinvestasi di Kabupaten Temanggung sehingga ada kepastian berinvestasi yang ramah serta resiko berinvestasi rendah, Mendapatkan kemudahan informasi data yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi serta komunikasi.	Mengembangkan database pemanfaatan ruang berbasis data spasial dalam mewujudkan perencanaan tata ruang yang terintegrasi Kab. Temanggung.	DPUPR, Ahli IT, Sosmed
66	PENINGKATAN PELAYANAN IZIN BELAJAR MELALUI SISTEM INFORMASI IZIN BELAJAR	Meningkatkan kinerja pelayanan izin belajar pada Sub Bidang Diklat, Meningkatkan nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada pelayanan	Memiliki sistem pelayanan izin belajar melalui Sistem Informasi Izin Belajar (SIMIZJAR) Online pada Bidang Diklat	BKPSDM, ASN, Sosmed



NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
	(SIMIZJAR) ONLINE PADA BIDANG DIKLAT DAN PEMBINAAN PEGAWAI BKPSDM KABUPATEN TEMANGGUNG	izin belajar, Memberikan kemudahan dalam mengajukan permohonan izin belajar, Efisiensi waktu dan biaya dalam mengajukan permohonan izin belajar	dan Pembinaan Pegawai BKPSDM Kabupaten Temanggung.	
67	BAHAN AJAR INTERAKTIF BERBASIS KOMPUTER DENGAN IMPLEMENTASI PADA ANDROID MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA	Peserta didik mendapat media belajar yang praktis dan mudah dipahami sehingga dapat belajar dimana saja dan kapan saja secara mandiri, serta meningkatkan kemampuan literasi digital.	Penggunaan aplikasi yang berisi materi seputar mata pelajaran Bahasa Indonesia.	Dinas Pendidikan, Tenaga Pendidik, Pelajar ditingkat SMA/SMK, Sosmed
68	STRATEGI SINERGITAS DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DENGAN DASHBOARD EKSEKUTIF BERBASIS GEOSPASIAL DI KABUPATEN TEMANGGUNG	Menjadi produk kebijakan pemerintah dalam menjawab permasalahan alur hubungan antar Perangkat Daerah dan agar setiap kebijakan tersinergi dengan data visualisasi di Dashboard Eksekutif. Terwujudnya tata hubungan kerja yang jelas dan teratur antar Perangkat Daerah dibawah Asisten Pemerintahan dan Kesra serta Perangkat Daerah lainnya yang tidak dibawah Koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra juga memvisualisasikan sinergitas data dalam dashboard eksekutif.	Dashboard Eksekutif sebagai visualisasi kebijakan berbasis peta geospasial yang lokusnya telah tersaji dalam peta.	Setda, Akademisi, ASN, Sosmed, Pers, Masyarakat
69	TERTIB ADMINISTRASI PELAPORAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) MELALUI SIPDA CHT DI KABUPATEN TEMANGGUNG	Menjembatani upaya mewujudkan responsibilitas dan akuntabilitas penggunaan DBHCHT sebagai kegiatan prioritas. Menjadi sarana bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mengkoordinasikan stakeholder yang terkait dalam upaya bersama mewujudkan tertib pelaporan penggunaan DBHCHT. Sarana bagi stakeholder yang terkait untuk melaksanakan peran dan fungsi, melakukan komunikasi, koordinasi dan sinergi, dalam mewujudkan tertib pelaporan penggunaan DBHCHT.	Terciptanya aplikasi SIPDA CHT	Ahli IT, Setda Temanggung, Sosmed, Kemenkeu, Bea Cukai
70	APLIKASI KUNJUNGAN KERJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021	Memudahkan dan memperlancar koordinasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dengan unsur protokol di Pemerintah Kabupaten Temanggung.	Melalui Aplikasi kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati tercipta persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pasca kegiatan lebih efektif.	Kepala Daerah, Protokoler Bupati, Pemda, Ahli IT, Setda



NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
71	STRATEGI MEMBANGUN RESILIENT VILLAGE MELALUI INTEGRASI POTENSI DESA BERBASIS EKONOMI KREATIF DI KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN TEMANGGUNG DENGAN TATANAN KEBIASAAN BARU	Mewujudkan visi terwujudnya masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem. Terwujudnya program peningkatan kerjasama desa. Peningkatan pendapatan asli desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Terciptanya paket wisata, pelatihan masyarakat desa, promosi potensi ekonomi kreatif bagi desa	Perangkat Desa, Masyarakat, BUMD, Kemendesa PDPT, Pelaku Pariwisata, Dinbudpar, Sosmed, Dinpermades, Akademisi
72	PERCEPATAN PEMBUATAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SPJ-ANGGARAN) DENGAN SI- KOI (Aplikasi Keuangan Online Intern) DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG	Pembuatan laporan keuangan khususnya laporan pertanggungjawaban anggaran (SPJ Anggaran) DPRKPLH setiap bulannya dapat diselesaikan secara cepat dan tepat waktu. Laporan pertanggungjawaban anggaran (SPJ-Anggaran), terutama untuk Laporan Realisasi Anggaran DPRKPLH dapat diselesaikan dan dikirim ke BPPKAD sesuai tenggat waktu yaitu tanggal 4 setiap bulannya.	DPRKPLH memiliki aplikasi keuangan berbasis online untuk internal PD (SI-KOI)	DPRKPLH, Dinkominfo, Ahli IT, BPPKAD
73	MEMBANGUN SINERGITAS KINERJA KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KP3) DAN PENERAPAN KARTU TANI UNTUK MEMINIMALISIR KELANGKAAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN TEMANGGUNG	Terciptanya pedoman pengawasan pupuk dan pestisida sehingga membantu mempermudah pelaksanaan salah satu tugas pokok dan fungsi. Peredaran pupuk dan pestisida lebih optimal, sehingga pupuk dan pestisida yang beredar lebih terjamin ketersediaan dan kualitasnya	Peredaran pupuk dapat terkontrol dengan baik sehingga petani mendapat pupuk merata	Petani, DKPPP, Pedagang pupuk (KPL), Dinas Perdagangan, Perekonomian Setda, Kepolisian, Kejaksaan, BRI, Medsos, Pemerintah Desa, Akademisi
74	Dinas Pelayanan Modal MENYAPA (Melayani Pembuatan NIBnya Pelaku Usaha di Desa/ Kelurahan)	Masyarakat yang ingin berusaha di desa/kelurahan mendapatkan pendampingan izin usaha lebih dekat; Mengetahui potensi investasi di daerah; Mengurangi antrian di front office untuk mendapatkan pelayanan perizinan; Meminimalisir praktek calo Izin	Pelaku usaha dan UMKM ditingkat desa dan kecamatan memiliki NIB karena kemudahan akses untuk pendaftarannya; Meningkatkan perekonomian di Kabupaten Temanggung dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha di desa/kelurahan sehingga akan meningkatkan investasi di Kabupaten Temanggung.	Pengusaha, Masyarakat, UPK Kecamatan, Perangkat Desa, Perangkat Kecamatan, Dinas Pelayanan Modal

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
75	JAGA NEGRI	Meningkatkan kepatuhan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terhadap ketentuan Gratifikasi, menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel	Pelapor gratifikasi mendapatkan piagam penghargaan	ASN Temanggung, SKPD, Masyarakat, Inspektorat, Sosmed
76	GERAKAN KONSERVASI TANAH DAN AIR BERKELANJUTAN (SABUK GUNUNG)	Meningkatnya kualitas kualitas tutupan lahan khususnya di lahan kritis yang sulit diakses masyarakat; 2. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan konservasi;	Tertanamnya 74.550 bibit pohon yang tersebar di 109 Desa (11 Kecamatan) di lereng Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, dan Gunung Prau di tahun 2021.	Masyarakat, Perangkat Desa, Petani, DPRKPLH, Akademisi, Sosmed
77	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KINERJA (SIMAKIN) SEBAGAI UPAYA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS DI KABUPATEN TEMANGGUNG	Terselenggaranya Penilaian Kinerja Puskesmas yang mudah, cepat, lancar, transparan dan akuntabel; Kemudahan masyarakat untuk mengakses dan mengambil manfaat dari Sistem Informasi Manajemen Kinerja Puskesmas; Meningkatnya kepuasan masyarakat; Menghemat waktu, tenaga dan biaya dalam proses akses data kinerja Puskesmas.	Terciptanya SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KINERJA (SIMAKIN) sebagai upaya penguatan akuntabilitas kinerja pelayanan kesehatan PUSKESMAS di KABUPATEN TEMANGGUNG	Puskesmas, Dinkes, Ahli IT, RKPD
78	DATA BASE BERBASIS SPASIAL GUNA MENDUKUNG ANALISIS DAN KAJIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN TEMANGGUNG	Membantu menentukan arah kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan daerah. Perangkat Daerah Bappeda selaku salah satu Pengelola Data sangat membutuhkan data base dan data spasial sebagai bahan analisis dan kajian dalam perencanaan pembangunan daerah.	Terwujudnya data base berbasis spasial guna mendukung analisis dan kajian perencanaan pembangunan daerah di kabupaten temanggung	Perangkat Daerah, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Perangkat Desa, DPRD, BAPPEDA
79	UNIT LAYANAN INKLUSI DISABILITAS (LIDi) UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS DAN PERAN SERTA PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN TEMANGGUNG	Meningkatnya kapasitas/kompetensi masyarakat di lingkungan terdekat penyandang disabilitas tentang tindakan yang dilakukan dalam berinteraksi dengan mereka	Terwujudnya wadah penyandang disabilitas yang kompeten berupa UNIT LAYANAN INKLUSI DISABILITAS (LIDi) untuk meningkatkan kapasitas dan peran serta perlindungan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana di kabupaten temanggung	Perangkat Kecamatan, Masyarakat Inklusi, BPBPD,
80	SISTEM INFORMASI E-BPHTB TERINTEGRASI DI BPPKAD KABUPATEN TEMANGGUNG	memudahkan validasi data saat proses pengurusan dokumen pertanahan. Didapatkannya data BPHTB dan data PBB	Aplikasi e-BPHTB yang memudahkan registrasi usaha.	BPPKAD, Perbankan, Dukcapil, Kominfo, BPN, Kementerian Agraria, Sosmed

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
		secara realtime akan memastikan bahwa dalam proses pengurusan sertifikat kewajiban pajak daerah telah terpenuhi.		
89	PELAYANAN PUBLIKASI DAN PENYEBARAN INFORMASI AGENDA KEGIATAN MELALUI E-TOA (TEMANGGUNG ON AGENDA) PADA BAGIAN HUMAS SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG	Mendukung upaya program pemerintah dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas utamanya dalam bidang informasi	Aplikasi E-TOA (Temanggung On Agenda) memudahkan masyarakat dan perangkat daerah mendapatkan informasi agenda kegiatan.	Humas Setda, Setkap RI, Masyarakat, Sosmed, Wartawam / Jurnalis,
90	RENCANA AKSI DAERAH ANAK USIA SEKOLAH YANG TIDAK SEKOLAH (RAD AUSTS) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKEADILAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG	Mendukung capaian indikator program dalam RPJMD yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, angka putus sekolah, APM dan APK; Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berkeadilan di Kabupaten Temanggung khususnya penanganan AUSTS yang didanai dengan APBD Kabupaten Temanggung.	Dokumen rencana aksi daerah anak usia sekolah yang tidak sekolah (rad austs) dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berkeadilan di kabupaten temanggung	Perangkat Desa, Dinpermades, Bappeda, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Masyarakat
91	SISTEM INFORMASI RENCANA KERJA (SIRENJA) PERANGKAT DAERAH UNTUK TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG	Mendukung capaian indikator program dalam RPJMD yaitu persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu; Terdokumentasinya dokumen perencanaan pembangunan dengan baik; Terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan yang efektif dan efisien; Menjadi dasar dalam melakukan evaluasi perencanaan pembangunan dalam tahun berkenaan; Menjadi dokumen pendukung dalam penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; Memberikan akses dalam rangka transparansi penyelenggaraan pemerintahan; Sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.	Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dokumen perencanaan pembangunan melalui Sistem Informasi Rencana Kerja (SIRENJA) Perangkat Daerah	BAPPEDA, Ahli IT, Sosmed,



NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
92	SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN (SIMPELBANG) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG	Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (Simpelbang) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan bagi publik maupun stakeholder yang saat ini telah ada sehingga pada akhirnya dapat mengalami perbaikan yang mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan dapat mengantisipasi tuntutan perubahan terhadap kualitas dan jenis pelayanan publik yang sesuai dengan perubahan kondisi yang terjadi.	Aplikasi SIMPELBANG memudahkan pelaksanaan APBD yang tertibadministrasi, tepat mutu, tapt waktu, tepat sasaran yang optimal kepada masyarakat.	Setda, Ahli IT, Sosmed, Masyarakat, Pemda
93	KOMUNIKASI DIGITAL PIMPINAN MELALUI POJOK BUPATI DALAM RANGKA PUBLIKASI KEGIATAN PIMPINAN KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN TEMANGGUNG	Memotivasi untuk meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Stakeholder; Berkontribusi memberikan informasi kepada Masyarakat	Program Pojok Bupati di Media Televisi dan Radio	Bupati, Wakil Bupati, Setda, Kominfo, Temanggung TV, eRTe FM,
94	UPDATING DATA DAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID) BADAN PUBLIK MELALUI SISTEM INFORMASI MONITORING EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (SiMONEV-KIP) DI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	Sebagai sistem kontrol dan pengawasan pelaksanaan keterbukaan informasi oleh PPID Badan Publik; Mempermudah dan mempercepat monitoring dan evaluasi updating data dan informasi PPID Badan Publik; Meningkatkan capaian indikator kinerja OPD, yaitu tingkat keaktifan PPID Badan Publik.	Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (SiMONEV-K) yang dapat diakses secara umum.	Kementrian Dalam Negri, Pemerintah Daerah, PPID, Masyarakat, Din Kominfo
95	MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ASET DESA MELALUI SIMONA (SISTEM MONITORING DAN EVALUASI ASET DESA) DI KABUPATEN TEMANGGUNG	Sebagai bentuk komitmen dalam upaya mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023; Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi aset desa sebagai alat bantu penentu kebijakan; Tersedianya data terintegrasi penggunaan keuangan desa dan aset desa	Aplikasi SIMONA (Sistem Monitoring dan Evaluasi Aset Desa) menghasilkan monitoring dan evaluasi asset desa yang akurat.	Perangkat Desa, Dinpermades, Pelaku Usaha, UMKM, Akademisi, Masyarakat, Sosmed, Ahli IT

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
96	DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL BERBASIS ANDROID MELALUI E-STATISTIK DI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	Pemenuhan tupoksi dalam penyediaan data statistik bagi bahan perencanaan pembangunan, dimana dengan aplikasi E-Statistik akan membantu perangkat daerah dalam mengakses data statistik dalam menunjang perencanaan dan evaluasi pembangunan.	Aplikasi E-Statistik yang berisi data statistic yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung.	Dinkominfo, Pemda, Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat
97	SINERGITAS PENTAHHELIX DAN SI PROKES	Pelaksanaan Protokol kesehatan yang dilaksanakan secara otomatis dan meminimalisir adanya kontak secara langsung, protokol kesehatan dapat ditegakkan secara maksimal, Waktu yang lebih singkat dan relative efisien dan dapat dillaksanakan secara konstan	Inovasi Sinergitas Pentahelix dan Si-Prokes agar penegakan prokes lebih baik dan memangkas keterbatasan SDM dan anggaran.	BPBD, Tenaga Kesehatan, Sosmed, Akademisi, Pelaku Bisnis
98	SINERGITAS PENTAHHELIX DAN SI-NOTIKA 24/7 BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG	Tersedianya sistem informasi laporan kebencanaan yang bersinergi dengan Pentahelix dan perangkat daerah lain guna mendukung Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Temanggung lebih efektif dan cepat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan proses penanganan bencana	Aplikasi SI-NOTIKA 24/7 untuk meminimalisir kerugian Ketika terjadi bencana dan sebagai Langkah pencegahan yang efektif.	BPBD, Relawan Bencana, Akademisi, Sosmed
99	SILEMBU MBOTEN NGONCEKI, MBOTEN NGULEK "INOVASI BAWANG PUTIH LOKAL SIAP PAKAI"	Meningkatkan harga bawang putih lokal di tingkat petani terutama saat musim panen raya; Memberikan nilai tambah pada komoditas bawang putih lokal berupa kepraktisan dalam penggunaan; Membangun citra bawang putih lokal agar dapat kompetitif dengan bawang putih impor; Menciptakan lapangan pekerjaan baru dari kegiatan pengolahan lebih lanjut bawang putih segar menjadi produk olahan; Meningkatkan semangat petani bawang putih di Kabupaten Temanggung untuk mendukung terciptanya swasembada bawang putih nasional.	Silembu Mboten Ngonceki, mboten ngulek "Inovasi Bawang Putih Lokal Siap Pakai" yang bernilai jual tinggi dan berdaya saing.	Petani, Perangkat Kecamatan, UMKM, Pedagang, Ahli IT, DKPP



NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
100	MAJALAH ELING MEDIKS	Majalah ELING MEDIK's ini yang akan menjadi media dan sarana penghubung antara Puskesmas Selopampang dan masyarakat Selopampang dibidang kesehatan	Majalah ELING MEDIK's sebagai bahan informasi bersama dan publikasi	Puskesmas, Dinkes, Tenaga Kesehatan, Masyarakat, Sosmed, Wartawan,
101	SINERGI, KOLABORASI, DAN KOORDINASI PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN SOCIAL POWER – diTEBAS (Digital Informasi Web Gis Temanggung Bebas Sampah) DPRKPLH TEMANGGUNG	Mempermudah menyusun perencanaan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten; Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah sebagai Instrumen pengendalian kegiatan antar OPD dan Lembaga/Institusi/Kementerian terkait untuk urusan pengelolaan sampah.	Aplikasi DI-TEBAS yang memudahkan proses pengawasan dan pengendalian pengelolaan yang semakin lama semakin kompleks permasalahanya.	DPRKPLH, Pemda, Ormas/LSM, Akademisi, Masyarakat, Sosmed, UPT
102	GIAT SAPA HUBIN (SINERGI ANTAR PELAKU AKTIF HUBUNGAN INDUSTRIAL)	Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat pekerja dan pengusaha yang berkualitas; Terciptanya iklim kondusif dalam berusaha; Pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.	Sistem pembinaan LKS (Lembaga Kerjasama) bipartit yang sistematis dan berkesinambungan	Pengusaha, Buruh, Disnaker, LKS,
103	SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS JARINGAN IRIGASI SEBAGAI UPAYA DALAM PENGUATAN KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN REGIONAL I WILAYAH TEMANGGUNG	Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis Jaringan Irigasi yang ada di UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I wilayah Temanggung dapat dijadikan sebagai acuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan penataan dan pengelolaan Sumber Daya Air secara tepat di Daerah Irigasi UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I wilayah Temanggung.	Tersedianya penyimpanan database jaringan irigasi secara digital dan real time	DPUPKP, UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I Temanggung, Masyarakat

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022

Tabel 2.404
Krenova Masyarakat Tahun 2022

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
1	Ekstrak Batang Tembakau (Nicotiana tabacum L.)	Sebagai insektisida alami pada ulat kubis (<i>Plutella xylostella</i>)	Bisa memanfaatkan limbah tembakau yang sebelumnya tidak terpakai, dapat membuka lapangan kerja baru	DKPPP, masyarakat petani
2	STOP C (Sarung Tangan Otomatis	Sebagai salah satu alat pencegah	Dapat membuka lapangan kerja baru,	DKK, masyarakat

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
	Pencegah Corona)	Virus Corona	terciptanya inovasi baru yang bisa bermanfaat bagi kesehatan masyarakat luas	
3	Alarm Hujan Sederhana	Meminimalisir jemuran kehujanan, mudah direplikasi	Masyarakat dapat mengantisipasi jemuran kehujanan, untuk pengembangan di masa depan juga bisa dikembangkan untuk menolong para petani tembakau pada saat penjemuran tembakau	DKPPP, pelaku usaha, masyarakat, petani
4	Pembuatan Produk Fusion Pastry Bakery Menjadi Produk Kreatif dan Kewirausahaan Siswa Tata Boga SMK Swadaya Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan harga jual produk pangan lokal yang tergolong murah menjadi lebih mahal sehingga membantu kesejahteraan para petani, b. Menciptakan produk Contectionety, Hasil pangan Temanggung dapat di manfaatkan lebih maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan nilai positif dari SMK Swadaya sebagai salah satu SMK Swasta berkualitas di Temanggung, b. Memberikan pemasukan bagi sekolah, c. Mengajarkan jiwa entrepreneurship kepada siswa sekolah 	SMK, pelaku usaha, masyarakat
5	Simulasi dan Pemrograman Lampu Lalu Lintas untuk Sekolah Dasar	Membuat anak mengenal lebih dini terkait pemrograman, mengajarkan hal-hal baru untuk meningkatkan kecerdasan anak	Anak memiliki pola pikir yang lebih kreatif, anak tidak cepat puas dengan apa yang sudah dipelajarinya	Perhubungan, Satlantas, Sekolah, masyarakat
6	Saklar Lampu dan Exhaust Fan Toilet Otomatis	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Program Penghematan Listrik dengan proses otomatisasi, b. Membantu menyediakan toilet dengan Penerangan dan sirkulasi udara yang baik, siswa, Guru SMK Negeri Bansari dapat mengaplikasi ilmu dalam proses pengembangan, produksi dan pemasaran 	Dapat membuka lapangan kerja baru, pengguna toilet menjadi lebih nyaman	Sekolah, masyarakat, pelaku usaha
7	Pengembangan "Mosen" Kendaraan Listrik Ramah Lingkungan sebagai	Pengalaman nyata siswa untuk mengelola suatu produk,	Dapat menambah relasi untuk sekolah ke depannya, meningkatkan nilai positif dari	Sekolah, masyarakat, pelaku usaha



NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
	Sarana Transportasi dalam Lingkup Instansi	pengenalan pembelajaran berbasis proyek, adanya simbiosis mutualisme antara sekolah dan instansi mitra	SMK Swadaya sebagai salah satu SMK Swasta berkualitas di Temanggung	
8	Aplikasi Sistem Tracking Antrian Produksi di Konveksi Umum	Mengubah menjadi konveksi digital, memperbesar Bisnis UMKM, efektifitas & efisiensi Produksi	Semakin memudahkan masyarakat dalam menunggu antrian produksi	Sekolah, masyarakat, pelaku usaha
9	Gelang Mantan XCOFFE Daur Ulang Si Limbah Kopi	Berkontribusi mengurangi limbah, membuka lapangan kerja, menambah semangat (moodbooster), menunjang penampilan, tampil lebih percaya diri, cara lain dalam menikmati kopi	Dapat memberikan nilai lebih pada limbah kopi, memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan limbah kopi menjadi barang bernilai tinggi, membuka lapangan pekerjaan baru	Pelaku usaha, masyarakat
10	Tatap Lentera (Tongkat Penuntun Adaptif Disabilitas Sensorik Mata/Netra)	Menurunkan tingkat cedera, meningkatkan kemandirian, meningkatkan kesiapsiagaan bencana, relasi sosial meningkat	Ketersediaan Fasilitas publik ramah disabilitas dari 10% meningkat hingga 40%, Pendapatan meningkat hingga 85%	Pemerintah, masyarakat, pelaku usaha
11	SENTTUL (Seni Tekstur Tutul/Kriya)	Dapat memberikan teknik dan warna baru dalam dunia seni kriya, memberikan peluang untuk edukasi teknik tutul bagi anak-anak sekolah dalam berkarya, mendorong untuk dapat menemukan teknik-teknik baru yang mampu menambah keindahan dalam seni	Meningkatkan pendapatan, memberikan wawasan baru dalam hal kesenian kepada para generasi muda	Pelaku usaha, masyarakat
12	Kampung Dongeng	Menambah minat anak-anak dalam mendengarkan cerita/dongeng, menambah wawasan anak tentang dongeng-dongeng yang ada di Temanggung	a. Mewujudkan anak-anak Indonesia yang ceria dan bahagia sesuai dengan fitrahnya, b. Membangun pengaruh positif sejak dini bagi anak-anak melalui Kampung Dongeng Temanggung yang akan membentuk karakter	Dinpusip, masyarakat



NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
			baik pada anak	
13	Telur Ayam Ras Petelur Omega-3 "Nabati"	Bahan suplemen melimpah di sekitar kita, pengaplikasiannya mudah, secara finansial lebih menguntungkan, kaya gizi	Menambah variasi pilihan lauk yang lebih bergizi dan tidak mengandung banyak kolesterol	Pelaku usaha, masyarakat
14	Troli Listrik	Memudahkan dalam pengambilan barang meringankan beban dalam pengangkutan barang	Hemat tenaga dan hemat bahan bakar, Proses cepat dan mudah	RSUD, Dinas Pendidikan, Bappeda,
15	Craft Pengharum Ruangan dari Clay Sabun	Membuat ruangan menjadi harum dan segar	Menghilangkan bau yang tidak sedap, Menjadi hiasan	Pelaku usaha, masyarakat
16	Pengaruh Variasi Bumbu dan Jenis Penyimpanan terhadap Kualitas Rasa Nugget Ampas Tahu	Memberikan informasi dan pengetahuan tentang pengaruh kualitas rasa nugget ampas tahu dengan perlakuan variasi bumbu dan jenis penyimpanan yang berbeda	a. Menambah lapangan pekerjaan, b. Menambah variasi pilihan lauk yang berprotein tinggi	DKK. masyarakat, pelaku usaha
17	BUDIDAYA CACING LUMBRICUS RUBELLUS DENGAN ULTRA MEDIA	Peningkatan produksi cacing, Menjamin kelangsungan siklus hidup cacing Lumbricus Rubellus	a. Menambah lapangan pekerjaan, b. Menambah relasi bisnis, c. Meningkatkan pendapatan anggota kemitraan	DKK, masyarakat, pelaku usaha
18	Water Meter Digital	Penggunaan air bisa disesuaikan sesuai kebutuhan, Mempermudah pengelola dalam mengelola administrasi	Pelanggan lebih bisa mengontrol dan mengetahui penggunaan air, Efisiensi tenaga, biaya, dan waktu, Pengembangan dari inovasi yang sebelumnya, Membuka lapangan pekerjaan, Mengikuti arus digitalisasi dengan tujuan mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan air bersih	PDAM, Bappeda, Sekda, Dinpermades
19	"SI HOLER" PELUBANG PLASTIK MULSA	Membantu pertanian lebih cepat selesai, biaya relative terjangkau, penggunaan lebih efektif dan efisien, dapat digunakan dengan mudah dalam setiap waktu (cuaca terang/hujan), pengoperasiannya sangat mudah dengan waktu pekerjaan lebih cepat selesai	Memberikan peluang usaha/tenaga kerja baru untuk masyarakat dengan mengembangkan SIHOLER yang dapat digunakan setiap waktu, Mengatasi permasalahan pertanian di masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan dan kendala dalam melubangi mulsa plastic pertanian	Bappeda, DKPPP, Dinpermades



NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
		dibanding dengan konvensional, Mengurangi polusi udara, karena kalau menggunakan yang arang lebih banyak asap		
20	Tali Tambang Majapahit	Tali Tambang Majapahit mempunyai kekutan yang luar biasa dan tidak kalah dengan tali tambang yang lain serta mempunyai daya tahan lebih dari puluhan tahun, Digunakan Tali Menali	Dengan adanya Inovasi Tali Tambang Majapahit dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang tadinya tinggal 5 KK, sekarang mencapai 60 KK sebagai pengrajin Home Industri yang bekerjasama dengan Inventor.	UMKM, masyarakat
21	Ijuk Ulir Ranjau Binatang	Manfaat dari Ijuk Ulir Ranjau Binatang dapat digunakan untuk menanggulangi / menghalau berbagai jenis binatang, utamanya untuk keamanan jaringan listrik dan jaringan telepon. Pemasangan lebih mudah, simple, cepat, efektif dan efisien.	Membuka peluang usaha baru bagi masyarakat Beringin dan Sekitarnya sehingga mampu meningkatkan ekonomi keluarga, Diciptakannya Ijuk Ulir Ranjau Binatang adalah untuk meminimalisir gangguan listrik dari berbagai binatang.	UMKM, masyarakat
22	Penerapan Metode Certainty Factor dalam Mendeteksi Penyakit pada Cabai Kriting	Meningkatkan deteksi dini penyakit pada cabai kriting	Kesehatan tanaman cabai lebih terjaga dengan baik dan hama penyakit yang menyerang bisa dikendalikan	DKPPP, petani, pelaku usaha
23	OPTIMALISASI DAYA SAING FILM ANIMASI KARYA GENERASI 4.0 SMK BHUMIPHALA DI DUNIA INDUSTRI	Menambah motivasi untuk menemukan ide-ide baru guna meningkatkan daya saing pribadi maupun kelompok di dunia industri 4.0.	siswa dibekali ilmu dan keahlian bidang animasi agar mampu bersaing di dunia industri 4.0	Dinas Pendidikan, dunia usaha
24	PEMANFAATAN MEDIA SINIAR (PODCAST) SEBAGAI SARANA PUBLIKASI PROGRAM PEMERINTAH	Publikasi program pemerintah adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebijakan dan program pemerintah melalui media sosial	Pemanfaatan media siniar untuk publikasi program kebijakan, Menciptakan keterbukaan, komunikasi yang efektif dan interaktif	Dinas Pendidikan
25	Pengembangan Produk Gula Aren Menjadi Gula Semut Muneng	Variasi pemanis dengan bentuk yang lain, dan lebih mudah pemakaiannya	Menambah pendapatan petani	DKPPP, pelaku usaha, masyarakat



NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
26	GMC :GANESA MOBIL COFEE	Memudahkan orang untuk membeli sesuatu, dan bisa berjualan keliling	Menambah pendapatan bagi penjual	Sekolah, pelaku usaha, masyarakat
27	Desa Wisata Mranggen Kidul, Bansari	Meningkatkan Potensi Alam dan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat	meningkatkan pembangunan desa mranggen, membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan asli desa, tumbuhnya UMKM sehingga mendorong pertumbuhan peningkatan ekonomi masyarakat Desa Mranggen dan Sekitarnya	Dinbudpar, Dinkopdag, Kecamatan, Desa, Pokja, Dinkominfo, Dinpermades, mensos, Komunitas
28	Desa Wisata Tlahab, Kledung	Meningkatkan Potensi Alam dan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat	meningkatkan pembangunan Desa Tlahab, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan asli desa, serta mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Temanggung	Dinbudpar, Dinkopdag, Kecamatan, Desa, Pokja, Dinkominfo, Dinpermades, mensos, Komunitas
29	Desa Wisata Tegalrejo, Ngadirejo	Meningkatkan Potensi Alam, Mendukung program pemerintah sebagai lokasi penyangga Borobudur dan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat	meningkatkan pembangunan Desa Tegalrejo, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan asli desa, serta mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Temanggung	Dinbudpar, Dinkopdag, Kecamatan, Desa, Pokja, Dinkominfo, Dinpermades, mensos, Komunitas
30	Desa Wisata Ngadimulyo, Kedu	Meningkatkan Potensi Alam, Potensi Budaya, Religi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat	meningkatkan pembangunan Desa Ngadimulyo, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan asli desa, serta mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Temanggung, khususnya masyarakat Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kedu	Dinbudpar, Dinkopdag, Kecamatan, Desa, Pokja, Dinkominfo, Dinpermades, mensos, Komunitas
31	Desa Wisata Pagergunung, Bulu	Meningkatkan Potensi Alam, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat	meningkatkan pembangunan Desa Pagergunung, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan asli desa,	Dinbudpar, Dinkopdag, Kecamatan, Desa, Pokja, Dinkominfo, Dinpermades, mensos, Komunitas



NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
			serta mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Temanggung	
32	Desa Wisata Traji, Parakan	Meningkatkan Potensi Alam, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat	meningkatkan pembangunan Desa Traji, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan asli desa, serta mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Temanggung	Dinbudpar, Dinkopdag, Kecamatan, Desa, Pokja, Dinkominfo, Dinpermades, mensos, Komunitas
33	Desa Wisata Soropadan, Pringsurat	Meningkatkan Potensi Alam dan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat	meningkatkan pembangunan Desa Soropadan, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan asli desa, serta mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Temanggung	Dinbudpar, Dinkopdag, Kecamatan, Desa, Pokja, Dinkominfo, Dinpermades, mensos, Komunitas
34	Desa Wisata Purbosari, Ngadirejo	Meningkatkan Potensi Alam, Situs Budaya candi liyangan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat	meningkatkan pembangunan Desa Purbosari, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan asli desa, serta mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Temanggung	Dinbudpar, Dinkopdag, Kecamatan, Desa, Pokja, Dinkominfo, Dinpermades, mensos, Komunitas
35	Desa Wisata Rejosari, Bansari	Meningkatkan Potensi Alam, Cultur Budaya, Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat	meningkatkan pembangunan Desa Rejosari, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan asli desa, serta mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Temanggung	Dinbudpar, Dinkopdag, Kecamatan, Desa, Pokja, Dinkominfo, Dinpermades, mensos, Komunitas
36	Desa Wisata Menggoro, Tembarak	Meningkatkan Potensi Alam, Situs Budaya Masjid dan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat	membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan asli desa, serta mendukung percepatan	Dinbudpar, Dinkopdag, Kecamatan, Desa, Pokja, Dinkominfo, Dinpermades, mensos, Komunitas



NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
			pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Temanggung	
37	Desa Wisata Nampirejo, Temanggung	Meningkatkan Potensi Alam, Pasar Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat	meningkatkan pembangunan Desa Nampirejo, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan asli desa, serta mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Temanggung	Dinbudpar, Dinkopdag, Kecamatan, Desa, Pokja, Dinkominfo, Dinpermades, mensos, Komunitas
38	Desa Wisata Tawangsari, Wonoboyo	Meningkatkan Potensi Alam, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat	Meningkatkan pembangunan Desa Tawangsari, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan asli desa, serta mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Temanggung, khususnya masyarakat Desa Tawangsari, Kecamatan Wonoboyo	Dinbudpar, Dinkopdag, Kecamatan, Desa, Pokja, Dinkominfo, Dinpermades, mensos, Komunitas
39	Pesona Alam Embung Kledung	Meningkatkan Potensi Alam, Budaya, embung dan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat	Meningkatkan pembangunan Desa Tlahab, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan asli desa, serta mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Temanggung, khususnya masyarakat Desa Tlahab, Kecamatan Kledung	Dinbudpar, Dinkopdag, Kecamatan, Desa, Pokja, Dinkominfo, Dinpermades, mensos, Komunitas
40	Desa Wisata Prangkogan	Peningkatan perputaran roda perekonomian di Desa Perangkogan, dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, UMKM tumbuh dan berkembang	Meningkatnya ekonomi masyarakat Desa Perangkogan, Desa Perangkogan semakin maju dan dikenal, masyarakat semakin maju dan kreatif	POKDARWIS, PEMDES, KECAMATAN, DINBUDPAR, DINPERMADES, BAPPEDA, DINKOPDAG, SATPOL PP & DAMKAR, DINDIKPORA, DPUR, TENAGA KERJA
41	Desa Wisata Pluralisme, Desa Getas Kaloran Temanggung	Melestarikan Budaya Toleransi Antar Umat Beragama dan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat	Terjadinya pertumbuhan ekonomi di Desa Getas dan sekitarnya; Terbukanya lapangan kerja baru untuk masyarakat desa Getas dan sekitarnya; Berkembangnya UMKM di Desa Getas	DINBUDPAR, DINPERMADES, BAPPEDA, DINKOPDAG, SATPOL PP & DAMKAR, DINDIKPORA, DPUR, KESBANGPOL, TENAGA KERJA



NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
			dan Sekitarnya; Kerukunan umat beragama semakin meningkat	
42	Desa Wisata "Tanpa Nama" Desa Tegowanuh, Kaloran Temanggung	Meningkatkan dan Mengembangkan Desa Wisata "TANPA NAMA" Desa Tegowanuh Kaloran Temanggung; Mendukung program pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi masyarakat	Pergerakan ekonomi masyarakat di Desa Tegowanuh dan sekitar semakin terlihat; Masyarakat Desa Tegowanuh semakin meningkat kesejahteraannya; Terbukanya lapangan kerja baru untuk masyarakat Desa Tegowanuh dan Sekitarnya	Dinbudpar, Dinkopdag, Kecamatan, Desa, Pokja, Dinkominfo, Dinpermades, mensos, Komunitas, PDAM
43	Desa Wisata Muncar-Moncer Gemawang Temanggung	mengangkat produk unggulan kearifan lokal yang dimiliki Kabupaten Temanggung Terutama di Desa Muncar Kecamatan Gemawang agar produk-produk lokal mempunyai daya saing tinggi di pasar global Terbangunnya Desa Wisata yang mempunyai keunikan dengan penyajian kultur budaya lokal dengan didukung produk perkebunan dan kehutanan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi	Desa Munjar yang tadinya terisolir menjadi salah satu tujuan wisata yang diminati oleh Turism; Terjadinya perubahan kultur masyarakat, yang tadinya tidak begitu peduli dengan kekayaan alam yang dimiliki sekarang menjadi peduli bahkan bisa menjadi tambahan penghasilan keluarga masyarakat Muncar; Meningkatkan harga produk-produk pertanian, perkebunan, dan kehutanan; Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai produk lokal.	Dinbudpar, Dinkopdag, Kecamatan, Desa, Pokja, Dinkominfo, Dinpermades, mensos, Komunitas, TSLP/CSR
44	Desa Wisata Dewi Eramaya, Desa Ngropoh Kranggan Temanggung	Memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian kami dalam menyikapi potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata di wilayah Desa Ngropoh Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di Desa Ngropoh Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, membangun dan menumbuhkan	Meningkatkan perekonomian masyarakat; masyarakat menjadi lebih maju; peningkatan industri kecil menengah yang ada di desa; sebagai sarana promosi lokal; melestarikan tradisi dan budaya masyarakat; Membuka lapangan kerja baru	Dinbudpar, Dinkopdag, Kecamatan, Desa, Pokja, Dinkominfo, Dinpermades, mensos, Komunitas



NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
		sikap dukungan positif dari masyarakat desa sebagai tuan rumah, meningkatkan pendapatan ekonomi daerah		
45	Desa Wisata Kembang Madu	Meningkatkan PAD; Meningkatkan ekonomi masyarakat dan sekitarnya; Meningkatkan daya tarik lokasi wisata religi; Membangun dan mengembangkan Desa; Wisata Kedu Makukuhan Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung	Para Pengunjung semakin nyaman, spot-spot baru dapat terbangun, meningkatnya pengunjung wisata.	Dinbudpar, Dinkopdag, Kecamatan, Desa, Pokja, Dinkominfo, Dinpermades, mensos, Komunitas
46	Desa Wisata Wagir Bawang, Desa Simpar	Menghidupkan dan mengembangkan kembali Desa Wisata Wagir Bawang dalam tatanan New Normal Pasca Pandemi Covid-19; Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata; Pemerataan Pembangunan Wilayah Kabupaten Temanggung	Terjadinya pertumbuhan ekonomi dimasyarakat Desa Simpar; tumbuhnya pemberdayaan masyarakat terkait dengan usaha baru dan tenaga kerja; adanya pendapatan asli desa, Desa simpar; desa yang asing menjadi desa wisata terkenal yang diminati Tourism	Dinbudpar, Dinkopdag, Kecamatan, Desa, Pokja, Dinkominfo, Dinpermades, mensos, Komunitas
47	Festival Lembutan	Meningkatkan nilai ekonomi hasil olahan tembakau	Harga tembakau naik, peningkatan sumber ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja baru	
48	VIOCI	Meningkatkan produk roti yang memadukan unsur makanan lokal dengan sentuhan-sentuhan modern, menambah produk unggulan lokal sebagai oleh-oleh pendukung wisata atau kunjungan kerja dari daerah lain	Meningkat ekonomi masyarakat, mendukung peningkatan ekraf, mempermudah dalam mencari produk makanan lokal sebagai cinderamata khas Temanggung. Membuka lapangan kerja baru.	
49	WEDANG LOMBOK, DESA REJOSARI, KECAMATAN BANSARI, KABUPATEN TEMANGGUNG	Meningkatkan daya tarik kearifan lokal, Desa Rejosari, Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, terciptanya manfaat baru dari cabe	Meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap cita rasa wedang Lombok, membuka lapangan usaha baru, meningkatkan ekonomi masyarakat	



NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
50	"GRUBINE SIMBAH" WALITELON UTARA TEMANGGUNG	Melestarikan budaya kuliner nenek moyang, meningkatkan nilai ekonomi ketela rambat, membuka peluang usaha baru	Kuliner grubi mulai dikenal kembali, membuka lapangan kerja, meningkatkan ekonomi masyarakat.	
51	PUNCAK BOTORONO, DESA PETARANGAN, KECAMATAN KLEDUNG	Meningkatkan Potensi Alam bukit botorono dan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat, terbukanya lapangan kerja baru	Terbangunnya wisata baru, peningkatan ekonomi masyarakat, menurunkan angka pengangguran, tumbunya umkm	
52	SEMOET GANTENG (GULA SEMUT)	Meningkatkan nilai ekonomi gula aren, membuka peluang usaha baru, meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Harga gula aren meningkat, meningkatkan ekonomi pengrajin gula aren, gula aren mampu bersaing ditingkat pasar global	
53	Stik Daun Kopi	Meningkatkan nilai daun kopi, yang tadinya tidak mempunyai nilai ekonomi menjadi punya nilai ekonomi, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, membuka peluang usaha baru	Meningkatkan ekonomi masyarakat utama petani kopi, membuka peluang tenaga kerja baru, terciptanya olahan kuliner khas temanggung yang baru.	
54	PEMBUATAN DESTILATOR UNTUK PEMBAKARAN SAMPAH RESIDU	Meningkatkan nilai ekonomi sampah, meningkatkan kebersihan lingkungan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Sampah menjadi berkah, membuka tambahan usaha baru, permasalahan sampah bisa diatasi.	
55	Kopi Tutur	Meningkatkan produk kualitas kopi temanggung, Jangkauan pasar lebih luas, Kopi siap saji dimanapun berada	Meningkatkan ekonomi masyarakat, membuka peluang tenaga kerja, meningkatkan daya tarik penggemar kopi, meningkatkan popularitas kopi temanggung .	
56	ONDELA ENDESS	Melestarikan budaya kuliner khas temanggung, meningkatkan nilai ekonomi ketela rambat, meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Onde-onde makanan kuliner khas temanggung menjadi lebih dikenal, makanan kuliner khas temanggung mampu bersaing dipasar global, meningkatkan ekonomi masyarakat.	
57	KAMPOENG ULIN MAJAPAHIT DI NEGERI BRINGIN	Melestarikan seni budaya kerajinan tangan dari bahan baku	Kerajinan tangan tali ijuk peninggalan majapahit tetap lestari dan semakin	



NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
		ijuk peninggalan jaman majapahit, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, membuka tenaga kerja, meningkatkan nilai ekonomi limbah aren (ijuk)	diminati oleh konsumen dan mampu bersaing dipasar global, meningkatkan ekonomi masyarakat, mengurangi pengangguran, menjadi obyek edukasi wisata baru yang unik.	
58	Pemanfaatan Kekayaan Lingkungan Untuk Pariwisata Alam Banyu Ciblon Lestari (BCL) Desa Tlogowero Kecamatan Bansari	Meningkatkan Potensi Alam, Mata air dan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat	meningkatkan perekonomian masyarakat; masyarakat menjadi lebih maju; peningkatan industri kecil menengah yang ada di desa; sebagai sarana promosi lokal; melestarikan tradisi dan budaya masyarakat; Membuka lapangan kerja baru	
59	BUNTALA MADANI	Terbangunnya wisata embung walitis; tumbuhnya pemberdayaan masyarakat, Berkembangnya seni budaya	Peningkatan ekonomi masyarakat, Terbukanya lapangan kerja baru, Tumbuhnya UMKM	
60	KAMPUNG ADAT GUNUNG WULUH	Terbangunnya wisata alam air terjun, terbentuknya tatanan kehidupan baru, pemberdayaan masyarakat, terbangunnya infrastruktur.	Kampung Gunung Wuluh yang asing jadi dikenal, peningkatan ekonomi masyarakat, tumbuhnya umkm, peningkatan sdm.	
61	SHIBIRU Inovator Pengetahuan Budaya Pewarna Alam	Memperkenalkan tanaman pewarna baru yaitu tanaman strobilates cusia, lahan tidak produktif menjadi produktif, tumbuhnya petani baru yaitu petani tanaman pawarna alam strobilates cusia, Peningkatan pemberdayaan masyarakat, membuka lapangan kerja	Menambahkan koleksi tanaman untuk penggunaan pewarna alam di kerajinan tradisional tekstil. Meningkatkan ekonomi masyarakat, Meningkatkan produktifitas lahan, Berdirinya KOPERASI "Shidobiru Sakatani Makmur" , Pasta & powder dari tanaman Strobilanthes cusia lebih diminati para pengrajin tradisi tekstil dibanding dengan tanaman indigo lain karena hasil pewarnaannya lebih kuat dan mudah prosesnya, menurunkan angka pengangguran	
62	Miniatur Scale Pemanfaatan Limbah Pralon Atau Pvc Dan Bekas Kartu	Limbah pralon mempunyai nilai ekonomi tinggi, Terciptanya	Terciptanya kerajinan tangan baru, meningkatkan ekonomi.	



NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
	Perdana Provider Menjadi Karya Seni Bernilai Tinggi (MIMOGE)	Kerajinan Baru dari limbah pralon yang mempunyai daya saing tinggi		
63	Pemanfaatan Limbah Tembakau Menjadi Kerajinan Tangan Yang Mempunyai Nilai Jual (KAYUNEDW)	Meningkatkan nilai ekonomi limbah daun tembakau, membuka lapangan kerja baru, terciptanya kerajinan limbah daun tembakau yang berdaya saing tinggi	Meningkatkan ekonomi masyarakat, mengurangi pengangguran	
64	Metode Pembelajaran Montessori Di Teras Berbagi Ilmu Teras Berbagi Ilmu	Dapat dijadikan sebagai alternatif belajar anak dengan suasana yang berbeda dibanding di rumah, Dapat dijadikan rujukan bagi para orang tua untuk mengembangkan potensi putra-putri mereka, Memberikan pengetahuan diluar materi yang telah diberikan di sekolah.	Anak mampu belajar mandiri, kreatif belajar lebih senang	
65	AMPAS TAHU (Glycine max)	Meningkatkan nilai ekonomi ampas tahu,	Diversifikasi makanan dari ampas tahu, meningkatkan ekonomi masyarakat, membuka peluang usaha baru	
66	Alat Pemas Madu Manual	Mempermudah dalam proses panen madu, mengoptimalkan waktu pemanenan, produksi madu yang dihasilkan bisa lebih maksimal, larva lebah tidak banyak yang mati, jangka waktu ke panen berikutnya lebih singkat, lebih terjamin kebersihannya	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi produktivitas madu	
67	BOGUS RICE (Beras Analog Suweg Dan Kacang Merah)	Dapat menggantikan makanan pokok	Meningkatkan ekonomi masyarakat, membuka peluang usaha baru, masyarakat tidak ketergantungan dengan beras, diversifikasi makanan.	
68	Minyak Kopi Sebagai Terapi Herbal Di Masa Pandemi COVID-19	Meningkatkan aneka produk dari olahan kopi, membantu dalam penanganan penyakit tertentu, membuka peluang usaha baru	Meningkatkan ekonomi masyarakat, ditemukan salah satu obat herbal dari bahan kopi, meningkatkan nilai daya saing kopi, membuka lapangan kerja baru, dapat tertanganinya penyakit-	



NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
			penyakit tertentu seperti asma dan sejenisnya secara cepat.	
69	Pengembangan Knalpot Dua Suara Dengan Pengaturan Remote Control	Tersedianya knalpot dengan dua tipe yaitu standar dan racing dalam satu knalpot menggunakan remote control serta tersedianya knalpot dengan harga lebih ekonomis. Terciptanya peluang usaha yang komersial di bidang otomotif khususnya untuk kaum millennial. Terwujudnya pengembangan ekonomi kerakyatan yang berasal dari industri otomotif.	memenuhi kebutuhan pokok kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yakni knalpot racing dan standart, memenuhi kebutuhan para pelaku / penghobi otomotif dan keinginan pasar.	
70	CMP (Cangkul Motor + Pompa)	Petani mudah melakukan penyiangan rumput pada lahan kering /tegalan Dapat sSebagai alat pengemburan tanah Dapat untuk di gunakan sebagai pompa air untuk pengairan lahan kering /tegalan, Pompa air bisa digunakan untuk penyemprotan tanaman kopi dll.	Petani lebih mudah mengelola pertanian dengan lebih efektif dan efisien.	
71	SIRUP DAUN MINT	Menambah nilai ekonomis dari mint, Sebagai produk kesehatan, seperti meredakan batuk, menjaga imun tubuh , untuk kecantikan, dll.	Menambah umur simpan dari mint segar, meningkatkan ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja baru	
72	Cassbean Bar	Memberikan alternatif bahan baku lokal dalam olahan makanan populer di Indonesia, Meningkatkan produktivitas perajin patilo (rengginan singkong), Memotivasi masyarakat dalam melakukan inovasi pangan lokal	Dapat mengurangi impor gandum, Meningkatkan potensi singkong dipasar global, Meningkatkan ekonomi masyarakat, membuka peluang usaha baru, dan membuka lapangan kerja	



NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
		dan mengoptimalkan pemanfaatan singkong dan kacang tanah menjadi olahan cereal snack bar dengan nama dagang Cassbean Bar		
73	ANGKOT BEBAS COVID-19	Masyarakat mendapatkan pelayanan transportasi umum dengan penerapan protokol kesehatan, Pengusaha dan pekerja di sektor transportasi umum aktivitas bisnis nya tetap berjalan	Perekonomian dapat berjalan dengan baik, Angkutan umum tetap dapat beroperasi.	
74	RESTORAN SATU JALUR	Dapat membangkitkan umkm sektor rumah makan/restauran di masa pandemic covid-19	Restoran tetap dapat dibuka dengan melakukan protocol kesehatan, perekonomian tetap berjalan, pengunjung restoran merasa aman dan nyaman	
75	JALAN JALAN VIRTUAL TEMANGGUNG	Jalan-jalan Virtual tidak menimbulkan kerumunan seperti yang biasa terdapat di tempat wisata, Menjadi media tele-tourism sehingga ketika kondisi sudah kondusif akan meningkatkan minat wisatawan berkunjung ke Temanggung.	Informasi dan publikasi pariwisata tetap berjalan dengan baik, wisata di temanggung tetap berjalan walupun dimasa pandemic covid-19	
76	Belanja Kolektif Di Pasar Tradisional	Masyarakat tetap dapat memperoleh barang kebutuhan sesuai yang diinginkan tanpa harus datang sendiri ke pasar, BUMDES mendapatkan tambahan pendapatan dari jasa belanja di pasar tersebut, mengurangi resiko tertular virus, apabila masyarakat datang ke pasar. kegiatan perekonomian / transaksi jual beli di pasar tetap dapat berjalan dalam situasi pandemi dengan tetap memperhatikan	Perputaran roda perekonomian masyarakat tetap berjalan dengan baik, transaksi jual beli tetap berjalan dimasa pandemic covid-19	



NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
77	SIDORA (Kursi Daur Ulang Sampah)	protokol kesehatan Membuat lapangan kerja bagi ibu rumah tangga karena bisa dikerjakan saat waktu luang, Hidup lebih sehat dengan pengolahan sampah yang ramah lingkungan,	Mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat Menjaga pelestarian lingkungan Dapat Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, membuka lapangan kerja	
78	Dari Sampah Menjadi Berkah	dapat mengurangi jumlah sampah, mencegah pencemaran lingkungan, meningkatkan kemandirian serta partisipasi dalam pengelolaan sampah, memberikan nilai ekonomi yang berasal dari barang-barang yang masih dapat didaur ulang sehingga kualitas hidup masyarakat akan meningkat serta meningkatkan kualitas desa wisata bagi masyarakat umum.	Meningkatkan ekonomi masyarakat, lingkungan tetap terjaga kebersihannya, masyarakat sadar terhadap kebutuhan lingkungan bebas sampah	
79	Pembuatan Lampu Hias dari Pipa PVC	Solusi cara mengatasi semakin meningkatnya limbah rumah tangga, Mengekspresikan nilai seni yang dimiliki Meningkatkan nilai ekonomi limbah pralon dengan dibuat kerajinan hiasan dan penerangan, mendorong UMKM membuat kreasi dan memanfaatkan barang yang mudah didapatkan dan mudah dibuat dengan peralatan yang mudah didapatkan	Membuka lapangan kerja baru, meningkatkan ekonomi masyarakat, mengurangi limbah pralon	
80	Pembuatan Paving Block Plastik Untuk Mendukung Pengurangan Sampah Plastik	Mengurangi limbah plastic, limbah plastic mempunyai nilai jual, limbah plastic menjadi produk unggulan	Mengurangi pencemaran lingkungan, limbah plastic dapat dimanfaatkan untuk bangunan	



NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
81	PEMANFAATAN EKSTRAK BUNGA PACAR AIR (Impatiens balsamina) DAN BUNGA TELANG (Clitoria ternatea) Sebagai Bahan Dasar Warna Pembuatan Lakmus	Memberikan informasi pada masyarakat tentang bunga pacar air dan bunga telang sebagai bahan dasar warna pembuatan kertas lakmus yang dapat dijadikan alat uji asam ,basa dan garam serta menambah wawasan terutama dalam ilmu pengetahuan alam.	Dapat dibuatnya kertas lakmus dari bahan bunga pacar dan bunga telang	
82	Memadukan Produk Eskrim Dengan Kopi Temanggung Sebagai Upaya Diferensiasi	Dapat terciptanya variasi produk baru yang unik dan diferent yaitu Es Krim rasa Kopi, Dapat meningkatkan citra kopi temanggung, terbukanya peluang usaha baru	Meningkatkan ekonomi masyarakat, dapat meningkatkan branding kopi temanggung, mengangkat produk unggulan Kab. Temanggung	
83	Protein Hewani Untuk Meningkatkan Sistem Imun “Triple Imuna”	dapat meningkatkan sistem imun, Stamina, menanggulangi anemia, mencerdaskan otak, merawat tulang dan gigi, membantu regenerasi sel otot, menurunkan kolesterol, Membantu petani dalam mengatasi hama tanaman.	Meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat, dapat menanggulangi permasalahan hama belalang, peluang usaha baru.	
84	Ekstrak Daun Pepaya Dan Serai Sebagai Pengendali Walang Sangit Pada Tanaman Padi	Sebagai salah satu insektisida alami dan menjadi alternatif bagi para petani dalam pengendalian walang sangit	Dapat meningkatkan produksi pertanian	
85	Pengawet Switch Pelampung Pompa Air	Penggunaan lebih nyaman, aman dan hemat beaya tagihan listriknya. Umur dari switch pelampung menjadi awet, lebih ekonomis	Ditemukan produk baru pelampung pompa air membuat pengguna lebih hemat penggunaan air, mengurangi beban biaya listrik.	
86	Smarthome Dengan Remot Tv Berbasis Arduino	Dengan menggunakan smarthome atau sistem rumah pintar ini memberikan segala kenyamanan, keselamatan, keamanan dan	Meningkatkan efektif dan efisiensi bagi para pengguna Smarthome Remot TV berbasi Ardoino	



NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
		penghematan energi yang berlangsung secara otomatis dan terprogram dengan Arduino, memudahkan pengguna untuk memantau dan mengendalikan ruangan/kamar/Lorong dari satu titik dan kapan saja hanya dengan menggunakan koneksi remot tv		
87	RASA MESRA (Surat Suara Pemilu Elektronik Bagi Disabilitas Netra)	Meningkatkan kemudahan dan kemandirian para penyandang disabilitas sensorik netra dalam memberikan suaranya/mencoblos.	Dengan adanya RASA MESRA diharapkan akan berdampak pada meningkatnya partisipasi pemilih dari penyandang disabilitas, menurunkan angka kecurangan pemilu, adanya aksesibilitas dan mereduksi marginalitas bagi penyandang disabilitas.	
88	Smart Service Desa Pare	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lebih baik dan cepat	Masyarakat dapat terlayani dengan baik dengan lebih mudah dan cepat	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022

2.6 Penghargaan yang Diterima Kabupaten Temanggung

Kabupaten Temanggung mempunyai prestasi dan menerima banyak penghargaan baik skala provinsi, nasional maupun internasional dari berbagai bidang lomba/kompetisi. Pencapaian tersebut merupakan apresiasi sekaligus memberikan semangat untuk berkarya dan berprestasi yang lebih baik di masa mendatang. Berikut merupakan jumlah penghargaan yang diterima Kabupaten Temanggung pada tahun 2018-2021.

Tabel 2.405
Jumlah Penghargaan yang diterima Kabupaten Temanggung
Tahun 2018 – 2021

No	Tahun	Jumlah Penghargaan		
		Regional	Nasional	Internasional
1	2018	14	10	-
2	2019	10	26	5
3	2020	8	17	6
4	2021	15	20	2
5	2022	34	19	3

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah

Daftar penghargaan yang diterima Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.406
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2018

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	SKALA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	Penghargaan Anugrah Parahita Eka Praya Tingkat Madya Tahun 2018	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Nasional	DPPKBPPA
2	Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Pratama Tahun 2018	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Nasional	DPPKBPPA



NO	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	SKALA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
3	Piagam Penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik Tahun 2018	Kemenpan RB	Nasional	RSUD Temanggung
4	Sertifikat BAPETEN <i>Safety and Security Award 2018</i> kepada RSUD Temanggung tentang Radiologi Diagnostik & Intervensional dengan Predikat Sangat Baik	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)	Nasional	RSUD Temanggung
5	Penghargaan kepada Dinarpus Temanggung sebagai Perpustakaan Terbaik Daerah	Coca Cola Foundation	Nasional	Dinarpus
6	Penghargaan kepada Pemkab Temanggung tentang Laporan Keuangan Tahun 2017 dengan capaian Opini WTP	Menteri Keuangan RI	Nasional	BPPKAD
7	Piagam Bhumimandala Award tentang Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	Badan Informasi Geospasial	Nasional	BPPKAD
8	Adiwiyata Nasional kepada SMP N 2 Pringsurat	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nasional	Dindikpora
9	Adiwiyata Nasional kepada SMP N 1 Parakan	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nasional	Dindikpora
10	Adiwiyata Nasional kepada SMA N 1 Temanggung	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nasional	Dindikpora
11	Kalpataru (Kategori Perintis Lingkungan Hidup) kepada Kelompok Tani Margo Rahayu	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Dinas Lingkungan Hidup
12	Pemenang III Kategori Desa sebagai Pelaksana Terbaik Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat kepada Desa Caruban Kec. Kandangan	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Dinpermades
13	Juara Duta Wisata Provinsi Jawa Tengah	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Dinarpus
14	Juara III Pos Lansia Terbaik Tingkat Jawa	Gubernur Jawa Tengah	Regional	DPPKBPPA



NO	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	SKALA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	Tengah			
15	Penghargaan Peringkat III kepada TKSK Kecamatan Kranggan pada Lomba Pilar-pilar Sosial Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Dinas Sosial
16	Juara I Kategori Kelompok Tani Upaya Khusus Jagung Teladan 2018 dalam Lomba Penyuluhan Bidang Pertanian Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Dintanpangan
17	Juara 2 Penyuluh Inovatif dan Kreatif dalam mensukseskan Program Kartu Tani Jawa Tengah	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Dintanpangan
18	Juara 2 Poktan Berprestasi Komoditas Tembakau dalam Kegiatan Pemberian Penghargaan Pelaku Pembangunan Perkebunan dan Petani/Kelompok Tani Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Dintanpangan
19	Piagam Penghargaan kepada RSUD Temanggung sebagai Badan Publik Menuju Informatif	Gubernur Jawa Tengah	Regional	RSUD Temanggung
20	Sertifikat Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2005 kepada Disnaker Temanggung	PT. Global Inspeksi Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen LSSM-058-IDN	Regional	Disnaker
21	Juara III Lomba Petugas OP Tingkat UPT Balai Pusdataru Tahun 2018 kepada DPUPKP Temanggung	Balai PSDA PROBOLO	Regional	DPUPKP
22	Piagam Penghargaan kepada Pemkab Temanggung sebagai Terbaik ketiga Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan DAK Fisik TA 2017 Provinsi Jawa Tengah	Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah	Regional	BPPKAD



NO	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	SKALA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
23	Piagam Penghargaan kepada DPPKAD Kabupaten Temanggung sebagai terbaik ketiga Pemerintah Daerah yang memiliki kesehatan fiskal daerah terbaik se Jawa Tengah dilihat dari LKPD Audited TA 2018	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah	Regional	BPPKAD
24	Sangrai Kopi Juara Utama Lomba Krenova Provinsi Jateng	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Bappeda

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2018

Daftar penghargaan yang yang diterima Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.407
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	SKALA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	Internasional GACC Open di Malaysia	Federasi Catur Malaysia (MAS)	Internasional	Dindikpora
2	Kejuaraan Renang Internasional Thailand Sport School Games	Kementrian Pariwisata dan Olahraga Thailand	Internasional	Dindikpora
3	Kejuaraan Karate Internasional di Surakarta (<i>South East Asean University Karate Championship</i>) Juara II	Rektor Universitas Sebelas Maret	Internasional	Dindikpora
4	Internasional Kejuaraan Sepatu Roda di Surakarta	Walikota Surakarta	Internasional	Dindikpora
5	Kejuaraan Karate Internasional di Surakarta (<i>South East Asean University Karate Championship</i>) Juara III	Rektor Universitas Sebelas Maret	Internasional	Dindikpora

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	SKALA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
6	Juara II Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Nasional	Bappeda
7	Juara Harapan I Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional II Tahun 2019	Menteri Dalam Negeri	Nasional	Dinpermades
8	Kabupaten Stop BABS/ODF	Menteri Kesehatan	Nasional	Dinas Kesehatan
9	STBM Berkelanjutan Tahun 2019	Menteri Kesehatan	Nasional	Dinas Kesehatan
10	Sanitarian Puskesmas Terbaik Kabupaten SBS (ODF) 100% Tahun 2019	Dirjen Kesmas Kemenkes RI	Nasional	Dinas Kesehatan
11	Penghargaan Kabupaten Terbaik Pendataan ERDKK dan Implementasi Kartu Tani 2019 (Kriteria Kecepatan, Komunikasi, & Koordinasi, Kerjasama, Realisasi Penggunaan kartu Tani)	Kementerian Pertanian	Nasional	Dintanpangan
12	Maturitas Penyelenggaraan SPIP Level 3	Deputi Kepala BKPK Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	Nasional	Inspektorat
13	Pengembangan Hilirisasi dan Kewirausahaan Bidang Perkebunan	Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian	Nasional	Dintanpangan
14	Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Pratama Tahun 2019	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Nasional	DPPKBPPA
15	BUMD Terbaik di Indonesia Tahun 2019	Top Business	Nasional	PD Bank Pasar Temanggung
16	Top Pembina BUMD 2019	Top Business	Nasional	Bupati Temanggung



NO	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	SKALA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
17	Penghargaan Adipura Kategori Kota Kecil 2019	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nasional	Kabupaten Temanggung
18	Juara I Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Dinpermades
19	Peringkat II kategori Pembina Ketahanan Pangan Adhikarya Pangan Nusantara Provinsi Jawa Tengah 2019	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Dinas Pertanian
20	Juara I Kabupaten Kota Bertransaksi Kartu Tani Terbanyak	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Dintanpangan
21	Duta Lingkungan Sehat STBM Kategori Anak Sekolah	Gubernur Jawa Tengah	Regional Peringkat I	Dinas Kesehatan
22	Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi di Jawa Tengah Tahun 2019	Gubernur Jawa Tengah	Regional Peringkat II	Dinas Kesehatan
23	Pelaksana Terbaik PHBS Tk Provinsi Jawa tengah	Gubernur Jawa Tengah	Regional (Juara Harapan III)	Dinas Kesehatan
24	Juara II Stand Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2019	Gubernur Jawa Tengah	Regional	DinPerindag Kop dan UMKM
25	Juara III Pesona Produk Kriya Dekranasda Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2019	Gubernur Jawa Tengah	Regional	DinPerindag Kop dan UMKM
26	Juara III Penghargaan <i>Central Java's Potensial Investment Challenge (CJPIC)</i>	Keris Jateng	Regional	DPMPPTSP
27	Nasional Catur Piala Ketua DPR RI di Jakarta	Ketua DPR Republik Indonesia	Nasional	Dindikpora
28	Kejurnas Atletik di Cibinong Bogor Juara I	PB PASI (Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh)	Nasional	Dindikpora



NO	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	SKALA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		Indonesia)		
29	Nasional Kejuaraan Renang Terbuka se Indonesia di Yogyakarta Juara I	Walikota Yogyakarta	Nasional	Dindikpora
30	Nasional Wushu Junior di Pangkalpinang	Piala Bergilir Presiden Republik Indonesia	Nasional	Dindikpora
31	Nasional Wushu Junior di Semarang Juara I	Rektor Universitas Negeri Semarang	Nasional	Dindikpora
32	Nasional Wushu Championsip di Yogyakarta	Asosiasi Pemersatu Orangtua Siswa Sasana Wushu Indonesia Sinduadi (APASI)	Nasional	Dindikpora
33	Nasional Kemah Budaya di Jakarta	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Nasional	Dindikpora
34	Nasional Kejuaraan Renang terbuka se Indonesia di Yogyakarta Juara II	Walikota Yogyakarta	Nasional	Dindikpora
35	Nasional Wushu Junior di Semarang Juara II	Rektor Universitas Negeri Semarang	Nasional	Dindikpora
36	Nasional Lomba O2SN Tingkat Nasional di Semarang	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Nasional	Dindikpora
37	Nasional Lemkari Piala Menpora di Jakarta	Menteri Pemuda dan Olahraga	Nasional	Dindikpora
38	Kejurnas Atletik di Cibinong Bogor Juara II	PB PASI (Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia)	Nasional	Dindikpora
39	Nasional Championship BMX di Temanggung	Gubernur Jawa Tengah	Nasional	Dindikpora
40	Nasional Kejuaraan Renang Antar Sekolah dan Mahasiswa di Yogyakarta	Gubernur AAU Cup	Nasional	Dindikpora



NO	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	SKALA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
41	Tari Konceran, Juara I Festival Tari Tingkat Provinsi Jateng	Gubernur Jateng	Regional	Dinas Pariwisata

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2019

Penghargaan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2020, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.408
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	SKALA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	Juara I Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Provinsi Jawa Tengah	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Bappeda
2	Juara I Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Nasional	Bappeda
3	IGA (Inovation Government Aaward) Nominasi 10 besar Kabupaten Terfavorit Tingkat Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Nasional	Bappeda
4.	Juara Utama (Drone Semprot Pertanian Otomatis) dan Juara Favorit (Hidroponik Organik) Krenova masyarakat Tingkat Provinsi	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Bappeda
5	Juara III Kategori Pasar Anugerah IDSD Tingkat Prov. Jateng	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Bappeda
6	Pemilihan Duta Genre tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2020	Gubernur Jawa Tengah	Regional	DPPAPPKB
7	Pemilihan kelompok Bina Keluarga Remaja Mutiara Kasih juara terbaik II	Gubernur Jawa Tengah	Regional	DPPAPPKB

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	SKALA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
8	OPINI WTP yang ke 7	BPK RI	Nasional	BPPKAD
9	OPINI WTP yang ke 8	BPK RI	Nasional	BPPKAD
10	Juara I Kategori Desa Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Dinpermades
11	Juara III tingkat Provinsi Jawa Tengah Kategori Pelayanan Masyarakat Tahun 2020	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Satpol
12	Juara 1 Nasional Wushu Online (7 medali emas)	Wushu Indonesia Provinsi Bali	Internasional	Dindikpora
13	Nasional Taekwondo Poomsae virtual juara 1	Taekwondo Indonesia Provinsi Banten	Internasional	Dindikpora
14	Juara 2 Nasional Wushu Online Se Indonesia (3 medali perak)	Wushu Indonesia Provinsi Bali	Internasional	Dindikpora
15	Juara 1 dan 2 Balap sepeda Internasional Sirkuit BMX di Banyuwangi (2 medali emas dan 3 medali perak)	Banyuwangi Internasional BMX	Internasional	Dindikpora
16	Juara 2 Balap Sepeda tingkat Nasional pada PON	PB PON	Nasional	Dindikpora
17	Juara 1 Balap Sepeda pada International Sirkuit BMX di Jakarta	DISPORA Provinsi DKI	Internasional	Dindikpora
18	Juara 3 Wushu pada Wushu Tournamen	Brunei Wushu Federation	Internasional	Dindikpora
19	Juara 3 Sepakbola Putri	Special Olympics Indonesia	Nasional	Dindikpora
20	Juara 1 Renang tingkat Nasional	Akademi angkatan Udara	Nasional	Dindikpora



NO	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	SKALA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
21	Juara 1 menembak	Yon Armed 13 Kostrad Sukabumi	Nasional	Dindikpora
22	Juara 1 Wushu	UNNES	Nasional	Dindikpora
23	Juara 1 Renang	PARASWIM Indonesia	Nasional	Dindikpora
24	Juara 1 Pencak silat	IPSI Yogyakarta	Nasional	Dindikpora
25	Juara 1 Tenis	PELTI kabupaten Bogor, Jabar	Nasional	Dindikpora
26	Juara 1 Tenis	PELTI kabupaten Pati, Jateng	Nasional	Dindikpora

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2020

Pada tahun 2019 Kabupaten Temanggung berhasil menjadi juara 2 lomba Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional untuk kategori Kabupaten Terbaik. Prestasi ini berlanjut pada tahun 2020, Kabupaten Temanggung berhasil menjadi juara 1 lomba Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional. Pengumuman disampaikan oleh Kepala Bappenas bersamaan dengan pelaksanaan Musrebangnas Tahun 2020 secara virtual pada hari Kamis tanggal 30 April tahun 2020.

Penghargaan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2021, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.409
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	SKALA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	Juara I Lomba Penerapan Hygiene Sanitasi Pada Unit Usaha Produk Hewan oleh CV. Sumber Gizi Desa Kedu Kec. Kedu tingkat Provinsi Jawa Tengah	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2	Juara II Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terendah tingkat Provinsi Jawa Tengah	Sekda Provinsi Jawa Tengah	Regional	Diperinaker



NO	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	SKALA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
3	Kategori Kabupaten Inovatif	Kemendagri	Nasional	Bappeda
4	Kota Layak Anak Kategori Madya	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nasional	BKPBPPPA
5	Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Utama	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nasional	BKPBPPPA
6	OPINI WTP yang ke 9	BPK RI	Nasional	BPKPAD
7	Shibiru Pewarna Alam dari tanaman Stobilantes Cusia,	Juara 2 (dua) tingkat Provinsi Jateng	Regional	Bappeda
8	Lift Cor Beton Ekonomis (LCBE)	10 besar tingkat Provinsi Jawa Tengah	Regional	Bappeda
9	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (SBM)	Terbaik Pertama di Tingkat Nasional	Nasional	DKK
10	Sekolah Adiwiyata Nasional kepada SMP N 1 Kandangan	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nasional	Dindikpora
11	Medali Perak bidang Lomba Matematika pada kompetisi Sains Nasional (KSN) jenjang SMP tingkat Nasional	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Nasional	Dindikpora
12	juara 1 (emas) kejuaraan Nasional Championship Karate	Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI)	Nasional	Dindikpora
13	juara 1 (emas) Open virtual Wushu Tournament 2021 Putra	Pengurus Besar Wushu Indonesia	Nasional	Dindikpora
14	juara 1 (emas) Open virtual Wushu Tournament 2021 Putri	Pengurus Besar Wushu Indonesia	Nasional	Dindikpora
15	Juara 1 (emas) Taekwondo Championship Menpora Cup	Pengurus Besar Taekwondo Indonesia	Nasional	Dindikpora



NO	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	SKALA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
16	Juara 2 (perak) Open Virtual Wushu Tournament 2021	Pengurus Besar Wushu Indonesia	Nasional	Dindikpora
17	Juara 2 (perak) tenis lapangan Walikota Tegal Cup XIII tahun 2021	Pengkab PELTI (Persatuan Lawn Tenis Indonesia) Kabupaten Tegal	Nasional	Dindikpora
18	Juara 3 (perunggu) Open Virtual Wushu Tournament 2021	Pengurus Besar Wushu Indonesia	Nasional	Dindikpora

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021

DOKUMENTASI KOMPETISI DAN PIAGAM PENGHARGAAN KABUPATEN TEMANGGUNG





**BUPATI TEMANGGUNG MEMBERIKAN PENGHARGAAN
KEPADA PMENANG LOMBA KRENOVA PERANGKAT DAERAH
DAN MASYARAKAT TAHUN 2021**





KABUPATEN TEMANGGUNG MENERIMA PENGHARGAAN WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) SEBANYAK 10 (SEPULUH) KALI BERTURUT-TURUT

PENGHARGAAN TAHUN 2022



KABUPATEN TEMANGGUNG MENERIMA PENGHARGAAN INDIKASI GEOGRAFIS TERBANYAK SE INDONESIA





**PRESIDEN JOKOWI & PM AUSTRALIA
MENAIKI SEPEDA BAMBU HASIL KARYA
INOVASI PUTRA TEMANGGUNG**



KENANGAN BANSARI TINGKATKAN PRODUKSI BAWANG



**SHIBIRU MERAHAI PENGHARGAAN JUARA UTAMA
LOMBA KRENOVA TINGKAT PROVINSI JATENG
TAHUN 2021**

INOVASI KABUPATEN TEMANGGUNG



PEMURNIAN KUDA LUMPING TEMANGGUNG



**BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH
MEMBERI BANTUAN HIBAH SANGKO
HASIL KRENOVA TEMANGGUNG**



GERBANG EMAS

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023



GERBANG EMAS

**BAB III
RKPD 2023**

PETIK MERAH KOPI ROBUSTA TEMANGGUNG

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2023 menggambarkan kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Temanggung yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Bab ini akan membahas kerangka pendanaan daerah agar dapat memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan daerah tahun 2023.

Kerangka ekonomi dan pendanaan daerah ini menjadi dasar kebijakan perencanaan anggaran agar dapat dialokasikan secara efektif dan berbasis program prioritas disamping juga untuk mencapai program dalam RPJMD yang dari hasil evaluasi pada tahun 2022 yang masuk dalam katagori program yang akan tercapai dan program yang perlu upaya keras untuk mencapai target RPJMD. Diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh sesuai target dan pertumbuhan ekonomi juga meningkat secara kualitas untuk menurunkan kemiskinan, memperbaiki ketimpangan pendapatan, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan IPM sebagai indikator kesejahteraan masyarakat.

Rancangan kerangka ekonomi dan pendanaan daerah tahun 2023 ini akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kabupaten Temanggung.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian global, nasional, dan daerah berikut analisa berdasarkan pada indikator makro ekonomi dan tantangan peluang serta strategi dalam mewujudkan kondisi perekonomian yang direncanakan merupakan hal yang mendasari arah dan kebijakan ekonomi yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

3.1.1 Kondisi Perekonomian Global dan Nasional

Ekonomi global yang sempat pulih tertahan akibat tekanan geopolitik Rusia-Ukraina sehingga perbaikan ekonomi dunia tidak optimal karena volatilitas pasar keuangan meningkat. Inflasi yang tinggi dan meningkatnya harga komoditas juga menjadi tantangan global, hal ini disebabkan ekspektasi yang tadinya positif terhadap pemulihan ekonomi global seiring meredanya Covid-19 tertahan atau mengalami tekanan karena eskalasi perang di Ukraina sejak 24 Februari 2022.

Stabilitas sistem keuangan Indonesia yang berada dalam kondisi normal, didukung terjaganya pemulihan ekonomi dan ditopang semakin baiknya penanganan Covid-19. Penurunan kasus dan pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat menggerakkan kegiatan perekonomian dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap kuat didukung konsumsi masyarakat, investasi, serta belanja pemerintah.

Corona Virus Disease 2019 atau (COVID-19) ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020. Virus tersebut dengan cepat telah menyebar di berbagai negara di dunia. Indonesia merupakan negara dengan kasus positif terbesar ketiga di kawasan Asia Tenggara setelah Malaysia dan Filipina. Pandemi COVID-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian.

Dari sisi ekonomi, COVID-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan. Ekonomi dunia mengalami resesi, begitupun dengan ekonomi Indonesia juga terkena dampak negatif COVID-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat. Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya non performing loan dan volatilitas di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan.

Pemerintah melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya untuk mencapai pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19 dan diharapkan dapat membantu UMKM dan meningkatkan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia.

Tabel 3.1
Realisasi dan Target Indikator Ekonomi Makro Nasional Tahun 2017-2023

INDIKATOR	REALISASI					TARGET	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,40 - 6,00	5,30 - 5,90
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5	5,34	5,28	7,07	6,49	5,50 - 6,30	5,30 - 6,00
IPM	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29	72,78 - 72,90	73,31 - 73,49
Inflasi (%)	3,61	3,13	2,72	1,68	1,87	1,87	2,00 - 4,00
Persentase Penduduk Miskin (%)	10,64	9,82	9,44	9,78	10,14	9,20 - 9,70	7,50 - 8,50

Sumber: BPS, 2022

3.1.2 Kondisi Perekonomian Jawa Tengah

Dalam publikasi Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang di keluarkan oleh BPS, angka inflasi Jawa Tengah pada tahun 2021 sebesar 1,28%, mengalami penurunan sebesar 0,28% dibanding angka inflasi pada tahun 2020 sebesar 1,56%. Namun, posisi angka inflasi Jawa Tengah ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan angka inflasi nasional.

IPM Jawa Tengah tahun 2021 adalah sebesar 72,16 mengalami kenaikan sebesar 0,29 dari tahun 2020 sebesar 71,87. Angka tersebut berada di bawah IPM nasional yaitu sebesar 72,29. Angka IPM Jawa Tengah tahun 2017-2021 setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menjadi indikasi bahwa Pemerintah Jawa Tengah telah berhasil meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Jawa Tengah. Persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 penduduk miskin mengalami peningkatan sebanyak 1,26% dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebanyak -0,59%.

Tabel 3.2
Realisasi dan Target Indikator Makro Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017-2023

INDIKATOR	REALISASI					TARGET	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,26	5,3	5,36	-2,65	3,32	4,20 - 5,20	5,00 - 5,60
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,57	4,51	4,49	6,48	5,95	5,75 - 5,69	5,63 - 4,80
IPM	70,52	71,12	71,73	71,87	72,16	72,58	72,75
Inflasi (%)	3,71	2,82	2,81	1,56	1,28	3,0 +/- 1	3,0 +/-1
Persentase Penduduk Miskin (%)	13,01	11,32	10,8	11,41	11,79	10,49 - 10,30	9,51 - 9,29

Sumber : BPS dan Bappeda Kabupaten Temanggung, 2022

3.1.3 Kondisi Perekonomian Kabupaten Temanggung

Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung tetap diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis



pada potensi unggulan daerah terutama yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sedangkan di sisi lain, pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan angka kemiskinan dengan target sebesar 9,8%, tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,5%, dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,49.

Kondisi perekonomian Kabupaten Temanggung sebagaimana kondisi Jawa Tengah maupun Indonesia, diperkirakan mengalami kontraksi dan beberapa penurunan kinerja ekonomi terkait dengan masih terjadinya pandemi global Covid-19. Salah satu upaya pemulihan ekonomi Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah memberikan bantuan dan stimulus pada pelaku UMKM, diharapkan bantuan tersebut dapat meningkatkan jumlah dan kualitas produksi baik untuk sektor barang maupun jasa. Selain itu, dengan kembali dibukanya berbagai kegiatan diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian dan terjadi pemulihan ekonomi.

Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Temanggung sesuai dengan RPJMD, untuk tahun 2023 adalah sebesar 3,5%. Namun pada tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Temanggung telah berhasil mencapai angka 2,62%. Diharapkan akan terus menurun walaupun fluktuasi angka pada tahun 2021 dapat juga dipengaruhi oleh faktor program padat karya selama pandemi covid yang sifatnya temporer. Keberhasilan pencapaian target pembangunan ke depan diharapkan dapat menurunkan angka TPT menuju angka proyeksi 2,5%, hal ini didukung oleh beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki tingkat pengangguran, diantaranya:

- a. Penciptaan kesempatan kerja baru melalui penumbuhan industri padat karya maupun pengembangan UMKM;
- b. Perluasan kerja di sektor informal;
- c. Peningkatan keahlian dan kompetensi tenaga kerja;

- d. Meningkatkan kemauan berwirausaha masyarakat melalui program tenaga kerja mandiri dengan fasilitas dukungan seperti peralatan usaha, pelatihan kerja serta kemudahan akses permodalan;
- e. Memperkuat sistem informasi pasar kerja; dan
- f. Perlindungan sosial bagi pekerja.

Tabel 3.3
Realisasi dan Target Indikator Makro Kabupaten Temanggung
Tahun 2017-2023

INDIKATOR	REALISASI					TARGET	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indek Pembangunan Manusia	68,34	68,83	69,56	69,57	69,88	70,16	70,49
Tingkat Kemiskinan (%)	11,46	9,87	9,42	9,96	10,17	10	9,8
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,03	5,13	5,05	-2,13	3,34	3,5	4,8
Inflasi (%)	3,12	2,89	2,66	n.a	n.a	n.a	n.a
Pendapatan Perkapita (PDRB Perkapita dalam juta rupiah)	24,99	26,68	28,05	27,7	28,48	28,45	29,57
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,97	3,24	2,99	3,85	2,62	3,5	3,5
Ketimpangan Pendapatan*	17,56	18,34	18,39	17,54	18,78	18,5	18,7

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2022

Keterangan : *Indikator Baru

3.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Untuk menentukan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan perkembangan di Kabupaten Temanggung, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan target di tingkat provinsi dan nasional. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 berada pada kisaran 5,3 - 5.9%. Hal ini didasarkan atas berbagai pertimbangan baik di dalam negeri maupun luar negeri, misalnya mulai adanya pemulihan ekonomi global, meningkatnya jumlah penduduk yang divaksin, meningkatnya investasi, meningkatnya ekspor terutama dari sektor manufaktur, meningkatnya mobilisasi penduduk, serta peningkatan konsumsi masyarakat. Sementara itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memproyeksi pertumbuhan ekonomi 2023 menjadi 5,0 – 5.6%.

Dengan memperhatikan kondisi di tingkat provinsi dan nasional, maka terbaca adanya optimisme bahwa pada 2022 ekonomi akan tumbuh meskipun masih banyak diwarnai dengan adanya ketidakpastian di berbagai sektor terutama terkait kebijakan penanganan Covid-19. Optimisme inilah yang menjadi dasar bagi proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2023, meskipun harus mempertimbangkan beberapa faktor yang pada akhirnya menyebabkan besaran pertumbuhan ekonomi tidak akan setinggi proyeksi pemerintah pusat maupun provinsi.

Faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung berupa investasi fisik maupun investasi modal manusia yaitu pendidikan. Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi tidak mengutamakan sisi konsumsi namun lebih ke sisi produksi yaitu peningkatan dalam jumlah maupun kualitas produksi barang dan jasa, sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dapat naik dengan meningkatkan produktivitas di setiap sektor perekonomian.

Tabel 3.4
Pertumbuhan Ekonomi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2023

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2017	5,03	5,26	5,07
2018	5,13	5,31	5,17
2019	5,05	5,36	5,02
2020	-2,13	-2,65	-2,07
2021	3,34	3,32	3,69
2022*	3,5	4,20 - 5,20	5,40 - 6,00
2023*	4,8	5,00 - 5,60	5,30 - 5,90

Keterangan : *proyeksi

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2022

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Temanggung semakin membaik dibuktikan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 yaitu 3,34%, di mana tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yaitu ada di angka - 2,13%. Beberapa upaya yang akan dilakukan guna memastikan

pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan lebih baik lagi diantaranya peningkatan produktivitas sektor kearifan lokal seperti pertanian yang dapat ditingkatkan dengan cara:

- Mendorong minat berusaha di bidang pertanian;
- Peningkatan teknologi pertanian;
- Mendorong persaingan yang sehat dalam jual beli sektor pertanian;
- Pengembangan jenis komoditas agar berhasil guna;
- Membuka peluang ekspor ke daerah lain;
- Digitalisasi usaha produk pertanian, dan lain-lain.

3.1.3.2 Struktur Ekonomi

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung atas dasar harga konstan selama jangka waktu 5 tahun terakhir menunjukkan pergerakan dan pergeseran di beberapa sub sektor. Struktur ekonomi Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 3.5.

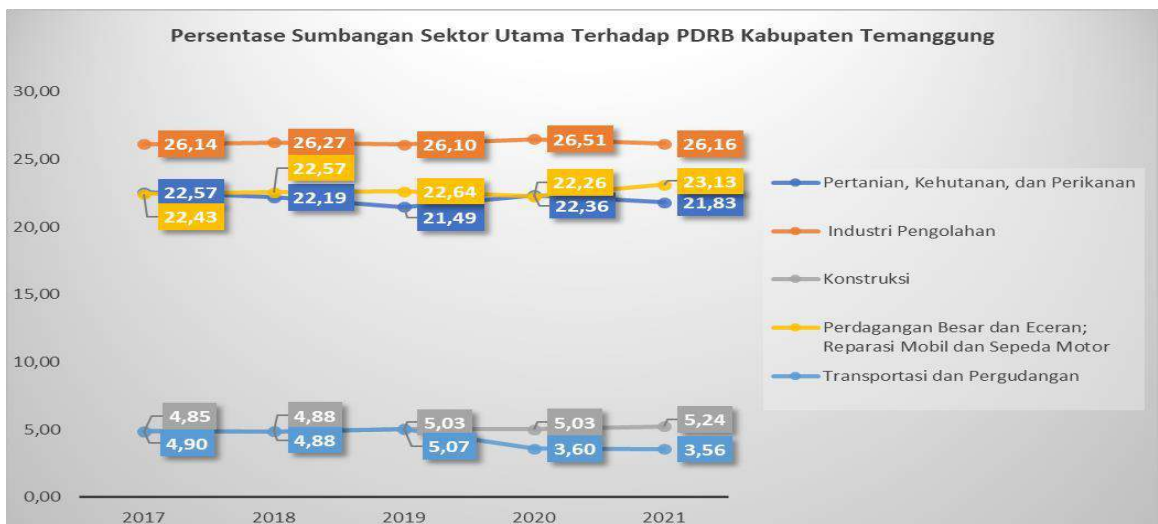
Tabel 3.5
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung ADHK
Tahun 2017-2023

LAPANGAN USAHA		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2	3,36	1,73	1,9	0,82
B	Pertambangan dan Pengalihan	4,24	3,61	4,24	2,11	6,74
C	Industri Pengolahan	5,9	5,29	4,73	-0,61	2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,15	4,62	4,22	2,92	4,82
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,94	4,67	4,74	2,04	5,62
F	Konstruksi	8,93	5,79	8,15	-2,01	7,54
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,3	5,79	5,39	-3,78	7,39
H	Transportasi dan Pergudangan	3,6	4,53	9,29	-30,85	2,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,17	6,24	9,41	-6,81	6,03
J	Informasi dan Komunikasi	12,94	13,75	12,94	14,14	5,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,59	3,52	3,38	2	3,42

LAPANGAN USAHA		2017	2018	2019	2020	2021
L	Real Estate	6,52	5,65	6,2	-0,06	2,28
M,N	Jasa Perusahaan	8,84	9,43	9,55	-6,32	3,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,41	3,11	3,41	-1,61	-0,26
P	Jasa Pendidikan	6,63	6,18	7,95	-0,19	0,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,92	7,5	7,56	7,75	0,55
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,22	7,87	8,33	-6,18	0,96
PDRB		5,03	5,13	5,05	-2,13	3,34

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2022

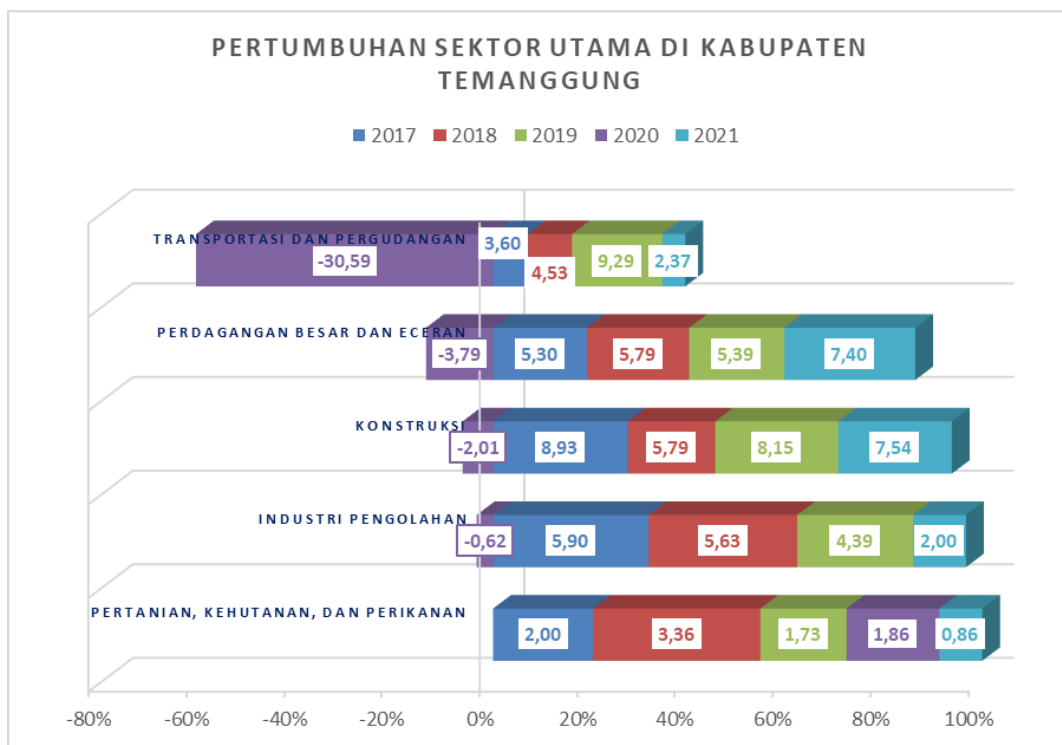
Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penentuan pertumbuhan ekonomi adalah sektor pendukung utama. Tiga sektor utama yang menjadi penggerak utama ekonomi di Kabupaten Temanggung, yaitu industri pengolahan, perdagangan dan pertanian. Pada tahun 2021 sektor pertanian masih tetap mengalami pertumbuhan positif dibandingkan dengan sektor utama lainnya yang mengalami pertumbuhan negatif. Meskipun 3 sektor tersebut adalah penggerak utama perekonomian Kabupaten Temanggung, akan tetapi 3 sektor tersebut tidak memiliki pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya.



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2022

Gambar 3.1.

Persentase Sumbangan Sektor Utama terhadap PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2022

Gambar 3.2.

Pertumbuhan Sektor Utama di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Struktur lapangan usaha Kabupaten Temanggung mulai tahun 2017 sedikit bergeser dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan ke lapangan usaha industri pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya peranan lapangan usaha kategori Industri Pengolahan tahun 2017 sampai 2021 yang nilainya lebih besar dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Meningkatnya permintaan akan produk barang jadi dan barang setengah jadi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional telah mendorong perkembangan Industri Pengolahan menjadi lapangan usaha yang terbesar kontribusinya dalam pembentukan PDRB. Akan tetapi setelah terkena pandemi covid, pemulihan lapangan usaha yang membaik dengan pertumbuhan tertinggi adalah sektor Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

3.1.3.3 PDRB per Kapita

PDRB Perkapita menggambarkan rata-rata besarnya output barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Semakin besar PDRB Perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut. Penghitungan pendapatan yang benar-benar diterima oleh penduduk Kabupaten Temanggung sampai saat ini belum dapat dilakukan, karena belum tersedianya data arus pendapatan yang mengalir antar kabupaten atau kota. Namun demikian PDRB Perkapita masih cukup relevan untuk menggambarkan apakah secara rata-rata, pendapatan masyarakat mengalami peningkatan atau tidak.

Tabel 3.6
Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung
Tahun 2017-2021

TAHUN	NILAI (Rp)	Pertumbuhan (%)
2017	24.993.338,29	6,21
2018	26.682.478,77	6,76
2019	28.052.969,06	5,14
2020	27.702.750,00	-2,13
2021	28.484.021,00	3,34

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2022

Nilai PDRB perkapita selalu naik hal ini menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin membaik. Namun demikian data tersebut belum dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki/ dinikmati oleh penduduk Kabupaten Temanggung saja, akan tetapi ada yang dimiliki/ dinikmati oleh penduduk dari luar Kabupaten Temanggung yang melakukan investasi di Kabupaten Temanggung.

Nilai PDRB Perkapita tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19 yang pada berbagai sektor selama periode tahun 2020. Dan pada tahun 2021 PDRB Perkapita sudah kembali mengalami peningkatan dengan pertumbuhannya menjadi 3,34%.



Peningkatan pendapatan perkapita dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

- a. Menaikkan investasi berdasarkan potensi daerah sampai kepada komoditas;
- b. Meningkatkan program kewirausahaan / pengembangan UMKM / pengembangan ekonomi kreatif;
- c. Memaksimalkan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri maupun sektor penggerak perekonomian;
- d. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan keterampilan; dan
- e. Meningkatkan produksi bagi sektor potensial daerah.

3.1.3.4 Inflasi

Pentingnya kestabilan harga dan pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Angka Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan menurun sehingga standar hidup dari masyarakat juga akan ikut turun dan akhirnya akan semakin menambah berat beban ekonomi masyarakat. Tingkat inflasi yang lebih tinggi dibanding tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai mata uang rupiah.

Sejak tahun 2020 BPS Kabupaten Temanggung hanya berwenang menghitung laju inflasi sampai level provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi daerah sampel. Kabupaten yang menjadi sampel dan dapat menjadi pembanding adalah Kabupaten Banyumas.

Tabel 3.7

Inflasi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional

LOKASI	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*
Temanggung	3,12	2,89	2,66	n.a	n.a	n.a	n.a
Banyumas	3,91	2,98	2,28	1,9	2,18	3+/-1	3+/-1
Jawa Tengah	3,71	2,82	2,81	1,56	1,28	3+/-1	3+/-1
Nasional	3,61	3,13	2,72	1,9	1,6	3+/-1	3+/-1

Keterangan : *Proyeksi | Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2022

Laju inflasi di Kabupaten Temanggung tahun 2017-2019 cukup fluktuatif. Tinggi rendahnya angka inflasi salah satunya dipengaruhi

oleh gejolak perubahan harga yang diantaranya disebabkan ketersediaan atau stok barang yang tidak sesuai dengan jumlah permintaan dan juga karena adanya kenaikan biaya produksi misalnya kenaikan bahan baku maupun kenaikan biaya untuk pekerja. Tahun 2021-2022 inflasi di tingkat provinsi dan nasional mengalami penurunan salah satunya karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat terkait pandemi Covid 19 sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Sedangkan proyeksi tahun 2023 secara nasional juga akan terpengaruh oleh inflasi secara global.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah diatur oleh pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Keuangan daerah disusun setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah dengan berdasarkan pada program (*money follow program*), penyelesaian isu strategis dan permasalahan di daerah, serta mendukung pencapaian target RPJMD tahun 2018-2023. APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah, di mana kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dan mendukung pemulihan serta penguatan ekonomi daerah, diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengedepankan kriteria kinerja yang dinamis dan strategis untuk mendorong daerah lebih kompetitif, seperti penurunan angka pengangguran, kinerja pengendalian inflasi, indeks pencegahan korupsi;
- b. Menyederhanakan dan menjaga konsistensi formula DID (Dana Insentif Daerah);
- c. Mendorong kemandirian daerah dan peningkatan kualitas belanja APBD;
- d. Mempertajam indikator yang selaras dengan pencapaian prioritas nasional;
- e. Memperkuat indikator yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional;
- f. Mengalokasikan sebagian DID pada tahun berjalan dengan menggunakan data kinerja tahun berjalan/termutakhir dalam rangka pemulihan ekonomi di daerah;
- g. Penggunaan DID untuk digitalisasi pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan, serta pemulihan ekonomi termasuk pemberdayaan UMKM, industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- h. Penyaluran berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan.

DID ini diberikan kepada daerah sesuai dengan skor dari kriteria utama dan kriteria kinerja yang diatur oleh Kementerian Keuangan. Suatu daerah wajib memenuhi kriteria agar mendapat DID yaitu Pemerintah daerah yang memiliki nilai kinerja di atas batas nilai yang ditentukan (B) dari hasil penilaian peningkatan kinerja 2 tahun terakhir dan capaian kinerja tahun terakhir pada kelompok kategori yang telah ditentukan. Kriteria utama DID tahun 2021 meliputi Opini BPK atas LKPD (WTP), Penetapan Peraturan Daerah APBD tepat waktu, dan Penggunaan *E-Government* (*E-Budgeting* dan *E-Procurement*). Sedangkan kriteria kinerja meliputi hal berikut.

- a. Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan Daerah

- Kemandirian Daerah
- Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah
- Sistem Informasi Keuangan Daerah (baru)
- b. Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan
 - Angka Partisipasi Murni
 - Peta Mutu Pendidikan
- c. Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan
 - Penanganan Stunting (Balita)
 - Balita yang mendapatkan imunisasi lengkap
 - Persalinan di fasilitas kesehatan
- d. Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur
 - Akses sanitasi Layak
 - Sumber air minum layak
- e. Kesejahteraan Masyarakat
 - Penurunan Penduduk Miskin
 - Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - Penurunan Angka Pengangguran (baru)
- f. Pelayanan Umum Pemerintahan
 - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
 - Penghargaan Pembangunan Daerah
 - Inovasi Daerah
- g. Peningkatan ekspor
- h. Peningkatan Investasi
- i. Pengelolaan Sampah
- j. Pengendalian Inflasi Daerah
- k. Indeks Pencegahan Korupsi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang berimplikasi pada kebijakan daerah dan desentralisasi fiskal sebagai akibat adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada



daerah. Tujuannya adalah untuk semakin meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) diharapkan dapat mengoptimalkan dan menguatkan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemerataan kesejahteraan di daerah.

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemampuan daerah akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

Memperhatikan berbagai kondisi obyektif masyarakat, aspirasi yang berkembang, dan dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dari dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, serta mensinergikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang mengusung tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan 7 arah kebijakan prioritas yaitu:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas;
6. Ekonomi hijau; dan
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Maka perlu melahirkan beberapa agenda kunci pemerintahan daerah dalam penyiapan kebijakan pembangunan khususnya kebijakan keuangan daerah. Keberadaan agenda pemerintah daerah dimaksud merupakan hal yang penting, diantaranya sebagai tolok ukur dan untuk

membangun tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah dalam mengatasi krisis akibat pandemi Covid-19 maupun tantangan yang mungkin timbul di masa depan.

Kebijakan keuangan daerah yang erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah serta mendukung arah kebijakan pembangunan RPJMD tahun 2023 adalah pemantapan pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing daerah, dengan prioritas sebagai berikut:

1. Pemantapan reformasi birokrasi (*good governance*);
2. Percepatan pengurangan kemiskinan;
3. Pemantapan Kapasitas dan daya saing ekonomi kerakyatan; dan
4. Pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan hidup.

Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJMD tahun 2023 melalui peningkatan penerimaan daerah, dan penajaman alokasi belanja serta upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Penerimaan Pendapatan Daerah di tahun 2023 diperkirakan membaik dan mulai bergerak positif setelah 3 tahun mengalami guncangan akibat pandemi Covid-19. Optimisme pertumbuhan ini didasari oleh beberapa hal antara lain:

- a. Kegiatan ekonomi dapat berlangsung secara optimal seiring dengan telah berjalannya program vaksinasi;
- b. Kebijakan Pemerintah yang terus mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat dan keberlangsungan produksi sektor manufaktur; dan
- c. Perbaikan iklim usaha karena dampak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja.

Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain.

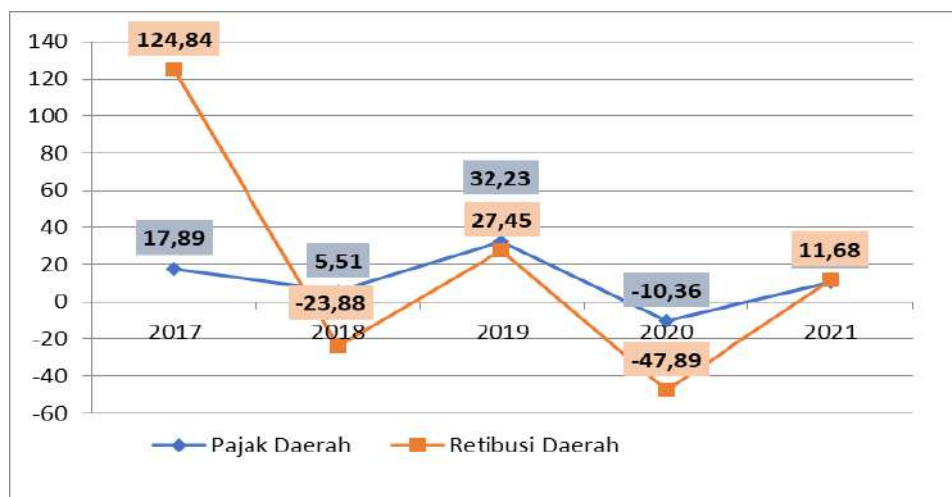


Pendapatan Daerah Yang Sah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan peraturan perundang-undangan. Kemampuan untuk menghimpun PAD dipengaruhi oleh beberapa hal, namun yang paling krusial adalah seberapa besar pertumbuhan sektor konsumsi, khususnya untuk barang kena Pajak Daerah. Pendapatan Transfer merupakan penyaluran pendapatan dari Pemerintah yang sifatnya sangat dinamis artinya memperhatikan penerimaan Pendapatan Negara, serta pemenuhan terhadap prioritas belanja yang ditentukan oleh Pemerintah. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah yang bersumber selain dari PAD.

Kebijakan Pemerintah dalam menetapkan proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2023 tetap mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan dari pada pertumbuhan yang agresif, sehingga proses perhitungan proyeksi Pendapatan Daerah pada Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2023 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi dengan memertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Optimalisasi pemungutan PAD merupakan prioritas, yang terdiri atas 4 jenis dan memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu: (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah, di mana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD Kabupaten Temanggung selain Pendapatan BLUD.

Pendapatan Daerah yang bersumber Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat adalah Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Proyeksi Penerimaan dari Dana Perimbangan sepenuhnya tergantung pada Pemerintah Pusat, karena data penetapan pembagian sementara dan pembagian definitif untuk Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan, sehingga hanya bersifat koordinasi dan konfirmasi. Sedangkan untuk pemetaan potensi objek pajak tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah fungsinya hanya melaksanakan pencocokan atau rekonsiliasi kas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung, 2022.

Gambar 3.3.

Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Pajak daerah di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan dari tahun 2017 – 2019 dan menurun pada tahun 2020 karena dampak pandemi Covid-19. Pajak Daerah pada tahun 2017 sebesar Rp38.291.278.094,00 dan naik menjadi Rp53.424.094.046,00 di tahun 2019. Pajak daerah didominasi oleh pajak penerangan jalan dan pajak bumi dan bangunan. Sedangkan retribusi daerah tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi di mana penerimaan tertinggi pada tahun 2017 sebesar Rp16.687.218.837,00 dan terendah di tahun 2020 sebesar Rp8.436.169.882,00. Retribusi terbanyak pada retribusi jasa umum yaitu retribusi pelayanan pasar.

Beberapa asumsi yang digunakan dalam melakukan proyeksi terhadap komponen pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat dikatakan belum proporsional, karena prosentase proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah masing sangat rendah. Kontributor terbesar PAD berasal dari sektor Lain-lain PAD yang Sah yaitu Pendapatan BLUD. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan

PAD pada RKPD Tahun 2023 adalah dengan memperhatikan karakteristik masing-masing jenis pungutan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan objek pajak daerah (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)) diperkirakan sama atau sedikit lebih tinggi dari tahun 2022;
 - b. Optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah, berasal dari penambahan objek baru dan penyesuaian tarif Retribusi Daerah;
 - c. Optimalisasi penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yaitu dengan meningkatkan kinerja BUMD sehingga dapat menghasilkan Dividen atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - d. Optimalisasi Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yaitu dengan Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan.
2. Pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer diproyeksikan sebagai berikut:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Perimbangan (DBH dan DAU diperkirakan sama atau naik sedikit dibanding dengan Tahun Anggaran 2022, DAK Fisik dan Non Fisik yang bersifat in out, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa diperkirakan sama dengan Tahun Anggaran 2022);
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diperkirakan naik sedikit dibanding dengan Tahun Anggaran 2022, namun untuk Bantuan Keuangan yang bersifat in out dianggarkan sesuai dengan usulan/hasil verifikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pendapatan Lain-Lain. Pendapatan Daerah Yang Sah ini belum dapat diproyeksikan dikarenakan:
- a. Pendapatan hibah belum dapat dipastikan perolehannya pada Tahun Anggaran 2023 karena pengalokasian pendapatan ini berdasarkan perjanjian hibah daerah antara Pemerintah

Kabupaten Temanggung dengan Pihak Ketiga. Pendapatan hibah yang berasal dari sumbangan pihak ketiga juga belum dapat dipastikan karena pengalokasian pendapatan ini berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Pihak Ketiga.

- b. Dana Darurat selama ini Pemerintah Kabupaten Temanggung belum pernah mendapatkan;
- c. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tidak bisa diprediksi karena merupakan dana dari pemerintah yang bersifat insidesial.

Pendapatan daerah tidak terlepas dari asumsi-asumsi, diantaranya: kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional; Kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah diantaranya alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM; Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; dan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Dari Tabel 3.8 dapat dilihat bahwa proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan pendapatan tahun anggaran sebelumnya. Hal ini terjadi karena atas pertimbangan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 dan target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022. Kenaikan pendapatan tertinggi yaitu pada pendapatan transfer. Sedangkan untuk PAD hanya naik sedikit dimana Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berupa pendapatan BLUD menjadi salah satu penyumbang kenaikannya.



Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022

Gambar 3.4.
Pendapatan Kabupaten Temanggung

Tabel 3.8
Realisasi Pendapatan Kabupaten Temanggung

URAIAN	TAHUN ANGGARAN				
	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021*	TARGET 2022	PROYEKSI 2023
PENDAPATAN DAERAH	1.878.383.823.682	1.830.846.293.347	1.970.997.563.332	1.901.861.801.040	2.241.986.014.229
1. Pendapatan Asli Daerah	278.313.775.793	307.488.084.365	363.119.915.874	296.358.641.240	297.511.239.968
a. Pajak Daerah	53.424.094.046	47.887.604.813	52.832.020.942	59.010.000.000	60.190.200.000
b. Retribusi Daerah	16.189.001.249	8.436.169.882	9.400.033.763	9.959.202.250	10.058.794.273
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	14.571.585.064	18.800.858.165	19.633.082.917	17.416.596.347	18.287.426.164
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	194.129.095.434	232.363.451.505	281.254.778.252	209.972.842.643	208.974.819.531
2. Pendapatan Transfer	1.530.401.293.306	1.451.579.818.982	1.537.846.595.458	1.605.503.159.800	1.944.474.774.261
a. Transfer Pemerintah Pusat	1.416.959.014.266	1.350.758.939.773	1.385.928.637.379	1.472.041.917.200	1.696.640.215.561
1) Dana Perimbangan	1.133.246.263.266	1.046.565.618.773	1.120.897.599.379	1.223.724.012.200	1.448.322.310.561
a) Dana Transfer Umum-DBH	45.213.757.136	52.880.696.555	66.832.564.275	50.975.465.200	61.408.024.000
b) Dana Transfer Umum-DAU	828.948.502.000	762.027.309.000	753.140.119.000	753.174.275.000	778.059.299.000
c) Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	92.570.658.000	55.578.330.000	131.534.286.845	153.727.447.000	358.040.434.561
d) Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	166.513.346.130	176.079.283.218	169.390.629.259	265.846.825.000	250.814.553.000

URAIAN	TAHUN ANGGARAN				
	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021*	TARGET 2022	PROYEKSI 2023
2) Dana Insentif Daerah	41.768.103.000	56.311.496.000	17.149.213.000	2.438.134.000	2.438.134.000
3) Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0
4) Dana Keistimewaan	0	0	0	0	0
5) Dana Desa	241.944.648.000	247.881.825.000	247.881.825.000	245.879.771.000	245.879.771.000
b. Transfer antar Daerah	113.442.279.040	100.820.879.209	151.917.958.079	133.461.242.600	247.834.558.700
1) Pendapatan Bagi Hasil	102.323.566.038	94.165.118.971	114.087.366.818	117.486.242.600	120.000.000.000
2) Bantuan Keuangan	11.118.713.002	6.655.760.238	37.830.591.261	15.975.000.000	127.834.558.700
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	69.668.754.583	71.778.390.000	70.031.052.000	0	0
a. Hibah	0	0	571.300.000	0	0
b. Dana Darurat	0	0	0	0	0
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	69.668.754.583	71.778.390.000	69.459.752.000	0	0

Keterangan : *Anaudit

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung, 2022

Dari gambar 3.4 terlihat bahwa komponen pembentuk pendapatan daerah terbesar bersumber dari pendapatan transfer. Pendapatan transfer memberikan kontribusi yang paling tinggi terhadap pendapatan daerah yaitu rata-rata sebesar 81,99%, kemudian dari sektor PAD rata-rata sebesar 15,78% dan sisanya berupa Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah rata-rata sebesar 2,24%. Pada tahun 2021 realisasi pendapatan daerah (anaudit BPK-RI) mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 terjadi penurunan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat, di mana dana tranfer dari pemerintah banyak yang dialokasikan untuk mengurangi dampak dari pandemi virus corona.

Dalam rangka mendukung upaya-upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah, maka ditetapkan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemutakhiran data subyek/obyek sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memperbaiki sistem, mekanisme, dan prosedur pengelolaan dan pelayanan pendapatan asli daerah;
- c. Melakukan review atas peraturan yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah dan melakukan kajian guna mengembangkan dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah;
- d. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pemungut dan pengelola pendapatan asli daerah;
- e. Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi, serta memberikan penghargaan dan sanksi guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak;
- f. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan;
- g. Memperbaiki sistem pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi yang dilakukan pihak lain;

- h. Peningkatan pendayagunaan aset milik pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
- i. Meningkatkan tata kelola dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- j. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal dengan perangkat daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat berjalan efektif.

Mengingat kemampuan pendapatan asli daerah yang sangat terbatas, maka pemerintah daerah perlu menggali sumber-sumber pendanaan lain di luar APBD Kabupaten Temanggung seperti mengoptimalkan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, badan-badan sosial, komunitas, dan organisasi yang ada di Kabupaten Temanggung termasuk Badan Amil zakat nasional dan daerah, serta sumber pembiayaan lain.

3.2.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah, disebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah dan disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD. Sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Prioritas kebijakan belanja operasi pada RKPD Tahun 2023 ini fokus pada:
 - a. belanja rutin Perangkat Daerah seperti belanja gaji pegawai dan belanja barang dan jasa operasional pada program penunjang urusan perangkat daerah;
 - b. belanja hibah kepada kelompok yang menunjang Prioritas Nasional dan capaian kinerja yang masih dalam status upaya keras seperti belanja hibah bibit tanaman produktif, bibit ikan, bibit ternak, dan peralatan pengolahan hasil pertanian;
 - c. belanja bantuan sosial dalam rangka pencapaian target kemiskinan ekstrem pada angka 0 pada tahun 2024 dan penurunan angka stunting melalui bantuan sosial jaminan kesehatan masyarakat miskin, bantuan sosial kepada KUBE, dan Bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni
2. Belanja Modal, adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung

dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset lainnya dan aset tak berwujud. Prioritas kebijakan belanja modal pada RKPD Tahun 2023 ini fokus pada:

- a. Belanja modal jalan yang mendukung Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur;
 - b. Belanja irigasi dan jaringan yang mendukung Pengembangan Kawasan Kopi dan Pengembangan Kawasan Agropolitan PRING KRAKAL (Pringsurat, Kranggan, Kaloran),
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dirinci atas jenis belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Prioritas kebijakan belanja transfer pada RKPD Tahun 2023 ini fokus pada:
- a. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa melalui Dana Desa, Alokasi Dana Desa, BPJS Perangkat Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan pemberian insentif bagi Ketua RT/RW;
 - b. Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan infrastruktur perdesaan.

Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2023 untuk peruntukannya fokus pada program-program prioritas yang akan dicapai, antara lain:

1. Melaksanakan program prioritas sesuai visi dan misi daerah;
2. Melaksanakan program prioritas yang mendukung arah kebijakan Prioritas Nasional dan prioritas Provinsi Jawa Tengah
3. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

4. Pemenuhan belanja daerah yang bersifat wajib untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
5. Melaksanakan program dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan minimal; dan
6. Melaksanakan program pembangunan daerah yang merupakan aspirasi masyarakat melalui tahapan Musrenbang.

Target dan realisasi belanja daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2021, target Tahun 2022, dan proyeksi Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah secara lengkap terinci pada tabel 3.9 dan tabel 3.10 sebagai berikut :



Tabel 3.9
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019-2020

URAIAN	TAHUN ANGGARAN			
	TARGET 2019	REALISASI 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020
Belanja Tidak Langsung	1.185.251.063.102	1.168.792.735.222	1.311.030.318.106	1.213.213.275.176
Belanja pegawai	727.717.447.777	700.110.120.312	717.814.482.756	671.072.509.371
Belanja bunga				
Belanja subsidi	0			
Belanja hibah	55.021.600.000	62.473.200.000	66.747.887.850	68.809.177.692
Belanja bantuan sosial	23.557.112.500	23.579.612.500	28.829.520.000	7.162.252.000
Belanja bagi hasil kepada pemerintah desa / kelurahan	5.290.146.750	5.290.146.750	6.410.600.000	6.410.600.000
Belanja bantuan keuangan	373.164.756.075	376.839.655.660	406.611.563.600	409.802.732.000
Belanja tidak terduga	500.000.000	500.000.000	84.616.263.900	49.956.004.113
Belanja langsung	725.527.192.369	777.872.643.706	564.165.514.074	569.915.627.775
Belanja pegawai	106.033.104.936	108.344.310.197	124.560.725.713	122.876.914.568
Belanja barang dan jasa	379.019.452.259	407.120.036.216	342.741.826.744	344.955.658.684
Belanja modal	240.474.635.174	262.408.297.293	96.862.961.617	102.083.054.523
Total Jumlah Belanja	1.910.778.255.471	1.946.665.378.928	1.875.195.832.180	1.783.128.902.951

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022

Tabel 3.10

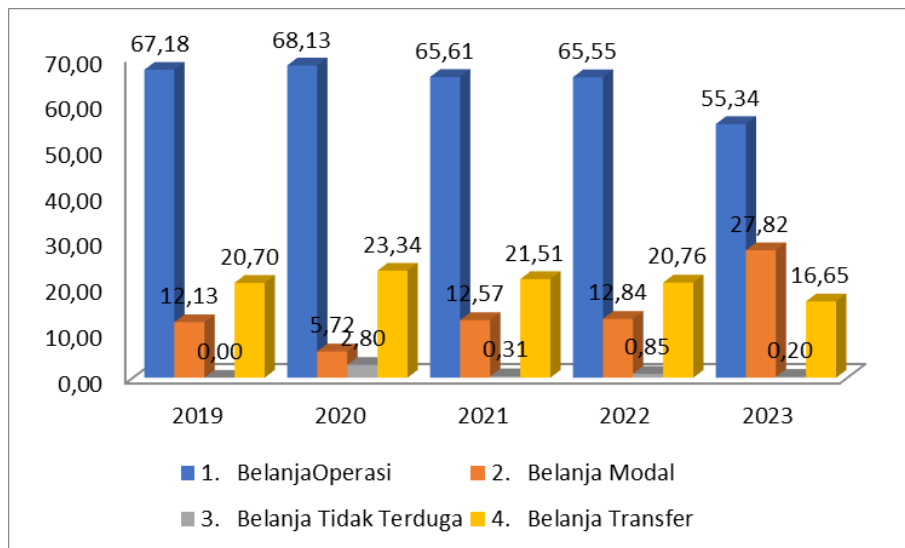
Target dan Realisasi Tahun 2021, Target 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 Belanja Daerah Kabupaten Temanggung

URAIAN	TAHUN ANGGARAN			
	TARGET 2021	REALISASI 2021	TARGET 2022	PROYEKSI 2023
BELANJA DAERAH	1.949.350.917.532	1.877.969.167.294	2.005.470.211.214	2.486.811.750.195
1. Belanja Operasi	1.292.191.254.489	1.232.194.234.987	1.314.615.499.764	1.380.665.230.258
a. Belanja Pegawai	745.159.846.448	681.107.527.533	739.381.293.467	830.473.436.891
b. Belanja Barang dan Jasa	440.303.600.768	458.561.990.957	486.001.435.629	461.701.350.406
c. Belanja Bunga	0	0	0	0
d. Belanja Subsidi	0	0	0	0
e. Belanja Hibah	95.589.819.773	89.546.728.997	71.337.288.350	70.773.915.467
f. Belanja Bantuan Sosial	11.137.987.500	2.977.987.500	17.895.482.318	17.716.527.495
2. Belanja Modal	239.836.719.621	235.995.614.408	257.495.125.454	688.885.826.301
a. Belanja Tanah	0	58.015.740	0	-
b. Belanja Peralatan dan Mesin	68.678.977.062	75.015.739.240	99.830.914.103	98.832.604.962
c. Belanja Bangunan dan Gedung	87.046.452.290	83.641.790.248	115.718.010.011	201.729.385.712
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	74.426.892.800	71.894.050.162	36.364.351.340	382.797.804.127
e. Belanja modal aset tetap lainnya	9.659.397.469	5.309.106.018	5.581.850.000	5.526.031.500
a. Belanja modal aset lainnya	25.000.000	76.913.000	0	0
3. Belanja Tidak Terduga	13.600.000.000	5.779.500.000	17.004.350.000	5.000.000.000
4. Belanja Transfer	403.722.943.422	403.999.817.899	416.355.235.996	412.260.693.636
a. Belanja Bagi Hasil	5.264.500.000	5.656.124.477	6.901.000.000	6.901.000.000
b. Belanja Bantuan Keuangan	398.458.443.422	398.343.693.422	409.454.235.996	405.359.693.636

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022

Berdasarkan tabel 3.9 dan tabel 3.10 dapat dilihat konsistensi antara target dengan realisasi belanja daerah Tahun 2019-2021. Terdapat kenaikan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2023 jika dibandingkan dengan belanja daerah pada tahun anggaran sebelumnya. Hal ini terjadi karena atas pertimbangan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan rutin, kegiatan prioritas penyelesaian permasalahan pembangunan, penyelesaian kegiatan yang mendukung capaian kinerja yang masih dalam status Upaya keras, dan kegiatan yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kenaikan proyeksi belanja Tahun 2023 terbesar pada belanja operasi di mana belanja pegawai menjadi salah satu penyebabnya. Besaran proyeksi belanja pegawai tahun 2023 sebesar 33,40 %, hal ini disebabkan karena ada tambahan beban belanja pegawai dari penerimaan CPNS sebanyak 884 orang dan PPPK sebanyak 2.084 orang. Belanja modal dan belanja transfer juga mengalami kenaikan. Belanja modal terjadi kenaikan pada belanja bangunan dan gedung serta Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan karena menyesuaikan pada belanja DAK fisik. Untuk belanja transfer kenaikan terjadi karena penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena penyediaan anggaran untuk penanganan Covid-19 berkurang.

Apabila data belanja daerah tersebut dilihat menggunakan grafik batang, maka akan jelas terlihat bahwa belanja operasi merupakan belanja yang paling tinggi dan mencapai lebih dari 50% dari total Belanja daerah selama kurun waktu 5 tahun. Keadaan belanja daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat seperti pada gambar 3.5.



Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022

Gambar 3.5.

Belanja Daerah Kabupaten Temanggung

Berdasarkan gambar 3.5 terlihat bahwa belanja daerah Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 tahun anggaran didominasi oleh belanja Operasi. Komposisi belanja operasi paling tinggi terjadi yaitu pada tahun anggaran 2020, hal ini disebabkan karena sebagian besar anggaran belanja daerah dipergunakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Belanja operasi pada tahun anggaran 2023 diprediksi mencapai 67,77% dari total belanja daerah.

3.2.2.1 Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Persentase realisasi belanja operasi terhadap belanja daerah Kabupaten Temanggung dari tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.11

Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Daerah	Persentase
2019	1.236.735.432.764	1.841.033.635.270	67,18%
2020	1.214.876.493.815	1.783.202.789.098	68,13%
2021	1.232.194.234.987	1.877.969.167.294	65,61%
2022	1.314.615.499.764	2.005.470.211.214	65,55%
2023	1.380.665.230.258	2.486.811.750.195	55,52%

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022

Proporsi belanja operasional Kabupaten Temanggung terhadap Belanja Daerah rata-rata adalah 64,40 %. Persentase belanja operasi tertinggi selama lima tahun terakhir adalah tahun 2020 yaitu sebesar 68,13% dan terendah pada tahun 2023 yaitu sebesar 55,52%.

3.2.2.2 Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan aset lainnya.

Tabel 3.12
Persentase Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah

Tahun	Belanja Modal	Belanja Daerah	Persentase
2019	223.249.187.567	1.841.033.635.270	12,13%
2020	102.083.054.523	1.783.202.789.098	5,72%
2021	235.995.614.408	1.877.969.167.294	12,57%
2022	257.495.125.454	2.005.470.211.214	12,84%
2023	688.885.826.301	2.486.811.750.195	27,82%

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022

Proporsi belanja modal Kabupaten Temanggung terhadap Belanja Daerah mencapai rata-rata sebesar 14,92%. Persentase belanja modal tertinggi selama lima tahun terakhir adalah tahun 2023 yaitu sebesar 27,82 % dan terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 5,72 %.

3.2.2.3 Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Tabel 3.13

Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah

Tahun	Belanja Transfer	Belanja Daerah	Persentase
2019	381.049.014.939	1.841.033.635.270	20,70%
2020	416.287.236.647	1.783.202.789.098	23,34%
2021	403.999.817.899	1.877.969.167.294	21,51%
2022	416.355.235.996	2.005.470.211.214	20,76%
2023	412.260.693.636	2.486.811.750.195	16,65%

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022

Proporsi belanja transfer Kabupaten Temanggung terhadap Belanja Daerah mencapai rata-rata sebesar 20,58%. Persentase belanja transfer tertinggi selama lima tahun terakhir adalah tahun 2020 yaitu sebesar 23,34% dan terendah pada tahun 2023 yaitu sebesar 16,65%.

3.2.2.4 Persentase Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3.14

Persentase Belanja Tidak Terduga terhadap Belanja Daerah

Tahun	Belanja Tidak Terduga	Belanja Daerah	Persentase
2019	500.000.000	1.841.033.635.270	0,03%
2020	49.956.004.113	1.783.202.789.098	2,80%
2021	5.779.500.000	1.877.969.167.294	0,31%
2022	17.004.350.000	2.005.470.211.214	0,85%
2023	5.000.000.000	2.486.811.750.195	0,20%

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022

Proporsi belanja tidak terduga Kabupaten Temanggung terhadap Belanja Daerah mencapai rata-rata sebesar 0,84%. Persentase belanja tidak terduga tertinggi selama lima tahun terakhir adalah tahun 2020 yaitu sebesar 2,80 % dan terendah pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,027 %.

3.2.3 Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup kekurangan defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Anggaran defisit adalah anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan, dan sebaliknya anggaran surplus adalah manakala anggaran belanja lebih kecil daripada anggaran pendapatan.

3.3.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

- a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). Besarnya SiLPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan Tahun Anggaran berkenaan adalah hasil perhitungan SiLPA pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran sebelumnya setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- b) Penerimaan pinjaman daerah dilakukan manakala terjadi defisit anggaran, sedangkan SiLPA dan pencairan dana cadangan tidak dapat menutup keseluruhan defisit, maka akan dicukupi dengan penerimaan pinjaman daerah. Pinjaman ini dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, maupun dari pihak ketiga.
- c) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- d) Penerimaan Pembiayaan ini dapat berupa penerimaan kembali atas investasi non permanen dan penerimaan perhitungan pihak ketiga berupa retensi.

3.3.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan yang lain. Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan pada tahun Anggaran 2023 dilakukan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung pada Tahun 2024. Pembentukan dana cadangan dilakukan karena Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak mampu menganggarkan dalam 1 tahun anggaran.

b. Penyertaan modal pemerintah daerah;

Investasi yang akan dilakukan pemerintah daerah adalah investasi jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Penyertaan modal berupa uang dan atau barang daerah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023.

c. Pembayaran pokok hutang;

Pengeluaran pembiayaan guna pembayaran pokok hutang pemerintah daerah pada Pusat Investasi Pemerintah.

d. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan

Pengeluaran Pembiayaan berupa pengeluaran perhitungan pihak ketiga berupa retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

Tabel 3.15
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung

URAIAN	TAHUN ANGGARAN				
	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	TARGET 2022	PROYEKSI 2023
PEMBIAYAAN DAERAH	86.044.884.418	114.804.704.856	169.436.735.505	103.608.410.174	244.825.735.966
1. Penerimaan Pembiayaan	91.129.078.155	124.692.881.503	170.680.615.115	112.608.410.174	265.425.735.966
a. SiLPA	85.356.884.193	123.395.072.830	170.673.307.258	112.608.410.174	265.425.735.966
b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman	55.857.857	50.489.211	7.307.857,00	0	0
c. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	5.716.336.105	1.247.319.462	0	0	0
2. Pengeluaran Pembiayaan	5.084.193.737	9.888.176.647	1.243.879.610	9.000.000.000	20.600.000.000
a. Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	5.000.000.000	15.000.000.000
b. Penyertaan Modal Daerah	-	4.171.840.542	0	0	1.600.000.000
c. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	5.084.193.737	5.716.336.105	1.243.879.610	4.000.000.000	4.000.000.000
PEMBIAYAAN NETTO	86.044.884.418	114.804.704.856	169.436.735.505	103.608.410.174	244.825.735.966

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2022

Berdasarkan tabel 3.15 dapat dilihat bahwa Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp265.425.735.966,00. Proyeksi angka SiLPA pada proyeksi tahun 2023 lebih besar dibanding rata-rata realisasi SiLPA tahun sebelumnya, hal ini disebabkan proyeksi SiLPA masih merupakan prediksi sementara dalam rangka menutup defisit anggaran akibat proyeksi belanja yang melebihi proyeksi pendapatan. Dilihat dari realisasi tahun 2021, besaran SiLPA memiliki proporsi sebesar 9,09 persen terhadap total belanja daerah. Besaran proporsi tersebut menggambarkan bagaimana pengelolaan belanja daerah di Kabupaten Temanggung. Dalam hal ini, pemerintah daerah telah berupaya untuk menyerap anggaran belanja secara optimal dan maksimal untuk penyelenggaraan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ini dikarenakan proporsi SiLPA yang semakin kecil menunjukkan pengelolaan belanja daerah yang semakin baik.

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari 3 komponen yaitu Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentukan Dana Cadangan, dan Penyertaan Modal Daerah merupakan amanat dari Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan pembayaran kepada pihak ketiga berupa retensi.

Informasi dan data sebagai suatu sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah tertuang dan telah dilaksanakan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau disingkat SIPD.

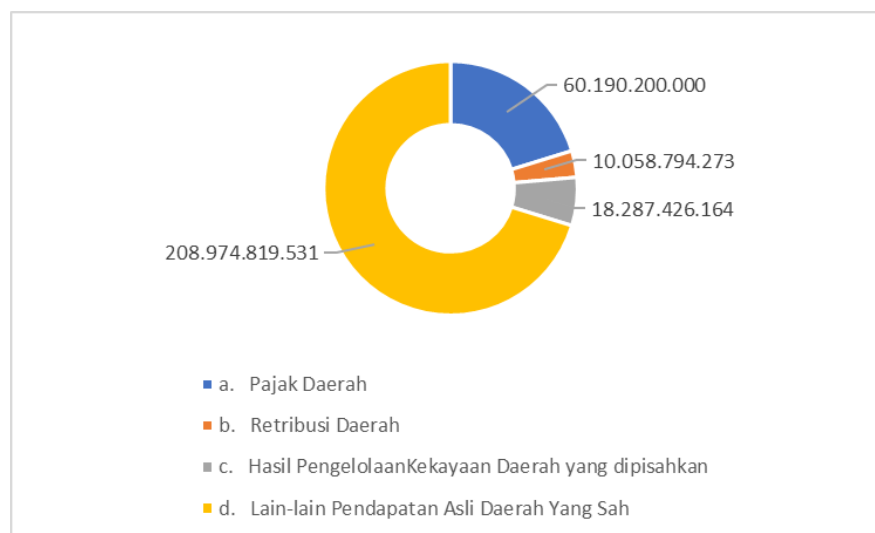
3.3 Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung menunjukkan prestasi yang bagus karena memperoleh WTP sebanyak 9 kali pada tahun 2012 - 2020. Sedangkan untuk Laporan Keuangan

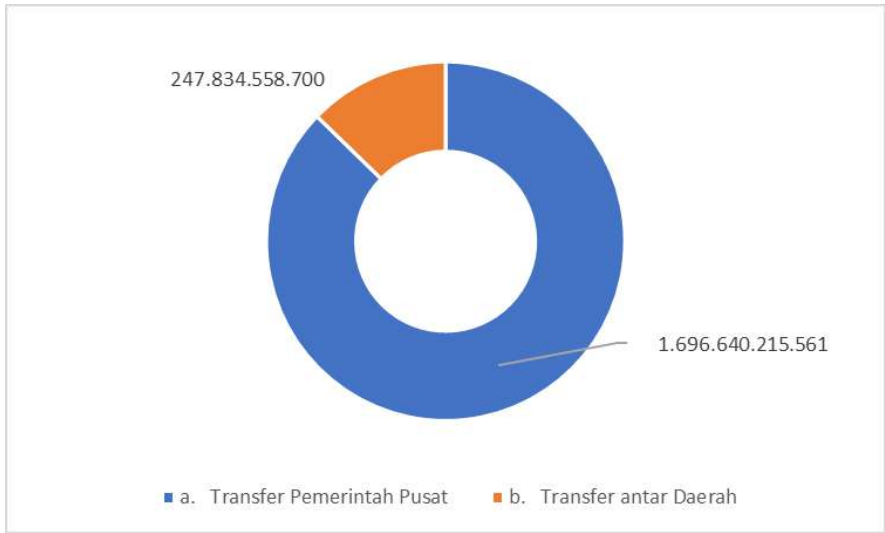
Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 masih dalam proses pemeriksaan oleh BPK-RI.



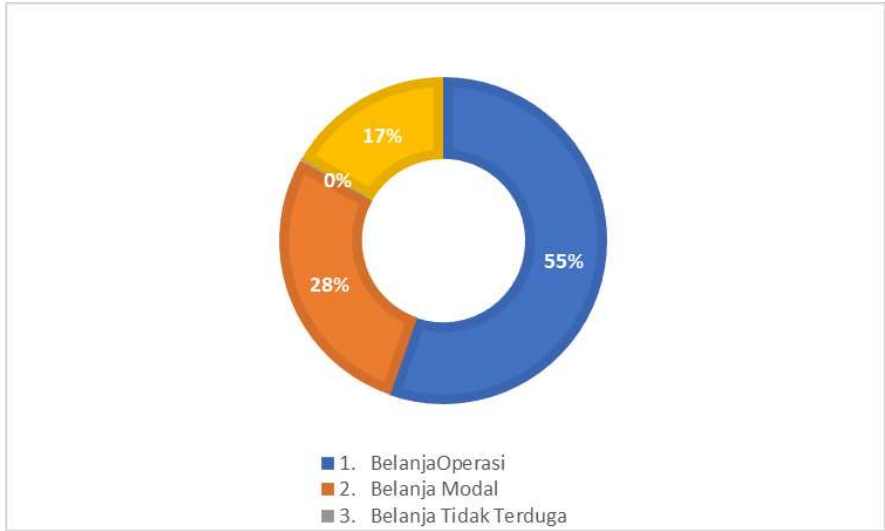
Gambar 3.6.
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023



Gambar 3.7.
Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023



Gambar 3.8.
Proyeksi Pendapatan Transfer Tahun 2023



Gambar 3.9.
Proyeksi Belanja Tahun 2023



GERBANG EMAS

BAB IV RKPD 2023

PRAMUKA IKUT TERLIBAT DALAM GERAKAN KONSERVASI TANAH DAN AIR

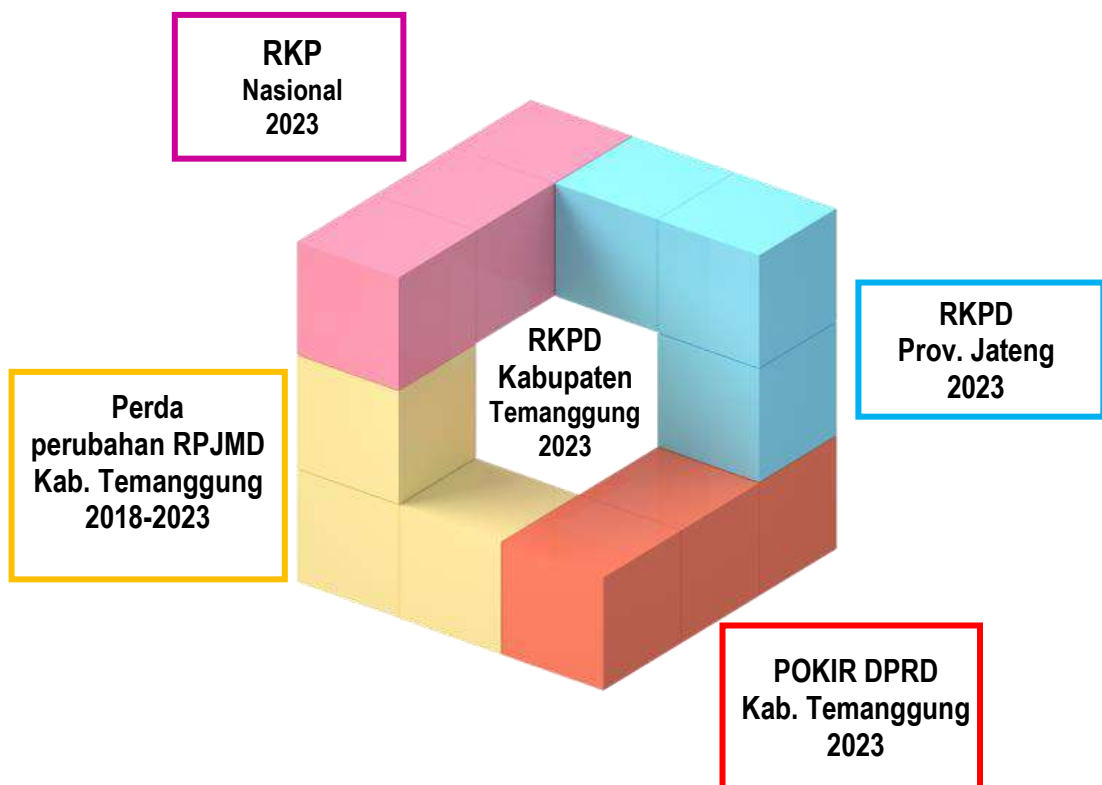
BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2021 Triwulan IV sebagai pijakan kondisi yang ada untuk merumuskan target sasaran RKPD Tahun 2023. Prioritas Daerah yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2023 disusun berdasarkan:

1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023;
2. Prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
3. Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023; dan
4. Pokok- pokok pikiran DPRD.

Proses integrasi penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2023 digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4.1
Komponen penyusun RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Secara garis besar substansi bab ini terdiri dari:

- A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- B. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2023;
- C. Kontribusi Kabupaten Temanggung dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 pada Tahun 2023;
- D. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur pada Tahun 2023;
- E. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target SDG's Kabupaten Temanggung;
- F. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG);
- G. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim;
- H. Fasilitasi Perubahan Iklim
- I. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
- J. Kebijakan dan Strategi Hasil Musrenbang RKPD 2023.

Secara detail diuraikan sebagai berikut.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

4.1.1 Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 adalah

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.



Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah:

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

4.1.2 Misi Pembangunan Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut.

a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu



bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

b. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya.

Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).



Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam Peraturan Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

a. Tujuan dan Sasaran Misi 1 (Pertama) “Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya”

Tujuan yang akan dicapai pada Misi Pertama adalah “Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya”, dengan memperhatikan 2 (dua) indikator tujuan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Angka Kemiskinan, yang **sasarannya** meliputi:

- 1) Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan;



- 2) Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan;
- 3) Meningkatnya budaya literasi masyarakat;
- 4) Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga;
- 5) Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
- 6) Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan;
- 7) Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk;
- 8) Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- 9) Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

b. Tujuan dan Sasaran Misi 2 (Kedua) “Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan”.

Tujuan Pembangunan Misi Kedua adalah “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan”, yang pencapaiannya dapat diukur melalui 4 (empat) indikator tujuan yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Ketimpangan Pendapatan. Adapun **sasarannya** meliputi:

- 1) Meningkatnya kesejahteraan petani;
- 2) Meningkatnya kedaulatan pangan;
- 3) Meningkatnya pariwisata daerah;
- 4) Meningkatnya investasi sektor riil;
- 5) Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah;
- 6) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.



c. Tujuan dan Sasaran Misi 3 (Ketiga) “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”

Tujuan pembangunan dari Misi Ketiga adalah “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”, dengan memperhatikan 2 (dua) indikator tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Adapun **sasaran**nya meliputi:

- 1) Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan;
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa;
- 4) Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum;
- 5) Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana.

Masing-masing sasaran pada setiap misi telah diukur dengan indikator sasaran yang secara rinci dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran per Misi dengan Bidang

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM DAN GANDEM

MISI1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya						
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN	BIDANG
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	1. Indek Pembangunan Manusia (IPM)	1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,80	Tahun	Pendidikan
			2. Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,49	Tahun	
	2. Angka kemiskinan	2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	3. Angka Harapan Hidup (AHH)	75,53	Tahun	Kesehatan
			4. Indeks Kinerja RSUD	80,00	Kategori Sehat	
	3. Meningkatnya budaya literasi masyarakat	3. Meningkatnya budaya literasi masyarakat	5. Persentase peminjam di perpustakaan	82	%	Perpustakaan
			6. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	3,56	Angka	
	4. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	4. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	7. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	3,41	Angka	Pemuda dan Olah Raga
			8. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IKP)	3,51	Angka	
	5. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	5. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	9. Indek Gotong Royong	4,22	Angka	Pemerintahan Umum
			10. Indek Toleransi	4,19	Angka	

MISI1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN	BIDANG
		kebangsaan				
		7. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	11. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,80	%	Pengendalian Penduduk
		8. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	12. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,65	Angka	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			13. Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	0,004	%	
		9. Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	14. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	63	%	Sosial

MISI 2 : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN	BIDANG
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	1. Pertumbuhan ekonomi 2. Pendapatan perKapita 3. Tingkat Pengangguran	1. Meningkatnya kesejahteraan petani	15. Tingkat ketersediaan energi perkapita	2935	Kkal/kapita/hari	Pertanian
			16. Tingkat ketersediaan protein perkapita	103,8	Kkal/kapita/hari	
			17. Tingkat ketersediaan lemak perkapita	37,50	Kkal/kapita/hari	

MISI 2 : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN	BIDANG
	Terbuka (TPT) 4. Ketimpagan Pendapatan	2. Meningkatnya kedaulatan pangan	18. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	78,30	%	Pangan
			19. Tingkat Konsumsi Ikan	21,34	Kg/kap/th	Kelautan dan Perikanan
		3. Meningkatnya pariwisata daerah	20. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,65	%	Pariwisata
		4. Meningkatnya investasi sektor riil	21. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	27,00	%	Perindustrian
			22. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	20,00	%	Perdagangan
			23. Persentase Koperasi sehat	10,71	%	Koperasi dan UKM
			24. Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	0,015	%	
			25. Indek Kemudahan Berusaha	65,00	Angka	Penanaman Modal
			26. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76,10	%	Tenaga Kerja
		5. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	27. Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	84,00	%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			28. Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	89,50	%	
			29. Persentase perumahan dan Permukiman layak huni	97,97	%	Perumahan dan Kawasan Permukiman



MISI 2 : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan						
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN	BIDANG
			30. Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	1,61	%	Perhubungan
		6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	31. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,53	Angka	Lingkungan Hidup

MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas						
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN	BIDANG
Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	1. Indek Reformasi Birokrasi 2. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	32. Indek Perencanaan Pembangunan Daerah	4,2	Angka	Perencanaan
			33. Persentase Ketercapaian Kinerja pembangunan daerah	90,00	%	
			34. Manajemen Risiko Indek (MRI)	Level 2	Level	
			35. Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Kategori	Penelitian dan Pengembangan
			36. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	15	%	Keuangan
			37. Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	79,5	Angka	
			38. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,5	Angka	Administrasi Pemerintahan

MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN	BIDANG
			39. Indek Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	25	Angka	
			40. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	BB	-	
			41. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,95	Angka	Pengawasan
			42. Indeks Profesionalitas ASN	50,09	Angka	Kepegawaian dan Diklat
			43. Indeks <i>Merit System</i>	0,61	Angka	
			44. Indeks Manajemen Kearsipan	67,00	Angka	Kearsipan
			45. Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	91,50	%	Sekretariat Dewan
		1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	46. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,00	Angka	Komunikasi dan Informatika
			47. Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	96,00	Angka	
			48. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	80	Angka	
			49. Rata-rata IKM di Kecamatan	84,00	%	Kewilayahan
		2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen	50. Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	0,71	Angka	Pemberdayaan Masyarakat dan

MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas						
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN	BIDANG
		pemerintahan desa	51. Persentase desa yang berpredikat mandiri	6,39	%	Desa
		3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	52. Indek Rasa Aman	4,44	Angka	Ketentraman dan Ketertiban Umum
		4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	53. Indek Resiko Bencana	192,08	Angka	Ketentraman dan Ketertiban Umum Kebencanaan

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022

1. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 yang mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi, maka dirumuskan penyesuaian strategi dan arah kebijakan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut:

- a. Misi 1 (Pertama) “Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya”, beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - 1) Meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui pemerataan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;
 - 2) Peningkatan kompetensi dan daya saing generasi muda;
 - 3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan;
 - 4) Peningkatan cakupan mutu dan pelayanan KB;
 - 5) Penguatan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak; dan
 - 6) Penyempurnaan kebijakan bantuan sosial, keberpihakan kepada masyarakat miskin, rentan, dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- b. Misi 2 (Kedua) “Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan”, beberapa srategi yang akan dilakukan yaitu:
 - 1) Memaksimalkan teknologi yang mampu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas unggul;
 - 2) Mengoptimalkan potensi wisata dan daerah tujuan wisata yang adaptif terhadap pandemic Covid-19;
 - 3) Memberdayakan kewirausahaan masyarakat dan promosi investasi;
 - 4) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang;
 - 5) Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

c. Misi 3 (Ketiga) “Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”, beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- 1) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
- 2) Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik yang adaptif
- 3) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa serta partisipasi masyarakat;
- 4) Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum;
- 5) Optimalisasi mitigasi bencana.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung lima tahun ke depan, ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan prioritas dan fokus pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan dimulai pada tahun 2019 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2018-2023.



Gambar 4.2

Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan dalam Peraturan Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 yaitu Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Berkelanjutan dan Peningkatan Daya Saing Daerah.

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023

4.2.1 Tema Pembangunan Tahun 2023

Tabel 4.2
Tema Pembangunan Tahun 2023

Tema RKP Nasional Tahun 2023	Tema RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	Tema RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023
Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Berdikari	Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Berkelanjutan dan Peningkatan Daya Saing Daerah

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022

Berdasarkan tabel tersebut, tema pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 selaras dengan tema pembangunan baik RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. **Tema pembangunan Kabupaten Temanggung tahun 2023** bersumber dari arah kebijakan pembangunan RPJMD 2018-2023 yaitu **“Pemantapan pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing daerah”**.

4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

a. Prioritas Nasional dalam RKP 2023

Kebijakan di tahun 2023 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas guna transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan 7 Prioritas Nasional (7 PN) yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1);



- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN 2);
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing (PN 3);
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (PN 4);
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (PN 5);
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN 6);
- 7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN 7).

b. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.3
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	Fokus Pembangunan Provinsi Jawa Tengah
1.	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdaya saing dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani - Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan melalui; - Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu; - Peningkatan ketahanan pangan; - Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil menengah, serta koperasi; - Peningkatan eco socio tourism berbasis masyarakat dan lingkungan hidup; - Peningkatan nilai penanaman modal; - Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang, serta konektivitas antar daerah dan wilayah

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	Fokus Pembangunan Provinsi Jawa Tengah
		<ul style="list-style-type: none"> - pengembangan serta antar wilayah pantura, tengah, dan pansela; - Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; - Peningkatan ketahanan bencana;
2.	Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan basic need access (akses kebutuhan dasar) untuk penduduk miskin perdesaan dan perkotaan; - Penguatan tata kelola kelembagaan penanggulangan kemiskinan terutama; - Penguatan sustainable livelihood (keberlanjutan ekonomi masyarakat) untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; - Pengurangan pengangguran;
3.	Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing,	<ul style="list-style-type: none"> - Penuntasan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan; - Penguatan pembangunan kesehatan paripurna; - Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak; - Pembangunan kependudukan berdasarkan 5 pilar pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan;
4.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantapan kualitas pelayanan publik termasuk penerapan pemerintahan digital guna mendukung pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, kolaboratif, dan inovatif, sarana pelayanan publik yang inklusif, open government melalui; - Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan; - Perwujudan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik; - Penguatan kondusivitas wilayah; - Pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah secara lebih progresif, realistis, dan kondusif.

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022

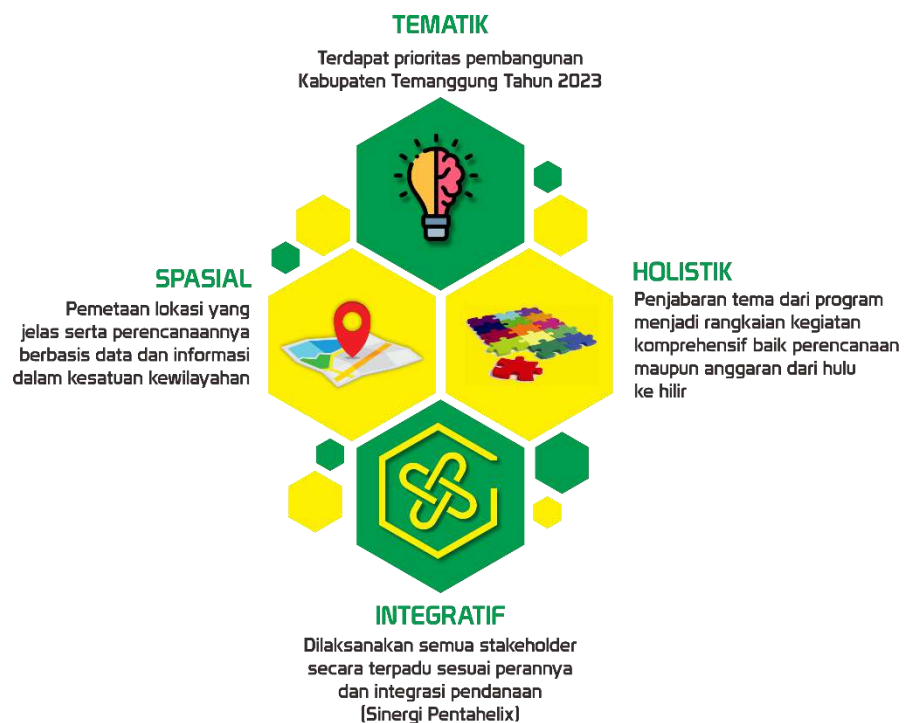


c. Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Prioritas pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratik, dan politik. Proses perencanaan partisipatif, teknokratik dan politik merupakan hal yang sangat penting dimana usulan perencanaan mulai dari Musrenbang maupun Forum Khusus dengan penyelarasan dan sinkronisasi dengan pokok pikiran DPRD (aspirasi DPRD) dalam mencapai tujuan pembangunan sesuai arahan peraturan perundangan yang berlaku.

Selain itu, prioritas pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 juga disusun dengan menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Dalam perencanaan pembangunan perlu merumuskan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tema pembangunan dalam jangka waktu 1 tahun. Selanjutnya, penjabaran tema dari program ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif dari hulu ke hilir (dalam sebuah kegiatan). Tidak luput pula, perencanaan pembangunan juga melibatkan beberapa pemangku kepentingan seperti Perangkat Daerah maupun stakeholder non Perangkat Daerah dalam sebuah sinergi untuk pelaksanaan perencanaan prioritas pembangunan. Tersedianya lokasi dari prioritas pembangunan tersebut juga harus jelas dengan menerapkan kesatuan kewilayahan sehingga satu lokasi dengan lainnya saling berkaitan erat.





Gambar 4.3
Konsep THIS dalam Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Oleh karena itu, pembangunan tahun 2023 ditujukan pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing daerah dengan **prioritas pembangunan** sebagaimana tabel berikut:

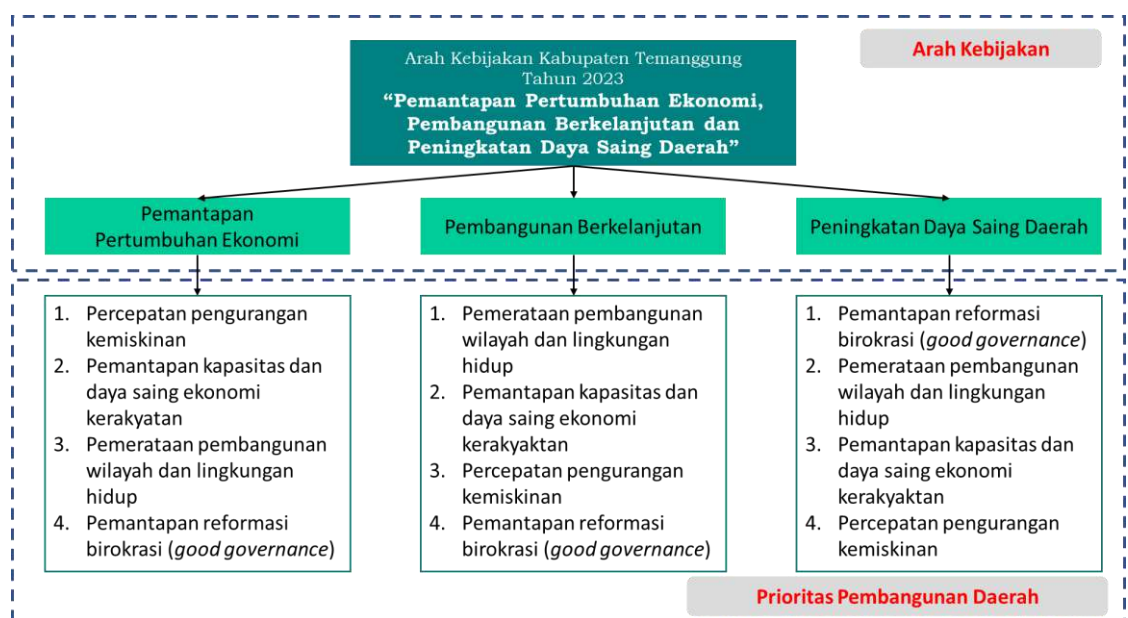
Tabel 4.4
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung	Fokus Pembangunan Kabupaten Temanggung
1	Pemantapan Reformasi Birokrasi (<i>good governance</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi reformasi birokrasi (<i>good governance</i>) - Pemantapan Reformasi Birokrasi (<i>good governance</i>) dan jejaring (<i>networking</i>)
2	Percepatan pengurangan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan kebutuhan Pendidikan dasar masyarakat - Pemenuhan kebutuhan Kesehatan dasar masyarakat - Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia - Penanggulangan kemiskinan - Percepatan pengurangan kemiskinan - Penanggulangan kemiskinan terdampak Covid-19
3	Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi kerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan ketahanan pangan - Penguatan daya saing ekonomi dan pariwisata daerah - Penguatan ekonomi kerakyatan terdampak Covid-19

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung	Fokus Pembangunan Kabupaten Temanggung
4	Pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerataan pembangunan wilayah - Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap tata ruang dan lingkungan hidup - Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022

Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RKPD Tahun 2023 dengan arah kebijakan Perubahan RPJMD 2018-2023 dapat dijelaskan melalui gambar berikut:



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022

Gambar 4.4

Keterkaitan dan Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Temanggung dengan Arah Kebijakan Perubahan RPJMD

Prioritas pembangunan Kabupaten dalam RKPD Tahun 2023 terkait erat dan selaras dengan arah kebijakan tahun 2023 pada Perubahan RPJMD 2018-2023. Prioritas pembangunan Kabupaten Temanggung dalam RKPD 2023 sejumlah 4 prioritas seluruhnya sangat terkait dan mendukung pada penjabaran masing-masing dari arah kebijakan yaitu pemantapan pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing daerah.

Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RKPD 2023 dengan arah kebijakan Perubahan RPJMD 2018-2023 dapat dilihat pada gambar 4.2 bahwa seluruh prioritas pembangunan daerah mendukung arah kebijakan RPJMD yang telah ditetapkan pada tahun 2023, dimana arah kebijakan menjadi pedoman dan acuan penentuan prioritas pembangunan daerah.

Perumusan prioritas RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dengan mempertimbangkan prioritas nasional, prioritas Provinsi Jawa Tengah, permasalahan pembangunan/isu strategis Kabupaten Temanggung, janji politik kepala daerah dan pokok-pokok pikiran DPRD. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Keselarasan dan keterkaitan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Sebagaimana penjelasan diatas, arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2023 secara nasional dituangkan ke dalam 7 Prioritas Nasional yang secara rinci dijabarkan sasaran pada masing-masing PN. Keterkaitan sasaran indikator sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RKPD 2023 dengan sasaran PN RKP 2023 dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.5
Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Sasaran PN RKP Tahun 2023

No	Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP *)	Sasaran RKPD Temanggung **)	Indikator Sasaran RKPD Temanggung
PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			
1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya kedaulatan pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Skor Pola Pangan Harapan (PPH) • Tingkat konsumsi ikan
		Meningkatnya kesejahteraan petani	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat ketersediaan energi per kapita • Tingkat ketersediaan protein per kapita • Tingkat ketersediaan lemak per kapita
2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	Meningkatnya pariwisata daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
		Meningkatnya investasi sektor riil	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB • Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB • Persentase koperasi sehat • Persentase usaha mikro naik kelas • Indeks Kemudahan Berusaha • Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan			
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)	Tidak ada (karena Kabupaten Temanggung berada di Kawasan Barat Indonesia)	Tidak ada (karena Kabupaten Temanggung berada di Kawasan Barat Indonesia)
2	Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di	Meningkatnya investasi sektor riil	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB

No	Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP *)	Sasaran RKPD Temanggung **)	Indikator Sasaran RKPD Temanggung
	Kawasan Barat Indonesia (KBI)		<ul style="list-style-type: none"> Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
		Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Harapan Lama Sekolah (HLS)
		Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Angka Harapan Hidup (AHH)
		Meningkatnya penanganan, pemberdayaan, perlindungan dan jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani
PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing			
1	Terkendalnya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata Kelola kependudukan	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil Rata-rata IKM di Kecamatan
2	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	Meningkatnya penanganan, pemberdayaan, perlindungan dan jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani
3	Terpenuhinya layanan dasar bidang Kesehatan dan pendidikan	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Harapan Lama Sekolah (HLS)
		Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Angka Harapan Hidup (AHH)
4	Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Pembangunan Gender (IPG)

No	Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP *)	Sasaran RKPD Temanggung **)	Indikator Sasaran RKPD Temanggung
			<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perempuan dan anak korban kekerasan
		Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
5	Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perumahan dan permukiman layak huni
		Meningkatnya investasi sektor riil	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase usaha mikro naik kelas • Indeks Kemudahan Berusaha
6	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	Meningkatnya investasi sektor riil	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase usaha mikro naik kelas • Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
		Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata Lama Sekolah (RLS) • Harapan Lama Sekolah (HLS)
PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			
1	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> • Indek Gotong Royong • Indek Toleransi
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	<ul style="list-style-type: none"> • Indek Rasa Aman
2	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
3	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> • Indek Gotong Royong • Indek Toleransi

No	Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP *)	Sasaran RKPD Temanggung **)	Indikator Sasaran RKPD Temanggung
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun Persentase desa yang berpredikat mandiri
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	<ul style="list-style-type: none"> Indek Rasa Aman
4	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> Indek Gotong Royong Indek Toleransi
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	<ul style="list-style-type: none"> Indek Rasa Aman
5	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Harapan Lama Sekolah (HLS)
		Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Angka Harapan Hidup (AHH)
6	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	Meningkatnya budaya literasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Persentase peminjam di perpustakaan
PN 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar			
1	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	<ul style="list-style-type: none"> Persentase perumahan dan permukiman layak huni Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas
2	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	<ul style="list-style-type: none"> Persentase infrastruktur kondisi baik Persentase pemanfaatan ruang sesuai

No	Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP *)	Sasaran RKPD Temanggung **)	Indikator Sasaran RKPD Temanggung
			rencana tata ruang
3	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perumahan dan permukiman layak huni • Persentase infrastruktur kondisi baik
4	Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
		Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase infrastruktur kondisi baik
5	Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim			
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
2	Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Resiko Bencana
3	Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap <i>baseline</i>	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
PN 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik			
1	Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas Lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah • Persentase ketercapaian kinerja pembangunan daerah • Manajemen Risiko Indeks • Indeks Inovasi Daerah

No	Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP *)	Sasaran RKPD Temanggung **)	Indikator Sasaran RKPD Temanggung
			<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) • Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) • Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ) • Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) • Indeks Persepsi Anti Korupsi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Profesionalitas ASN • Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik • Nilai Keterbukaan Informasi Publik • Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil • Rata-rata IKM di Kecamatan
2	Optimalnya kebijakan luar negeri	Meningkatnya investasi sektor riil	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB • Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
		Meningkatnya pariwisata daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
3	Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Risiko Indeks • Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) • Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa

No	Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP *)	Sasaran RKPD Temanggung **)	Indikator Sasaran RKPD Temanggung
			(PBJ) <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) • Indeks Persepsi Anti Korupsi
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Profesionalitas ASN • Indeks Merit System • Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu • Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik • Nilai Keterbukaan Informasi Publik • Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil • Rata-rata IKM di Kecamatan
5	Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> • Indek Gotong Royong • Indek Toleransi
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	<ul style="list-style-type: none"> • Indek Rasa Aman

Sumber: *) Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022

**) Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung 2018-2023
 BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022

Sebagaimana telah tercantum pada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung 2018-2023 bahwa sasaran pembangunan daerah berjumlah 20 sasaran. Sedangkan, sasaran tiap prioritas nasional tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 yang berjumlah 29 sasaran. Melihat kepada penjelasan keterkaitan sasaran pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan dari 20 sasaran pembangunan Kabupaten Temanggung terkait dan sesuai dengan 28 sasaran prioritas nasional tahun 2023. Terdapat 1 sasaran prioritas nasional yang tidak dapat didukung oleh sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung yaitu 'meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)' pada PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Hal ini dikarenakan secara kewilayahan Kabupaten Temanggung berada di wilayah barat Indonesia. Secara persentase tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RKPD dengan sasaran PN RKP Tahun 2023 sebesar 96,55%.

Keselarasan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RKPD 2023 dengan prioritas nasional dan prioritas Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:



Tabel 4.6
Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung dengan
Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Nasional 2023	Prioritas Provinsi Jawa Tengah 2023	Prioritas Kabupaten Temanggung 2023
1.	PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 2. Pemantapan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan 3.
2.	PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE) 2. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup
3.	PN 3 : Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan Pengurangan Kemiskinan
4.	PN 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan Reformasi Birokrasi (good governance) 2. Pemantapan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan
5.	PN 5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE) 3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 2. Pemantapan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan 3. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup

No	Prioritas Nasional 2023	Prioritas Provinsi Jawa Tengah 2023	Prioritas Kabupaten Temanggung 2023
		menuju SDM berdaya saing,	
6.	PN 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	1. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup
7.	PN 7 : Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	1. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	1. Pemantapan Reformasi Birokrasi (good governance)

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung tahun 2023 yang berjumlah 4 prioritas selaras dengan 7 prioritas nasional dan prioritas Provinsi Jawa Tengah. Tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dengan prioritas nasional RKP tahun 2023 dapat dinilai 100% (karena keseluruhan prioritas pembangunan daerah selaras dengan prioritas nasional).

2. Konsistensi dengan permasalahan/isu strategis

Permasalahan pembangunan Kabupaten Temanggung telah diidentifikasi berdasarkan kaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan isu strategis Kabupaten Temanggung memperhatikan gambaran kondisi daerah dan permasalahan, capaian indikator kinerja serta arah kebijakan. Penyusunan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan isu strategis yang ada. Adapun permasalahan pembangunan/isu strategis telah tertuang pada bab II. Selanjutnya, permasalahan pembangunan tersebut diklasifikasikan kembali menurut masing-masing isu strategis yang ada guna pemetaan konsistensi terhadap prioritas pembangunan, strategi, dan arah kebijakan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.7

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Temanggung Tahun 2023

NO	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	<ul style="list-style-type: none"> - Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung - Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Temanggung - Masih adanya kasus gizi buruk - Masih tingginya kasus kematian ibu - Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal - Belum optimalnya sarana prasarana bidang pendidikan - Masih rendahnya rata-rata lama sekolah - Masih terdapat sarana prasarana jaringan irigasi yang rusak - Belum optimalnya pelayanan drainase - Masih adanya rumah tidak layak huni - Masih adanya pemerlu perlindungan sosial yang masih membutuhkan pelayanan - Perlunya pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja - Perlunya pelatihan kewirausahaan - Masih rendahnya optimalisasi Skor Pola Pangan Harapan dan ketersediaan protein per kapita 	Menekan laju KEMISKINAN	Percepatan Pengurangan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyempurnaan kebijakan bantuan sosial, keberpihakan kepada masyarakat miskin, rentan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 	Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Berkelanjutan dan Peningkatan Daya Saing Daerah

NO	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	<ul style="list-style-type: none"> - Masih perlunya pelayanan KB bagi masyarakat untuk menekan laju pertumbuhan penduduk - Belum optimalnya amenities, aksesibilitas dan atraksi pariwisata 				
2	<ul style="list-style-type: none"> - Masih tingginya angka stunting - Masih adanya kasus gizi buruk - Masih tingginya kasus kematian ibu - Masih adanya kasus kematian bayi dan balita - Belum optimalnya sarana prasarana bidang pendidikan - Masih rendahnya rata-rata lama sekolah - Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya pengobatan penyakit TBC, hipertensi dan diabetes - Masih adanya rumah tidak layak huni - Masih adanya pemerlu perlindungan sosial yang masih membutuhkan pelayanan - Perlunya pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja - Perlunya pelatihan kewirausahaan - Masih ditemukannya kasus kekerasan pada perempuan dan anak 	Kualitas sumber daya manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi kerakyatan - Percepatan pengurangan kemiskinan - Pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang - Peningkatan kualitas lingkungan yang berkelanjutan 	Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Berkelanjutan dan Peningkatan Daya Saing Daerah

NO	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	<ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya pemahaman yang kurang terkait gender - Perlu peningkatan optimalisasi Skor Pola Pangan Harapan dan ketersediaan protein per kapita - Masih perlunya pelayanan KB bagi masyarakat untuk menekan laju pertumbuhan penduduk - Perlunya pelatihan SDM sesuai dengan kompetensi tugas fungsinya - Belum optimalnya prestasi olahraga - Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan dan produktivitas perikanan - Perlunya peningkatan pembinaan industri penghasil cukai - Belum optimalnya penerapan indeks profesionalitas ASN dan sistem merit dalam pengelolaan kepegawaian - Masih rendahnya keikutsertaan ASN dalam diklat pengembangan kompetensi - Masih adanya kasus narkoba di Kabupaten Temanggung 				
3	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal - Belum optimalnya sarana prasarana bidang pendidikan 	Percepatan pemulihan perekonomian dan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantapan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan - Percepatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan potensi wisata dan daerah tujuan wisata yang adaptif terhadap pandemi covid-19 	Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Berkelanjutan dan

NO	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya rata-rata lama sekolah - Masih terdapat sarana prasarana jaringan irigasi yang rusak - Belum optimalnya pelayanan drainase - Masih adanya rumah tidak layak huni - Masih adanya pemerlu perlindungan sosial yang masih membutuhkan pelayanan - Perlunya pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja - Perlunya pelatihan kewirausahaan - Belum optimalnya Skor Pola Pangan Harapan dan ketersediaan protein per kapita - Perlunya peningkatan pada desa berpredikat mandiri, desa swasembada, dan desa cepat berkembang - Penguatan optimalisasi penekanan laju pertumbuhan penduduk - Masih kurangnya penguatan koperasi dan UMKM - Belum optimalnya ketersediaan informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan - Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan dan produktivitas perikanan - Belum optimalnya produktivitas 	kesejahteraan masyarakat	pengurangan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan kewirausahaan masyarakat dan promosi investasi 	Peningkatan Daya Saing Daerah

NO	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	<p>tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan komoditas pertanian lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amenitas, aksesibilitas dan atraksi pariwisata masih perlu ditingkatkan - Masih kurangnya sarana prasarana perdagangan dan manajemen pengelolaan pasar - IKM industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah masih rendah - Perlunya peningkatan pembinaan industri penghasil cukai - Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan konservasi lingkungan hidup 				
4	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya sarana prasarana bidang pendidikan - Belum optimalnya cakupan pelayanan farmasi sesuai standar di puskesmas - Masih kurangnya sarana prasarana cakupan penanganan bencana kebakaran - Masih adanya pemerlu perlindungan sosial yang masih membutuhkan pelayanan - Pembaharuan data kependudukan yang belum optimal - Belum optimalnya sarana dan 	Tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi (<i>good governance</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi - Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik yang adaptif - Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa serta partisipasi masyarakat - Peningkatan peran serta masyarakat dalam 	Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Berkelanjutan dan Peningkatan Daya Saing Daerah

NO	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	<ul style="list-style-type: none"> prasarana lalu lintas - Belum optimalnya penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Temanggung - Sarana prasarana untuk keamanan informasi belum memadai - Belum optimalnya literasi dan pengelolaan naskah kuno - Belum optimalnya pengelolaan kearsipan - Masih kurangnya sarana prasarana perdagangan dan manajemen pengelolaan pasar - Belum optimalnya pengelolaan pemerintahan pada unsur pendukung pemerintah - Belum optimalnya ketercapaian kinerja perencanaan dan pemanfaatan kelitbang - Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah - Belum optimalnya penerapan indeks profesionalitas ASN dan sistem merit dalam pengelolaan kepegawaian - Belum adanya fungsional peneliti - Belum optimalnya fungsi pengawasan daerah 			mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022

3. Janji Tahunan Kepala Daerah dan Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD

1. Janji Tahunan Kepala Daerah

Janji tahunan kepala daerah yang merupakan Janji Politik Kepala Daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD sebagai representasi pendekatan politik menjadi rujukan penentuan prioritas pembangunan RKPD Tahun 2023 dengan penyesuaian pada konteks isu strategis Tahun 2023. Substansi janji politik yang termaktub dalam program prioritas Peraturan Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 yaitu:

- a) Peningkatan akses pendidikan SD dan SMP;
- b) Pelayanan kesehatan;
- c) Pembinaan kepemudaan;
- d) Penanganan fakir miskin;
- e) Perlindungan dan jaminan sosial;
- f) Peningkatan produktivitas, penerapan teknologi untuk agribisnis, peternakan, perikanan;
- g) Peningkatan ketahanan pangan;
- h) Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, keuangan daerah dan publik berbasis teknologi informasi;
- i) Pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa;
- j) Pemeliharaan ketentraman ketertiban umum, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; dan
- k) Pengembangan kawasan strategis.

2. Pokok-pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan amanat Pasal 178 Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan



Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran, selanjutnya hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan.

Dalam rangka memberikan masukan terhadap Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023, DPRD Kabupaten Temanggung memberikan sumbangan pokok-pokok pikiran yang harus diperhatikan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang selaras dengan Visi dan Misi yang ada.

DPRD memberikan penekanan khususnya pada aspek pemulihan ekonomi, percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi agar dilakukan secara sinergi antar Perangkat Daerah, Perangkat Daerah dengan masyarakat, maupun sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah di atasnya (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), di samping itu, juga dilakukan terobosan yang nyata terhadap pengembangan potensi sumber daya unggulan lokal (holtikultura, Kopi, Tembakau, Panili, Ternak dan lain-lain) dan peningkatan jejaring pemasaran yang selama ini masih menjadi kendala dari pengembangan potensi unggulan lokal tersebut.

Keterkaitan prioritas pembangunan Kabupaten Temanggung yang memuat janji tahunan kepala daerah dan pokok-pokok pikiran tahunan DPRD sebagaimana tabel berikut:



Tabel 4.8

Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Janji Tahunan Kepala Daerah dan Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun 2023

NO	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SUBSTANSI JANJI TAHUNAN (POLITIK) YANG TERMAKTUB DALAM PROGRAM PRIORITAS RPJMD TAHUN 2018-2023	POKOK-POKOK PIKIRAN TAHUNAN DPRD
1.	Menekan Laju Kemiskinan	Percepatan Pengurangan Kemiskinan	<p>Penanganan fakir miskin</p> <p>Perlindungan dan jaminan sosial</p> <p>Peningkatan produktivitas, penerapan teknologi untuk agribisnis, peternakan dan perikanan</p> <p>Peningkatan ketahanan pangan</p> <p>Pengembangan kawasan strategis</p>	<p>Pemulihan Ekonomi</p> <p>Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Antar Perangkat Daerah, Perangkat Daerah Dengan Masyarakat, Maupun Antara Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Diatasnya (Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Provinsi)</p> <p>Pengembangan Potensi Sumber Daya Unggulan Lokal (Holtikultura, Kopi, Tembakau, Panili, Ternak Dan Lain-Lain)</p> <p>Peningkatan Jejaring Pemasaran</p>
2.	Kualitas Sumber daya Manusia	Pemantapan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan	<p>Peningkatan akses pendidikan SD dan SMP</p> <p>Pelayanan kesehatan</p> <p>Pembinaan kepemudaan</p> <p>Pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa</p> <p>Pemeliharaan ketentraman ketertiban umum, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana</p>	
3.	Percepatan Pemulihan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	<p>Pemantapan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan</p> <p>Pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan hidup</p> <p>Pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan hidup</p>	<p>Penanganan fakir miskin</p> <p>Peningkatan produktivitas, penerapan teknologi untuk agribisnis, peternakan, perikanan</p> <p>Pengembangan kawasan strategis</p>	

NO	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SUBSTANSI JANJI TAHUNAN (POLITIK) YANG TERMAKTUB DALAM PROGRAM PRIORITAS RPJMD TAHUN 2018-2023	POKOK-POKOK PIKIRAN TAHUNAN DPRD
4.	Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi (Good Governance)	Peningkatan akses pendidikan SD dan SMP Pelayanan kesehatan Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, keuangan daerah dan publik berbasis teknologi informasi Pemeliharaan ketentraman ketertiban umum, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 selanjutnya dijabarkan menjadi **program prioritas** sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan;
- 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 3) Program Pengembangan Kebudayaan;
- 4) Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- 5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 6) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- 7) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- 8) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- 9) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- 10) Program Penyelenggaraan Jalan;
- 11) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 12) Program Kawasan Permukiman;
- 13) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 14) Program Pengelolaan Persampahan;
- 15) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
- 16) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 17) Program Penanggulangan Bencana;
- 18) Program Aplikasi Informatika;
- 19) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Program prioritas merupakan program yang diselenggarakan untuk mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Tabel 4.9

Keterkaitan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB (OPD)	KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL
Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,80 Tahun	1. Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Persentase APK SD sederajat	Dindikpora	Prioritas Nasional 3 : Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,49 Tahun	2. Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi kerakyatan		2. Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A		
					3. Persentase APM SD sederajat		Prioritas Nasional 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
					4. Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/ SDLB/MI/ Paket A		
					5. Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik		
					6. Persentase SD terakreditasi minimal B		
					7. Angka kelulusan SD sederajat		
					8. Angka putus sekolah SD sederajat		
					9. Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik		
					10. Persentase APK SMP sederajat		
					11. Rasio APK Perempuan/Laki-laki		

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB (OPD)	KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL
					SMP/SMPLB/MTs/Paket B 12. Persentase APM SMP sederajat 13. Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B 14. Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat 15. Persentase ruang kelas SMP negeri dalam keadaan baik 16. Presentase SMP terakreditasi minimal B 17. Angka kelulusan SMP sederajat 18. Angka putus sekolah SMP sederajat 19. Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik 20. Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun) 21. Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB (OPD)	KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL
					(SD/MI, SMP/MTs) 22. Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD 23. Prosentase TK terakreditasi minimal B 24. Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik 25. Persentase angka melek huruf usia ≥ 15 tahun 26. Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan 27. Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 28. Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah		
Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	75,53 Tahun	1. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 2. Pemantapan kapasitas dan	Program Upaya pemenuhan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan	1. Angka kematian ibu 2. Angka kematian bayi 3. Prevalensi balita gizi buruk	Dinas Kesehatan dan RSUD	Prioritas Nasional 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan
	Indeks Kinerja RSUD	80,00 (Kategori Sehat)					



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB (OPD)	KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL
			daya saing ekonomi kerakyatan	masyarakat	4. Presentase rumah tangga yang memiliki jamban 5. Presentase puskesmas yang sarprasnya sesuai standar 6. Presentase Ketersediaan obat sesuai kebutuhan 7. Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar 8. Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar 9. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 10. Presentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan 11. Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar		Ekonomi dan Pelayanan Dasar

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB (OPD)	KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL
					12. Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani 13. Angka Kematian Neonatal (AKN) 14. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar 15. Angka Kematian Balita 16. Presentase anak usia pendidikan dasar yang sesuai mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 17. Cakupan warga negara indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 18. Cakupan warga negara indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 19. Presentase kunjungan baru di pelayanan kesehatan dasar (Cakupan rawat jalan)		

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB (OPD)	KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL
					20. Presentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah terakreditasi utama 21. Presentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 22. Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 23. Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 24. Presentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar 25. Penanganan KLB 1x24 jam 26. Angka penemuan kasus Malaria 27. Inciden rate DBD (Demam Berdarah Dengue)		

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB (OPD)	KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL
					28. Angka penemuan kasus baru Kusta 29. Persentase Desa atau kelurahan UCI 30. Proporsi anak umur 1 tahun diimunisasi campak 31. Prevalensi gizi kurang pada anak balita (0-60 bulan) 32. Prevalensi stunting pada anak baduta (0-24 bulan) 33. Persentase Bayi umur < 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif 34. Prevalensi anemia pada ibu hamil 35. Persentase Desa bebas rawan gizi 36. Persentase Rumah Sehat 37. Cakupan nilai akreditasi RSUD 38. Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit 39. Jumlah Warga Negara		



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB (OPD)	KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL
					dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan		
Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IKP)	3,51	Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi kerakyatan	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kelompok seni budaya yang produktif	Dinbudpar	Prioritas Nasional 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,65	Percepatan pengurangan kemiskinan	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	1. Persentase keterwakilan perempuan di Lembaga pemerintah 2. Rasio perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsive gender dalam penyusunan dokumen perencanaan	DPPPKPPAB	Prioritas Nasional 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
	Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	0,004%					
Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	63%	Percepatan pengurangan kemiskinan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial 2. Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota 3. Cakupan pengelolaan	Dinas Sosial	Prioritas Nasional 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB (OPD)	KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL
					<p>data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota</p> <p>4. Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan</p> <p>5. Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar</p>		
Meningkatnya kesejahteraan petani	<p>1. Tingkat ketersediaan energi per kapita</p> <p>2. Tingkat ketersediaan protein per kapita</p> <p>3. Tingkat ketersediaan lemak per kapita</p>	<p>2935 kkal/kapita/hari</p> <p>103,8 kkal/kapita/hari</p> <p>37,50 kkal/kapita/hari</p>	<p>1. Percepatan pengurangan kemiskinan</p> <p>2. Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi kerakyatan</p>	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	DKPPP	Prioritas Nasional 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
Meningkatnya kedaulatan pangan	1. Skor Pola Pangan Harapan	78,30%	Percepatan pengurangan kemiskinan	1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan Desa pelaksana program ketahanan pangan	DKPPP	Prioritas Nasional 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB (OPD)	KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL
	2. Tingkat Konsumsi Ikan	21,34 kg/kap/th		2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1. Produktivitas ikan nila 2. Produktivitas ikan lele 3. Produktivitas ikan mas	DKPPP	Prioritas Nasional 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
				3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1. Persentase nelayan perairan umum yang terbina	DKPPP	Prioritas Nasional 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
Meningkatnya pariwisata daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,65%	1. Percepatan pengurangan kemiskinan 2. Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi kerakyatan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase obyek wisata yang berkembang	Dinbudpar	Prioritas Nasional 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan Prioritas Nasional 3 : Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing Prioritas Nasional 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB (OPD)	KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL
Meningkatnya investasi sektor riil	Persentase usaha mikro naik kelas	0,015%	1. Percepatan pengurangan kemiskinan 2. Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi kerakyatan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi	Dinkopdag	Prioritas Nasional 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Persentase infrastruktur kondisi baik	84,00%	Pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan hidup	Program Penyelenggaraan Jalan	1. Persentase jalan kabupaten kondisi mantap 2. Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	DPUPR	Prioritas Nasional 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan Prioritas Nasional 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
	Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	89,50%		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	DPUPR	Prioritas Nasional 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan Prioritas Nasional 5:



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB (OPD)	KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL
							Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
	Persentase perumahan dan permukiman layak huni	97,97%		Program Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rumah layak huni 2. Persentase kawasan kumuh perkotaan 3. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 4. Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni 	DPRKPLH	Prioritas Nasional 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,53	Pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan hidup	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara 	DPRKPLH	Prioritas Nasional 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB (OPD)	KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL
				2. Program Pengelolaan Persampahan	<ol style="list-style-type: none"> Persentase sampah yang tertangani Cakupan layanan persampahan 	DPRKPLH	Prioritas Nasional 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,00	Pemantapan reformasi birokrasi (<i>good governance</i>)	1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> Persentase PPID badan publik yang aktif Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran 	Dinkominfo	Prioritas Nasional 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
	2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	96,00		2. Program Aplikasi Informatika	<ol style="list-style-type: none"> Persentase ketersediaan jaringan intranet Persentase sistem informasi yang terintegrasi Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal Persentase ketersediaan akses internet publik 	Dinkominfo	Prioritas Nasional 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB (OPD)	KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Indek Rasa Aman	4,44	Pemantapan reformasi birokrasi (<i>good governance</i>)	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati 2. Rasio Linmas per RT 3. Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada 	Satpol PP Damkar dan BPBD	<p>Prioritas Nasional 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;</p> <p>Prioritas Nasional 7 : Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik</p>
Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	192,08	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan reformasi birokrasi (<i>good governance</i>) 2. Pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan hidup 	Program Penanggulangan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan desa tangguh bencana 2. Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana 3. Persentase Tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana 4. Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana 	BPBD	<p>Prioritas Nasional 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;</p>



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB (OPD)	KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL
					5. Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana 6. Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana 7. Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 8. Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 9. Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022



Berdasarkan tabel diatas, keterkaitan indikator sasaran prioritas pembangunan dengan indikator kinerja program prioritas dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator kinerja program prioritas terkait dengan indikator sasaran prioritas pembangunan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa tingkat keterkaitan indikator sasaran prioritas pembangunan dengan indikator kinerja program prioritas sebesar 100%.

Sebagaimana tabel diatas pula, dapat terlihat bahwa indikator dampak digunakan sebagai indikator kinerja sasaran pembangunan daerah. Selain itu, keseluruhan program prioritas mempunyai indikator kinerja dimana indikator tersebut menggunakan indikator hasil. Tingkat penggunaan indikator hasil sebagai indikator kinerja program prioritas daerah sebesar 100%.

4.3. KONTRIBUSI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2019 PADA TAHUN 2023

Pemerintah Kabupaten Temanggung mendukung terlaksananya Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal–Semarang–Salatiga– Demak–Grobogan, Kawasan Purworejo–Wonosobo–Magelang–Temanggung dan Kawasan Brebes–Tegal–Pemalang. Kabupaten Temanggung masuk dalam percepatan Kawasan Puwomanggung. Program kegiatan yang direncanakan dalam mendukung percepatan tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.10
Perencanaan Pembangunan Mendukung Perpres 79 Tahun 2019

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PROGRES	TINDAK LANJUT
KABUPATEN TEMANGGUNG			
1	Pembangunan Prasarana Konservasi SDA Sungai Bodri, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung	- Tahun 2009 : DED 2009 (APBD) - Tahun 2023 : Review DED 2023 - Tahun 2023 : Kegiatan konstruksi 2023	Ditangani oleh BBWS Bodri Kuto Jawa Tengah
2	Pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta	- Pembebasan lahan	Diusulkan di APBN di tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PROGRES	TINDAK LANJUT
KABUPATEN TEMANGGUNG			
3	Peningkatan Jalan Pringsurat – Secang – Batas Yogyakarta, Kabupaten Temanggung	- Tahun 2021–2024 Kegiatan Konstruksi	Kewenangan pusat karena jalan nasional
4	Pengembangan Kawasan Kopi dan Pengembangan Kawasan Agropolitan PRING KRAKAL (Pringsurat, Kranggan, Kaloran), Kabupaten Temanggung	- Tahun 2021 : Telah dialokasikan budidaya Rp3,36M (APBN) - FS dan DED gudang dan sarpras pengolahan - Tahun 2023 : Pembangunan Fisik usulan lewat APBN 1M, APBD mensupport dalam pembinaan, monitoring dan evaluasi	Pengadaan bibit dan pupuk untuk pengembangan kawasan Inisiasi oleh provinsi
5	Pengembangan Kawasan Wisata	Tahun 2023 : usulan kegiatan melalui provinsi dan pusat	Inisiasi oleh provinsi karena merupakan lintas kawasan
6.	Reservasi dan revitalisasi Umbul Jumprit	Tahun 2022 : pembangunan fisik mulai dilakukan, didanai lewat APBN	Ditangani oleh BBWSO Serayu Opak Yogyakarta dan BP2W Provinsi Jawa Tengah
7.	Peningkatan ruas jalan Dakaran – Sibajak	Tahun 2020-2023 : Sudah terlaksana melalui Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah	Ditangani Oleh DPUPR
8.	Kawasan khusus terpadu Nusantara	Tahun 2022-2023 : Akan dilaksanakan <i>launching</i> di Kawasan pedesaan Bansari	Ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT)
9.	Pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta dengan salah satu pintu tol di Kab. Temanggung	Tahun 2022-2024 : Akan dilaksanakan pembangunan jalan tol dengan salah satu pintu tol di Desa Soropadan, Kec. Pringsurat	Ditangani oleh BPJT Kementerian PUPR

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022



4.4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA TAHUN 2023

Program pembangunan infrastruktur pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 difokuskan untuk mendukung terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem dan Gandem melalui Tema pemantapan pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing daerah. Pembangunan infrastuktur yang direncanakan tidak sebatas bidang pekerjaan umum namun juga bidang kesehatan, pendidikan, dan pertanian.

Perencanaan pembangunan infrastruktur di DPUPR bertujuan meningkatkan kualitas jalan sehingga memperlancar arus transportasi yang akan berdampak dalam pergerakan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan, meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing daerah. Selain itu pembangunan infrastruktur diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang.

Perencanaan pembangunan infrastruktur di Dinas Kesehatan bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat melalui puskesmas dan diarahkan mendukung prioritas pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing daerah.

Perencanaan pembangunan infrastruktur di Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan bertujuan meningkatkan produktivitas pangan, pertanian dan perikanan dan diarahkan mendukung prioritas pemantapan pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan serta peningkatan daya saing daerah.

Perencanaan pembangunan infrastruktur di Dindikpora bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat dan diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing daerah.



4.5. SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH DALAM Mendukung Pencapaian Target SDGs Kabupaten Temanggung

Pemerintah Kabupaten Temanggung sepenuhnya mendukung dan berkomitmen dalam mendukung terwujudnya tujuan SDGs sejumlah 17 tujuan melalui beberapa program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Temanggung. Ada satu tujuan yaitu tujuan 10 yang tidak secara langsung berkontribusi karena hal tersebut merupakan kewenangan pusat.

Tabel 4.11
Sasaran, Prioritas dan Program Yang Mendukung Terwujudnya SDGs di Kabupaten Temanggung Pada Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan - Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan - Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk - Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak - Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) - Meningkatnya kedaulatan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Percepatan pengurangan kemiskinan - Pemantapan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pengelolaan Pendidikan b. Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat c. Program Pembinaan Keluarga Berencana d. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera e. Program Pemberdayaan Sosial f. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial g. Program Penanggulangan Bencana h. Program Pengembangan Perumahan i. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum j. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM
				k. Program Pencatatan Sipil l. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja m. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan n. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) o. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif p. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting q. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian r. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat s. Program Pengelolaan Budidaya Ikan; t. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya u. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian v. Program Penyelenggaraan Jalan
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan	- Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	- Percepatan Pengurangan Kemiskinan - Pemantapan	a. Program Pengelolaan Pendidikan b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan



NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM
	pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan - Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) - Meningkatnya kesejahteraan petani - Meningkatnya kedaulatan pangan 	Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial d. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian e. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat f. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya g. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	<ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan - Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk - Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 	<ul style="list-style-type: none"> - Percepatan Pengurangan Kemiskinan - Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi kerakyatan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat b. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan d. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) e. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) f. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial g. Program Rehabilitasi Sosial h. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM
				(LLAJ) i. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial j. Program Pengendalian Penduduk
4	Menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	- Percepatan pengurangan kemiskinan - Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi kerakyatan	a. Program Pengelolaan Pendidikan b. Program Aplikasi Informatika c. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	- Peningkatan kapasitas dan daya sains ekonomi kerakyatan - Percepatan pengurangan kemiskinan	a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan b. Program Perlindungan Perempuan c. Program Pengendalian Penduduk d. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) e. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia f. Program Peningkatan Peran Partai Politik
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	- Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan - Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan	- Percepatan pengurangan kemiskinan - Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) c. Program Pengelolaan dan Pengembangan

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM
		Kesejahteraan Sosial (PPKS)		<p>Sistem Penyediaan Air Minum</p> <p>d. Program Pengembangan Perumahan</p> <p>e. Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh</p> <p>f. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>g. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</p> <p>h. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)</p> <p>i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</p>
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern	tidak ada indikator di Pemerintah Kabupaten Temanggung karena ESDM bukan kewenangan kabupaten/kota		
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kesejahteraan petani - Meningkatnya kedaulatan pangan - Meningkatnya pariwisata daerah - Meningkatnya investasi sektor riil 	<ul style="list-style-type: none"> - Percepatan pengurangan kemiskinan - Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi kerakyatan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja b. Program Penempatan Tenaga Kerja c. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat d. Program Perekonomian dan Pembangunan e. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya f. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM
				Perikanan g. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata h. Program Pemasaran Pariwisata i. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif j. Program Pengembangan Kebudayaan k. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal l. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan m. Program Hubungan Industrial n. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota o. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) p. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
9	Membangun infrastruktur yang tangguh meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	a. Program Penyelenggaraan Jalan b. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang c. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya d. Program Aplikasi Informatika e. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM
				f. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah g. Program Penataan Bangunan Gedung h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
10	Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak - Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 	Percepatan Pengurangan Kemiskinan	a. Program Penataan Desa b. Program Peningkatan Kerjasama Desa c. Program Administrasi Pemerintahan Desa d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat e. Program Hubungan Industrial f. Program Perlindungan Perempuan g. Program Perlindungan Anak
11	Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan - Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan - Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak - Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, 	<ul style="list-style-type: none"> - Percepatan Pengurangan Kemiskinan - Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup 	a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah c. Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya



NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM
		<p>dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup - Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum - Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana 		<ul style="list-style-type: none"> e. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang f. Program Pengelolaan Persampahan g. Program Penanggulangan Bencana h. Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pengelolaan Persampahan b. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) c. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup d. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
13	Mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat b. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM
				Kemandirian Pangan c. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat d. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian e. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian f. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian g. Program Penyuluhan Pertanian h. Program Perencanaan Lingkungan Hidup i. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup j. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati k. Program Pengendalian B3 dan Limbah B3 l. Pengelolaan Persampahan m. Program penanggulangan bencana n. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
14	Melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan	Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak ada indikator karena tidak mempunyai laut		
15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem	Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak ada indikator karena bukan merupakan indikator di tingkat kabupaten/kota		

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM
	daratan			
16	Mewujudkan Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan - Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak - Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan - Meningkatnya kualitas pelayanan publik - Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa - Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum 	Pemantapan Reformasi Birokrasi (<i>good governance</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah e. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat f. Program Perekonomian dan Pembangunan g. Program Pencatatan Sipil h. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan i. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan j. Program Pendaftaran Penduduk k. Program Informasi dan Komunikasi Publik
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan - Meningkatnya kualitas pelayanan publik 	Pemantapan Reformasi Birokrasi (<i>good governance</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah c. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat d. Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia e. Program Pencatatan Sipil

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022



4.6. SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH DALAM MENDUKUNG PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

Strategi pengarusutamaan gender di Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 tahun 2018 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Temanggung. Sesuai Perbup ini, seluruh perangkat daerah dan desa wajib menyusun perencanaan penganggaran responsive gender pada semua program dan kegiatan secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada menggunakan Teknik analisis gender berupa GAP (*Gender Analysis Pathway*) dan GBS (*Gender Budget Statement*). Adapun penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender dilaksanakan setiap tahun sebelum penyusunan rencana kerja anggaran.

Tabel 4.12
Sasaran dan Prioritas Daerah yang Mendukung
Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Temanggung Tahun 2023

NO	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Pemantapan Reformasi Birokrasi (<i>good governance</i>)	Indeks Pembangunan Gender	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DPPAPPPKB
2				Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPAPPPKB
3				Program Perlindungan Perempuan	DPPAPPPKB
4				Program Pengendalian Penduduk	DPPAPPPKB
5				Program Pembinaan Keluarga Berencana	DPPAPPPKB
6				Program Pembinaan dan Fasilitas Perencanaan, Evaluasi, Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa	DINPERMADES
7				Program Pengembanagan Lembaga Ekonomi Masyarakat/Desa dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	DINPERMADES
8				Program Pendaftaran Penduduk	DINDUKCAPIL
9				Program Pencatatan	DINDUKCAPIL

NO	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Sipil	
10				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	DINKOPDAG
11				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DINKOPDAG
12				Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	DINKOPDAG
13				Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro	DINKOPDAG
14				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DINPERINAKEK
15				Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD
16				Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA
17				Program Perekonomian dan Pembangunan	SETDA
18				Program Pembinaan Perpustakaan	DINPUSIP
19				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
20				Program Pendidikan Politik Masyarakat	KESBANGPOL
21				Program Penyelenggaraan Pengawasan	INSPEKTORAT
22				Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA
23				Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	BAPPEDA
24				Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	BAPPEDA
25				Program Pelayanan Penanaman Modal	DPM

NO	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
26				Program Penanganan Fakir Miskin	DINSOS
27				Program Pemberdayaan Sosial	DINSOS
28				Program Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	DINKOMINFO
29				Program pemeliharaan Kentetraman Dan Ketertiban Umum	SATPOL PP DAMKAR
30				Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
31				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	DINKES
32				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD
33				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
34				Program Pengembangan Permukiman	DPUPR
35				Pogram Pengembangan Perumahan	DPRKPLH
36				Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	DPRKPLH

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022

4.7. SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH DALAM Mendukung PENGARUSUTAMAAN KERENTANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 01 Tahun 2012 termuat definisi desa/kelurahan tangguh bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Sasaran, prioritas daerah dan program dalam mendukung pengarusutamaan kerentanan bencana dan perubahan iklim sebagaimana tersebut dalam tabel berikut.

Tabel 4.13
Sasaran dan Prioritas Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan
Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim di Kabupaten
Temanggung Tahun 2023

NO	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	STRATEGI	PROGRAM
1.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Pemantapan reformasi birokrasi	Peningkatan Pelayanan Informasi Bencana	a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	b. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan c. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	d. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian e. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
2.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	f. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian g. Program Penyuluhan Pertanian h. Program Perencanaan Lingkungan Hidup i. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup j. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati k. Program Pengendalian B3 dan Limbah B3 l. Pengelolaan Persampahan m. Program penanggulangan bencana n. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022

4.8. FASILITASI PERUBAHAN IKLIM

Dalam upaya melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional dan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, berikut beberapa hal yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung:

1. Gas Rumah Kaca

Perubahan iklim global yang terjadi disebabkan karena terganggunya keseimbangan energi antara bumi dan atmosfer. Keseimbangan tersebut dipengaruhi antara lain oleh peningkatan gas-gas asamarang atau karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄) dan nitrous oksida (NO) yang lebih dikenal dengan gas rumah kaca (GRK).

Perubahan iklim global tersebut telah mendorong sektor pemerintahan untuk berperan aktif dalam upaya penurunan emisi GRK. Pada tingkat Provinsi Jawa Tengah capaian kinerja penurunan emisi GRK tahun 2021 sebesar 6.028,02 ton CO₂eq (CO₂ *equivalen*) yang berasal dari sektor pengelolaan limbah. Kabupaten Temanggung dalam konteks perubahan iklim menghasilkan GRK dari kegiatan ekonomi, utamanya dari kegiatan penggunaan energi, industri, pertanian, peternakan, kehutanan dan pengelolaan limbah.

Pada tahun 2018 Kabupaten Temanggung memulai untuk melakukan inventarisasi GRK dan ditindaklanjuti pada Tahun 2020 melalui *updating* data dan analisis. Penyusunan dokumen ini dilakukan dengan melibatkan unsur dari berbagai pemangku kepentingan dan mempertimbangkan karakteristik, potensi emisi serta prioritas rencana pembangunan daerah. Pelibatan OPD di Kabupaten Temanggung sejak dari awal proses sampai dengan akhir

dimaksudkan sebagai upaya menjaga kualitas dan akurasi data sumber emisi GRK.

Emisi GRK Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, sedangkan mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan emisi Tahun 2018. Emisi di Tahun 2019 termasuk kategori tinggi dikarenakan keberadaan data tentang sektor peternakan, lahan dan pertanian (terutama pada sub sector perubahan lahan yang tinggi). Emisi Kabupaten Temanggung berfluktuatif dengan emisi tertinggi pada tahun 2019 sebesar 2.746,1 Gg CO₂e. Sektor AFOLU (*Agriculture, Forestry, and Land Use*) berkontribusi paling besar terhadap emisi GRK di Kabupaten Temanggung disusul oleh sektor pengadaan dan penggunaan energi, pengelolaan limbah, kemudian IPPU (*Industrial Process and Product Use*). Berikut merupakan sumber yang menjadi prioritas dalam sistem inventarisasi GRK, yaitu: 1) Transportasi, 2) Industri Pengolahan, 3) Ternak, 4) Pengolahan limbah cair, 5) N₂O langsung dari pengolahan tanah, 6) Pengolahan Sawah, 7) Pembakaran Biomassa, 8) N₂O Tak langsung dari pengolahan tanah dan 9) Limbah Padat.

2. Sabuk Gunung

Sabuk Gunung merupakan gerakan konservasi penanaman pohon di lereng Gunung Sumbing, Sindoro, dan Prah. konservasi ini merupakan upaya menanggulangi kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung dinilai kritis. terdapat 13.000 hektare lahan di lereng Gunung Sumbing, Sindoro, Prah masuk masuk dalam kategori lahan kritis mengakibatkan banyak mata air yang mulai mati dan berkurang debitnya. Sehingga hal ini banyak permintaan bantuan air bersih ke desa-desa yang terus meningkat setiap tahunnya.

Mulai akhir tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menanam pohon konservasi sekurangnya ada 500 ribu pohon dan dari non pemerintah 220 ribu pohon. Kebutuhan riil pohon untuk penanaman ini di atas 15 juta bibit pohon untuk seluruh



Kabupaten Temanggung, sebagai upaya dalam penataan lingkungan hidup sehingga dengan konservasi lahan, diharapkan dapat meminimalkan polusi dan pencemaran lainnya, sehingga bumi ini menjadi lestari.

3. Komitmen Adaptasi Perubahan Iklim melalui Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim

Pemerintah Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten yang rentan terhadap dampak perubahan iklim mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat maka pada tahun 2022 melalui fasilitasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Temanggung berkomitmen terhadap kegiatan adaptasi perubahan iklim.

Sebagai langkah awal, Pemerintah Kabupaten Temanggung sedang menyusun Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim. Selain itu pada tahun 2020 di Temanggung telah dilaksanakan kegiatan Sekolah Lapang mitigasi perubahan iklim yang difasilitasi oleh Dinas pertanian Kabupaten Temanggung.

4.9. SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH DALAM Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Prioritas pembangunan Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 juga dalam mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), hal ini sebagai salah satu bentuk tanggungjawab dan komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pemerintah Kabupaten Temanggung memprioritaskan pemenuhan SPM dalam menyelenggarakan pelayanan dasar melalui

beberapa program di perangkat daerah dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Pemenuhan SPM juga diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena terkait dengan pelayanan dasar dan memprioritaskan penyediaan layanan dasar sesuai target SPM tidak hanya dalam hal jenis melainkan juga mutu (kuantitas dan kualitas layanan).

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Program yang mendukung terlaksananya pemenuhan SPM sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:



Tabel 4.14
Sasaran, Prioritas Daerah dan Program yang Mendukung Pemenuhan SPM
di Kabupaten Temanggung Tahun 2023

NO	SPM BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM
1	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan	Percepatan pengurangan kemiskinan	Program pengelolaan pendidikan
			Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional			
		Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
			Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional			
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5- 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD					
2	Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	Percepatan pengurangan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan c. Program Sediaan Farmasi, Alat
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar			

NO	SPM BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal essensial sesuai standar			Kesehatan dan Makanan Minuman d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Pelayanan kesehatan balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan Dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Setiap warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan penderita DM	Setiap penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan ODGJ berat	Setiap ODGJ berat Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan	Setiap orang terduga			

NO	SPM BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM
		pada orang terduga tuberkulosis	tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Setiap orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah;	Percepatan pengurangan kemiskinan Pemerataan pembangunan wilayah dan Lingkungan Hidup	a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh pengolahan air limbah untuk limbah domestik			
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni korban bencana	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah;	Percepatan pengurangan kemiskinan Pemerataan pembangunan wilayah dan Lingkungan Hidup	a. Program Pengembangan Perumahan b. Program Kawasan Permukiman.
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Jumlah warga negara terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni			
5	Ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Pemantapan reformasi birokrasi (<i>good governance</i>);	a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum b. Program Penanggulangan Bencana
		Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi			

NO	SPM BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM
			rawan bencana			
		Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang Memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang Memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
6	Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Percepatan pengurangan kemiskinan	a. Program Pemberdayaan Sosial; b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; c. Program Rehabilitasi Sosial; d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; e. Program Penanganan Bencana.
		Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis rehabilitasi di luar panti	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti			

NO	SPM BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial			

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022



GERBANG EMAS

BAB V RKPD 2023

PASAR PAPRINGAN TEMANGGUNG

5.1. RENCANA KERJA DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 serta seiring dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah. RKPD disusun dengan mensinkronkan perencanaan dan penganggaran melalui tiga langkah yaitu pertama, melanjutkan implementasi *money follows program*, dengan cara mengintegrasikan sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan. Kedua, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, pemerintah provinsi maupun pusat. Ketiga, memperkuat kendali program dengan melakukan pengendalian, monitoring serta evaluasi.

Tahapan penyusunan program merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan analisis dan metodologi perumusan sasaran pembangunan daerah. Indikasi rencana program disusun untuk menjabarkan sasaran pembangunan daerah dan dalam rangka pencapaian indikator sasaran serta dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pemerintah pusat menyatakan bahwa upaya pemerataan pembangunan yang dilakukan pemerintah di tahun 2023 ini ditempuh dengan menetapkan 8 prioritas nasional dalam RKP 2023. Tema yang diusung dalam RKP 2023 yaitu “Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”. Seiring dengan RKP 2023 yang ditetapkan pemerintah pusat, maka RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 menyelaraskan programnya sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas dalam RKP 2023.

5.1.1 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Terhadap Arah Kebijakan RKP 2023

Pemerintah Kabupaten Temanggung sepenuhnya mendukung terhadap 7 Arah Kebijakan Pemerintah Pusat yang tercantum dalam RKP

Tahun 2023 melalui dukungan beberapa program beserta anggarannya. Dukungan program dan anggaran dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 terhadap Arah Kebijakan RKP 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel 5.1 – 5.8.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Dukungan Program Daerah Pemerintah
Kabupaten Temanggung terhadap Arah Kebijakan dalam RKP Tahun
2023

No	Arah Kebijakan RKP 2023	Jumlah Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	9	326.172.011.843	1. DKPPP 2. Dinas Sosial 3. Dindikpora 4. DPRKPLH 5. Dinas Kesehatan 6. DPUPR
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Kesehatan dan Pendidikan	3	216.010.632.061	1. Dinas Kesehatan 2. Dindikpora 3. BKPSDM
3	Penanggulangan Pengangguran yang Disertai <i>Decent Job</i>	1	115.000.000	1. Dinperinaker
4	Mendorong Pemulihan Dunia Usaha	9	3.752.229.400	1. DPM 2. Dinkopdag 3. Dinperinaker 4. Dinbudpar
5	Revitalisasi Industri Dan Penguatan Riset Terapan	2	1.059.660.000	1. Bappeda 2. Dinperinaker
6	Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Respon Terhadap Perubahan Iklim)	4	2.389.629.900	1. DPRKPLH
7	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Antara Lain Air Bersih dan Sanitasi	5	102.532.085.614	1. DPUPR 2. Dinas Kesehatan 3. DPRKPLH 4. Dinkominfo
JUMLAH		44	652.031.248.818	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa total program daerah Kabupaten Temanggung yang mendukung Arah Kebijakan Nasional Tahun 2023 sejumlah 44 program. Rekapitulasi secara persentase dukungan program daerah RKPD terhadap arah kebijakan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 5.2
Persentase Dukungan Program Daerah RKPD Kabupaten Temanggung terhadap Arah Kebijakan Nasional Tahun 2023

No	Arah Kebijakan	Jumlah Program Yang Mendukung Arah Kebijakan Tahun 2023	Persentase (%)
1	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	9	20,45
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Kesehatan dan Pendidikan	3	6,82
3	Penanggulangan Pengangguran yang Disertai <i>Decent Job</i>	1	2,27
4	Mendorong Pemulihan Dunia Usaha	9	20,45
5	Revitalisasi Industri Dan Penguatan Riset Terapan	2	4,55
6	Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Respon Terhadap Perubahan Iklim)	4	9,09
7	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Antara Lain Air Bersih dan Sanitasi	3	11,36
Jumlah		44	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

Tabel 5.3
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Arah Kebijakan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

No	Arah Kebijakan RKP 2023	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2023	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	1. Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APK SD sederajat	105,05	%	215.419.632.061	Dindikpora
			Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A	0,965	angka		
			Persentase APM SD sederajat	98,3	%		
			Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI / Paket A	0,975	angka		
			Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	79,5	%		
			Persentase SD terakreditasi minimal B	96,97	%		
			Angka kelulusan SD sederajat	100	%		
			Angka putus sekolah SD sederajat	0,03	%		
			Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	53,9	%		
			Persentase APK SMP sederajat	98,59	%		

No	Arah Kebijakan RKP 2023	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2023	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
			Persentase APK SMP sederajat	1	%		
			Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B	88	%		
			Persentase APM SMP sederajat	1,055	%		
			Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B	98,5	%		
			Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	95,17	%		
			Persentase SMP terakreditasi minimal B	97,2	%		
			Angka kelulusan SMP sederajat	100	%		
			Angka putus sekolah SMP sederajat	0,2	%		
			Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	63,21	%		
			Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	76,6	%		
			Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100	%		
			Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	100	%		
			Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	51	%		
			Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	47,47	%		
			Persentase TK terakreditasi minimal B	98,64	%		
			Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	97,19	%		
			Persentase angka melek huruf usia ≥5 tahun	100	%		
			Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	15,8	angka		

No	Arah Kebijakan RKP 2023	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2023	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
			Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	105,05	%		
			Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	0,965	angka		
		2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kematian ibu	67,5	Per 100.000 kelahiran hidup	65.715.847.000	Dinas Kesehatan
			Angka kematian bayi	12	Per 1000 kelahiran hidup		
			Prevalensi balita gizi buruk	0,5	%		
			Presentase rumah tangga yang memiliki jamban	83,84	%		
			Presentase puskesmas yang sarprasnya sesuai standar	100	%		
			Ketersediaan obat sesuai kebutuhan	98	%		
			Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100	% minimal		
			Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	% maksimal		
			Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	% maksimal		
			Presentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100	% maksimal		
			Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100	%		

BAB V



No	Arah Kebijakan RKP 2023	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2023	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
			Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	72	%		
			Angka Kematian Neonatal (AKN)	7	% minimal		
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	% minimal		
			Angka Kematian Balita	13,6	Maksimal per 1000 KH		
			Presentase anak usia pendidikan dasar yang sesuai mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%		
			Cakupan warga negara indonesia usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	% minimal		
			Cakupan warga negara indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	% minimal		
			Presentase kunjungan baru di pelayanan kesehatan dasar (Cakupan rawat jalan)	43,5	%		
			Presentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah terakreditasi utama	53,85	%		
			Presentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%		
			Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%		
			Presentase ODGJ berat yang mendapatkan	100	%		

No	Arah Kebijakan RKP 2023	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2023	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
			pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				
			Presentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	100	%		
			Penanganan KLB 1x24 jam	100	%		
			Angka penemuan kasus Malaria	<1	per 1000 penduduk		
			Inciden rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	<20	per 1000 penduduk		
			Angka penemuan kasus baru Kusta	<1	per 1000 penduduk		
			Desa atau kelurahan UCI	100	%		
			Proporsi anak umur 1 tahun diimunisasi campak	95	%		
			Prevalensi gizi kurang pada anak balita (0-60 bulan)	15,5	% maksimal		
			Prevalensi stunting pada anak baduta (0-24 bulan)	27	% maksimal		
			Bayi umur < 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	80	% maksimal		
			Prevalensi anemia pada ibu hamil	20	% maksimal		
			Desa bebas rawan gizi	100	%		
			Rumah Sehat	82	%		
			Indeks kinerja RSUD	100	%		
			Cakupan nilai akreditasi RSUD	54	%		
			Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit	67,5	Per 100.000 kelahiran hidup		
		3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	90	%	24.980.373.000	DPUPR
		4. Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah tinggal yang terlayani air bersih layak			470.427.990	DPRKPLH

No	Arah Kebijakan RKP 2023	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2023	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah		
		5. Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	89,42	%	8.766.859.000	DPRKPLH		
			Persentase kawasan kumuh perkotaan	18,25	%				
		6. Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/ barehsos			1.218.124.692	Dinas Sosial		
			Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%				
			Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/ barehsos						
			Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%				
			Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/ barehsos						
			Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%				
			Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	%				
			Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan	1,22	%				



No	Arah Kebijakan RKP 2023	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2023	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
			sosial di luar panti sosial				
		7. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	%	7.230.748.100	Dinas Sosial
			Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial				
			Persentase fakir miskin yang memperoleh penanganan sosial usaha ekonomi produktif				
			Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	%		
			Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	%		
			Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial				
			8. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Tingkat Ketersediaan Energi per Kapita			
		9. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat ketersediaan Protein per Kapita			170.000.000	DKPPP
JUMLAH						326.172.011.843	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah



Tabel 5.4

Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap
Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):
Kesehatan dan Pendidikan

No	Arah Kebijakan RKP 2023	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2023	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
2	Prioritas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM): Kesehatan dan Pendidikan	1. Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APK SD sederajat	105,05	%	215.419.632.061	Dindikpora
			Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A	0,965	angka		
			Persentase APM SD sederajat	98,3	%		
			Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A	0,975	angka		
			Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	79,5	%		
			Persentase SD terakreditasi minimal B	96,97	%		
			Angka kelulusan SD sederajat	100	%		
			Angka putus sekolah SD sederajat	0,03	%		
			Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	53,9	%		
			Persentase APK SMP sederajat	98,59	%		
			Persentase APK SMP sederajat	1	%		
			Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B	88	%		
			Persentase APM SMP sederajat	1,055	%		
			Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B	98,5	%		
			Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	95,17	%		
			Persentase SMP terakreditasi minimal B	97,2	%		
			Angka kelulusan SMP sederajat	100	%		
			Angka putus sekolah SMP sederajat	0,2	%		
			Persentase pendidik SMP yang memiliki	63,21	%		

No	Arah Kebijakan RKP 2023	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2023	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
			sertifikat pendidik				
			Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	76,6			
			Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100	%		
			Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	100	%		
			Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	51	%		
			Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	47,47	%		
			Prosentase TK terakreditasi minimal B	98,64	%		
			Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	97,19	%		
			Persentase angka melek huruf usia ≥ 15 tahun	100	%		
			Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	15,8	angka		
			Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	105,05	%		
			Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	0,965	angka		
		2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	100	%	10.000.000	Dinas Kesehatan

No	Arah Kebijakan RKP 2023	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2023	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
		3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memiliki kompetensi teknis dan fungsional sesuai jabatannya	18	%	581.000.000	BKPSDM
JUMLAH						1.046.218.343.435	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah

Tabel 5.5

Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Arah Kebijakan Penanggulangan Pengangguran yang Disertai *Decent Job*

No	Arah Kebijakan RKP 2023	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2023	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
3	Penanggulangan Pengangguran yang Disertai <i>Decent Job</i>	1. Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	65	%	115.000.000	Dinperinaker
			Tingkat setengah pengangguran	5,7	%		
			Persentase tenaga kerja formal	31	%		
JUMLAH						115.000.000	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

Tabel 5.6

Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Arah Kebijakan Mendorong Pemulihan Dunia Usaha

No	Arah Kebijakan RKP 2023	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2023	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
4	Mendorong Pemulihan Dunia Usaha	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	10	%	365.000.000	DPM
			Persentase ketersediaan SDM bidang penanaman modal dan perizinan yang terlatih	100	%		
		2. Program Promosi Penanaman Modal	Persentase ketersediaan SDM bidang penanaman modal dan perizinan yang terlatih	100	%	75.000.000	DPM
			Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	100	%		
		3. Program Pelayanan	Persentase pelayanan perizinan online	100	%	409.629.400	DPM



No	Arah Kebijakan RKP 2023	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2023	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
		Penanaman Modal	Persentase perijinan yang bebas calo	100	%		
			Persentase perijinan yang diterbitkan tepat waktu	95	%		
		4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	100	%	700.000.000	DPM
			Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	100	%		
			Persentase tertanganinya gugatan hukum dalam pengadilan	100	%		
		5. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik	67	%	670.000.000	Dinkopdag
			Persentase Layanan Penerbitan SKA				
		6. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi	68,41	%	50.000.000	Dinkopdag
		7. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	95	%	135.000.000	Dinkopdag
			Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	60	%		
		8. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	35	%	756.660.000	Dinperinaker
		9. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase desa wisata unggulan	5	%	590.940.000	Dinbudpar
JUMLAH						3.752.229.400	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.



Tabel 5.7
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap
Arah Kebijakan Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan

No	Arah Kebijakan RKP 2023	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2023	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
5	Revitalisasi Industri Dan Penguatan Riset Terapan	1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan			303.000.000	Bappeda
			Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian Dan Pengkajian	100	%		
			Persentase Inovasi Daerah Yang Dikembangkan	65	%		
		2. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase IKM industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	35	%	756.660.000	Dinperinaker
JUMLAH						1.059.660.000	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah

Tabel 5.8
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap
Arah Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon Dan Transisi Energi
(Respon Terhadap Perubahan Iklim)

No	Arah Kebijakan RKP 2023	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2023	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
6	Pembangunan Rendah Karbon Dan Transisi Energi (Respon Terhadap Perubahan Iklim)	1. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang Dokumen Lingkungan Hidup	100	%	35.001.300	DPRKPLH
			2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas udara	86	Angka	858.102.400
		3. Program Pengelolaan Keaneragaman Hayati Kabupaten/Kota	Indeks kualitas tutupan lahan	74,33	%	1.320.526.200	DPRKPLH
			Inventarisasi kehati dan RTH	0,07	%		
		4. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Presentase penghargaan bidang lingkungan hidup	66,67	%	176.000.000	DPRKPLH
JUMLAH						2.389.629.900	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.



Tabel 5.9
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap
Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar
Antara Lain Air Bersih dan Sanitasi

No	Arah Kebijakan RKP 2023	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2023	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah		
7	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar antara lain Air Bersih dan Sanitasi	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	90	%	24.980.373.000	DPUPR		
		2. Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah tinggal yang terlayani air bersih layak			470.427.990	DPRKPLH		
		3. Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	89,42	%	8.766.859.000			
		4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentase rumah tangga yang memiliki jamban	83,84	%	65.715.847.000	Dinas Kesehatan		
		5. Program Aplikasi Informatika	Presentase Ketersediaan Akses Internet Publik	100	%	2.598.578.624	Dinkominfo		
			Presentase Ketersediaan Jaringan Intranet	100	%				
			Presentase Sistem Informasi Yang Terintegrasi	50	%				
			Presentase Sistem Informasi Yang Berfungsi Optimal	60	%				
		JUMLAH						102.532.085.614	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

5.1.2 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Terhadap Prioritas Nasional RKP 2023

Pemerintah Kabupaten Temanggung sepenuhnya mendukung terhadap 7 Prioritas Pemerintah Pusat yang tercantum dalam RKP 2023 melalui dukungan beberapa program beserta anggarannya. Dukungan program beserta anggaran tersebut juga mendukung tema RKP 2023



berkaitan dengan Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dimana hal tersebut salah satunya untuk kebijakan penguatan ekonomi dan pemulihan ekonomi dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19. Dukungan program dan anggaran dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 terhadap Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.10
Rekapitulasi Dukungan Program Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Terhadap Prioritas Nasional RKP Tahun 2023

No	Prioritas Nasional RKP tahun 2023	Jumlah Program Yang Mendukung Prioritas RKP Tahun 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	27	39.815.590.400	1. DKPPP 2. Dinpermades 3. Dinkopdag 4. DPM 5. DKPPP 6. Dinbudpar 7. Dinperinaker 8. Sekretariat Daerah 9. Bappeda
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	2	165.445.128.500	1. Kecamatan 2. DPUPR
3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	12	474.197.713.561	1. Dindikpora 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial 4. Dinpermades 5. Dinas Perhubungan 6. Dinas Kominfo 7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 9. Dinperinaker 10. Sekretariat DPRD 11. BKPSDM 12. DPPPAPPKB
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	5	15.078.956.000	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. BKPSDM 3. Inspektorat Daerah
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan	12	338.167.437.490	1. Dinas Kesehatan 2. DPUPR 3. DPRKPLH 4. DKPPP

No	Prioritas Nasional RKP tahun 2023	Jumlah Program Yang Mendukung Prioritas RKP Tahun 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
	ekonomi dan pelayanan dasar			5. Dinas Perhubungan
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	4	71.646.154.810	1. DPUPR 2. Satpol PP Dan Damkar 3. BPBD 4. Dinas Sosial 5. DPRKPLH
7	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	40	255.305.843.683	1. Dinas Sosial 2. Dindikpora 3. DPPPAPPKB 4. Dindukcapil 5. Dinpermades 6. Dinas Perhubungan 7. Dinas Kominfo 8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 9. Sekretariat Daerah 10. Sekretariat DPRD 11. Bappeda 12. BPKPAD 13. BKPSDM 14. Inspektorat 15. Kecamatan 16. Bakesbangpol
JUMLAH			1.361.656.824.444	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah



Tabel 5.11

Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap
PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
1	DKPPP	1 Pangan	1 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan Desa pelaksana program ketahanan pangan	27,68	%	170.000.000
			2 Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	90	%	25.000.000
2	Dinpermades	2 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	35	%	435.000.000
				Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif	32	%	
				Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	10	%	
3	Dinkopdag	3 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	22	%	30.000.000
			5 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	Persentase penambahan nilai asset dan omset koperasi	30	%	130.000.000
		4 Perdagangan	6 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik	67	%	670.000.000
				Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	70	%	
Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	90	%					

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	
				Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	34	%		
				Persentase pasar daerah dalam kondisi baik	67	%		
			7 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi	68,41	%	50.000.000	
			8 Program Pengembangan Ekspor	Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sektor perdagangan	2,56	%	200.000.000	
			9 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	95	%	135.000.000	
4	DPM	4	Penanaman Modal	10 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi	625	Milyar	365.000.000
					Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	10	%	
					Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	100	%	
			11 Program Promosi Penanaman Modal	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	100	%	75.000.000	
			12 Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan online	100	%	484.629.400	
				Persentase perijinan yang bebas calo	100	%		
				Persentase perijinan yang diterbitkan tepat waktu	95	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	
			13 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Perzinan yang diterbitkan	100	%	350.000.000	
				Persentase Pengaduan masyarakat yang terselesaikan	100	%		
				Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	100	%		
			14 Program Hubungan Industrial	Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	79	%	135.000.000	
				Persentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	58	%		
				Persentase perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	45	%		
				Persentase perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	100	%		
5	DKPPP	5 Kelautan dan Perikanan	15 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktivitas ikan nila	6,2	kg/m2	210.000.000	
				Produktivitas ikan lele	13,8	kg/m2		
				Produktivitas ikan mas	6	kg/m2		
		6	Pertanian	16 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase tersedianya data dan informasi produksi olahan hasil perikanan	100	%	10.000.000
					17 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi	63,3	kwintal/ha
		Produktivitas jagung	46	kwintal/ha				
		Produktivitas Ubi Kayu	339,8	kwintal/ha				
		Produktivitas bawang putih	79,6	kwintal/ha				
		Produktivitas bawang merah	80,15	kwintal/ha				
			Produktivitas cabai rawit	55,15	kwintal/ha			

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	
				Produktivitas cabai besar	69,5	kwintal/ha		
				Produktivitas tembakau	6,8	kwintal/ha		
				Produktivitas kopi robusta	7,25	kwintal/ha		
				Produktivitas kopi arabika	7	kwintal/ha		
				Produktivitas Cengkeh	2,45	kwintal/ha		
				Produktivitas Vanili	2,95	kwintal/ha		
				Produktivitas ternak sapi	177,6	Kg/Ekor		
				Produktivitas ternak domba	13,71	Kg/Ekor		
				Produktivitas ternak kambing	13,71	Kg/Ekor		
				Produktivitas ternak ayam ras pedaging	0,75	Kg/Ekor		
				Produktivitas ternak ayam ras petelur	10,88	Kg/Ekor		
				Produktivitas ternak ayam buras	0,7	Kg/Ekor		
			18	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	76,55	%	18.590.000.000
			19	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penanganan penyakit hewan	90	%	100.000.000
					Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	70	%	
			20	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian bencana pertanian	40,3	%	206.041.000
			21	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang naik kelas	0,98	%	167.000.000

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
6	Dinbudpar	8	Pariwisata	22	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase obyek wisata yang berkembang	41,66	%	331.172.000
				23	Program Pemasaran Pariwisata	Pertumbuhan jumlah wisatawan	21	%	129.096.000
						Lama tinggal wisatawan	1	hari	
				24	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Desa Wisata	11,76	%	354.564.000
						Persentase Desa Wisata Naik Klasifikasi	5	%	
						Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	2	%	
7	Dinperinaker	9	Perindustrian	25	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase IKM industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	35	%	756.660.000
8	Sekretariat Daerah	10	Sekretariat Daerah	26	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	%	135.432.000
						Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	100	%	
						Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	80	%	
						Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu	100	%	
						Prosentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan	100	%	
						Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	
					Persentase kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	100	%		
					Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja tepat waktu	100	%		
					Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	95	%		
9	Bappeda	11	Penelitian dan Pengembangan	27	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	100	%	303.000.000
					Persentase inovasi daerah yang dikembangkan	65	%		
10	DPUPR	12	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	97	%	25.663.600.000
					Cakupan area layanan daerah irigasi	59,32	%		
Jumlah								65.479.190.400	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah

Tabel 5.12

**Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap
PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	
1	Kecamatan	1	Kecamatan	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	100	%	7.594.628.500
					Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik	100	%		
					Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	100	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
2	DPUPR	2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Desa terfasilitasi kegiatan Bankeu/Hibah	100	%	159.850.500.000
					Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase gedung pemerintah kondisi baik	80	%	
					Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Trotoar kondisi baik	62	%	
					Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	85	%	
						Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	93,73	%	
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	88,1	%	
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi	90	%	
Jumlah							167.445.128.500		

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

Tabel 5.13
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap
PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
1	Dindikpora	1	Pendidikan	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APK SD sederajat	105,05	%	215.169.632.061
						Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A	0,965	angka	
						Persentase APM SD sederajat	98,3	%	
						Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A	0,975	angka	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	79,5	%	
				Persentase SD terakreditasi minimal B	96,97	%	
				Angka kelulusan SD sederajat	100	%	
				Angka putus sekolah SD sederajat	0,03	%	
				Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	53,9	%	
				Persentase APK SMP sederajat	98,59	%	
				Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B	1	%	
				Persentase APM SMP sederajat	88	%	
				Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B	1,055	%	
				Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98,5	%	
				Persentase ruang kelas SMP negeri dalam keadaan baik	95,17	%	
				Persentase SMP terakreditasi minimal B	97,2	%	
				Angka kelulusan SMP sederajat	100	%	
				Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	63,21	%	
				Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	76,6		
				Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100	%	
				Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	%	
				Persentase TK terakreditasi minimal B	51	%	
				Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	47,47	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran			
					Persentase angka melek huruf usia \geq 15 tahun	98,64	%				
					Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	97,19	%				
					Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	%				
					Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	15,8	angka				
				2	Kepemudaan dan Olahraga	2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	80,76	%	475,000,000
				3	Kesehatan	3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Prosentase pelatih olahraga bersertifikat	35,4	%	11,146,183,000
							Persentase prestasi olah raga	59	%		
							Persentase atlet berprestasi	21	%		
		2	Dinas Kesehatan	3	Kesehatan	4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kematian ibu	67,5	Per 100.000 kelahiran hidup	219.772.259.000
								Angka kematian bayi	12	Per 1000 kelahiran hidup	
				Prevalensi balita gizi buruk		0,5		%			
				Presentase rumah tangga yang memiliki jamban		83,84		%			
				Presentase puskesmas yang sarprasnya sesuai standar		100		%			

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				Presentase Ketersediaan obat sesuai kebutuhan	98	%	
				Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100	% minimal	
				Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	% maksimal	
				Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	% maksimal	
				Presentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100	% maksimal	
				Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100	%	
				Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	72	%	
				Angka Kematian Neonatal (AKN)	7	% minimal	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	% minimal	
				Angka Kematian Balita	13,6	Maksimal per 1000 KH	
				Presentase anak usia pendidikan dasar yang sesuai mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
				Cakupan warga negara indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	% minimal	
				Cakupan warga negara indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	% minimal	
				Presentase kunjungan baru di pelayanan kesehatan dasar (Cakupan rawat jalan)	43,5	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				Presentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah terakreditasi utama	53,85	%	
				Presentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
				Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
				Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%	
				Presentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	100	%	
				Penanganan KLB 1x24 jam	100	%	
				Angka penemuan kasus Malaria	<1	per 1000 penduduk	
				Inciden rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	<20	per 1000 penduduk	
				Angka penemuan kasus baru Kusta	<1	per 1000 penduduk	
				Persentase Desa atau kelurahan UCI	100	%	
				Proporsi anak umur 1 tahun diimunisasi campak	95	%	
				Prevalensi gizi kurang pada anak balita (0-60 bulan)	15,5	% maksimal	
				Prevalensi stunting pada anak baduta (0-24 bulan)	27	% maksimal	
				Persentase Bayi umur < 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	80	% maksimal	
				Prevalensi anemia pada ibu hamil	20	% maksimal	
				Persentase Desa bebas rawan gizi	100	%	
				Persentase Rumah Sehat	82	%	
				Cakupan nilai akreditasi RSUD	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
			5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit	54	%	461.000.000	
					Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	%		
					Tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	100	%		
					Puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi	62	%		
					Penggunaan obat rasional di puskesmas	77	%		
					Pengawasan makanan dan minuman di pasar tradisoinal	100	%		
					Sarana pelayanan mendapatkan ijin kesehatan	100	%		
Produksi industri rumah tangga	100	%							
3	Dinas Sosial	3	Sosial	6	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100	%	185.000.000
			7	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	1.273.987.100	
					Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%		
					Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran							
					Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	%							
					Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial	1,22	%							
				8	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100		%					
						Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	85		%					
						Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	95		%					
						Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	10,2		%					
						Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48		%					
				9	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	100		%	20.084.556.500				
				4	DPPPAPPKB	4	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		10	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kelurahan	100	%	301.605.000
											Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed	9,17	%	
Persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	2,04	%												
Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19th)	26,3	%												
11	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	76,21					%	6.292.841.000					
		Persentase kepesertaan KB aktif	76,21					%						
		Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	49,19					%						
		Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)	33,90					%						

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	
			12 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Indeks pembangunan keluarga	50	%	4.400.040.000	
5	Dindikcapil	5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13 Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	97,4	%	743.500.000
					Persentase kepemilikan KTP el	99	%	
					Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	72	%	
					Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu	100	%	
			14	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	75	%	15.000.000
					Persentase penerbitan akta kematian	99	%	
					Cakupan pelayanan akta perkawinan tepat waktu	100	%	
					Cakupan pelayanan akta perceraian tepat waktu	100	%	
6	Dinpermades	6	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	15 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	35	%	8.121.200.000
					Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif	32	%	
					Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	10	%	
7	Dinas perhubungan	7	Perhubungan	16 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	38,65	%	272.592.000
					Persentase potensi titik parkir yang tertangani	100	%	
					Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan	99,5	%	
					Persentase bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar	50	%	
					Persentase bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar	62,5	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
				Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar	65,22	%			
				Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	87,18	%			
				Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100	%			
				Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100	%			
				Persentase Penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	14,26	%			
8	Dinas Kominfo	8	Komunikasi dan Informatika	17	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase PPID badan publik yang aktif	20	%	237.716.000
						Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	30	%	
						Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	100	%	
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9	Kebudayaan	18	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kelompok seni budaya yang produktif	80,64	%	8.000.000
		10	Pariwisata	19	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Desa Wisata	11,76	%	236.376.000
						Persentase Desa Wisata Naik Klasifikasi	5	%	
						Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	2	%	
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11	Perpustakaan	20	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan	40	%	3.915.606.400
						Persentase perpustakaan yang aktif	35,62	%	
11	Dinperinaker	12	Tenaga kerja	21	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	65	%	50.000.000
						Persentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru atau bekerja	45	%	
						Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang	45	%	
			Tenaga kerja	22		Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	65	%	115.000.000

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat setengah pengangguran	5,7	%		
					Presentase tenaga kerja formal	31	%		
12	Sekretariat DPRD	13	Pemerintahan	23	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda	26,67	%	3.044.788.500
					Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	100	%		
					Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	58	%		
13	BKPSDM	14	Pemerintahan	24	Program Kepegawaian Daerah	Persentase penyusunan formasi pegawai	100	%	1.200.000.000
					Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu	100	%		
					Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	100	%		
					Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	80	%		
					Persentase Perempuan pada Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	48	%		
					Persentase Pelanggaran disiplin ASN	0,2	%		
					Persentase Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN	90	%		
					Persentase Pelaksanaan Updating Data Kepegawaian	95	%		
					Persentase penyelesaian pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional	100	%		
				25	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Pengawas yang memiliki Kompetensi Diklat Kepemimpinan	35	%	
					Persentase ASN yang memiliki kompetensi Teknis dan Fungsional sesuai jabatannya	18	%		
14	DPPPAPPKB	15	Pemberdayaan Perempuan dan	26	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase desa sayang ibu dan bayi	62,28	%	30.000.000
					Persentase rumah sakit sayang ibu dan bayi	100	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
		perlindungan Anak	27 Program Pemenuhan Hak Anak	Presentase terbentuknya kecamatan layak anak	60	%	20.000.000
			28 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	2,34	%	30.000.000
				Rasio perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan dokumen perencanaan	45,71	%	
			29 Program Perlindungan Perempuan	Pravelensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	0,011	%	187.497.000
				Persentase perempuan korban kekerasan	2,34	%	
			30 Program Perlindungan Khusus Anak	Presentase anak korban kekerasan	0,011	%	314.303.000
Jumlah							498.684.682.561

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah

Tabel 5.14
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap
PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
1	Dinas Kebudayaan dan pariwisata	1 Kebudayaan	1 Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kelompok seni budaya yang produktif	80,64	%	13.947.141.000
			2 Program Pembinaan Sejarah	Persentase pelestarian Sejarah Lokal	6,73	%	58.483.000
			3 Program Pestaarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase pelestarian cagar budaya	5,18	%	248.332.000
2	BKPSDM	2 Kepegawaian	4	Persentase penyusunan formasi pegawai	100	%	75.000.000

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	
					Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu	100	%	
					Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	100	%	
					Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	80	%	
					Persentase Perempuan pada Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	48	%	
					Persentase Pelanggaran disiplin ASN	0,2	%	
					Persentase Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN	90	%	
					Persentase Pelaksanaan Updating Data Kepegawaian	95	%	
					Persentase penyelesaian pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional	100	%	
3	Sekretariat Daerah	3	Sekretariat Daerah	5	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			750.000.000
					Cakupan Pilar Batas yang terinventarisir	100	%	
					Prosentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	100	%	
					Cakupan Kecamatan Tertib Administrasi	100	%	
					Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	90	%	
					Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	30	%	
					Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	100	%	
					Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	90	%	
					Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi	75	%	
4	Bakesbangpol	4	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	Program Penguatan			48.381.100
					Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	62	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	
			Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	10	%		
			7 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi	100	%	836.597.640	
			8 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan	100	%	100.000.000	
5	Dinpusip	5	Perpustakaan	9 Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan	40	%	3.985.606.400
					Persentase perpustakaan yang aktif	35,62	%	
			10 Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Cakupan naskah kuno Kabupen Temanggung dan koleksi nasional yang dilestarikan	100	%	185.000.000	
6	Bappeda	6	Penelitian dan Pengembangan	11 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	100	%	382.452.000
					Persentase inovasi daerah yang dikembangkan	65	%	
Jumlah							20.616.993.140	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

Tabel 5.15

Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap
PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
1	Dinas Kesehatan	1	Kesehatan	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kematian ibu	67,5	Per 100.000 kelahiran hidup	97.000.000.000
						Angka kematian bayi	12	Per 1000 kelahiran hidup	
						Prevalensi balita gizi buruk	0,5	%	
						Presentase rumah tangga yang memiliki jamban	83,84	%	
						Presentase puskesmas yang sarprasnya sesuai standar	100	%	
						Presentase Ketersediaan obat sesuai kebutuhan	98	%	
						Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100	% minimal	
						Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	% maksimal	
						Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	% maksimal	
						Presentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100	% maksimal	
						Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100	%	
						Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	72	%	
						Angka Kematian Neonatal (AKN)	7	% minimal	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	% minimal	
				Angka Kematian Balita	13,6	Maksimal per 1000 KH	
				Presentase anak usia pendidikan dasar yang sesuai mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
				Cakupan warga negara indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	% minimal	
				Cakupan warga negara indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	% minimal	
				Presentase kunjungan baru di pelayanan kesehatan dasar (Cakupan rawat jalan)	43,5	%	
				Presentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah terakreditasi utama	53,85	%	
				Presentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
				Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
				Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%	
				Presentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	100	%	
				Penanganan KLB 1x24 jam	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				Angka penemuan kasus Malaria	<1	per 1000 penduduk	
				Inciden rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	<20	per 1000 penduduk	
				Angka penemuan kasus baru Kusta	<1	per 1000 penduduk	
				Persentase Desa atau kelurahan UCI	100	%	
				Proporsi anak umur 1 tahun diimunisasi campak	95	%	
				Prevalensi gizi kurang pada anak balita (0-60 bulan)	15,5	% maksimal	
				Prevalensi stunting pada anak baduta (0-24 bulan)	27	% maksimal	
				Persentase Bayi umur < 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	80	% maksimal	
				Prevalensi anemia pada ibu hamil	20	% maksimal	
				Persentase Desa bebas rawan gizi	100	%	
				Persentase Rumah Sehat	82	%	
				Cakupan nilai akreditasi RSUD	100	%	
				Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit	54	%	
				Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
2	DPUPR	2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	97	%	25.663.600.000
					Cakupan area layanan daerah irigasi	59,32	%		
				3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	90	%	16.192.686.500
				4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	50	%	21.999.686.500
				5	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Desa terfasilitasi kegiatan Bankeu/Hibah	100	%	125.000.000
				6	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase gedung pemerintah kondisi baik	80	%	2.150.000.000
				7	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Trotoar kondisi baik	62	%	250.000.000
				8	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	85	%	159.850.500.000
						Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	93,73	%	
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	88,1	%	200.000.000				
3	DPRKPLH	3	Perumahan dan Kawasan Permukiman	10	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	5	%	470.427.990
					Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	86,8	%		
				11	Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	89,42	%	6.066.859.000
						Persentase kawasan kumuh perkotaan	18,25	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	
				Persentase warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	%		
				Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100	%		
4	DKPPP	4	Pangan	12 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rasio ketersediaan pangan	100	%	1.200.000.000
5	Dinas perhubungan	5	Perhubungan	13 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadahi	38,65	%	23.191.364.000
				Persentase potensi titik parkir yang tertangani	100	%		
				Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan	99,5	%		
				Persentase bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar	50	%		
				Persentase bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar	62,5	%		
				Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar	65,22	%		
				Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	87,18	%		
				Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100	%		
				Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
					Persentase Penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	14,26	%		
6	Dinkominfo	6	Komunikasi dan Informatika	14	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase PPID badan publik yang aktif	20	%	5.496.552.400
						Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	30	%	
						Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	100	%	
				15	Program Aplikasi Informatika	Persentase ketersediaan jaringan intranet	100	%	2.938.578.624
			Persentase sistem informasi yang terintegrasi	50	%				
			Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	60	%				
			Persentase ketersediaan akses internet publik	100	%				
		7	Persandian	16	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat penilaian persiapan/ pengelolaan resiko keamanan informasi	1	%	97.752.500
Jumlah									362.893.007.514

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

Tabel 5.16

Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap
PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	
1	DPUPR	1 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	97	%	100.000.000	
				Cakupan area layanan daerah irigasi	59,32	%		
2	Satpol PP Dan Damkar	2 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	2 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	100	%	1.256.990.000	
				Rasio Linmas per RT	1,62	Rasio		
				Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100	%		
			3	3 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	61	%	1.669.620.000
					Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	69,8	%	
					Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten	44	angka	
					Persentase aparatur yang memenuhi standar kualifikasi	44	%	
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	%				
3	BPBD	4	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan desa tangguh bencana	10,47	%	2.825.938.800	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
		Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	100	%	
				Persentase Tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana	100	%	
				Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	86,4	%	
				Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	100	%	
				Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana	100	%	
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%	
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%	
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%	
4	Dinas Sosial	3 Sosial	5 Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	100	%	28.000.000
5	DPRKPLH	4 Lingkungan Hidup	6 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	62,73	%	184.273.810
				Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				keputusan kelayakan Lingkungan Hidup			
			7 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	46	Angka	858.102.400
				Indeks Kualitas Udara	86	Angka	
			8 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	74,33	%	1.320.526.200
				Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung	0,067	%	
				Cakupan RTH Publik	0,07	%	
			9 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha yang memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3	100	%	10.000.000
			10 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	100	%	35.001.300
			11 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	26,88	%	176.000.000
			12 Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	38,2	%	63.181.702.300
				Cakupan layanan persampahan	55	%	
						Jumlah	71.646.154.810

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

Tabel 5.17

Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap
PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	
1	Dinas Sosial	1 Sosial	1 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	100	%	92.920.000	
2	Dindikpora	2 Kepemudaan Dan Olah Raga	2 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	80,76	%	12.065.000.000	
3	DPPPAPPKB	3 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	2,34	%	30.000.000	
				Rasio perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan dokumen perencanaan	45,71	%		
			4 Program Perlindungan Perempuan	Pravelensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	0,011	%	187.497.000	
					Persentase perempuan korban kekerasan	0,011	%	
		5 Program Perlindungan Khusus Anak	Presentase anak korban kekerasan	0,011	%	314.303.000		
		4 Pengendalian Penduduk Dan KB	6 Program Pengendalian Penduduk	Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kelurahan	100	%	146.350.000	
				Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed	9,17	%		
Persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	2,04			%				
Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19th)	26,3	%						
		7 Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	76,21	%	6.277.837.000		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
				Persentase kepesertaan KB aktif	76,21	%			
				Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	49,19	%			
Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)	33,90	%							
			8	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Indeks pembangunan keluarga	50	%	4.300.040.000	
4	Dindikcapil	5	Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil	9	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	97,4	%	743.500.000
						Persentase kepemilikan KTP el	99	%	
						Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	72	%	
						Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu	100	%	
				10	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	75	%	15.000.000
						Persentase penerbitan akta kematian	99	%	
						Cakupan pelayanan akta perkawinan tepat waktu	100	%	
						Cakupan pelayanan akta perceraian tepat waktu	100	%	
				11	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	60	%	631.500.000
						Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	90	%	
5	Dinpermades	6	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	12	Program Penataan Desa	Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada	40	%	12.200.000.000
						Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa	37	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
			13 Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	90	%	115.666.000.000
				Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	90	%	
				Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	85	%	
				Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	100	%	
				Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu	85	%	
				Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa	10	%	
				Persentase desa yang tertib pengelolaan aset	85	%	
6	Dinas Perhubungan	7 Perhubungan	14 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadahi	38,65	%	3.316.048.000
				Persentase potensi titik parkir yang tertangani	100	%	
				Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan	99,5	%	
				Persentase bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar	50	%	
				Persentase bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar	62,5	%	
				Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar	65,22	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
				Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	87,18	%			
				Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100	%			
				Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100	%			
				Persentase Penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	14,26	%			
7	Dinas Kominfo	8	Komunikasi Dan Informatika	15	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase PPID badan publik yang aktif	20	%	5.230.084.000
						Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	30	%	
						Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	100	%	
						Persentase ketersediaan jaringan intranet	100	%	
		Persentase sistem informasi yang terintegrasi	50	%					
		Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	60	%					
				9	Statistik	17	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan ketersediaan data makro daerah	100
		10	Persandian	18	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat penilaian persiapan/ pengelolaan resiko keamanan informasi	1	%	97.752.500
8	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	11	Kearsipan	19	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Cakupan naskah kuno Kabupaten Temanggung dan koleksi nasional yang dilestarikan	100	%	185.000.000

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
			20	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	31,98	%	42.050.000	
9	Sekretariat Daerah	12	Sekretariat Daerah	21	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pilar Batas yang terinventarisir	100	%	37.442.127.500
						Prosentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	100	%	
						Cakupan Kecamatan Tertib Adminstrasi	100	%	
						Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan kegamaan kondisi baik	90	%	
						Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	30	%	
						Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	100	%	
						Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	90	%	
						Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi	75	%	
				22	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	%	2.882.706.500
						Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	100	%	
						Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	80	%	
						Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu	100	%	
						Prosentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan	100	%	
						Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	
					Persentase kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	100	%	
					Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja tepat waktu	100	%	
					Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	95	%	
10	Sekretariat DPRD	13	Sekretariat DPRD	23	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD			13.439.347.293
					Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda	26,67	%	
					Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	100	%	
					Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	58	%	
11	Bappeda	14	Perencanaan	24	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah			1.022.000.000
					Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100	%	
					Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	95	%	
				25	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			550.000.000
					Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pembangunan manusia	90	%	
					Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	90	%	
					Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi dan sumber daya alam	90	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
					Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	90	%		
12	BPKPAD	15	Keuangan	26	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	100	%	17.627.423.796
						Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	89,96	%	
						Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100	%	
						Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100	%	
						Persentase realisasi keuangan	93	%	
						Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	90	%	
						Opini BPK atas LKPD	WTP	-	
				27	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	88,1	%	1.291.180.400
						Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	99,1	%	
				28	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	1,27	%	991.814.400
						Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	100	%	
						Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100	%	
						Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	95	%	
						Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	95	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
13	BKPSDM	16	Kepegawaian	29	Program Kepegawaian Daerah	Persentase penyusunan formasi pegawai	100	%	290.000.000
						Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu	100	%	
						Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	100	%	
						Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	80	%	
						Persentase Perempuan pada Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	48	%	
						Persentase Pelanggaran disiplin ASN	0,2	%	
						Persentase Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN	90	%	
						Persentase Pelaksanaan Updating Data Kepegawaian	95	%	
						Persentase penyelesaian pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional	100	%	
14	Inspektorat	17	Inspektorat Daerah	30	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	100	%	1.049.716.000
						Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	46	%	
						Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	23	%	
						Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	48	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	
			31 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Nilai maturitas SPIP	3,3	Angka	299.716.000	
				Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) / Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	60	%		
				Persentase tindak lanjut aduan Whistle blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	100	%		
				Nilai Survey Penilaian Integritas	81,97	Angka		
15	Kecamatan	18	Kecamatan	32 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	100	%	2.622.266.800
					Persentase realisasi penerimaan PBB	100	%	
				33 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	100	%	7.498.194.280
					Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik	100	%	
					Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	100	%	
				34 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	100	%	264.000.000
				35 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tempat ibadah kondisi baik	80	%	1.391.000
				36 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	1	%	10.000.000
					Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
			37	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	62	%	48.381.100	
					Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	10	%		
16	Bakesbangpol	19	Kesatuan Bangsa Dan Politik	38	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya	87	%	1.736.687.850
					Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik	30	%		
					Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	30	%		
			39	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan	100	%	100.000.000	
			40	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi	100	%	836.597.640	
			41	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah	100	%	1.035.000.000	
					Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	10	%		
					Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	35	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
17	Dinperinaker	20	Perindustrian	42	Program Hubungan Industrial	Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	79	%	135.000.000
						Persentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	58	%	
						Persentase perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	45	%	
						Persentase perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	100	%	
Jumlah								255.440.843.683	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

Tabel 5.18

Dukungan Program Daerah Kabupaten Temanggung terhadap Kegiatan Prioritas Masing-Masing PN Tahun 2023

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
1	PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan					
	Program Prioritas 1.1: Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)					
	Kegiatan Prioritas 1.1: 1. Akselerasi pengembangan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) 2. Peningkatan pasokan bahan bakar nabati 3. Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi 4. Peningkatan pemenuhan energi domestic 5. Pengembangan industri pendukung EBT	(Energi bukan kewenangan Kabupaten)	-	-	-	-

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
Program Prioritas 1.2: Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi						
	Kegiatan Prioritas 1.2: 1. Pemantapan kawasan berfungsi lindung (kumulatif) 2. Pengelolaan hutan berkelanjutan 3. Penyediaan air untuk pertanian 4. Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas 5. Pemeliharaan, pemulihan dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau 6. Pengembangan waduk multiguna	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	97	%	29.963.600.000
			Cakupan area layanan daerah irigasi	59,32	%	
Program Prioritas 1.3: Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan						
	Kegiatan Prioritas 1.3: 1. Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi 2. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok 3. Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar 4. Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian dan digitalisasi pertanian 5. Peningkatan tata Kelola sistem pangan nasional	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan Desa pelaksana program ketahanan pangan	27,68	%	170.000.000
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	90	%	25.000.000
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktivitas ikan nila	6,2	kg/m2	239.950.000
			Produktivitas ikan lele	13,8	kg/m2	
			Produktivitas ikan mas	6	kg/m2	
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase tersedianya data dan informasi produksi olahan hasil perikanan	100	%	10.000.000
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi	63,3	kwintal/ha	13.917.897.000
			Produktivitas jagung	46	kwintal/ha	
			Produktivitas Ubi Kayu	339,8	kwintal/ha	
			Produktivitas bawang putih	79,6	kwintal/ha	
Produktivitas bawang merah	80,15		kwintal/ha			
Produktivitas cabai rawit	55,15		kwintal/ha			
	Produktivitas cabai besar	69,5	kwintal/ha			

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			Produktivitas tembakau	6,8	kwintal/ha	
			Produktivitas kopi robusta	7,25	kwintal/ha	
			Produktivitas kopi arabika	7	kwintal/ha	
			Produktivitas Cengkeh	2,45	kwintal/ha	
			Produktivitas Vanili	2,95	kwintal/ha	
			Produktivitas ternak sapi	177,6	Kg/Ekor	
			Produktivitas ternak domba	13,71	Kg/Ekor	
			Produktivitas ternak kambing	13,71	Kg/Ekor	
			Produktivitas ternak ayam ras pedaging	0,75	Kg/Ekor	
			Produktivitas ternak ayam ras petelur	10,88	Kg/Ekor	
		Produktivitas ternak ayam buras	0,7	Kg/Ekor		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	76,55	%	19.716.260.000
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penanganan penyakit hewan	90	%	500.000.000
Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	70		%			
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian bencana pertanian	40,3	%	500.000.000		
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang naik kelas	0,98	%	267.000.000		
Program Prioritas 1.4: Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan						
1. Peningkatan pengelolaan wilayah Pengelolaan perikanan (WPP) dan penataan ruang laut 2. Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktivitas ikan nila	6,2	kg/m2	239.950.000	
		Produktivitas ikan lele	13,8	kg/m2		
		Produktivitas ikan mas	6	kg/m2		
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase tersedianya data dan informasi produksi olahan hasil perikanan	100	%	10.000.000	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
	3. Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan 4. Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap Pengelolaan sumber daya 5. Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan					
Program Prioritas 1.5: Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi						
	Kegiatan Prioritas 1.5: 1. Peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar 2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha 3. Peningkatan kapasitas, jangkauan dan inovasi koperasi 4. Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha 5. Peningkatan nilai tambah usaha sosial	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	22	%	30.000.000
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Persentase penambahan nilai asset dan omset koperasi	30	%	130.000.000
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	35	%	8.606.200.000
			Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif	32	%	
			Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	10	%	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik	67	%	8.769.303.700
			Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	70	%	
			Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	90	%	
			Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	34	%	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi	68,41	%	30.000.000

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
		Program Pengembangan Ekspor	Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sektor perdagangan	2,56	%	400.000.000
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perengkapannya yang ditera ulang	95	%	135.000.000
Program Prioritas 1.6: Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi						
	Kegiatan Prioritas 1.6: 1. Peningkatan industry pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman dan non agro yang terintegrasi hulu hilir 2. Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industry terutama di luar jawa 3. Peningkatan daya saing destinasi dan industry pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam yang didukung penguatan rantai pasok 4. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital 5. Perbaikan iklim usaha dan Peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan 6. Pengembangan industry halal	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	35	%	906.660.000
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase obyek wisata yang berkembang	41,66	%	331.172.000
		Program Pemasaran Pariwisata	Pertumbuhan jumlah wisatawan Lama tinggal wisatawan	21 1	% hari	129.096.000
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Desa Wisata Persentase Desa Wisata Naik Klasifikasi Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	11,76 5 2	% % %	590.940.000
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	625 10 100	Milyar % %	150.000.000
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	100	%	410.000.000
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Perzinan yang diterbitkan Persentase Pengaduan masyarakat yang terselesaikan Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	100 100 100	% % %	385.000.000
		Program Hubungan Industrial	Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	79	%	135.000.000

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			Persentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	58	%	3.023.138.500
			Persentase perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	45	%	
			Persentase perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	100	%	
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	%	
			Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	100	%	
			Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	80	%	
			Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu	100	%	
			Prosentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan	100	%	
			Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	100	%	
			Persentase kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	100	%	
			Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja tepat waktu	100	%	
			Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	95	%	
Program Prioritas 1.7: Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)						
	Kegiatan Prioritas 1.7:	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	35	%	906.660.000

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
1. Peningkatan diversifikasi, nilai tambah dan daya saing produk ekspor dan jasa 2. Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor 3. Pengelolaan impor 4. Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif 5. Peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global 6. Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding dan produk kreatif 7. Peningkatan efektivitas preferential trade agreement (PTA)/free trade agreement (FTA)/comprehensive economic partnership agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase obyek wisata yang berkembang	41,66	%	331.172.000
		Program Pemasaran Pariwisata	Pertumbuhan jumlah wisatawan	21	%	129.096.000
			Lama tinggal wisatawan	1	hari	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Desa Wisata	11,76	%	590.940.000
			Persentase Desa Wisata Naik Klasifikasi	5	%	
			Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	2	%	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi	68,41	%	30.000.000
		Program Pengembangan Ekspor	Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sektor perdagangan	2,56	%	400.000.000
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perllengkapannya yang ditera ulang	95	%	135.000.000
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	%	3.023.138.500
			Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	100	%	
			Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	80	%	
			Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu	100	%	
			Prosentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan	100	%	
Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	100		%			
Persentase kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	100		%			

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja tepat waktu	100	%	
			Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	95	%	
Program Prioritas 1.8: Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing						
	Kegiatan Prioritas 1.8: 1. Peningkatan pendalaman sektor keuangan 2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan industry 4.0 3. Peningkatan sistem logistic dan stabilitas harga 4. Peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industry pengolahan dan pariwisata 5. Reformasi fiscal 6. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi digital	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	35	%	906.660.000
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase obyek wisata yang berkembang	41,66	%	331.172.000
		Program Pemasaran Pariwisata	Pertumbuhan jumlah wisatawan	21	%	129.096.000
			Lama tinggal wisatawan	1	hari	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Desa Wisata	11,76	%	590.940.000
			Persentase Desa Wisata Naik Klasifikasi	5	%	
			Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	2	%	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi	68,41	%	30.000.000
		Program Pengembangan Ekspor	Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sektor perdagangan	2,56	%	400.000.000
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perrlengkapannya yang ditera ulang	95	%	135.000.000
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	%	3.023.138.500
			Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	100	%	
			Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	80	%	
	Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu		100	%		

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	
			Prosentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan	100	%		
			Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	100	%		
			Persentase kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	100	%		
			Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja tepat waktu	100	%		
			Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	95	%		
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi	625	Milyar		150.000.000
			Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	10	%		
			Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	100	%		
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	100	%		410.000.000
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Perzinan yang diterbitkan	100	%		385.000.000
			Persentase Pengaduan masyarakat yang terselesaikan	100	%		
			Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	100	%		
		Program Hubungan Industrial	Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	79	%		135.000.000
			Persentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	58	%		
			Persentase perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	45	%		
			Persentase perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan yang	100	%		

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	
			diselesaikan dengan perjanjian bersama				
		Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	100	%	382.452.000	
			Persentase inovasi daerah yang dikembangkan	65	%		
2	PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan						
	Program Prioritas 2.1: Pembangunan Wilayah Sumatera	(Kabupaten Temanggung berada di Wilayah Jawa)	-	-	-	-	
	Program Prioritas 2.2: Pembangunan Wilayah Jawa-Bali						
	Kegiatan Prioritas 2.2: 1. Pengembangan kawasan strategis 2. Pengembangan sektor unggulan 3. Pengembangan kawasan perkotaan 4. Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan transmigrasi 5. Kelembagaan dan keuangan daerah	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	100	%	18.831.358.400	
				Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik	100		%
				Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	100		%
			Program Pengembangan Permukiman	Persentase Desa terfasilitasi kegiatan Bankeu/Hibah	100	%	125.000.000
			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase gedung pemerintah kondisi baik	80	%	9.050.000.000
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Trotoar kondisi baik	62	%	250.000.000
				Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	85	%
					Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	93,73	%
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	88,1	%	650.000.000
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi	90	%	0

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
	Program Prioritas 2.3: Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara	(Kabupaten Temanggung berada di Wilayah Jawa)	-	-	-	-
	Program Prioritas 2.4: Pembangunan Wilayah Kalimantan	(Kabupaten Temanggung berada di Wilayah Jawa)	-	-	-	-
	Program Prioritas 2.5: Pembangunan Wilayah Sulawesi	(Kabupaten Temanggung berada di Wilayah Jawa)	-	-	-	-
	Program Prioritas 2.6: Pembangunan Wilayah Maluku	(Kabupaten Temanggung berada di Wilayah Jawa)	-	-	-	-
	Program Prioritas 2.7: Pembangunan Wilayah Papua	(Kabupaten Temanggung berada di Wilayah Jawa)	-	-	-	-
3	PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing					
	Program Prioritas 3.1: Pengendalian penduduk dan penguatan tata Kelola kependudukan					
	Kegiatan Prioritas 3.1: 1. Percepatan cakupan administrasi kependudukan 2. Integrasi sistem administrasi kependudukan 3. Pendampingan dan layanan terpadu 4. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kelurahan	100	%	301.605.000
Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed			9,17	%		
Persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun			2,04	%		
Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19th)			26,3	%		
Program Pembinaan Keluarga Berencana		Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	76,21	%	6.292.841.000	
		Persentase kepesertaan KB aktif	76,21	%		
		Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	49,19	%		

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)	33,90	%	
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Indeks pembangunan keluarga	50	%	4.400.040.000
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	97,4	%	743.500.000
			Persentase kepemilikan KTP el	99	%	
			Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	72	%	
			Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu	100	%	
		Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	75	%	15.000.000
			Persentase penerbitan akta kematian	99	%	
			Cakupan pelayanan akta perkawinan tepat waktu	100	%	
			Cakupan pelayanan akta perceraian tepat waktu	100	%	
Program Prioritas 3.2: Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial						
	Kegiatan Prioritas 3.2: 1. Sistem jaminan sosial nasional 2. Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran 3. Perlindungan sosial adaptif 4. Kesejahteraan sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100	%	670.000.000
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	1.568.124.692
			Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	
			Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	%	16.262.618.000
			Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial	1,22	%	
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	%	
			Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	85	%	
			Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	95	%	
			Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	10,2	%	
			Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	%	
		Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	100	%	2.798.000.000
Program Prioritas 3.3: Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan						
	Kegiatan Prioritas 3.3: 1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi 2. Percepatan perbaikan gizi 3. Peningkatan pengendalian penyakit 4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kematian ibu	67,5	Per 100.000 kelahiran hidup	317.081.259.000
			Angka kematian bayi	12	Per 1000 kelahiran hidup	
			Prevalensi balita gizi buruk	0,5	%	
			Presentase rumah tangga yang memiliki jamban	83,84	%	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
5.	Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan		Presentase puskesmas yang sarprasnya sesuai standar	100	%	
			Presentase Ketersediaan obat sesuai kebutuhan	98	%	
			Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100	% minimal	
			Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	% maksimal	
			Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	% maksimal	
			Presentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100	% maksimal	
			Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100	%	
			Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	72	%	
			Angka Kematian Neonatal (AKN)	7	% minimal	
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	% minimal	
			Angka Kematian Balita	13,6	Maksimal per 1000 KH	
			Presentase anak usia pendidikan dasar yang sesuai mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
			Cakupan warga negara indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	% minimal	
			Cakupan warga negara indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	% minimal	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			Presentase kunjungan baru di pelayanan kesehatan dasar (Cakupan rawat jalan)	43,5	%	
			Presentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah terakreditasi utama	53,85	%	
			Presentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
			Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
			Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%	
			Presentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	100	%	
			Penanganan KLB 1x24 jam	100	%	
			Angka penemuan kasus Malaria	<1	per 1000 penduduk	
			Inciden rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	<20	per 1000 penduduk	
			Angka penemuan kasus baru Kusta	<1	per 1000 penduduk	
			Persentase Desa atau kelurahan UCI	100	%	
			Proporsi anak umur 1 tahun diimunisasi campak	95	%	
			Prevalensi gizi kurang pada anak balita (0-60 bulan)	15,5	% maksimal	
			Prevalensi stunting pada anak baduta (0-24 bulan)	27	% maksimal	
			Persentase Bayi umur < 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	80	% maksimal	
			Prevalensi anemia pada ibu hamil	20	% maksimal	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			Persentase Desa bebas rawan gizi	100	%	450.000.000
			Persentase Rumah Sehat	82	%	
			Cakupan nilai akreditasi RSUD	100	%	
			Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit	54	%	
			Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	%	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi	62	%	
			Penggunaan obat rasional di puskesmas	77	%	
			Pengawasan makanan dan minuman di pasar tradisoinal	100	%	
			Sarana pelayanan mendapatkan ijin kesehatan	100	%	
			Produksi industri rumah tangga	100	%	
Program Prioritas 3.4: Peningkatan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas						
	Kegiatan Prioritas 3.4: 1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran 2. Afirmasi akses dan percepatan wajib belajar 12 tahun 3. Peningkatan Pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan 4. Penjaminan mutu Pendidikan 5. Peningkatan tata Kelola Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APK SD sederajat	105,05	%	215.469.632.061
			Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A	0,965	angka	
			Persentase APM SD sederajat	98,3	%	
			Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A	0,975	angka	
			Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	79,5	%	
			Persentase SD terakreditasi minimal B	96,97	%	
			Angka kelulusan SD sederajat	100	%	
			Angka putus sekolah SD sederajat	0,03	%	
			Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	53,9	%	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			Persentase APK SMP sederajat	98,59	%	
			Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B	1	%	
			Persentase APM SMP sederajat	88	%	
			Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B	1,055	%	
			Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98,5	%	
			Persentase ruang kelas SMP negeri dalam keadaan baik	95,17	%	
			Persentase SMP terakreditasi minimal B	97,2	%	
			Angka kelulusan SMP sederajat	100	%	
			Angka putus sekolah SMP sederajat	0,2	%	
			Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	63,21	%	
			Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	76,6		
			Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100	%	
			Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	%	
			Persentase TK terakreditasi minimal B	51	%	
			Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	47,47	%	
			Persentase angka melek huruf usia \geq 15 tahun	98,64	%	
			Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	97,19	%	
			Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang	100	%	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
			Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	15,8	angka	
Program Prioritas 3.5: Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda						
Kegiatan Prioritas 3.5: 1. Pemenuhan hak dan perlindungan anak 2. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan 3. Kualitas pemuda	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase desa sayang ibu dan bayi	62,28	%	60.000.000	
		Persentase rumah sakit sayang ibu dan bayi	100	%		
	Program Pemenuhan Hak Anak	Presentase terbentuknya kecamatan layak anak	60	%	20.000.000	
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	2,34	%	60.000.000
	Rasio perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan dokumen perencanaan		45,71	%		
	Program Perlindungan Perempuan	Pravelensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	0,011	%	187.497.000	
		Persentase perempuan korban kekerasan	0,011	%		
	Program Perlindungan Khusus Anak	Presentase anak korban kekerasan	0,011	%	314.303.000	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	80,76	%	475.000.000		
Program Prioritas 3.6: Pengentasan kemiskinan						
Kegiatan Prioritas 3.6: 1. Akselerasi penguatan ekonomi keluarga 2. Keperantaraan usaha dan dampak sosial 3. Reforma agraria	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	35	%	8.606.200.000	
		Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif	32	%		
		Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	10	%		

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
4.	Perhutanan sosial	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Desa Wisata	11,76	%	590.940.000
			Persentase Desa Wisata Naik Klasifikasi	5	%	
			Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	2	%	
Program Prioritas 3.7: Peningkatan produktivitas dan daya saing						
	Kegiatan Prioritas 3.7: 1. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri 2. Penguatan Pendidikan tinggi berkualitas 3. Peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi 4. Prestasi olahraga	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	65	%	655.425.000
			Persentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru atau bekerja	45	%	
			Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang	45	%	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	65	%	115.000.000
			Tingkat setengah pengangguran	5,7	%	
			Persentase tenaga kerja formal	31	%	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	35,4	%	11.146.183.000
			Persentase prestasi olah raga	59	%	
			Persentase atlet berprestasi	21	%	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda	26,67	%	16.884.135.793
			Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	100	%	
			Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	58	%	
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase penyusunan formasi pegawai	100	%	1.565.000.000
			Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu	100	%	
			Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	100	%	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	80	%	
			Persentase Perempuan pada Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	48	%	
			Persentase Pelanggaran disiplin ASN	0,2	%	
			Persentase Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN	90	%	
			Persentase Pelaksanaan Updating Data Kepegawaian	95	%	
			Persentase penyelesaian pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional	100	%	
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Pengawas yang memiliki Kompetensi Diklat Kepemimpinan	35	%	611.000.000
			Persentase ASN yang memiliki kompetensi Teknis dan Fungsional sesuai jabatannya	18	%	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadahi	38,65	%	28.068.004.000
			Persentase potensi titik parkir yang tertangani	100	%	
			Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan	99,5	%	
			Persentase bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar	50	%	
			Persentase bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar	62,5	%	
			Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar	65,22	%	



No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	87,18	%	
			Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100	%	
			Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100	%	
			Persentase Penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	14,26	%	
4	PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan					
	Program Prioritas 4.1: Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter					
	Kegiatan Prioritas 4.1: 1. Revolusi mental dalam sistem Pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong dan budi pekerti 2. Revolusi mental dalam tata Kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani dan responsive 3. Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter 4. Penguatan pusat-pusat perubahan Gerakan revolusi mental 5. Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila 6. Pembinaan ideologi Pancasila, Pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pilar Batas yang terinventarisir	100	%	38.261.070.000
Prosentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu			100	%		
Cakupan Kecamatan Tertib Admistrasi			100	%		
Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan kegamaan kondisi baik			90	%		
Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati			30	%		
Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH			100	%		
Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi			90	%		
Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi		75	%			
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	62	%	48.381.100
			Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	10	%	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
	untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi	100	%	836.597.640
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase penyusunan formasi pegawai	100	%	1.565.000.000
			Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu	100	%	
			Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	100	%	
			Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	80	%	
			Persentase Perempuan pada Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	48	%	
			Persentase Pelanggaran disiplin ASN	0,2	%	
			Persentase Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN	90	%	
			Persentase Pelaksanaan Updating Data Kepegawaian	95	%	
			Persentase penyelesaian pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional	100	%	
Program Prioritas 4.2: Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia						
	Kegiatan Prioritas 4.2: 1. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal 2. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kelompok seni budaya yang produktif	80,64	%	13.580.141.000
		Program Pembinaan Sejarah	Persentase pelestarian Sejarah Lokal	6,73	%	118.483.000

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
3. Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif 4. Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia 5. Pengembangan tata Kelola pembangunan kebudayaan		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase pelestarian cagar budaya	5,18	%	248.332.000
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pilar Batas yang terinventarisir	100	%	38.261.070.000
			Prosentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	100	%	
			Cakupan Kecamatan Tertib Adminstrasi	100	%	
			Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	90	%	
			Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	30	%	
			Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	100	%	
			Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	90	%	
			Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi	75	%	
Program Prioritas 4.3: Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial						
1. Penguatan cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama 2. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama 3. Penyelarasan relasi agama dan budaya 4. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pilar Batas yang terinventarisir	100	%	38.261.070.000	
		Prosentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	100	%		
		Cakupan Kecamatan Tertib Adminstrasi	100	%		
		Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	90	%		
		Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	30	%		
		Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	100	%		

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
	5. Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan		Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	90	%	836.597.640
			Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi	75	%	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, masyarakat, dan ekonomi	100	%	
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	62	%	
			Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	10	%	
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan	100	%	100.000.000		
Program Prioritas 4.4: Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter						
	Kegiatan Prioritas 4.4: 1. Peningkatan budaya literasi 2. Pengembangan, pembinaan dan perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah serta sastra 3. Pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas dan daya cipta 4. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan	40	%	3.985.606.400
			Persentase perpustakaan yang aktif	35,62	%	
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Cakupan naskah kuno Kabupaten Temanggung dan koleksi nasional yang dilestarikan	100	%	185.000.000
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	100	%
Persentase inovasi daerah yang dikembangkan	65	%				
5	PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar					
Program Prioritas 5.1: Infrastruktur pelayanan dasar						
	Kegiatan Prioritas 5.1:	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	Angka kematian ibu	67,5	Per 100.000 kelahiran hidup	317.081.259.000

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
1. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau 2. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman 3. Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan 4. Keselamatan dan keamanan transportasi 5. Ketahanan kebencanaan infrastruktur 6. Waduk multipurpose dan modernisasi irigasi	Upaya Kesehatan Masyarakat		Angka kematian bayi	12	Per 1000 kelahiran hidup	
			Prevalensi balita gizi buruk	0,5	%	
			Presentase rumah tangga yang memiliki jamban	83,84	%	
			Presentase puskesmas yang sarprasnya sesuai standar	100	%	
			Presentase Ketersediaan obat sesuai kebutuhan	98	%	
			Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100	% minimal	
			Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	% maksimal	
			Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	% maksimal	
			Presentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100	% maksimal	
			Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100	%	
			Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	72	%	
			Angka Kematian Neonatal (AKN)	7	% minimal	
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	% minimal	
			Angka Kematian Balita	13,6	Maksimal per 1000 KH	
Presentase anak usia pendidikan dasar yang sesuai mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%				

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			Cakupan warga negara indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	% minimal	
			Cakupan warga negara indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	% minimal	
			Presentase kunjungan baru di pelayanan kesehatan dasar (Cakupan rawat jalan)	43,5	%	
			Presentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah terakreditasi utama	53,85	%	
			Presentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
			Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
			Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%	
			Presentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	100	%	
			Penanganan KLB 1x24 jam	100	%	
			Angka penemuan kasus Malaria	<1	per 1000 penduduk	
			Inciden rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	<20	per 1000 penduduk	
			Angka penemuan kasus baru Kusta	<1	per 1000 penduduk	
			Persentase Desa atau kelurahan UCI	100	%	
			Proporsi anak umur 1 tahun diimunisasi campak	95	%	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			Prevalensi gizi kurang pada anak balita (0-60 bulan)	15,5	% maksimal	
			Prevalensi stunting pada anak baduta (0-24 bulan)	27	% maksimal	
			Persentase Bayi umur < 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	80	% maksimal	
			Prevalensi anemia pada ibu hamil	20	% maksimal	
			Persentase Desa bebas rawan gizi	100	%	
			Persentase Rumah Sehat	82	%	
			Cakupan nilai akreditasi RSUD	100	%	
			Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit	54	%	
			Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	%	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	97	%	29.963.600.000
			Cakupan area layanan daerah irigasi	59,32	%	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	90	%	16.192.686.500
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	50	%	7.457.000.000
		Program Pengembangan Permukiman	Persentase Desa terfasilitasi kegiatan Bankeu/Hibah	100	%	125.000.000
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	88,1	%	650.000.000
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	5	%	470.427.990
			Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	86,8	%	
		Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	89,42	%	6.066.859.000
			Persentase kawasan kumuh perkotaan	18,25	%	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	
			Persentase warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	%	28.068.004.000	
			Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100	%		
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadahi	38,65	%		
			Persentase potensi titik parkir yang tertangani	100	%		
			Presentase kendaraan bermotor yang laik jalan	99,5	%		
			Persentase bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar	50	%		
			Persentase bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar	62,5	%		
			Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar	65,22	%		
			Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	87,18	%		
			Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100	%		
			Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100	%		
			Persentase Penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	14,26	%		
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rasio ketersediaan pangan	100	%		1.200.000.000

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
Program Prioritas 5.2: Infrastruktur ekonomi						
	Kegiatan Prioritas 5.2: 1. Konektivitas jalan 2. Konektivitas kereta api 3. Konektivitas laut 4. Konektivitas udara 5. Konektivitas darat	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	85	%	162.970.500.000
			Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	93,73	%	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadahi	38,65	%	28.068.004.000
			Persentase potensi titik parkir yang tertangani	100	%	
			Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan	99,5	%	
			Persentase bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar	50	%	
			Persentase bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar	62,5	%	
			Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar	65,22	%	
			Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	87,18	%	
			Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100	%	
			Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100	%	
			Persentase Penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	14,26	%	
			Program Prioritas 5.3: Infrastruktur perkotaan			
	Kegiatan Prioritas 5.3: 1. Transportasi perkotaan 2. Infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Trotoar kondisi baik	62	%	250.000.000
		Program Pengembangan Permukiman	Persentase Desa terfasilitasi kegiatan Bankeu/Hibah	100	%	125.000.000
			Persentase rumah layak huni	89,42	%	6.066.859.000

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
	3. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan 4. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh perkotaan	18,25	%	
			Persentase warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	%	
			Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100	%	
Program Prioritas 5.4: Energi dan ketenagalistrikan						
	Kegiatan Prioritas 5.4: 1. Keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan 2. Akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan 3. Kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik	(Energi bukan kewenangan Kabupaten)	-	-	-	-
Program Prioritas 5.5: Transformasi Digital						
	Kegiatan Prioritas 5.5: 1. Penuntasan infrastruktur TIK 2. Pemanfaatan infrastruktur TIK 3. Fasilitas pendukung transformasi digital	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase PPID badan publik yang aktif	20	%	5.496.552.400
			Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	30	%	
			Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	100	%	
		Program Aplikasi Informatika	Persentase ketersediaan jaringan intranet	100	%	2.938.578.624
			Persentase sistem informasi yang terintegrasi	50	%	
			Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	60	%	
			Persentase ketersediaan akses internet publik	100	%	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat penilaian persiapan/ pengelolaan resiko keamanan informasi	1	%	97.752.500
6	PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim					
Program Prioritas 6.1: Peningkatan Kualitas lingkungan hidup						
	Kegiatan Prioritas 6.1: 1. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup 2. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup 4. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	62,73	%	184.273.810
			Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	100	%	
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	46	Angka	858.102.400
			Indeks Kualitas Udara	86	Angka	
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	74,33	%	1.320.526.200
			Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung	0,067	%	
			Cakupan RTH Publik	0,07	%	
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha yang memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3	100	%	10.000.000
		Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen n HidupLingkungan Hidup	100	%	35.001.300

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
		Program Penghargaan Lingkungan untuk Masyarakat	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	66,67	%	176.000.000
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	97	%	29.963.600.000
			Cakupan area layanan daerah irigasi	59,32	%	
Program Prioritas 6.2: Peningkatan ketahanan bencana dan iklim						
	Kegiatan Prioritas 6.2: 1. Penanggulangan bencana 2. Peningkatan ketahanan iklim	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan desa tangguh bencana	10,47	%	2.825.938.800
			Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	100	%	
			Persentase Tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana	100	%	
			Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	86,4	%	
			Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	100	%	
			Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana	100	%	
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%	
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%	
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%	
		Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	61	%	1.669.620.000
		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	69,8	%		

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran		
		dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten	44	angka			
			Persentase aparaturnya yang memenuhi standar kualifikasi	44	%			
			Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	%			
		Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	100	%		2.798.000.000	
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	100		%	1.256.990.000
				Rasio Linmas per RT	1,62		Rasio	
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100	%				
Program Prioritas 6.3: Pembangunan rendah karbon								
	Kegiatan Prioritas 6.3: 1. Pembangunan energi berkelanjutan 2. Pemulihan lahan berkelanjutan 3. Pengelolaan limbah 4. Pengembangan industri hijau 5. Rendah karbon pesisir dan laut	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	38,2	%	70.981.702.300		
			Cakupan layanan persampahan	55	%			
7	PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik							
Program Prioritas 7.1: Konsolidasi demokrasi								
	Kegiatan Prioritas 7.1: 1. Penguatan kapasitas Lembaga demokrasi 2. Penguatan kesetaraan dan kebebasan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	80,76	%	475.000.000		
			Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	2,34	%	60.000.000		

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	
3.	Peningkatan kualitas komunikasi publik	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rasio perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan dokumen perencanaan	45,71	%	187.497.000	
		Program Perlindungan Perempuan	Pravelensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	0,011	%		
				Persentase perempuan korban kekerasan	0,011	%	
		Program Perlindungan Khusus Anak	Presentase anak korban kekerasan	0,011	%	314.303.000	
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kelurahan	100	%	301.605.000	
			Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed	9,17	%		
			Persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	2,04	%		
			Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19th)	26,3	%		
		Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	76,21	%	6.292.841.000	
				Persentase kepesertaan KB aktif	76,21		%
				Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	49,19		%
				Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)	33,90		%
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Indeks pembangunan keluarga	50	%	4.400.040.000			
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	97,4	%	743.500.000			
		Persentase kepemilikan KTP el	99		%		

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			Presentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	72	%	
			Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu	100	%	
		Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	75	%	15.000.000
			Persentase penerbitan akta kematian	99	%	
			Cakupan pelayanan akta perkawinan tepat waktu	100	%	
			Cakupan pelayanan akta perceraian tepat waktu	100	%	
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase PPID badan publik yang aktif	20	%	5.496.552.400
			Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	30	%	
			Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	100	%	
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase ketersediaan jaringan intranet	100	%	2.938.578.624
			Persentase sistem informasi yang terintegrasi	50	%	
			Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	60	%	
			Persentase ketersediaan akses internet publik	100	%	
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	%	3.023.138.500
			Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	100	%	
			Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	80	%	
			Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu	100	%	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			Prosentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan	100	%	
			Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	100	%	
			Persentase kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	100	%	
			Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja tepat waktu	100	%	
			Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	95	%	
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya	87	%	1.736.687.850
			Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik	30	%	
			Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	30	%	
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan	100	%	100.000.000
Program Prioritas 7.2: Optimalisasi kebijakan luar negeri						
	Kegiatan Prioritas 7.2: 1. Penguatan Integritas NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri 2. Penguatan Kerjasama pembangunan internasional 3. Peningkatan citra positif di dunia internasional 4. Peningkatan peran Indonesia di tingkat regional dan global	Program Hubungan Industrial	Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	79	%	135.000.000
			Persentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	58	%	
			Persentase perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	45	%	
			Persentase perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	100	%	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	62	%	48.381.100
			Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	10	%	
Program Prioritas 7.3: Penegakan hukum nasional						
	Kegiatan Prioritas 7.3: 1. Penataan regulasi 2. Perbaikan sistem hukum pidana dan perdata 3. Penguatan sistem anti korupsi 4. Peningkatan akses terhadap keadilan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	100	%	468.716.000
			Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	46	%	
			Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	23	%	
			Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	48	%	
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai maturitas SPIP	3,3	Angka	299.716.000
			Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) / Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	60	%	
			Persentase tindak lanjut aduan Whistle blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	100	%	
			Nilai Survey Penilaian Integritas	81,97	Angka	
			Prosentase penanganan aduan masyarakat	100	%	
			Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	1	%	10.000.000

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	100	%	
Program Prioritas 7.4: Reformasi birokrasi dan tata Kelola						
	Kegiatan Prioritas 7.4: 1. Penguatan implemntasi manajemen ASN berbasis sistem merit 2. Transformasi pelayanan publik 3. Penataan kelembagaan dan proses bisnis 4. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja pembangunan	Program Penataan Desa	Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada	40	%	11.480.000.000
			Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Indek Pembangunan Desa	37	%	
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	90	%	361.625.771.000
			Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	90	%	
			Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	85	%	
			Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	100	%	
			Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu	85	%	
			Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa	10	%	
			Persentase desa yang tertib pengelolaan aset	85	%	
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Cakupan naskah kuno Kabupen Temanggung dan koleksi nasional yang dilestarikan	100	%	185.000.000
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	31,98	%	42.050.000
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pilar Batas yang terinventarisir	100	%	38.261.070.000

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			Prosentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	100	%	
			Cakupan Kecamatan Tertib Admistrasi	100	%	
			Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	90	%	
			Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	30	%	
			Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	100	%	
			Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	90	%	
			Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi	75	%	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda	26,67	%	16.884.135.793
			Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	100	%	
			Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	58	%	
		Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100	%	1.829.743.000
			Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	95	%	
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang <u>pembangunan manusia</u>	90	%	620.442.000
			Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang	90	%	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			pemerintahan dan kesejahteraan rakyat			
			Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi dan sumber daya alam	90	%	
			Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	90	%	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	100	%	17.627.423.796
			Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	89,96	%	
			Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100	%	
			Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100	%	
			Persentase realisasi keuangan	93	%	
			Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	90	%	
			Opini BPK atas LKPD	WTP	-	
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	88,1	%	1.291.180.400
			Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	99,1	%	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	1,27	%	991.814.400
			Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	100	%	
			Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100	%	
			Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	95	%	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	95	%	
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase penyusunan formasi pegawai	100	%	1.565.000.000
			Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu	100	%	
			Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	100	%	
			Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	80	%	
			Persentase Perempuan pada Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	48	%	
			Persentase Pelanggaran disiplin ASN	0,2	%	
			Persentase Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN	90	%	
			Persentase Pelaksanaan Updating Data Kepegawaian	95	%	
			Persentase penyelesaian pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional	100	%	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	100	
		Persentase realisasi penerimaan PBB		100	%	
Program Prioritas 7.5: Menjaga stabilitas keamanan nasional						
	Kegiatan Prioritas 7.5: 1. Penguatan keamanan dalam negeri 2. Penguatan kemampuan pertahanan dibarengi confidence building measures 3. Penguatan keamanan laut	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	100	%	227.279.900
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadahi	38,65	%	28.068.004.000
			Persentase potensi titik parkir yang tertangani	100	%	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
4. Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat 5. Penguatan keamanan dan ketahanan siber			Presentase kendaraan bermotor yang laik jalan	99,5	%	
			Persentase bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar	50	%	
			Persentase bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar	62,5	%	
			Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar	65,22	%	
			Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	87,18	%	
			Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100	%	
			Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100	%	
			Persentase Penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	14,26	%	
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan ketersediaan data makro daerah	100	%	302.833.000
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat penilaian persiapan/ pengelolaan resiko keamanan informasi	1	%	97.752.500
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	100	%	18.831.358.400
			Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik	100	%	
			Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	100	%	
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	100	%	264.000.000
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tempat ibadah kondisi baik	80	%	1.391.000		
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi	100	%	836.597.640		

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah	100	%	1.135.000.000
			Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	10	%	
			Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	35	%	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dukungan program daerah RKPD Tahun 2023 terhadap kegiatan prioritas pada masing-masing PN RKP Tahun 2023 yang secara rekapitulasi dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 5.19

Rekapitulasi Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2023 terhadap Kegiatan Prioritas Masing-Masing PN RKP Tahun 2023

No	Jumlah Kegiatan Prioritas RKP Tahun 2023		Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2023	
	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Persentase
1	PN 1	45	49	100%
2	PN 2	5	7	100%
3	PN 3	29	27	93,10%
4	PN 4	20	15	75,00%
5	PN 5	21	18	85,71%
6	PN 6	11	12	100%
7	PN 7	20	41	100%

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

5.1.3 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan pembangunan berkolaborasi dengan semua unsur baik pemerintah maupun non-pemerintah yang berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Unsur yang terlibat antara lain Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Non-Pemerintah, Akademisi, media massa, perusahaan, komunitas, dan masyarakat (*penta helix*).

Selain mendukung program prioritas Agenda Pembangunan Nasional, kebijakan pembangunan daerah juga menerapkan konsep tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan prioritas pada kegiatan yang berdaya ungkit besar pada pemantapan reformasi birokrasi, percepatan pengurangan kemiskinan, pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi kerakyatan dan pemerataan pembangunan wilayah dan



lingkungan hidup. Gambaran kebijakan tersebut dapat dilihat secara rinci pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.20
Rekapitulasi Dukungan Program dan Anggaran Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Prioritas Kabupaten Temanggung Tahun 2023	Jumlah Program Yang Mendukung	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	Pemantapan Reformasi Birokrasi (<i>Good Governance</i>)	27	135.995.251.636	1. BKPSDM 2. Bappeda 3. Inspektorat 4. BPKPAD 5. Dinkominfo 6. Dindukcapil 7. Badan Kesbangpol 8. DPM 9. Bagian Perekonomian 10. Bagian Organisasi 11. Bagian Hukum 12. Bagian Pemerintahan 13. Dinpusip 14. Sekretariat DPRD 15. Satpol PP Damkar 16. Bagian Forkompin 17. Bagian Pembangunan 18. Bagian PBJ
2	Percepatan pengurangan kemiskinan	26	724.856.659.761	1. Dinas Sosial 2. Dinperinaker 3. Dinkopdag 4. Bappeda 5. Dinbudpar 6. DPPPAPPKB 7. DPUPR 8. BPBD 9. Dinkominfo 10. Dinas Kesehatan 11. DKPPP 12. Bagian Perekonomian 13. Dinpermades 14. Dindikpora 15. Bagian Kesra
3	Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi kerakyatan	14	81.301.296.610	1. DPM 2. Dinas Perhubungan 3. Dinperinaker 4. Dinbudpar 5. DPRKPLH 6. DKPPP 7. BPBD 8. Dinkopdag
4	Pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan hidup	10	569.625.376.890	1. DPUPR 2. DPRKPLH 3. Dinas Kesehatan
JUMLAH		77	1.025.415.120.187	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah

Tabel 5.21
Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung :
Pemantapan Reformasi Birokrasi (*Good Governance*)

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
1	BKPSDM	1	Kepegawaian	1	Program Kepegawaian Daerah	Persentase penyusunan formasi pegawai	100	%	1.565.000.000
						Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu	100	%	
						Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	100	%	
						Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	80	%	
						Persentase Perempuan pada Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	48	%	
						Persentase Pelanggaran disiplin ASN	0,2	%	
						Persentase Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN	90	%	
						Persentase Pelaksanaan Updating Data Kepegawaian	95	%	
						Persentase penyelesaian pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional	100	%	
2	BKPSDM	2	Pendidikan dan Pelatihan	2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Pengawas yang memiliki Kompetensi Diklat Kepemimpinan	35	%	611.000.000
						Persentase ASN yang memiliki kompetensi Teknis dan Fungsional sesuai jabatannya	18	%	
3	BAPPEDA	3	Penelitian dan Pengembangan	3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	100	%	382.452.000
						Persentase inovasi daerah yang dikembangkan	65	%	
4	Inspektorat	4	Inspektorat Daerah	4		Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	100	%	468.716.000

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	46	%			
				Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	23	%			
				Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	48	%			
5	Inspektorat	5	Inspektorat Daerah	5	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai maturitas SPIP	3,3	Angka	299.716.000
					Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) / Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	60	%		
					Persentase tindak lanjut aduan Whistle blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	100	%		
					Nilai Survey Penilaian Integritas	81,97	Angka		
					Prosentase penanganan aduan masyarakat	100	%		
6	BAPPEDA	6	Perencanaan	6	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100	%	1.829.743.000
					Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	95	%		
7	BAPPEDA	7	Perencanaan	7	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pembangunan manusia	90	%	620.442.000
					Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat	90	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
				daerah sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat					
				Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi dan sumber daya alam	90	%			
				Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	90	%			
8	BPKPAD	8	Keuangan	8	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	100	%	17.627.423.796
						Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	89,96	%	
						Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100	%	
						Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100	%	
						Persentase realisasi keuangan	93	%	
						Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	90	%	
						Opini BPK atas LKPD	WTP	-	
9	Dinkominfo	9	Komunikasi dan Informatika	9	Program Aplikasi Informatika	Persentase ketersediaan jaringan intranet	100	%	2.938.578.624
						Persentase sistem informasi yang terintegrasi	50	%	
						Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	60	%	
						Persentase ketersediaan akses internet publik	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
10	Dinkominfo	10 Persandian	10 Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat penilaian persiapan/ pengelolaan resiko keamanan informasi	1	%	97.752.500
11	Dinkominfo	11 Dinkominfo	11 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan ketersediaan data makro daerah	100	%	302.833.000
12	Dindukcapil	12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	75	%	15.000.000
				Persentase penerbitan akta kematian	99	%	
				Cakupan pelayanan akta perkawinan tepat waktu	100	%	
				Cakupan pelayanan akta perceraian tepat waktu	100	%	
13	Dindukcapil	13 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	60	%	631.500.000
				Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	90	%	
14	Bakesbangpol	14 Kesatuan Bangsa dan Politik	14 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya	87	%	1.736.687.850
				Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik	30	%	
				Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	30	%	
15	DPM	15 Penanaman Modal	15 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi	625	Milyar	150.000.000
				Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	10	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
					Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	100	%		
16	DPM	16	Penanaman Modal	16	Program Promosi Penanaman Modal	100	%	410.000.000	
17	DPM	17	Penanaman Modal	17	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan online	100	%	409.629.400
						Persentase perijinan yang bebas calo	100	%	
						Persentase perijinan yang diterbitkan tepat waktu	95	%	
18	DPM	18	Penanaman Modal	18	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Perizinan yang diterbitkan	100	%	385.000.000
						Persentase Pengaduan masyarakat yang terselesaikan	100	%	
						Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	100	%	
19	Sekretariat Daerah	19	Sekretariat Daerah	19	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah berpredikat B dalam penyusunan LKJiP	74,5	%	36.449.281.973
						Tersedianya administrasi keuangan, umm dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	
						Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan kepala daerah	100	%	
						Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	100	%	
20	Sekretariat Daerah	20	Sekretariat Daerah	20	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pilar Batas yang terinventarisir	100	%	38.261.070.000
						Prosentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	100	%	
						Cakupan Kecamatan Tertib Adminsitrasi	100	%	



No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
					Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	90	%		
					Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	30	%		
					Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	100	%		
					Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	90	%		
					Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi	75	%		
21	Dinpusip	21	Kearsipan	21	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	31,98	%	42.050.000
22	Sekretariat DPRD	22	Sekretariat DPRD	22	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda	26,67	%	16.884.135.793
					Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	100	%		
					Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	58	%		
23	Satpol PP Damkar	23	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Dukungungan Masyarakat	23	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	100	%	1.256.990.000
					Rasio Linmas per RT	1,62	Rasio		
					Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100	%		
24	Satpol PP Damkar	24	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Dukungungan Masyarakat	24	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	61	%	1.669.620.000
					Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	69,8	%		
					Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten	44	angka		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	
				Persentase aparaturnya yang memenuhi standar kualifikasi	44	%		
				Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	%		
25	Satpol PP Damkar	25	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Dukungandan Masyarakat	25	Program Penanggulangan Bencana		2.852.938.800	
				Cakupan desa tangguh bencana	10,47	%		
				Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	100	%		
				Persentase Tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana	100	%		
				Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	86,4	%		
				Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	100	%		
				Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana	100	%		
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%		
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%		
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%		
26	Sekretariat Daerah	26	Sekretariat Daerah	26	Program Perekonomian dan Pembangunan		3.023.138.500	
					Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100		%
					Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	100		%
					Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	80	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	
				Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu	100	%		
				Prosentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan	100	%		
				Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	100	%		
				Persentase kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	100	%		
				Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja tepat waktu	100	%		
				Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	95	%		
27	Dinkominfo	27	Komunikasi dan Informatika	27	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik		237.716.000	
					Persentase PPID badan publik yang aktif	20		%
					Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	30		%
					Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	100	%	
Jumlah							135.995.251.636	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

Tabel 5.22
Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung :
Percepatan Pengurangan Kemiskinan

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
1	Dinas Sosial	1	Sosial	1	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100	%	670.000.000

No	Perangkat Daerah		Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
2	Dinas Sosial	2	Sosial	2	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	1.568.124.692
						Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	
						Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	
						Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	%	
						Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial	1,22	%	
3	Dinas Sosial	3	Sosial	3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	%	16.262.618.600
						Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	85	%	
						Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	95	%	
						Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	10,2	%	
						Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	%	
4	Dinas Sosial	4	Sosial	4	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	100	%	2.798.000.000
5	Dinperinaker	5	Tenaga Kerja	5	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	65	%	115.000.000
						Tingkat setengah pengangguran	5,7	%	
						Presentase tenaga kerja formal	31	%	
6	Dinkopdag	6	Perdagangan	6		Persentase pasar daerah dalam kondisi baik	67	%	8.769.303.700

No	Perangkat Daerah		Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	70	%	
						Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	90	%	
						Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	34	%	
7	Dinkopdag	7	Perdagangan	7	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi	68,41	%	30.000.000
8	Dinkopdag	8	Perdagangan	8	Program Pengembangan Ekspor	Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sektor perdagangan	2,56	%	400.000.000
9	Dinkopdag	9	Perdagangan	9	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	95	%	135.000.000
10	Diperinaker	10	Perindustrian	10	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase IKM industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	35	%	906.660.000
11	BAPPEDA	11	Perencanaan	11	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pembangunan manusia	90	%	620.442.000
						Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	90	%	
						Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi dan sumber daya alam	90	%	
						Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	90	%	
12	Dinbudpar	12	Pariwisata	12	Program Pemasaran Pariwisata	Pertumbuhan jumlah wisatawan	21	%	129.096.000
						Lama tinggal wisatawan	1	hari	

No	Perangkat Daerah		Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
13	DPPPAPPKB	13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kelurahan	100	%	301.605.000
						Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed	9,17	%	
						Persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	2,04	%	
						Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19th)	26,3	%	
14	DPPPAPPKB	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	76,21	%	6.292.841.000
						Persentase kepesertaan KB aktif	76,21	%	
						Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	49,19	%	
						Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)	33,90	%	
15	DPPPAPPKB	15	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Indeks pembangunan keluarga	50	%	4.400.040.000
16	DPUPR	16	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	97	%	29.963.600.000
						Cakupan area layanan daerah irigasi	59,32	%	
17	DPRKPLH	17	Perumahan dan Kawasan Permukiman	17	Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	89,42	%	6.066.859.000
						Persentase kawasan kumuh perkotaan	18,25	%	
						Persentase warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	%	
						Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100	%	
18	BPBD	18	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta	18	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan desa tangguh bencana	10,47	%	2.825.938.800
						Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat	100	%	



No	Perangkat Daerah		Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
			Perlindungan Masyarakat			bencana pada masa tanggap darurat bencana			
						Persentase Tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana	100	%	
						Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	86,4	%	
						Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	100	%	
						Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana	100	%	
						Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%	
						Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%	
						Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%	
19	Dinkes	19	Kesehatan	19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kematian ibu	67,5	Per 100.000 kelahiran hidup	317.081.259.000
						Angka kematian bayi	12	Per 1000 kelahiran hidup	
						Prevalensi balita gizi buruk	0,5	%	
						Presentase rumah tangga yang memiliki jamban	83,84	%	
						Presentase puskesmas yang sarprasnya sesuai standar	100	%	
						Presentase Ketersediaan obat sesuai kebutuhan	98	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100	% minimal	
				Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	% maksimal	
				Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	% maksimal	
				Presentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100	% maksimal	
				Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100	%	
				Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	72	%	
				Angka Kematian Neonatal (AKN)	7	% minimal	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	% minimal	
				Angka Kematian Balita	13,6	Maksimal per 1000 KH	
				Presentase anak usia pendidikan dasar yang sesuai mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
				Cakupan warga negara indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	% minimal	
				Cakupan warga negara indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	% minimal	
				Presentase kunjungan baru di pelayanan kesehatan dasar (Cakupan rawat jalan)	43,5	%	
				Presentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah terakreditasi utama	53,85	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				Presentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
				Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
				Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%	
				Presentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	100	%	
				Penanganan KLB 1x24 jam	100	%	
				Angka penemuan kasus Malaria	<1	per 1000 penduduk	
				Inciden rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	<20	per 1000 penduduk	
				Angka penemuan kasus baru Kusta	<1	per 1000 penduduk	
				Persentase Desa atau kelurahan UCI	100	%	
				Proporsi anak umur 1 tahun diimunisasi campak	95	%	
				Prevalensi gizi kurang pada anak balita (0-60 bulan)	15,5	% maksimal	
				Prevalensi stunting pada anak baduta (0-24 bulan)	27	% maksimal	
				Persentase Bayi umur < 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	80	% maksimal	
				Prevalensi anemia pada ibu hamil	20	% maksimal	
				Persentase Desa bebas rawan gizi	100	%	
				Persentase Rumah Sehat	82	%	
				Cakupan nilai akreditasi RSUD	100	%	
				Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit	54	%	

No	Perangkat Daerah		Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	%	
20	DKPPP	20	Pangan	20	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rasio ketersediaan pangan	100	%	1.200.000.000
21	DKPPP	21	Pangan	21	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan Desa pelaksana program ketahanan pangan	27,68	%	170.000.000
22	Sekretariat Daerah	22	Sekretariat Daerah	22	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	%	3.023.138.500
						Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	100	%	
						Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	80	%	
						Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu	100	%	
						Prosentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan	100	%	
						Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	100	%	
						Persentase kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	100	%	
						Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja tepat waktu	100	%	
						Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	95	%	
23	Dinpermades	23		23	Program Penataan Desa	Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada	40	%	11.480.000.000



No	Perangkat Daerah		Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa	37	%	
24	Dindikpora	24	Pendidikan	24	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APK SD sederajat	105,05	%	215.469.632.061
						Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A	0,965	angka	
						Persentase APM SD sederajat	98,3	%	
						Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A	0,975	angka	
						Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	79,5	%	
						Persentase SD terakreditasi minimal B	96,97	%	
						Angka kelulusan SD sederajat	100	%	
						Angka putus sekolah SD sederajat	0,03	%	
						Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	53,9	%	
						Persentase APK SMP sederajat	98,59	%	
						Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B	1	%	
						Persentase APM SMP sederajat	88	%	
						Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B	1,055	%	
						Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98,5	%	
						Persentase ruang kelas SMP negeri dalam keadaan baik	95,17	%	
						Persentase SMP terakreditasi minimal B	97,2	%	
						Angka kelulusan SMP sederajat	100	%	
						Angka putus sekolah SMP sederajat	0,2	%	
						Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	63,21	%	
						Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	76,6		

No	Perangkat Daerah		Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100	%	
						Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	%	
						Prosentase TK terakreditasi minimal B	51	%	
						Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	47,47	%	
						Persentase angka melek huruf usia \geq 15 tahun	98,64	%	
						Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	97,19	%	
						Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	%	
						Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	15,8	angka	
25	Sekretariat Daerah	25	Sekretariat Daerah	25	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pilar Batas yang terinventarisir	100	%	38.261.070.000
						Prosentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	100	%	
						Cakupan Kecamatan Tertib Adminstrasi	100	%	
						Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	90	%	
						Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	30	%	
						Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	100	%	
						Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	90	%	
						Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi	75	%	
26	DPPPAPKB	26	Pemberdayaan Perempuan dan	26	Program Pengarusutamaan	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	2,34	%	60.000.000

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
		Perlindungan Anak	Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rasio perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan dokumen perencanaan	45,71	%	
Jumlah							724.856.659.761

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

Tabel 5.23
Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung :
Pemantapan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
1	DPM	1 Penanaman Modal	1 Program Promosi Penanaman Modal	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	100	%	410.000.000
2	Dishub	2 Perhubungan	2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadahi	38,65	%	272.592.000
				Persentase potensi titik parkir yang tertangani	100	%	
				Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan	99,5	%	
				Persentase bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar	50	%	
				Persentase bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar	62,5	%	
				Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar	65,22	%	
				Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	87,18	%	
				Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100	%	
				Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
					Persentase Penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	14,26	%		
3	Dinperinaker	3	Perindustrian	3	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	35	%	906.660.000	
4	Dinbudpar	4	Kebudayaan	4	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kelompok seni budaya yang produktif	80,64	%	13.580.141.000
5	DPRKPLH	5	Lingkungan Hidup	5	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	66,67	%	176.000.000
6	Dinbudpar	6	Pariwisata	6	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase obyek wisata yang berkembang	41,66	%	331.172.000
7	DKPPP	7	Pangan	7	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan Desa pelaksana program ketahanan pangan	27,68	%	170.000.000
8	DKPPP	8	Pertanian	8	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi	63,3	kwintal/h a	13.971.897.000
					Produktivitas jagung	46	kwintal/h a		
					Produktivitas Ubi Kayu	339,8	kwintal/h a		
					Produktivitas bawang putih	79,6	kwintal/h a		
					Produktivitas bawang merah	80,15	kwintal/h a		
					Produktivitas cabai rawit	55,15	kwintal/h a		
					Produktivitas cabai besar	69,5	kwintal/h a		
					Produktivitas tembakau	6,8	kwintal/h a		
					Produktivitas kopi robusta	7,25	kwintal/h a		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
					Produktivitas kopi arabika	7	kwintal/h a		
					Produktifitas Cengkeh	2,45	kwintal/h a		
					Produktivitas Vanili	2,95	kwintal/h a		
					Produktivitas ternak sapi	177,6	Kg/Ekor		
					Produktivitas ternak domba	13,71	Kg/Ekor		
					Produktivitas ternak kambing	13,71	Kg/Ekor		
					Produktivitas ternak ayam ras pedaging	0,75	Kg/Ekor		
					Produktivitas ternak ayam ras petelur	10,88	Kg/Ekor		
					Produktivitas ternak ayam buras	0,7	Kg/Ekor		
9	DKPPP	9	Pertanian	9	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	76,55	%	19.716.260.000
				10	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian bencana pertanian	40,3	%	500.000.000
				11	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang naik kelas	0,98	%	267.000.000
10	BPBD	10	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	12	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan desa tangguh bencana	10,47	%	2.825.938.800
						Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	100	%	
						Persentase Tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana	100	%	
						Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	86,4	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
				Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	100	%			
				Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana	100	%			
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%			
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%			
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%			
11	DKPPP	11	Kelautan dan Perikanan	13	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktivitas ikan nila	6,2	kg/m2	239.950.000
						Produktivitas ikan lele	13,8	kg/m2	
						Produktivitas ikan mas	6	kg/m2	
12	Dinkopdag	12	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro UKM	Persentase usaha mikro aktif	35	%	130.000.000
							Jumlah	81.301.296.610	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

Tabel 5.24

Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung :
Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran						
1	DPUPR	1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase gedung pemerintah kondisi baik	80	%	9.050.000.000				
				2	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	85	%	162.970.500.000				
						Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	93,73	%					
				3	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Desa terfasilitasi kegiatan Bankeu/Hibah	100	%	125.000.000				
				4	Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	89,42	%	6.066.859.000				
						Persentase kawasan kumuh perkotaan	18,25	%					
						Persentase warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	%					
						Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100	%					
				2	Dinas Kesehatan	2	Kesehatan	5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kematian ibu	67,5	Per 100.000 kelahiran hidup	317.081.259.000
										Angka kematian bayi	12	Per 1000 kelahiran hidup	
Prevalensi balita gizi buruk	0,5	%											
Presentase rumah tangga yang memiliki jamban	83,84	%											
Presentase puskesmas yang sarprasnya sesuai standar	100	%											

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				Presentase Ketersediaan obat sesuai kebutuhan	98	%	
				Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100	% minimal	
				Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	% maksimal	
				Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	% maksimal	
				Presentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100	% maksimal	
				Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100	%	
				Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	72	%	
				Angka Kematian Neonatal (AKN)	7	% minimal	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	% minimal	
				Angka Kematian Balita	13,6	Maksimal per 1000 KH	
				Presentase anak usia pendidikan dasar yang sesuai mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
				Cakupan warga negara indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	% minimal	
				Cakupan warga negara indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	% minimal	
				Presentase kunjungan baru di pelayanan kesehatan dasar (Cakupan rawat jalan)	43,5	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				Presentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah terakreditasi utama	53,85	%	
				Presentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
				Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
				Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%	
				Presentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	100	%	
				Penanganan KLB 1x24 jam	100	%	
				Angka penemuan kasus Malaria	<1	per 1000 penduduk	
				Inciden rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	<20	per 1000 penduduk	
				Angka penemuan kasus baru Kusta	<1	per 1000 penduduk	
				Persentase Desa atau kelurahan UCI	100	%	
				Proporsi anak umur 1 tahun diimunisasi campak	95	%	
				Prevalensi gizi kurang pada anak balita (0-60 bulan)	15,5	% maksimal	
				Prevalensi stunting pada anak baduta (0-24 bulan)	27	% maksimal	
				Persentase Bayi umur < 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	80	% maksimal	
				Prevalensi anemia pada ibu hamil	20	% maksimal	
				Persentase Desa bebas rawan gizi	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
				Persentase Rumah Sehat	82	%			
				Cakupan nilai akreditasi RSUD	100	%			
				Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit	54	%			
				Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	%			
3	DPRKPLH	3	Lingkungan Hidup	6	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	74,33	%	1.320.526.200
					Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung	0,067	%		
					Cakupan RTH Publik	0,07	%		
				7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	66,67	%	176.000.000
				8	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	38,2	%	70.981.702.300
					Cakupan layanan persampahan	55	%		
				9	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	46	Angka	858.102.400
					Indeks Kualitas Udara	86	Angka		
4	DPUPR	4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	88,1	%	650.000.000
							Jumlah	569.625.376.890	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

Adapun rekapitulasi pagu anggaran prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan untuk setiap program prioritas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.25

Penjabaran Pagu Anggaran Program Prioritas yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Pagu Anggaran
1	Pemantapan Reformasi Birokrasi (<i>good governance</i>)	Program Aplikasi Informatika	2.938.578.624
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.256.990.000
		Program Penanggulangan Bencana	2.825.938.000
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	5.496.552.400
Jumlah			12.518.059.824
2	Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	16.262.618.600
		Program Kawasan Permukiman	6.066.859.000
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	317.081.259.000
		Program Pengelolaan Pendidikan	215.469.632.061
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	60.000.000
Jumlah			554.940.368.661
3	Pemantapan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan	Program Pengembangan Kebudayaan	13.580.141.000
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	331.172.000
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	170.000.000
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	13.971.897.000
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	239.950.000
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	130.000.000
Jumlah			28.423.160.000
4	Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	Program Penyelenggaraan Jalan	162.970.500.000
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	317.081.259.000
		Program Pengelolaan Persampahan	70.981.702.300

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Pagu Anggaran
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	650.000.000
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	858.102.400
Jumlah			552.541.563.700

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

5.1.4 Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)

Pemerintah Kabupaten Temanggung menerapkan konsep tematik, holistik, integratif dan spasial dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.

Konsep Tematik

Konsep tematik telah diterapkan dalam pembangunan daerah, hal ini dapat dilihat dari adanya prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan pada setiap tahunnya dan sesuai dengan arah kebijakan daerah. Konsep tematik dalam arah kebijakan pembangunan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Temanggung

Konsep tematik juga diwujudkan dalam penetapan prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung, pada tahun 2023 adalah (1) Pemantapan reformasi birokrasi, (2) Percepatan pengurangan

kemiskinan, (3) Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi kerakyatan, dan (4) Pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan hidup.

Konsep Holistik

Dalam perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Temanggung menerapkan konsep holistik yaitu perencanaan yang komprehensif dari hulu ke hilir, antara lain gerakan konservasi lingkungan, gerakan penanganan kemiskinan, gerakan penanganan stunting.

Konsep Integratif

Penerapan konsep integratif juga dilakukan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kebijakan pembangunan daerah yang melibatkan semua perangkat daerah, antara lain kegiatan penanganan kemiskinan melalui 1 perangkat daerah 1 desa dampingan, penanganan stunting yang melibatkan semua perangkat daerah, kegiatan SDGs yang didukung banyak program dan anggaran di semua perangkat daerah.

Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah juga dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung berkolaborasi dengan aktor non pemerintah baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia dan pelaksanaan kegiatan, yaitu kegiatan penanganan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan (SDGs), penanganan stunting, penanganan anak usia sekolah tidak sekolah, pelaksanaan kabupaten sehat, TMMD dan masih banyak lainnya. Aktor non pemerintah yang dilibatkan adalah akademisi, tim penggerak PKK, lembaga amil zakat, BAZNAS, komunitas tertentu, kelompok masyarakat, media massa, TJLSP dan masih banyak lagi.

Konsep Spasial

Konsep Spasial juga diterapkan dalam kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan penanganan stunting, kemiskinan dan infrastruktur yang dilaksanakan di semua kecamatan dengan salah satu tujuannya tidak



ada kesenjangan antar wilayah, dan hasilnya pemetaan juga dapat dilihat dalam bentuk peta/spasial.

Tabel 5.26

Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) dan *Penta Helix* dalam Mendukung Prioritas Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023: PEMANTAPAN PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH				
1	Pemantapan Reformasi Birokrasi (<i>Good Governance</i>)	1. Program Kepegawaian Daerah	Persentase penyusunan formasi pegawai	BKPSDM
			Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu	BKPSDM
			Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	BKPSDM
			Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	BKPSDM
			Persentase Perempuan pada Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	BKPSDM
			Persentase Pelanggaran disiplin ASN	BKPSDM
			Persentase Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN	BKPSDM
			Persentase Pelaksanaan Updating Data kepegawaian	BKPSDM
		2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM
		3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Bappeda
			Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	Bappeda

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023: PEMANTAPAN PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH				
			Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Bappeda
			Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bappeda
		4. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	Inspektorat
			Nilai maturitas SPIP	Inspektorat
			Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) / Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Inspektorat
			Persentase tindak lanjut aduan Whistle blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	Inspektorat
			Nilai Survey Penilaian Integritas	Inspektorat
		5. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai maturitas SPIP	Inspektorat
			Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) / Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Inspektorat
			Persentase tindak lanjut aduan Whistle blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	Inspektorat
			Nilai Survey Penilaian Integritas	Inspektorat
			Prosentase penanganan aduan masyarakat	Inspektorat
		6. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	Bappeda
			Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Bappeda
			Monitoring Program dan Daerah Kegiatan Perangkat Daerah	Bappeda
		7. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023: PEMANTAPAN PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH				
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda
		8. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKPAD
			Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	BPKPAD
			Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	BPKPAD
			Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	BPKPAD
			Penyusunan peraturan	BPKPAD

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023: PEMANTAPAN PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH				
			daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKPAD
			Koordinasi Penyusunan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKPAD
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	BPKPAD
			Pelaksanaan Pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKPAD
		9. Program Aplikasi Informatika	Penatalaksanaan dan Pengawasan <i>e- government</i> dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinkominfo
			Penatalaksanaan dan Pengawasan <i>e- government</i> dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinkominfo
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Dinkominfo
			Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dinkominfo
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinkominfo
		10. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Dinkominfo
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinkominfo
		11. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan ketersediaan data makro daerah	Dinkominfo
		12. Program Pencatatan Sipil	Pencatatan, penata usahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dindukcapil

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023: PEMANTAPAN PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH				
			Peningkatan dalam pelayanan Pencatatan sipil pengumpulan data kependudukan	Dindukcapil
		13.Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dindukcapil
		14.Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Pelaksana Koordinasi di bidang pendidikan politik,etika budaya politik, peningkatan demokrasi,fasilitas kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik,pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Badan Kesbangpol
		15.Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Fasilitasi pengembangan kawasan investasi dan kebijakan penanaman modal	DPM
			Pengkajian potensi investasi pariwisata	DPM
			Pengkajian potensi investasi UMKM	DPM
			Pengkajian potensi investasi pertanian	DPM
			Pengembangan potensi unggulan daerah	DPM
		16.Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan	DPM
			Sosialisasi kebijakan Penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha dan Peraturan Perizinan	DPM
			Diseminasi promosi investasi	DPM
		17.Program Pelayanan Penanaman Modal	Fasilitasi percepatan pelayanan perizinan	DPM
			Peningkatan pelayanan perizinan satu pintu	DPM
			Penyempurnaan sarana dan prasarana perizinan	DPM
			Fasilitasi Pengaduan dan advokasi	DPM
		18.Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Penyelenggaraan Temu Usaha	DPM
			Pengawasan dan pengendalian penanaman modal dan perizinan	DPM
			Monev PATEN	DPM
			Monev dan Pelaporan LKPM	DPM
		19.Program Penunjang Urusan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Organisasi

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023: PEMANTAPAN PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH				
		Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi
			Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LkjIP	Bagian Organisasi
			Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan kepala daerah	Bagian Forkompim
			Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan kepala daerah	Bagian Pembangunan, Bagian PBJ
		20.Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum
			Fasilitasi Bantuan Hukum	Bagian Hukum
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Bagian Hukum
			Penataan Administrasi Pemerintahan	Bagian Pemerintahan
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Bagian Pemerintahan
			Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Bagian Pemerintahan
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bagian Kesra
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Bagian Kesra
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Bagian Kesra
		21.Program Pengelolaan Arsip	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Dinpusip
			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Dinpusip
		22.Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD
			Pembahasan rancangan peraturan daerah	Sekretariat DPRD
			Penyelenggaraan Kajian Perundang undangan	Sekretariat DPRD
			Fasiliasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik	Sekretariat DPRD
			Pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekretariat DPRD
			Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD
			Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRD
		23.Program Peningkatan	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	Satpol PP Damkar

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023: PEMANTAPAN PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH				
		Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rasio linmas per RT	Satpol PP Damkar
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	Satpol PP Damkar
		24.Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	Satpol PP Damkar
			Tingkat Waktu Tanggap (<i>response time rate</i>)	Satpol PP Damkar
			Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten	Satpol PP Damkar
			Persentase aparaturnya yang memenuhi standar kualifikasi	Satpol PP Damkar
		25.Program Penanggulangan Bencana	Cakupan desa tangguh bencana	BPBD
			Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	BPBD
			Persentase Tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana	BPBD
			Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	BPBD
			Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	BPBD
			Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana	BPBD
		26.Program Perekonomian dan Pembangunan		Bagian Pembangunan, Bagian PBJ
2	Percepatan Pengurangan Kemiskinan	1. Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos
		2. Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinsos
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Dinsos
			Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Dinsos

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023: PEMANTAPAN PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH				
		3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos
			Pembinaan Lanjut Usia Terlantar Potensial	Dinsos
		4. Program Penanganan Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dinsos
		5. Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja	Dinperinaker
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Dinperinaker
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Dinperinaker
			Job Fair/Bursa Kerja	Dinperinaker
		6. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinkopdag
			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinkopdag
			Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinkopdag
		7. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Dinkopdag
			Pemantauan harga stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Dinkopdag
			Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Dinkopdag
		8. Program Pengembangan Ekspor	Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten/kota	Dinkopdag
		9. Program Standardisasi dan Perlindungan konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Dinkopdag
			Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Dinkopdag
		10. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Dinperinaker
		11. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023: PEMANTAPAN PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH				
		Pembangunan Daerah	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda
		12.Program Pemasaran Pariwisata	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Dinbudpar
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinbudpar
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi	Dinbudpar

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023: PEMANTAPAN PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH				
			Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	
		13.Program Pengendalian Penduduk	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	DPPPAPPKB
		14.Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DPPPAPPKB
			Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	DPPPAPPKB
			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	DPPPAPPKB
			Pembinaan Terpadu Kampung KB	DPPPAPPKB
		15.Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPPAPPKB
			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPPAPPKB
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	DPPPAPPKB
			Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPPAPPKB
		16.Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air	DPUPR
			Rehabilitasi/Pemeliharaan /Pembinaan Petani Pemakai Air	DPUPR
			Penyusunan DED Irigasi	DPUPR

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023: PEMANTAPAN PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH				
			Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi	DPUPR
			Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	DPUPR
			Fasilitasi DAK Penugasan Sub Bidang Irigasi	DPUPR
		17.Program Kawasan Permukiman	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	DPRKPLH
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	DPRKPLH
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	DPRKPLH
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	DPRKPLH
			Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	DPRKPLH
		18.Program Penanggulangan Bencana	Penanganan pasca Bencana Kabupaten	BPBD
		19.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pembangunan jamban keluarga	Dinas Kesehatan
			Pembangunan septic tank	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		20.Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	DKPPP
			Sarana Pendukung Lumbung Pangan Masyarakat - Lantai Jemur	DKPPP
			Sarana Pendukung Lumbung Pangan Masyarakat - Rice Milling Unit (RMU)	DKPPP
			Fasilitasi dan distribusi akses pangan	DKPPP
		21.Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari Tani pekarangan	DKPPP
			Pemberdayaan lumbung Pangan masyarakat	DKPPP
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	DKPPP
			Pengisian gudang cadangan pangan dalamantisipasi kerawanan pangan	DKPPP
			Pengembangan Konsumsi Pangan B2SA	DKPPP

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023: PEMANTAPAN PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH				
			Pendampingan P2KP	DKPPP
		22. Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Bagian Perekonomian
			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Bagian Perekonomian
		23. Program Penataan Desa	Penyediaan Prasarana dan Sarana Transportasi antar Wilayah	Dinpermades
		24. Program Pengelolaan Pendidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Dindikpora
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Dindikpora
			Bantuan siswa miskin SMP/MTs	Dindikpora
			Fasilitasi bantuan beasiswa bagi siswa miskin	Dindikpora
			Bantuan siswa miskin masuk sekolah	Dindikpora
			Fasilitasi kegiatan BOS dan PIP SMP	Dindikpora
			BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Dindikpora
			25. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumah Ibadah dan Sarpras Pendidikan, Keagamaan Kondisi Baik
3	Pemantapan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan	1. Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan <i>matchmaking</i> dan pameran investasi	DPM
		2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan
			Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dinas Perhubungan
		3. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinperinaker
		4. Program Pengembangan Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Dinbudpar
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Dinbudpar
		5. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	DPRKPLH
6. Program Peningkatan Daya	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dinbudpar		

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023: PEMANTAPAN PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH				
		Tarik Destinasi Pariwisata	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinbudpar
			Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinbudpar
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinbudpar
		7. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Upaya Khusus Mendukung Ketahanan Pangan	DKPPP
		8. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengembangan Kawasan Hortikultura	DKPPP
			Pengembangan Tanaman Kopi	DKPPP
			Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Padi Unggul	DKPPP
			Pengembangan Padi Organik	DKPPP
			Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP2TT) Jagung	DKPPP
			Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat	DKPPP
			Pengembangan Buah unggulan	DKPPP
			Pengadaan Alat Pertanian Perkebunan dan Pelatihan pendidikan	DKPPP
			Pengembangan Sistem pembenihan Mandiri Tanaman Perkebunan	DKPPP
			Pengembangan Sistem Pembenihan Buah Unggulan	DKPPP
			Fasilitasi Pengembangan Informasi Pertanian Perkebunan dan Hortikultura (Statistik Pertanian)	DKPPP
			Pengelolaan Database Pertanian	DKPPP
			Perawatan Kebun dinas dan Kebun entres	DKPPP
			Optimalisasi Kebun Pemda	DKPPP
		Intensifikasi Tanaman Cengkeh	DKPPP	
		Introduksi dan Diversifikasi Komoditas Pertanian berpotensi	DKPPP	

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023: PEMANTAPAN PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH				
		9. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Fasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian (PSP)	DKPPP
			Fasilitasi DAK Pertanian	DKPPP
			Fasilitasi Temu Usaha pelaku pasar Komoditas Hortikultura	DKPPP
			Fasilitasi Temu Usaha pelaku pasar Komoditas Perkebunan	DKPPP
			Fasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian (PSP)	DKPPP
			Diseminasi Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	DKPPP
			Diseminasi Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan	DKPPP
			Promosi atas hasil produksi Tanaman Hortikultura	DKPPP
			Promosi atas hasil produksi Tanaman Perkebunan	DKPPP
			Peningkatan mutu Hasil Produksi dan pasca panen Hortikultura	DKPPP
			Peningkatan mutu Hasil Produksi dan pasca panen Perkebunan	DKPPP
			Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	DKPPP
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian	DKPPP
		10. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian Hama Tikus	DKPPP
			Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Pangan	DKPPP
			Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Hortikultura	DKPPP
			Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dalam Menunjang Sistem Manajemen Lingkungan Pertanian di Daerah Tembakau	DKPPP
		11. Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kinerja Penyuluhan	DKPPP
			Fasilitasi Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Teknologi Pertanian	DKPPP
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani	DKPPP
			Visualisasi dan Display Hasil Penyuluhan	DKPPP

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana	
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023: PEMANTAPAN PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH					
			Penumbuhan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Petani	DKPPP	
		12. Program Penanggulangan Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	BPBD	
			Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD	
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	
			Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	BPBD	
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten Temanggung	BPBD	
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana di Kabupaten Temanggung	BPBD	
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana di Kabupaten Temanggung	BPBD	
4	Pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan hidup		1. Program Penataan Bangunan Gedung	Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	DPUPR
				Sarpras Kelurahan Bidang Keciaptakaryaan	DPUPR
		2. Program Penyelenggaraan Jalan	Perencanaan Peningkatan Jalan Kabupaten	DPUPR	
			Perencanaan Pembangunan Jalan (Ban-Keu)	DPUPR	
			Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten	DPUPR	
			Perencanaan Pemeliharaan Jalan (DAK)	DPUPR	
			Fasilitasi Dana APBN Kebinamargaan	DPUPR	
			Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	DPUPR	
			Perencanaan Peningkatan Jembatan	DPUPR	

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023: PEMANTAPAN PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH				
			Perencanaan Pembangunan Jembatan	DPUPR
			Pengadaan Tanah Pemerintah	DPUPR
			Peningkatan Kapasitas Jalan Kabupaten	DPUPR
			Fasilitasi DAK Jalan Penugasan	DPUPR
			Fasilitasi DAK Jalan Reguler	DPUPR
			Peningkatan Jalan Kabupaten	DPUPR
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten	DPUPR
			Pembangunan Turap/Talud Pengaman Jalan	DPUPR
			Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional I Temanggung	DPUPR
			Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional II Parakan	DPUPR
			Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional III Ngadirejo	DPUPR
			Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional IV Kranggan	DPUPR
			Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional V Kandangan	DPUPR
			Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional VI Tembarak	DPUPR
			Penggantian Jembatan	DPUPR
			Pelebaran Jembatan	DPUPR
			Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional I Temanggung	DPUPR
			Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional II Parakan	DPUPR
			Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional III Ngadirejo	DPUPR
			Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional IV Kranggan	DPUPR
			Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional V Kandangan	DPUPR
			Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana	DPUPR

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023: PEMANTAPAN PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH				
			Jembatan Regional VI Tembarak	
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	DPUPR
		3. Program Pengembangan Permukiman	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	DPUPR
			Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	DPUPR
			Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	DPUPR
		4. Program Kawasan Permukiman	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	DPRKPLH
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	DPRKPLH
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	DPRKPLH
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	DPRKPLH
		5. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pembangunan Puskesmas	Dinas Kesehatan
			Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan
		6. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Program Mitigasi Perubahan Iklim Kabupaten Temanggung (Proklim)	DPRKPLH
			Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	DPRKPLH
			Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	DPRKPLH
			Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	DPRKPLH
			Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	DPRKPLH
			Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	DPRKPLH
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Persampahan	DPRKPLH
		7. Program Penghargaan	Koordinasi Adiwiyata	DPRKPLH

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023: PEMANTAPAN PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH				
		Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Fasilitasi Lingkungan Bersih Sehat (LBS)	DPRKPLH
		8. Program Pengelolaan Persampahan	Pendukung dan Koordinasi Bank Sampah Kabupaten Temanggung	DPRKPLH
			Operasi dan Pemeliharaan alat angkut sampah dan listrik	DPRKPLH
			Peningkatan dan Pengembangan TPS dan/atau TPST 3R	DPRKPLH

Sumber : Bappeda, data diolah, 2022.

5.1.5 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Terhadap Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur. Pemerintah Kabupaten Temanggung sangat mendukung kegiatan tersebut dan mengalokasikan program kegiatan terhadap pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata di kawasan pariwisata di Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 5.27

Dukungan Program dan Kegiatan Kabupaten Temanggung Terhadap Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PELAKSANA
1	Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Pendataan potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	130.000.000	Dinkopdag
2	Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelindungan Cagar Budaya	248.332.000	Dinbudpar



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PELAKSANA
3	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	13.455.141.000	Dinbudpar
4	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan egovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.598.578.624	Dinkominfo
5	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	Pemeliharaan Berkala Jalan	165.240.500.000	DPUPR
6	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	309.000.000	DKPPP
7	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST /SPA	128.051.077.300	DPRKPLH
8	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	858.102.400	DPRKPLH
9	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1.180.217.500	Bappeda
JUMLAH				312.070.948.824	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

Pengembangan Borobudur sebagai destinasi pariwisata super prioritas selain mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, juga membutuhkan dukungan dari daerah sekitarnya, salah satunya adalah Kabupaten Temanggung. Potensi yang mendukung pengembangan Borobudur yang berada di Kabupaten Temanggung salah satunya adalah event yang dilaksanakan secara rutin di Kawasan Borobudur yaitu pengambilan air suci, persemayaman air suci di Candi



Mendut dan perayaan Hari Raya Waisak di Candi Borobudur. Sejumlah Biksu yang berasal dari 11 majelis agama Buddha di Indonesia, mengikuti ritual pengambilan air suci (berkah) untuk perayaan Hari Raya Waisak di Mata Air Jumprit Temanggung persisnya di Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Air berkah tersebut akan disemayamkan di Candi Mendut dan akan digunakan dalam perayaan detik-detik Waisak di Candi Borobudur.

Air di Umbul Jumprit memang bukan air biasa. Bagi Umat Budha, air Umbul Jumprit dianggap sebagai air suci pembersih jiwa manusia. Harapan pengambilan air suci ini untuk seluruh manusia di dunia agar sadar bahwa jiwa ini bagaikan jiwa Sang Buddha. Penuh cinta kasih tanpa memandang aliran dan agama. Salah seorang Wakil Bhikkhu, Dwi Virya, mengatakan dalam agama Buddha air suci mempunyai makna filosofis yang sangat tinggi.

Pemerintah Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk melestarikan Mata Air Jumprit, salah satunya dengan memberikan dukungan terhadap akses menuju Mata Air Jumprit. Tahun 2022 melalui anggaran APBN akan dilaksanakan preservasi dan revitalisasi kawasan umbul jumprit dengan anggaran Rp5.000.000.000,00 untuk penataan bangunan taman beserta kelengkapannya serta menata jaringan perpipaan air bersih dengan anggaran Rp.13.000.000.000,00. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Temanggung mengusulkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota yaitu pembangunan dua ruas jalan. Anggaran sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar) untuk ruas jalan Dakaran-Sibajak dan anggaran sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar) untuk ruas jalan Muntung-Jumprit. Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 juga mendapatkan alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan belas miliar) untuk penataan destinasi wisata Umbul Jumprit dan penataan jaringan perpipaan air bersih yang ada di mata air Jumprit.

5.1.6 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Terhadap Pembangunan Pintu Tol Bawen-Yogyakarta

Pada tahun 2022, Provinsi Jawa Tengah memiliki agenda pembangunan jalan tol ruas Bawen-Yogyakarta dengan pintu tol di Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung. Peluang tersebut ditangkap oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui kegiatan penataan ruang yaitu peninjauan kembali dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung 2011-2031 agar keberadaan pintu tol ini memungkinkan tumbuhnya ekonomi baru serta mendukung pengembangan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Temanggung. Harapannya Kabupaten Temanggung tidak sebatas dilewati tetapi bisa menjadi daerah tujuan.

5.1.7 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Terhadap Aksi Konvergensi Stunting

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 42/M.PPPN/HK/04/2020 Tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2022 Kabupaten Temanggung menjadi kabupaten percontohan penanganan perkawinan anak usia dini dan pencegahan stunting oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah 1) Rapat Koordinasi; 2) Sosialisasi dan 3) *Forum Group Discussion* (FGD)

Selain itu juga dilakukan penelitian secara khusus oleh Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc dan tim di Desa Wadas Kecamatan Kandangan sebagai desa dengan kasus stunting tertinggi dan Desa Tanurejo Kecamatan Bansari sebagai desa dengan kasus stunting rendah. Universitas Diponegoro Semarang juga melakukan penelitian tentang indeks resiko stunting dan determinan penurunan kejadian stunting

tahun 2018-2021 di Kabupaten Temanggung. Guna menunjang kegiatan sebagaimana di maksud, maka dukungan kegiatan yang bersumber dari APBD sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5.28
Program Daerah yang Mendukung Aksi Konvergensi Stunting
Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	PELAKSANA
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah/Kota	65.715.847.000	Dinas Kesehatan
		2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
2	Program Penyediaan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten /Kota	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum/SPAM di daerah Kabupaten	24.980.373.000	DPRKPLH
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1. Orientasi Pengelola dan Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	8.313.080.000	DPPPAPPKB
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	7.230.748.100	Dinas Sosial
		2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		
6	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	758.500.000	Dindikcapil
7	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan dana BOP PAUD	13.183.020.000	Dindikpora
Jumlah Total			120.181.568.100	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

5.1.8 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Terhadap SDGs

Pemerintah Kabupaten Temanggung juga berkomitmen dalam mendukung keberhasilan program pembangunan berkelanjutan/SDGs, pengarusutamaan tata kelola Pemerintahan yang baik, dan pengarusutamaan gender dan didukung oleh sebagian besar perangkat



daerah berserta lembaga non pemerintah. Program daerah yang mendukung pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (SDGs), pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik, dan pengarusutamaan gender sebagaimana tercantun dalam tabel berikut:

Tabel 5.29
Program Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Pengarusutamaan Gender

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
I	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			
1	Program Pengelolaan Pendidikan	tujuan 1 tujuan 2 tujuan 4	V	V
II	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan			
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	tujuan 1 tujuan 2 tujuan 3 tujuan 6 tujuan 13	V	V
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	tujuan 3		
3	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	tujuan 3		
III	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	tujuan 6		
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	tujuan 1 tujuan 6		V
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	tujuan 1		
4	Program Pengembangan Permukiman	tujuan 1	V	V
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Tujuan 9		
6	Program Penyelenggaraan Jalan	tujuan 9		
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tujuan 9 Tujuan 11 Tujuan 13		
8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Tujuan 9		
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Tujuan 9		
IV	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman			
1	Program Pengembangan Perumahan	tujuan 1 tujuan 6		V

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
2	Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	tujuan 1 tujuan 6 tujuan 11		V
V	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
1	Program Penanggulangan Bencana	tujuan 1 tujuan 11 tujuan 13	V	
2	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana			V
3	Program Pemeliharaan Ketenteraman dan ketertiban Umum			V
VI	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	tujuan 1 tujuan 2 tujuan 3	V	V
2	Program Rehabilitasi Sosial	tujuan 3		
3	Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial			V
VII	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	tujuan 1 tujuan 8	V	V
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	tujuan 8		
3	Program Hubungan Industrial	tujuan 8 tujuan 10	V	
VIII	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	tujuan 5 tujuan 16	V	V
2	Program Perlindungan Perempuan	tujuan 16 tujuan 5 tujuan 10	V	V
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	tujuan 3		V
4	Program Pemenuhan Hak Anak	tujuan 16	V	
5	Program Perlindungan Khusus Anak	tujuan 10	V	
IX	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan			
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	tujuan 2 tujuan 13	V	
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	tujuan 2 tujuan 8 tujuan 13		
X	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	tujuan 6 tujuan 9 tujuan 12 tujuan 13	V	
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	tujuan 13		
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	tujuan 6 tujuan 11 tujuan 13 tujuan 15		
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	tujuan 6 tujuan 12 tujuan 13	V	
5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	tujuan 6	V	
6	Program Pengelolaan Persampahan	tujuan 1 tujuan 12 tujuan 11 tujuan 13		
XI	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			
1	Program Pencatatan Sipil	tujuan 1 tujuan 16 tujuan 17	V	V
2	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	tujuan 16		
3	Program Pendaftaran Penduduk	tujuan 16		V
XII	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			
1	Program Penataan Desa	tujuan 10	V	
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	tujuan 10		
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	tujuan 10	V	
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	tujuan 10	V	
5	Program Pembinaan dan Fasilitas Perencanaan, evaluasi, pengelolaan keuangan dan pembangunan desa			V
6	Program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat/desa dan pemberdayaan kawasan perdesaan			V
XIII	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
1	Program Pengendalian Penduduk	tujuan 1 tujuan 3 tujuan 5		V
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana	tujuan 1 tujuan 3 tujuan 5		V
3	Program Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera	tujuan 3		
XIV	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	tujuan 8 tujuan 9		
2	Program Pengembangan Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	tujuan 8		
3	Program Pelayanan Penanaman Modal			V
XV	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Publik			
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	tujuan 16	V	V
2	Program Aplikasi Informatika	tujuan 4 Tujuan 9		
XVI	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tujuan 3 Tujuan 11		
XVII	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi			
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Tujuan 8		V
XVIII	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga			
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	tujuan 1 tujuan 4 tujuan 8	V	
XIX	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			
1	Program Pengembangan Kebudayaan	tujuan 8	V	
2	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Tujuan 11		
3	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan			
4	Program Pembinaan Perpustakaan			V
XX	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan			
1	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	tujuan 2 tujuan 8		
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Tujuan 8		
XXI	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	tujuan 8		
2	Program Pemasaran Pariwisata	tujuan 8		
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	tujuan 8	V	
XXII	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	tujuan 2 tujuan 13		
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tujuan 13		
3	Program Pengendalian bencana Pertanian	Tujuan 13		
4	Program Penyuluhan Pertanian	Tujuan 13		
XXIII	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan			
1	Program Pengembangan Ekspor	tujuan 17		
2	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Tujuan 12		
3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan			V
XXIV	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi			
1	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	tujuan 8		V
XXV	Sekretariat Daerah			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tujuan 1 tujuan 4	V	
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tujuan 12 tujuan 16 tujuan 17	V	V
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	tujuan 16 tujuan 8	V	V
4	Program Administrasi Umum	tujuan 16	V	
XXVI	Perencanaan			
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tujuan 11	V	V
2	Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	tujuan 1 tujuan 11 tujuan 17	V	V
3	Program Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam			V
XXVII	Keuangan			
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	tujuan 16 tujuan 17	V	
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tujuan 16	V	
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tujuan 16 Tujuan 17	V	
XXVIII	Kepegawaian			
1	Program Kepegawaian Daerah		V	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
XXIX	Pendidikan Dan Pelatihan			
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	tujuan 5 tujuan 16	V	V
XXX	Penelitian Dan Pengembangan			
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	tujuan 1 tujuan 9		
XXXI	Inspektorat Daerah			
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan		V	V
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		V	
XXXII	Kecamatan			
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		V	
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		V	
XXXIII	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	tujuan 5		V
2	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial	Tujuan 3		

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

Berdasarkan pemetaan Indikator SDG's dalam dokumen perencanaan daerah terdapat indikator tujuan, indikator sasaran, indikator program, dan indikator yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah. Beberapa indikator SDG's yang bukan merupakan kewenangan daerah otomatis tidak ada dukungannya di Renja maupun RKPD. Hasil pemetaan indikator SDG's sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.30
Pemetaan Indikator SDG's dalam Dokumen Perencanaan Daerah

No	Spesifikasi Indikator	Pilar Sosial	Pilar Ekonomi	Pilar Lingkungan	Pilar Hukum dan Tata Kelola	Jumlah Indikator
1	Indikator Kinerja Tujuan	1	4	-	-	5
2	Indikator Kinerja Sasaran	8	4	4	3	19

No	Spesifikasi Indikator	Pilar Sosial	Pilar Ekonomi	Pilar Lingkungan	Pilar Hukum dan Tata Kelola	Jumlah Indikator
3	Indikator Kinerja Program	60	7	9	14	90
4	Indikator Pada Renstra PD	4	8	18	6	36
5	Indikator Bukan Kewenangan	6	5	-	4	15
Jumlah		79	28	31	27	165

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

5.1.9 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Terhadap Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Pemerintah Kabupaten Temanggung juga berkomitmen mendukung proses adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.31
Program Daerah yang Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PELAKSANA
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	317.081.259.000	Dinas Kesehatan
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	1.200.000.000	DPPP
3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	170.000.000	DPPP
4	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	13.971.897.000	DPPP
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	19.716.260.000	DPPP
6	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	500.000.000	DPPP
7	Program Penyuluhan Pertanian	267.000.000	DPPP
8	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	184.273.810	DPRKPLH
9	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	858.102.400	DPRKPLH
10	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.320.526.200	DPRKPLH
11	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	10.000.000	DPRKPLH
12	Program Pengelolaan Persampahan	70.981.702.300	DPRKPLH
Jumlah Total			

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

5.2. PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2023 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung disusun dalam rangka memenuhi sasaran pokok, arah kebijakan tahun ke lima pembangunan RPJMD tahun 2018-2023 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan nasional sekaligus mempedomani tema pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yaitu Pemantapan pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing daerah. Selain itu juga berdasarkan permasalahan dan hasil evaluasi capaian pembangunan daerah.

5.2.1 Kegiatan Prioritas Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang

Program dan kegiatan prioritas yang direncanakan dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Bidang Pendidikan

➤ Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dana BOS, rehab sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan tenaga pendidik dan penyelenggaraan proses belajar nonformal/ kesetaraan. Program ini dilakukan dalam rangka menangani anak usia sekolah tidak sekolah untuk peningkatan rata-rata lama sekolah.

2) Bidang Kesehatan

➤ Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat



Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan rumah sakit dan puskesmas, operasional rumah sakit dan puskesmas, penyediaan alat kesehatan/penunjang medik, pelayanan jaminan kesehatan. Program ini dilakukan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kematian balita, prevalensi balita gizi buruk, prevalensi stunting dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kapasitas SDM di bidang kesehatan. Program ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat.

- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan pengawasan obat, makanan dan minuman sesuai standar kesehatan. Program ini dilakukan dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan farmasi sesuai standar.

3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan irigasi. Program ini dilakukan dalam rangka menangani adanya jaringan irigasi yang rusak dan kurang berfungsi optimal sehingga terwujud ketersediaan air guna peningkatan kualitas produksi pertanian.

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan. Program ini dilakukan dalam rangka meningkatkan cakupan akses masyarakat terhadap air minum.

- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan dan pemeliharaan drainase. Program ini dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan drainase pada masyarakat.

➤ Program Pengembangan Permukiman

Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman. Program ini dilakukan dalam rangka mencapai cakupan rumah tangga dan lingkungan layak huni.

➤ Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Implementasi SIMBG dan rehab gedung. Program ini dilakukan dalam rangka mewujudkan bangunan gedung yang layak sesuai standar dan sesuai dengan kepentingannya.

➤ Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan. Program ini dilakukan dalam rangka mewujudkan bangunan sesuai dengan kondisi lingkungannya sehingga terjaga stabilitas bangunan dan keamanan bangunan serta pelestarian lingkungan.

➤ Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada kegiatan rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, serta kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi dan penggantian jembatan. Program ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kondisi jalan dan jembatan sehingga mendukung perekonomian masyarakat.

➤ Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan RRTR dan penegakan hukum bidang penataan ruang. Program ini dilakukan dalam rangka mewujudkan penataan ruang sesuai dengan peruntukannya.



- Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Program ini diarahkan pada kegiatan sosialisasi dan informasi terkait jasa konstruksi. Program ini dalam rangka menyediakan informasi jasa konstruksi yang update.

4) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Program Pengembangan Perumahan
Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan rumah susun. Program ini dilakukan dalam rangka mewujudkan rumah susun yang bersih, sehat dan layak huni sehingga tercapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- Program Kawasan Permukiman
Program ini diarahkan pada kegiatan perbaikan dan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Program ini dilakukan dalam rangka mewujudkan rumah yang layak huni sehingga tercapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

5) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Program ini dilakukan dalam rangka menurunkan angka kriminalitas dan peningkatan cakupan penegakan perda.
- Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan aparatur pemadam kebakaran, pencegahan kebakaran dan penanggulangan bencana. Program ini dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta kesiapsiagaan terkait terjadinya bencana.
- Program Penanggulangan Bencana
Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait kesiapsiagaan bencana. Program ini

dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya bencana serta kesiapsiagaan terjadinya bencana, dilaksanakan oleh Satpol PP Damkar. Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Penanganan Pasca bencana dan Respon Cepat Darurat Bencana dilaksanakan oleh BPBD. Program ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

6) Bidang Sosial

➤ Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat. Program ini dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

➤ Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial, kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial, dan kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan bagi pemerlu perlindungan sosial. Program ini dilakukan dalam rangka peningkatan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial.

➤ Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, dan perlindungan anak-anak terlantar. Program ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi anak-anak terlantar serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

➤ Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, bantuan makanan dan sandang.

Program ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan.

➤ Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan. Program ini dilakukan dalam rangka mewujudkan taman makam pahlawan yang bersih dan tertata.

b. Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar

1) Bidang Tenaga Kerja

➤ Program Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja. Program ini dilakukan untuk peningkatan pelatihan berbasis kompetensi.

➤ Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia. Program ini dilakukan untuk optimalisasi kesempatan kerja dalam menyerap lapangan kerja.

➤ Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah. Program ini dilakukan untuk mewujudkan harmonisasi di hubungan industrial dan mencegah kasus demo.

2) Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

➤ Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan. Program ini dilakukan dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan dan implementasi PUG di semua sektor kehidupan.

➤ Program Perlindungan Perempuan



Program ini diarahkan pada kegiatan sinkronisasi dan koordinasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan kegiatan fasilitasi layanan rujukan bagi korban. Program ini dilakukan dalam rangka menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan.

➤ Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga. Program ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga.

➤ Program Pemenuhan Hak Anak

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak. Program ini dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak anak sehingga anak tumbuh berkembang dengan optimal.

➤ Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada kegiatan sinkronisasi dan koordinasi perlindungan terhadap anak dan kegiatan pendampingan bagi anak korban kekerasan. Program ini dilakukan dalam rangka penurunan kasus kekerasan terhadap anak.

3) Bidang Pangan

➤ Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan infrastruktur lumbung pangan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

➤ Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan pengadaan cadangan pangan pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan petani.

- Program Pengawasan Keamanan Pangan
Program ini diarahkan pada kegiatan pengawasan pangan segar untuk meningkatkan kedaulatan pangan.

4) Pertanian

- Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
Program ini diarahkan pada kegiatan Akes Reforma Agraria di Desa Ketitang Kecamatan Jumo. Reforma Agraria ini untuk mengatasi persoalan umum di bidang agraria, sosial, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan yang melibatkan berbagai stakeholder. Kegiatan ini juga melibatkan pemberdayaan masyarakat maupun peningkatan UMKM untuk kemakmuran rakyat melalui penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset.

5) Bidang Lingkungan Hidup

- Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Program ini diarahkan pada kegiatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Program ini diarahkan pada kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyimpanan dan pengelolaan limbah B3 untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

- Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

- Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Program ini diarahkan pada kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

- Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA untuk meningkatkan prosentase angka sampah yang tertangani.

6) Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

- Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk dan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

- Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

7) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

- Program Penataan Desa
Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana desa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen desa
- Program Kerjasama antar Desa
Program ini diarahkan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen desa.
- Program Administrasi Pemerintahan Desa
Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi perencanaan pembangunan desa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen desa.
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
Program ini diarahkan untuk kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen desa.

8) Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

- Program Pengendalian Penduduk
Program ini diarahkan untuk kegiatan penyediaan data dan informasi keluarga untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.



- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Program ini diarahkan pada kegiatan pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB untuk meningkatkan cakupan akseptor KB
- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB untuk meningkatkan cakupan akseptor KB

9) Bidang Perhubungan

- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Program ini diarahkan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.

10) Bidang Komunikasi Dan Informatika

- Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan media informasi publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Program Aplikasi Informatika
Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

11) Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

- Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi
Program ini diarahkan untuk Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan prosentase kopeehat.
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro

Program ini diarahkan pada pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro untuk meningkatkan UKM aktif

- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil dan usaha mikro

Program ini diarahkan pada pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro untuk meningkatkan jumlah UKM aktif. Program ini dalam rangka penguatan peran UMKM yang belum optimal dan peningkatan usaha mikro yang naik kelas serta perlunya upaya peningkatan UKM aktif dalam pembangunan daerah.

12) Bidang Penanaman Modal

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota. Program ini dalam rangka penguatan upaya keras terkait ketersediaan SDM bidang PM dan perizinan yang terlatih.

- Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal. Program ini dalam rangka peningkatan ketersediaan informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan.

- Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu pelayanan perizinan online, perijinan yang bebas calo, dan perijinan yang diterbitkan tepat waktu.

- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitukesesuaian pelaksanaan perzinan yang diterbitkan, pengaduan masyarakat yang terselesaikan, dan tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan.

13) Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Program ini diarahkan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu organisasi pemuda yang aktif.
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota dan kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan. Program ini dalam rangkapeningkatan prestasi olahraga yang belum optimal.
- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Program ini diarahkan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitugugus depan yang aktif

14) Bidang Statistik

- Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah. Program ini dalam rangka peningkatan Ketersediaan data

statistik sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan daerah.

15) Bidang Persandian

- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dalam rangka peningkatan sarana prasarana keamanan informasi dan peningkatan SDM di bidang persandian sehingga terwujud keamanan informasi.

16) Bidang Kebudayaan

- Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya, kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, dan kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan. Program ini dalam rangka peningkatan kelompok seni budaya yang produktif.

- Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional. Program ini dalam rangka melestarikan kesenian tradisional.

- Program Pembinaan Sejarah

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal. Program ini dalam rangka pelestarian cagar budaya dan sejarah lokal yang belum optimal.

- Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya. Program ini dalam rangka pelestarian cagar budaya dan sejarah lokal yang belum optimal.

17) Bidang Perpustakaan

- Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Perpustakaan dan kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat. Program ini dalam rangka peningkatan pertumbuhan pengunjung dan peminjam di perpustakaan.

- Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
Program ini diarahkan pada kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno. Program ini dalam rangka peningkatan pengelolaan naskah kuno dan koleksi nasional yang dilestarikan di Kabupaten Temanggung.

18) Bidang Kearsipan

- Program Pengelolaan Arsip
Program ini diarahkan pada kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis, kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota, dan kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini dalam rangka peningkatan indeks manajemen kearsipan.
- Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu arsip vital konvensional yang dialihmediakan.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Bidang Kelautan dan Perikanan

- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Perikanan Tangkap. Program ini dalam rangka peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum.
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dan kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan. Program ini dalam rangkapeningkatan swasembada pada ikan konsumsi.

- Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Program ini diarahkan pada kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitupeningkatan lokasi penebaran benih ikan.
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Program ini diarahkan pada kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitutersedianya data dan informasi produksi olahan hasil perikanan.

2) Bidang Pariwisata

- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata. Program ini dalam rangka pengembangan destinasi wisata yang belum optimal.
- Program Pemasaran Pariwisata
Program ini diarahkan pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata. Program ini dalam rangka peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung dan peningkatan lama tinggal wisatawan yang masih rendah.
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar. Program ini dalam

rangka Peningkatan desa wisata yang naik klasifikasi dan Peningkatan pelaku ekonomi kreatif.

3) Bidang Pertanian

➤ Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Program ini diarahkan pada kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme. Program ini dalam rangka Peningkatan produktivitas tanaman pangan, peningkatan produktivitas tanaman hortilkultura dan tanaman perkebunan, peningkatan berbagai macam komoditas pertanian seperti tembakau dan kopi, dan peningkatan produktivitas ternak ruminansia dan ternak unggas.

➤ Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, Jaringan Irigasi Usaha Tani, dan Rumah Potong Hewan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitukecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama

➤ Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitupeningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat dan penanganan penyakit hewan.

➤ Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitupengendalian bencana pertanian

- Program Penyuluhan Pertanian
Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu kelompok tani yang naik kelas.

4) Bidang Perdagangan

- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Program ini diarahkan pada kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
Program ini dalam rangka Peningkatan pedagang kaki lima dan pedagang pasar yang menempati ruang sesuai peruntukannya, peningkatan manajemen pengelolaan pasar, dan peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan.

5) Bidang Perindustrian

- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Program ini diarahkan pada kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi. Program ini dalam rangka masih terjadinya fluktuasi harga pada hortikultura.
- Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang di tera ulang.
- Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kota
Program ini diarahkan pada kegiatan Pengendalian Ijin Usaha Industri. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase pembinaan industri penghasil cukai

6) Bidang Transmigrasi



- Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase calon transmigran yang mendapatkan pembekalan

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Sekretariat Daerah

- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Program ini diarahkan pada kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Fasilitasi dan Koordinasi Hukum serta Fasilitasi Kerja Sama Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan Pilar Batas yang terinventarisir, Prosentase Pelaporan SPM, Perangkat Daerah tepat Waktu, Cakupan Kecamatan Tertib Adminsitrasi, Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan kegamaan kondisi baik, Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati, Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH, Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi, dan Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi.
- Program Perekonomian dan Pembangunan
Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi, Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi, Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP, Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu, Prosentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan, Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan,

Persentase kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa, Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja tepat waktu, dan Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah.

2) Sekretariat DPRD

- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Program ini diarahkan pada kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dan Fasilitasi Tugas DPRD. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda, Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana, dan Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan.

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan

- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu dan Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu.
- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, SDA dan Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, Perekonomian, SDA dan Infrastruktur. Program ini dilakukan dalam rangka diperlukannya peningkatan keoptimalan persentase ketercapaian kinerja pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pengendalian monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan.

2) Keuangan

➤ Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Program ini dilaksanakan dalam rangka diperlukannya peningkatan indeks pengelolaan keuangan daerah (IKPD);

➤ Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah meliputi Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, Penagihan Pajak Daerah dan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak, Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu, Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu, Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah dan Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu

3) Kepegawaian

➤ Program Kepegawaian Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Mutasi dan Promosi ASN, Pengembangan Kompetensi ASN dan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur. Program ini dilaksanakan dalam rangka belum optimalnya indeks profesionalitas ASN dan diperlukannya penerapan sistem merit secara optimal dalam pengelolaan kepegawaian di Kabupaten Temanggung.

4) Pendidikan dan Pelatihan

➤ Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, Program ini dilaksanakan dalam rangka Belum optimalnya indeks profesionalitas ASN dan diperlukannya peningkatan pengikutsertaan ASN dalam diklat.

5) Penelitian dan Pengembangan

➤ Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan; Sosial dan Kependudukan; dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Program ini dilaksanakan dalam rangka belum adanya sumber daya manusia khususnya fungsional peneliti bidang penelitian dan pengembangan.

f. Unsur Pengawasan Urusan pemerintahan

1) Inspektorat Daerah

➤ Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu. Program ini dilaksanakan dalam rangka upaya peningkatan indeks persepsi anti korupsi dan

perlunya peningkatan optimalisasi maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan Pendampingan dan Asistensi. Program ini dilaksanakan dalam rangka diperlukannya peningkatan pengawasan baik perencanaan, keuangan maupun penyelenggaraan kinerja.

g. Unsur Kewilayahan

1) Kecamatan

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan dan Persentase realisasi penerimaan PBB.

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan pada kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang meliputi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu, Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik dan Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif.

- Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan. Program ini dilakukan untuk

mencapai indikator kinerja yaitu Persentase penanganan laporan kejadian.

- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah meliputi Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase tempat ibadah kondisi baik.
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program ini diarahkan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan dan Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu.

h. Unsur Pemerintahan Umum

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan meliputi Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Program ini dilakukan dalam rangka upaya pembentukan FKUB di Kecamatan.
- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan

Ekonomi, Sosial dan Budaya meliputi Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Program ini dilaksanakan dalam rangka perluasan terhadap sekolah dan desa/kelurahan yang mendapatkan pemahaman kebangsaan serta sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial meliputi Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah, Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

5.2.2 Pagu Indikatif Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang

Berikut adalah rekapitulasi pagu indikatif pada setiap program berdasarkan urusannya di RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Secara rinci untuk penjabaran program/kegiatan/sub kegiatan beserta indikator kinerja dan pagunya dituangkan dalam lampiran RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Tabel 5.32
Rekapitulasi Anggaran Per Urusan dan Per Bidang

NO	URUSAN	TOTAL ANGGARAN
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.513.980.007.858
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	734.312.354.374
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	479.041.544.588
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	241.694.707.422
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	6.537.286.990
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	24.991.948.484
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	27.402.236.000
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	653.473.069.887
1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	7.482.113.397
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	641.800.000
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	28.675.191.238
4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	0
5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	87.486.332.177
6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6.984.763.588
7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	385.828.230.676
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	15.231.199.008
9	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	46.415.474.070
10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	12.899.291.262
11	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	15.933.529.939
12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	5.462.668.553
13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	12.021.183.000
14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	302.833.000
15	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	97.752.500
16	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	19.778.635.334
17	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	8.190.002.145
18	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	42.050.000



NO	URUSAN	TOTAL ANGGARAN
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	47.572.278.700
1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	249.950.000
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	1.051.208.000
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	34.955.157.000
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	9.509.303.700
5	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	1.806.660.000
6	Transmigrasi	0
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	152.212.668.098
1	Sekretariat Daerah	77.733.490.473
2	Sekretariat DPRD	47.479.177.625
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	52.707.921.965
1	Perencanaan	9.291.889.326
2	Keuangan	36.335.198.055
3	Kepegawaian	6.087.382.584
4	Pendidikan Dan Pelatihan	611.000.000
5	Penelitian Dan Pengembangan	382.452.000
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.648.808.827
1	Inspektorat Daerah	6.648.808.827
VII	UNSUR KEWILAYAHAN	79.932.129.671
1	Kecamatan	79.932.129.671
VIII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	7.134.815.189
1	Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.134.815.189
Jumlah		2.486.661.750.195

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.



Tabel 5.33
Rencana Pembiayaan Per Urusan dan Program

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.513.980.007.858
A	PENDIDIKAN				734.312.354.374
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APK SD sederajat	105,05	%	215.469.632.061
		Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A	0,965	angka	
		Persentase APM SD sederajat	98,3	%	
		Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/ SDLB/MI/ Paket A	0,975	angka	
		Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	79,5	%	
		Persentase SD terakreditasi minimal B	96,97	%	
		Angka kelulusan SD sederajat	100	%	
		Angka putus sekolah SD sederajat	0,03	%	
		Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	53,9	%	
		Persentase APK SMP sederajat	98,59	%	
		Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B	1	%	
		Persentase APM SMP sederajat	88	%	
		Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B	1,055	%	
		Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98,5	%	
		Persentase ruang kelas SMP negeri dalam keadaan baik	95,17	%	
	Persentase SMP terakreditasi minimal B	97,2	%		

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF
		Angka kelulusan SMP sederajat	100	%	
		Angka putus sekolah SMP sederajat	0,2	%	
		Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	63,21	%	
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	76,6		
		Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100	%	
		Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	%	
		Prosentase TK terakreditasi minimal B	51	%	
		Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	47,47	%	
		Persentase angka melek huruf usia ≥ 15 tahun	98,64	%	
		Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	97,19	%	
		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	%	
		Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	15,8	angka	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100	%	518.842.722.313
B	KESEHATAN				479.041.544.588
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kematian ibu	67,5	Per 100.000 kelahiran hidup	317.081.259.000
		Angka kematian bayi	12	Per 1000 kelahiran hidup	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF
		Prevalensi balita gizi buruk	0,5	%	
		Presentase rumah tangga yang memiliki jamban	83,84	%	
		Presentase puskesmas yang sarprasnya sesuai standar	100	%	
		Presentase Ketersediaan obat sesuai kebutuhan	98	%	
		Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100	% minimal	
		Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	% maksimal	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	% maksimal	
		Presentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100	% maksimal	
		Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100	%	
		Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	72	%	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)	7	% minimal	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	% minimal	
		Angka Kematian Balita	13,6	Maksimal per 1000 KH	
		Presentase anak usia pendidikan dasar yang sesuai mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
		Cakupan warga negara indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	% minimal	
		Cakupan warga negara indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	% minimal	
		Presentase kunjungan baru di pelayanan kesehatan dasar (Cakupan rawat jalan)	43,5	%	



No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF
		Presentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah terakreditasi utama	53,85	%	
		Presentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
		Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
		Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%	
		Presentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	100	%	
		Penanganan KLB 1x24 jam	100	%	
		Angka penemuan kasus Malaria	<1	per 1000 penduduk	
		Inciden rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	<20	per 1000 penduduk	
		Angka penemuan kasus baru Kusta	<1	per 1000 penduduk	
		Persentase Desa atau kelurahan UCI	100	%	
		Proporsi anak umur 1 tahun diimunisasi campak	95	%	
		Prevalensi gizi kurang pada anak balita (0-60 bulan)	15,5	% maksimal	
		Prevalensi stunting pada anak baduta (0-24 bulan)	27	% maksimal	
		Persentase Bayi umur < 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	80	% maksimal	
		Prevalensi anemia pada ibu hamil	20	% maksimal	
		Persentase Desa bebas rawan gizi	100	%	
		Persentase Rumah Sehat	82	%	
		Cakupan nilai akreditasi RSUD	100	%	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF
		Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit	54	%	
		Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	%	
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	100	%	10.000.000
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi	62	%	450.000.000
		Penggunaan obat rasional di puskesmas	77	%	
		Pengawasan makanan dan minuman di pasar tradisoinal	100	%	
		Sarana pelayanan mendapatkan ijin kesehatan	100	%	
		Produksi industri rumah tangga	100	%	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan	Persentase rumah tangga sehat (PHBS rumah tangga) strata utama dan paripurna	83,09	%	0
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100	%	161.500.285.588
C	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				241.694.707.422
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	97	%	29.963.600.000
		Cakupan area layanan daerah irigasi	59,32	%	
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	90	%	16.192.686.500
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	%	0

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	50	%	7.457.000.000
5	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Desa terfasilitasi kegiatan Banku/Hibah	100	%	125.000.000
6	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase gedung pemerintah kondisi baik	80	%	9.050.000.000
7	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Trotoar kondisi baik	62	%	250.000.000
8	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	85	%	162.970.500.000
		Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	93,73	%	
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	88,1	%	650.000.000
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi	90	%	0
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100	%	15.035.920.922
D	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				6.537.286.990
1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	5	%	470.427.990
		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	86,8	%	
2	Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	89,42	%	6.066.859.000
		Persentase kawasan kumuh perkotaan	18,25	%	
		Persentase warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	%	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF
		Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100	%	
E	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				24.991.948.484
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	100	%	1.256.990.000
		Rasio Linmas per RT	1,62	Rasio	
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100	%	
2	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	61	%	1.669.620.000
		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	69,8	%	
		Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten	44	angka	
		Persentase aparaturnya yang memenuhi standar kualifikasi	44	%	
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	%	
3	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan desa tangguh bencana	10,47	%	2.825.938.800
		Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	100	%	
		Persentase Tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana	100	%	
		Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	86,4	%	
		Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	100	%	
		Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana	100	%	



No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%		
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%		
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%		
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Ex BAU)	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100	%	19.239.399.684	
F	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					27.402.236.000
1	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100	%	670.000.000	
2	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	1.568.124.692	
		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%		
		Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%		
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	%		
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	%	16.262.618.600	
		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	85	%		

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	95	%	
		Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	10,2	%	
		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	%	
4	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	100	%	2.798.000.000
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	100	%	227.279.900
6	Program Penanganan warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase pemulangan warga Negara migrant korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal	100	%	0
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100	%	5.876.212.808
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				653.473.069.887
A	TENAGA KERJA	7.482.113.397			
1	Program Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	65	%	655.425.000
		Persentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru atau bekerja	45	%	
		Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang	45	%	
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	65	%	115.000.000
		Tingkat setengah pengangguran	5,7	%	
		Persentase tenaga kerja formal	31	%	
3	Program Hubungan Industrial	Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	79	%	135.000.000
		Persentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	58	%	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF
		Persentase perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	45	%	
		Persentase perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	100	%	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100	%	6.576.688.397
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				641.800.000
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	2,34	%	60.000.000
		Rasio perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan dokumen perencanaan	45,71	%	
2	Program Perlindungan Perempuan	Pravelensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	0,011	%	187.497.000
		Persentase perempuan korban kekerasan	0,011	%	
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase desa sayang ibu dan bayi	62,28	%	60.000.000
		Persentase rumah sakit sayang ibu dan bayi	100	%	
4	Program Pemenuhan Hak Anak	Presentase terbentuknya kecamatan layak anak	60	%	20.000.000
5	Program Perlindungan Khusus Anak	Presentase anak korban kekerasan	0,011	%	314.303.000
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				28.675.191.238
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rasio ketersediaan pangan	100	%	1.200.000.000
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan Desa pelaksana program ketahanan pangan	27,68	%	170.000.000

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rasio lumbung pangan masyarakat	56	%	0
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	90	%	25.000.000
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100	%	27.280.191.238
D	URUSAN PERTANAHAN		0		0
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	100	%	0
E	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				87.486.332.177
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	62,73	%	184.273.810
		Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	100	%	
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	46	Angka	858.102.400
		Indeks Kualitas Udara	86	Angka	
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	74,33	%	1.320.526.200
		Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung	0,067	%	
		Cakupan RTH Publik	0,07	%	
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha yang memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3	100	%	10.000.000

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen n HidupLingkungan Hidup	100	%	35.001.300
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	26,88	%	0
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	66,67	%	176.000.000
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	%	0
9	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	38,2	%	70.981.702.300
		Cakupan layanan persampahan	55	%	
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100	%	13.920.726.167
F	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				6.984.763.588
1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	97,4	%	743.500.000
		Persentase kepemilikan KTP el	99	%	
		Presentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	72	%	
		Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu	100	%	
2	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	75	%	15.000.000
		Persentase penerbitan akta kematian	99	%	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF
		Cakupan pelayanan akta perkawinan tepat waktu	100	%	
		Cakupan pelayanan akta perceraian tepat waktu	100	%	
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	60	%	631.500.000
		Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	90	%	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100	%	5.594.763.588
G	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				385.828.230.676
1	Program Penataan Desa	Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada	40	%	11.480.000.000
		Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Indek Pembangunan Desa	37	%	
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah di tetapkan	100	%	0
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	90	%	361.625.771.000
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	90	%	
		Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	85	%	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	100	%	
		Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu	85	%	
		Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa	10	%	
		Persentase desa yang tertib pengelolaan aset	85	%	
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	35	%	8.606.200.000

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF
		Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif	32	%	
		Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	10	%	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100	%	4.116.259.676
H	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				15.231.199.008
1	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kelurahan	100	%	
		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed	9,17	%	301.605.000
		Persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	2,04	%	
		Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19th)	26,3	%	
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	76,21	%	6.292.841.000
		Persentase kepesertaan KB aktif	76,21	%	
		Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	49,19	%	
		Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)	33,90	%	
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Indeks pembangunan keluarga	50	%	4.400.040.000
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100	%	4.236.713.008
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				46.415.474.070
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadahi	38,65	%	28.068.004.000
		Persentase potensi titik parkir yang tertangani	100	%	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	
		Presentase kendaraan bermotor yang laik jalan	99,5	%		
		Persentase bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar	50	%		
		Persentase bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar	62,5	%		
		Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar	65,22	%		
		Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	87,18	%		
		Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100	%		
		Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100	%		
		Persentase Penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	14,26	%		
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100	%	18.347.470.070	
J	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					12.899.291.262
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase PPID badan publik yang aktif	20	%	5.496.552.400	
		Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	30	%		
		Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	100	%		
2	Program Aplikasi Informatika	Persentase ketersediaan jaringan intranet	100	%	2.938.578.624	
		Persentase sistem informasi yang terintegrasi	50	%		
		Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	60	%		
		Persentase ketersediaan akses internet publik	100	%		
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100	%	4.464.160.238	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF
K	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				15.933.529.939
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	Persentase koperasi aktif	22	%	30.000.000
2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Persentase penambahan nilai asset dan omset koperasi	30	%	130.000.000
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif	75	%	0
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil dan usaha mikro UKM	Persentase usaha mikro aktif	35	%	0
5	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha	1,07	%	0
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100	%	15.773.529.939
L	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				5.462.668.553
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi	625	Milyar	150.000.000
		Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	10	%	
		Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	100	%	
2	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	100	%	410.000.000
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan online	100	%	409.629.400
		Persentase perijinan yang bebas calo	100	%	
		Persentase perijinan yang diterbitkan tepat waktu	95	%	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Perzinan yang diterbitkan	100	%	
		Persentase Pengaduan masyarakat yang terselesaikan	100	%	385.000.000
		Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	100	%	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100	%	4.108.039.153
M	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				12.021.183.000
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	80,76	%	475.000.000
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Prosentase pelatih olahraga bersertifikat	35,4	%	11.146.183.000
		Persentase prestasi olah raga	59	%	
		Persentase atlet berprestasi	21	%	
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Presentase gugus depan yang aktif	92,89	%	400.000.000
N	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				302.833.000
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan ketersediaan data makro daerah	100	%	302.833.000
O	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				97.752.500
1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat penilaian persiapan/ pengelolaan resiko keamanan informasi	1	%	97.752.500

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF
P	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				19.778.635.334
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kelompok seni budaya yang produktif	80,64	%	13.580.141.000
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kelompok kesenian yang produktif	32,16	%	0
3	Program Pembinaan Sejarah	Persentase pelestarian Sejarah Lokal	6,73	%	118.483.000
4	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase pelestarian cagar budaya	5,18	%	248.332.000
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100	%	5.831.679.334
Q	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				8.190.002.145
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan	40	%	3.985.606.400
		Persentase perpustakaan yang aktif	35,62	%	
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Cakupan naskah kuno Kabupen Temanggung dan koleksi nasional yang dilestarikan	100	%	185.000.000
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100	%	4.019.395.745
R	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				42.050.000
1	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	31,98	%	42.050.000
2	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip vital konvensional yang dialihmediakan	50	%	0

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				47.572.278.700
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				249.950.000
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Prosentase nelayan perairan umum yang terbina	30	%	0
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktivitas ikan nila	6,2	kg/m2	239.950.000
		Produktivitas ikan lele	13,8	kg/m2	
		Produktivitas ikan mas	6	kg/m2	
3	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	33	%	0
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase tersedianya data dan informasi produksi olahan hasil perikanan	100	%	10.000.000
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				1.051.208.000
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase obyek wisata yang berkembang	41,66	%	331.172.000
2	Program Pemasaran Pariwisata	Pertumbuhan jumlah wisatawan	21	%	129.096.000
		Lama tinggal wisatawan	1	hari	
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Desa Wisata	11,76	%	590.940.000
		Persentase Desa Wisata Naik Klasifikasi	5	%	
		Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	2	%	
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				34.955.157.000
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi	63,3	kwintal/ha	13.971.897.000

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF
		Produktivitas jagung	46	kwintal/ha	
		Produktivitas Ubi Kayu	339,8	kwintal/ha	
		Produktivitas bawang putih	79,6	kwintal/ha	
		Produktivitas bawang merah	80,15	kwintal/ha	
		Produktivitas cabai rawit	55,15	kwintal/ha	
		Produktivitas cabai besar	69,5	kwintal/ha	
		Produktivitas tembakau	6,8	kwintal/ha	
		Produktivitas kopi robusta	7,25	kwintal/ha	
		Produktivitas kopi arabika	7	kwintal/ha	
		Produktivitas Cengkeh	2,45	kwintal/ha	
		Produktivitas Vanili	2,95	kwintal/ha	
		Produktivitas ternak sapi	177,6	Kg/Ekor	
		Produktivitas ternak domba	13,71	Kg/Ekor	
		Produktivitas ternak kambing	13,71	Kg/Ekor	
		Produktivitas ternak ayam ras pedaging	0,75	Kg/Ekor	
		Produktivitas ternak ayam ras petelur	10,88	Kg/Ekor	
		Produktivitas ternak ayam buras	0,7	Kg/Ekor	
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	76,55	%	19.716.260.000
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penanganan penyakit hewan	90	%	500.000.000
		Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	70	%	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian bencana pertanian	40,3	%	500.000.000
5	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang naik kelas	0,98	%	267.000.000
D	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				9.509.303.700
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik	67	%	8.769.303.700
		Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	70	%	
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	90	%	
		Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	34	%	
2	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi	68,41	%	30.000.000
4	Program Pengembangan Ekspor	Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sektor perdagangan	2,56	%	400.000.000
3	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	95	%	135.000.000
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100	%	175.000.000
E	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1.806.660.000
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase IKM industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	35	%	906.660.000
2	Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Prosentase pembinaan industri penghasil cukai	5,3	%	900.000.000

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF
F	TRANSMIGRASI				0
1	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase calon transmigran yang mendapatkan pembekalan	100	%	0
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				125.212.668.098
A	SEKRETARIAT DAERAH				77.733.490.473
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah berpredikat B dalam penyusunan LKJiP	74,5	%	36.449.281.973
		Tersedianya administrasi keuangan, umm dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	
		Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan kepala daerah	100	%	
		Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	100	%	
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pilar Batas yang terinventarisir	100	%	38.261.070.000
		Prosentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	100	%	
		Cakupan Kecamatan Tertib Adminstrasi	100	%	
		Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	90	%	
		Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	30	%	
		Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	100	%	
		Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	90	%	
		Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi	75	%	
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	%	3.023.138.500
		Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	100	%	
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	80	%	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF
		Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu	100	%	
		Persentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan	100	%	
		Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	100	%	
		Persentase kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	100	%	
		Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja tepat waktu	100	%	
		Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	95	%	
B	SEKRETARIAT DPRD				47.479.177.625
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100	%	30.595.041.832
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda	26,67	%	16.884.135.793
		Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	100	%	
		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	58	%	
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				52.707.921.965
A	PERENCANAAN				9.291.889.326
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100	%	1.829.743.000
		Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	95	%	
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pembangunan manusia	90	%	620.442.000

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	90	%	
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi dan sumber daya alam	90	%	
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	90	%	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100	%	6.841.704.326
B	KEUANGAN	36.335.198.055			
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	100	%	17.627.423.796
		Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	89,96	%	
		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100	%	
		Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100	%	
		Persentase realisasi keuangan	93	%	
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	90	%	
		Opini BPK atas LKPD	WTP	-	
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	88,1	%	1.291.180.400
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	99,1	%	
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	1,27	%	991.814.400
		Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	100	%	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF
		Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100	%	
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	95	%	
		Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	95	%	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100	%	16.424.779.459
C	KEPEGAWAIAN				6.087.382.584
1	Program Kepegawaian Daerah	Persentase penyusunan formasi pegawai	100	%	1.565.000.000
		Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu	100	%	
		Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	100	%	
		Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	80	%	
		Persentase Perempuan pada Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	48	%	
		Persentase Pelanggaran disiplin ASN	0,2	%	
		Persentase Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN	90	%	
		Persentase Pelaksanaan Updating Data Kepegawaian	95	%	
		Persentase penyelesaian pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional	100	%	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100	%	4.522.382.584
D	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				611.000.000
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Pengawas yang memiliki Kompetensi Diklat Kepemimpinan	35	%	611.000.000

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF
		Persentase ASN yang memiliki kompetensi Teknis dan Fungsional sesuai jabatannya	18	%	
E	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				382.452.000
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	100	%	382.452.000
		Persentase inovasi daerah yang dikembangkan	65	%	
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				6.648.808.827
A	INSPEKTORAT DAERAH				6.648.808.827
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	100	%	468.716.000
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	46	%	
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	23	%	
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	48	%	
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai maturitas SPIP	3,3	Angka	299.716.000
		Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) / Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	60	%	
		Persentase tindak lanjut aduan Whistle blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	100	%	
		Nilai Survey Penilaian Integritas	81,97	Angka	
		Prosentase penanganan aduan masyarakat	100	%	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100	%	5.880.376.827

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF
VII	UNSUR KEWILAYAHAN				79.932.129.671
A	KECAMATAN				79.932.129.671
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100	%	58.346.380.271
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	100	%	2.479.000.000
		Persentase realisasi penerimaan PBB	100	%	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	100	%	18.831.358.400
		Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik	100	%	
		Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	100	%	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	100	%	264.000.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tempat ibadah kondisi baik	80	%	1.391.000
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	1	%	10.000.000
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	100	%	
VIII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				7.134.815.189
A	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				7.134.815.189
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	62	%	48.381.100
		Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	10	%	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya	87	%	1.736.687.850
		Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik	30	%	
		Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	30	%	
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan	100	%	100.000.000
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi	100	%	836.597.640
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah	100	%	1.135.000.000
		Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	10	%	
		Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	35	%	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100	%	3.278.148.599
JUMLAH TOTAL					2.486.661.750.195

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

Dalam mendukung pembangunan daerah dibutuhkan kolaborasi antara Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah yang terdiri dari Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Lembaga Sosial lainnya. Khusus untuk TJSLP Kabupaten Temanggung telah menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 126 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. TJSLP dan Lembaga Sosial lainnya sudah mendukung pembangunan daerah dan perannya dapat dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat di berbagai bidang. Pemerintah Kabupaten Temanggung mengapresiasi kebijakan Forum TJSLP dan Lembaga sosial lainnya yang telah berperan aktif mendukung pembangunan di Kabupaten Temanggung di berbagai bidang. Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung bersama Forum TJSLP melaksanakan kegiatan pertemuan bersama membahas agenda kegiatan pembangunan daerah yang memerlukan kerjasama dengan TJSLP secara rutin tiap tiga bulan sekali. TJSLP di Kabupaten Temanggung berkomitmen sebagian laba untuk program pembangunan daerah, dengan 2 (dua) mekanisme, yaitu dapat menyalurkan sendiri atau dikumpulkan melalui Forum TJSLP. Pemerintah Daerah berfungsi menyediakan *database* baik berupa program/kegiatan, lokus, dan calon penerima manfaat.

Pada Tahun 2021 Forum TJSLP dan juga Lembaga Non Pemerintah Lainnya (Baznas, Lazisnu, Lazismu, dan masyarakat) telah memberikan kontribusi di berbagai bidang sebesar Rp7.419.872.220,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang terdiri dari Rp5.287.911.824,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) digunakan untuk penanganan kemiskinan dan Rp2.131.960.396,00 (dua miliar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus

Sembilan puluh enam rupiah) digunakan untuk bantuan tanaman konservasi, bantuan kesehatan, bantuan sembako dan bantuan RTLH. Pada tahun 2023, TJSLP berkomitmen membantu Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk penanganan kemiskinan dan stunting.

Forum TJSLP merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya, melainkan sebagai sarana meraih keuntungan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Temanggung, sehingga dapat mewujudkan kesamaan persepsi, komitmen dan kepedulian perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Temanggung serta mampu mewujudkan program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Kabupaten Temanggung.

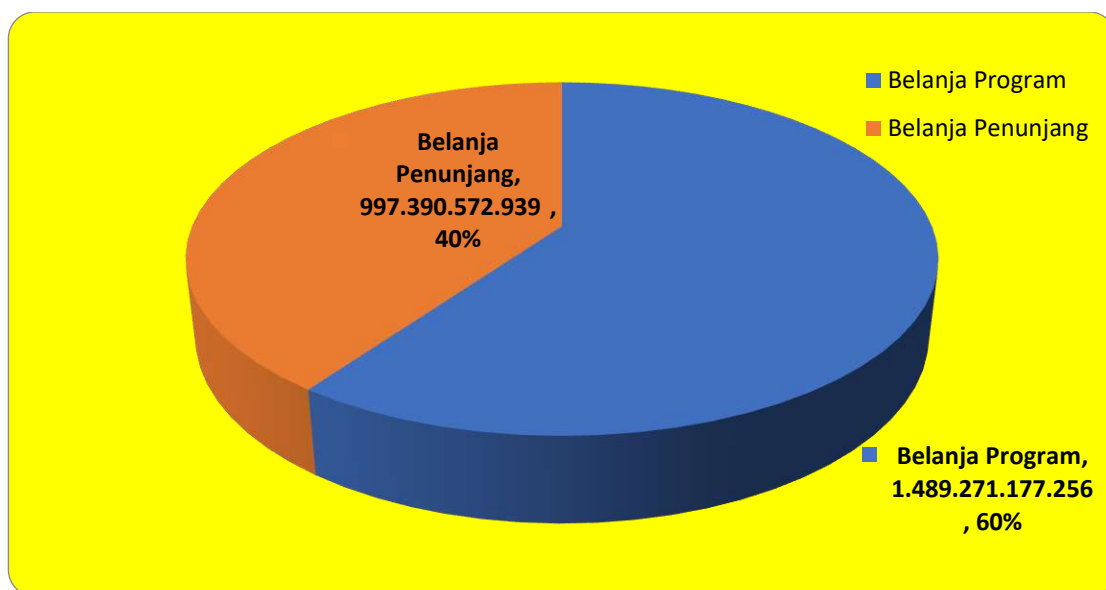
5.3. ANALISIS PEMETAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKPD 2023

Analisis ini merupakan sebuah inovasi yang dilakukan dalam penyusunan dokumen RKPD 2023 yang bertujuan untuk memetakan Prioritas Pembangunan Prioritas Kegiatan dalam RKPD 2023 dan memberikan gambaran akan komitmen Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dalam merencanakan kegiatan dan anggarannya sesuai tema prioritas pembangunan dalam RPJMD 2018-2023.

Metode yang digunakan yaitu dengan menyebar kuesioner serta *deep interview* kepada verifikator perencanaan kegiatan Perangkat Daerah di masing masing bidang sektoral Bappeda untuk menilai kesesuaian Tema Pembangunan dan Prioritas Kegiatan yang telah direncanakan dalam Matrik RKPD 2023. Setelah itu hasilnya diolah dan disajikan secara deskriptif agar informasi yang dibutuhkan tersampaikan.

5.3.1 Persebaran Tema Pembangunan RPJMD 2018-2023 dalam RKPD 2023

Langkah pertama yang dilakukan adalah memilah struktur anggaran RKPD 2023 menjadi dua yaitu belanja urusan penunjang dan belanja program.



Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

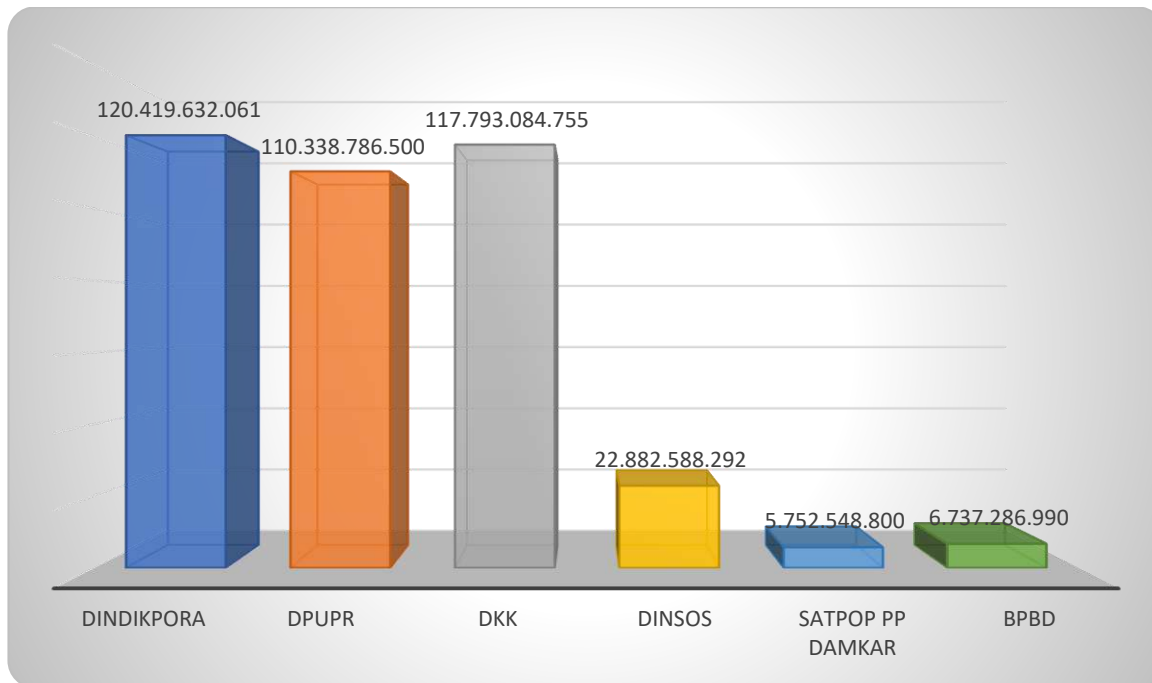
Gambar 5.2.

Anggaran Belanja Program dan Belanja Urusan Penunjang Total anggaran APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah

sebesar Rp2.486.661.750.195,00. Berdasarkan diagram di atas tampak bahwa belanja program dalam RKPD Tahun 2023 adalah 59,89% dari total anggaran atau sebesar Rp1.489.271.177.256,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan penganggaran kita termasuk baik karena porsi anggaran belanja urusan penunjang (pegawai dan rutin) dalam APBD lebih kecil daripada anggaran belanja program.

Selanjutnya dari anggaran belanja program kita kelompokkan lagi menjadi dua, yaitu belanja program untuk pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Belanja program untuk pelayanan dasar adalah belanja program yang mendukung tercapainya target dalam Standar Pelayanan Minimal. Alasan yang mendasari bahwa belanja program pelayanan dasar harus dikeluarkan adalah karena adanya kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran dengan besaran tertentu untuk memenuhi tercapainya target standar pelayanan minimal atau SPM.

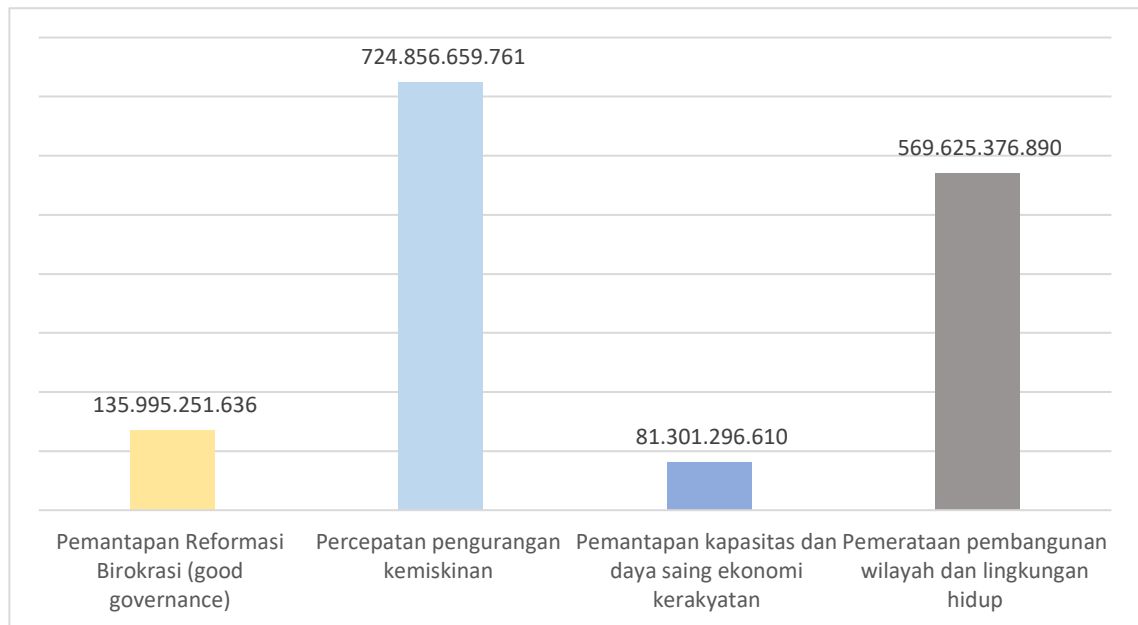
Belanja program untuk kebutuhan memenuhi target pelayanan dasar yaitu standar pelayanan minimal ada di enam perangkat daerah, yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPUPR, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Total anggarannya sebesar Rp383.923.927.398,00.



Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

Gambar 5.3.
Anggaran Belanja Program Terkait Pelayanan Dasar

Selanjutnya anggaran untuk kecamatan sebesar Rp79.932.139.671,00 dikeluarkan dan tersisa anggaran sebesar Rp1.025.415.120.187,00 yang akan dipetakan sesuai tema dengan menggunakan hasil wawancara yang telah dilakukan. Hasil pemetaan tema pada anggaran belanja program tersebut bisa kita lihat pada diagram berikut ini.



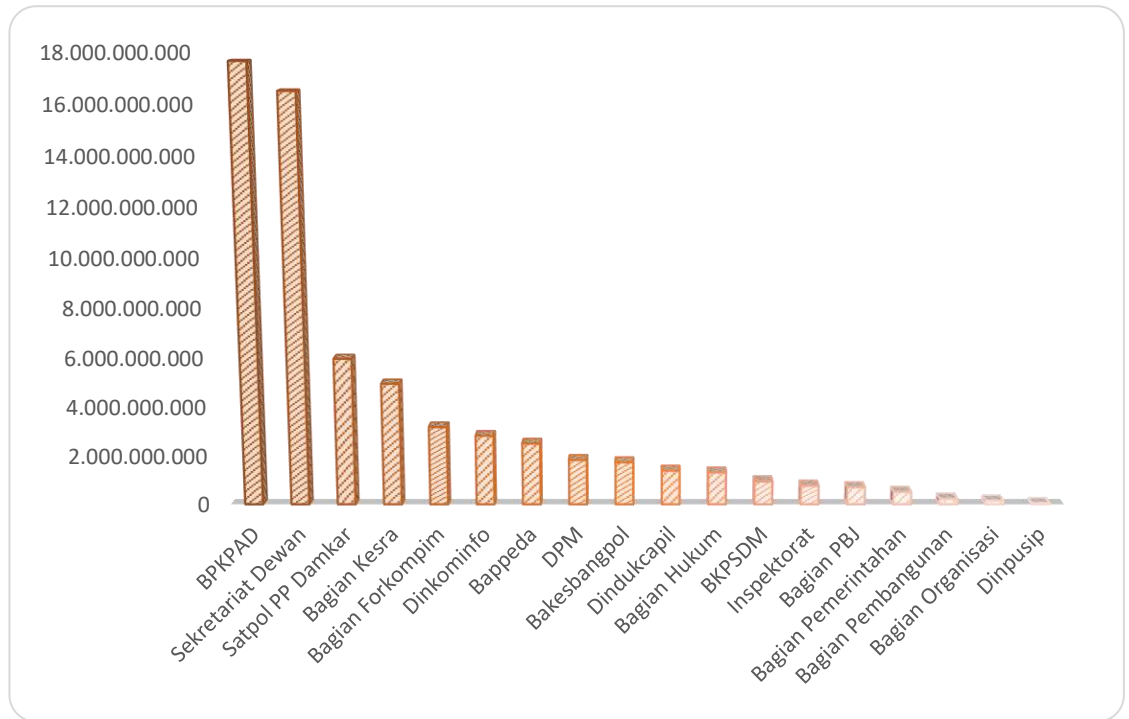
Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, 2022.

Gambar 5.4.
Anggaran Belanja Program Berdasarkan Prioritas Tahun 2023

Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa tema percepatan pengurangan kemiskinan anggarannya paling besar diantara prioritas pembangunannya lainnya, hal ini menunjukkan adanya komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk penanggulangan kemiskinan. Persebaran anggaran terkait empat prioritas pada tahun 2023 secara rinci tersebut di bawah ini:

a. **Pemantapan Reformasi Birokrasi**

Pemantapan reformasi birokrasi di Kabupaten Temanggung dilakukan melalui berbagai upaya salah satunya melalui fokus penganggaran dalam RKPD 2023 sebesar Rp135.995.251.636,00. Perangkat daerah yang berkontribusi pada pemantapan reformasi birokrasi di Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 ada 18 perangkat daerah, yaitu BKPSDM, Inspektorat, Bappeda, BPKPAD, Dinkominfo, Dindukcapil, Baskesbangpol, DPM, Bagian Organisasi, Bagian Forkompim, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Bagian Kesra, Bagian Pembangunan, Bagian PBJ, Dinpusip, Sekretariat Dewan dan Satpol PP Damkar.



Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

Gambar 5.5.
Distribusi Anggaran Belanja Program Perangkat Daerah yang mendukung Pemantapan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023

Perangkat daerah yang kontribusinya sangat besar adalah BPKPAD yaitu sebesar 27,92% dari total anggaran APBD Kabupaten Temanggung untuk belanja program selain pelayanan dasar dan kecamatan atau sebesar Rp17.627.423.796,00. Secara rinci, kontribusi masing-masing perangkat daerah dalam pemantapan reformasi birokrasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.34
Kontribusi Perangkat Daerah dalam Pemantapan Reformasi Birokrasi dalam RKPD Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rupiah)	Persentase
1	BPKPAD	17.627.423.796	27.92%
2	Sekretariat Dewan	16.484.135.793	26.11%
3	Satpol PP Damkar	5.952.548.800	9.43%
4	Bagian Kesra	4.939.716.000	7.82%
5	Bagian Forkompim	3.177.728.000	5.03%
6	Dinkominfo	2.824.164.124	4.47%
7	Bappeda	2.505.217.500	3.97%
8	DPM	1.829.629.400	2.90%

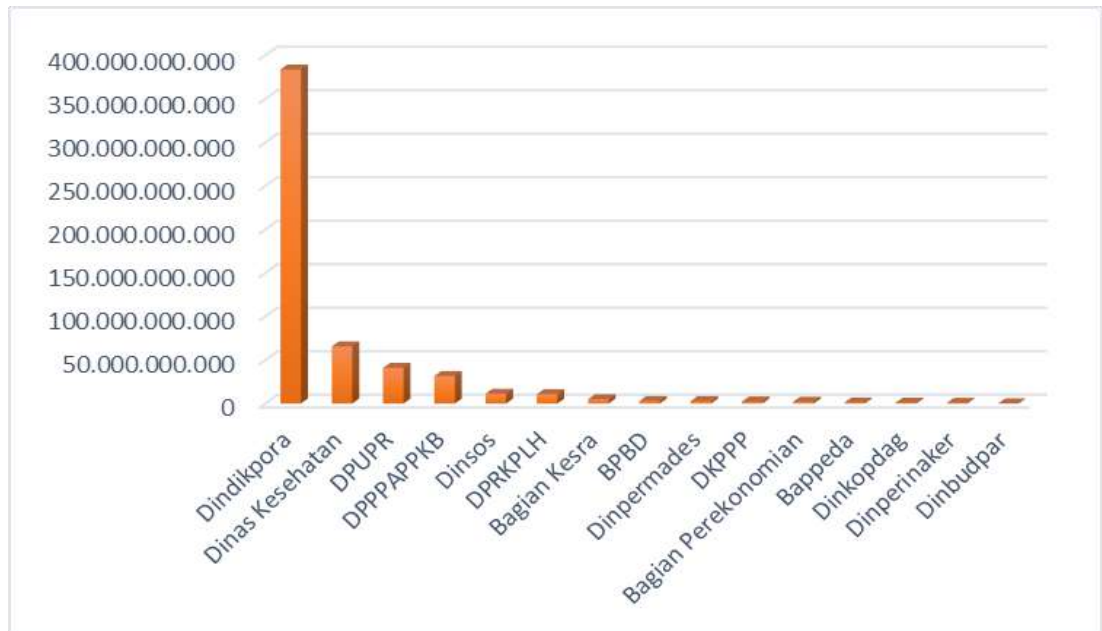
No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rupiah)	Persentase
9	Bakesbangpol	1.736.687.850	2.75%
10	Dindukcapil	1.390.000.000	2.20%
11	Bagian Hukum	1.317.716.000	2.09%
12	BKPSDM	946.000.000	1.50%
13	Inspektorat	768.432.000	1.22%
14	Bagian PBJ	703.439.000	1.11%
15	Bagian Pemerintahan	510.000.000	0.81%
16	Bagian Pembangunan	225.152.000	0.36%
17	Bagian Organisasi	150.000.000	0.24%
18	Dinpusip	42.050.000	0.07%
TOTAL		135.995.251.636	100%

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

b. Percepatan Pengurangan Kemiskinan

Percepatan Pengurangan Kemiskinan memiliki anggaran yang terbesar dari 3 prioritas lainnya. Pelaksanaan kegiatan yang mendukung tema percepatan pengurangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 dapat dilihat melalui fokus penganggaran APBD sebesar Rp724.856.659.761,00.

Perangkat daerah yang berkontribusi pada percepatan pengurangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 ada 15 perangkat daerah, yaitu Dindikpora, Dinas Kesehatan, DPUPR, DPPPAPKB, Dinsos, DPRKPLH, BPBD, Dinpermades, DKPPP, Bagian Kesra, Bagian Perekonomian, Bappeda, Dinperinaker dan Dinbudpar. Distribusi dari anggaran belanja program pada perangkat daerah yang mendukung Percepatan Pengurangan Kemiskinan di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 tercantum pada diagram berikut.



Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, 2022.

Gambar 5.6.

Distribusi Anggaran Belanja Program Perangkat Daerah yang mendukung Percepatan Pengurangan Kemiskinan di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023

Kontribusi terbesar dalam tema Percepatan Pengurangan Kemiskinan disumbang oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yaitu sebesar 68,25% dari total anggaran belanja program selain pelayanan dasar dan kecamatan atau sebesar Rp383.932.414.122,00. Secara rinci, kontribusi dari perangkat daerah yang mendukung percepatan pengurangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 5.35

Kontribusi Perangkat Daerah dalam Percepatan Pengurangan Kemiskinan dalam RKPD Tahun 2023

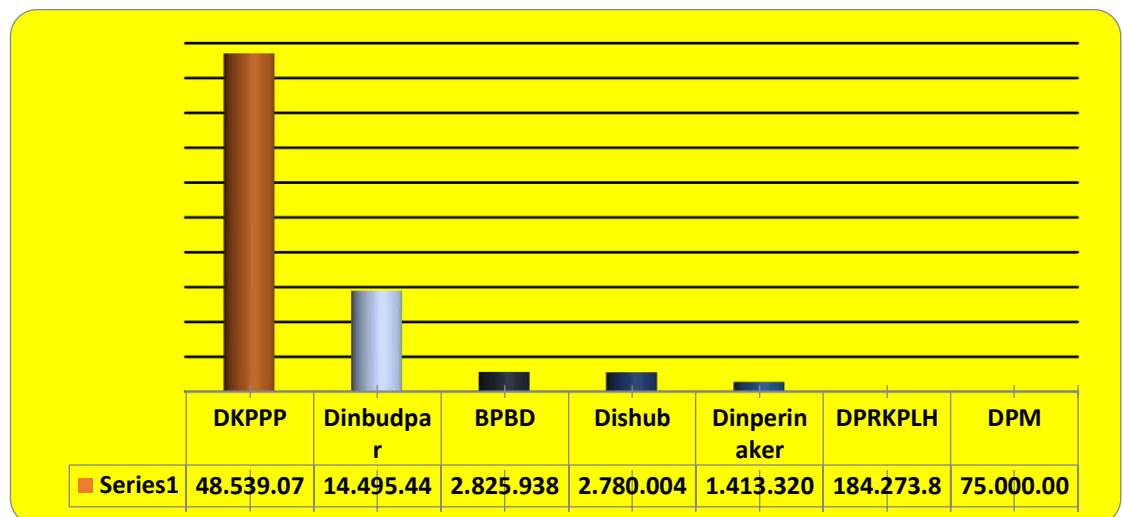
No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rupiah)	Persentase
1	Dindikpora	383.932.414.122	68.25%
2	Dinas Kesehatan	65.715.847.000	11.68%
3	DPUPR	41.054.200.000	7.30%
4	DPPPAPPKB	31.624.330.600	5.62%
5	Dinsos	11.291.872.792	2.01%
6	DPRKPLH	10.758.859.000	1.91%
7	Bagian Kesra	4.939.716.000	0.88%
8	BPBD	2.825.938.800	0.50%
9	Dinpermades	2.740.000.000	0.49%

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rupiah)	Persentase
10	DKPPP	2.370.000.000	0.42%
11	Bagian Perekonomian	2.089.547.500	0.37%
12	Bappeda	1.180.217.500	0.21%
13	Dinkopdag	1.055.000.000	0.19%
14	Dinperinaker	871.660.000	0.15%
15	Dinbudpar	129.096.000	0.02%
TOTAL		724.856.659.761	100.00%

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

c. Pemantapan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan

Pelaksanaan kegiatan yang mendukung pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi kerakyatan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 dapat dilihat melalui fokus penganggaran APBD sebesar Rp81.301.296.610,00. Perangkat daerah yang mendukung tema ini tercantum pada diagram berikut.



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah

Gambar 5.7.
Distribusi Anggaran Belanja Program Perangkat Daerah yang mendukung Pemantapan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023

Kontribusi terbesar pada tema Pemantapan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan terdapat pada DKPPP sebesar 69,03% dari total anggaran belanja program selain pelayanan dasar dan kecamatan atau sebesar Rp70.313.055.610,00. Secara rinci,

kontribusi dari perangkat daerah yang mendukung tema tercantum pada tabel berikut:

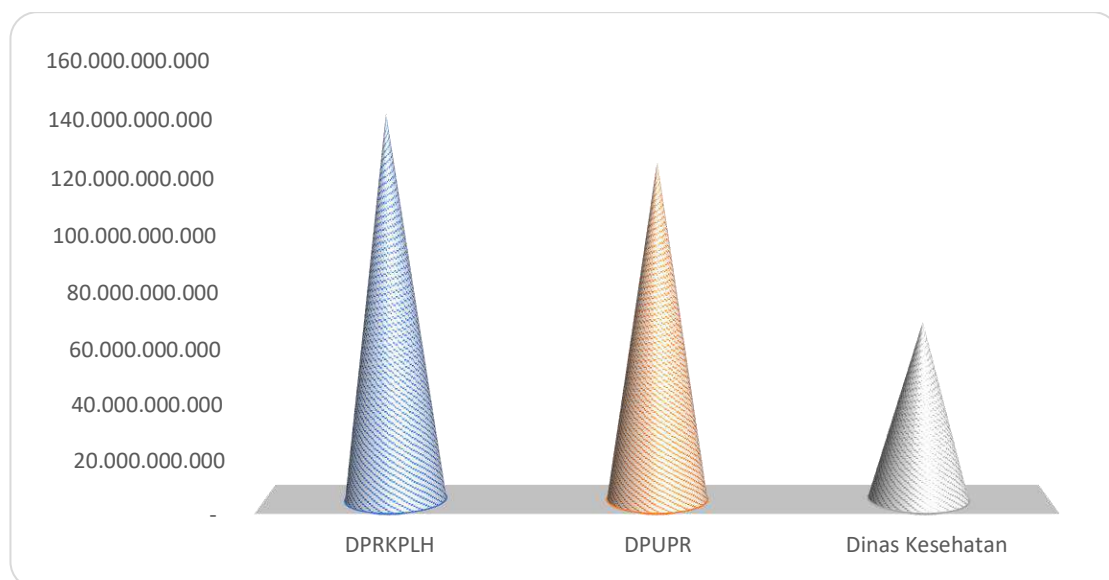
Tabel 5.36
Kontribusi Perangkat Daerah dalam Pemantapan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan dalam RKPD Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rupiah)	Persentase
1	DKPPP	48.539.078.000	69.03%
2	Dinbudpar	14.495.441.000	20.62%
3	BPBD	2.825.938.800	4.02%
4	Dinas Perhubungan	2.780.004.000	3.95%
5	Dinperinaker	1.413.320.000	2.01%
6	DPRKPLH	184.273.810	0.26%
7	DPM	75.000.000	0.11%
TOTAL		81.301.296.610	100.00%

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

d. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup

Pelaksanaan kegiatan yang mendukung tema Pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 dapat dilihat melalui fokus penganggaran APBD Rp569.625.376.890,00. Perangkat daerah yang mendukung tema ini tercantum pada diagram berikut.



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

Gambar 5.8
Distribusi Anggaran Belanja Program Perangkat Daerah yang mendukung Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023

Kontribusi terbesar dalam tema ini disumbang oleh DPRKPLH yaitu sebesar 43% dari total anggaran belanja program selain pelayanan dasar dan kecamatan atau sebesar Rp140.306.462.500,00. Sedangkan DPUPR dan DPRKPLH memberikan kontribusi secara berturut turut sebesar 37% dan 20%. Kontribusi dari perangkat daerah yang mendukung tema tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5.37
Kontribusi Perangkat Daerah dalam Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup dalam RKPD Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rupiah)	Persentase
1	DPRKPLH	172.020.500.000	43%
2	DPUPR	123.371.015.500	37%
3	Dinas Kesehatan	317.081.259.000	20%
TOTAL		569.625.376.890	100%

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

5.4. DUKUNGAN PROGRAM RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 TERHADAP PENANGANAN UPAYA KERAS

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sehingga dibutuhkan komitmen dari semua perangkat daerah untuk mencapai target yang sudah ditentukan, namun ada beberapa indikator yang termasuk kategori upaya keras. RKPD Kabupaten Temanggung menyediakan anggaran untuk penanganan upaya keras sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut ini:

Tabel 5.38
Dukungan Program dan Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Upaya Keras Tahun 2023

No	DData Sektoral	Program	Anggaran	Perangkat Daerah
1	Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik (55,04%)	Program Pengelolaan Pendidikan	8.230.732.000	Dindikpora
2	Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik (57,31%)	Program Pengelolaan Pendidikan	37.081.828.000	Dindikpora

No	DData Sektoral	Program	Anggaran	Perangkat Daerah
3	Angka putus sekolah SMP sederajat (46,94%)	Program Pengelolaan Pendidikan	150.000.000	Dindikpora
4	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (25,52%)	Program Pengelolaan Pendidikan	10.627.700.000	Dindikpora
5	Persentase prestasi olahraga (20,09%)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	300.000.000	Dindikpora
6	Persentase pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan (0%)	Program Pembinaan Perpustakaan	1.416.000.000	Dinpusip
7	Cakupan naskah kuno Kabupaten Temanggung dan koleksi nasional yang dilestarikan(0,077%)	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	185.000.000	Dinpusip
8	Persentase desa sayang ibu dan bayi	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	480.000.000	DPPPAPKB
9	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed (67,89%)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.163.786.000	DPPPAPKB
10	Angka Kematian Ibu (0%)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	682.740.000	Dinkes
11	Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (30,97%)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	20.000.000	Dinkes
12	Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar (31,02%)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.500.000.000	Dinkes
13	Persentase Pelestarian sejarah lokal (65,43%)	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	248.332.000	Dinbudpar

No	DData Sektoral	Program	Anggaran	Perangkat Daerah
14	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan (47%)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	7.657.000.000	DPUPR
15	Persentase usaha yang memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 (0%)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	10.000.000	DPRKPLH
16	Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup (0%)	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	35.001.300	DPRKPLH
17	Persentase sampah yang tertangani (62,70%)	Program Pengelolaan Persampahan	63.181.702.300	DPRKPLH
18	Persentase bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar (50%)	-	0	Dinhub
19	Tingkat ketersediaan protein per kapita (60,53%)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	140.000.000	DKPPP
20	Prosentase nelayan perairan umum yang terbina (41,59%)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	210.000.000	DKPPP
21	Persentase usaha mikro yang naik kelas (23,33%)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	130.000.000	Dinkopdag
22	Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi (18,09%)	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	30.000.000	Dinkopdag
23	Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang (59,17%)	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	670.000.000	Dinkopdag
24	Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang	Program Peningkatan Sarana	670.000.000	Dinkopdag

No	DData Sektoral	Program	Anggaran	Perangkat Daerah
	sesuai peruntukan (43,89%)	Distribusi Perdagangan		
25	Persentase IKM industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah (52,75%)	Program Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	50.000.000	Dinperinaker
26	Prosentase pembinaan industri penghasil cukai (39,53%)	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	100.000.000	Dinperinaker
27	Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan perizinan yang terlatih (44,19%)	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	175.000.000	DPM
28	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan (0%)	- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Program Pemasaran Pariwisata	460.268.000	Pariwisata
29	Persentase desa wisata naik klasifikasi (0%)	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	236.376.000	Pariwisata
30	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (57,97%)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	50.000.000	Dinperinaker
31	Persentase sistem informasi yang terintegrasi (56,64%)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	27.322.328	Dinkomifo
32	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (47,73%)	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	111.582.100	Satpol PP dan Damkar
33	Persentase peningkatan data jumlah obyek pajak (55,12%)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	991.814.400	BKPAD
34	Indeks Merit System (42,46%)	Program Kepegawaian Daerah	260.000.000	BKPSDM

No	DData Sektoral	Program	Anggaran	Perangkat Daerah
35	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa (32,20%)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	85.000.000	Inspektorat
36	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara (53,76%)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	11.000.000	Inspektorat
37	Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda (37,5%)	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	2.194.733.300	Sekretariat DPRD
38	Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan (0%)	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	48.381.100	Bankesbangpol
39	Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan (48,44%)	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	48.381.100	Bankesbangpol
40	Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan (0%)	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	836.597.640	Bankesbangpol
41	Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba (0%)	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	836.597.640	Bankesbangpol

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

5.5. DUKUNGAN PROGRAM RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 TERHADAP PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Temanggung berkomitmen dalam penelitian dan pengembangan daerah demi kemajuan pembangunan Kabupaten Temanggung sehingga mampu bersaing dengan daerah lain. Hal ini ditunjukkan dengan adanya program kegiatan beserta anggaran



yang tersedia di RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Program dan kegiatan selain mandiri juga dikerjasamakan dengan akademisi.

Tabel 5.39
Program dan Anggaran Yang Mendukung Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	303,000,000	Bappeda
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	18,590,000,000	DKPPP
3	Program Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja	50,000,000	Dinperinaker
4	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	170,000,000	DKPPP
5	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	184,273,810	DPRKPLH
6	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	858,102,400	DPRKPLH
7	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	10,000,000	DPRKPLH
8	Program Pengelolaan Persampahan	63,181,702,300	DPRKPLH
9	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	8,556,200,000	Dinpermades
10	Program Pelayanan Penanaman Modal	409,629,400	DPM
11	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	210,000,000	DKPPP
12	Program Pemasaran Pariwisata	129,096,000	Dinbudpar
Jumlah		92,652,003,910	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

5.6. RENCANA TINDAK LANJUT

Bappeda selaku pengampu kebijakan penyusunan RKPD Tahun 2023 serta Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 harus melaksanakan langkah langkah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawalan Tema Prioritas Pembangunan dalam Renja Perangkat daerah Tahun 2023 sehingga anggaran anggaran perangkat daerah yang mendukung tema tahunan seharusnya mendapat porsi yang lebih besar.
- 2) Membuat sebuah kebijakan yang jelas dan tegas terhadap Perangkat Daerah yang masih saja menyusun Renja tahunan tidak sesuai dengan tema prioritas pembangunan yang telah ditentukan, di



samping kegiatan layanan umum urusan wajib dasar yang memang harus ada dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.

- 3) Pada saat penyusunan Ranwal RKPD harus sesegera mungkin melakukan kegiatan analisis pemetaan anggaran sehingga dapat menjadi dasar awal dalam melaksanakan pendampingan dan verifikasi anggaran perangkat daerah sebelum menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah
- 4) Semua perangkat daerah diwajibkan memasukkan inovasi kedalam dokumen perencanaan tahunan (Renja PD). Inovasi Perangkat Daerah yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kinerja masing masing Perangkat Daerah tersebut baik dalam hal Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Inovasi bentuk lainnya sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selain itu setiap perangkat daerah juga diwajibkan memotivasi dan memprovokasi masyarakat untuk ikut berperan serta melakukan inovasi yang dapat bersinergi dengan kegiatan inovasi di perangkat daerah terkait.
- 5) Program unggulan yang telah disesuaikan dengan tema tahunan untuk masing masing daerah harus tetap mendukung visi misi Bupati serta target IKUPD terutama dengan status Upaya Keras dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 .
- 6) Seluruh perangkat daerah khusus yang menangani pelayanan agar mencanangkan zona integritas. Dari hasil evaluasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan zona integritas perlu perbaikan sehingga penting dilaksanakan sosialisasi dan pendampingan khusus pada Perangkat Daerah yang ditunjuk dan dilakukan oleh tim Penilai Internal. Dalam pelaksanaan zona integritas persamaan persepsi perlu dilakukan dengan tim Penilai Internal terkait pertanyaan pertanyaan yang muncul dalam lembar kerja dan pentingnya data untuk melengkapi lembar kerja tersebut.
- 7) Seluruh perangkat daerah dimungkinkan untuk berkolaborasi dari sisi anggaran untuk mempercepat pencapaian indikator terutama dengan status Upaya Keras, misalnya melalui anggaran BLUD.

- 8) Melibatkan peran serta masyarakat dan komunitas dalam mendukung pembangunan daerah (Penta Helix).
- 9) Peningkatan kualitas koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait dengan perencanaan dan penganggaran.
- 10) Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi terkait pencapaian kinerja perencanaan pembangunan beserta tindak lanjutnya.
- 11) Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi serta tindak lanjutnya.



GERBANG EMAS

BAB VI RKPD 2023

TEMBAKAU BIBIT KEMLOKO LERENG GUNUNG SUMBING

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 secara teknis dirumuskan dari indikator kinerja tujuan yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja sasaran (impact). Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diperlukan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu parameter yang dibentuk untuk mengetahui keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dari suatu organisasi yang berfungsi untuk memperoleh informasi kinerja yang dinilai penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja serta ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis (Permen PAN, 2007).

IKU berfungsi untuk memperoleh informasi kinerja yang dinilai penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis. Kedua fungsi tersebut dapat digunakan untuk evaluasi dalam rangka memperbaiki kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dimana aspek akuntabilitas kinerja ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di Kabupaten Temanggung. Pengimplementasian indeks kinerja utama di Kabupaten Temanggung dalam perencanaan akan menghasilkan dampak secara simultan baik positif maupun negatif.

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja tujuan dan

indikator kinerja sasaran pada akhir tahun 2023 atau pada setiap tahun periode RPJMD Tahun 2018-2023. Penyajian Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada bab ini meliputi: indikator kinerja, satuan, dan penetapan target kinerja Tahun 2023.



Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Temanggung Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		DEFINISI INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023				
Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya								
Tujuan : Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya								
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka	70,16	70,49	Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak	$\sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	Angka dihitung oleh BPS	Dinkominfo
2	Angka Kemiskinan	%	10	9,8	Ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum yang sesuai dengan tingkat kelayakan hidup	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{Jumlah seluruh penduduk}} \times 100\%$	Angka dihitung oleh BPS	Dinas Sosial
Misi 2 : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan								
Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan								
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,5	4,8	Proses perubahan kondisi perekonomian di kabupaten Temanggung secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu	$\frac{PDRB_n - PDRB_{n-1}}{PDRB_{n-1}} \times 100\%$	Angka dihitung oleh BPS	Dinkominfo
4	Pendapatan per Kapita	Juta rupiah	28,45	29,57	Besarnya pendapatan rata-rata penduduk di Kabupaten Temanggung. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan Daerah dengan jumlah	$\frac{PDRB_{tahun\ n}}{\sum penduduk_{tahun\ n}}$	Angka dihitung oleh BPS	Dinkominfo

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		DEFINISI INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023				
					penduduk suatu daerah tersebut			
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,5	3,5	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	$\frac{\sum \text{pengangguran}}{\sum \text{angkatan kerja}} \times 100\%$	Angka dihitung oleh BPS	Dinkominfo
6	Ketimpangan Pendapatan	%	18,5	18,7	Pengukuran ketimpangan pendapatan diukur dari distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia	Jumlah pendapatan dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibagi total seluruh pendapatan seluruh penduduk dikali 100%	Ketimpangan Pendapatan diukur dari distribusi pengeluaran berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Bappeda

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

7	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	64,5	65	Merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan	Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah yang bersih, bebas kkn dan kualitas pelayanan publik	Dinilai oleh Kementerian PAN dan RB	Bagian organisasi Sekretariat Daerah
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	81	82	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan	Hasil survey indeks kepuasan masyarakat: nilai rata-rata dari hasil survey di perangkat daerah		Bagian pemerintahan Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		DEFINISI INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023				
					membandingkan antara harapan dan kebutuhannya			

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022

Dari 8 indikator kinerja utama di atas kemudian dijabarkan kedalam Indikator Kinerja Sasaran (IKS) dan Prioritas Pembangunan dimana masing-masing indikator ini merupakan pengimplementasian dari 3 misi pembangunan Kabupaten Temanggung. Indikator Kinerja Sasaran sebagai bentuk implementasi dari program pembangunan Kabupaten Temanggung berjumlah 50 sasaran yang terbagi kedalam 3 tabel sesuai dengan pembagian program untuk 3 misi pembangunan Kabupaten Temanggung sekaligus menjadi sasaran yang menunjang Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Tabel 6.2

Indikator Kinerja Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Misi Kesatu

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		DEFINISI INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	
			2022	2023					
MISI 1	:	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya							
Tujuan	:	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya							
Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	7,65	7,8	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal	Jumlah lama pendidikan tiap jenjang dibagi jumlah jenjang pendidikan yang ditempuh. Berikut rumus perhitungan RLS:	Semakin lama menempuh pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan	Dindikpora

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		DEFINISI INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	
			2022	2023					
MISI 1	:	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya							
	2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	12,42	12,49	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang	$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ <p>Jumlah anak usia >7 tahun yang sedang sekolah dibagi dengan total anak usia >7 tahun. Berikut rumus perhitungan HLS:</p> $HLS = \sum_{i=7}^k \frac{E_i}{P_i}$	Semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah, maka angka putus sekolah semakin kecil	Dindikpora
Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	3	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,51	75,53	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu	Jumlah umur orang-orang yang meninggal pada satu waktu dibagi jumlah keseluruhan orang yang meninggal pada satu waktu	Dihitung oleh perangkat daerah terkait	Dinas Kesehatan
	4	Indeks Kinerja RSUD	Kategori sehat	79.80	80	Nilai yang menunjukkan kinerja RSUD dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Jumlah nilai 3 unsur penilaian yaitu Mutu pelayanan, Pelayanan, dan Keuangan	Dihitung oleh instansi terkait	RSUD
Meningkatnya budaya literasi masyarakat	5	Persentase peminjam di perpustakaan	%	80	82	Masyarakat yang memanfaatkan fasilitas	Jumlah peminjam buku dibagi jumlah pengunjung	Semakin tinggi persentase, maka semakin	Dinpusip

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		DEFINISI INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	
			2022	2023					
MISI 1	:	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya							
					perpustakaan untuk meminjam buku	perpustakaan dikali 100%	banyak masyarakat yang mengunjungi perpustakaan		
Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	6	Indek Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	3,53	3,56	Sebuah tolak ukur atas capaian-capaian kepemudaan di lima bidang dasar, yakni domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi	Jumlah 5 indeks pendukung IPP dibagi 5 yaitu: 1. Pendidikan 2. Kesehatan dan Kesejahteraan 3. Lapangan dan Kesempatan Kerja 4. Partisipasi dan Kepemimpinan 5. Gender dan diskriminasi	< 1,8 = tidak Baik 1,81-2,60 = Kurang Baik 2,61-3,40 = Cukup 3,41-4,20 = Baik 4,21-5 = Sangat Baik	Dindikpora
	7	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Angka	3,2	3,41	Pembangunan olahraga adalah suatu proses yang membuat manusia memiliki banyak akses untuk melakukan aktivitas fisik sekaligus mengukur kemajuan pembangunan olahraga.	Jumlah 4 indeks pendukung olahraga dibagi 4 yaitu: 1. Ruang Terbuka 2. SDM 3. Partisipasi Olahraga 4. Kebugaran Jasmani	< 1,8 = tidak Baik 1,81-2,60 = Kurang Baik 2,61-3,40 = Cukup 3,41-4,20 = Baik 4,21-5 = Sangat Baik	Dindikpora

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		DEFINISI INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	
			2022	2023					
MISI 1	:	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya							
Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	8	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	3,41	3,51	Instrumen yang disusun bersama antara Kemendikbud, Kementerian PPN/ Bappenas, dan BPS untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan. Instrumen ini sesuai dengan amanat UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	Jumlah nilai dari 7 dimensi pembangunan budaya dibagi dengan 7 berikut dimensi pendukung: 1. Ekobud 2. Pendidikan 3. Sosbud 4. Warisan budaya 5. Ekspresi budaya 6. Literasi 7. Gender	< 1,8 = tidak Baik 1,81-2,60 = Kurang Baik 2,61-3,40 = Cukup 3,41-4,20 = Baik 4,21-5 = Sangat Baik	Dinbudpar
Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	9	Indeks Gotong-Royong	Angka	4,21	4,22	Indeks yang mengukur tingkat gotong royong masyarakat dalam rangka menunjang proses pembangunan di tingkat mikro.	Jumlah 8 indeks pendukung gotong-royong diantaranya: 1. Kepercayaan pada Lingkungan 2. Peduli 3. Komitmen pada keputusan bersama 4. Sosialisasi 5. Kemudahan Mendapat Pertolongan 6. Kerja Bakti	< 1,8 = tidak Baik 1,81-2,60 = Kurang Baik 2,61-3,40 = Cukup 3,41-4,20 = Baik 4,21-5 = Sangat Baik	Dinpemades

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		DEFINISI INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	
			2022	2023					
MISI 1	:	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya							
	10	Indeks Toleransi	Angka	4,17	4,19	Masyarakat dapat menjamin hak dari individu untuk bebas bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun dengan tidak melanggar nilai- nilai yang berlaku di dalam suatu komunitas dan hak orang lain	7. Aksi Kolektif 8. Kerjasama Nilai total 4 variabel utama setelah dihitung dengan 8 indikator turunan dibagi 4 dengan variabel sebagai berikut. 1. Regulasi Pemerintah 2. Tindakan Pemerintah 3. Regulasi Sosial 4. Demografi Agama	<1 = tidak Baik 1,8 - <2,6 = Cukup 2,6-<3,5= Baik 3,5-<4,2= Sangat Baik 4,2-5 = Memuaskan	Kesbangpol
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	11	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,81	0,80	Angka dalam persen yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu	Jumlah penduduk tahun n dikurangi jumlah penduduk tahun sebelumnya dibagi jumlah penduduk tahun sebelumnya dikali 100%	Angka dihitung oleh BPS	DPPPAPPKB
Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	95,64	95,65	Indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender	$IPG=1/3[(Xede(1) + Xede(2) + 1inc-dis)]$	Angka dihitung oleh BPS	DPPPAPPKB

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		DEFINISI INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	
			2022	2023					
MISI 1	:	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya							
	13	Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	0,004	0,004	Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara seksual, psikologis, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman tindakan tertentu seperti pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, serta perlakuan buruk lainnya yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat baik yang terjadi di masyarakat maupun kehidupan pribadi	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dibagi jumlah rumah tangga	Angka dihitung oleh BPS	DPPPAPPKB
Meningkatnya Penanganan,	14	Persentase Pemerlu Pelayanan	%	63	63	Proses refungsionalisasi	Jumlah Kepala Keluarga (KK) Pemerlu		Dinsos

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		DEFINISI INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023				
MISI 1	:	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya						
Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani			dan pengembangan untuk memungkinkan PMKS mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat	Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani dibagi KK Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dikali 100%		

Tabel 6.3

Indikator Kinerja Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Misi Kedua

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		DEFINISI INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	
			2022	2023					
MISI 2	:	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan							
Tujuan	:	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan							
Meningkatnya kesejahteraan petani	15	Tingkat ketersediaan energi perkapita	kkal/kapita/hari	2930	2935	Ketersediaan bahan makanan yang memadai bagi masyarakat di suatu wilayah.	Rumus perhitungan jumlah ketersediaan bahan makanan per kapita adalah jumlah bahan makanan yang tersedia (dari produksi, stok, impor/ekspor) dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun	Dihitung oleh perangkat daerah terkait	DKPPP

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		DEFINISI INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	
			2022	2023					
MISI 2	: Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan								
	16	Tingkat ketersediaan protein perkapita	kkal/kapita/hari	103,6	103,8	Ketersediaan bahan makanan yang mengandung protein baik nabati maupun hewani yang memadai bagi masyarakat di suatu wilayah.	Ketersediaan perkapita = $\frac{\text{Ketersediaan}}{\sum \text{penduduk}}$	Dihitung oleh perangkat daerah terkait	DKPPP
	17	Tingkat ketersediaan lemak perkapita	kkal/kapita/hari	37,25	37,5	Ketersediaan bahan makanan yang mengandung lemak bagi masyarakat di suatu wilayah	ketersediaan per kapita masing – masing bahan makanan ini disajikan dalam bentuk kuantum (volume) dan kandungan nilai gizinya dalam satuan kkal untuk energi, dan satuan gram untuk protein dan lemak	Dihitung oleh perangkat daerah terkait	DKPPP
Meningkatnya kedaulatan pangan	18	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-	78,2	78,3	Susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan.	Persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) dikali bobot masing-masing kelompok pangan	Kualitas konsumsi pangan penduduk dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH)	DKPPP
	19	Tingkat Konsumsi Ikan	kg/kap/th	21,29	21,34	Jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi masyarakat Temanggung selama satu tahun dalam bentuk konversi setara	Jumlah Konsumsi Ikan per orang dalam satu tahun	Prediksi tahun 2020 = target tahun 2020	DKPPP

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		DEFINISI INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	
			2022	2023					
MISI 2	: Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan								
					konsumsi ikan utuh segar				
Meningkatnya pariwisata daerah	20	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,63	1,65	Peranan Lapangan Usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Angka dari BPS	Dinbudpar
Meningkatnya investasi sektor riil	21	Kontribusi sektor perindustrian Terhadap PDRB	%	26	27	Peranan Lapangan Usaha industri pengolahan terhadap PDRB	Kontribusi Lapangan Usaha Industri terhadap PDRB	Angka dari BPS	Disperinaker
	22	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	19,5	20	Peranan Lapangan Usaha perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB	Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan terhadap PDRB	Angka dari BPS	Disperinaker
	23	Persentase Koperasi Sehat	%	9,5	10,71	Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan	Jumlah koperasi sehat dibagi jumlah koperasi dikali 100%		Dinkopdag
	24	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	%	0,014	0,015	UMKM yang melakukan kegiatan usaha secara rutin/kontinyu didukung dengan	Jumlah Usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil dibagi jumlah usaha mikro binaan dikali 100%	Semakin banyak usaha mikro yang naik kelas, maka semakin baik	Dinkopdag

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		DEFINISI INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	
			2022	2023					
MISI 2	: Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan								
					pengadministrasian dan manajemen usaha		tingkat penjualan usaha tersebut.		
	25	Indeks kemudahan berusaha	Angka	62,5	65	Sebuah indeks yang dibuat oleh Bank Dunia dimana peringkat yang tinggi menunjukkan peraturan untuk berbisnis yang lebih baik (biasanya lebih sederhana) dan kuatnya perlindungan atas hak milik.	Jumlah nilai 10 dimensi dibagi 10: 1. Pengurusan izin usaha 2. IMB 3. Pendaftaran tanah 4. Pajak perusahaan 5. Hak legal peminjam dan pemberi pinjaman 6. Biaya dan waktu penyelesaian hukum 7. Kemudahan memperoleh listrik 8. Kemudahan ekspor 9. Kemudahan pemulihan kebangkrutan 10. Perlindungan pemegang saham minoritas		DPM
	26	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	75,7	76,1	Merupakan salah satu indikasi tingginya kesempatan kerja yang tersedia sehingga orang terserap dalam lapangan kerja yang ada atau sedang mencari kerja atau bahkan mempersiapkan usaha	Jumlah penduduk Angkatan Kerja dibagi Jumlah penduduk usia kerja (15-64 Tahun) dikali 100%	Angka dari BPS	Dinperinaker

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		DEFINISI INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	
			2022	2023					
MISI 2	: Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan								
Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	27	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	83,95	84	Infrastruktur wilayah dengan menjumlahkan persentase Jalan kondisi baik, Jembatan Kabupaten Kondisi Baik, Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik, dan Persentase Rumah Berakses Air Minum Layak dibagi 4 variabel	Rata-rata dari variabel-variabel persentase infrastruktur kondisi baik	Jalan, Jembatan, Irigasi, Air bersih	DPUPR
	28	Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang	%	89,45	89,5	Merupakan Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung	Luasan yang sesuai peruntukannya dibagi luas Kabupaten Temanggung dikali 100%	Semakin banyak lahan digunakan bangunan sesuai peruntukannya, maka semakin tinggi persentase	DPUPR
	29	Persentase perumahan dan Permukiman layak huni	%	97,92	97,97	Rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya	Menggunakan 16 indikator kumuh	Dasar perhitungan Permen PUPR No 14 Tahun 2018	DPRKPLH
	30	Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	%	1,59	1,61	Nilai dalam bentuk persen yang menunjukkan penurunan kecelakaan lalu lintas.	Angka kecelakaan lalu lintas tahun n dikurangi angka kecelakaan lalu lintas tahun (n-1) dibagi angka kecelakaan tahun (n-1) dikali 100%		Dinas Perhubungan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		DEFINISI INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	
			2022	2023					
MISI 2	: Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan								
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	31	Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH)	angka	69,18	70,53	Merupakan istilah baru yang menggabungkan keseluruhan jenis indeks kualitas lingkungan dari semua mata yang mencakup udara, air, hutan, flora, dan fauna, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan	$(0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$		DPRKPLH

Tabel 6.4

Indikator Kinerja Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Misi Ketiga

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		DEFINISI INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	
			2022	2023					
MISI 3	: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas								
Tujuan	: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas								
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	32	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	4,1	4,2	Mengukur kualitas perencanaan pembangunan daerah	Mengukur aspek integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar dokumen perencanaan daerah	<1 : tidak Baik $1,8-<2,6$: Cukup $2,6-<3,5$: Baik $3,5-<4,2$: Sangat Baik $4,2-5$: Memuaskan	Bappeda (Indikator Baru)
	33	Persentase Ketercapaian Kinerja	%	89	90	Jumlah persentase capaian indikator Sasaran Perangkat daerah terhadap target tahun ke-	Rata rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran		Bappeda

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		DEFINISI INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	
			2022	2023					
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas									
		Pembangunan Daerah				n/jumlah indikator sasaran Perangkat Daerah			
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	34	Manajemen Risiko Indeks	Level	Level 1	Level 2	<p>Nilai indeks yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengembangkan kemampuan untuk mengatasi masalah/ketidakpastian.</p>	<p>Nilai 4 komponen manajemen risiko dikali dengan masing-masing bobot dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemimpinan (15%) 2. Proses MR (45%) 3. Aktivitas Mitigasi Risiko (25%) 4. Hasil Penerapan MR (15%) 	<p>Sistem pengukuran/angka yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di suatu organisasi pada waktu tertentu</p>	Bappeda
	35	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Jumlah satuan inovasi yang diakui oleh Pemerintah Pusat	<p>Akumulasi penilaian dari variable dan indikator inovasi daerah yang terdiri dari indikator satuan pemda dan satuan inovasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1-500: Kurang Inovatif • 501-1000: Inovatif • >1001: Sangat Inovatif 	Bappeda
	36	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	15	15	Persentase kontribusi PAD merupakan ratio perbandingan pendapatan asli daerah dengan total	Realisasi PAD dibagi realisasi pendapatan daerah	Semakin tinggi nilai PAD suatu daerah maka semakin baik pula	BPKPAD

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		DEFINISI INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023				
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas								
	Terhadap Pendapatan				penerimaan daerah. Untuk mengetahui persentase pendapatan terhadap total penerimaan daerah.		kontribusi pajak, retribusi, dan pendapatan lain di daerah tersebut.	
	37 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	79,4	79,5	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.	Dihitung menggunakan 6 Dimensi yaitu: 1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran 2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD 3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah 4. Penyerapan anggaran 5. Kondisi keuangan daerah 6. Opini BPK atas LKPD	Semakin tinggi nilai indeks maka pengelolaan keuangan semakin transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.	BKPAD (indikator baru)
	38 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggara	Angka	3,45	3,5	Mekanisme evaluasi yang dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Akumulasi dari penilaian terhadap variabel indeks capaian kinerja		Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		DEFINISI INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	
			2022	2023					
MISI 3	: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas								
		n Pemerintahan Daerah (EKPPD)				dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik			
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	39	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBj)	Angka	20	25	Nilai indeks yang menunjukkan kemampuan suatu organisasi dalam pemanfaatan sistem pengadaan, kompetensi SDM yang bertanggung jawab, dan kematangan unit kerja pengadaan barang jasa.	Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBj ditambah Nilai Kematangan dibagi 2	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	
	40	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	-	BB	BB	Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik	Nilai kumulatif dari perencanaan pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian di Kabupaten Temanggung	Dinilai oleh Kementerian PAN dan RB dengan penilaian: <ul style="list-style-type: none"> • AA: >90-100 • A : >80-90 • BB: >70-80 • B : >60-70 • CC: >50-60 • C : >30-50 • D : >0-30 	Ortala
	41	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Angka	3,93	3,95	Mengukur Indeks Perilaku Anti Korupsi melalui Survei Perilaku Anti Korupsi	Nilai IPAK diperoleh dengan mensurvey atas aspek-aspek yang ditentukan	Instansi yang berkompeten mengeluarkan nilai IPAK adalah	Inspektorat

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		DEFINISI INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	
			2022	2023					
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas									
						oleh Kementerian PAN dan RB	Kementerian PAN dan RB yang diperoleh dari hasil survey yang dilakukan oleh Tim survey Kabupaten		
	4 2	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	50,07	50,09	Suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN	Dihitung dari angka kumulatif dimensi : kualifikasi pendidikan (bobot 25%), dimensi kompetensi (bobot 40%), dimensi kinerja (bobot 30%), dan dimensi disiplin (5%). Dihitung dengan formula rumus: $IP = \sum_{i=1}^n IPI$	Yang berkompeten mengeluarkan indeks profesionalisme ASN adalah BKN Pusat Adapun input data dari Kabupaten/Kota. <ul style="list-style-type: none"> • ≤60 : sangat rendah • 61-70 : rendah • 71-80 : sedang • 81-90 : tinggi • 91-100 : sangat tinggi 	BKPSDM
	4 3	Indeks Merit System	Angka	0,51	0,61	Ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah.	Nilai <i>Merit System</i> diperoleh dari penghitungan aspek : perencanaan kebutuhan ASN, Pengadaan ASN, Pengembangan	Penilaian prestasi pegawai yang berimbang pada pemberian <i>Reward</i> dan <i>punishment</i> .	BKPSDM (Indikator baru)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		DEFINISI INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023				
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas								
						karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, dan disiplin, perlindungan dan pelayanan serta system informasi		
	44	Indeks Manajemen Kearsipan	Angka	66,5	67	Nilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung	Akumulasi dari hasil audit internal dan eksternal	Dinpusip
	45	Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	%	91	91,5	Dokumen rancangan peraturan daerah yang disahkan tepat waktu oleh pejabat yang berwenang.	Jumlah raperda yang diajukan dibagi jumlah perda yang ditetapkan dikali 100%	Sekretariat Dewan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	46	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,9	3	Indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan yang diperoleh secara kumulatif dari penghitungan perkalian antara	Nilai indeks dari 3 domain pendukung SPBE yang mana domain 1 berbobot 17%, domain 2 berbobot 28%, dan domain 3 berbobot <ul style="list-style-type: none"> • 4,2-5,0 = memuaskan • 3,5-<4,2 = sangat baik • 2,6-<3,5 = baik • 1,8-<2,6 = cukup • <1,8 = kurang 	Dinkominfo

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		DEFINISI INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	
			2022	2023					
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas									
					nilai Indeks Domain dan bobot domain.	55% kemudian dijumlahkan			
	47	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	95,7	96	Salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan <i>good governance</i> melalui pengelolaan informasi publik yang baik yang merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi .	Total Nilai dari 4 Indikator yaitu: 1. mengumumkan informasi publik 2. menyediakan informasi publik 3. pelayanan informasi publik 4. pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> • 97-100 = informatif • 96-80 = menuju informatif • 60-79 = cukup informatif • 40-59 = kurang informatif • 0-39 = tidak informatif 	Dinkominfo
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	48	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Angka	79,5	80	Merupakan kewajiban perangkat daerah khususnya penyelenggara pelayanan dalam memberikan layanan umum kepada masyarakat. Penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan dilakukan oleh Ombudsman RI.	Rumus perhitungan IKM unit pelayanan sebagai berikut: $\frac{\sum nu}{\sum u} \times NP$ Keterangan: • $\sum nu$ = Total nilai persepsi per unsur	Dihitung oleh perangkat daerah terkait	Dindukcapil

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		DEFINISI INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	
			2022	2023					
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas									
						<ul style="list-style-type: none"> • Σu = Total unsur terisi • NP = Nilai Perimbangan yaitu 25 			
	49	Rata-rata IKM di Kecamatan	%	83,5	84	<p>Mengukur tingkat kepuasan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan.</p> $\frac{\Sigma nu}{\Sigma u} \times NP$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Σnu = Total nilai persepsi per unsur • Σu = Total unsur terisi • NP = Nilai Perimbangan yaitu 25 	Dihitung oleh perangkat daerah terkait	Kecamatan (Indikator Baru)	
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	50	Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	Angka	0,7	0,71	Fokus pada upaya penguatan otonomi desa dan Kewenangan Desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa,	Akumulasi nilai IDM seluruh desa dibagi jumlah desa	Dihitung oleh perangkat daerah terkait	Dinpermades

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		DEFINISI INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	
			2022	2023					
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas									
					pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa				
	51	Persentase desa yang berpredikat mandiri	%	6,02	6,39	Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan	Jumlah desa yang berpredikat mandiri dibagi jumlah desa dikali 100%	Semakin tinggi angka persentase, maka semakin banyak desa yang mampu mengembangkan potensi serta kehidupan masyarakatnya.	Dinpermades
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	52	Indeks Rasa Aman	Angka	4,43	4,44	Mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal	Nilai total dari 4 indikator dibagi 4 dengan indikator sebagai berikut: 1. Kesadaran hukum, 2. Organisasi sipil,	<ul style="list-style-type: none"> • 4,2-5,0 = memuaskan • 3,5-<4,2 = sangat baik • 2,6-<3,5 = baik • 1,8-<2,6 = cukup • <1,8 = kurang 	Satpol PP Damkar

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		DEFINISI INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	
			2022	2023					
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas									
						3. Mitigasi resiko sosial 4. Penyelesaian sengketa secara beradab Nilai yang dihitung dikonversi ke skala linkert			
Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	5 3	Indek Resiko Bencana	Angka	192,08	192,08	Mengetahui gambaran capaian upaya penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Nilai yang tertera dapat menjadi panduan bagi para pengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk melakukan prioritas upaya penanggulangan bencana di daerahnya masing-masing guna menurunkan indeks risiko bencana sebagai upaya meningkatkan ketangguhan masyarakat	Indeks Risiko Bencana untuk setiap Kabupaten/Kota yang merupakan hasil perhitungan	<ul style="list-style-type: none"> • Skor ≥ 144: Tinggi • Skor 45-143: Sedang • Skor <45: rendah 	BPBD

Sedangkan indikator kinerja program untuk mengukur keberhasilan kinerja Perangkat Daerah dalam mendukung capaian kinerja Pemerintah Daerah tahun 2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6.5
Indikator Kinerja Program Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Urusan/Program	Kinerja Program RKPD	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				SEMUA PD
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	SEMUA PD
		Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Kepala Daerah	100	%	SEMUA PD
		Persentase Perangkat Daerah berpredikat B dalam penyusunan LKJiP	74,5	%	Bag.Organisasi
		Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	100	%	Bag. Prokompim
	PENDIDIKAN				
2	Program Pengelolaan Pendidikan				Dindikpora
		Persentase APK SD sederajat	105,05	%	
		Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A	0,965	angka	
		Persentase APM SD sederajat	98,3	%	
		Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A	0,975	angka	
		Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	79,5	%	
		Persentase SD terakreditasi minimal B	96,97	%	
		Angka kelulusan SD sederajat	100	%	
		Angka putus sekolah SD sederajat	0,03	%	
		Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	53,9	%	
		Persentase APK SMP sederajat	98,59	%	

No	Urusan/Program	Kinerja Program RKPD	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B	1	%	
		Persentase APM SMP sederajat	88	%	
		Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B	1,055	%	
		Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98,5	%	
		Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	95,17	%	
		Persentase SMP terakreditasi minimal B	97,2	%	
		Angka kelulusan SMP sederajat	100	%	
		Angka putus sekolah SMP sederajat	0,2	%	
		Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	63,21	%	
		Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100	%	
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	76,6	%	
		Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	%	
		Persentase TK terakreditasi minimal B	51	%	
		Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	47,47	%	
		Persentase angka melek huruf usia \geq 15 tahun	98,64	%	
		Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	97,19	%	
		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	%	
		Rasio Guru Keagamaan terhadap anak usia sekolah	15,8	angka	
	KESEHATAN				

No	Urusan/Program	Kinerja Program RKPD	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				Dinkes
		Angka kematian ibu	67,5	Per 100.000 kelahiran hidup	
		Angka kematian bayi	12	Per 1000 kelahiran hidup	
		Prevalensi balita gizi buruk	0,5	%	
		Presentase rumah tangga yang memiliki jamban	83,84	%	
		Presentase puskesmas yang sarprasnya sesuai standar	100	%	
		Presentase Ketersediaan obat sesuai kebutuhan	98	%	
		Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100	% minimal	
		Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	% maksimal	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	% maksimal	
		Presentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100	% maksimal	
		Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100	%	
		Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	72	%	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)	7	% minimal	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100		
		Angka Kematian Balita	13,6	Maksimal per 1000 KH	

No	Urusan/Program	Kinerja Program RKPD	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Presentase anak usia pendidikan dasar yang sesuai mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
		Cakupan warga negara indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	% minimal	
		Cakupan warga negara indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	% minimal	
		Presentase kunjungan baru di pelayanan kesehatan dasar (Cakupan rawat jalan)	43,5	%	
		Presentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah terakreditasi utama	53,85	%	
		Presentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
		Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
		Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%	
		Presentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	100	%	
		Penanganan KLB 1x24 jam	100	%	
		Angka penemuan kasus Malaria	<1	per 1000 penduduk	
		Inciden rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	<20	per 1000 penduduk	
		Angka penemuan kasus baru Kusta	<1	per 1000 penduduk	
		Persentase Desa atau kelurahan UCI	100	%	
		Proporsi anak umur 1 tahun diimunisasi campak	95	%	
		Prevalensi gizi kurang pada anak balita (0-60 bulan)	15,5	% maksimal	
		Prevalensi stunting pada anak baduta (0-24 bulan)	27	% maksimal	

No	Urusan/Program	Kinerja Program RKPD	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Persentase Bayi umur < 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	80	% maksimal	
		Prevalensi anemia pada ibu hamil	20	% maksimal	
		Persentase Desa bebas rawan gizi	100	%	
		Persentase Rumah Sehat	82	%	
		Cakupan nilai akreditasi RSUD	100	%	
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit	54	%	
		Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	%	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				Dinkes
		Persentase Tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	100	%	
5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman				Dinkes
		Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi	62	%	
		Cakupan penggunaan obat rasional di puskesmas	77	%	
		Persentase Pengawasan makanan dan minuman di pasar tradisonal	100	%	
		Persentase sarana pelayanan mendapatkan ijin kesehatan	100	%	
		Cakupan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) yang mendapat SPP-IRT	100	%	
6	Program Pemberdayaan masyarakat Bidang kesehatan				Dinkes

No	Urusan/Program	Kinerja Program RKPD	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Persentase Rumah tangga sehat (PHBS Rumah tangga) strata utama dan paripurna	83,09	%	
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
7	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)				DPUPR
		Cakupan area layanan daerah irigasi	97	%	
		Persentase jaringan irigasi kondisi baik	59,32	%	
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				DPUPR
		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	90	%	
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah				
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	%	DPRKPLH
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase				DPUPR
		Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	50	%	
11	Program Pengembangan Pemukiman				DPUPR
		Persentase Desa terfasilitasi kegiatan Bankeu/Hibah	100	%	
12	Program Penataan Bangunan Gedung				DPUPR
		Persentase gedung pemerintah kondisi baik	80	%	
13	Program Penataan				DPUPR

No	Urusan/Program	Kinerja Program RKPD	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
	Bangunan dan Lingkungannya				
		Persentase Trotoar kondisi baik	62	%	
14	Program penyelenggaraan jalan				DPUPR
		Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	85	%	
		Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	93,73	%	
15	Program Pengembangan Jasa Konstruksi				DPUPR
		Persentase Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi	90	%	
16	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang				DPUPR
		Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	88,1	%	
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
17	Program Pengembangan Perumahan				DPRKPLH
		<i>Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)</i>	5	%	
		<i>Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi</i>	86,8	%	-
18	Program Kawasan Permukiman				DPRKPLH
		Persentase rumah layak huni	89,42	%	
		Persentase kawasan kumuh perkotaan	18,25	%	
		Persentase warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	%	
		Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100	%	
	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				

No	Urusan/Program	Kinerja Program RKPD	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
19	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum				Satpol PP-Damkar
		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	100	%	
		Rasio Linmas per RT	1,62	Rasio	
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100	%	
20	Program Penanggulangan Bencana				BPBD
		Cakupan desa tangguh bencana	10,47	%	
		Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	100	%	
		Persentase Tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana	100	%	
		Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	86,4	%	
		Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	100	%	
		Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana	100	%	
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%	
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%	
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%	
21	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				Satpol PP-Damkar

No	Urusan/Program	Kinerja Program RKPD	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	61	%	
		Tingkat Waktu Tanggap (<i>response time rate</i>)	69,8	%	
		Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten	44	angka	
		Persentase aparatur yang memenuhi standar kualifikasi	44	%	
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	%	
	SOSIAL				
22	Program Pemberdayaan Sosial				Dinsos
		Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100	%	
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan				Dinsos
		Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100	%	
23	Program Rehabilitasi Sosial				Dinsos
		Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	
		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	
		Persentase Warga negara lanjut usia terlanjar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	

No	Urusan/Program	Kinerja Program RKPD	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	%	
		Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial	1,22	%	
24	Program perlindungan dan jaminan sosial				Dinsos
		Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	%	
		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah	85	%	
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah	95	%	
		Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	10,2	%	
		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	%	
25	Program Penanganan Bencana				Dinsos
		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	100	%	
26	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan				Dinsos
		Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	100	%	
	TENAGA KERJA				
27	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja				Dinperinaker
		Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	65	%	
		Persentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru atau bekerja	45	%	

No	Urusan/Program	Kinerja Program RKPD	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang	45	%	
28	Program Penempatan Tenaga Kerja				Dinperinaker
		Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	65	%	
		Tingkat setengah pengangguran	5,7	%	
		Persentase tenaga kerja formal	31	%	
29	Program Hubungan Industrial				Dinperinaker
		Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	79	%	
		Persentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	58	%	
		Persentase perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	45	%	
		Persentase perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	100	%	
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK				
30	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				DPPPAPPKB
		Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	2,34	%	
		Rasio perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan dokumen perencanaan	45,71	%	
31	Program Perlindungan Perempuan				DPPPAPPKB
		Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	0,011	%	

No	Urusan/Program	Kinerja Program RKPD	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Persentase perempuan korban kekerasan	0,011	%	
32	Program Peningkatan Kualitas Keluarga				DPPPAPPKB
		Persentase desa sayang ibu dan bayi	62,28	%	
		Persentase rumah sakit sayang ibu dan bayi	100	%	
33	Program Pemenuhan Hak Anak / PHA)				DPPPAPPKB
		Presentase terbentuknya kecamatan layak anak	60	%	
34	Program perlindungan Khusus Anak				DPPPAPPKB
		Presentase anak korban kekerasan	0,011	-	
	PANGAN				
35	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan				DKPPP
		Rasio ketersediaan pangan	100	%	
36	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat				DKPPP
		Persentase peningkatan Desa pelaksana program ketahanan pangan	27,68	%	
37	Program Penanganan Kerawanan Pangan				DKPPP
		Rasio lumbung pangan masyarakat	56	%	
38	Program Pengawasan Keamanan Pangan				DKPPP
		Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	90	%	
	PERTANAHAN				
39	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan				DPRKPLH

No	Urusan/Program	Kinerja Program RKPD	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	100	%	
	LINGKUNGAN HIDUP				
40	Program Perencanaan Lingkungan Hidup				DPRKPLH
		Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	62,73	%	
		Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	100	%	
41	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				DPRKPLH
		Indeks Kualitas Air	46	Angka	
		Indeks Kualitas Udara	86	Angka	
42	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				DPRKPLH
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	74,33	%	
		Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung	0,067	%	
		Cakupan RTH Publik	0,07	%	
43	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)				DPRKPLH
		Persentase usaha yang memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3	100	%	
44	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				DPRKPLH

No	Urusan/Program	Kinerja Program RKPD	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	100	%	
45	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				DPRKPLH
		Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	26,88	%	
46	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				DPRKPLH
		Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	66,67	%	
47	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				DPRKPLH
		Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	%	
48	Program Pengelolaan Persampahan				DPRKPLH
		Persentase sampah yang tertangani	38,2	%	
		Cakupan layanan persampahan	55	%	
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
49	Program Pendaftaran Penduduk				Dindukcapil
		Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	97,4	%	
		Persentase kepemilikan KTP el	99	%	
		Presentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	72	%	

No	Urusan/Program	Kinerja Program RKPD	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu	100	%	
50	Program Pencacatan Sipil				Dindukcapil
		Persentase kepemilikan akta kelahiran	75	%	
		Persentase penerbitan akta kematian	99	%	
		Cakupan pelayanan akta perkawinan tepat waktu	100	%	
		Cakupan pelayanan akta perceraian tepat waktu	100	%	
51	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan				Dindukcapil
		Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	60	%	
		Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	90	%	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
52	Program penataan Desa				Dinpermades
		Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada	40	%	
		Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Indek Pembangunan Desa	37	%	
53	Program Peningkatan Kerjasama Desa				Dinpermades
		Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah di tetapkan	100	%	
54	Program Administrasi Pemerintahan Desa				Dinpermades
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	90	%	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	90	%	

No	Urusan/Program	Kinerja Program RKPD	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	85	%	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	100	%	
		Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu	85	%	
		Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa	10	%	
		Persentase desa yang tertib pengelolaan aset	85	%	
55	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat				Dinpermades
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	35	%	
		Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif	32	%	
		Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	10	%	
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
56	Program pengendalian penduduk				DPPPAPPKB
		Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kelurahan	100	%	
		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ <i>unmetneed</i>	9,17	%	
		Persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	2,04	%	
		Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19th)	26,3	%	
57	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)				DPPPAPPKB

No	Urusan/Program	Kinerja Program RKPD	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	76,21	%	
		Persentase kepesertaan KB aktif	76,21	%	
		Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	49,19	%	
		Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)	33,9	%	
58	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				DPPPAPPKB
		Indeks pembangunan keluarga	50	%	
	PERHUBUNGAN				
59	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				Dinhub
		Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadahi	38,65	%	
		Persentase potensi titik parkir yang tertangani	100	%	
		Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan	99,5	%	
		Persentase bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar	50	%	
		Persentase bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar	62,5	%	
		Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar	65,22	%	
		Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	87,18	%	
		Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100	%	
		Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100	%	
		Persentase Penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	14,26	%	

No	Urusan/Program	Kinerja Program RKPD	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
60	Program Informasi Dan Komunikasi Publik				Dinkominfo
		Persentase PPID badan publik yang aktif	20	%	
		Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	30	%	
		Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	100	%	
61	Program aplikasi informatika				Dinkominfo
		Persentase ketersediaan jaringan intranet	100	%	
		Persentase sistem informasi yang terintegrasi	50	%	
		Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	60	%	
		Persentase ketersediaan akses internet publik	100	%	
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
62	Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi				DINKOPDAG
		Persentase koperasi aktif	22	%	
63	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				DINKOPDAG
		Persentase penambahan nilai asset dan omset koperasi	30	%	
64	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian				DINKOPDAG
		Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif	75	%	
65	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil dan usaha mikro UKM				DINKOPDAG

No	Urusan/Program	Kinerja Program RKPD	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Persentase usaha mikro aktif	35	%	
66	Program Pengembangan UMKM				DINKOPDAG
		Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha	1,07	%	
	PENANAMAN MODAL				
67	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				DPM
		Nilai realisasi investasi	625	Milyar	
		Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	10	%	
		Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	100	%	
68	Program Promosi Penanaman Modal				DPM
		Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	100	%	
69	Program Pelayanan Penanaman Modal				DPM
		Persentase pelayanan perizinan online	100	%	
		Persentase perijinan yang bebas calo	100	%	
		Persentase perijinan yang diterbitkan tepat waktu	95	%	
70	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				DPM
		Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Perizinan yang diterbitkan	100	%	
		Persentase Pengaduan masyarakat yang terselesaikan	100	%	
		Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	100	%	
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				

No	Urusan/Program	Kinerja Program RKPD	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
71	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				Dindikpora
		Persentase organisasi pemuda yang aktif	80,76	%	
72	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				Dindikpora
		Prosentase pelatih olahraga bersertifikat	35,4	%	
		Persentase prestasi olahraga	59	%	
		Persentase atlet berprestasi	21	%	
73	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan				Dindikpora
		Presentase gugus depan yang aktif	92,89	%	
	STATISTIK				
74	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				Dinkominfo
		Cakupan ketersediaan data makro daerah	100	%	
	PERSANDIAN				
75	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi				Dinkominfo
		Tingkat penilaian persiapan/ pengelolaan resiko keamanan informasi	1	%	
	KEBUDAYAAN				
76	Program Pengembangan Kebudayaan				Dinbudpar
		Persentase kelompok seni budaya yang produktif	80,64	%	
77	Program Pengembangan Kesenian Tradisional				Dinbudpar
		Persentase kelompok kesenian yang produktif	32,16	%	Indikator baru
78	Program Pembinaan Sejarah				

No	Urusan/Program	Kinerja Program RKPD	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Persentase pelestarian Sejarah Lokal	6,73	%	
79	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya				Dinbudpar
		Persentase pelestarian cagar budaya	5,18	%	
	PERPUSTAKAAN				
80	Program Pembinaan Perpustakaan				Dinarpus
		Persentase pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan	40	%	
		Persentase perpustakaan yang aktif	35,62	%	
81	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno				Dinarpus
		Cakupan naskah kuno Kabupaten Temanggung dan koleksi nasional yang dilestarikan	100	%	
	KEARSIPAN				
82	Program Pengelolaan Arsip				Dinarpus
		Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	31,98	%	
83	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip				Dinarpus
		Persentase arsip vital konvensional yang dialihmediakan	50	%	
	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
84	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				DKPPP
		Prosentase nelayan perairan umum yang terbina	30	%	
85	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				DKPPP
		Produktivitas ikan nila	6,2	kg/m2	
		Produktivitas ikan lele	13,8	kg/m2	
		Produktivitas ikan mas	6	kg/m2	

No	Urusan/Program	Kinerja Program RKPD	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
86	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan				DKPPP
		Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	33	%	
87	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				DKPPP
		Persentase tersedianya data dan informasi produksi olahan hasil perikanan	100	%	
	PARIWISATA				
88	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				Dinbudpar
		Persentase obyek wisata yang berkembang	41,66	%	
89	Program Pemasaran Pariwisata				Dinbudpar
		Pertumbuhan jumlah wisatawan	21	%	
		Lama tinggal wisatawan	1	hari	
90	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				Dinbudpar
		Persentase Peningkata Desa Wisata	11,76	%	
		Persentase Desa Wisata Naik Klasifikasi	5	%	
		Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	2	%	
	PERTANIAN				
91	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian				DKPPP
		Produktivitas padi	63,3	kwintal/ha	
		Produktivitas jagung	46	kwintal /ha	
		Produktivitas Ubi Kayu	339,8	kwintal /ha	
		Produktivitas bawang putih	79,6	kwintal/ha	

No	Urusan/Program	Kinerja Program RKPD	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Produktivitas bawang merah	80,15	kwintal /ha	
		Produktivitas cabai rawit	55,15	kwintal /ha	
		Produktivitas cabai besar	69,5	kwintal /ha	
		Produktivitas tembakau	6,8	kwintal/ ha	
		Produktivitas kopi robusta	7,25	kwintal/ ha	
		Produktivitas kopi arabika	7	kwintal/ ha	
		Produktifitas Cengkeh	2,45	kwintal/ ha	
		Produktivitas Vanili	2,95	kwintal/ ha	
		Produktivitas ternak sapi	177,6	Kg/Ekor	
		Produktivitas ternak domba	13,71	Kg/Ekor	
		Produktivitas ternak kambing	13,71	Kg/Ekor	
		Produktivitas ternak ayam ras pedaging	0,75	Kg/Ekor	
		Produktivitas ternak ayam ras petelur	10,88	Kg/Ekor	
		Produktivitas ternak ayam buras	0,7	Kg/Ekor	
92	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian				DKPPP
		Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	76,55	%	
93	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				DKPPP
		Persentase penanganan penyakit hewan	90	%	
		Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	70	%	

No	Urusan/Program	Kinerja Program RKPD	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
94	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian				DKPPP
		Persentase pengendalian bencana pertanian	40,3	%	
95	Program Penyuluhan Pertanian				DKPPP
		Persentase kelompok tani yang naik kelas	0,98	%	
	PERDAGANGAN				
96	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan				Dinkopdag
		Persentase pasar daerah dalam kondisi baik	67	%	
		Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	70	%	
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	90	%	
		Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	34	%	
97	Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				Dinkopdag
		Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi	68,41	%	
98	Program Pengembangan ekspor				Dinkopdag
		Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sektor perdagangan	2,56	%	
99	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen				Dinkopdag
		Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	95	%	
	PERINDUSTRIAN				
100	Program Perencanaan dan				Dinperinaker

No	Urusan/Program	Kinerja Program RKPD	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
	Pengembangan Industri				
		Persentase IKM industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	35	%	
101	Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kota				Dinperinaker
		Prosentase pembinaan industri penghasil cukai	5,3	%	
	TRANSMIGRASI				
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi				Dinperinaker
		Persentase calon transmigran yang mendapatkan pembekalan	100	%	-
	SEKRETARIAT DAERAH				
102	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				Bag.Pemerintahan
		Cakupan Pilar Batas yang terinventarisir	100	%	
		Prosentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	100	%	
		Cakupan Kecamatan Tertib Adminstrasi	100	%	
		Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan kegamaan kondisi baik	90	%	
		Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	30	%	
		Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	100	%	
		Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	90	%	
		Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi	75	%	
103	Program Perekonomian dan Pembangunan				

No	Urusan/Program	Kinerja Program RKPD	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	%	Bag. Perekonomian
		Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	100	%	Bag. Perekonomian
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	80	%	Bag. Perekonomian
		Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu	100	%	Bag. Pembangunan
		Prosentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan	100	%	Bag. PBJ
		Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	100	%	Bag. PBJ
		Persentase kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	100	%	Bag. PBJ
		Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja tepat waktu	100	%	Bag. Pembangunan
		Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	95	%	Bag. Pembangunan
	SEKRETARIAT DPRD				
104	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD				Sekretariat DPRD
		Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda	26,67	%	
		Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	100	%	
		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	58	%	
	PERENCANAAN				
105	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi				Bappeda

No	Urusan/Program	Kinerja Program RKPD	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
	Pembangunan Daerah				
		Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100	%	
		Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	95	%	
106	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				Bappeda
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pembangunan manusia	90	%	
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	90	%	
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi dan sumber daya alam	90	%	
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	90	%	
	KEUANGAN				
107	Program pengelolaan Keuangan daerah				BPKPAD
		Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	100	%	
		Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	89,96	%	
		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100	%	
		Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100	%	



No	Urusan/Program	Kinerja Program RKPD	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Persentase realisasi keuangan	93	%	
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	90	%	
		Opini BPK atas LKPD	WTP	-	
108	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				BPKPAD
		Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	88,1	%	
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	99,1	%	
109	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				BPKPAD
		Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	1,27	%	
		Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	100	%	
		Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100	%	
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	95	%	
		Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	95	%	
	KEPEGAWAIAN				
110	Program Kepegawaian Daerah				BPKSDM
		Persentase penyusunan formasi pegawai	100	%	
		Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu	100	%	
		Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	100	%	
		Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	80	%	
		Persentase Perempuan pada Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	48	%	

No	Urusan/Program	Kinerja Program RKPD	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Persentase Pelanggaran disiplin ASN	0,2	%	
		Persentase Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN	90	%	
		Persentase Pelaksanaan Updating Data Kepegawaian	95	%	
		Persentase penyelesaian pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional	100	%	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
111	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				BPKSDM
		Persentase Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Pengawas yang memiliki Kompetensi Diklat Kepemimpinan	35	%	
		Persentase ASN yang memiliki kompetensi Teknis dan Fungsional sesuai jabatannya	18	%	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
112	Program penelitian dan pengembangan				Bappeda
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	100	%	
		Persentase inovasi daerah yang dikembangkan	65	%	
	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
113	Program Penyelenggaraan Pengawasan				INSPEKTORAT
		Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	100	%	
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	46	%	
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	23	%	

No	Urusan/Program	Kinerja Program RKPD	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	48	%	
114	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi				INSPEKTORAT
		Nilai maturitas SPIP	3,3	Angka	
		Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) / Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	60	%	
		Persentase tindak lanjut aduan Whistle blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	100	%	
		Nilai Survey Penilaian Integritas	81,97	Angka	
		Prosentase penanganan aduan masyarakat	100	%	
	KECAMATAN				
115	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan Publik				Kecamatan
		Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	100	%	
		Persentase realisasi penerimaan PBB	100	%	
116	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				Kecamatan
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	100	%	
		Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik	100	%	
		Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	100	%	
117	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				Kecamatan
		Persentase penanganan laporan kejadian	100	%	

No	Urusan/Program	Kinerja Program RKPD	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
118	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				Kecamatan
		Persentase tempat ibadah kondisi baik	80	%	
119	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Kecamatan
		Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	1	%	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	100	%	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
120	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				Badan Kesbangpol
		Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	62	%	
		Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	10	%	
121	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				Badan Kesbangpol
		Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya	87	%	
		Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik	30	%	
		Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	30	%	
122	Program Pemberdayaan dan Pengawasan				Badan Kesbangpol

No	Urusan/Program	Kinerja Program RKPD	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
	Organisasi Kemasyarakatan				
		Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan	100	%	
123	Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya				Badan Kesbangpol
		Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi	100	%	
124	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial				Badan Kesbangpol
		Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah	100	%	
		Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	10	%	
		Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	35	%	

Dalam rangka mendukung capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah dengan mengakomodir konsep pembangunan pentahelix atau multipihak dimana unsur Pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah. Sinergitas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dengan Lembaga Non Pemerintah dalam rangka mendukung capaian Kinerja Pemerintah Daerah diimplementasikan antara lain dalam bentuk pelibatan Lembaga Non Pemerintah tersebut dalam proses Musrenbang di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten, kegiatan forum khusus anak, forum khusus disabilitas, forum khusus perempuan, forum ekonomi kreatif, forum lembaga, kegiatan TKPKD dalam rangka penanganan kemiskinan, keterlibatan akademisi dan kementerian dalam penyusunan dokumen masterplan smart city, dan kegiatan satu perangkat daerah satu desa dampingan.

Secara khusus dalam rangka mendukung program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait Program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung bekerja sama dengan lembaga Non Pemerintah antara lain yaitu LazizNU, LazizMU, Baznas, Laziz Jateng, Forum TJSPLP Temanggung dan Konsorsium BUMN Pusat.

Selain hal tersebut di atas, salah satu bentuk dukungan dalam rangka pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilakukan antara lain melalui pengiriman dokumen-dokumen perencanaan pembangunan secara tepat waktu dan tepat mutu sebelum jadwal batas akhir pengiriman sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6.6
Laporan Dokumen BAPPEDA yang Wajib Dikirim ke Provinsi Maupun Pusat Tahun 2019–2021

NO	NAMA	TANGGAL PENGIRIMAN									BIDANG
		2019			2020			2021			
		BATAS KIRIM	TGL KIRIM	KETERANGAN	BATAS KIRIM	TGL KIRIM	KETERANGAN	BATAS KIRIM	TGL KIRIM	KETERANGAN	
1	Laporan IDSD	30 Agustus 2019	26 Agustus 2019	Tepat waktu	31 Agustus 2020	26 Agustus 2020	Tepat waktu	31 Agustus 2021	26 Agustus 2021	Tepat waktu	LITBANG
2	LP2KD	28 Februari 2019	21 Februari 2019	Tepat waktu	28 Februari 2020	24 Februari 2020	Tepat waktu	26 Februari 2021	18 Februari 2021	Tepat waktu	PPMP
3	Laporan Stunting	29 Maret 2019	22 Maret 2019	Tepat waktu	31 Maret 2020	26 Maret 2020	Tepat waktu	31 Maret 2021	25 Maret 2021	Tepat waktu	PPMP
4	Laporan RKPD	09 Mei 2018	04 Mei 2018	Tepat waktu	28 Mei 2019	23 Mei 2019	Tepat waktu	22 Juli 2020	18 Juli 2020	Tepat waktu	PEIPD
5	RKPD Perubahan	Minggu III Juli 2018	13 Juli 2018	Tepat waktu	Minggu III Juli 2019	12 Juli 2019	Tepat waktu	Minggu III Juli 2020	10 Juli 2020	Tepat waktu	PEIPD
6	Laporan AUSTS	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	Juli 2021	n.a	n.a	PPMP
7	Laporan Akhir P4GN	Minggu II Januari 2020	4 Januari 2020	Tepat waktu	Minggu II Januari 2021	8 Januari 2021	Tepat waktu	Minggu Januari II 2022	6 Januari 2022	Tepat waktu	PPMP
8	Laporan Semester I RPKP	Minggu I Bulan Juli 2019	2 Juli 2019	Tepat waktu	Minggu I Bulan Juli 2020	7 Juli 2020	Tepat waktu	Minggu I Bulan Juli 2021	2 July 2021	Tepat waktu	PPMP
9	Laporan Akhir RPKP	Minggu I Pebruari 2020	10 Januari 2020	Tepat waktu	Minggu I Februari 2021	13 Januari 2021	Tepat waktu	Minggu I Februari 2022	2 Februari 2022	Tepat waktu	PPMP

NO	NAMA	TANGGAL PENGIRIMAN									BIDANG
		2019			2020			2021			
		BATAS KIRIM	TGL KIRIM	KETERANGAN	BATAS KIRIM	TGL KIRIM	KETERANGAN	BATAS KIRIM	TGL KIRIM	KETERANGAN	
10	Laporan Bankeu Khusus	Minggu I Januari 2020	17 Desember 2019	Tepat waktu	Minggu I Januari 2021	11 Desember 2020	Tepat waktu	Minggu I Januari 2022	27 Pebruari 2022	Tepat waktu	PPMP
11	Laporan Akhir Implementasi Masterplan Smart City	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	Minggu II Januari 2022	n.a	n.a	PPMP
12	Laporan Evaluasi Implementasi Masterplan Smart City	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	Minggu I Juli 2021	2 Juli 2021	Tepat waktu	PPMP



GERBANG EMAS

BAB VII RKPD 2023

SENDANG SENGON DESA BANJARSARI KECAMATAN NGADIREJO

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang merupakan perencanaan tahun kelima atau periode terakhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dengan memuat kebijakan umum dan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan Tema Pembangunan tahun 2023 adalah Pemanjatan Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Berkelanjutan dan Peningkatan Daya Saing Daerah.

Dokumen RKPD sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang mempunyai 4 (empat) fungsi utama yaitu: (1) menjadi pedoman oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pemerintah daerah tahun 2023; (2) sebagai landasan bagi penyusunan KUA-PPAS untuk menyusun RAPBD Kabupaten Temanggung Tahun anggaran 2023; (3) menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan; (4) sebagai dokumen perencanaan strategis sehingga berdampak pada pencapaian indikator kinerja daerah Kabupaten Temanggung dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Disamping itu, usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain pembiayaannya diusulkan ke APBD Pemerintah Kabupaten Temanggung, juga diusulkan ke APBD Propinsi Jawa Tengah dan ke Pemerintah Pusat melalui APBN serta sumber lainnya.



Pencapaian indikator kinerja daerah Kabupaten Temanggung dilihat dari capaian 8 indikator kinerja utama tahun 2021 sebagai berikut:

1. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** mencapai 69,88 meningkat daripada tahun 2020 (69,57). Capaian angka ini melebihi dari target yang ditetapkan pada RPKD tahun 2021.
2. **Angka Kemiskinan** mencapai 10,17% lebih baik pencapaiannya dari Provinsi Jawa Tengah.
3. **Pertumbuhan Ekonomi** mencapai 3,34% menunjukkan geliat perekonomian sudah mulai terlihat membaik, dan Kabupaten Temanggung optimis target tahun 2023 (4,80) akan tercapai.
4. **Pendapatan per Kapita** meningkat menjadi 28,484 juta rupiah dibanding pencapaian tahun 2020.
5. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** mencapai 2,62 lebih baik dibandingkan pencapaian TPT Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.
6. **Ketimpangan Pendapatan** mencapai 18,78 naik dibandingkan tahun 2020
7. **Indeks Reformasi Birokrasi** mencapai 63,42 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 (62,70)
8. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** meningkat menjadi 82,06 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 (80,41).

Pencapaian indikator tujuan dan sasaran serta target kinerja program/kegiatan dengan melalui serangkaian program dan kegiatan prioritas dalam penjabarannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah Kabupaten Temanggung, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat, swasta dan masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergitas pentahelix guna mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.



Dari hasil evaluasi RKPD tahun 2021 rekapitulasi capaian kinerja indikator sebagai berikut:

1. Capaian **Indikator Tujuan** Kabupaten Temanggung ada 8 indikator dengan status Telah Tercapai sejumlah 3 indikator (37,50%) dan status Akan Tercapai sejumlah 5 indikator (62,50%);
2. Capaian **Indikator Sasaran** Kabupaten Temanggung antara lain:
 - a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ada 10 indikator sasaran, dengan status Telah Tercapai sejumlah 4 indikator (33,33%) dan 6 indikator dengan status Akan Tercapai (66,67%);
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ada 20 indikator sasaran, dengan status telah tercapai sejumlah 7 indikator (35,00%), status Akan Tercapai ada 12 indikator (60,00%) dan 1 indikator perlu Upaya Keras (5%);
 - c. Urusan pemerintahan pilihan ada 7 indikator, terdapat 4 indikator dengan status telah tercapai (57,14%) dan 3 indikator dengan status akan tercapai (42,86%);
 - d. Unsur pendukung urusan pemerintahan ada 4 indikator, terdapat 1 indikator dengan status telah tercapai (25,00%) dan 3 indikator dengan status akan tercapai (75,00%);
 - e. Unsur penunjang urusan pemerintahan ada 9 indikator, terdapat 4 indikator dengan status telah tercapai (44,44%), 4 indikator dengan status akan tercapai (44,44%) dan 1 indikator dengan status upaya keras (11,11%);
 - f. Unsur pengawasan urusan pemerintahan ada 1 indikator dengan status akan tercapai (100%);
 - g. Unsur kewilayahan ada 1 indikator dengan status telah tercapai (100%).

h. Unsur pemerintahan umum ada 2 indikator dengan status telah tercapai (100%).

3. Capaian **Indikator Program** Kabupaten Temanggung antara lain:

- a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ada 124 indikator program, terdapat 75 indikator dengan status Telah Tercapai (60,48%), 40 indikator dengan status Akan Tercapai (32,26%) dan 9 indikator dengan status perlu Upaya Keras (7,26%);
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ada 117 indikator program, terdapat 60 indikator program Telah Tercapai (51,28%), 43 indikator Akan Tercapai (36,75%), dan 14 indikator perlu Upaya Keras (11,97%);
- c. Urusan pemerintahan pilihan ada 45 indikator program, terdapat 15 indikator telah tercapai (33,33%), 23 indikator akan tercapai (51,11%) dan 7 indikator perlu upaya keras (15,56%);
- d. Unsur pendukung urusan pemerintahan ada 24 indikator program, terdapat 17 indikator telah tercapai (70,83%), 5 indikator akan tercapai (20,83%) dan 2 indikator perlu upaya keras (8,33%);
- e. Unsur penunjang urusan pemerintahan ada 33 indikator program, terdapat 23 indikator telah tercapai (69,70%), 9 indikator akan tercapai (27,27%) dan 1 indikator perlu upaya keras (3,03%);
- f. Unsur pengawasan urusan pemerintahan ada 9 indikator program, terdapat 3 indikator telah tercapai (33,33%), 4 indikator akan tercapai (44,44%) dan 2 indikator perlu upaya keras (22,22%);

- g. Unsur kewilayahan ada 9 indikator program, terdapat 3 indikator telah tercapai (33,33%) dan 6 indikator akan tercapai (66,67%);
- h. Unsur pemerintahan umum ada 10 indikator program, terdapat 5 indikator telah tercapai (50,00%), 1 indikator akan tercapai (10,00%) dan 4 indikator perlu upaya keras (40,00%)

Kebijakan RKPD Tahun 2023 fokus penyelesaian target 2023, khususnya target yang berstatus Upaya Keras dan juga terkait beberapa faktor, situasi, dan kondisi dalam rangka pemantapan pertumbuhan ekonomi yang terdampak *Covid-19* yang tetap sejalan dengan prioritas kebijakan Pemantapan Reformasi Birokrasi, Percepatan Pengurangan Kemiskinan, Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup dan Pemantapan Kapasitas dan daya saing ekonomi kerakyatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 diharapkan mampu menjadi pedoman dan motivasi bagi semua pihak terutama Perangkat Daerah dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah pada akhir capaian Perubahan RPJMD guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Temanggung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1						734,312,354,374							0		
1	1	1					518,842,722,313							0		
1	1	1	02.02				514,671,763,713							0		
1	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	514,671,763,713	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	12 Orang/bulan	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1,775,000,000				0	
1	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4648 Paket	1,775,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	4648 Paket	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						168,000,000				0	
1	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	12 Paket	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	73,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	12 Paket	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	12 Paket	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	12 Laporan	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	12 Laporan	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
													Nasional					Daerah		
1	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												0				
1	1	1	02.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan		0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
1	1	1	02.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	433,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		36 Laporan		0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
1	1	1	02.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,613,958,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan		0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
1	1	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														0		
1	1	1	02.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		50 Unit		0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
1	1	1	02.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				21 Unit	110,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		21 Unit		0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
1	1	1	02.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		15 Unit		0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															0	
1	1	2	02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																0
1	1	2	02.01	4 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				9 Ruang	694,467,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		9 Ruang		0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
1	1	2	02.01	6 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	683,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		5 Unit		0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
1	1	2	02.01	8 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				46 Ruang	6,853,265,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Lungge	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		46 Ruang		0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
									Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi												
1	1	2	02.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				5 Unit	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		5 Unit		0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
1	1	2	02.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				4830 Unit	15,400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		4830 Unit		0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
									Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik												
1	1	2	02.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1500 Peserta Didik	455,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1500 Peserta Didik		0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				434 Satuan Pendidikan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		434 Satuan Pendidikan		0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
1	1	2	02.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				1818 Orang	13,760,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1818 Orang		0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
1	1	2	02.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	125,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0 Orang		0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				2261 Orang							2261 Orang				
1	1	2	02.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				514 Satuan Pendidikan	225,000,000		Kab. Tembung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		514 Satuan Pendidikan		0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				408 Satuan Pendidikan	54,324,510,000			Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		408 Satuan Pendidikan		0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
1	1	2	02.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				434 Orang	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		434 Orang	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	02.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				14 Ruang	3,095,428,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		14 Ruang	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						85,045,308,000							0	
1	1	2	02.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				9 Unit	2,348,597,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		9 Unit	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	02.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				7 Ruang	1,415,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		7 Ruang	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	02.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				199 Unit	33,318,231,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		199 Unit	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	02.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1079 Peserta Didik	584,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1079 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	02.02	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				2000 Paket	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		2000 Paket	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	02.02	35	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia				28 Paket	1,115,720,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		28 Paket	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	02.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				10950 Peserta Didik	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		10950 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	02.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				2781 Orang	14,271,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		2781 Orang	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	02.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	210,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0 Orang	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				800 Orang							800 Orang							
1	1	2	02.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				42 Satuan Pendidikan	31,457,160,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		42 Satuan Pendidikan		0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	02.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				42 sekolah	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		42 sekolah		0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	02.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						23,834,004,061								0	
1	1	2	02.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				3 Unit	896,613,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		3 Unit		0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik							
1	1	2	02.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				6 Unit	1,346,773,361		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		6 Unit		0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik							
1	1	2	02.03	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	337,936,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		4 Unit		0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik							
1	1	2	02.03	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	262,061,700		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		2 Unit		0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	02.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia				6620 Paket	264,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		6620 Paket		0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	02.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				200 Peserta Didik	144,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		200 Peserta Didik		0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	02.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				5 Paket	125,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		5 Paket		0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
1	1	2	02.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				1867 Orang	7,238,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1867 Orang	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
1	1	2	02.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				25 Orang	25,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		25 Orang	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
1	1	2	02.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				629 Satuan Pendidikan	13,183,020,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		629 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
1	1	2	02.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				626 Orang	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		626 Orang	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
1	1	2	02.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						10,849,050,000							0			
1	1	2	02.04	9	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia				4227 Paket	211,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		4227 Paket	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
1	1	2	02.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				4229 Peserta Didik	1,268,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		4229 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
1	1	2	02.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				0 Peserta Didik	5,635,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				3608 Peserta Didik							3608 Peserta Didik				
1	1	2	02.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				25 Satuan Pendidikan	3,724,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		25 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
1	1	2	02.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				25 Orang	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		25 Orang	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA									12,021,183,000						0	
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						475,000,000								0		
2	19	2	02.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						475,000,000								0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 2 02.02 2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	475,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2 19 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						11,146,183,000							0	
2 19 3 02.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						5,146,183,000							0	
2 19 3 02.01 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				5 Unit	5,146,183,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		5 Unit	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2 19 3 02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						300,000,000							0	
2 19 3 02.02 2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				3 Dokumen	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19		3 Dokumen	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2 19 3 02.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						5,150,000,000							0	
2 19 3 02.04 2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				0 Organisasi	5,150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0 Organisasi	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				2 Organisasi							2 Organisasi		
2 19 3 02.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						550,000,000							0	
2 19 3 02.05 1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Dokumen	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2 19 3 02.05 3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				1 Unit	150,000,000	Kab. Temanggung, Kedu, Kutoanyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Unit	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2	19	4					400,000,000							0					
2	19	4	02.01				400,000,000							0					
2	19	4	02.01	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	1 Organisasi	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	2						171,384,595,868								0				
1	2	1					84,043,336,868								0				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
1	2	1	02.02				80,832,740,868								0				
1	2	1	02.02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
1	2	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1200 Orang/bulan	80,832,740,868		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	1200 Orang/bulan	0	Dinas Kesehatan
														Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
1	2	1	02.05				459,942,000								0				
1	2	1	02.05	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
1	2	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	459,942,000		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	1 Paket	0	Dinas Kesehatan
1	2	1	02.06				119,870,000								0				
1	2	1	02.06	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
1	2	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	1 Paket	0	Dinas Kesehatan
1	2	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	12,000,000		Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	1 Paket	0	Dinas Kesehatan
1	2	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	12,000,000		Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	1 Paket	0	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 2 1 02.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	60,870,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1 2 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		30 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1 2 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						25,000,000							0	
1 2 1 02.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	25,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Unit	0	Dinas Kesehatan
1 2 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,375,784,000							0	
1 2 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	220,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1 2 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2,155,784,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1 2 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						210,000,000							0	
1 2 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	100,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		14 Unit	0	Dinas Kesehatan
1 2 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	10,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		20 Unit	0	Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
1	2	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	95,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		3 Unit		0	Dinas Kesehatan	
1	2	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	5,000,000		Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		10 Unit		0	Dinas Kesehatan
1	2	1	02.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						20,000,000								0		
1	2	1	02.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				26 Unit Kerja	20,000,000		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		26 Unit Kerja		0	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						86,881,259,000								0		
1	2	2	02.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						56,179,500,000								0		
1	2	2	02.01	6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				8 Unit	37,000,000,000			DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		8 Unit		0	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.01	7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	50,000,000		Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		2 Unit		0	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				7 Unit	1,390,000,000		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		7 Unit		0	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
															Nasional	Daerah			
1	2	2	02.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				38 Unit	2,825,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		38 Unit	0	Dinas Kesehatan
											Kab. Temanggung, Ngadirejo, Manggong	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)							
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik							
1	2	2	02.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	3,965,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		1 Unit	0	Dinas Kesehatan
												DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)							
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik							
1	2	2	02.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				1 Paket	2,500,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		1 Paket	0	Dinas Kesehatan
												DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)							
1	2	2	02.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				4 Paket	8,329,500,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		4 Paket	0	Dinas Kesehatan
												DAK Non Fisik-BOKKB-BOK							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 2 2 02.01 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				26 Paket	120,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		26 Paket	0	Dinas Kesehatan
1 2 2 02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						30,676,759,000							0	
1 2 2 02.02 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10740 Orang	315,940,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		10740 Orang	0	Dinas Kesehatan
1 2 2 02.02 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11598 Orang	399,800,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		11598 Orang	0	Dinas Kesehatan
1 2 2 02.02 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9740 Orang	105,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		9740 Orang	0	Dinas Kesehatan
1 2 2 02.02 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				99708 Orang	50,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		99708 Orang	0	Dinas Kesehatan
1 2 2 02.02 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				513899 Orang	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		513899 Orang	0	Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
													Nasional					Daerah		
1	2	2	02.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				108351 Orang	128,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		108351 Orang	0	Dinas Kesehatan	
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik							
1	2	2	02.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				220899 Orang	50,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		220899 Orang	0	Dinas Kesehatan	
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik							
1	2	2	02.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10578 Orang	20,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		10578 Orang	0	Dinas Kesehatan	
1	2	2	02.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1978 Orang	30,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		1978 Orang	0	Dinas Kesehatan	
1	2	2	02.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				8483 Orang	110,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		8483 Orang	0	Dinas Kesehatan	
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	2	2	02.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				12896 Orang	100,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		12896 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	5,771,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		12 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	2,356,547,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		12 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	100,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		12 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	275,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		12 Dokumen	0	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	2	2	02.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	300,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		12 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1	2	2	02.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	200,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		0 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen					12 Dokumen				
1	2	2	02.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		12 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1	2	2	02.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		12 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1	2	2	02.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	19,305,472,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		12 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1	2	2	02.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1	2	2	02.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				11 Unit	530,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		11 Unit	0	Dinas Kesehatan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
1	2	2	02.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)					1 Unit	30,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		1 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							25,000,000							0	
1	2	2	02.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya					20 Unit	25,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		20 Unit	0	Dinas Kesehatan	
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							10,000,000							0	
1	2	3	02.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							10,000,000							0	
1	2	3	02.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya					1100 Orang	10,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		1100 Orang	0	Dinas Kesehatan	
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							450,000,000							0	
1	2	4	02.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							39,000,000							0	
1	2	4	02.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					12 Dokumen	39,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		12 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1	2	4	02.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							125,000,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 2 4 02.03 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				12 Dokumen	125,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		12 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1 2 4 02.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						286,000,000							0	
1 2 4 02.06 1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				120 Unit	286,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		120 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							259,661,004,230						259,816,004,230	
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							29,461,004,230						29,466,004,230	
1 2 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						29,461,004,230							29,461,004,230	
1 2 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				485 Orang/bulan	29,461,004,230		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		485 Orang/bulan	29,461,004,230	Dinas Kesehatan
		Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai				14 Bulan							14 Bulan		
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							230,200,000,000						230,350,000,000	
1 2 2 02.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						95,200,000,000							95,350,000,000	
1 2 2 02.01 5	Pengembangan Rumah Sakit	Terlaksananya pembangunan unit gedung layanan dan sarpras pendukungnya				1 Paket	60,000,000,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	RSUD Kabupaten Temanggung	1 Paket	0	Dinas Kesehatan
1 2 2 02.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya pembangunan unit gedung layanan dan sarpras pendukungnya				1 Paket	35,200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Paket	95,350,000,000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
		Tersedianya alat kesehatan				1 Paket			DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		RSUD Kabupaten Temanggung	1 Paket			
		Tersedianya fasilitas Pendampingan Pelayanan Rujukan (Pendampingan DAK Kesehatan)				1 Kegiatan			Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi			RSUD Kabupaten Temanggung	1 Kegiatan			
		Tersedianya sarana dan prasarana (aset) rumah sakit				1 Paket						RSUD Kabupaten Temanggung	1 Paket			
1	2	2	02.02					135,000,000,000						135,000,000,000		
1	2	2	02.02	32												
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit				75 Kegiatan	135,000,000,000		Pendapatan dari BLUD		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		75 Kegiatan	135,000,000,000	Dinas Kesehatan	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	2							1,948,826,000							0	
1	2	1						1,948,826,000							0	
1	2	1	02.10					1,948,826,000							0	
1	2	1	02.10	1												
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1 Unit Kerja	1,948,826,000		Kab. Temanggung, Parakan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		1 Unit Kerja		0 Dinas Kesehatan	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	2							1,027,085,299							0	
1	2	1						1,027,085,299							0	
1	2	1	02.10					1,027,085,299							0	
1	2	1	02.10	1												
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1 Unit Kerja	1,027,085,299		Kab. Temanggung, Parakan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		1 Unit Kerja		0 Dinas Kesehatan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
											Nasional	Daerah							
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0						
1	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							0						
1	2	1	02.10			Peningkatan Pelayanan BLUD							0						
1	2	1	02.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,201,418,539	Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0						
1	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							0						
1	2	1	02.10			Peningkatan Pelayanan BLUD							0						
1	2	1	02.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,298,250,000	Kab. Temanggung, Bansari, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0						
1	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							0						
1	2	1	02.10			Peningkatan Pelayanan BLUD							0						
1	2	1	02.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3,370,592,000	Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19	Puskesmas Bulu	1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0						
1	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							0						
1	2	1	02.10			Peningkatan Pelayanan BLUD							0						
1	2	1	02.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,702,624,024	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
											Nasional	Daerah						
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0					
1	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							0					
1	2	1	02.10			Peningkatan Pelayanan BLUD							0					
1	2	1	02.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,861,462,731	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19	1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0					
1	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							0					
1	2	1	02.10			Peningkatan Pelayanan BLUD							0					
1	2	1	02.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,052,328,462	Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19	1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0					
1	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							0					
1	2	1	02.10			Peningkatan Pelayanan BLUD							0					
1	2	1	02.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,936,535,686	Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19	1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0					
1	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							0					
1	2	1	02.10			Peningkatan Pelayanan BLUD							0					
1	2	1	02.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,827,493,787	Kab. Temanggung, Selopampan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19	1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
											Nasional	Daerah						
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0						
1	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0						
1	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0						
1	2	1	02.10			Peningkatan Pelayanan BLUD						0						
1	2	1	02.10	1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1,616,641,350	Kab. Temanggung, Kranggan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19	1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0						
1	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0						
1	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0						
1	2	1	02.10			Peningkatan Pelayanan BLUD						0						
1	2	1	02.10	1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1,045,702,821	Kab. Temanggung, Kranggan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19	1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0						
1	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0						
1	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0						
1	2	1	02.10			Peningkatan Pelayanan BLUD						0						
1	2	1	02.10	1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	3,001,759,200	Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19	1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0						
1	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0						
1	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0						
1	2	1	02.10			Peningkatan Pelayanan BLUD						0						
1	2	1	02.10	1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1,042,000,000	Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19	1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
															3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
											Nasional	Daerah						
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0					
1	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							0					
1	2	1	02.10			Peningkatan Pelayanan BLUD							0					
1	2	1	02.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,576,513,000	Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19	1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0					
1	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							0					
1	2	1	02.10			Peningkatan Pelayanan BLUD							0					
1	2	1	02.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	977,253,200	Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19	1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0					
1	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							0					
1	2	1	02.10			Peningkatan Pelayanan BLUD							0					
1	2	1	02.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,911,253,345	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19	1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0					
1	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							0					
1	2	1	02.10			Peningkatan Pelayanan BLUD							0					
1	2	1	02.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,443,300,000	Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19	1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
											Nasional	Daerah						
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0						
1	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0						
1	2	1	02.10			Peningkatan Pelayanan BLUD						0						
1	2	1	02.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	3,237,087,753	Kab. Temanggung, Ngadirejo, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19	0	1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0						
1	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0						
1	2	1	02.10			Peningkatan Pelayanan BLUD						0						
1	2	1	02.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1,376,486,985	Kab. Temanggung, Ngadirejo, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19	0	1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0						
1	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0						
1	2	1	02.10			Peningkatan Pelayanan BLUD						0						
1	2	1	02.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1,480,000,000	Kab. Temanggung, Jumo, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19	0	1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0						
1	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0						
1	2	1	02.10			Peningkatan Pelayanan BLUD						0						
1	2	1	02.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	2,619,200,000	Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19	0	1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0				
1	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0				
1	2	1	02.10			Peningkatan Pelayanan BLUD						0				
1	2	1	02.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1,907,150,000	Kab. Temanggung, Candiroto, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19	1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0				
1	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0				
1	2	1	02.10			Peningkatan Pelayanan BLUD						0				
1	2	1	02.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	2,352,000,000	Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19	1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0				
1	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0				
1	2	1	02.10			Peningkatan Pelayanan BLUD						0				
1	2	1	02.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1,100,000,000	Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19	1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0				
1	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0				
1	2	1	02.10			Peningkatan Pelayanan BLUD						0				
1	2	1	02.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	2,082,980,308	Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19	1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
1	3	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					1 Kegiatan	99,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Kegiatan	108,900,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Kegiatan	30,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Kegiatan	33,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,489,889,420							1,638,878,362	
1	3	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Bulan	90,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Bulan	99,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Bulan	1,399,889,420	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Bulan	1,539,878,362	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							389,998,580							428,998,438	
1	3	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					12 Bulan	149,999,880	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Bulan	164,999,868	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					0 Unit	19,998,700	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		0 Unit	21,998,570	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					12 Bulan							12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 3 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Bulan	220,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Bulan	242,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						29,963,600,000							15,717,559,660	
1 3 2 02.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						29,963,600,000							15,717,559,660	
1 3 2 02.02 1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun				1 Kegiatan	100,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Kegiatan	110,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 2 02.02 3	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun				1 Kegiatan	13,173,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Kegiatan	14,490,300,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
									Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi						
1 3 2 02.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1 Kegiatan	15,690,600,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Kegiatan	17,259,660	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
									Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
1 3 2 02.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				6 UPTD	1,000,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		6 UPTD	1,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						16,192,686,500							17,399,455,150	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
1	3	3	02.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					16,192,686,500						17,399,455,150			
1	3	3	02.01	4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Paket Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			13 paket	15,817,686,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Perdesaan	13 paket	17,399,455,150	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat			0 SR			Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				0 SR		
												Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi						
1	3	3	02.01	8	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan				0	375,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Perdesaan	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Jumlah Paket Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			1 Kegiatan							1 Kegiatan		
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					7,457,000,000						7,469,000,000		
1	3	6	02.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					7,457,000,000						7,469,000,000		
1	3	6	02.01	8	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan			1 Kegiatan	667,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Kegiatan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6	02.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara			6 UPTD	6,790,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		6 UPTD	7,469,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
												Nasional					Daerah
1	3	7							125,000,000						137,500,000		
1	3	7	02.01						125,000,000						137,500,000		
1	3	7	02.01	1				1 Kegiatan	125,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Kegiatan	137,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	8							9,050,000,000						9,955,000,000		
1	3	8	02.01						9,050,000,000						9,955,000,000		
1	3	8	02.01	1				1 Kegiatan	150,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Kegiatan	165,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	8	02.01	12				0 Unit	8,900,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		0 Unit	9,790,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
								1 Kegiatan							1 Kegiatan		
								1 Unit							1 Unit		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	3	9		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					250,000,000						275,000,000				
1	3	9	02.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota					250,000,000						275,000,000				
1	3	9	02.01	4 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				6 UPTD	250,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		6 UPTD	275,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					162,970,500,000						18,726,373,050				
1	3	10	02.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					162,970,500,000						18,726,373,050				
1	3	10	02.01	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				1 Kegiatan	250,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Kegiatan	275,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	10	02.01	6 Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar				1 Kegiatan	5,329,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Kegiatan		0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik							
												Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	3	10	02.01	8	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				1 Kegiatan	138,975,500,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Kegiatan	152,873,050	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	02.01	9	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				1 Kegiatan	2,585,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Kegiatan	2,843,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	02.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				1 Kegiatan	1,781,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Kegiatan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	02.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				6 UPTD	10,000,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		6 UPTD	11,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	02.01	16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian				1 Kegiatan	3,200,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Kegiatan	3,520,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	02.01	18	Rehabilitasi Jembatan	jembatan dalam kondisi baik				1 Kegiatan	350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Kegiatan	385,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	3	10	02.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				1 Kegiatan	500,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Kegiatan	550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						650,000,000							715,000,000	
1	3	12	02.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						400,000,000							440,000,000	
1	3	12	02.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	400,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Kegiatan	440,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	02.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						250,000,000							275,000,000	
1	3	12	02.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				1 Kegiatan	250,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Kegiatan	275,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1															
1	4						6,537,286,990						7,000,000,000		
1	4	2					470,427,990						750,000,000		
1	4	2	02.05				470,427,990						750,000,000		
1	4	2	02.05	2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	6 Dokumen	470,427,990	Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	6 Dokumen	750,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
					Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		6 Rusunawa		Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Wetan			6 Rusunawa			
									Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman						
									Kab. Temanggung, Ngadirejo, Manggon g						
									Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan						
1	4	3					6,066,859,000						6,250,000,000		
1	4	3	02.01				150,000,000						0		
1	4	3	02.01	2	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	1 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen		0	
					Tersusunnya dokumen RP3KP Kabupaten Temanggung		1 Dokumen					1 Dokumen			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
1	4	3	02.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh Ha					5,916,859,000						6,250,000,000			
1	4	3	02.03	2 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				55 Unit Rumah	3,189,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		55 Unit Rumah	3,150,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (P)				22 Unit Rumah		Kab. Temanggung, Pringsurat, Soropadan	Bantuan Keuangan			22 Unit Rumah			
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (sumber dana Bankeu)				166 Unit Rumah		Kab. Temanggung, Pringsurat, Kupon				166 Unit Rumah			
					Pendampingan Perbaikan RTLH				55 unit		Kab. Temanggung, Pringsurat, Gowak				55 unit			
											Kab. Temanggung, Kaloran, Tlogowungu							
											Kab. Temanggung, Kaloran, Gandon							
											Kab. Temanggung, Kaloran, Tleter							
											Kab. Temanggung, Kaloran, Getas							
											Kab. Temanggung, Kaloran, Kemiri							
											Kab. Temanggung, Kaloran, Geblog							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
									Kab. Temanggung, Kaloran, Tegowanuh										
									Kab. Temanggung, Kaloran, Keblukan										
									Kab. Temanggung, Kaloran, Tepusen										
									Kab. Temanggung, Kaloran, Gandulan										
									Kab. Temanggung, Kaloran, Kwarakan										
									Kab. Temanggung, Jumo, Jumo										
									Kab. Temanggung, Jumo, Kertosari										
									Kab. Temanggung, Bansari, Purborejo										
									Kab. Temanggung, Bejen, Congkrang										
1	4	3	02.03	3	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Terfasilitasinya kegiatan bidang perumahan				1 Kegiatan	27,859,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Kegiatan	100,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
1	4	3	02.03	8	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun					54 Unit	2,700,000,000	Kab. Temanggung, Pringsurat, Pingit	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		54 Unit	3,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							87,486,332,177						92,759,242,059	
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							13,920,726,167						14,324,242,059	
2	11	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							12,851,455,667						13,172,742,059	
2	11	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					153 Orang/bulan	12,851,455,667	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		153 Orang/bulan	13,172,742,059	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN						13 Bulan			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			13 Bulan		
2	11	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							56,151,000						0	
2	11	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					153 Paket	56,151,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		153 Paket	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							138,936,600						162,500,000	
2	11	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	5,998,500	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Paket	7,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
					Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						12 Bulan						12 Bulan		
2	11	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	20,999,100	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Paket	25,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
					Tersedianya Bahan Logistik Kantor						12 Bulan						12 Bulan		
2	11	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	21,950,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Paket	25,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
					Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan						12 Bulan						12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
2	11	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu, Fasilitasi Rapat					12 Bulan	59,990,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Bulan	65,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Bulan	29,999,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Bulan	40,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							570,292,500							624,000,000	
2	11	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Bulan	6,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Bulan	9,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	72,577,200	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	90,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Bulan		Kab. Temanggung, Kranggan, Sanggrahan					12 Bulan		
2	11	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Bulan	491,715,300	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Bulan	525,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							303,890,400							365,000,000	
2	11	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					17 Unit	92,986,200	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		17 Unit	100,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					12 Bulan							12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
2	11	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	205,925,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Unit	250,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						12 Bulan							12 Bulan		
2	11	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					12 Bulan	4,979,200	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Bulan	15,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							184,273,810							50,000,000	
2	11	2	02.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota							34,273,810							50,000,000	
2	11	2	02.01	2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersusnya Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tiap tahun (DIKPLHD)					1 Dokumen	34,273,810	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Dokumen	50,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	2	02.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota							150,000,000							0	
2	11	2	02.02	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun					1 Dokumen	150,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Dokumen	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							858,102,400							3,100,000,000	
2	11	3	02.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							257,863,900							1,100,000,000	
2	11	3	02.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air,Udara dan Tanah					40 Sampel	29,999,900	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		40 Sampel	100,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	3	02.01	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan					12 Bulan	227,864,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Bulan	1,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Nasional					Daerah		
2	11	3	02.03					600,238,500						2,000,000,000			
2	11	3	02.03	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Terlaksananya konservasi dan reabilitasi lahan di Kabupaten Temanggung		1 Kegiatan	600,238,500	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Kegiatan	2,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	4						1,320,526,200						1,700,000,000			
2	11	4	02.01					1,320,526,200						1,700,000,000			
2	11	4	02.01	2	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		5.07 Ha	90,864,000	Kab. Temanggung, Pringsurat, Ngipik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		5.07 Ha	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
						Terpeliharanya Kebun Ngipik milik Pemda		12 Bulan							12 Bulan		
2	11	4	02.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		7.96 Ha	1,229,662,200	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		7.96 Ha	1,500,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
						Terpeliharanya Taman Kota		12 Bulan		Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman					12 Bulan		
2	11	5						10,000,000						60,000,000			
2	11	5	02.01					10,000,000						60,000,000			
2	11	5	02.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksananya fasilitasi penyusunan rincian teknis pengelolaan limbah B3 bagi usaha/ kegiatan di Kabupaten Temanggung		1 Kegiatan	10,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Kegiatan	60,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2	11	6					35,001,300						75,000,000		
2	11	6	02.01				35,001,300						75,000,000		
2	11	6	02.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan/Usaha di Kabupaten Temanggung	50 Kegiatan/Usaha	35,001,300	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Wilayah dan Lingkungan Hidup	50 Kegiatan/Usaha	75,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
2	11	9					176,000,000						450,000,000		
2	11	9	02.01				176,000,000						450,000,000		
2	11	9	02.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya Penghargaan Adipura, MSA, dan Pembinaan Saka Kalpataru	1 Paket	176,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	1 Paket	450,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
						Terselenggaranya Penghargaan Sekolah Adiwiyata	10 Sekolah					10 Sekolah			
2	11	11					70,981,702,300						73,000,000,000		
2	11	11	02.01				70,981,702,300						73,000,000,000		
2	11	11	02.01	3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Mandiri Sampah	200 Desa/Kelurahan	18,101,792,300	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	200 Desa/Kelurahan	19,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
						Jumlah Sampah Terkelola	70 %			Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		70 %			
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Persampahan	1 Paket					1 Paket			
						Terlaksananya Pemeliharaan Kebersihan Kota	12 Bulan					12 Bulan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
2	11	11	02.01	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat					200 Kelompok	565,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		200 Kelompok	500,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah (P)						3 Paket		Kab. Temanggung, Tembarak, Purwodadi				3 Paket		
					Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						12 Bulan		Kab. Temanggung, Parakan, Mandisari				12 Bulan		
													Kab. Temanggung, Ngadirejo, Karanggedong						
2	11	11	02.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya pembangunan TPST					1 Paket	7,800,000,000	Kab. Temanggung, Bejen, Jlegong	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Paket	8,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
														Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup				
2	11	11	02.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Penyediaan Alat Berat Operasional TPA/TPST					1 Paket	44,514,910,000	Kab. Temanggung, Kranggan, Sanggrahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Paket	45,500,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
					Penyediaan Sarpras Operasional IPLT						1 Unit			Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi			1 Unit		
					Terlaksananya Pemeliharaan dan Operasional UPT TPA Sanggrahan						1 Kegiatan						1 Kegiatan		
					Terlaksananya Revitalisasi TPA						1 Kegiatan						1 Kegiatan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	5					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						20,140,577,412					
1	5	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						17,213,967,412					
1	5	1	02.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5,340,990,412					
1	5	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	5,340,990,412	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	13 Orang/bulan	5,340,990,412	Satuan Polisi Pamongpra ja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	02.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						346,015,000					
1	5	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	146,015,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	1 Paket	146,015,000	Satuan Polisi Pamongpra ja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				500 Orang	200,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	500 Orang	200,000,000	Satuan Polisi Pamongpra ja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	02.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						181,500,000					
1	5	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	1 Paket	10,000,000	Satuan Polisi Pamongpra ja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	55,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	1 Paket	55,000,000	Satuan Polisi Pamongpra ja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2,500,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	1 Paket	2,500,000	Satuan Polisi Pamongpra ja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	1 Paket	25,000,000	Satuan Polisi Pamongpra ja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	1 Paket	10,000,000	Satuan Polisi Pamongpra ja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	39,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 Laporan	39,000,000	Satuan Polisi Pamongpra ja dan Pemadam Kebakaran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
1	5	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	40,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		20 Laporan	40,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						10,678,788,000							10,678,788,000	
1	5	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	560,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Unit	560,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	30,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		20 Unit	30,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	5,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		2 Unit	5,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	02.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	150,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Unit	150,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	9,933,788,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Unit	9,933,788,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						251,674,000							251,674,000	
1	5	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	70,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	70,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	9,500,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		10 Laporan	9,500,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
1	5	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	172,174,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	172,174,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						415,000,000						415,000,000		
1	5	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				0 Dokumen	60,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		0 Dokumen	60,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					20 Unit							20 Unit		
1	5	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup			50,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	02.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	5,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		10 Unit	5,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Unit	50,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	100,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Unit	100,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	150,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Unit	150,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
1	5	2		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						1,256,990,000					1,226,990,000			
1	5	2	02.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						1,256,990,000					1,226,990,000			
1	5	2	02.01	1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				240 Kasus	92,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		240 Kasus	92,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	
1	5	2	02.01	3 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				12 Dokumen	834,990,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Dokumen	834,990,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	
1	5	2	02.01	5 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1050 Orang	330,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1050 Orang	300,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	
1	5	4		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						1,669,620,000					1,669,620,000			
1	5	4	02.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						1,156,620,000					1,156,620,000			
1	5	4	02.01	2 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	111,582,100	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	111,582,100	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	
1	5	4	02.01	5 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				12 Dokumen	12,417,900	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Dokumen	12,417,900	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	
1	5	4	02.01	7 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				40 Orang	1,032,620,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		40 Orang	1,032,620,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	
1	5	4	02.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						15,070,000					15,070,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Nasional	Daerah			
1 5 4 02.02 1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				12 Dokumen	15,070,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Dokumen	15,070,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1 5 4 02.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						497,930,000							497,930,000	
1 5 4 02.04 1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				12 Orang	294,180,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Orang	294,180,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1 5 4 02.04 3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprasi Damkar				3 Dokumen	203,750,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		3 Dokumen	203,750,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						4,851,371,072								0
1 5 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,025,432,272								0
1 5 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,525,651,072								0
1 5 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	1,525,651,072		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		15 Orang/bulan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5,505,000								0
1 5 1 02.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	5,505,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		15 Paket	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						81,335,000								0
1 5 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Paket	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Paket	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Paket	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 02.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				27 Laporan	26,335,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		27 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
1	5	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					15 Laporan	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		15 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							297,941,200							0	
1	5	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					30 Laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		30 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	36,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					11 Laporan	8,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		11 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	248,941,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							115,000,000							0	
1	5	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					20 Unit	67,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		20 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					5 Unit	43,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		5 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					10 Unit	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		10 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							2,825,938,800							0	
1	5	3	02.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							1,813,000,000							0	
1	5	3	02.02	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi					1 Dokumen	85,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	02.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana					150 Orang	285,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		150 Orang	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
										Nasional	Daerah											
1	5	3	02.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota					1 Dokumen	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Dokumen		0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	3	02.02	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah paket rehabilitasi/rekonstruksi					2 paket	1,428,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		2 paket		0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	3	02.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							1,012,938,800								0		
1	5	3	02.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat					2 Dokumen	637,938,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		2 Dokumen		0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	3	02.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana					75 Orang	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		75 Orang		0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	3	02.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					100 Orang	325,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		100 Orang		0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											27,402,236,000					27,402,236,000	
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											5,876,212,808					5,876,212,808	
1	6	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											4,656,979,900					4,656,979,900	
1	6	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					0 Orang/bulan	4,656,979,900	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0 Orang/bulan				Dinas Sosial
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					28 Orang							28 Orang				
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai					12 bulan							12 bulan				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
1	6	1	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10,250,000					10,250,000			
1	6	1	02.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				41 Paket	10,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	41 Paket	10,250,000	Dinas Sosial	
1	6	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						116,773,000					116,773,000			
1	6	1	02.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 bulan	8,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	12 bulan	8,000,000	Dinas Sosial	
1	6	1	02.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPPD,LKJIP, Evaluasi RENJA 4x, IKPD 4x, DATA POKOK PEMBANGUNAN 4x, RFK 12x)				12 bulan	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	12 bulan	15,000,000	Dinas Sosial	
					Terlaksananya Penyusunan RENJA, Perubahan RENJA, PK,RKA, DPA, RKPA, dan DPPA Perangkat Daerah				12 bulan						12 bulan			
					Tersedianya Alat Tulis Kantor				12 bulan						12 bulan			
1	6	1	02.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan				12 bulan	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	12 bulan	10,000,000	Dinas Sosial	
1	6	1	02.06	8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	53,773,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	12 Laporan	53,773,000	Dinas Sosial	
					Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai				12 bulan						12 bulan			
1	6	1	02.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				12 bulan	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	12 bulan	30,000,000	Dinas Sosial	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	6	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	164,881,100	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		5 Unit	164,881,100	Dinas Sosial
						Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala barang milik Daerah				100 Persen							100 Persen		
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						670,000,000							670,000,000	
1	6	2	02.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						670,000,000							670,000,000	
1	6	2	02.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	65,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		50 Orang	65,000,000	Dinas Sosial
						terlaksananya pembinaan, Capacity Building dan perekrutan anggota baru PSM dan TAGANA				100 Persen							100 Persen		
1	6	2	02.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19		0 Orang	75,000,000	Dinas Sosial
						Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang							40 Orang		
						Terfasilitasinya bansos program sembako				100 Persen							100 Persen		
						terlaksananya pembinaan dan Capacity Building TKSK dan PSBPK.				100 Persen							100 Persen		
						Terlaksananya pembinaan E-Warong, dan terlaksananya program Sembako				1 Paguyuban							1 Paguyuban		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	6	2	02.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Lembaga	530,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		7 Lembaga	530,000,000	Dinas Sosial	
					Terfasilitasinya Kegiatan FKKT,IPSM,LKKS dan SLRT				100 Persen								100 Persen		
					terlaksananya pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga sosial				4 Kegiatan								4 Kegiatan		
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1,568,124,692							1,568,124,692		
1	6	4	02.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					1,548,124,692							1,548,124,692		
1	6	4	02.01	1	Penyediaan Permakanan	Tersediannya Kebutuhan Makanan bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya			100 Persen	30,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		100 Persen	30,000,000	Dinas Sosial	
1	6	4	02.01	2	Penyediaan Sandang	Tersediannya Kebutuhan Sandang bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya			100 Persen	25,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		100 Persen	25,000,000	Dinas Sosial	
1	6	4	02.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			6 Orang	50,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		6 Orang	50,000,000	Dinas Sosial	
					Tersedianya alat bantu bagi disabilitas (kursi roda anak dan kursi roda standar dewasa)				100 Persen								100 Persen		
1	6	4	02.01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terlayannya Reunifikasi Keluarga bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya			100 persen	10,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		100 persen	10,000,000	Dinas Sosial	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	6	4	02.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	665,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0 Orang	665,000,000	Dinas Sosial
						Tersedianya Fasilitas Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi Klien dan Keluarga disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya				100 Persen							100 Persen		
1	6	4	02.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	343,124,692		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0 Orang	343,124,692	Dinas Sosial
						Tersedianya pemberian layanan kedaruratan berupa pemenuhan kebutuhan dasar serta Bimbingan Fisik, mental dan Sosial bagi Klien Penyandang Disabilitas, Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar serta PPKS lainnya yang bersifat sementara termasuk reunifikasi atau pengembalian kepada keluarga beserta sarana pendukungnya.				12 bulan							12 bulan		
1	6	4	02.01	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Ada layanan layanan pemberian akses Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya				100 Persen	10,000,000		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		100 Persen	10,000,000	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
															Nasional	Daerah			
1	6	4	02.01	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	43,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0 Orang	43,000,000	Dinas Sosial
						Tersedianya Layanan Data dan Pengaduan bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya, Tersedianya Fasilitasi untuk pembuatan NIK, KTP, Akte Kalaahiran, Surat Nikah dan atau Kartu Identitas Keluarga				100 Persen							100 Persen		
1	6	4	02.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	350,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		0 Orang	350,000,000	Dinas Sosial
						Tersedianya Pemberian Laynanan Kedaruratan bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya				100 Persen							100 Persen		
1	6	4	02.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Tersedianya Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya				100 Persen	10,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		100 Persen	10,000,000	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	6	4	02.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	12,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0 Orang	12,000,000	Dinas Sosial
						Tersedianya Pemberian Layanan Rujukan Keluarga bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya				100 Persen							100 Persen		
1	6	4	02.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						20,000,000							20,000,000	
1	6	4	02.02	6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0 Orang	10,000,000	Dinas Sosial
						Tersedianya fasilitas layanan perbekalan kesehatan di luar panti				100 Persen							100 Persen		
1	6	4	02.02	9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0 Orang	10,000,000	Dinas Sosial
						Tersedianya Fasilitas untuk layanan NIK, KTP, Akte Kalaupun, Surat Nikah dan atau Kartu Identitas Keluarga				100 Persen							100 Persen		

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
												Nasional					Daerah	
1	6	5		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					16,262,618,600						16,262,618,600			
1	6	5	02.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar					1,273,987,100						1,273,987,100			
1	6	5	02.01	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota			0 Orang	1,265,987,100	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		0 Orang	1,265,987,100	Dinas Sosial
						Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial			100 Persen						100 Persen			
1	6	5	02.01	2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak telantar yang memperoleh perlindungan sosial			100 Persen	8,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		100 Persen	8,000,000	Dinas Sosial
1	6	5	02.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota					14,988,631,500						14,988,631,500		
1	6	5	02.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata			0 Orang	197,836,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0 Orang	197,836,000	Dinas Sosial
						Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/ kota			100 Persen						100 Persen			
1	6	5	02.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota			100 Persen	10,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		100 Persen	10,000,000	Dinas Sosial
1	6	5	02.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			9000 orang	11,532,795,500	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		9000 orang	11,532,795,500	Dinas Sosial
						Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar			100 Persen			DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			100 Persen			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
1	6	5	02.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					600 Orang	3,248,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		600 Orang	3,248,000,000	Dinas Sosial
					Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan						100 Persen							100 Persen		
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA							2,798,000,000							2,798,000,000	
1	6	6	02.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota							2,630,000,000							2,630,000,000	
1	6	6	02.01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota					200 Orang	102,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		200 Orang	102,000,000	Dinas Sosial
					Persentase korban bencana yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan						100 Persen							100 Persen		
1	6	6	02.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota					120 Orang	108,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		120 Orang	108,000,000	Dinas Sosial
					Persentase korban bencana yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang						100 Persen							100 Persen		
1	6	6	02.01	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota					1500 Orang	2,420,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		1500 Orang	2,420,000,000	Dinas Sosial

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
1	6	6	02.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						168,000,000					168,000,000			
1	6	6	02.02	2 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	168,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	0 Orang	168,000,000	Dinas Sosial		
					Sosialisasi Kesiapsiagaan dan pencegahan Bencana Kepada Masyarakat di daerah Rawan Bencana dalam rangka				100 Persen					100 Persen				
1	6	7		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						227,279,900					227,279,900			
1	6	7	02.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						227,279,900					227,279,900			
1	6	7	02.01	2 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				222 Makam	227,279,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	222 Makam	227,279,900	Dinas Sosial		
					Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan TMP Bambang Sugeng Kranggan				2 Lokasi					2 Lokasi				
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							641,800,000					709,475,000		
2	8	2		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						60,000,000					85,000,000			
2	8	2	02.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						30,000,000					50,000,000			
2	8	2	02.01	3 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				46 Perangkat Daerah	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19	46 Perangkat Daerah	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2	8	2	02.03					30,000,000						35,000,000			
2	8	2	02.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		50 Orang	30,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		50 Orang	35,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
								5 KEG							5 KEG		
2	8	3							187,497,000							189,000,000	
2	8	3	02.01						56,475,000							57,000,000	
2	8	3	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		2 Dokumen	56,475,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		2 Dokumen	57,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	3	02.02						131,022,000							132,000,000	
2	8	3	02.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjut bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		12 Layanan	131,022,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		12 Layanan	132,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	4							60,000,000							85,000,000	
2	8	4	02.01						30,000,000							50,000,000	
2	8	4	02.01	2	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 kegiatan	30,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		5 kegiatan	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 8 4 02.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						30,000,000						35,000,000		
2 8 4 02.02 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	30,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19		50 Orang	35,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 KEG							5 KEG		
2 8 6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						20,000,000							30,000,000	
2 8 6 02.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						20,000,000							30,000,000	
2 8 6 02.02 1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				180 Orang	20,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		180 Orang	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 8 7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						314,303,000							320,475,000	
2 8 7 02.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						106,475,000							111,475,000	
2 8 7 02.01 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				5 kegiatan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		5 kegiatan	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 8 7 02.01 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	56,475,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		2 Dokumen	56,475,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				5 kegiatan							5 kegiatan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2	8	7	02.02					131,022,000						132,000,000						
2	8	7	02.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Layanan	131,022,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		20 Layanan	132,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota					1 kegiatan						1 kegiatan				
2	8	7	02.03					76,806,000								77,000,000				
2	8	7	02.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	76,806,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		2 Dokumen	77,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					12 bulan						12 bulan				
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											15,231,199,008		46,722,779,192		
2	14	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												4,236,713,008		4,362,279,192	
2	14	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,392,279,192							3,392,279,192		
2	14	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	3,392,279,192	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		27 Orang/bulan	3,392,279,192	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
													Nasional					Daerah	
2	14	1	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						25,323,000						30,000,000			
2	14	1	02.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					69 Paket	25,323,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		69 Paket	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						77,600,000						98,000,000			
2	14	1	02.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					2 Paket	2,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		2 Paket	3,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	02.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	11,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		12 Paket	13,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	02.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	9,820,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		12 Paket	12,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	02.06	8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	29,030,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		12 Laporan	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	02.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	25,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		12 Laporan	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
2	14	1	02.08					616,510,816						667,000,000		
2	14	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat								12 Laporan	17,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat								12 BULAN		
2	14	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								12 Laporan	35,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor								12 BULAN		
2	14	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								12 Laporan	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								12 Laporan	600,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										175,000,000	
2	14	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								2 Unit	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								75 Unit	70,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	65,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		2 Unit	70,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 1 02.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	5,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		2 Unit	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						301,605,000							320,000,000	
2 14 2 02.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						95,255,000							100,000,000	
2 14 2 02.01 2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	95,255,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 2 02.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						206,350,000							220,000,000	
2 14 2 02.02 9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				12 Bulan	60,000,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		12 Bulan	70,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 2 02.02 11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				12 Dokumen	29,550,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		12 Dokumen	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Tersedianya Data dan Informasi Keluarga				12 bulan							12 bulan		
2 14 2 02.02 13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				12 Dokumen	116,800,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		12 Dokumen	120,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				12 BULAN			DAK Non Fisik-BOKB-KB			12 BULAN			
2	14	3					6,292,841,000						5,215,500,000		
2	14	3	02.01				1,175,019,200						1,377,000,000		
2	14	3	02.01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja						0 Organisasi	80,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					Terlaksananya Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		25 keg		DAK Non Fisik-BOKB-KB			25 keg			
2	14	3	02.01	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal								27,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
							25,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19				
2	14	3	02.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang							75,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
							3 Dokumen	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		3 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2	14	3	02.01	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				12 Laporan	312,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		12 Laporan	350,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	02.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				0 Laporan	648,000,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		0 Laporan	800,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					12 bulan							12 bulan		
2	14	3	02.01	8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				12 Laporan	40,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		12 Laporan	45,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK					12 kegiatan					3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		12 kegiatan		
2	14	3	02.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						1,387,200,000							1,400,000,000	
2	14	3	02.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				1930 Orang	1,387,200,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		1930 Orang	1,400,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
2	14	3	02.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota					2,626,621,800						1,328,500,000			
2	14	3	02.03	1 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				31 Laporan	13,950,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19	31 Laporan	14,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	3	02.03	3 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				0 Orang	1,540,285,800	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19	0 Orang	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				4620 Orang			DAK Non Fisik-BOKB-KB			4620 Orang			
					"Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)"				12 BULAN						12 BULAN			
2	14	3	02.03	6 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				10 Unit	1,059,786,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19	10 Unit	1,200,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	3	02.03	8 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	12,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19	12 Laporan	14,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				4 kegiatan						4 kegiatan			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
2	14	3	02.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					1,104,000,000						1,110,000,000			
2	14	3	02.04	3 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				64 Kampung	1,104,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19		64 Kampung	1,110,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					4,400,040,000						36,825,000,000			
2	14	4	02.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					4,300,040,000						36,675,000,000			
2	14	4	02.01	2 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				40 Unit	480,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		40 Unit	600,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	4	02.01	4 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				200 Orang	237,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		200 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					"Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)"				3 kegiatan						3 kegiatan			
2	14	4	02.01	5 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1887 Orang	3,533,040,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		1887 Orang	36,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 4 02.01 14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	"Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas"				3 kegiatan	50,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		3 kegiatan	75,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 4 02.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						100,000,000							150,000,000	
2 14 4 02.02 2	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				25 keg	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		25 keg	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						28,675,191,238						30,421,862,238		
2 9 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						27,280,191,238						30,271,862,238		
2 9 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						23,146,362,238							25,403,362,238	
2 9 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				247 Orang/bulan	23,146,362,238	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	ASN di lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	247 Orang/bulan	25,403,362,238	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2 9 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						88,447,000							90,000,000	
2 9 1 02.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	88,447,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1 Paket	90,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
2	9	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						171,432,000					225,000,000			
2	9	1	02.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	Dinas Ketahanan pangan, Pertanian dan Perikanan	1 Paket	20,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2	9	1	02.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	Dinas Ketahanan pangan, Pertanian dan Perikanan		65,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2	9	1	02.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	Dinas Ketahanan pangan, Pertanian dan Perikanan	1 Paket	20,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2	9	1	02.06	8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	56,432,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	Dinas Ketahanan pangan, Pertanian dan Perikanan	1 Laporan	60,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2	9	1	02.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	45,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	Dinas Ketahanan pangan, Pertanian dan Perikanan	1 Laporan	60,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2	9	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1,600,000,000						0		
2	9	1	02.07	9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1,600,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Unit	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
													Nasional					Daerah	
2	9	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,828,820,000						1,853,500,000			
2	9	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		3,500,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
2	9	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					115,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
2	9	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,712,820,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1 Laporan	1,700,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2	9	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						445,130,000							2,700,000,000		
2	9	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						125,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	Dinas ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2	9	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	300,930,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	Dinas ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1 Unit	2,500,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2	9	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						19,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	Dinas ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
												Nasional					Daerah
2	9	2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					1,200,000,000						0		
2	9	2	02.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					1,200,000,000						0		
2	9	2	02.01	1 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia			3 Unit	1,200,000,000	Kab. Temanggung, Kandang an, Kedungu mpul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19	Gapoktan Desa Bengkal Kec Kranggan	3 Unit	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
									Kab. Temanggung, Kranggan, Bengkal	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik							
									Kab. Temanggung, Selopam pang, Bumiayu								
2	9	3		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					170,000,000						100,000,000		
2	9	3	02.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota					30,000,000						100,000,000		
2	9	3	02.02	3 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota					30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19		100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
2	9	3	02.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi					140,000,000						0		
2	9	3	02.04	2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			1 Laporan	140,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19	2 desa lokasi Stunting	1 Laporan	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2	9	5					25,000,000						50,000,000		
2	9	5	02.01				25,000,000						50,000,000		
2	9	5	02.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	Pasar Tradisonal	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3	25						249,950,000						475,000,000		
3	25	4					239,950,000						450,000,000		
3	25	4	02.04				239,950,000						450,000,000		
3	25	4	02.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	164,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19	pokdakan, UPI	1 Unit	200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3	25	4	02.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	75,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Mungsen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19	pokdakan, UPI	1 Unit	250,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3	25	6					10,000,000						25,000,000		
3	25	6	02.01				10,000,000						25,000,000		
3	25	6	02.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	10,000,000	Kab. Temanggung, Parakan, Dangkel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19		1 Dokumen	25,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Nasional	Daerah			
3	27						34,955,157,000					2,690,000,000			
3	27	2					13,971,897,000					2,075,000,000			
3	27	2	02.01				8,324,897,000					2,000,000,000			
3	27	2	02.01	1			6,250,257,000	Kab. Temanggung, Pringsurat, Ngipik	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19	1 Laporan	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
								Kab. Temanggung, Kaloran, Tempuran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			kelompok tani, kelompok ternak, Gapoktan			
									Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
3	27	2	02.01	2			2,074,640,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19	1 Laporan	2,000,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
								Kab. Temanggung, Kedu, Bojonegoro				kelompok tani, kelompok ternak, Gapoktan			
3	27	2	02.02				5,647,000,000						75,000,000		
3	27	2	02.02	3			5,647,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19	1 Dokumen	75,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
												kelompok tani, kelompok ternak, gapoktan			
3	27	3					19,716,260,000						525,000,000		
3	27	3	02.01				75,000,000						225,000,000		
3	27	3	02.01	2			75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19	1 Dokumen	225,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
3	27	3	02.02				19,641,260,000						300,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
3	27	3	02.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara				9 Unit	6,242,430,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19	kelompok tani	9 Unit	300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
													DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)							
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik							
3	27	3	02.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	480,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19	kelompok tani	4 Unit		0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3	27	3	02.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				39 Unit	9,190,110,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19	kelompok tani	39 Unit		0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik							
3	27	3	02.02	7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	3,500,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19	kelompok tani	1 Unit		0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3	27	3	02.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	228,720,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19	kelompok tani	1 Unit		0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Nasional	Daerah			
2 12							6,984,763,588					7,687,703,588			
2 12 1							5,594,763,588					5,842,703,588			
2 12 1	02.02						4,017,703,588					4,017,703,588			
2 12 1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			38 Orang/bulan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	38 Orang/bulan	4,017,703,588	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 1	02.05						13,946,000					15,000,000			
2 12 1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			38 Paket		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	38 Paket	15,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 1	02.06						175,750,000					205,000,000			
2 12 1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			6 Paket		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	6 Paket	10,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 paket		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	12 paket	100,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			20 paket		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	20 paket	5,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			20 laporan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20 laporan	30,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				jumlah laporan makanminum harian pegawai			12 laporan					12 laporan			
2 12 1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		60,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 1	02.08						1,275,234,000					1,435,000,000			
2 12 1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		65,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	12 Laporan	145,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			8 Laporan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	8 Laporan	25,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
2	12	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					36 Laporan	1,058,234,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		36 Laporan	1,200,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							112,130,000							170,000,000	
2	12	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					14 Unit	65,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		14 Unit	70,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	47,130,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		2 Unit	100,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						tempat parkir roda 2					1 paket								1 paket	
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							743,500,000							820,000,000	
2	12	2	02.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk							743,500,000							820,000,000	
2	12	2	02.01	3	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk					60000 Orang	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		60000 Orang	20,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	2	02.01	7	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan					12 Laporan	728,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	800,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL							15,000,000							25,000,000	
2	12	3	02.01		Pelayanan Pencatatan Sipil							15,000,000							25,000,000	
2	12	3	02.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan					17000 Layanan	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		17000 Layanan	25,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							631,500,000							1,000,000,000	
2	12	4	02.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							631,500,000							1,000,000,000	
2	12	4	02.03	3	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					24 Laporan	631,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		24 Laporan	1,000,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2															
2	13														
2	13	1													
2	13	1	02.02												
2	13	1	02.02	1											
2	13	1	02.05	2											
2	13	1	02.06	1											
2	13	1	02.06	2											
2	13	1	02.06	4											
2	13	1	02.06	5											
2	13	1	02.06	8											

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
2	13	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	50,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Laporan	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							410,256,000							430,000,000	
2	13	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					10 Laporan	2,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		10 Laporan	3,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	17,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Laporan	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	5,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Laporan	7,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	386,256,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Laporan	400,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							215,000,000							120,000,000	
2	13	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					27 Unit	80,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		27 Unit	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					0 Unit	135,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0 Unit	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit								2 Unit	
						Revised DED					1 kegiatan								1 kegiatan	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
2	13	2		PROGRAM PENATAAN DESA						11,480,000,000					2,350,000,000			
2	13	2	02.01	Penyelenggaraan Penataan Desa						11,480,000,000					2,350,000,000			
2	13	2	02.01	6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa untuk kegiatan TMMD dan Karya Bhakti				5 Desa	11,480,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	5 Desa	2,350,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				0 Unit				Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi			0 Unit		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				5 Unit							5 Unit		
2	13	4		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						361,625,771,000					129,220,000,000			
2	13	4	02.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						361,625,771,000					129,220,000,000			
2	13	4	02.01	3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	ADD				266 Desa	357,830,771,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	266 Desa	125,270,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					BHP/BHR				266 Desa							266 Desa		
					DD				266 Desa							266 Desa		
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				1 Dokumen							1 Dokumen		
2	13	4	02.01	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	02.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				266 Laporan	3,485,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	266 Laporan	3,600,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	02.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				266 Dokumen	70,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	266 Dokumen	70,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
2	13	4	02.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa				266 Laporan	60,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		266 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	02.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	80,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Dokumen	80,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						8,606,200,000							8,461,200,000	
2	13	5	02.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						8,606,200,000							8,461,200,000	
2	13	5	02.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				266 Lembaga	8,121,200,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		266 Lembaga	7,861,200,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	5	02.01	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	95,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	5	02.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				0 Laporan	40,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0 Laporan	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	5	02.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	350,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Dokumen	500,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
2	15	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					12 bulan	30,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 bulan	30,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							487,540,000							487,540,000	
2	15	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa surat menyurat					12 bulan	6,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 bulan	6,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor					12 bulan	80,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 bulan	80,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa administrasi 6 Org, 1 org PTT Terminal					12 bulan	401,540,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 bulan	401,540,000	Dinas Perhubungan
						Tersedianya jasa pengamanan kantor 6 org tenaga satpam					12 bulan								12 bulan	
						Tersedianya peralatan dan bahan pembersih, tenaga jasa kebersihan kantor 3 Org dan terbayarnya iuran retribusi sampah					12 bulan								12 bulan	
2	15	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							12,405,000,000							105,000,000	
2	15	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					32 Unit	75,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		32 Unit	75,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	12,320,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		2 Unit	20,000,000	Dinas Perhubungan
						Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					12 bulan								12 bulan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 15 1 02.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	10,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		20 Unit	10,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						28,068,004,000							13,621,855,894	
2 15 2 02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						21,076,364,000							11,775,465,894	
2 15 2 02.02 1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				128 Unit	2,569,020,000	Kab. Temanggung, Lungge	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		128 Unit	0	Dinas Perhubungan
								Kab. Temanggung, Mudal							
								Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kelurahan							
								Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
2	15	2	02.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				10 paket	7,164,900,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		10 paket	0	Dinas Perhubungan
												Kab. Temanggung, Kandang an, Rowo	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan						
												Kab. Temanggung, Parakan, Semua Kelurahan							
												Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kelurahan							
												Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan							
2	15	2	02.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				0 Unit	10,771,148,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		0 Unit	11,204,169,894	Dinas Perhubungan
						Terpeliharanya Penerangan Jalan Umum (PJU)				12 bulan							12 bulan		
2	15	2	02.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya perlengkapan jalan				12 bulan	571,296,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 bulan	571,296,000	Dinas Perhubungan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
2	15	2	02.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					3,587,592,000						387,592,000			
2	15	2	02.03	2	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun			1 paket	3,000,000,000	Kab. Temanggung, Gemawang, Jambon	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 paket	0	Dinas Perhubungan	
2	15	2	02.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara			0 Unit	315,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Giyanti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		0 Unit	115,000,000	Dinas Perhubungan	
					Terpeliharanya halte				10 unit		Kab. Temanggung, Kandang an, Caruban				10 unit			
					Terpeliharanya terminal tipe c Kabupaten Temanggung				12 bulan		Kab. Temanggung, Kedu, Kedu				12 bulan			
											Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Wetan							
											Kab. Temanggung, Kledung, Kwadungan Gunung							
2	15	2	02.03	5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Peningkatan pelayanan terminal			12 bulan	272,592,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 bulan	272,592,000	Dinas Perhubungan	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
2	15	2	02.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir					254,296,000					209,046,000				
2	15	2	02.04	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Laporan	254,296,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		0 Laporan	209,046,000	Dinas Perhubungan
					Terfasilitasinya pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten			12 bulan								12 bulan		
2	15	2	02.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					2,504,012,000						604,012,000			
2	15	2	02.05	1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	1,900,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Unit	0	Dinas Perhubungan
2	15	2	02.05	4 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				5400 Dokumen	135,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		5400 Dokumen	135,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	02.05	7 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				0 Unit	469,012,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		0 Unit	469,012,000	Dinas Perhubungan
					Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor (operasional pengujian kendaraan bermotor), servise dan kalibrasi			12 bulan								12 bulan		
2	15	2	02.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					361,296,000						361,296,000			
2	15	2	02.06	1 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengamanan lalu lintas				100 kegiatan	361,296,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		100 kegiatan	361,296,000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 2 02.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						284,444,000						284,444,000		
2 15 2 02.09 1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya operasional bus sekolah				12 bulan	284,444,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 bulan	284,444,000	Dinas Perhubungan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							12,899,291,262						14,250,303,038	
2 16 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							4,464,160,238						4,582,303,038	
2 16 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,749,103,038						3,749,103,038		
2 16 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	3,749,103,038		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		13 Orang/bulan	3,749,103,038	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						316,806,000						380,500,000		
2 16 1 02.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				34 Paket	11,050,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		34 Paket	12,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 1 02.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				230 Orang	305,756,000		DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		230 Orang	368,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						211,284,200						244,000,000		
2 16 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			11,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	120,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		3 Paket	130,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						13,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			16,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						9,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			12,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 1 02.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				66 Laporan	30,284,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		66 Laporan	36,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 16 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	33,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	30 Laporan	39,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						118,967,000						132,700,000		
2 16 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3,075,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		5,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		8,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 1 02.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						11,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		13,200,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						98,892,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		106,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						68,000,000						76,000,000		
2 16 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						68,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		76,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						5,496,552,400						6,122,000,000		
2 16 2 02.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						5,496,552,400						6,122,000,000		
2 16 2 02.01 5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				12 Dokumen	5,081,936,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	12 Dokumen	5,600,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 2 02.01 6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				12 Dokumen	83,148,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	12 Dokumen	112,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 2 02.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya				30 Orang	266,468,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	30 Orang	300,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 2 02.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas						65,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		110,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
2	16	3					2,938,578,624							3,546,000,000				
2	16	3	02.01				1,690,564,656							2,146,000,000				
2	16	3	02.01	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	32,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	12 Dokumen	46,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	3	02.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				46 Unit	1,658,564,656		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	46 Unit	2,100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	02.02				1,248,013,968							1,400,000,000				
2	16	3	02.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1 Unit	27,322,328		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	1 Unit	78,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	02.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				52 Unit	110,924,656		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	52 Unit	142,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	3	02.02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				12 Dokumen	184,766,984		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	12 Dokumen	230,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	3	02.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				0 Dokumen	925,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	950,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				6 Dokumen					6 Dokumen			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
													Nasional					Daerah	
2	17	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						198,747,756						198,747,756			
2	17	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19		0 Paket	15,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
						Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Bulan							12 Bulan		
2	17	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor				12 Bulan	34,097,756	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19		12 Bulan	34,097,756	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan karcis, penggandaan				12 Bulan	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19		12 Bulan	40,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	59,650,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19		0 Laporan	59,650,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
						Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan tamu				12 Bulan							12 Bulan		
2	17	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				12 Bulan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19		12 Bulan	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
2	17	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4,667,152,994						4,667,152,994		
2	17	1	02.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Transport lokal perjalanan dalam daerah				12 Bulan	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19		12 Bulan	15,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	1	02.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	720,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19		12 Bulan	720,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	1	02.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor				12 Bulan	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19		12 Bulan	10,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	1	02.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	LEMBUR (3700 ORANG/JAM)				12 Bulan	3,922,152,994	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19		12 Bulan	3,922,152,994	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
					Terbayarnya honor sopir kepala dinas				12 Bulan							12 Bulan		
					Terbayarnya honor Sopir operasional				12 Bulan							12 Bulan		
					Terbayarnya honor tenaga kebersihan				12 Bulan							12 Bulan		
					Terbayarnya honor tenaga kebersihan/PTT				12 Bulan							12 Bulan		
					Terbayarnya tenaga kelistrikan				12 Bulan							12 Bulan		
					Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih				12 Bulan							12 Bulan		
					Tersedianya honor ketertiban kantor dan pasar				12 Bulan							12 Bulan		
					Tersedianya honor ketertiban umkm center				12 Bulan							12 Bulan		
					Tersedianya honor pengarcis				12 Bulan							12 Bulan		
					Tersedianya honor SPG Umkm center				12 Bulan							12 Bulan		
					Tersedianya honor ss bid perdagangan				12 Bulan							12 Bulan		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
2	17	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						470,760,000					470,760,000			
2	17	1	02.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan,BBM pejabat,pajak				12 Bulan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19	12 Bulan	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
2	17	1	02.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaaraandinas/operasional,BBM Truk				12 Bulan	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19	12 Bulan	250,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
2	17	1	02.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	170,760,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19	0 Unit	170,760,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
					Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				12 Bulan						12 Bulan			
2	17	3		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						30,000,000						30,000,000		
2	17	3	02.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						30,000,000						30,000,000		
2	17	3	02.01	1 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan koperasi				15 Koperasi	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19	15 Koperasi	30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3	30	3	02.02					20,000,000					20,000,000		
3	30	3	02.02	1				20,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19		20,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3	30	4						30,000,000					30,000,000		
3	30	4	02.02					10,000,000					10,000,000		
3	30	4	02.02	2				10,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19	0 Laporan	10,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
													12 Bulan		
3	30	4	02.03					20,000,000					20,000,000		
3	30	4	02.03	2				20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19	20 Kecamatan	20,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3	30	5						400,000,000					400,000,000		
3	30	5	02.01					400,000,000					400,000,000		
3	30	5	02.01	2				200,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19	1 Kegiatan	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3	30	5	02.01	3				200,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19	1 Kegiatan	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
3	30	6																
3	30	6	02.01															
3	30	6	02.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	TERA												
2																		
2	18																	
2	18	1																
2	18	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
2	18	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN												
2	18	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
2	18	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan												
2	18	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pengembangan Layanan Berbasis ISO Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan												
2	18	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan												
2	18	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													
2	18	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
2	18	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							0	30,000,000	Dinas Penanaman Modal		
2	18	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							0	60,000,000	Dinas Penanaman Modal		
2	18	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				120 Orang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		120 Orang	17,000,000	Dinas Penanaman Modal	
					Makan Minum Rapat					250 Orang		0	250 Orang			
					Minum Harian Pegawai					10395 OH			10395 OH			
2	18	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	33,000,000	Dinas Penanaman Modal	
2	18	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								525,885,600		555,000,000	
2	18	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	4,000,000	Dinas Penanaman Modal	
2	18	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	100,000,000	Dinas Penanaman Modal	
2	18	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	21,000,000	Dinas Penanaman Modal	
2	18	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	430,000,000	Dinas Penanaman Modal	
2	18	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								130,000,000		163,000,000	
2	18	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	48,000,000	Dinas Penanaman Modal	
2	18	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	100,000,000	Dinas Penanaman Modal	
2	18	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	15,000,000	Dinas Penanaman Modal	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2	18	2					150,000,000						162,000,000		
2	18	2	02.01				75,000,000						82,000,000		
2	18	2	02.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terselenggaranya kegiatan forum / sosialisasi investasi	1 Kegiatan	75,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Kegiatan	82,000,000	Dinas Penanaman Modal
2	18	2	02.02				75,000,000						80,000,000		
2	18	2	02.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Kajian Potensi Investasi	1 Dokumen	75,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	80,000,000	Dinas Penanaman Modal
2	18	3					410,000,000						450,000,000		
2	18	3	02.01				410,000,000						450,000,000		
2	18	3	02.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Kepala Daerah Yang Mendukung Perizinan Berusaha	2 Dokumen	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Dokumen	100,000,000	Dinas Penanaman Modal
2	18	3	02.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	320,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	350,000,000	Dinas Penanaman Modal
						Jumlah Informasi Produk Promosi Daerah	1 Dokumen						1 Dokumen		
2	18	4					409,629,400						430,000,000		
2	18	4	02.01				409,629,400						430,000,000		
2	18	4	02.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3000 Pelaku Usaha	389,629,400	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3000 Pelaku Usaha	400,000,000	Dinas Penanaman Modal

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 18 4 02.01 3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				200 Orang	20,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	200 Orang	30,000,000	Dinas Penanaman Modal
2 18 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						385,000,000							500,000,000	
2 18 5 02.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						385,000,000							500,000,000	
2 18 5 02.01 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				10 Kegiatan Usaha.	87,500,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				0	10 Kegiatan Usaha.	100,000,000	Dinas Penanaman Modal
2 18 5 02.01 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				160 Pelaku Usaha	195,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	160 Pelaku Usaha	300,000,000	Dinas Penanaman Modal
2 18 5 02.01 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				10 Kegiatan Usaha	102,500,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	10 Kegiatan Usaha	100,000,000	Dinas Penanaman Modal
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						19,778,635,334					19,778,635,334			
2 22 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5,831,679,334					5,831,679,334			
2 22 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,279,570,334					3,279,570,334			
2 22 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3,279,570,334		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			3,279,570,334	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1,311,377,000					1,311,377,000			
2 22 1 02.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	11,377,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Paket	11,377,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 22 1 02.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	900,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Unit	900,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2 22 1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						93,891,650						93,891,650		
2 22 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						995		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		995	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2 22 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						44,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		44,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2 22 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						48,896,650		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		48,896,650	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2 22 1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						108,951,605						108,951,605		
2 22 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						79,958,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		79,958,800	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2 22 1 02.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Bulan	25,999,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Bulan	25,999,700	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2 22 1 02.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2,993,105		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		2,993,105	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2 22 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						13,580,141,000						13,580,141,000		
2 22 2	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						430,141,000						430,141,000		
2 22 2 02.01 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						422,141,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		422,141,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2 22 2 02.01 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan						8,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		8,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 2 02.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						179,546,500							179,546,500	
3 26 2 02.02 4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						179,546,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup			179,546,500	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
									Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup				
3 26 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						129,096,000							129,096,000	
3 26 3 02.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						129,096,000							129,096,000	
3 26 3 02.01 2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota						129,096,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup			129,096,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3 26 5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						590,940,000							590,940,000	
3 26 5 02.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						590,940,000							590,940,000	
3 26 5 02.01 1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	pelatihan SDM Pariwisata				2 Pelatihan	236,376,000		DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		2 Pelatihan	236,376,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3 26 5 02.01 2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	pelatihan SDM Pariwisata				3 Pelatihan	354,564,000		DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata				3 Pelatihan	354,564,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN														
2 23 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8,190,002,145							0	
2 23 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,470,280,145							0	
2 23 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	3,470,280,145		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Orang/bulan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						11,744,000							0	
2 23 1 02.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pakain Dinas				32 buah	11,744,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		32 buah	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						87,142,000							0	
2 23 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup			0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 23 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	10,995,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0 Paket	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						8,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 1 02.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	33,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						29,996,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						360,236,600							0	
2 23 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 1 02.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						9,915,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						255,321,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						89,993,000							0	
2 23 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	69,993,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0 Unit	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 1 02.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		3 Unit	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2	23	2					3,985,606,400							0	
2	23	2	02.01				1,819,606,400							0	
2	23	2	02.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2	02.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	20 Perpustakaan	1,500,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		20 Perpustakaan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2	02.01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2	02.01	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	0 Layanan	95,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0 Layanan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2	02.01	8	Pengembangan Bahan Pustaka			15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2	02.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	12 bulan	99,606,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 bulan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2	02.02					2,166,000,000						0	
2	23	2	02.02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	20 Lokus	1,416,000,000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		20 Lokus	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2	02.02	2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5 Perpustakaan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		5 Perpustakaan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 2 02.02 4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Mobil perpustakaan keliling				1 unit	650,000,000		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		1 unit	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						185,000,000							0	
2 23 3 02.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota						185,000,000							0	
2 23 3 02.01 1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				1 Orang	185,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Orang	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
									Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi						
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							42,050,000						0	
2 24 2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							42,050,000						0	
2 24 2 02.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						2,000,000							0	
2 24 2 02.01 3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota						2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 2 02.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota						33,050,000							0	
2 24 2 02.02 2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis						33,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 2 02.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota						7,000,000							0	
2 24 2 02.03 2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				0 Laporan	7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
2	7	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	42,324,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		12 Laporan	42,324,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2	7	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		12 Laporan	70,000,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2	7	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							719,320,001							719,320,001	
2	7	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	7,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		12 Laporan	7,000,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2	7	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	110,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		12 Laporan	110,000,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2	7	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	602,320,001	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		12 Laporan	602,320,001	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2	7	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							160,496,050							160,496,050	
2	7	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					25 Unit	68,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		25 Unit	68,000,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2	7	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	82,496,050	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		1 Unit	82,496,050	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2	7	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		10 Unit	10,000,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						655,425,000							655,425,000	
2	7	3	02.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						655,425,000							655,425,000	
2	7	3	02.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				160 Orang	600,425,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		160 Orang	600,425,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2	7	3	02.01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				1 Unit	55,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		1 Unit	55,000,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						115,000,000							115,000,000	
2	7	4	02.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota						115,000,000							115,000,000	
2	7	4	02.04	1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				16 Orang	115,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		16 Orang	115,000,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
2	7	5						135,000,000						135,000,000				
2	7	5	02.02					135,000,000						135,000,000				
2	7	5	02.02	4	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	135,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19	1 Lembaga	135,000,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			1,806,660,000						1,806,660,000				
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			906,660,000						906,660,000				
3	31	2	02.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			906,660,000						906,660,000				
3	31	2	02.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah IKM Industri yang Berbasis Komoditas Unggulan				1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3	31	2	02.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Pelatihan atau Pembinaan Industri Penghasil Cukai				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3	31	2	02.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM Tembakau yang mendapatkan pembinaan				25 IKM	656,660,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19	25 IKM	656,660,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3	31	2	02.01	6	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3	31	3					900,000,000						900,000,000		
3	31	3	02.01				900,000,000						900,000,000		
3	31	3	02.01	1			1 Dokumen	900,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19	1 Dokumen	900,000,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
							1 Dokumen						1 Dokumen		
4							UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	1							592,942,500						516,536,850	
4	1	2						592,942,500						516,536,850	
4	1	2	02.01					537,942,500						456,536,850	
4	1	2	02.01	1			12 Dokumen	21,525,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	12 Dokumen	97,892,600	Sekretariat Daerah
												2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			
4	1	2	02.01	2			12 Dokumen	41,417,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	12 Dokumen	42,482,150	Sekretariat Daerah
4	1	2	02.01	3			6 Dokumen	475,000,000	Kab. Tembung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	6 Dokumen	316,162,100	Sekretariat Daerah
4	1	2	02.04					55,000,000						60,000,000	
4	1	2	02.04	1			12 Dokumen	55,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	12 Dokumen	60,000,000	Sekretariat Daerah
4							UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Nasional	Daerah			
4	1						36,189,411,500						0		
4	1	2					36,189,411,500						0		
4	1	2	02.02				36,189,411,500						0		
4	1	2	02.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2 Dokumen	750,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	1	2	02.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	34,681,411,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	1	2	02.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	758,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4															
4															
4	1						1,628,716,000							1,827,628,100	
4	1	2					1,628,716,000							1,827,628,100	
4	1	2	02.03				1,628,716,000							1,827,628,100	
4	1	2	02.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	111 Dokumen	100,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	111 Dokumen	160,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	2	02.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	30 Kasus	1,442,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	30 Kasus	1,567,628,100	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
4	1	2	02.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				111 Dokumen	86,716,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		111 Dokumen	100,000,000	Sekretariat Daerah	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
4	1				SEKRETARIAT DAERAH						2,189,547,500						36,188,640,900		
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						2,189,547,500						36,188,640,900		
4	1	3	02.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						235,432,000						240,432,000		
4	1	3	02.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				12 Dokumen	177,716,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Dokumen	177,716,000	Sekretariat Daerah	
4	1	3	02.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				2 Laporan	57,716,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		2 Laporan	62,716,000	Sekretariat Daerah	
4	1	3	02.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						1,954,115,500						35,948,208,900		
4	1	3	02.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				2 Dokumen	1,954,115,500	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		2 Dokumen	35,948,208,900	Sekretariat Daerah	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
4	1				SEKRETARIAT DAERAH						230,152,000						255,000,000		
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah	%		%	95 %	230,152,000						95 %	255,000,000	
						Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang Selesai Tepat Waktu	%		%	100 %							100 %		
						Persentase Pelaporan Kegiatan PD/Unit Kerja Tepat Waktu	%		%	100 %							100 %		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
													Nasional					Daerah		
4	1	3	02.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						230,152,000					255,000,000					
4	1	3	02.02	1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	105,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	0	1 Dokumen	105,000,000	Sekretariat Daerah		
4	1	3	02.02	2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				100 Laporan	125,152,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	100 Laporan	150,000,000	Sekretariat Daerah		
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	1			SEKRETARIAT DAERAH														0		
4	1	3		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN														0		
4	1	3	02.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						603,439,000						0				
4	1	3	02.03	1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				0 Dokumen	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	0	0 Dokumen	0	Sekretariat Daerah		
4	1	3	02.03	2 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						153,439,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0		Sekretariat Daerah		
4	1	3	02.03	3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				0 Orang	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Orang	0		Sekretariat Daerah		
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	1			SEKRETARIAT DAERAH														33,321,104,810		
4	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														33,321,104,810		
4	1	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						14,328,710,810						14,328,710,810				
4	1	1	02.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				124 Orang/bulan	14,328,710,810	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		124 Orang/bulan	14,328,710,810	Sekretariat Daerah		
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
4	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	2,000,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	2,000,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	1,000,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	1,500,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							5,592,600,000							5,500,000,000	
4	1	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					8 Unit	4,060,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		8 Unit	4,000,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					2 Unit	1,100,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		2 Unit	1,000,000,000	Sekretariat Daerah
														Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)				
4	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					44 Unit	175,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		44 Unit	200,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					8 Unit	257,600,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		8 Unit	300,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							4,396,394,000							4,396,394,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
4	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	15,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	15,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	1,098,400,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	1,098,400,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	3,282,994,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	3,282,994,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,332,826,500							2,500,000,000	
4	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					12 Unit	250,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Unit	250,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					12 Unit	701,826,500	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Unit	800,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara					12 Unit	80,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Unit	100,000,000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
4	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					12 Unit	120,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Unit	120,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara					1 Unit	20,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Unit	30,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					12 Unit	1,161,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Unit	1,200,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							509,749,163							510,000,000	
4	1	1	02.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2 Orang/Bulan	169,749,163	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		2 Orang/Bulan	170,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan					50 Paket	300,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		50 Paket	300,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2 Orang	40,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		2 Orang	40,000,000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
4	1	1	02.12					1,636,000,000						1,636,000,000					
4	1	1	02.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	354,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Paket	354,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	282,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Paket	282,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	1,000,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Paket	1,000,000,000	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DAERAH						410,000,000							1,800,000,000	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						410,000,000							1,800,000,000	
4	1	1	02.13		Penataan Organisasi						410,000,000							1,800,000,000	
4	1	1	02.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	53,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		2 Dokumen	410,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 kegiatan	290,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 kegiatan	410,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 kegiatan	18,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		2 kegiatan	410,000,000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
4	1	1	02.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana					2 kegiatan	12,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		2 kegiatan	160,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					2 Dokumen	37,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		2 Dokumen	410,000,000	Sekretariat Daerah
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																				
4	1				SEKRETARIAT DAERAH							3,334,728,000							3,465,500,800	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3,334,728,000							3,465,500,800	
4	1	1	02.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							600,000,000							600,000,000	
4	1	1	02.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					16 Orang/Bulan	600,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		16 Orang/Bulan	600,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan							2,734,728,000							2,865,500,800	
4	1	1	02.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan					500 Laporan	833,864,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		500 Laporan	774,550,400	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					2000 Laporan	1,300,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		2000 Laporan	1,430,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan					800 Laporan	600,864,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		800 Laporan	660,950,400	Sekretariat Daerah
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Nasional	Daerah			
4	2						47,479,177,625						0		
4	2	1					30,595,041,832						0		
4	2	1	02.02				2,666,378,664						0		
4	2	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	2,666,378,664		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	24 Orang/bulan	0	Sekretariat DPRD	
4	2	1	02.06				834,276,000						0		
4	2	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0	Sekretariat DPRD	
4	2	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			25,093,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0	Sekretariat DPRD	
4	2	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			20,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0	Sekretariat DPRD	
4	2	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			33,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0	Sekretariat DPRD	
4	2	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu			100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0	Sekretariat DPRD	
4	2	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			649,963,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0	Sekretariat DPRD	
4	2	1	02.08				754,797,358						0		
4	2	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			8,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0	Sekretariat DPRD	
4	2	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			110,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0	Sekretariat DPRD	
4	2	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	636,797,358		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	0 Laporan	0	Sekretariat DPRD	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4	2	1	02.09					1,539,963,400						0	
4	2	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			599,963,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit	900,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	0 Unit	0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		30 Unit	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	30 Unit	0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		10 Unit	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	10 Unit	0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				24,417,457,910					0	
4	2	1	02.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			23,916,457,910		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			411,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		0 Orang	90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	0 Orang	0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.16		Layanan Administrasi DPRD				382,168,500					0	
4	2	1	02.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			100,168,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			282,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0	Sekretariat DPRD
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				16,884,135,793					0	
4	2	2	02.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				4,019,261,800					0	
4	2	2	02.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			2,194,733,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif								
										Nasional					Daerah						
4	2	2	02.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan					2 Dokumen	825,302,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		2 Dokumen		0	Sekretariat DPRD
4	2	2	02.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik							999,226,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)				0	Sekretariat DPRD
4	2	2	02.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran							638,986,000								0	
4	2	2	02.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS							206,505,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)				0	Sekretariat DPRD
4	2	2	02.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS							206,509,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)				0	Sekretariat DPRD
4	2	2	02.02	3	Pembahasan APBD							112,986,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)				0	Sekretariat DPRD
4	2	2	02.02	4	Pembahasan APBD Perubahan							112,986,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)				0	Sekretariat DPRD
4	2	2	02.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan							180,000,000								0	
4	2	2	02.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum							40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)				0	Sekretariat DPRD
4	2	2	02.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur							44,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)				0	Sekretariat DPRD
4	2	2	02.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat							44,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)				0	Sekretariat DPRD
4	2	2	02.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian							52,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)				0	Sekretariat DPRD
4	2	2	02.04		Peningkatan Kapasitas DPRD							3,252,930,651								0	
4	2	2	02.04	2	Pendalaman Tugas DPRD							2,825,044,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)				0	Sekretariat DPRD
4	2	2	02.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan							208,142,151		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)				0	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional					Daerah			
4	2	2	02.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			0	Sekretariat DPRD	
4	2	2	02.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat											0		
4	2	2	02.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			0	Sekretariat DPRD	
4	2	2	02.05	3	Pelaksanaan Reses						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			0	Sekretariat DPRD	
4	2	2	02.08		Fasilitasi Tugas DPRD											0		
4	2	2	02.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			0 Dokumen		7,244,867,342		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0 Dokumen	0	Sekretariat DPRD
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	1				PERENCANAAN						9,291,889,326						0	
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6,841,704,326						0	
5	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						325,000,000						0	
5	1	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan peningkatan SDM Perencana, Kegiatan SIPD, Kegiatan PEL, Kegiatan SDGs, Kegiatan Nangkis dan kegiatan Penanggulangan Stunting			6 kegiatan		325,000,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	6 kegiatan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4,965,704,326						0	
5	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			36 Orang/bulan		4,965,704,326		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	36 Orang/bulan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						16,000,000						0	
5	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			43 paket		16,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	43 paket	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						123,500,000						0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
5	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,500,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Paket		0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	17,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Paket		0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	14,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Paket		0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				24 Laporan	49,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		24 Laporan		0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	38,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		25 Laporan		0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						848,500,000								0	
5	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				25 Laporan	1,500,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		25 Laporan		0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
5	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	99,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		36 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	317,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	431,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						563,000,000							0	
5	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	113,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		35 Unit	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	450,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Unit	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						1,829,743,000							0	
5	1	2	02.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						1,061,025,500							0	
5	1	2	02.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD /RKPD)				0 Dokumen	1,061,025,500	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD /RKPD)				6 Dokumen							6 Dokumen		
5	1 2 02.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					88,500,000								0
5	1 2 02.02 3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan			6 Buku	88,500,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		6 Buku		0 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1 2 02.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					680,217,500								0
5	1 2 02.03 3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			3 Laporan	680,217,500	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		3 Laporan		0 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1 3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					620,442,000								0
5	1 3 02.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					318,442,000								0
5	1 3 02.01 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			1 Dokumen	123,042,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Dokumen		0 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1 3 02.01 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			1 Laporan	38,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Laporan		0 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1 3 02.01 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			4 Dokumen	107,400,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		4 Dokumen		0 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
5	1	3	02.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	50,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Laporan		0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	02.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						150,000,000								0	
5	1	3	02.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	75,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		4 Dokumen		0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	02.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	25,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Laporan		0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	02.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Dokumen		0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	02.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						152,000,000								0	
5	1	3	02.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	76,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Dokumen		0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	02.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	76,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Laporan		0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
5	5			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					382,452,000						0			
5	5	2		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					382,452,000							0		
5	5	2	02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					294,488,200							0		
5	5	2	02.01	2	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				3 Laporan	168,838,200	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	3 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	02.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				5 Laporan	125,650,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	5 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	02.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan					27,964,000							0		
5	5	2	02.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				2 Dokumen	27,964,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	2 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	02.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi					59,999,800							0		
5	5	2	02.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				3 Dokumen	59,999,800	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	3 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
5	2	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpeliharanya service dan penggantian suku cadang komputer dan AC				12 bulan	25,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 bulan	45,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5	2	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya service lift dan genset				12 bulan	50,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 bulan	50,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						17,627,423,796							18,381,516,596	
5	2	2	02.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						676,726,800							680,000,000	
5	2	2	02.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				0 Dokumen	77,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0 Dokumen	90,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5	2	2	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				4 Dokumen	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		4 Dokumen	60,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
						Terlaksananya penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD TA 2022				4 Dokumen							4 Dokumen		
5	2	2	02.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 dan Perbup tentang penjabaran APBD Kabupaten Temanggung TA 2023				3 Dokumen	282,726,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		3 Dokumen	285,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5	2	2	02.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya penyusunan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022 dan Perbup tentang penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022				3 Dokumen	227,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		3 Dokumen	195,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
5	2	2	02.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	terlaksananya koordinasi penyusunan apdb dengan pem., pemprop, pemkot maupun dengan SKPD serta pemdes					1 paket	30,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 paket	50,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5	2	2	02.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							556,180,400							680,000,000	
5	2	2	02.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	tersedianya daftar gaji bagi pns se kab Temanggung					14 kegiatan	495,180,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		14 kegiatan	500,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5	2	2	02.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	terlaksananya koordinasi pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan non gaji serta penerbitan SKPP					104 unit kerja	50,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		104 unit kerja	120,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5	2	2	02.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	terlaksananya rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran Kas serta pemungutan dan pemotongan sp2d dengan instansi terkait					104 unit kerja	11,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		104 unit kerja	60,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5	2	2	02.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							1,145,000,000							1,772,000,000	
5	2	2	02.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban							41,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			52,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5	2	2	02.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah							61,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			150,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5	2	2	02.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota							143,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			170,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
5	2	2	02.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota					0 Orang	900,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0 Orang	1,400,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
					Terlaksananya workshop, Rakor SKPD, Sosialisasi kebijakan Akuntansi dan tersedianya honor untuk pengelola keuangan se Kabupaten Temanggung						104 Unit Kerja							104 Unit Kerja		
5	2	2	02.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							15,249,516,596							15,249,516,596	
5	2	2	02.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					0 Laporan	249,516,596	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0 Laporan	249,516,596	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
													Dana Desa							
													Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi							
5	2	2	02.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					0 Laporan	15,000,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0 Laporan	15,000,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							1,291,180,400							1,687,277,004	
5	2	3	02.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah							1,291,180,400							1,687,277,004	
5	2	3	02.01	1	Penyusunan Standar Harga	tersusunnya standar harga					69 dok	31,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		69 dok	25,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5	2	3	02.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah							835,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			835,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5	2	3	02.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah							51,453,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			40,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 2 3 02.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						165,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		250,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 2 3 02.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				0 Laporan	208,726,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	0 Laporan	537,277,004	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
		Terlaksananya pembinaan pejabat pengurus barang dan terlaksananya laporan BMD				103 Unit Kerja						103 Unit Kerja			
5 2 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						991,814,400						985,000,000		
5 2 4 02.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						991,814,400						985,000,000		
5 2 4 02.01 5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						602,907,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		600,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 2 4 02.01 6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						327,180,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		300,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 2 4 02.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				0 Dokumen	16,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	0 Dokumen	20,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
		Terlaksananya penagihan pajak daerah				12 bulan						12 bulan			
5 2 4 02.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				0 Dokumen	45,726,800	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	0 Dokumen	65,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
		Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD				12 bulan						12 bulan			
		Terlaksananya penagihan pajak daerah				12 bulan						12 bulan			
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 3	KEPEGAWAIAN														
5 3 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
5 3 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,889,495,584						3,889,500,000		
5 3 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3,889,495,584		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		3,889,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
5	3	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						171,000,000						150,000,000		
5	3	1	02.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		90,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	1	02.09	5 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	5 Unit	3,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	1	02.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	10 Unit	30,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	1	02.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	62,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	0 Unit	20,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	1	02.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		7,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						1,565,000,000						475,000,000		
5	3	2	02.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						290,000,000						185,000,000		
5	3	2	02.01	2 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				3 Dokumen	260,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	3 Dokumen	150,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	02.01	6 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		15,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	02.01	10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		20,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	02.02	Mutasi dan Promosi ASN						135,000,000						165,000,000		
5	3	2	02.02	2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		15,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	02.02	3 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				2 Dokumen	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	2 Dokumen	150,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif								
										Nasional					Daerah						
6																					
6	1																				
6	1	1																			
6	1	1	02.02																		
6	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					35 Orang/bulan	5,449,664,827		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35 Orang/bulan	5,450,000,000	Inspektorat	
6	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			10,000,000	Inspektorat	
6	1	1	02.05																		
6	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					46 Paket	16,882,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		46 Paket	0	Inspektorat	
6	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					37 Orang	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		37 Orang	60,000,000	Inspektorat	
6	1	1	02.06																		
6	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			3,000,000	Inspektorat	
6	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			30,000,000	Inspektorat	
6	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Paket	40,000,000	Inspektorat	
6	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	42,830,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	30,000,000	Inspektorat	
6	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	68,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	70,000,000	Inspektorat	
6	1	1	02.07																		
6	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel							35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			50,000,000	Inspektorat	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Nasional					Daerah		
6	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			200,000,000	Inspektorat
6	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											10,000,000	
6	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			5,000,000	Inspektorat
6	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			5,000,000	Inspektorat
6	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											85,000,000	
6	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			70,000,000	Inspektorat
6	1	1	02.09	5	Pemeliharaan Mebel						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			5,000,000	Inspektorat
6	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	0 Unit	10,000,000	Inspektorat
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN											520,000,000	
6	1	2	02.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal											460,000,000	
6	1	2	02.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		10,000,000	Inspektorat
6	1	2	02.01	3	Reviu Laporan Kinerja						110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		125,000,000	Inspektorat
6	1	2	02.01	4	Reviu Laporan Keuangan						80,000,000			2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		85,000,000	Inspektorat
6	1	2	02.01	5	Pengawasan Desa						85,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		90,000,000	Inspektorat
6	1	2	02.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				0 Dokumen	135,716,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	0 Dokumen	150,000,000	Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6	1	2	02.02				50,000,000							60,000,000	
6	1	2	02.02	1			11,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			15,000,000	Inspektorat
6	1	2	02.02	2			39,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			45,000,000	Inspektorat
6	1	3					299,716,000							340,000,000	
6	1	3	02.01				36,000,000							40,000,000	
6	1	3	02.01	1			36,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			40,000,000	Inspektorat
6	1	3	02.02				263,716,000							300,000,000	
6	1	3	02.02	3			230,716,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			250,000,000	Inspektorat
6	1	3	02.02	4			33,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			50,000,000	Inspektorat
7															
7	1						12,715,973,147							14,081,205,518	
7	1	1					12,356,285,147							13,719,392,118	
7	1	1	02.02				12,049,425,147							13,441,551,118	
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/bulan	12,049,425,147	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		125 Orang/bulan	13,441,551,118	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.05				45,141,000							45,141,000	
7	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	123 Paket	45,141,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	123 Paket	45,141,000	Kecamatan Temanggung

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
7	1	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						81,659,000						52,200,000		
7	1	1	02.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	5,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		10 Paket	5,200,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	18,739,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		10 Paket	12,000,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		10 Paket	10,000,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	37,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		0 Laporan	15,000,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	10,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	10,000,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						123,060,000							121,500,000	
7	1	1	02.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	6,000,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	15,500,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	15,500,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						102,560,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19			100,000,000	Kecamatan Temanggung

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
7	1	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						57,000,000					59,000,000			
7	1	1	02.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	20,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	10 Unit	22,000,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	1 Unit	30,000,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	6,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	20 Unit	3,500,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	6,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	10 Unit	3,500,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						319,313,000						319,313,400		
7	1	2	02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						319,313,000						319,313,400		
7	1	2	02.04	3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	319,313,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 Laporan	319,313,400	Kecamatan Temanggung	
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						27,175,000						27,500,000		
7	1	3	02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						27,175,000						27,500,000		
7	1	3	02.01	3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	27,175,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	1 Laporan	27,500,000	Kecamatan Temanggung	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						13,200,000					15,000,000			
7	1	4	02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						13,200,000					15,000,000			
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	13,200,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 Laporan	15,000,000	Kecamatan Temanggung	
7				UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1			KECAMATAN						823,899,600					842,585,560			
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						142,040,000					148,540,000			
7	1	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						37,140,000					37,950,000			
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	2,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	10 Paket	2,200,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	11,500,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	10 Paket	12,650,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	6,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 Paket	6,600,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12,640,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 Laporan	11,000,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,500,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						8,000,000					0			
7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	8,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	1 Unit	0	Kecamatan Temanggung	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	369,359,600	Kab. Temanggung, Temanggung I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Pokmas / Ormas	405,295,560	Kecamatan Temanggung
UNSUR KEWILAYAHAN															
7 1	KECAMATAN							792,432,000						837,021,200	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							145,232,000						152,601,200	
7 1 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							28,198,800						28,114,680	
7 1 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	2,059,200	Kab. Temanggung, Temanggung II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		10 Paket	2,265,120	Kecamatan Temanggung
7 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	7,499,600	Kab. Temanggung, Temanggung II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		10 Paket	8,249,560	Kecamatan Temanggung
7 1 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	4,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Paket	4,400,000	Kecamatan Temanggung
7 1 1 02.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	9,640,000	Kab. Temanggung, Temanggung II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	7,700,000	Kecamatan Temanggung
7 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	5,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		2 Laporan	5,500,000	Kecamatan Temanggung
7 1 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							7,500,000						0	
7 1 1 02.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	7,500,000	Kab. Temanggung, Temanggung II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		3 Unit	0	Kecamatan Temanggung

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
7	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						90,533,200					99,586,520			
7	1	1	02.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,500,000	Kab. Temanggung, Temanggung II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	2,750,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	13,200,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	76,033,200	Kab. Temanggung, Temanggung II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	83,636,520	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						19,000,000					24,900,000			
7	1	1	02.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	6,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		2 Unit	6,600,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Unit	15,000,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	1,500,000	Kab. Temanggung, Temanggung II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Unit	1,650,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	1,500,000	Kab. Temanggung, Temanggung II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Unit	1,650,000	Kecamatan Temanggung	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
7	1	3					647,200,000						684,420,000						
7	1	3	02.02				647,200,000						684,420,000						
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				18 Unit	359,398,550	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		18 Unit	367,838,405	Kecamatan Temanggung
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	287,801,450	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Pokmas / Ormas	316,581,595	Kecamatan Temanggung
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN														
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										828,212,000		778,377,900		
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										134,012,000		128,377,900		
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										25,817,000		28,481,700		
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	2,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		10 Paket	2,200,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	8,347,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		10 Paket	9,181,700	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	6,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Paket	6,600,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	4,470,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	5,000,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	5,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		2 Laporan	5,500,000	Kecamatan Temanggung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
7	1	1	02.07					8,000,000							0					
7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	8,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		2 Unit		0	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.08					81,733,000								86,188,000				
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4,080,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	4,488,000		Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	7,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	7,700,000		Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	70,653,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	74,000,000		Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.09					18,462,000								13,708,200				
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	5,462,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		2 Unit	6,008,200		Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Unit	4,400,000		Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	1,500,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Unit	1,650,000		Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	1,500,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Unit	1,650,000		Kecamatan Temanggung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7	1	3					694,200,000						650,000,000				
7	1	3	02.02				694,200,000						650,000,000				
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			9 Unit	439,980,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	9 Unit	300,000,000	Kecamatan Temanggung
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			12 Pokmas / Ormas	254,220,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 Pokmas / Ormas	350,000,000	Kecamatan Temanggung
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	1				KECAMATAN												
							1,022,789,200							783,001,120			
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					300,589,200						153,581,120	
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					42,189,200						43,141,120	
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			10 Paket	3,500,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	10 Paket	3,850,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			10 Paket	14,719,200	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	10 Paket	16,191,120	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	7,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 Paket	7,700,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Laporan	11,970,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 Laporan	9,900,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2 Laporan	5,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	2 Laporan	5,500,000	Kecamatan Temanggung

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
7	1	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						3,500,000						0		
7	1	1	02.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	3,500,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Unit	0	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						83,900,000						92,290,000		
7	1	1	02.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	6,600,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Laporan	6,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	6,600,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	71,900,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	79,090,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						171,000,000						18,150,000		
7	1	1	02.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2 unit	6,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		2 unit	6,600,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	160,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		0 Unit	6,050,000	Kecamatan Temanggung
					Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 unit							1 unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					0 Unit	2,500,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		0 Unit	2,750,000	Kecamatan Temanggung
						Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					12 unit							12 unit		
7	1	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					0 Unit	2,500,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		0 Unit	2,750,000	Kecamatan Temanggung
						Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					12 unit							12 unit		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							722,200,000							629,420,000	
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							722,200,000							629,420,000	
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					9 Unit	448,967,800	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		9 Unit	328,864,580	Kecamatan Temanggung
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					12 Pokmas / Ormas	273,232,200	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Pokmas / Ormas	300,555,420	Kecamatan Temanggung
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN							979,058,800							859,560,680	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							234,858,800							139,940,680	
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							28,208,800							28,125,680	
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					10 Paket	1,500,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		10 Paket	1,650,000	Kecamatan Temanggung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	7,068,800	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		10 Paket	7,775,680	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	6,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket	6,600,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	8,640,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	6,600,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	5,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		2 Laporan	5,500,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						10,350,000							11,385,000	
7	1	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3 unit	10,350,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		3 unit	11,385,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						79,300,000							87,230,000	
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	3,300,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	9,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	9,900,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	67,300,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	74,030,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						117,000,000							13,200,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	3,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		2 Unit	3,300,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	110,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Unit	5,500,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	1,500,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Unit	1,650,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	2,500,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Unit	2,750,000	Kecamatan Temanggung
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						744,200,000							719,620,000	
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						744,200,000							719,620,000	
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	491,810,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		0 Unit	441,991,000	Kecamatan Temanggung
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	252,390,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Pokmas / Ormas	277,629,000	Kecamatan Temanggung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	351,692,500	Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Pokmas / Ormas	386,861,750	Kecamatan Temanggung
UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	1				KECAMATAN						793,480,000							818,924,000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						139,280,000							154,304,000	
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						34,240,000							34,760,000	
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	2,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Banyuurip	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		10 Paket	2,200,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	8,001,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Banyuurip	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		10 Paket	8,801,100	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	6,600,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Banyuurip	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Paket	7,260,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12,639,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Banyuurip	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	10,998,900	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	5,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Banyuurip	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	5,500,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						11,400,000							12,540,000	
7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	11,400,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Banyuurip	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		3 Unit	12,540,000	Kecamatan Temanggung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					12 Pokmas / Ormas	301,292,230	Kab. Temanggung, Temanggung, Banyuwirip	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Pokmas / Ormas	331,421,453	Kecamatan Temanggung
UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	1				KECAMATAN							1,089,915,482							897,140,030	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							139,715,482							154,420,030	
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							36,292,174							36,654,391	
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					10 Paket	2,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		10 Paket	2,200,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					10 Paket	10,322,174	Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		10 Paket	11,354,391	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	6,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Paket	6,600,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	12,970,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	11,000,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2 Laporan	5,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		2 Laporan	5,500,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							8,000,000							8,800,000	
7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					3 Unit	8,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		3 Unit	8,800,000	Kecamatan Temanggung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
7	1	1	02.08					77,423,308					85,165,639						
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	3,300,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	8,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	8,800,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	66,423,308	Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	73,065,639	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						18,000,000							23,800,000	
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	5,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		2 Unit	5,500,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Unit	15,000,000	Kecamatan Temanggung
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)				
															4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup				
															4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup				
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	1,500,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Unit	1,650,000	Kecamatan Temanggung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
7	1	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					12 Unit	1,500,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Unit	1,650,000	Kecamatan Temanggung
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							950,200,000						742,720,000	
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							950,200,000						742,720,000	
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					8 Unit	709,725,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		8 Unit	478,197,500	Kecamatan Temanggung
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					12 Pokmas / Ormas	240,475,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Pokmas / Ormas	264,522,500	Kecamatan Temanggung
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN							753,294,800						829,357,190	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							136,094,800						150,437,190	
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							36,423,900						36,799,290	
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					10 Paket	2,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Jurang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		10 Paket	2,200,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					10 Paket	9,953,900	Kab. Temanggung, Temanggung, Jurang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		10 Paket	10,949,290	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	6,500,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Jurang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Paket	7,150,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	12,970,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Jurang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	11,000,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	5,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Jurang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	5,500,000	Kecamatan Temanggung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Nasional					Daerah		
7	1	1	02.07					8,000,000						8,800,000			
7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit	8,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Jurang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		2 Unit	8,800,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.08						73,670,900						81,037,900		
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	3,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Jurang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	3,300,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	5,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Jurang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	5,500,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	65,670,900	Kab. Temanggung, Temanggung, Jurang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	72,237,900	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.09						18,000,000						23,800,000		
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2 Unit	5,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Jurang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		2 Unit	5,500,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Unit	15,000,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		12 Unit	1,500,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Jurang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Unit	1,650,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		12 Unit	1,500,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Jurang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Unit	1,650,000	Kecamatan Temanggung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7	1	3					617,200,000						678,920,000		
7	1	3	02.02				617,200,000						678,920,000		
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	226,240,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Jurang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	10 Unit	248,864,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	390,960,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Jurang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 Pokmas / Ormas	430,056,000	Kecamatan Temanggung	
7					UNSUR KEWILAYAHAN										
7	1				KECAMATAN										
7	1	1					905,864,000						827,809,400		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			284,664,000					144,489,400		
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			32,859,692					33,604,661		
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Tlogorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	10 Paket	2,200,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	9,549,692	Kab. Temanggung, Temanggung, Tlogorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	10 Paket	10,504,661	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	8,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Tlogorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 Paket	8,800,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8,310,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Tlogorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 Laporan	6,600,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	5,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Tlogorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	2 Laporan	5,500,000	Kecamatan Temanggung	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
7	1	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						8,000,000						8,800,000		
7	1	1	02.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	8,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Tlogorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		2 Unit	8,800,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						74,804,308						82,284,739		
7	1	1	02.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Tlogorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	3,300,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	7,500,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Tlogorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	8,250,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	64,304,308	Kab. Temanggung, Temanggung, Tlogorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	70,734,739	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						169,000,000						19,800,000		
7	1	1	02.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	6,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Tlogorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		2 Unit	6,600,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	160,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Tlogorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Unit	9,900,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	1,500,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Tlogorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		8 Unit	1,650,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	1,500,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Tlogorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		5 Unit	1,650,000	Kecamatan Temanggung	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
7	1	3					621,200,000						683,320,000						
7	1	3	02.02				621,200,000						683,320,000						
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	412,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Tlogorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		5 Unit	453,200,000	Kecamatan Temanggung
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	209,200,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Tlogorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Pokmas / Ormas	230,120,000	Kecamatan Temanggung
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN														
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah														
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	2,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kebonsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		10 Paket	2,200,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10,428,100	Kab. Temanggung, Temanggung, Kebonsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		10 Paket	11,470,910	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	7,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kebonsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Paket	7,700,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	11,640,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kebonsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	9,900,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	5,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kebonsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	5,500,000	Kecamatan Temanggung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional					Daerah			
7	1	1	02.07					8,000,000						8,800,000				
7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			2 Unit	8,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kebonsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		2 Unit	8,800,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.08					79,670,400						87,637,440				
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	3,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kebonsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	3,300,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	9,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kebonsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	9,900,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					67,670,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup			74,437,440	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.09					18,000,000						23,800,000				
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			2 Unit	5,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kebonsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		2 Unit	5,500,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Unit	15,000,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			12 Unit	1,500,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kebonsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Unit	1,650,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			12 Unit	1,500,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kebonsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Unit	1,650,000	Kecamatan Temanggung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7	1	3					648,200,000						658,020,000				
7	1	3	02.02				648,200,000						658,020,000				
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			9 Unit	317,447,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kebonsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		9 Unit	294,191,700	Kecamatan Temanggung
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			12 Pokmas / Ormas	330,753,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kebonsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Pokmas / Ormas	363,828,300	Kecamatan Temanggung
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	1				KECAMATAN												
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						895,566,482					930,493,130	
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						137,366,482					151,473,130	
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						33,727,174					33,469,891	
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			10 Paket	2,500,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Manding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		10 Paket	2,750,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			10 Paket	12,827,174	Kab. Temanggung, Temanggung, Manding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		10 Paket	14,109,891	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	5,100,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Manding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Paket	5,610,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Laporan	8,300,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Manding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	5,500,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2 Laporan	5,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Manding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		2 Laporan	5,500,000	Kecamatan Temanggung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional					Daerah			
7	1	1	02.07					8,000,000					8,800,000					
7	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	3,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Manding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Unit	3,300,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Manding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Unit	5,500,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.08					76,139,308						83,753,239				
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Manding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	3,300,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	10,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Manding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	11,000,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	63,139,308	Kab. Temanggung, Temanggung, Manding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	69,453,239	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.09					19,500,000						25,450,000				
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	5,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Manding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		2 Unit	5,500,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Manding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Unit	15,000,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	2,500,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Manding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		6 Unit	2,750,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	2,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Manding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		4 Unit	2,200,000	Kecamatan Temanggung
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						758,200,000						779,020,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
7	1	3	02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						758,200,000					779,020,000					
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	423,889,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		0 Unit	411,277,900	Kecamatan Temanggung	
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				49 Pokmas / Ormas	334,311,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Manding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		49 Pokmas / Ormas	367,742,100	Kecamatan Temanggung	
7				UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1			KECAMATAN								945,261,200							784,946,320	
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								130,061,200							144,526,320	
7	1	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								37,498,488							38,707,337	
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	2,500,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Mungsen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		10 Paket	2,750,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	11,088,488	Kab. Temanggung, Temanggung, Mungsen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		10 Paket	12,197,337	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	6,600,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Mungsen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Paket	7,260,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12,310,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Mungsen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	11,000,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	5,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Mungsen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	5,500,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								77,562,712							85,318,983	
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Mungsen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	3,300,000	Kecamatan Temanggung	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	9,110,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Mungsen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	10,021,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	65,452,712	Kab. Temanggung, Temanggung, Mungsen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	71,997,983	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						15,000,000							20,500,000	
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2,600,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Mungsen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		2 Unit	2,860,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Mungsen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Unit	15,000,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	1,400,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Mungsen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Unit	1,540,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	1,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Mungsen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Unit	1,100,000	Kecamatan Temanggung
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						815,200,000							640,420,000	
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						815,200,000							640,420,000	
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	624,740,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Mungsen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Unit	434,214,000	Kecamatan Temanggung
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	190,460,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Mungsen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Pokmas / Ormas	206,206,000	Kecamatan Temanggung
7					UNSUR KEWILAYAHAN														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Nasional					Daerah		
7	1						827,243,811						773,230,000				
7	1	1					136,043,811						150,380,000				
7	1	1	02.06				26,943,811						26,370,000				
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	2,473,811	Kab. Temanggung, Temanggung, Purworejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 Paket	2,720,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	6,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Purworejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 Paket	6,600,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	5,500,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Purworejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 Paket	6,050,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	7,970,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Purworejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 Laporan	5,500,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Purworejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 Laporan	5,500,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						89,600,000					98,560,000	
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Purworejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 Laporan	3,300,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	10,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Purworejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 Laporan	11,000,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	76,600,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Purworejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 Laporan	84,260,000	Kecamatan Temanggung

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
7	1	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						19,500,000					25,450,000			
7	1	1	02.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	5,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Purworejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 Unit	5,500,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	1 Unit	15,000,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	2,500,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Purworejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 Unit	2,750,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	2,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Purworejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 Unit	2,200,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						691,200,000					622,850,000			
7	1	3	02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						691,200,000					622,850,000			
7	1	3	02.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	440,722,500	Kab. Temanggung, Temanggung, Purworejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	7 Unit	327,500,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	3	02.02	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	250,477,500	Kab. Temanggung, Temanggung, Purworejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 Pokmas / Ormas	295,350,000	Kecamatan Temanggung	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 1 1 02.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Unit	1,650,000	Kecamatan Temanggung
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						1,018,200,000							647,020,000	
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1,018,200,000							647,020,000	
7 1 3 02.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	740,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Unit	341,000,000	Kecamatan Temanggung
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						278,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					306,020,000	Kecamatan Temanggung
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 1	KECAMATAN														
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
7 1 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34,740,000							35,310,000	
7 1 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	2,500,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		10 Paket	2,750,000	Kecamatan Temanggung
7 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	8,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		10 Paket	8,800,000	Kecamatan Temanggung
7 1 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	6,600,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Paket	7,260,000	Kecamatan Temanggung
7 1 1 02.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12,640,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	11,000,000	Kecamatan Temanggung
7 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	5,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		2 Laporan	5,500,000	Kecamatan Temanggung
7 1 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						8,000,000							8,800,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2 Unit	8,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		2 Unit	8,800,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							78,076,000							85,883,600	
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	3,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	3,300,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	10,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	11,000,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	65,076,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	71,583,600	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							21,000,000							27,100,000	
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					2 Unit	5,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		2 Unit	5,500,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Unit	15,000,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					12 Unit	3,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Unit	3,300,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					12 Unit	3,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Unit	3,300,000	Kecamatan Temanggung
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							782,200,000							750,420,000	
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							782,200,000							750,420,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	441,425,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		7 Unit	375,567,500	Kecamatan Temanggung
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	340,775,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Pokmas / Ormas	374,852,500	Kecamatan Temanggung
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						953,612,200							923,206,420	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						155,412,200							171,686,420	
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						41,012,200							41,846,420	
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	2,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		10 Paket	2,200,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	15,042,200	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19		10 Paket	16,546,420	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	7,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Paket	7,700,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	11,970,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	9,900,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	5,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		2 Laporan	5,500,000	Kecamatan Temanggung

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
7	1	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						8,000,000						8,800,000		
7	1	1	02.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	8,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		2 Unit	8,800,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						83,900,000						92,290,000		
7	1	1	02.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	3,300,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	13,200,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	68,900,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	75,790,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						22,500,000						28,750,000		
7	1	1	02.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	10,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		2 Unit	11,000,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Unit	15,000,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	1,500,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Unit	1,650,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	1,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Unit	1,100,000	Kecamatan Temanggung	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
7	1	3					798,200,000						751,520,000						
7	1	3	02.02				798,200,000						751,520,000						
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	530,200,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 Unit	456,720,000	Kecamatan Temanggung				
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	268,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 Pokmas / Ormas	294,800,000	Kecamatan Temanggung				
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN									1,037,433,000			867,272,300		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												137,233,000		152,052,300
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												29,965,000		30,057,500
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2,225,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	10 Paket	2,447,500	Kecamatan Temanggung				
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	10 paket	8,500,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	10 paket	9,350,000	Kecamatan Temanggung				
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 Paket	6,600,000	Kecamatan Temanggung				
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8,240,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 Laporan	6,160,000	Kecamatan Temanggung				
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	5,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	2 Laporan	5,500,000	Kecamatan Temanggung				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
7	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						84,443,000					92,887,300			
7	1	1	02.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 Laporan	4,400,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	7,350,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 Laporan	8,085,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	73,093,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 Laporan	80,402,300	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						22,825,000					29,107,500			
7	1	1	02.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	6,825,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	2 Unit	7,507,500	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	1 Unit	15,000,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	3,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 Unit	3,300,000	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	3,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 Unit	3,300,000	Kecamatan Temanggung	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7	1	1	02.09					24,537,500						30,991,250		
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			9,922,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,914,750	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 Unit	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Unit	15,000,000	Kecamatan Temanggung
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2,307,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,538,250	Kecamatan Temanggung	
7	1	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2,307,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,538,250	Kecamatan Temanggung	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			880,300,000						630,300,000		
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			880,300,000						630,300,000		
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit	617,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Unit	367,700,000	Kecamatan Temanggung
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas / Ormas	262,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Pokmas / Ormas	262,600,000	Kecamatan Temanggung
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN			1,894,103,998						1,894,103,998		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,798,907,098						1,798,907,098		
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,606,078,458						1,606,078,458		
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		16 Orang/ bulan	1,606,078,458	Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		16 Orang /bulan	1,606,078,458	Kecamatan Tembarak
						Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan TPP ASN		12 Bulan						12 Bulan		
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5,872,000						5,872,000		
7	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		16 Paket	5,872,000	Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		16 Paket	5,872,000	Kecamatan Tembarak

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
7	1	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						53,658,000					53,658,000			
7	1	1	02.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,100,000	Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	1 Paket	4,100,000	Kecamatan Tembarak	
					Tersedianya Komponen Instalasi Listrik				12 Bulan						12 Bulan			
7	1	1	02.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,000,000	Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	1 Paket	15,000,000	Kecamatan Tembarak	
					Tersedianya Alat Tulis Kantor, Alat serta Bahan Kebersihan Kantor dan Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				12 Bulan						12 Bulan			
7	1	1	02.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8,750,000	Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	1 Paket	8,750,000	Kecamatan Tembarak	
					Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan				12 Bulan						12 Bulan			
7	1	1	02.06	8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	15,808,000	Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	12 Laporan	15,808,000	Kecamatan Tembarak	
					Terpenuhinya Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan						12 Bulan			
7	1	1	02.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Paket	10,000,000	Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	1 Paket	10,000,000	Kecamatan Tembarak	
					Terlaksananya Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				12 Bulan						12 Bulan			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
7	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						95,986,400					95,986,400			
7	1	1	02.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5,000,000	Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	12 Laporan	5,000,000	Kecamatan Tembarak	
					Tersedianya Jasa pengiriman Surat/Dokumen dan SPPD Dalam Daerah				12 Bulan						12 Bulan			
7	1	1	02.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	19,800,000	Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	12 Laporan	19,800,000	Kecamatan Tembarak	
					Terbayarnya Jasa Komunikasi dan Internet, Sumber Daya Air, dan Listrik				12 Bulan						12 Bulan			
7	1	1	02.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	71,186,400	Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	12 Laporan	71,186,400	Kecamatan Tembarak	
					Tersedianya Honor/Upah Tenaga Kebersihan dan Penjaga Malam				12 Bulan						12 Bulan			
7	1	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						37,312,240						37,312,240		
7	1	1	02.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	14,650,000	Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	9 Unit	14,650,000	Kecamatan Tembarak	
					Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/Operasional				12 Bulan						12 Bulan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					0 Unit	2,091,740	Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0 Unit	2,091,740	Kecamatan Tembarak
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					10 Unit									
						Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor					12 Bulan									
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	20,570,500	Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Unit	20,570,500	Kecamatan Tembarak
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							62,161,900							62,161,900	
7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							62,161,900							62,161,900	
7	1	2	02.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0 Laporan	62,161,900	Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0 Laporan	62,161,900	Kecamatan Tembarak
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					1 Laporan								1 Laporan	
						Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB					12 Bulan								12 Bulan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7	1	3					19,835,000						19,835,000		
7	1	3	02.01				19,835,000						19,835,000		
7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1 Laporan	19,835,000	Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Laporan	19,835,000	Kecamatan Tembarak
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan						0 Laporan		
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan						1 Laporan		
						Terlaksananya Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	12 Bulan						12 Bulan		
7	1	4					13,200,000						13,200,000		
7	1	4	02.01				13,200,000						13,200,000		
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	13,200,000	Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	13,200,000	Kecamatan Tembarak
						Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	12 Bulan						12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Nasional					Daerah		
7																	
7																	
7	1																
7	1	1															
7	1	1	02.02														
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN											
7	1	1	02.05														
7	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan											
7	1	1	02.06														
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan											
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan											
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan											
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu											

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	10,000,000	Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	10,000,000	Kecamatan Pringsurat
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							139,650,600							141,768,600	
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	7,170,600	Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	7,170,600	Kecamatan Pringsurat
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	21,600,000	Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	21,600,000	Kecamatan Pringsurat
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	110,880,000	Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	112,998,000	Kecamatan Pringsurat
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							36,951,600							24,951,600	
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					12 Unit	19,984,800	Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Unit	19,984,800	Kecamatan Pringsurat
7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					12 Unit	2,000,000	Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Unit	2,000,000	Kecamatan Pringsurat
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					0 Unit	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		0 Unit	0	Kecamatan Pringsurat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	2,966,800	Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Unit	2,966,800	Kecamatan Pringsurat
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						208,274,900							166,580,000	
7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						208,274,900							166,580,000	
7	1	2	02.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	208,274,900	Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	166,580,000	Kecamatan Pringsurat
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						16,780,000							35,755,000	
7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						16,780,000							35,755,000	
7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	16,780,000		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		0 Laporan	35,755,000	Kecamatan Pringsurat
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						13,200,000							13,200,000	
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						13,200,000							13,200,000	
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	13,200,000	Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	13,200,000	Kecamatan Pringsurat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,600,000	Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	4,970,000	Kecamatan Kaloran
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	20,000,000	Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	19,980,000	Kecamatan Kaloran
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	90,427,200	Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	90,427,200	Kecamatan Kaloran
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						62,695,500							28,449,000	
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya				10 Unit	19,000,000	Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		10 Unit	19,569,800	Kecamatan Kaloran
7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	4,000,000	Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Unit	3,444,800	Kecamatan Kaloran
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	39,695,500	Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		4 Unit	5,434,400	Kecamatan Kaloran
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						127,640,600							102,040,000	
7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						127,640,600							102,040,000	
7	1	2	02.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	127,640,600	Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	102,040,000	Kecamatan Kaloran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7	1	3					39,176,800							0		
7	1	3	02.01				39,176,800							0		
7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	39,176,800	Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0 Laporan	0	Kecamatan Kaloran
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 Laporan							12 Laporan		
7	1	4					13,200,000								13,200,000	
7	1	4	02.01				13,200,000								13,200,000	
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	13,200,000	Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0 Laporan	13,200,000	Kecamatan Kaloran
7																
7	1						3,983,076,361								4,119,336,091	
7	1	1					3,821,918,961								3,926,136,091	
7	1	1	02.02				3,121,536,091								3,121,536,091	
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3,121,536,091		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup			3,121,536,091	Kecamatan Parakan
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
7	1	1	02.05				7,340,000								10,000,000	
7	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	7,340,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		20 Paket	10,000,000	Kecamatan Parakan
7	1	1	02.06				49,007,870								83,000,000	
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup			5,000,000	Kecamatan Parakan
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup			15,000,000	Kecamatan Parakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Nasional					Daerah		
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan					5,007,870	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup			8,000,000	Kecamatan Parakan
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	0 Laporan		25,000,000	Kecamatan Parakan
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup			30,000,000	Kecamatan Parakan
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					147,035,000						161,600,000	
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup			10,000,000	Kecamatan Parakan
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					23,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup			26,600,000	Kecamatan Parakan
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					119,535,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup			125,000,000	Kecamatan Parakan
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					497,000,000						550,000,000	
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					26,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup			40,000,000	Kecamatan Parakan
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	0 Unit		500,000,000	Kecamatan Parakan
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup			10,000,000	Kecamatan Parakan
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					129,287,400						150,000,000	
7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					129,287,400						150,000,000	
7	1	2	02.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					129,287,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup			150,000,000	Kecamatan Parakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7	1	3					18,670,000						30,000,000		
7	1	3	02.01				18,670,000						30,000,000		
7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	18,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	0 Laporan	30,000,000	Kecamatan Parakan
7	1	4					13,200,000						13,200,000		
7	1	4	02.01				13,200,000						13,200,000		
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			13,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		13,200,000	Kecamatan Parakan
7															
7															
7	1						1,173,576,000						1,247,100,000		
7	1	1					146,376,000						160,600,000		
7	1	1	02.05				2,256,000						3,000,000		
7	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	2,256,000		Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	6 Paket	3,000,000	Kecamatan Parakan
7	1	1	02.06				31,000,000						34,100,000		
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket	3,000,000		Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	100 Paket	3,100,000	Kecamatan Parakan
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	7,500,000		Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman			100 Paket	8,500,000	Kecamatan Parakan
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	6,500,000		Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman			100 Paket	7,000,000	Kecamatan Parakan
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8,000,000		Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	12 Laporan	9,000,000	Kecamatan Parakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100 Laporan	6,000,000	Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		100 Laporan	6,500,000	Kecamatan Parakan
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3,000,000							3,500,000	
7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 Unit	3,000,000	Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Unit	3,500,000	Kecamatan Parakan
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							86,800,000							94,500,000	
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					100 Laporan	5,000,000	Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		100 Laporan	5,500,000	Kecamatan Parakan
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					100 Laporan	12,000,000	Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		100 Laporan	13,200,000	Kecamatan Parakan
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					100 Laporan	69,800,000	Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		100 Laporan	75,800,000	Kecamatan Parakan
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							23,320,000							25,500,000	
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					3 Unit	5,000,000	Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		3 Unit	5,500,000	Kecamatan Parakan
7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					15 Unit	2,500,000	Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		15 Unit	3,000,000	Kecamatan Parakan
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	15,820,000	Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		2 Unit	17,000,000	Kecamatan Parakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7	1	3					1,027,200,000						1,086,500,000		
7	1	3	02.02				1,027,200,000						1,086,500,000		
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	567,751,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	10 Unit	581,000,000	Kecamatan Parakan
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	459,449,000	Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	5 Pokmas / Ormas	505,500,000	Kecamatan Parakan
7					UNSUR KEWILAYAHAN										
7	1				KECAMATAN										
7	1	1					973,186,508						978,147,200		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
7	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 Paket	2,936,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	8 Paket	4,000,000	Kecamatan Parakan
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,000,000	Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Wetan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan			1 Paket	2,100,000	Kecamatan Parakan
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,000,000	Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Wetan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan			1 Paket	10,500,000	Kecamatan Parakan
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7,500,000	Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Wetan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan			2 Paket	7,875,000	Kecamatan Parakan
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15,000,000	Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Wetan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	12 Laporan	20,000,000	Kecamatan Parakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Nasional					Daerah		
7	1	1	02.08					63,783,500					67,008,000				
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6,000,000	Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Wetan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		12 Laporan	6,300,000	Kecamatan Parakan
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	6,500,000	Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Wetan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 Laporan	7,000,000	Kecamatan Parakan
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	51,283,500	Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Wetan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 Laporan	53,708,000	Kecamatan Parakan
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						55,763,008					59,250,000	
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	5,000,000	Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Wetan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	3 Unit	5,250,000	Kecamatan Parakan
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	47,000,000	Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Wetan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	3 Unit	50,000,000	Kecamatan Parakan
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	3,763,008	Kab. Temanggung, Semuak Kecamatan, Parakan Wetan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	9 Unit	4,000,000	Kecamatan Parakan
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						817,204,000					807,414,200	
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						817,204,000					807,414,200	
7	1	3	02.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						3,000,000	Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Wetan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		5,000,000	Kecamatan Parakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	447,114,000	Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Wetan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan				4 Unit	416,969,700	Kecamatan Parakan
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				13 Pokmas / Ormas	367,090,000	Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Wetan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan				13 Pokmas / Ormas	385,444,500	Kecamatan Parakan
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						2,036,251,947							2,505,421,000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,839,852,547							2,302,221,000	
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,646,354,547							2,056,621,000	
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1,646,354,547	Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			14 Orang/bulan	2,056,621,000	Kecamatan Bulu
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						6,239,000							6,600,000	
7	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				17 Paket	6,239,000	Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			17 Paket	6,600,000	Kecamatan Bulu
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						50,918,900							68,000,000	
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	2,600,000	Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			8 Paket	5,000,000	Kecamatan Bulu
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	11,447,900	Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			11 Paket	9,000,000	Kecamatan Bulu
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	6,500,000	Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)			12 Paket	7,000,000	Kecamatan Bulu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	20,371,000	Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	22,000,000	Kecamatan Bulu
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	10,000,000	Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		5 Laporan	25,000,000	Kecamatan Bulu
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						98,029,100							117,000,000	
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5,000,000	Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	10,000,000	Kecamatan Bulu
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	21,000,000	Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	30,000,000	Kecamatan Bulu
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	72,029,100	Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0 Laporan	77,000,000	Kecamatan Bulu
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						38,311,000							54,000,000	
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	21,000,000	Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Unit	25,000,000	Kecamatan Bulu
7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	2,900,000	Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		11 Unit	4,000,000	Kecamatan Bulu
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	14,411,000	Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Unit	25,000,000	Kecamatan Bulu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7	1	2					159,349,400						160,000,000		
7	1	2	02.04				159,349,400						160,000,000		
7	1	2	02.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	19 Laporan	159,349,400	Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		19 Laporan	160,000,000	Kecamatan Bulu
7	1	3					23,850,000						30,000,000		
7	1	3	02.01				23,850,000						30,000,000		
7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	23,850,000	Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		3 Laporan	30,000,000	Kecamatan Bulu
7	1	4					13,200,000						13,200,000		
7	1	4	02.01				13,200,000						13,200,000		
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	13,200,000	Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	13,200,000	Kecamatan Bulu
7															
7															
7	1						2,184,498,012						184,546,500		
7	1	1					2,008,751,212						165,266,500		
7	1	1	02.02				1,836,984,712						0		
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15 orang	1,836,984,712	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		15 orang	0	Kecamatan Kedu
7	1	1	02.05				6,239,000						6,239,000		
7	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	17 Paket	6,239,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		17 Paket	6,239,000	Kecamatan Kedu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
7	1	1	02.06											41,721,000						
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		4 Paket	3,250,000	Kecamatan Kedu	
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						9,150,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup			9,150,000	Kecamatan Kedu	
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						6,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup			6,500,000	Kecamatan Kedu	
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	11,171,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		0 Laporan	11,171,000	Kecamatan Kedu	
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						11,650,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup			11,650,000	Kecamatan Kedu	
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						86,695,100							80,195,100		
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						6,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup			0	0	Kecamatan Kedu
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	10,740,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		0 Laporan	10,740,000	Kecamatan Kedu	
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	69,455,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		4 Laporan	69,455,100	Kecamatan Kedu	
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						37,111,400							37,111,400		
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						21,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup			21,750,000	Kecamatan Kedu	
7	1	1	02.09	5	Pemeliharaan Mebel						1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup			1,000,000	Kecamatan Kedu	
7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1,425,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1,425,800	Kecamatan Kedu	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif										
										Nasional					Daerah								
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					0 Unit	12,935,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		0 Unit	12,935,600	Kecamatan Kedu			
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															0			
7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																0		
7	1	2	02.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					12 Laporan	143,266,800		Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan		0	Kecamatan Kedu	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					12 Laporan												
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																19,280,000		
7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																19,280,000		
7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						19,280,000		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup					19,280,000	Kecamatan Kedu	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																0		
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																0		
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					4 Laporan	13,200,000		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		4 Laporan		0	Kecamatan Kedu	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	1				KECAMATAN							2,239,984,444										2,234,677,444	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2,042,195,144										2,034,488,144	
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,866,131,844										1,866,131,844	
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							1,866,131,844		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)						1,866,131,844	Kecamatan Kandangan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
													Nasional					Daerah	
7	1	1	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						7,707,000						0			
7	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	7,707,000	Kab. Temanggung, Kandang an, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Paket	0	Kecamatan Kandangan
7	1	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							33,078,800						33,078,800		
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,000,000	Kecamatan Kandangan	
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						8,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		8,200,000	Kecamatan Kandangan	
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						3,360,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		3,360,800	Kecamatan Kandangan	
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	15,316,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Laporan	15,316,000	Kecamatan Kandangan
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						5,202,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		5,202,000	Kecamatan Kandangan	
7	1	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							2,931,660						2,931,660		
7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2,931,660		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		2,931,660	Kecamatan Kandangan	
7	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							94,180,400						94,180,400		
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		6,000,000	Kecamatan Kandangan	
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		20,000,000	Kecamatan Kandangan	
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						68,180,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		68,180,400	Kecamatan Kandangan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						128,004,100						128,004,100		
7 1 2 02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						128,004,100						128,004,100		
7 1 2 02.04 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						128,004,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		128,004,100	Kecamatan Candirotro	
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						16,780,000						16,780,000		
7 1 3 02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						16,780,000						16,780,000		
7 1 3 02.01 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	16,780,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	12 Laporan	16,780,000	Kecamatan Candirotro	
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						13,200,000						13,200,000		
7 1 4 02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						13,200,000						13,200,000		
7 1 4 02.01 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						13,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		13,200,000	Kecamatan Candirotro	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 1	KECAMATAN						2,823,267,926						3,070,514,966		
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,653,561,726						2,877,314,966		
7 1 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,442,314,966						2,442,314,966		
7 1 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2,442,314,966		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		2,442,314,966	Kecamatan Ngadirejo	
7 1 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						6,606,000						0		
7 1 1 02.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				18 Paket	6,606,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	18 Paket	0	Kecamatan Ngadirejo	
7 1 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						46,173,000						73,000,000		
7 1 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	10 Paket	5,000,000	Kecamatan Ngadirejo	
7 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	7,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	10 Paket	9,000,000	Kecamatan Ngadirejo	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					10 Paket	6,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		10 Paket	7,000,000	Kecamatan Ngadirejo
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	19,623,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	25,000,000	Kecamatan Ngadirejo
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					4 Laporan	10,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		4 Laporan	27,000,000	Kecamatan Ngadirejo
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							99,923,500							123,000,000	
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	10,000,000	Kecamatan Ngadirejo
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	22,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	33,000,000	Kecamatan Ngadirejo
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	72,923,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	80,000,000	Kecamatan Ngadirejo
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							58,544,260							239,000,000	
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					8 Unit	22,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		8 Unit	25,000,000	Kecamatan Ngadirejo
7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					2 Unit	3,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		2 Unit	4,000,000	Kecamatan Ngadirejo
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Unit	200,000,000	Kecamatan Ngadirejo
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Unit	5,000,000	Kecamatan Ngadirejo
7	1	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	1,544,260		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Unit	5,000,000	Kecamatan Ngadirejo
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							134,056,200							150,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 1 2 02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						134,056,200						150,000,000		
7 1 2 02.04 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				19 Laporan	134,056,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		19 Laporan	150,000,000	Kecamatan Ngadirejo
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						22,450,000						30,000,000		
7 1 3 02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						22,450,000						30,000,000		
7 1 3 02.01 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	22,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		3 Laporan	30,000,000	Kecamatan Ngadirejo
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						13,200,000						13,200,000		
7 1 4 02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						13,200,000						13,200,000		
7 1 4 02.01 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	13,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	13,200,000	Kecamatan Ngadirejo
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 1	KECAMATAN						978,591,800						862,089,625		
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						110,391,800						118,269,625		
7 1 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2,202,000						2,400,000		
7 1 1 02.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	2,202,000	Kab. Temanggung, Ngadirejo, Manggon g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	2,400,000	Kecamatan Ngadirejo
7 1 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						22,383,800						29,927,780		
7 1 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,595,000	Kab. Temanggung, Ngadirejo, Manggon g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	3,954,500	Kecamatan Ngadirejo
7 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,798,000	Kab. Temanggung, Ngadirejo, Manggon g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	12,977,800	Kecamatan Ngadirejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5,086,800	Kab. Temanggung, Ngadirejo, Manggong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Paket	5,595,480	Kecamatan Ngadirejo
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	6,904,000	Kab. Temanggung, Ngadirejo, Manggong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	7,400,000	Kecamatan Ngadirejo
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						68,950,000							70,345,000	
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4,790,000	Kab. Temanggung, Ngadirejo, Manggong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	5,269,000	Kecamatan Ngadirejo
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	7,080,000	Kab. Temanggung, Ngadirejo, Manggong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	7,788,000	Kecamatan Ngadirejo
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	57,080,000	Kab. Temanggung, Ngadirejo, Manggong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	57,288,000	Kecamatan Ngadirejo
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						16,856,000							15,596,845	
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	3,309,600	Kab. Temanggung, Ngadirejo, Manggong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Unit	3,640,560	Kecamatan Ngadirejo
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000	Kab. Temanggung, Ngadirejo, Manggong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	8,055,245	Kecamatan Ngadirejo
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	3,546,400	Kab. Temanggung, Ngadirejo, Manggong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9 Unit	3,901,040	Kecamatan Ngadirejo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						868,200,000							743,820,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
7	1	3	02.02					868,200,000						743,820,000				
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	592,000,000	Kab. Temanggung, Ngadirejo, Manggong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 Unit	440,000,000	Kecamatan Ngadirejo
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				13 Pokmas / Ormas	276,200,000	Kab. Temanggung, Ngadirejo, Manggong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			13 Pokmas / Ormas	303,820,000	Kecamatan Ngadirejo
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN						2,226,607,837					2,592,423,201		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,093,777,937					2,457,035,311		
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,864,322,337						2,050,754,571	
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	1,864,322,337		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		17 Orang/bulan	2,050,754,571	Kecamatan Jumo
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						7,707,000						7,707,000	
7	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				21 Paket	7,707,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		21 Paket	7,707,000	Kecamatan Jumo
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						46,075,000						48,775,000	
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		7 Paket	4,400,000	Kecamatan Jumo
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Paket	7,700,000	Kecamatan Jumo
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Paket	6,600,000	Kecamatan Jumo
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	19,075,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	19,075,000	Kecamatan Jumo
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		3 Laporan	11,000,000	Kecamatan Jumo
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						119,968,200						121,768,200	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6,972,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	6,972,800	Kecamatan Jumo
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	18,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	19,800,000	Kecamatan Jumo
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	94,995,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	94,995,400	Kecamatan Jumo
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						55,705,400							58,030,540	
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	20,251,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		10 Unit	22,276,540	Kecamatan Jumo
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	32,454,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Unit	32,454,000	Kecamatan Jumo
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		7 Unit	3,300,000	Kecamatan Jumo
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						103,794,900							114,174,390	
7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						103,794,900							114,174,390	
7	1	2	02.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7 Laporan	103,794,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		7 Laporan	114,174,390	Kecamatan Jumo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7	1	3					15,835,000						6,693,500		
7	1	3	02.01				15,835,000						6,693,500		
7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	15,835,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		0 Laporan	6,693,500	Kecamatan Jumo
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan						12 Laporan		
7	1	4					13,200,000						14,520,000		
7	1	4	02.01				13,200,000						14,520,000		
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	13,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	14,520,000	Kecamatan Jumo
7															
7	1						2,079,900,886						2,094,267,570		
7	1	1					1,949,309,886						1,954,432,570		
7	1	1	02.02				1,759,432,570						1,759,432,570		
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	1,759,432,570		Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kelurahan	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	ASN di lingkungan Kantor Kecamatan Wonoboyo	16 Orang/bulan	1,759,432,570	Kecamatan Wonoboyo
7	1	1	02.05				5,872,000						0		
7	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	16 Paket	5,872,000		Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kelurahan	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	ASN dilingkungan Kantor Kecamatan Wonoboyo	16 Paket	0	Kecamatan Wonoboyo

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
													Nasional					Daerah	
7	1	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						44,340,700					49,000,000				
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	ASN dilingkungan kantor Kecamatan Wonoboyo dan masyarakat Kecamatan Wonoboyo	12 Paket	3,000,000	Kecamatan Wonoboyo
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	ASN dilingkungan kantor Kecamatan Wonoboyo dan masyarakat Kecamatan Wonoboyo	12 Paket	12,000,000	Kecamatan Wonoboyo
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan				12 Paket	2,959,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	ASN dilingkungan kantor Kecamatan Wonoboyo dan masyarakat Kecamatan Wonoboyo	12 Paket	4,000,000	Kecamatan Wonoboyo
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	13,881,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	ASN dilingkungan kantor Kecamatan Wonoboyo dan masyarakat Kecamatan Wonoboyo	12 Laporan	10,000,000	Kecamatan Wonoboyo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	15,000,000	Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	ASN dilingkungan kantor Kecamatan Wonoboyo dan masyarakat Kecamatan Wonoboyo	12 Laporan	20,000,000	Kecamatan Wonoboyo
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							77,119,616						78,000,000	
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	9,517,616	Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	ASN dilingkungan Kantor Kecamatan Wonoboyo dan Masyarakat 13 Desa di Kecamatan Wonoboyo	12 Laporan	10,000,000	Kecamatan Wonoboyo
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	67,602,000	Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	ASN dilingkungan Kantor Kecamatan Wonoboyo dan Masyarakat 13 Desa di Kecamatan Wonoboyo	12 Laporan	68,000,000	Kecamatan Wonoboyo
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							62,545,000						68,000,000	
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					10 Unit	36,000,000	Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	ASN di lingkungan Kantor Kecamatan Wonoboyo dan warga masyarakat 13 Desa di kecamatan Wonoboyo	10 Unit	45,000,000	Kecamatan Wonoboyo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	19,945,000	Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	ASN di lingkungan Kantor Kecamatan Wonoboyo dan warga masyarakat 13 Desa di kecamatan Wonoboyo	1 Unit	15,000,000	Kecamatan Wonoboyo
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	6,600,000	Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	ASN di lingkungan Kantor Kecamatan Wonoboyo dan warga masyarakat 13 Desa di kecamatan Wonoboyo	12 Unit	8,000,000	Kecamatan Wonoboyo
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						85,556,000						90,000,000	
7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						85,556,000						90,000,000	
7	1	2	02.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	85,556,000	Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	Kepala Desa dan Perangkat Desa di 13 se-Kecamatan Wonoboyo	12 Laporan	90,000,000	Kecamatan Wonoboyo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						31,835,000						31,835,000	
7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						31,835,000						31,835,000	
7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	31,835,000	Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	31,835,000	Kecamatan Wonoboyo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7	1	4					13,200,000						18,000,000		
7	1	4	02.01				13,200,000						18,000,000		
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	13,200,000	Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	Masyarakat 13 Desa se-Kecamatan Wonoboyo	12 Laporan	18,000,000	Kecamatan Wonoboyo
7															
7															
7	1						2,896,966,988						3,471,540,101		
7	1	1					2,704,649,188						3,240,758,741		
7	1	1	02.02				2,505,835,091						3,007,002,109		
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2,505,835,091		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		3,007,002,109	Kecamatan Kranggan	
7	1	1	02.05				9,175,000						11,010,000		
7	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	9,175,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		11,010,000	Kecamatan Kranggan	
7	1	1	02.06				46,103,097						50,503,432		
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		3,600,000	Kecamatan Kranggan	
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12,000,000	Kecamatan Kranggan	
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9,543,097		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		11,451,716	Kecamatan Kranggan	
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	13,560,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		11,451,716	Kecamatan Kranggan	
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12,000,000	Kecamatan Kranggan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional					Daerah			
7	1						1,542,700,000						1,698,470,000					
7	1	1					290,500,000						321,050,000					
7	1	1	02.06				18,566,000						20,422,600					
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,000,000	Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Paket	2,200,000	Kecamatan Kranggan
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,000,000	Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Paket	4,400,000	Kecamatan Kranggan
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3,566,000	Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Paket	3,922,600	Kecamatan Kranggan
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4,000,000	Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Laporan	4,400,000	Kecamatan Kranggan
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	5,000,000	Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Laporan	5,500,000	Kecamatan Kranggan
7	1	1	02.08				102,934,000										113,227,400	
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	10,000,000	Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Laporan	11,000,000	Kecamatan Kranggan
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	92,934,000	Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Laporan	102,227,400	Kecamatan Kranggan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
7	1	1	02.09					169,000,000						187,400,000		
7	1	1	02.09	2				4,000,000	Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		2 Unit	4,400,000	Kecamatan Kranggan
7	1	1	02.09	9				15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		2 Unit	18,000,000	Kecamatan Kranggan
7	1	1	02.09	11				150,000,000	Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Unit	165,000,000	Kecamatan Kranggan
7	1	3						1,252,200,000						1,377,420,000		
7	1	3	02.02					1,046,800,000						1,151,480,000		
7	1	3	02.02	1				3,000,000	Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup			3,300,000	Kecamatan Kranggan
7	1	3	02.02	2				776,300,000	Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		11 Unit	853,930,000	Kecamatan Kranggan
7	1	3	02.02	3				267,500,000	Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		18 Pokmas / Ormas	294,250,000	Kecamatan Kranggan
7	1	3	02.03					205,400,000						225,940,000		
7	1	3	02.03	1				205,400,000	Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup			225,940,000	Kecamatan Kranggan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	9,300,000	Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	15,000,000	Kecamatan Bejen
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							40,000,000							40,000,000	
7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					4 Unit	40,000,000	Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		4 Unit	40,000,000	Kecamatan Bejen
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							128,266,000							131,000,000	
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	5,000,000	Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	6,000,000	Kecamatan Bejen
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	23,400,000	Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	25,000,000	Kecamatan Bejen
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	99,866,000	Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	100,000,000	Kecamatan Bejen
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							163,277,000							168,677,000	
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					9 Unit	26,600,000	Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		9 Unit	32,000,000	Kecamatan Bejen
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	136,677,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1 Unit	136,677,000	Kecamatan Bejen

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
													Nasional					Daerah	
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						100,550,600						110,000,000			
7	1	2	02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						100,550,600							110,000,000		
7	1	2	02.04	3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					12 Laporan	100,550,600	Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	110,000,000	Kecamatan Bejen
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						21,280,000							21,280,000		
7	1	3	02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						21,280,000							21,280,000		
7	1	3	02.01	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						6,280,000		Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		6,280,000	Kecamatan Bejen	
7	1	3	02.01	3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					0 Laporan	15,000,000	Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0 Laporan	15,000,000	Kecamatan Bejen
7	1	3	02.01	3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					12 Laporan							12 Laporan		
7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						13,200,000							13,200,000		
7	1	4	02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						13,200,000							13,200,000		
7	1	4	02.01	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	13,200,000	Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	13,200,000	Kecamatan Bejen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				0 Laporan							0 Laporan		
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							3 Laporan	10,000,000	Kecamatan Kledung
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									123,771,700	
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							12 Laporan	5,000,000	Kecamatan Kledung
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							12 Laporan	22,200,000	Kecamatan Kledung
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							12 Laporan	96,571,700	Kecamatan Kledung
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									55,694,300	
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							7 Unit	28,000,000	Kecamatan Kledung
7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							2 Unit	2,000,000	Kecamatan Kledung
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							2 Unit	23,694,300	Kecamatan Kledung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	2,000,000	Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Unit	2,000,000	Kecamatan Kledung
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						82,814,900							82,814,900	
7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						82,814,900							82,814,900	
7	1	2	02.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						82,814,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					82,814,900	Kecamatan Kledung
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						15,835,000							15,835,000	
7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						15,835,000							15,835,000	
7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	15,835,000	Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	15,835,000	Kecamatan Kledung
						Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPDP Di Kecamatan, Pembinaan Lomba Desa,, Pembinaan Lembaga Desa, Pendampingan Desa Binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)				13 Desa							13 Desa		
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						13,200,000							13,200,000	
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						13,200,000							13,200,000	
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	13,200,000	Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	13,200,000	Kecamatan Kledung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan							12 Laporan			
		Tersediannya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				12 Bulan							12 Bulan			
7	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			84,942,400							90,000,000		
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	19,000,000	Kab. Temanggung, Bansari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0 Laporan	20,000,000	Kecamatan Bansari
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	65,942,400	Kab. Temanggung, Bansari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	70,000,000	Kecamatan Bansari
					Tersediannya jasa pelayanan umum kantor		12 Bulan						12 Bulan			
7	1	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			125,000,000							100,000,000		
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	22,000,000	Kab. Temanggung, Bansari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		6 Unit	25,000,000	Kecamatan Bansari
					Tersediannya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan		12 Bulan						12 Bulan			
7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	3,000,000	Kab. Temanggung, Bansari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		2 Unit	5,000,000	Kecamatan Bansari
					Tersediannya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor dengan baik		12 Bulan						12 Bulan			
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	100,000,000	Kab. Temanggung, Bansari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0 Unit	70,000,000	Kecamatan Bansari
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit						1 Unit			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
		Tersedianya Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik				12 Bulan							12 Bulan			
7	1	2					44,808,700							50,000,000		
7	1	2	02.04				44,808,700							50,000,000		
7	1	2	02.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								12 Laporan	50,000,000	Kecamatan Bansari
7	1	3					15,835,000							30,000,000		
7	1	3	02.01				15,835,000							30,000,000		
7	1	3	02.01	3	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								12 Laporan	30,000,000	Kecamatan Bansari
						Jumlah laporan Peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)								13 Desa		
7	1	4					13,200,000							13,200,000		
7	1	4	02.01				13,200,000							13,200,000		
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								12 Laporan	13,200,000	Kecamatan Bansari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					3 Laporan	10,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Laporan	10,000,000	Kecamatan Tlogomulyo
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							16,570,000						16,570,000		
7	1	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					12 Unit	16,570,000	Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup			12 Unit	16,570,000	Kecamatan Tlogomulyo
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							96,920,000						96,920,000		
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	5,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	5,000,000	Kecamatan Tlogomulyo
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	7,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	7,200,000	Kecamatan Tlogomulyo
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	84,720,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	84,720,000	Kecamatan Tlogomulyo
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							25,000,000						25,000,000		
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					7 Unit	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7 Unit	20,000,000	Kecamatan Tlogomulyo
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	5,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Unit	5,000,000	Kecamatan Tlogomulyo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan yg dilimpahkan.	bulan		bulan	12 bulan	55,892,600						12 bulan	55,892,600	
7 1 2 02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yg terkait dengan kewenangan lain yg dilimpahkan.	bulan		bulan	12 bulan	55,892,600						12 bulan	55,892,600	
7 1 2 02.04 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	55,892,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	55,892,600	Kecamatan Tlogomulyo
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						18,023,000							18,023,000	
7 1 3 02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						18,023,000							18,023,000	
7 1 3 02.01 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	18,023,000	Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	18,023,000	Kecamatan Tlogomulyo
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						13,200,000							13,200,000	
7 1 4 02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						13,200,000							13,200,000	
7 1 4 02.01 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	13,200,000	Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	13,200,000	Kecamatan Tlogomulyo
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 1	KECAMATAN														
7 1 1							2,447,760,347							2,917,319,936	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,355,685,847							2,806,830,536	
7 1 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,101,263,350							2,521,516,020	
7 1 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2,101,263,350		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2,521,516,020	Kecamatan Selopampang
7 1 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						7,340,000							8,808,000	
7 1 1 02.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	7,340,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		20 Paket	8,808,000	Kecamatan Selopampang
7 1 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						57,252,500							59,991,000	
7 1 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						4,999,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup			5,999,400	Kecamatan Selopampang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									12,000,000	Kecamatan Selopampang	
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									12,000,000	Kecamatan Selopampang	
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	22,253,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	1 Laporan	17,991,600	Kecamatan Selopampang
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	0 Laporan	12,000,000	Kecamatan Selopampang
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						52,500,000				63,000,000	
7	1	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	52,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	1 Unit	63,000,000	Kecamatan Selopampang
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						95,216,700				114,276,480	
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		4,800,000	Kecamatan Selopampang
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		25,200,000	Kecamatan Selopampang
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						70,216,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		84,276,480	Kecamatan Selopampang
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						42,113,297				39,239,036	
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						21,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		29,995,560	Kecamatan Selopampang
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	1 Unit	2,987,520	Kecamatan Selopampang
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5,213,297	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		6,255,956	Kecamatan Selopampang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7	1	2					56,949,500						68,339,400		
7	1	2	02.04				56,949,500						68,339,400		
7	1	2	02.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		56,949,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		68,339,400	Kecamatan Selopampang	
7	1	3					21,925,000						26,310,000		
7	1	3	02.01				21,925,000						26,310,000		
7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	21,925,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		0 Laporan	26,310,000	Kecamatan Selopampang
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan						1 Laporan		
7	1	4					13,200,000						15,840,000		
7	1	4	02.01				13,200,000						15,840,000		
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			13,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		15,840,000	Kecamatan Selopampang	
7															
7	1						2,159,064,162						2,185,129,322		
7	1	1					1,930,564,962						1,943,978,202		
7	1	1	02.02				1,731,840,562						1,731,840,562		
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1,731,840,562	Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		1,731,840,562	Kecamatan Gemawang	
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)				
											2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif								
										Nasional					Daerah						
7	1	1	02.05					5,872,000						0							
7	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	5,872,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0 Paket		0	Kecamatan Gemawang	
7	1	1	02.06					57,093,200											62,802,520		
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	4,000,000		Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		7 Paket		4,400,000	Kecamatan Gemawang
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	15,998,500		Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Paket		17,598,350	Kecamatan Gemawang
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	4,234,700		Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Paket		4,658,170	Kecamatan Gemawang
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	22,887,000		Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan		25,175,700	Kecamatan Gemawang
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	9,973,000		Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		3 Laporan		10,970,300	Kecamatan Gemawang
7	1	1	02.08					90,280,400											99,308,440		
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5,000,000		Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan		5,500,000	Kecamatan Gemawang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	16,800,000	Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	18,480,000	Kecamatan Gemawang
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	68,480,400	Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	75,328,440	Kecamatan Gemawang
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						45,478,800							50,026,680	
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit 7 Unit	15,000,000	Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		0 Unit 7 Unit	16,500,000	Kecamatan Gemawang
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	28,500,000	Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		2 Unit	31,350,000	Kecamatan Gemawang
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1,978,800	Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		3 Unit	2,176,680	Kecamatan Gemawang
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						113,319,200							124,651,120	
7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						113,319,200							124,651,120	
7	1	2	02.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7 Laporan	113,319,200	Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		7 Laporan	124,651,120	Kecamatan Gemawang
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						101,980,000							101,980,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
											Nasional	Daerah								
7	1	3	02.01						101,980,000									101,980,000		
7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	101,980,000	Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	101,980,000	Kecamatan Gemawang	
						Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD Di Kecamatan, Pembinaan Lomba Desa,, Pembinaan Lembaga Desa, Pendampingan Desa Binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)				12 Desa										
7	1	4							13,200,000										14,520,000	
7	1	4	02.01						13,200,000										14,520,000	
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	13,200,000	Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	14,520,000	Kecamatan Gemawang	
7																				
7	1								1,898,879,213										2,470,434,701	
7	1	1							1,766,977,013										2,328,532,501	
7	1	1	02.02						1,537,935,469										1,537,935,469	
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1,537,935,469			Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						1,537,935,469	Kecamatan Tretep

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	71,160,000	Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	95,779,144	Kecamatan Tretep
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						67,999,900							154,828,200	
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	34,999,900	Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 Unit	51,609,400	Kecamatan Tretep
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	24,500,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 unit	51,609,400	Kecamatan Tretep
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	8,500,000	Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	51,609,400	Kecamatan Tretep
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						94,757,200							94,757,200	
7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						94,757,200							94,757,200	
7	1	2	02.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0 Laporan	94,757,200	Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan	94,757,200	Kecamatan Tretep
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7 Laporan							7 Laporan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7	1	3					13,945,000						13,945,000		
7	1	3	02.01				13,945,000						13,945,000		
7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	0 Dokumen	13,945,000	Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Dokumen	13,945,000	Kecamatan Tretep
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan						0 Laporan		
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan						1 Laporan		
7	1	4					13,200,000						13,200,000		
7	1	4	02.01				13,200,000						13,200,000		
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	13,200,000	Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	13,200,000	Kecamatan Tretep
						Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan						0 Laporan		
7	1	6					10,000,000						20,000,000		
7	1	6	02.01				10,000,000						20,000,000		
7	1	6	02.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	5,000,000	Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Tretep
7	1	6	02.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	5,000,000	Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Tretep

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
8	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	133,636,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Laporan	146,999,600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														190,700,000	
8	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					12 Unit	32,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Unit	35,200,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					12 Unit	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Unit	150,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					12 Unit	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Unit	5,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	2			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan														48,381,100	
8	1	2	02.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan														48,381,100	
8	1	2	02.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun					12 Dokumen	48,381,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)		12 Dokumen	48,381,100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
8	1	3					1,736,687,850							1,736,687,850		
8	1	3	02.01				1,736,687,850							1,736,687,850		
8	1	3	02.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		0 Dokumen	1,736,687,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	0 Dokumen	1,736,687,850	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4					100,000,000							110,000,000		
8	1	4	02.01				100,000,000							110,000,000		
8	1	4	02.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		25 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	25 Laporan	110,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5					836,597,640							850,000,000		
8	1	5	02.01				836,597,640							850,000,000		
8	1	5	02.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		120 Orang	836,597,640		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (good governance)	120 Orang	850,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG



TENTREM MAREM GANDEM



website

bappeda.temanggungkab.go.id



email

bappeda@temanggungkab.go.id



instagram

[@bappedatemanggungkab](https://www.instagram.com/bappedatemanggungkab)



whatsapp

62896 1635 2800



youtube

BAPPEDA TEMANGGUNG